

(1960)

spec. no. (I)



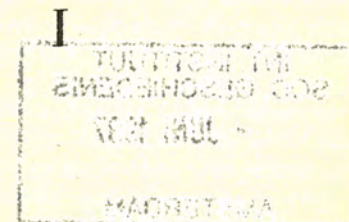
BINTANG MERAH SPESIAL KONGRES NASIONAL KE-VI PKI

DOKUMEN-DOKUMEN
KONGRES NASIONAL
KE-VI
PARTAI KOMUNIS INDONESIA

DJAKARTA

7-14 September 1959

Joop Morrië
Amsterdam



BINTANG MERAH NOMOR SPESIAL

INT. INSTITUUT
SOC. GESCHIEDENIS
- JUNI 1997

AMSTERDAM

10778985



Jajasan "Pembaruan"
Djakarta 1960

SEKEDAR PENGANTAR

DISEPANDJANG sedjarah PKI jang hampir 40 tahun usianja, Kongres Nasionalnja jang ke-VI jang berlangsung dari tg. 7 sampai tg. 14 September 1959 adalah Kongresnja jang terbesar.

Redaksi „Bintang Merah”, jang sudah selalu menerbitkan nomor-nomor istimewa berisi material lengkap Sidang² Pleno CC PKI, Konfernas² PKI dan Kongres Nasional ke-V PKI, tidak mau melewatkan kesempatan jang historis ini, jaitu Kongres PKI jang terbesar disepandjang sedjarahnja, setjara tidak memadai.

Inilah sebabnja „Bintang Merah” menerbitkan nomor² spesial jang memuat material lengkap Kongres Nasional ke-VI PKI. Penerbitan spesial „Bintang Merah” inipun djadinja penerbitan „Bintang Merah” jang terbesar disepandjang sedjarahnja jang kini sudah 14 tahun. Tiga djilid „Bintang Merah” nomor spesial, masing-masingnja setebal kuranglebih 400 halaman, djadi seluruhnja kuranglebih 1,200 halaman, akan mengundjungi parapembatja. Djilid ini adalah djilid pertamanja.

Sepintaslatu baik kita ingat, bahwa hingga kini dokumen² Kongres² PKI jang ke-I, II, III dan IV belum lagi dibukukan. Sebagian dari dokumen² itu dibakar oleh pendjadjah² Belanda dan Djepang, sebagian lagi hilang tak tentu rimbanja dirimba sedjarah kita jang pelik ini. Sisanja masih ter-serak², sebagian ada di-museum², sebagian lagi pada perorangan², sehingga belum mungkin penghimpunannja dilakukan. Sungguhpun demikian ada tekad pada redaksi „Bintang Merah”, untuk pada suatu waktu menghimpun dokumen² jang menjisa itu dan menerbitkannja. Dengan bantuan kaum revolusioner umumnja, kiranja hal ini bukannya tidak mungkin.

Mengenai dokumen² Kongres Nasional ke-VI PKI jang kita himpun sekarang ini, mulai Laporan Umum Kawan Aidit sampai pada resolusi²nja, sebenarnja tak memerlukan ia akan katapengantar. Dokumen² ini mengantarkan dirinja sendiri. Ia begitu djelasnja, ia begitu gamblangnja, djelas dan gamblang dalam mendjawab semua soal pokok dan penting revolusi Indonesia, dalam menganalisa dan menjimpulkan situasi jang kita hadapi, dan dalam merumuskan tugas² jang harus ditunaikan.

Kongres Nasional ke-VI, seperti diketahui, telah menyelesaikan atjara² Laporan Umum CC, Perubahan Konstitusi Partai, Perubahan Program Partai, dan Pemilihan CC dan Komisi Verifikasi dengan baik, dalam suasana lebih bulatnja persatuan didalam Partai dan antara Partai dan massa Rakjat, sehingga Kawan Aidit menamakannja Kongres persatuan djaja.

Segala angkatan didalam Partai, mulai jang tertua sampai jang termuda, dihimpun oleh satu rasa bersama — solidaritet proletar, solidaritet Komunis. Persatuan jang berdasarkan kesatuan ideologi, ideologi Marxisme-Leninisme inilah jang membikin Partai monolit seperti granit.

Dari mempeladjar dokumen² jang diterbitkan ini orang akan bisa menimba bukan sadja isi Kongres jang tak terlupakan itu, tetapi pun semangatnja, djiwanja.

Dokumen² ini ber h a k mendjadi milik dan makaitu w a d j i b mendjadi milik setiap kader Komunis, setiap kader revolusioner. Bukan hanja bukunja, tetapi melalui bukunja — isinja.

Kemudian — dan disini terletak tugas jang tak ringan bagi setiap kader Komunis, setiap kader revolusioner — intisari dokumen² ini harus „disosialisasikan” mendjadi milik Rakjat dan „diterdjemahkan” kedalam aksi² Rakjat.

Begitu banyak rintangan jang harus dilalui Kongres Nasional ke-VI PKI, tetapi djustru dilaluinja rintangan² itu dengan sukses membikin Kongres itu lebih bernilai, lebih bermutu — berlian dari segala berlian! Tjahaja Kongres itu tidak hanja berumur setahun-dua, ia akan tetap seminar selama ber-puluh² tahun j.a.d., menerangi djalan ke Indonesia merdeka penuh dan demokratis, Indonesia jang mau tak mau akan mendjadi Sosialis.

Kongres Nasional ke-VI PKI telah mengisi hati kita. Mari hati kita sekarang mengisi pelaksanaan keputusan² Kongres jang besar itu!

N j o t o

Pemimpin Redaksi „Bintang Merah”,
Wakil Ketua II CC PKI.

Djakarta, Djanuari 1960

KONGRES PERSATUAN DJAJA

Pidato pembukaan Kongres Nasional ke-VI PKI jang diutjapkan oleh Kawan D. N. AIDIT, Sekretaris Jenderal CC PKI, pada tgl. 7 September 1959

Kawan² jang tertjinta!

Atasnama Komite Central daripada Kongres Nasional ke-V PKI jang menjelenggarakan Kongres Nasional ke-VI ini, saja mengutjapkan selamat datang kepada kawan² semua dan mengharapkan agar kawan² tetap sehat walafiat selama Kongres ini berlangsung.

Dengan rasa terimakasih jang takterhingga kepada Rakjat perkdja Indonesia jang barisannja makin lama makin besar dan megah berdiri dibelakang PKI, dengan rasa terimakasih jang sebesar²nja kepada proletariat sedunia jang selamanja memihak perdjuaan Partai Komunis dan Rakjat Indonesia (*tepuktangan*), dengan rasa terimakasih jang se-dalam²nja kepada gurubesar² kita Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mau Tje-tung dan lain² jang telah memberi pedoman² kepada kita dalam melakukan perdjuaan untuk membebaskan Rakjat Indonesia dari penindasan, penghisapan dan penghinaan, dengan ini Kongres Nasional ke-VI PKI saja njatakan dibuka. (*Tepuktangan*).

Biarpun Kongres belum membentuk Komisi Mandat, djadi dengan sendirinja belum mungkin ada laporannja, tetapi dari Panitia Kongres telah saja terima laporan, bahwa utusan² dari semua Daerah Besar dan Pulau jang seharusnya datang kekongres ini, semuanya sudah berada didalam Kongres. (*Tepuktangan*). Utusan dari Daerah-daerah Besar dan Pulau² ini membawa mandat penuh dari semua anggota dan tjalonanggota Partai di Daerah Besar atau di Pulaunja. Dengan demikian, dalam Kongres Nasional ke-VI PKI ini diwakililah semua anggota dan tjalonanggota jang sekarang djumlahnja lebih dari 1,5 djuta. (*Tepuktangan*). Berdasarkan fasal 32 Konstitusi PKI jang disahkan oleh Kongres Nasional ke-V tahun 1954, Kongres ini adalah sah. (*Tepuktangan lama*).

Kongres jang mulia!

Walaupun dengan sangat menjesal, tapi perlu saja beritahukan kepada para peserta Kongres Nasional ke-VI PKI, bahwa untuk mendjadi tamu Kongres kita jang bersedjarah ini telah berada di Djakarta utusan² Partai² sekawan, jaitu:

Kawan *Dimo Ditchew*, anggota CC Partai Komunis Bulgaria. (*Tepuktangan*).

Kawan *Jerzy Albrecht*, Sekretaris CC Partai Buruh Persatuan Polandia. (*Tepuktangan*).

Kawan *Morris Hughes*, anggota Politbiro CC Partai Komunis Australia. (*Tepuktangan*).

Kawan *Ursinio Rojas*, anggota Politbiro CC Partai Sosialis Rakjat Kuba. (*Tepuktangan lama dan semua berdiri*).

Kawan *Pal Ilku*, anggota CC Partai Buruh Sosialis Hongaria. (*Tepuktangan*).

Kawan *Kurt Barthels*, anggota CC Partai Persatuan Sosialis Jerman. (*Tepuktangan*).

Kawan *Giuseppe Boffa*, Wakil CC Partai Komunis Italia. (*Tepuktangan*).

Kongres Nasional ke-VI PKI mengutjapkan selamat datang pada semua tamu ini, dan mengutjapkan terimakasih jang sebesar-besarnja kepada Partai² sekawan jang begitu besar perhatiannja pada Kongres kita, pada klas buruh dan Rakjat Indonesia serta pada tanahair kita. (*Tepuktangan*). Dengan adanja bukti perhatian besar dari Partai² sekawan kepada Kongres Partai kita, maka gagallah usaha kaum imperialis untuk mengisolasi proletariat Indonesia dari gerakan proletariat sedunia. (*Tepuktangan lama*). Dari lubuk hati kita jang se-dalam²nja, kita mengutjapkan terimakasih jang ber-limpah² kepada kawan² pemimpin² Partai² Marxis-Leninis sekawan ini. (*Tepuktangan*). Adalah karena ketentuan Peperpu Bagian Angkatan Darat maka mereka tidak bisa hadir sebagai tamu jang terhormat didalam Kongres kita ini, walaupun mereka sudah mempunjai visa dari Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri, artinja dari Pemerintah Indonesia, untuk datang ke Indonesia. Kenjataan ini mentjerminkan salahsatu segi daripada situasi politik jang rumit ditanahair kita, tetapi ini bukanlah segi satu²nja daripada situasi politik ditanahair kita. Difihak lain kawan-kawan, kenjataan ini djuga mendemonstrasikan betapa kuatnja solidaritet internasional dari kaum Komunis sedunia. (*Tepuktangan lama dan semua berdiri*).

Kawan² !

Adalah sangat menggembirakan, bahwa Kongres Nasional ke-VI PKI dikundjungi oleh kawan² dari sukubangsa² jang djauh lebih banjak djumlahnja daripada ketika Kongres Nasional ke-V, oleh kawan² wanita jang sudah lumajan djumlahnja dan oleh semua angkatan Komunis Indonesia. (*Tepuktangan*). Kongres ini adalah Kongres persatuan djaja daripada kaum Komunis Indonesia, djaminan mutlak bagi tertjiptanja persatuan djaja klas buruh, Rakjat

pekerdja dan nasion Indonesia. (*Tepuktangan*). Harapan Kongres Nasional ke-V supaya pengundjung Kongres Nasional ke-VI Partai mentjerminkan persatuan seperti jang kita lihat sekarang, sudah terpenuhi. (*Tepuktangan lama dan semua berdiri*).

Untuk memimpin sidang² Kongres Nasional ke-VI PKI ini saja usulkan kita membentuk sebuah Presidium Kongres jang terdiri dari kawan²:

(*Daftar nama anggota² Presidium Kongres dimuat pada halaman 218*).

Saja bertanja: apakah susunan Presidium Kongres ini dapat disetudjui oleh Kongres? (*Semua mengangkat kartu tanda setudju; tepuktangan lama dan semua hadirin berdiri*).

Sekarang saja persilahkan semua anggota Presidium naik ke podium untuk memimpin Kongres.



UNTUK DEMOKRASI DAN KABINET GOTONGROJONG

*Laporan Umum Komite Central PKI kepada Kongres Nasional
ke-VI PKI, disampaikan oleh Kawan D. N. AIDIT
pada tgl. 7 dan 8 September 1959*

Kawan² yang tertjinta !

Per-tama² izinkanlah saya mengutjapkan terimakasih yang tak terhingga karena Partai telah memberi kehormatan kepada saya untuk menjampaikan Laporan Umum ini kepada Kongres Nasional ke-VI Partai, Kongres daripada penggalang² front nasional dan pembangun² Partai Komunis Indonesia yang djaja, Kongres daripada pedjuang² militan untuk kemerdekaan nasional yang penuh, untuk demokrasi dan perdamaian dunia yang abadi. (*Tepuktangan*).

Kongres Nasional ke-VI ini adalah Kongres yang disiapkan dengan baik, dengan semangat revolusioner yang tinggi dan dengan semangat pengabdian yang tulus kepada Rakjat.

Lebih setengah tahun sebelum Kongres ini dilangsungkan bahan² Kongres sudah disebarkan untuk dibahas oleh kader² dan anggota² Partai. Ribuan rapat besar dan ketjil, tjeramah umum dan diskusi dilangsungkan untuk membahas bahan² Kongres kita, jaitu *Rentjana Tesis Daripada Laporan Umum CC PKI* yang akan disampaikan kepada Kongres Nasional ke-VI Partai, *Rentjana Perubahan Program* dan *Rentjana Perubahan Konstitusi PKI*. Mengenai bahan-bahan ini banjak pendapat yang berupa saran² sudah disampaikan kepada Sekretariat CC. Semuanja telah dipeladjar oleh Komisi Tesis, Komisi Perubahan Program dan Komisi Perubahan Konstitusi. Pendapat² yang akan menambah baiknja bahan² Kongres telah dimasukkan kedalam dokumen² yang akan dibahas oleh Kongres kita sekarang. Dalam Laporan Umum yang saya sampaikan ini sudah dimasukkan usul² yang tepat dan penting mengenai Rentjana Tesis Laporan Umum.

Tentu dalam Kongres ini tidak mungkin tiap² usul mendapat pembahasan² satu per satu. Satu kenyataan jalah bahwa semua rapat anggota, rapat fraksi² dan Komite² Partai serta semua Konferensi Partai yang diadakan untuk membahas bahan² Kongres, telah menjetudjuj pokok² pikiran yang dikemukakan dalam Rentjana Tesis. (*Tepuktangan lama*).

Rentjana Tesis telah memainkan peranan yang luarbiasa besar-nja dalam membangkitkan semangat dan perhatian anggota² Partai terhadap semua masalah penting dan pokok yang akan dibahas dalam Kongres Nasional ke-VI PKI. Laporan Umum ini pada hakekatnja merupakan perpaduan antara Rentjana Tesis dengan pendapat² yang tepat dan penting mengenai Rentjana Tesis. Oleh karena itu sesudah ada Laporan Umum ini, Rentjana Tesis sudah tidak mempunjai peranan apa² lagi dalam kehidupan Partai kita.

Sebagaimana kawan² ketahui, bahan² Kongres oleh Sekretariat CC djuga disampaikan kepada orang² diluar PKI, kepada pembesar-pembesar sivil dan militer, kepada tokoh² partai² dan organisasi-organisasi massa, kepada sardjana² dan pekerdja² kebudayaan. Kita djuga meminta pendapat² perseorangan dari kalangan massa Rakjat pekerdja. Banjak pendapat, baik tertulis maupun setjara lisan telah kita terima, dan djuga telah mendjadi bahan diskusi dalam komisi² yang bersangkutan. Atasnama seluruh anggota Partai Komunis Indonesia dan atasnama Kongres Nasional ke-VI PKI dari mimbar ini saya mengutjapkan banjak terimakasih kepada semua mereka yang berada diluar PKI, tetapi yang sudah begitu baik hati sudi menjampaikan saran²nja mengenai bahan² Kongres PKI.

Kegiatan anggota² Partai dalam menjambut Kongres Nasional ke-VI ini tidak hanja dalam membahas bahan² Kongres, tetapi djuga dalam hal² lain. Kongres ini kita siapkan djuga dengan berbagai atjara yang dapat lebih mengeratkan hubungan Partai dengan massa dalam bentuk kegiatan² memperbesar amal kepada Rakjat, mendorong madju kesenian Rakjat, menggiatkan pendidikan dalam Partai, meluaskan anggota dan organisasi Partai. Semua kegiatan ini telah mengangkat taraf kesedaran ideologi, politik dan organisasi Partai kita dan ini sangat penting bagi perkembangan Partai kita selandjutnja.

Sebagai tjontoh ingin saya kemukakan, bahwa dalam kegiatan memperbesar amal kepada Rakjat dalam rangka menjambut Kongres Nasional ke-VI PKI, ribuan Regu Kerdjabakti telah terbentuk dan kita mendapat pengalaman² yang sangat kaya dilapangan ini. Dalam Regu² Kerdjabakti ini telah mengambil bagian Pemimpin² Partai dari semua tingkat dan tidak sedikit orang² diluar PKI. Regu² Kerdjabakti sangat penting untuk dikembangkan sesudah Kongres. Pendeknja, Kongres ini bukanlah hanja Kongres kaum Komunis, tetapi ber-djuta² Rakjat Indonesia ikut merasakan bahwa Kongres ini adalah kongresnja sendiri. (*Tepuktangan lama*).

Kawan² !

Kongres kita menerima banjak surat² dan tilgram² utjapan selamat dari Partai² sekawan. Atas utjapan² selamat ini kita menjampaikan rasa terimakasih dan harapan semoga persaudaraan yang hangat antara Partai² Marxis-Leninis mendjadi semakin ter-gebleng.

Kongres kita djuga menerima sumbangan² berupa barang, menerima banjak surat dan tilgram dari seluruh pelosok tanahair, dari organisasi² massa dan perseorangan² yang menundjukkan simpatinja pada Kongres kita. Semua tanda simpati ini merupakan dorongan bagi Partai, dan chususnya bagi peserta² Kongres, untuk bekerdja lebih baik dalam melaksanakan tugas² patriotiknja. Kepada semua penjumbang ini atasnama Kongres saja mengutjapkan banjak terimakasih. (*Tepuktangan*).

Kawan² !

Sedjak Kongres Nasional ke-V Partai sampai sekarang kita telah banjak kehilangan kawan² kita yang terbaik. Diantarinja kita kehilangan Kawan Bachtaruddin, anggota CC Partai. Selain daripada itu kawan² yang gagahberani dan pantang mundur telah di-bunuh dengan tjara yang sangat biadab oleh pemberontak² kontra-revolusioner „PRRI” di Sumatera Barat, chususnya di Situdjuh, Suliki dan Atar. Demikian djuga kebiadaban kaum kontra-revolusioner „Permesta” telah menjebabkan sampai adjalnja sedjumlah Komunis² yang terbaik di Sulawesi Utara. Disamping itu tidak sedikit kawan² kita yang mendjadi korban kebiadaban DI-TII.

Diluarnegeri kita djuga telah kehilangan kawan² yang sudah terudji dalam kesetiaannja dan keuletannja dalam mengibarkan dan membela pandji² Marxisme-Leninisme, yang ditjintai dengan sepenuh hati oleh proletariat internasional, seperti Kawan² Boleslav Bierut dari Polandia, Antonin Zapotocky dari Tjekoslowakia, Kuichi Tokuda dari Djepang, Marcel Cachin dan Juliot Curie dari Perantjis, Dimitri Manuilsky dari Uni Sovjet dll.

Untuk putera² terbaik dari tanahairnja ini dan untuk pahlawan² proletariat yang ditjintai dengan sepenuh hati oleh klas dan Rakjatnja, baik yang didalam maupun yang diluarnegeri, saja mengadjak para peserta Kongres Nasional ke-VI PKI untuk berdiri sebentar dan mengheningkan tjipta. (*Semua hadirin berdiri dan suasana hening meliputi ruangan*).

Kawan² !

Lebih 5 tahun sudah berlalu sedjak Kongres Nasional Partai kita yang ke-V. Dengan kebanggaan Komunis dapat kita katakan, bahwa pada pokoknja kita telah melaksanakan dengan baik tugas² yang diberikan oleh Kongres Nasional ke-V Partai.

Banjak yang sudah terdjadi selama lebih dari 5 tahun itu, baik didalamnegeri, diluarnegeri maupun didalam Partai sendiri. Tetapi apapun yang sudah terdjadi, dan betapapun kesulitan² yang pernah dihadapi oleh Rakjat dan Partai kita selama itu, Kongres sekarang dilangsungkan dalam situasi dalam dan luarnegeri, dan situasi intern Partai yang djauh lebih baik, lebih maju dan lebih terkonsolidasi, daripada ketika kita melangsungkan Kongres Nasional ke-V dalam bulan Maret tahun 1954. (*Tepuktangan lama*).

Sedjak Kongres Nasional ke-V sampai sekarang sudah dilangsungkan 3 kali Konferensi Nasional Partai, 8 kali Sidang Pleno CC dan beberapa kali Sidang Politbiro yang diperluas dengan anggota-anggota CC yang bertempat-tinggal di Djakarta, dimana pimpinan sentral Partai telah memeriksa pelaksanaan tugas² yang ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-V, menganalisa situasi dan menetapkan pelaksanaan tugas² dengan tjara² yang lebih efektif.

Berkat petundjuk² Kongres Nasional ke-V, dapat dikatakan bahwa Partai selalu berkedudukan memegang inisiatif dalam kehidupan politik negeri kita. Kepertjajaan massa Rakjat makin lama makin bertambah besar akan kebenaran garis politik dan akan ketulusan serta kemampuan Partai dalam melaksanakan tugas² nasional dan internasionalja. Kenjataan² ini telah membikin lebih erat hubungan Partai dengan massa Rakjat. Kepertjajaan Rakjat yang makin besar kepada Partai telah menimbulkan rasa irihati, takut dan kuatir pada partai², golongan² dan orang² yang memusuhi kepentingan Rakjat, atau yang karena ketidakdjudjuran dan keragu-raguannja membela kepentingan Rakjat merasa berdosa kepada Rakjat. Mereka memfitnah Partai, berusaha menimbulkan provokasi² dan membikin komplotan² terhadap Partai dengan tudjuan „membendung Komunisme” atau „membasmi Komunisme” di Indonesia.

Sekarang kita menghadapi pekerdjaan² yang lebih berat. Makin bertambah besar kepertjajaan yang diberikan oleh Rakjat kepada Partai, makin berat kewadajiban dan tanggungdjawab yang dipikul oleh tiap² anggota Partai. Persoalan² yang dihadapi oleh Partai makin pelik.

Dilapangan politik luarnegeri kita harus lebih sungguh² lagi melandjutkan politik anti-kolonial dan tjinta damai, sedangkan dilapangan politik didalamnegeri kita harus terus memperdjauangkan supaya lebih banjak hak² politik berpindah ketangan Rakjat pekerdja.

Tugas² politik luar dan didalamnegeri hanja dapat kita laksanakan dengan baik djika kita tetap setia dan dengan lebih sungguh² meneruskan pelaksanaan tugas² urgen seperti yang sudah ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-V Partai, jaitu, *pertama* menggalang

front persatuan nasional anti-imperialis yang berbasiskan persekutuan kaum buruh dan kaum tani anti-feodal dibawah pimpinan klas buruh; dan kedua meneruskan pembangunan Partai yang tersebar diseluruh negeri dan mempunjai karakter massa yang luas, yang sepenuhnya terkonsolidasi dilapangan ideologi, politik dan organisasi. Melaksanakan dua tugas urgen ini sekaligus berarti memperkuat front internasional anti-kolonial dan tjinta damai.

Djadi, tugas² urgen Partai kita sekarang masih belum berubah dari yang sudah ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-V. Berdasarkan dua tugas urgen tsb. telah kita siapkan dan sekarang kita langsung Kongres Nasional ini dengan empat sembojan pokok, jaitu: „Dengan PKI didepan meneruskan perjuangn Rakjat untuk Indonesia yang merdeka penuh dan demokratis“, „Perbaiki pekerdjaan front nasional, pentjilkan lebih landjut kekuatan kepalabatu“, „Perkuat front internasional anti-kolonial dan tjinta damai“ dan „Landjutkan pembangunan Partai diseluruh negeri yang bersatu erat dengan massa, yang terkonsolidasi dilapangan ideologi, politik dan organisasi“. (Tepuktangan lama). Empat sembojan pokok ini mendjiwai Kongres Nasional ke-VI kita dan selandjutnja akan mendjiwai semua kegiatan Partai sesudah Kongres. (Tepuktangan). Dengan didjiwai oleh sembojan² ini djuga kita berdjung terus untuk peluasan hak² demokrasi bagi Rakjat dan untuk Kabinet Gotongrojong. (Tepuktangan lama).

Tudjuan pokok daripada Kongres Nasional ke-VI Partai ini ialah untuk menetapkan tugas² dilapangan ideologi, politik dan organisasi berdasarkan dua tugas urgen diatas, agar Partai kita lebih mampu mengubah imbalanced kekuatan politik didalam negeri. Dengan berbuat demikian berartilah, bahwa kita mentjiptakan sjarat² untuk lebih mendekatkan Rakjat dan nasion Indonesia kepada tudjuan strategis revolusi Indonesia, jaitu penjelesaian tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja. (Tepuktangan). Ini berarti mengachiri samasekali kekuasaan imperialisme dan feodalisme, berarti membentuk Pemerintah Rakjat, jaitu Pemerintah dari Rakjat, oleh Rakjat dan untuk Rakjat. (Tepuktangan lama).

Dengan melakukan tugas² seperti diuraikan diatas, berarti bahwa kita dipimpin oleh rasa tanggungjawab yang ada pada kita terhadap klas buruh, terhadap Rakjat pekerdja, terhadap seluruh Rakjat dan nasion Indonesia dan terhadap gerakan klas buruh revolusioner internasional.

MENERUSKAN PERDJUANGAN UNTUK INDONESIA JANG MERDEKA PENUH DAN DEMOKRATIS

(1) Imperialisme Belanda Masih Tetap Musuh Pertama Rakjat Indonesia

Kawan² !

Program PKI yang disahkan oleh Kongres Nasional ke-V Partai antara lain menjatakan, bahwa tugas² pembebasan nasional dan perubahan² demokratis di Indonesia belum lagi terlaksana. Hasrat Rakjat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan nasional yang penuh, untuk kebebasan² demokratis dan untuk memperbaiki penghidupannya masih belum terpenuhi. Apa yang dinjatakan oleh program PKI ini sampai sekarang masih berlaku.

Dengan menjatakan bahwa tugas² pembebasan nasional dan perubahan² demokratis dinegeri kita belum lagi terlaksana, tidaklah berarti bahwa kita tidak menilai hasil² yang ditjapai oleh Rakjat Indonesia dan Partai kita dalam perjuangn untuk kemerdekaan nasional dan demokrasi sedjak Kongres Nasional ke-V Partai sampai sekarang. Partai kita selamanja menilai sukses² dalam tiap² perjuangn sebagai hasil djerih-pajah dan pengorbanan Rakjat yang harus didjundjungtinggi.

Selama waktu yang ditindjau, Rakjat Indonesia telah berhasil mengusir pulang Misi Militer Belanda (MMB), membubarkan apa yang dinamakan Uni Indonesia-Belanda, membubarkan "Sticusa" (lembaga hubungan kebudayaan Indonesia-Belanda), membatalkan „hutang Indonesia“ kepada Belanda, menjengkirkan pengawasan pemerintah Belanda atas politik luarnegeri dan perdagangan luarnegeri Indonesia, membatalkan persetudjuan KMB, mengeluarkan dari Indonesia pegawai² kolonial Belanda dan orang² Belanda lainnja yang dapat merugikan kepentingan Indonesia, mengambilalih dan menasionalisasi perusahaan² kepunjaan kaum kolonialis Belanda. (Tepuktangan lama).

Djuga dalam pendemokrasian sistim pemerintahan telah tertjapai hasil², sebagai akibat kemenangan Partai dan kekuatan² demokratis lainnja dalam pemilihan umum untuk Parlemen pertama dan pemilihan² DPRD tingkat I dan II.

Tepat sekali garis politik yang ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-V Partai jaitu, bahwa imperialisme Belanda adalah musuh pertama Rakjat Indonesia. (Tepuktangan). Garis politik ini adalah objektif dan dengan garis politik ini Partai mendjadi lebih mampu

memobilisasi kekuatan Rakjat Indonesia jang se-besar²nja untuk dipukulkan kepada imperialisme Belanda dan kakitangan²nja. (*Tepuktangan*).

Dengan tertjapainja hasil² dalam perdjungan melawan imperialisme Belanda dan adanja pendemokrasian sistim pemerintahan, mungkin timbul pertanjaan²: Apakah dengan demikian tidak berarti bahwa tugas² pembebasan nasional dan perubahan demokratis sudah selesai? Apakah dengan demikian imperialisme Belanda sudah bukan musuh pertama Rakjat Indonesia lagi?

Dengan hasil² jang sampai sekarang sudah ditjapai dalam perdjungan melawan kolonialisme Belanda samasekali tidak berarti bahwa tugas² pembebasan nasional sudah selesai. Djuga adanja sekedar pendemokrasian sistim pemerintahan, walaupun soal ini sangat penting, samasekali tidak berarti bahwa tugas perubahan² demokratis dinegeri kita sudah rampung.

Kenyataan sekarang jalah, bahwa kaum kolonialis Belanda masih menduduki 20% daripada wilajah Republik Indonesia, jaitu Irian Barat; bahwa perusahaan² Belanda jang sudah diambilalih belum semua dinasionalisasi; bahwa dalam perdagangan luarnegeri Indonesia masih banyak menggunakan saluran kapitalis² Belanda; bahwa di Indonesia masih ada kapital Belanda dilapangan perminjakan (BPM atau Anglo-Dutch Shell) jang belum diganggugugat samasekali; bahwa kakitangan Belanda masih banyak jang menduduki fungsi penting dalam alat² negara dan dilapangan ekonomi; bahwa masih ada gerombolan² bersendjata jang beroperasi untuk kepentingan kaum kolonialis Belanda; bahwa udara, lautan dan pantai² Indonesia masih terus-menerus diantjam oleh pesawat² udara dan kapalselam² Belanda; dan bahwa dilapangan pendidikan dan kebudayaan kaum kolonialis Belanda masih mempunyai pengaruh. *Semuanya ini menundjukkan bahwa perdjungan Rakjat Indonesia untuk mengachiri kekuasaan kaum imperialis Belanda masih belum selesai, bahwa tugas pembebasan nasional samasekali belum rampung, bahwa Indonesia masih belum merdeka penuh atau pada hakekatnja masih berkedudukan setengah-djadjahan. Imperialisme Belanda masih tetap merupakan musuh pertama Rakjat Indonesia. (Tepuktangan lama).*

Masih bertjokolnja sisa² feodalisme di-desa² dalam bentuk monopoli tanah oleh tuantanah, dalam bentuk sewatanah jang berwujud barang dan berwujud kerdja, dan dalam bentuk hutang² jang menempatkan kaum tani dalam kedudukan budak terhadap tuantanah² merupakan bukti², bahwa kita tidak mungkin berbitjara tentang sudah terlaksananya tugas² perubahan demokratis. *Indonesia masih tetap negeri setengah-feodal.*

Selain daripada itu, kita samasekali belum dapat berbitjara tentang selesainya tugas² pembebasan nasional, karena imperialisme Amerika Serikat makin lama makin mendesak kedudukan imperialisme Belanda, makin menempati kedudukan² penting di Indonesia dilapangan ekonomi, politik dan kebudayaan. Kalau kita berbitjara tentang kebebasan nasional, maka tidaklah berarti bahwa kita ingin bebas dari imperialis Belanda untuk menerima imperialis AS atau imperialis lainnja. Adanja kekuatan militer AS di Irian Barat; adanja tokoh² dan partai² kanan jang masih leluasa mendjalankan politik imperialis AS di Indonesia; adanja infiltrasi kebudayaan AS melalui lektur, film, pendidikan dsb.; adanja bantuan kapaludara², pilot², sendjata² dan perlengkapan² militer lainnja serta instruktur² militer dari AS kepada kaum pemberontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta”; berkeliarannya perwira² AS dan orang „FBI” (djawatan mata² AS) di Indonesia, semuanya ini merupakan bukti², bahwa imperialisme AS sudah merupakan bahaya jang terus-menerus mengantjam kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. (*Tepuktangan*).

Imperialis AS adalah musuh Rakjat Indonesia jang paling berbahaya berhubung imperialisme ini adalah jang paling agresif, paling mampu melaksanakan maksud² djahat, berhubung dengan penanaman modalnja jang makin besar di Indonesia, berhubung masih agak banyak orang² Indonesia jang berkedudukan penting tetapi naif mengira imperialisme AS tidak begitu djahat. Politik anti-imperialisme tanpa melawan infiltrasi² dan intrik² AS adalah omong-kosong. Imperialisme AS pada waktu sekarang adalah musuh Rakjat Indonesia jang lebih berbahaya daripada imperialisme jang mana sadja, karena djika ia sudah masuk maka sukarlah untuk menendangnja keluar.

Diterimanya Undang² Penanaman Modal Asing oleh Parlemen dalam bulan September tahun 1958, walaupun ditentang keras oleh PKI dan Rakjat pekerdja Indonesia, berarti dibukanya pintu Indonesia untuk masuknja dan diperkuatnja kegiatan² politik, ekonomi dan kebudayaan negeri² imperialis, terutama Amerika Serikat, Djepang dan Jerman Barat. PKI menentang dengan teguh ketika Rantjangan Undang² ini dibitjarakan di Parlemen, karena PKI yakin, bahwa Undang² ini semata-mata hanja menguntungkan kaum imperialis dan memudahkan kaum imperialis melakukan intervensi²nja dan setjara legal mendapatkan dan memupuk komprador²nja dikalangan orang² Indonesia. Undang² ini merintangi pelaksanaan tugas² pembebasan nasional dan membuka djalan bagi kaum imperialis untuk mempertahankan Indonesia sebagai tempat penanaman modalnja, dan ini berarti menghalangi pembangunan ekonomi na-

sional Indonesia. Oleh karena itu PKI akan terus mengajak seluruh kaum buruh dan seluruh Rakyat Indonesia untuk menuntut kepada Pemerintah agar Undang² Penanaman Modal Asing dibatalkan. (*Tepuktangan dan seruan: „Setudju“*).

Dari uraian diatas djelaslah, bahwa perjuangan nasional untuk melikwidasi sepenuhnya kekuasaan ekonomi Belanda dalam rangka merealisasi pembatalan KMB dan perjuangan membebaskan Irian Barat tidak dapat dipisahkan dari perjuangan nasional melawan intrik², infiltrasi² dan bahaya intervensi AS. Djadi, kewajiban pembebasan nasional kita sekarang ialah membersihkan sisa² kolonialisme Belanda, dengan teguh melawan kegiatan subversif Amerika Serikat dengan SEATO-nja, mentjegah bertambahnja penanaman modal AS dan negeri² imperialis lainnja, dan memperlakukan perusahaan² AS sama dengan perusahaan² Belanda apabila AS terus-menerus mempersendjatai gerombolan² kontra-revolusioner atau memberikan bantuan sendjata kepada Belanda dalam agresi terhadap Republik Indonesia. (*Tepuktangan lama*).

(2) Indonesia Masih Tetap Berada Dalam Tjengkeraman Krisis Ekonomi

Kesimpulan Kongres Nasional ke-V Partai kita antara lain ialah, bahwa Indonesia berada dalam tjengkeraman krisis ekonomi yang terus-menerus sebagai akibat sifat ekonomi yang masih kolonial. Kesimpulan ini masih tetap berlaku hingga sekarang. Adanja krisis ekonomi Amerika Serikat dalam tahun 1957-1958 yang berakibat sangat luas pada dunia kapitalis lebih memperdalam lagi tjengkeraman krisis pada tubuh ekonomi Indonesia.

Beberapa hal pokok yang menjebabkan masih berlangsungnja keadaan ekonomi yang suram ialah :

Pertama : pembagian kerdja internasional setjara kapitalis, dimana Indonesia termasuk didalamnya, mengakibatkan (a) perbedaan yang makin besar diantara negeri² industri dan negeri² terbelakang, dan (b) tetap terbelakangnja negeri² yang sudah terbelakang itu.

Pembagian kerdja internasional setjara kapitalis telah membikin Indonesia praktis tidak mempunyai potensi dan kemampuan untuk mengatur dan memperbesar produksinja dalam segala lapangan. Ini disebabkan karena kedudukan bahan² ekspor kita makin tak terjamin dipasaran dunia kapitalis, sebab menghadapi saingan barang² sintetis, menghadapi spekulasi dan manipulasi harga dari kaum monopoli besar, menghadapi kegontjangan permintaan yang semakin sering dan hebat, dan menghadapi pasaran kapitalis yang

semakin terbatas. Keadaan yang demikian telah membikin Indonesia kurang mampu mengimpor barang² yang dibutuhkan, terutama barang² modal, dan menjebabkan tidak adanya dasar sama-sekali bagi Indonesia untuk memperbesar produksi barang² yang didjual dalam pasaran kapitalis itu.

Angka² produksi Indonesia yang sepenuhnya dapat dipertjaja sukar didapat. Angka² resmi menundjukkan produksi barang ekspor sbb. : dalam tahun 1958, selain satu-dua barang seperti kina dan tembakau yang produksinja naik sedikit, dan minjak, batubara serta bauxiet yang produksinja konstan, barang² ekspor lainnja semuanya menundjukkan kemunduran. Misalnja, djika dibandingkan dengan tahun 1957 produksi karet dalam tahun 1958 merosot dengan 6%, padahal produksi karet dalam tahun 1957 sudah 15% lebih rendah djika dibandingkan dengan tahun 1954. Produksi barang² ekspor lain seperti *serat, kopi, minjak-sawit, kopra dan lada* sedjak 1954 menundjukkan garis menurun yang tetap. Produksi *timah* yang dalam tahun 1957 sudah merosot hampir 23% djika dibandingkan dengan 1954, dalam tahun 1958 merosot lagi dengan 18%.

Mengenai produksi industri dalam negeri yang sudah sangat ketjil dan yang masih sangat tergantung pada impor bahan baku, djuga mengalami kemunduran. Industri dalam negeri bukan hanya tidak berkembang, tetapi selama tahun 1958 banjak perusahaan industri yang bekerdja djauh dibawah kapasitas yang ada. Sektor ini umumnya mengalami kesukaran² besar karena menghadapi persaingan hebat dari barangdjadi yang diimpor, lemahnja pasar dalam negeri, dan Pemerintah sampai sekarang gagal dalam mendatangkan barang² modal dan dalam memberikan perlindungan kepada industri nasional berupa djaminan pasar, persediaan bahan baku dan bantuan modal.

Walaupun dalam keadaan dunia ekonomi kapitalis sedang menaik, ekonomi negara kita tetap berada dalam keadaan yang sulit. Apalagi diwaktu krisis ! Per Jacobbsen, Sekretaris Djenderal Dana Moneter Internasional, terus terang mengatakan dimuka sidang ECOSOC dari PBB yang diadakan di Mexico dalam bulan April 1959 bahwa „negeri² penghasil bahan² mentah djanganlah mengharapka bahwa pemulihan industri dunia akan menolong mereka dari kesulitan mereka“. Apakah lagi yang masih dapat diharapkan oleh Indonesia dari pasaran dunia kapitalis, djika dalam situasi pemulihan („recovery“) sudah begitu tipis harapan bagi kedudukan bahan² ekspor kita ? Harga barangdjadi yang di ekspor oleh negara² kapitalis tetap naik, sedang harga bahan² mentah yang mereka impor dari kita turun dengan hebat. Hal ini dibenarkan oleh tinjdauan ekonomi dunia tahun 1958 dari PBB yang berbitjara tentang

„kemerosotan penghasilan ekspor negara² yang menghasilkan bahan-bahan ekspor sebanyak 7-8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, padahal harga barang jadi terus-menerus naik”. Perkembangan ini dibenarkan oleh kenyataan di Indonesia, dimana di tahun 1958 nilai impor dalam rupiah turun dengan 37% dan volume impor malahan turun dengan 47% dibandingkan dengan tahun 1957. Mengenai volume ekspor dalam tahun 1958 turun dengan hampir 14% (tidak termasuk minyak dan hasil²nja), padahal nilainya dalam rupiah turun dengan lebih dari 25%. Lihatlah betapa Indonesia menderita sebagai akibat krisis ekonomi di-negeri² Barat.

Dari kenyataan² diatas djelaslah, bahwa sistim Bukti Ekspor (BE) yang dianggap djalan keluar oleh Menteri Keuangan dalam kabinet Djuanda jll., Mr. Sutikno Slamet (PNI), tidak dapat memperbaiki situasi ekspor-impor dan semakin memerosotkan nilai rupiah serta menyebabkan kenaikan harga barang² keperluan hidup. Sistim BE malahan lebih mengikatkan Indonesia kepada ekonomi kapitalis dan makin membikin parah ekonomi Indonesia. Sistim ini hanya bertudjuan mengedjar devisen (mata uang asing — dolar atau pound sterling) dan menghambat perluasan perdagangan dengan negeri² Sosialis, sehingga Indonesia tidak menarik keuntungan setjukupnja dari kenyataan adanya kubu Sosialis yang ekonominya kuat dan terus tumbuh. Sekalipun sekarang sistim BE sudah dihapuskan, tetapi ini tidak berarti bahwa orientasi perdagangan luarnegeri dengan sendirinya akan berubah.

Dengan politik yang tidak realistis ini, yang dirugikan bukanlah negeri² Sosialis, tetapi Indonesia sendiri, khususnya pembangunan ekonominya.

Kedua : sisa² feodalisme yang masih meradjalela tidak memungkinkan pembebasan tenaga² produktif di-desa² dan tidak memungkinkan adanya kenaikan produksi bahan² makanan dan hasil² pertanian lainnja. Bahan² makanan seperti beras, ketela, djagung dan lain² pada umumnya tetap atau sedikit sekali mengalami kenaikan dalam tahun 1958. Kematjetan produksi ini tidak memungkinkan adanya perbaikan hidup bagi kaum tani yang meliputi 60-70% dari seluruh penduduk Indonesia. Keadaan sekarang malahan lebih serius lagi, jaitu dimana produksi bahan makanan kita sudah tidak lagi bisa mengedjar kenaikan djumlah penduduk. Ini berarti tambahan beban berat bagi impor Indonesia, kenaikan harga barang² pokok dan kemerosotan yang lebih landjut dalam tingkat hidup Rakyat banyak. Kematjetan ini yang pada pokoknja disebabkan oleh masih kuatnja sisa² feodalisme dalam ekonomi kita, djuga disebabkan oleh kematjetan transpor dan oleh karena Pemerintah belum samasekali mengambil tindakan² kongkrit dan tepat untuk

membantu kaum tani dengan kredit yang langsung, murah dan mudah, dengan menjediakan bibit² dan rabuk yang tjukup dan baik.

Keadaan tersebut tidak hanya menjulitkan peningkatan produksi barang² pertanian tetapi djuga tidak memungkinkan diperluasnya pasaran dalamnegeri yang sangat diperlukan bagi perkembangan industri nasional. Dengan demikian, maka masih adanya sisa² feodalisme dalam ekonomi Indonesia terang djuga sangat menghalangi kemandjuaan² ekonomi dalam segala lapangan.

Ketiga : krisis ekonomi Indonesia djuga disebabkan oleh sangat lemahnja sektor ekonomi yang dikuasai negara. Ekonomi sektor negara seharusnya menempati „posisi komando”, seharusnya merupakan sektor yang mendorong, memimpin dan memupuk perkembangan industri dalamnegeri, termasuk industri berat. Selain daripada itu, Pemerintah Indonesia tidak akan dapat mengatasi kesukaran² keuangan berupa defisit yang terus-menerus meningkat dalam anggaran belanja negara dan kenaikan uang yang dipindjam dari bank sentral, selama ekonomi sektor negara belum kuat, selama negara belum menguasai sebagian yang berarti daripada lapangan usaha Indonesia. Mengembangkan ekonomi sektor negara adalah satu keharusan djika menurut fasal 33 daripada Undang² Dasar 1945. Kesukaran² keuangan negara belum dapat diatasi, selama ekonomi kita terus-menerus digontjangkan oleh inflasi dan kematjetan produksi seperti yang didjelaskan diatas.

Demikian setjara singkat krisis ekonomi Indonesia yang bersifat kematjetan dalam produksi, kelemahan karena masih tergantung pada ekspor-impor yang terus-menerus mengalami kegontjangan, semakin banjaknja uang beredar yang tidak produktif dan semakin meradjalelanja inflasi dan kenaikan harga barang² pokok. Dengan demikian, teranglah bahwa krisis ekonomi kita berpangkal kepada sifatnja yang kolonial, ekonomi yang masih sangat tergantung pada pasaran dunia ekonomi kapitalis.

Keadaan yang suram dan matjet ini pula membikin Pemerintah Indonesia tidak sanggup menguasai dan mengatur keadaan harga didalamnegeri. Malahan sebaliknya, tindakan dilapangan ekspor-impor seperti misalnja sistim BE telah mengakibatkan makin meningkatnja harga barang². Keadaan ini lebih parah lagi setelah Menteri Perdagangan dalam Kabinet Djuanda jll. Rachmat Muljomiseno (NU), menjerah bulat² kepada manipulasi kaum spekulan dan tukang tjatut besar yang se-wenang² mempermainkan pasaran, yang akibatnja lebih hebat menekan penghidupan Rakyat. Barang² kebutuhan pokok seperti beras, tekstil, gula dan minyak mendjadi takterkendalikan harganya atau lenjap dari pasar.

Kaum spekulan berhasil menunggangi situasi peredaran barang²

jang sangat sulit, *pertama* karena matjetnja produksi dalam negeri, *kedua* karena terbatasnja persediaan barang² impor, berhubung dengan adanya pengurangan impor karena kemunduran ekspor, *ketiga* karena tidak lantjarnya transpor, dan *keempat* karena politik harga jang mendorong meradjalelanja spekulasi.

Politik harga Menteri Perdagangan kabinet Djuanda jll. jang disokong oleh golongan liberal adalah menyesuaikan harga pemerintah dengan harga pasar. Alasannja supaja tidak terdapat perbedaan harga resmi dan harga pasar jang sudah tinggi. (*Tawa*). Djadi, pemerintah mengikuti apa jang sudah diperbuat oleh kaum spekulasi (*tawa*), dan ini dilakukan atasnama „ekonomi terpimpin“. (*Tawa*). Ja, dipimpin oleh kaum spekulasi! (*Tawa*). Ini adalah politik melindungi kaum parasiter, jaitu para pedagang dan tukang tjatut besar, jang main spekulasi dengan mengorbankan kepentingan konsumen jang sebagian sangat terbesar terdiri dari massa Rakjat jang ber-puluh² djuta.

Politik harga jang didjalankan/seharusnja politik harga rendah jang ditetapkan dan dikendalikan setjara konsekwen oleh pemerintah. Tjara mengendalikan harga dan mentjegah meradjalelanja spekulasi dan tjatut adalah supaja pemerintah mengharuskan pasar mengikuti harga rendah jang ditetapkan oleh pemerintah, (*teputangan*), membandjiri pasar dengan barang² kebutuhan Rakjat sehari² dan langsung melaksanakan distribusi barang² tersebut untuk mendjamin golongan konsumen jang tidak mampu. Pemerintah Djuanda pernah menetapkan harga pasar supaja tidak melebihi harga 15 Desember 1958. Tetapi ketentuan pemerintah ini kemudian ditjabut setelah ternjata tidak djalan. Sebabnja kematjetan jalah karena tidak diikuti oleh tindakan² jang diperlukan untuk itu dan tidak dilakukan setjara konsekwen, malahan kepentingan para pedagang dan tukang tjatut besar lebih dilindungi daripada kepentingan ber-puluh² djuta massa Rakjat konsumen.

Permainan harga oleh kaum spekulasi dan golongan parasiter lainnja sangat dimungkinkan karena *politik distribusi* jang didjalankan oleh Kementerian Perdagangan selama ini tidak sehat. Pemerintah masih sadja memupuk susunan aparat perdagangan jang ber-lapis² dalam peredaran barang² dipasar antara importir atau distributor dengan pendjual etjeran (*detailis*). Susunan aparat perdagangan jang ber-lapis² ini menjebabkan adanya perdagangan perantara jang sangat banjak djumlahnja sehingga menjebabkan pengambilan keuntungan jang banjak dan ber-lapis² pula oleh golongan parasiter atas kerugian para konsumen jang sebagian sangat terbesar terdiri dari Rakjat pekerdja jang tidak mampu. Karena itu Pemerintah dalam mendjalankan politik distribusinja harus se-

banjak mungkin mengurangi djumlah pedagang perantara dan menggunakan koperasi² Rakjat, RK², RT² dan warung² sebagai saluran distribusi jang utama.

Berbitjara tentang *koperasi*, maka sudah seharusnya dituntut pada pemerintah supaja lebih banjak memberikan proteksi dan fasilitas tanpa diskriminasi guna mengembangkan koperasi² jang didirikan oleh Rakjat pekerdja, karena koperasi² ini lebih sehat dasarnya daripada „koperasi“ kapitalis model Hatta. Koperasi² Rakjat pekerdja harus sungguh² dikembangkan dengan tjara² jang demokratis untuk membantu melantjarkan distribusi barang² keperluan hidup jang pokok. Politik jang didjalankan oleh djawatan koperasi jang tidak menghendaki koperasi mendjual barang² dibawah harga pasar harus dihentikan. Politik ini adalah kelanjutan daripada politik harga jang sangat liberal dari djawatan perdagangan, jang apabila dipraktekkan dalam koperasi, maka koperasi² akan mendjadi organisasi² pedagang spekulasi dan tjatut. Kehidupan koperasi jang demokratis harus dipupuk dengan membiasakan adanya rapat² anggota koperasi untuk mengontrol kedadjaksanaan pengurus²nja.

Mengenai status *perusahaan² Belanda jang diambilalih* ada beberapa kemadjuan dilapangan per-undang²an, tetapi masih banjak rintangan² dalam mengefektifkan perusahaan² itu sebagai perusahaan negara. Usaha untuk mempartikelirkan perusahaan² tsb. mendapat tentangan keras dari kaum buruh dan dari kaum patriot pada umumnja. Usaha² kaum kapitalis untuk mendjadikan perusahaan² tjampuran dengan 20% kapital partikelir djuga tidak berhasil, sehingga kemungkinan besar perusahaan² itu akan tetap 100% perusahaan² negara. Pemerintah sudah mengeluarkan PP no. 2 dan PP no. 3 tahun 1959 untuk melaksanakan Undang² Nasionalisasi Perusahaan² Belanda. Apabila kedua PP ini, dan terutama sekali PP no. 2 tahun 1959 dilaksanakan setjara konsekwen, maka usaha untuk mempartikelirkan perusahaan² tersebut sudah gagal sama sekali. Tetapi PP no. 2 dan no. 3 itu mengandung kelemahan², misalnja dalam badan² pelaksana nasionalisasi masih djuga belum terdjamin komposisi keanggotaan jang demokratis, tidak ada ketentuan dimana wakil² serikatburuh diikutsertakan. Masalah ikutnja wakil serikatburuh² dalam badan² pelaksana daripada perusahaan² jang sudah diambilalih dan jang sudah dinasionalisasi tidak hanya penting untuk ketertiban perusahaan dan peningkatan produksi, tetapi lebih² lagi pentingnja untuk menghalangi penguasaan-penguasaan tertentu jang bermaksud mempartikelirkan perusahaan atau mendjalankan kekuasaan direksi setjara bebas untuk mengadakan manipulasi² dan korupsi.

Mengenai produksi perusahaan² yang diambilalih ada yang naik, tetapi pada umumnya konstan jika dibanding dengan ketika belum diambilalih. Jika terdapat kemunduran maka sebabnya bukanlah karena ketidakmampuan kaum buruh, tetapi karena tidak cukup persediaan bahan² baku yang harus diimpor atau karena pasaran luarnegeri mengalami kesulitan².

Hingga sekarang setjara ber-angsur² memang makin lama makin banyak penasionalisasian perusahaan² yang sudah diambilalih, terutama perusahaan² perkebunan. Dengan tetap memperhatikan segala kekurangannya, politik ambilalih dan kemudian politik nasionalisasi perusahaan² kaum kolonial Belanda adalah salahsatu hasil kongkrit dan penting, satu tindakan patriotik yang besar daripada kabinet Djuanda yang didukung oleh PKI dan kekuatan² demokratis lainnya. (*Tepuktangan*). Satu pelajaran, bahwa dengan persatuan nasional yang kuat dan tindakan tegas anti-kolonialisme, kita bisa berbuat sesuatu yang menguntungkan tanahair dan Rakyat Indonesia. Sekarang harus dijaga agar hasil² yang positif ini tidak dirusak oleh kaum egois anti-nasional, kaum pedagang spekulan, tukang tjatut dan koruptor baik sivil maupun militer.

Dalam hubungan dengan memperbaiki ekonomi negeri adalah sangat penting masalah *komunikasi dan transpor*. Yang sangat serius dan perlu segera dan pertama² mendapat pemertjahan ialah soal *transpor laut*. Adalah tepat sekali bahwa Pemerintah melarang KPM bekerja di Indonesia, karena maskapai pelajaran ini dapat digunakan oleh pihak Belanda sebagai alat sabotase dilapangan ekonomi dan alat penjelundup orang² jahat masuk dan keluar Indonesia. Sekarang tonase nasional untuk pelajaran interinsuler belum 50% pulih jika dibanding dengan ketika masih ada KPM (kira² 290.000 BRT pada November 1957). Lebih² lagi berhubungan kapal² sangat diperlukan untuk operasi² militer, maka tonase kapal sekarang masih jauh dari cukup. Problem mengatasi kekurangan tonase kapal adalah problem yang penting dan sangat mendesak. Ini dapat ditempuh dengan menggiatkan pembikinan kapal didalamnegeri, dengan mentjarter atau membeli kapal dari luarnegeri oleh Pemerintah.

Pembangunan *djalan raja dan pengangkutan sungai* diluar Jawa merupakan masalah transpor yang sangat penting dan mendesak. Sebenarnja soal ini bukanlah soal yang sangat sulit, asal Pemerintah mau menggunakan setjara maksimal kemungkinan² yang bisa didapat dari hubungan ekonomi dengan negara² Sosialis yang pengalamannya banyak dan memiliki alat² yang paling modern untuk keperluan ini, sedangkan tenaga manusia kita lebih dari cukup.

Pengangkutan *kereta-api* sebagai alat transpor yang murah sam-

pai sekarang belum lagi direhabilitasi. Dilihat dari sudut banyaknya kecelakaan kereta-api masalah rehabilitasi adalah masalah yang sangat urgen, disamping soal kecelakaan ini harus juga dilihat dari sudut kegiatan elemen² subversif asing. Tetapi rehabilitasi tidak akan dapat dilaksanakan apabila tidak diadakan rekonstruksi setjara luas dengan memperengkapi bengkel² kereta-api dengan alat² mesin baru untuk mempertinggi kemampuan bekerdjanja. Loko² dan wagon² perlu diperbanyak, pemeliharaan dan servis harus diperbaiki.

Pengangkutan *bermotor* mengalami kesulitan² yang disebabkan oleh kurangnya persediaan dan mahalnja onderdil² motor, sebagai akibat daripada matjetnja ekspor yang membikin kemampuan impor kita menjadi sangat terbatas. Dari sini dapat ditarik pelajaran, betapa buruknja jika terlalu menggantungkan diri pada impor dan jika kita belum juga memiliki pabrik² mesin yang dapat bikin onderdil² untuk kendaraan bermotor dan untuk pabrik² kita yang sudah ada. Selanjutnja pemasukan alat² pengangkutan bermotor harus mengutamakan truck, bus dan alat² pengangkutan umum lainnya, sedangkan impor mobil² lux supaya dihentikan.

Sudah tentu, dalam hubungan dengan membitjarakan komunikasi dan transpor adalah sangat penting masalah memperluas dan mengintensifkan lin² *hubungan udara*. Bepergian dengan kapal terbang sudah menjadi kebutuhan sehari² dari kehidupan ekonomi, politik dan sosial Rakyat Indonesia.

Karena Indonesia adalah negeri yang luas dengan ribuan pulau, maka penilaian terhadap sesuatu pemerintah akan diukur a.l. dari seriusnja dan berhasilnja pemerintah itu memertjahkan masalah komunikasi dan transpor. Masalah kesatuan Indonesia juga banyak tergantung dari pemertjahan masalah ini.

(3) Memperluas Perdagangan Dengan Negeri² Sosialis

Dari uraian diatas menjadi jelas, bahwa krisis ekonomi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh tergantungnja ekonomi negeri kita pada dunia kapitalis. Oleh karena itu, untuk mengatasi keadaan ini, kedudukan yang tergantung ini harus dihentikan dan Indonesia harus memperluas hubungan ekonominja dengan pasaran dunia Sosialis yang stabil dan yang tidak mengenal krisis.

Angka² statistik pemerintah yang terakhir menunjukkan kenaikan dalam hubungan perdagangan dengan negara² sosialis dalam tahun 1958 dan permulaan tahun 1959 dibandingkan dengan tahun 1957. Ekspor ke-negara² Sosialis yang dalam tahun 1957 ha-

nja 3½% (seluruh ekspor Indonesia 11 milyar rupiah), dalam tahun 1958 menjadi dua kali lipat, sedangkan impor dari negara² Sosialis yang dalam tahun 1957 hanya kira² 4% (seluruh impor Indonesia 9 milyar rupiah), dalam tahun 1958 juga menjadi dua kali lipat. Jadi krisis AS yang terakhir membawa perkembangan baru dalam perdagangan Indonesia dengan negara² Sosialis. Sebaliknya ekspor ke Eropa Barat dan Amerika Serikat setara langsung dan melalui Singapura (termasuk minjak tanah) mengalami kemunduran dari Rp. 8,1 milyar dalam tahun 1957 menjadi Rp. 5,7 milyar dalam tahun 1958 atau merosot dengan 2,4 milyar rupiah devisa (hampir 30%). Dengan sendirinya impor dari negara-negara kapitalis juga merosot.

Tetapi, walaupun sudah ada kemajuan dalam perdagangan dengan negara² Sosialis, terutama dengan Uni Soviet dan RRT, politik perdagangan luar negeri Indonesia masih tetap berat ke Barat. Negeri² kubu Sosialis adalah produsen dari lebih sepertiga daripada produksi industri dunia, sedangkan perdagangan Indonesia dengan negara² Sosialis masih dibawah 10%. Baru dapat kita katakan bahwa politik perdagangan luar negeri Indonesia tidak berat sebelah jika perdagangan Indonesia dengan negara² Sosialis sudah meliputi paling kurang sepertiga dari seluruh perdagangan.

Pemerintah Indonesia sekarang belum mengadakan tindakan² yang cukup penting dan sungguh² guna meluaskan hubungan dengan negeri² kubu Sosialis agar dapat mengurangi beban Indonesia dari akibat² krisis ekonomi negeri² imperialis. Dalam kata² sudah banyak diutarakan oleh pejabat² resmi tentang mengubah orientasi perdagangan luar negeri, tetapi dalam perbuatan orientasi perdagangan luar negeri Indonesia masih tetap berat ke AS, Inggris, Jerman Barat, Jepang dan negeri² imperialis lain².

Dalam hubungan dengan perdagangan luar negeri kenyataan masih menunjukkan, bahwa sekalipun perusahaan² Belanda sudah diambilalih, saluran perdagangan Belanda diluar negeri masih digunakan dengan alasan „tradisi” dan „ahli”. Masih digunakannya sistem transit dalam perdagangan luar negeri, dalam hal ini Bremen dan Antwerpen, menunjukkan masih kuatnya ikatan perdagangan luar negeri Indonesia dengan pasaran kapitalis. Tindakan ini sampai batas² tertentu merugikan kaum monopolis Belanda, tetapi tidak berarti besar bagi perbaikan ekonomi Indonesia. Merugikan Belanda memang penting, tapi yang lebih penting ialah supaya menguntungkan Indonesia. Baru besar artinya bagi perbaikan ekonomi Indonesia jika Indonesia samasekali meninggalkan sistem transit dalam perdagangan luar negerinya.

Dimasa lampau tjara penguasaan modal monopoli Belanda atas perdagangan impor-ekspor Indonesia adalah dilakukan melalui sistem „persetudjuan² agen tunggal” („sole agency agreements”) dari pabrik² dan industri² besar di-negeri² Barat. Sistem ini didasarkan atas prinsip liberalisme dalam perdagangan luar negeri, yaitu bebas mengimpor dan bebas mengekspor dari dan ke negeri mana saja yang disukai oleh pedagang. Bertjokolnya sistem „persetudjuan² agen tunggal” ini dengan sendirinya berarti kuatnya kedudukan monopoli industri² Barat dipasaran Indonesia dengan segala kesewenang²annya dalam politik harga mereka. Melalui sistem ini kaum monopolis Belanda sebagai agen tunggal dari kebanyakan industri² besar di Barat, menerima komisi² atas pendjualan barang²nya dipasaran Indonesia. Komisi² ini, yang merupakan pendapatan yang luarbiasa besarnya, dikirim langsung oleh industri² Barat ke-kantor² pusat kongsi² Belanda di Nederland. Sekalipun perusahaan² Belanda sudah diambilalih dan dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia, tetapi selama transaksi² perdagangan dengan Barat itu masih diteruskan dan Indonesia masih terus dibikin tergantung pada pasaran dunia kapitalis, maka selama itu pula komisi² besar masih terus mengalir ke Nederland atas kerugian Rakyat Indonesia sebagai konsumen. Kenyataan ini menunjukkan betapa modal Belanda masih mempunyai kekuasaan dalam perdagangan luar negeri kita, khususnya impor kita.

Djelaslah mengapa kaum modal monopoli asing berkepentingan sekali untuk, melalui agen² mereka di Indonesia, mempertahankan terus sistem liberal dari impor Indonesia. Siapapun mengetahui bahwa dengan sistem impor yang liberal ini adalah sukar untuk bisa mengambil langkah² yang njata guna memperluas perdagangan luar negeri kita dengan negeri² Sosialis. Kita tidak bisa memperluas perdagangan kita dengan negeri² Sosialis apabila tidak ditijptakan sjarat² dan kemungkinan² untuk membeli dari negeri² itu. Padahal, negeri² Sosialis tidak hanya merupakan pasaran yang stabil dan luas bagi barang² ekspor kita, tetapi juga merupakan sumber yang tepertjaja untuk mendapatkan barang² modal dan barang² konsumsi yang kita butuhkan. Ini merupakan sjarat objektif yang baik untuk mengatasi kemacetan dalam impor-ekspor dan produksi kita. Sjarat² cukup banyak untuk memperluas hubungan ekonomi dan teknik dengan negeri² Sosialis *atas dasar persamaan dan saling menguntungkan*, jadi tidak atas dasar keuntungan satu pihak saja.

Pemerintah Ali Sastroamidjojo yang pertama pernah mulai menerobos ikatan sistem liberal tsb. dengan mengadakan sistem „impor berentjana” („import planning”) dan pembayaran dengan djalan „clearing” („clearing payment”). Tetapi sistem impor berentjana

ini tidak mentjapai maksud mengatasi liberalisme dalam impor atau dalam perdagangan luarnegeri umumnja, sebab apa jang didjalkan oleh Pemerintah Ali Sastroamidjojo pada pokoknja hanja memindahkan pembagian devisen dari tangan importir² asing ketangan importir² partikelir nasional jang pada waktu itu berdjumlah kira² 6.000.

Impor atau perdagangan luarnegeri jang berentjana seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi dalam negeri jang berdasarkan politik pembangunan ekonomi jang kongkrit. Motif perdagangan luarnegeri seharusnya tidak terutama mengedjar devisen (mata-uang asing) tetapi untuk mendapatkan barang² modal, bahan² baku dan sedjumlah barang² kebutuhan Rakjat se-hari².

Segi jang baik dari tindakan Kabinet Ali Sastroamidjojo ialah pelaksanaan sistim pembayaran setjara „clearing“, artinja dalam djangka waktu tertentu diadakan perhitungan nilai barang² jang diexpor dan diimpor antara Indonesia dengan negara lain dan pembayaran baru diselesaikan setelah djangka waktu itu habis. Sistim „clearing“ inilah jang telah memungkinkan adanja orientasi baru dalam perdagangan luarnegeri Indonesia, jaitu dengan memasuki pasaran² baru, chususnja pasaran Sosialis. Djika sistim ini dikembangkan bisa mengadakan politik perdagangan luarnegeri jang baru dan jang menjambung pada politik pembangunan, jaitu politik impor jang disesuaikan dengan djurusan dan perkembangan expor kita guna memenuhi kebutuhan ekonomi dalam negeri.

Tetapi sistim „clearing“ tidak berlangsung lama, karena politik impor liberal dari „sosialis“ Sumitro, Menteri Perekonomian dalam kabinet B.H., telah menghapuskan sistim „clearing“ ini dan dengan demikian kembali meliberalisasi sistim impor kita. Sajangnja, sistim liberal jang dipulihkan kembali ini pada pokoknja masih sadja tetap dipergunakan sampai kini, ketjuala untuk satu-dua negeri, jaitu Tjekoslowakia, Mesir dan RRT.

Djadi kalau Indonesia ingin mengatasi kematjetan dalam ekonominja dan ingin mendapatkan barang² jang sangat diperlukan untuk memperbaiki keadaan ekonominja, maka djalan jang se-baik²nja ialah menghapuskan sistim liberal tsb. dan kembali kesistim „clearing“, terutama dalam perdagangan dengan neger² Sosialis, neger² Asia-Afrika dan Amerika Latin. Politik impor kita harus disesuaikan dengan rentjana pembangunan jang kongkrit dan urgen sehingga barang² jang diimpor sungguh² berguna untuk mengatasi krisis ekonomi sekarang. Dengan djalan ini orientasi jang masih sangat berat ke Barat dalam struktur perdagangan luarnegeri kita dapat dirombak.

Bertalian dengan masalah impor ini, perlu diperhatikan bahwa

Pemerintah Djuanda jll. telah mengeluarkan peraturan impor baru, jang djika dilaksanakan setjara baik memang bisa membantu untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Menurut peraturan impor baru ini, Pemerintah menguasai langsung impor barang² penting (1. kapas kasar, 2. benang tenun, 3. tekstil, 4. kertas, 5. semen, 6. besi beton dan besi pengikat beton, 7. tinsplate, 8. goni jute, 9. tepung trigu). Selain daripada 9 djenis barang² ini ada 4 barang lain jang djuga masuk penguasaan Pemerintah (1. beras, 2. tjengkeh, 3. cambrics dan 4. rabuk). Jang diserahi tugas melaksanakan impor barang² ini ialah „8 Besar“ jang sepenuhnya bekerdja dengan modal negara (CTC, Usindo, PT Indestin, PT Indivitra, PT Juda Bhakti, PT Mira Sari, PT Satya Negara, PT Triangle).

Segi positif peraturan impor baru ialah, bahwa dengan ini dipenuhilah sebagian daripada tuntutan Rakjat supaya impor barang-barang penting dikuasai oleh Pemerintah, dan dengan demikian berarti bahwa 75% daripada nilai seluruh impor jang berupa devisen berada ditangan Pemerintah. Dengan tindakan ini, djika dilaksanakan dengan konsekwen, maka dapatlah diachiri permainan daripada lk. 4.000 importir, jang pada umumnja avonturir dan spekulasi-spekulasi legal dan illegal.

Tetapi peraturan impor baru bisa gagal dalam pelaksanaannja djika tidak segera diikuti oleh tindakan² jang diperlukan. Perusahaan² „8 Besar“ ini harus didjaga agar tetap sepenuhnya milik negara. Selain daripada itu harus dipetjahkan masalah badan pelaksana impor-expor dan penjalurannja, misalnja dengan mendirikan *Badan Impor-Expur Negara* jang tunggal, sedangkan perusahaan² „8 Besar“ hanja mendjadi penjalur barang² impor dan expor itu. Dengan demikian dapat dihindari persaingan diantara perusahaan² „8 Besar“ jang bisa terdjadi karena perebutan keuntungan dan perebutan komisi diantara pengurus²nja.

Tindakan lebih landjut ialah supaya Badan Impor-Expur Negara dan „8 Besar“ serta semua perusahaan negara jang bentuk dan statusnja ber-matjam² seperti NV atau PT, Jajasan dll. diatur statusnja oleh Undang² Perusahaan Negara jang menetapkan prinsip-prinsip antara lain seperti berikut : sepenuhnya modal pemerintah pusat atau swatantra, pimpinan atau pengusahaan harus langsung oleh pemerintah pusat atau swatantra, dibentuk dewan pertimbangan atau dewan penasehat dimana ikutserta wakil² serikat-buruh jang bersangkutan, upah dan djaminan sosial kaum buruh diperbaiki.

Dengan berkomplot dengan kapitalis² besar asing dan kakitangan-kakitangannja jang bertjokol dipemerintahan, kaum pengusaha impor partikelir jang berkepalabatu, kaum spekulasi dan tu-

kang tjatut besar tentu akan mengadakan perlawanan dengan sekuat tenaga terhadap tindakan² madju Pemerintah dilapangan impor dan distribusi a.l. dengan menggunakan „relasi² baik” mereka diluarnegeri untuk mensabot usaha² Pemerintah. Oleh karena itu Pemerintah dan Rakjat harus waspada, dengan pandai dan teguh mematahkan perlawanan kaum reaksioner dilapangan ekonomi ini.

Kawan² !

Untuk menghentikan kemerosotan jang terus-menerus dilapangan ekonomi, dan terutama untuk melepaskan Indonesia dari akibat buruk krisis dunia kapitalis, kita mengadakan tuntutan² sbb. :

Pertama, supaya produksi dalam negeri diperbesar, antara lain dengan djalan membikin perusahaan² milik kolonialis Belanda jang telah diambilalih menjadi sepenuhnya milik negara, dengan sendirinja termasuk Bank² Belanda di Indonesia. Saham² Belanda dalam BPM harus dioper oleh Pemerintah Indonesia. Djuga perusahaan² KMT harus disita dan dijadikan milik negara. (*Tepuktangan*). Perusahaan² negara harus terus diperluas dan diperkuat sehingga menduduki „posisi komando”. Dengan djalan kerdjasama antara Pemerintah, para ahli dan Rakjat pekerdja segala usaha supaya dilakukan untuk merealisasi politik sedapat mungkin memenuhi kebutuhan sendiri dalam perekonomian, dan terutama sekali dalam soal bahan makanan dan pakaian, atau dalam istilah sekarang sandang-pangan. (*Tepuktangan*). Untuk suksesnja peningkatan produksi di-perusahaan² negara harus dilaksanakan prinsip „*pimpinan patriotik, pertinggi produksi, tjegah korupsi dan sabotase, djamin demokrasi dan perbaiki nasib buruh*”. (*Tepuktangan*). Untuk memperbesar produksi bahan makanan areal tanahgarapan harus diperluas, tjara mengerdjakan tanah harus lebih intensif dan tingkathidup kaum tani harus diperbaiki.

Kedua, supaya ekspor-impor dan distribusi bahan² penting sepenuhnya ditangan Pemerintah. Pemerintah harus mendjalankan politik harga rendah jang disesuaikan dengan kemampuan dajabeli Rakjat. Penjelundupan dan barter-liar supaya diberantas sampai ke-akar²nja. Pemerintah supaya sungguh² mengutamakan ekonomi sektor negara, sebagai djaminan dapatnja Pemerintah mengendalikan seluruh perekonomian negeri dan menggerowoti kekuasaan ekonomi modal asing. Masalah komunikasi dan transpor harus mendapat pemetjahan segera.

Ketiga, prinsip perdagangan luarnegeri harus diubah. Perdagangan luarnegeri harus dititikberatkan pada usaha merombak orientasi jang berat sebelah ke-negara² imperialis dengan djalan meluaskan hubungan dagang dengan negeri² A-A dan dengan negeri² Sosialis jang tidak mengenal krisis ekonomi, agar tertjapai

maksud lebih meluaskan pasaran bagi bahan² ekspor Indonesia dan untuk mendapatkan barang² modal jang diperlukan untuk mendirikan industri, terutama industri guna mengolah sendiri bahan-bahan mentah jang dihasilkan Indonesia. Djuga supaya kedatangan tjukup bahan² baku untuk keperluan industri dalam negeri. Devisen jang dihasilkan oleh maskapai² minjak asing supaya dapat dikuasai oleh Pemerintah dan digunakan untuk melantjarkan pembangunan dalam negeri dan untuk menjehatkan keuangan negara.

Keempat, supaya Pemerintah berusaha mengatasi keperluan akan barang² modal dan teknik dari luarnegeri melalui pindjaman luarnegeri dengan bunga jang serendah-rendahnja dan tanpa ikatan politik atau militer, baik ikatan setjara terang²an maupun rahasia, untuk keperluan rehabilitasi dan pembangunan industri negeri kita dan untuk mengeksploitasi pelikan (mineral) jang banjak ragam dan djumlahnja jang terdapat didalam bumi negeri kita. Dalam rangka pindjaman luarnegeri harus dipentingkan djuga pembangunan tanur², pabrik² kimia dan pabrik² jang memproduksi mesin² dan alat² produksi lainnja sebagai usaha permulaan untuk membebaskan Indonesia dari ketergantungan dalam ekonomi pada luarnegeri. Undang² Penanaman Modal Asing harus dibatalkan. (*Tepuktangan*).

Dengan melaksanakan tuntutan² diatas, maka akan tertijptalah sjarat² untuk melepaskan Indonesia dari tjengkeraman krisis ekonomi jang terus-menerus dan hingga sekarang berlangsung di negeri kita. Djadi, kemerosotan ekonomi jang terus-menerus di Indonesia dapat diatasi, dengan melaksanakan tuntutan² diatas, dan bukan dengan djalan mengundang penanaman modal asing, memperberat padjak Rakjat, mempartikelirkan atau mejajasankan perusahaan² negara dan tindakan² reaksioner lainnja dilapangan ekonomi dan keuangan.

Pelaksanaan tuntutan² ekonomi tsb. tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan tuntutan² Rakjat banjak sekarang, jaitu membasmi habis sisa² pemberontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta” (*tepuktangan*) dan gerombolan² teror DI-TII dan melakukan tindakan-tindakan „tangan besi” terhadap pengatjau² ekonomi dari kaum modal besar asing jang berkomplot dengan kaum komprador dan elemen² parasiter, baik sivil maupun militer, jang ada didalam badan² ekonomi dan aparat² pemerintah. (*Tepuktangan*).

Untuk memulihkan sepenuhnya keamanan dalam negeri dan memperbaiki keadaan ekonomi semua kekuatan nasional perlu dibangkitkan dan digerakkan. Telah menjadi pengalaman Rakjat, bahwa sedjak persetudjuan KMB kabinet² silihberganti, tetapi ternjata

belum ada kabinet yang cukup kuat untuk mengatasi kesulitan² yang menimpa negeri dan Rakyat. Rakyat sudah mengalami kabinet² yang anti-Komunis seperti kabinet² Hatta, Natsir, Sukiman dan BH (Burhanuddin Harahap). Kabinet² ini bukan hanya tidak mampu mempetjahkan masalah² mendesak daripada Rakyat, tetapi telah menjeret Indonesia lebih jauh kedalam jurang krisis ekonomi dan perpetjahan nasional. Kabinet² non-Komunis, yaitu tanpa orang Komunis turut didalamnya, tetapi disokong oleh Komunis, seperti kabinet Wilopo, kabinet² Ali Sastroamidjojo pertama dan kedua dan kabinet Djuanda juga tidak berdaya dalam mengangkat Indonesia dari krisis. Bertjermin kepada pengalaman² ini dan berpedoman pada gagasan² yang terkandung dalam Konsepsi Presiden Sukarno, adalah pada tempatnya dan adil jika Rakyat dalam rangka pelaksanaan UUD 45 menuntut pembentukan Kabinet Gotongrojong dibawah pimpinan Presiden Sukarno, (*tepuktangan lama*)¹ dimana didalamnya diwakili setjara adil partai² dan golongan-golongan kerja yang mempunyai ke-sungguhan² untuk melaksanakan tjita² Revolusi Agustus 1945 yang bersifat nasional dan demokratis. Hanya dengan Kabinet Gotongrojong, yaitu kabinet dengan orang² Komunis, akan dapat semua kekuatan nasional dibangkitkan dan digerakkan setjara besar² untuk mengatasi kesulitan² apa saja yang dihadapi oleh negeri dan Rakyat kita, termasuk krisis ekonomi yang sudah ber-larut² ada harapan dapat diatasi.

(4) Pengangguran, Kemiskinan, Ketidakadilan Ekonomi dan Sosial

Sebagai akibat krisis ekonomi di Indonesia yang makin mendalam, ditambah dengan meradjaletannya perdagangan spekulasi sehingga harga barang² kebutuhan hidup se-hari² menjadi tak terkendalikan samasekali, dan ditambah lagi dengan politik harga Kementerian Perdagangan yang tunduk pada kaum spekulan, penderitaan Rakyat pekerja Indonesia makin lama makin bertambah berat.

Kaum buruh: Sebagai akibat krisis ekonomi yang diderita oleh Indonesia, kehidupan kaum buruh bertambah berat. Kaum buruh Indonesia dihadapkan pada kesulitan² pokok a.l. sebagai berikut:

- * Kemerosotan terus-menerus daripada tingkat hidup kaum buruh, pegawai dan Rakyat pekerja pada umumnya;
- * Terus membubungnja harga barang² kebutuhan hidup yang pokok dengan tjepat;

* Bertambah besarnya antjaman pemertjatan dan meluasnja pengangguran;

* Bertambah sempitnja kesempatan kerja karena tidak berkembangnja industri sektor negara dan partikelir nasional.

Menurut statistik Kementerian Perburuhan tahun 1956 dari jumlah 3.896 perselisihan antara buruh dengan majikan, 2.893 perselisihan adalah mengenai persoalan upah dan pemertjatan. Dalam tahun 1957 angkanya ialah 4.131 perselisihan, 3.216 mengenai persoalan upah dan pemertjatan, sedangkan dalam tahun 1958 dari sebanyak 3.350 perselisihan, 2.613 mengenai upah dan pemertjatan.

Menurut buku statistik resmi tahun 1959, selama 4 tahun dari 1954 sampai tahun 1958 dapat disimpulkan, bahwa kenaikan upah rata² sebesar 50%. Juga dikalangan pegawai dan pekerja negeri selama 4 tahun tertjatat kenaikan² gaji dan yang terakhir dikeluarnya PP 7/1959, yaitu peraturan yang mengatur berlakunya index 135 dengan pengurangan tundjangan kemahalan daerah, mengatur kenaikan pensiun bagi para pensiunan pegawai serta 10% kenaikan upah bagi para pekerja negeri. Tetapi dengan kenaikan upah yang diperjuangkan dengan susah-pajah itu, nasib kaum buruh dan pegawai negeri tidak menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan karena kenaikan harga² kebutuhan hidup jauh lebih tinggi dari kenaikan upah. Index 19 matjam barang² kebutuhan se-hari² menurut BPS (Biro Pusat Statistik) tertjatat angka 106 untuk tahun 1954 dan 258 untuk tahun 1958 (1953 = 100) atau dalam 4 tahun ini harga² naik dengan 143%. Ini berarti upah riil tahun 1954 yang sudah sangat rendah itu tidak dapat dipertahankan dan sampai tahun 1958 merosot dengan 38%. Keadaan pada pertengahan tahun 1959 bertambah suram dengan sangat tjepatnya meningkat harga barang² kebutuhan se-hari², terutama tekstil, gula, minyak kelapa, ikan asin dll. Dengan demikian komposisi dan mutu makanan serta kebutuhan hidup lainnya dari kaum buruh bertambah merosot menjadi komposisi dan mutu yang lebih jelek, hal mana terang mengantjam kesehatan jasmani dan rohani kaum buruh. Lazimnya keadaan penghidupan Rakyat pekerja adalah lebih buruk daripada apa yang dinjatakan oleh laporan² resmi burdjuis. Upah rata² sekarang dengan wujud uang Rp. 6,50 dan ditambah natura menjadi rata² Rp. 10,—, sedangkan disamping itu masih ada kaum buruh lepas yang menerima upah sehari antara Rp. 4,50 — Rp. 5,—, yang berarti hanya kira² cukup untuk membeli 1 liter beras.

Dalam bidang per-undang²an yang langsung menjangkut soal² perburuhan perlu ditjatat tentang Undang² yang meratifikasi Konvensi I.L.O. No. 98 yang memuat larangan bagi majikan untuk

menggunakan segala matjam dajaupaja untuk menghalangi atau menghambat kemajuan pertumbuhan organisasi serikatburuh; Undang² jang meratifikasi Konvensi I.L.O. No. 100 tentang hapusnja perbedaan² upah antara buruh wanita dengan² buruh laki²; Undang² No. 22 tahun 1957 tentang penjelesaian perburuhan jang sedikit lebih demokratis daripada Undang² Darurat No. 16 tahun 1951. Pengalaman sampai sekarang ini ternjata, bahwa kemenangan jang ditjapai dalam bidang per-undang²an jang sebenarnya tjukup penting bagi perkembangan organisasi serikatburuh belum dengan sungguh² dilaksanakan Pemerintah. Oleh serikatburuh² pelaksanaan undang² ini masih belum tjukup kuat dituntut.

Laporan Kementerian Perburuhan jang terachir menggambarkan disatu fihak bertambahnja tenaga-kerdja sebagai akibat dari bertambahnja penduduk jang menurut taksiran dengan kira² 1.500.000 orang setahun, sedangkan difihak lain kesempatan bekerdja bukanja bertambah melainkan berkurang. Kebangkrutan perusahaan² nasional dan pembubaran jajasan² pemerintah mengakibatkan pemertjatan massal. Djuga modernisasi dibeberapa perusahaan besar asing, terutama di-perusahaan² minyak, disamping membawa kenaikan produksi jang besar sehingga lebih menguntungkan kaum monopolis asing, telah menambah djumlah pengangguran.

Bagi kaum imperialis, Indonesia masih tetap merupakan tempat penanaman kapitalnja dan gudang tenaga buruh jang murah. Mereka dengan sekuat tenaga berusaha tidak hanja untuk mempertahankan kapitalnja jang sudah ditanam di Indonesia, tetapi djuga untuk menambahnja. Modernisasi hanja mereka lakukan apabila tindakan ini lebih banjak mendatangkan keuntungan daripada djika menggunakan tenaga manusia jang murah. Mereka pada pokoknja mengedjar keuntungan se-besar²nja dengan memaksa kaum buruh Indonesia untuk memproduksi lebih banjak dengan upah jang tetap rendah. Mereka mengintensifkan penghisapannja dengan menambah kewadajiban kerdja, memperpanjang djam-kerdja dengan mempraktekkan kerdja lembur paksa, mengubah status buruh tetap mendjadi buruh lepas supaya dapat membebaskan diri dari keharusan memberi djaminan sosial, dan selandjutnja dengan menjerahkan bagian² tertentu dari pekerdjaan kepada pemborong² supaya bisa membebaskan diri dari ketentuan² jang ditetapkan didalam perdjandjian kerdja kolektif antara madjikan dengan serikatburuh². Malahan belakangan ini ada djuga usaha² dari agen² imperialis untuk menambah djamkerdja jang sekarang 7 djam mendjadi 8 djam sehari.

Oleh karena itu, adalah kewadajiban Partai kita dan serikatburuh² untuk dengan gigih melawan pemertjatan, mentjegah kenaikan har-

ga, berdjuaug untuk kenaikan upah, kenaikan pangkat dan perbaikan djaminan sosial kaum buruh dan pegawai. (Tepuktangan).

Dewasa ini disementara kalangan sedang ramai dipersoalkan tentang mempertinggi produktivitet kerdja dengan sembojan „untuk mempertinggi pendapatan nasional“. Memang, adalah kewadajiban jang terhormat untuk memperbesar pendapatan nasional. Tetapi adalah keliru djika pemetjahan persoalan ini didasarkan atas pandangan kapitalis jang djuga dengan sekuat tenaga berusaha mempertinggi produktivitet kerdja dengan tudjuan lebih memperbesar keuntungan kaum kapitalis monopoli. Pemetjahan mengenai persoalan ini hanja mungkin djika dihubungkan dengan soal merombak struktur ekonomi Indonesia dari ekonomi kolonial mendjadi ekonomi nasional, dari ekonomi jang hidupmatinja tergantung pada impor-expor mendjadi ekonomi jang merdeka berlandaskan industri nasional dimana peranan utama ada pada ekonomi sektor negara. Setiap usaha mempertinggi produktivitet kerdja didalam rangka struktur ekonomi lama atau ekonomi kolonial jang masih berlaku sampai sekarang, tidak akan membawa hasil jang menguntungkan Rakjat pekerdja dan kepentingan nasional, ia akan menguntungkan kaum kapitalis monopoli, dan oleh karena itu tidak mungkin didukung oleh Rakjat pekerdja. Di-perusahaan² dan djawatan² pemerintah mungkin produktivitet kerdja dipertinggi, djika pemerintah jang berkuasa didukung oleh Rakjat dan ada perhatian pemerintah jang pantas terhadap perbaikan nasib kaum buruh dan pegawainja.

Kaum tani: Kaum tani Indonesia dewasa ini mengalami bermacam² penindasan dan gangguan a.l. sbb. :/

- * penindasan dari fihak tuantanah dan lintahdarat berhubung masih bertjokolnja sisa² feodalisme;
- * gangguan gerombolan² DI-TII dan sisa² bandit „PRRI-Permesta“ jang dibantu oleh tuantanah² dan pengusaha² asing serta dipersendjatai oleh kaum imperialis.

Bagian terbesar penduduk Indonesia, jaitu antara 60-70% dari seluruh penduduk terdiri dari kaum tani. Pada waktu sekarang, bagian terbesar dari kaum tani adalah kaum tani jang tidak memiliki atau tidak tjukup memiliki tanah. Hakmilik atas bagian jang sangat besar dari tanah garapan berada ditangan sedjumlah ketjil tuantanah bumiputera dan ditangan kapitalis² monopoli asing. Tetapi walaupun bagian terbesar kaum tani tidak memiliki atau tidak tjukup memiliki tanah, segala bentjana jang dialami oleh desa dan pertanian djuga mendjadi tanggungan kaum tani, seperti bentjana alam, musim hudjan atau musim kemarau jang tidak tentu, gangguan hama dan gerombolan² bersendjata.

Dalam rangka persiapan Kongres Nasional ke-VI ini kader² Partai telah mengadakan gerakan „turun kebawah“, antara lain pengiriman kader² tinggi dan menengah untuk mengadakan penjelidikan (research) tentang hubungan² agraria didesa dan penghidupan kaum tani. Hasil² penjelidikan ini belum dapat dikatakan sempurna, tetapi ia merupakan permulaan yang sangat penting untuk memperbaiki pekerdjaan Partai dikalangan kaum tani. Setelah Kongres ini pekerdjaan penjelidikan harus kita landjutkan dengan lebih luas dan lebih mendalam. Dari penjelidikan² yang sudah kita lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa disatu pihak beberapa orang tuantanah didesa menguasai tanah yang sangat luas, dan ada kalanya menguasai lebih daripada separoh tanah didesa. Difihak lain buruhtani dan tanimiskin yang berdjumlah lebih daripada separoh penduduk desa, dan ada yang sampai berdjumlah sampai 90% daripada penduduk desa, ada kalanya memiliki kurang daripada separoh tanah didesa. Umumnya penggarap² tanah tuantanah harus membayar sewatanah 50% atau lebih dari hasil panen.

Kaum burdjuis Indonesia, bahkan djuga yang madju diantara mereka, karena kedudukan mereka yang masih erat berhubungan dengan sisa² feodalisme, pada umumnya masih menghindari tjara yang revolusioner dalam mengubah pemilikan tanah tuantanah menjadi pemilikan tanah kaum tani yang langsung mengerdjakan tanah. Dengan begitu sudah tentu masalah membebaskan kaum tani dan membebaskan tenaga² produktif didesa tidak akan tertjapai. Oleh karena itu harapan kaum tani satu²nja ialah pada pelaksanaan Program Agraria yang revolusioner dari PKI, pada pelaksanaan sembojan „tanah untuk petani“ yang dikibarkan tinggi oleh PKI. (*Tepuktangan*).

Partai kita menilai dan mendorong ber-matjam² usaha Pemerintah yang ditudjukan untuk memperbaiki keadaan didesa dan kedudukan kaum tani seperti :

- * Diundangkannya UU Penghapusan Tanah Partikelir, UU Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Perkebunan dan UU Tentang Tindakan² Terhadap Perkebunan Asing serta Peraturan² Pemerintah mengenai penyelesaian sengketa tanah antara kaum tani dengan pihak perkebunan dan Djawatan Kehutanan. Peraturan² ini sedikit atau banyak memudahkan kaum tani memperdjuangkan tuntutan²nja;
- * Bantuan kredit pemerintah untuk kaum tani dan kegiatan² Djawatan Pemerintah dilapangan pertanian dan dikalangan kaum tani;

- * Usaha² Pemerintah untuk mengikutsertakan wakil² kaum tani dalam berbagai badan atau panitia yang dibentuk oleh Pemerintah;
- * Usaha² Pemerintah untuk memadjukan koperasi² tani guna meningkatkan produksi pertanian dan memperbaiki penghidupan kaum tani.

Tetapi walaupun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa nasib kaum tani sekarang masih belum mengalami perubahan yang berarti, bahkan pada tahun² belakangan ini menjadi lebih buruk. Oleh karena itu, sekejapapun tidak boleh dilupakan, bahwa tudjuan terpenting gerakan tani ialah menghapuskan samasekali sisa-sisa feodalisme.

Kaum Miskin Kota : Kalangan burdjuasi ketjil yang belum tjukup mendapat perhatian Partai ialah kaum miskin kota, yang djumlahnya tidak sedikit. Dalam hubungan dengan memperbaiki pekerdjaan Partai di-kota², haruslah diperbaiki pekerdjaan membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa kaum miskin kota yang antara lain terdiri dari bakul yang mendjadikan barangdagangan yang diterimanya dari djuragan, tukang loak, tukang betja yang memiliki sebuah betja untuk ditarik sendiri, tukang warung ketjil, tukang sol sepatu, tukang pateri, tukang potong rambut dll. lagi. Walaupun ada diantara kaum miskin kota ini yang mempunyai alat produksi yang sederhana, tetapi penghidupannya umumnya sengsara.

Djumlah kaum miskin kota dalam tahun² belakangan ini menjadi lebih besar dengan adanya urbanisasi, yaitu perpindahan sebagian dari kaum tani miskin atau buruhtani dari desa ke kota. Kebanyakan dari mereka tidak mempunyai tjukup modal untuk bisa berusaha sendiri setjara ketjil²an sedang untuk mendapat pekerdjaan sebagai buruh adalah sukar berhubungan sempitnya lapangan kerdja atau berhubungan diperlukannya pengetahuan minimum tentang sesuatu vak. Masalah kaum miskin kota adalah djuga suatu problem masyarakat yang serius, bukan hanya karena tenaga yang banjak ini sampai sekarang tidak dapat digunakan setjara baik dalam lapangan produksi, tetapi karena banjak diantara mereka masih muda² dan djumlahnya makin lama makin besar.

Kaum miskin kota, sebagaimana halnya dengan burdjuasi ketjil pada umumnya, termasuk tenaga penggerak revolusi. Tetapi dalam keadaan penghidupan yang terlalu sukar, sebagian dari kaum miskin kota dapat dipergunakan oleh madjikan² sebagai pematah pemogokan, atau bisa sampai tertarik pada fikiran² yang ekstrim atau liar sehingga dapat ditarik oleh kaum petualang untuk menjadi anggota gerombolan pengatjau. Mereka mudah merosot menjadi

orang gelandangan. Oleh karena itu, Partai harus bekerdja lebih baik dikalangan kaum miskin kota, mengorganisasi mereka dalam organisasi² yang sesuai dengan kepentingan mereka sehari-hari guna perbaikan penghidupannya.

Kaum Nelajan : Karena Indonesia adalah negeri kepulauan, berdjuta² penduduknya berdiam ditepi pantai dan hidup sebagai nelajan. Kaum nelajan mempunyai peranan penting dalam produksi bahan makanan yang berupa ikan dan ada kalanya mereka mempunyai peranan penting dalam melindungi keamanan dan keselamatan negeri serta juga dalam melantjarkan pengangkutan pantai dan sungai. Ketjuali bagian yang sangat ketjil nelajan² kaya, sebagian terbesar daripada kaum nelajan kita hidup dalam kesengsaraan dan keterbelakangan. Sebagian diantara mereka hidup sebagai buruh nelajan yang dihisap oleh djuragan² sero dan djuragan² perahu besar, yang juga melakukan penghisapan sebagai lintah-darat dan tengkulak. Tingkat kebudayaan kaum nelajan kita pada umumnya masih rendah, alat² kerdjanja kuno sedang hubungan kerdjanja pada umumnya masih bersifat feodal.

Massa kaum nelajan merupakan tenaga penggerak revolusi bersama² dengan klas buruh, kaum tani, klas burdjuis ketjil kota dan elemen² demokratis lainnya. Kemelaratan yang keterlaluan didesa telah menjebabkan sebagian dari kaum tani yang hidup ditepi pantai meninggalkan pertanian dan memperkuat barisan nelajan. Oleh karena itu semakin urgenlah pekerdjaan Partai dikalangan nelajan untuk mengorganisasi dan membangkitkannya dalam aksi² buat perbaikan nasib dan kebebasan² demokratis, dan juga untuk memperbaiki alat kerdja mereka, yang sekaligus akan turut membantu memetjahkan kekurangan bahan makanan yang penting bagi Rakjat Indonesia, yaitu kebutuhan yang besar akan ikan.

Djuga *inteligensia*, termasuk para pekerdja ilmu dan kebudayaan, masih tetap mengalami kesukaran². Kurangnya alat, kurangnya biaya, sukarnya kesempatan kerdja dan tingginya pajak sangat menjukarkan pekerdjaan dilapangan ilmu dan kebudayaan. Kenjataan pada waktu sekarang ialah, bahwa di-tengah² kekurangan sekolah, puluhan ribu guru SR menganggur. Adalah menggembirakan bahwa pada waktu² belakangan ini makin banyak para pekerdja ilmu dan kebudayaan serta para mahasiswa yang mentjeburkan diri kedalam gerakan progresif, yang bersimpati pada Partai atau masuk Partai. Partai harus dengan sepenuh hati bersatu dengan para pekerdja ilmu dan kebudayaan serta mahasiswa dan membantu mereka dalam mengatasi kesulitan²nja dan dalam mengembangkan bakat²nja.

Gambaran keadaan penghidupan kaum buruh, kaum tani, kaum miskin kota, nelajan dan inteligensia seperti didjelaskan diatas menunjukkan bahwa penderitaan sebahagian yang sangat terbesar dari Rakjat Indonesia memang bertambah berat. Pengangguran, kemiskinan, ketidakadilan ekonomi dan sosial makin meradjalela. Mereka adalah korban dari krisis ekonomi sekarang, korban dari-pada politik Pemerintah² yang kurang mentjerminkan kepentingan nasional dan kepentingan Rakjat banjak.

(5) Memperbaiki Pekerdjaan Front Nasional Dan Mementjilkan Lebih Landjut Kekuatan Kepala-batu

Kawan²!

Setjara politik dalam tahun² belakangan ini Indonesia bergeser kekiri. Sesudah berlangsung pemilihan umum Parlemen yang pertama dinegeri kita, Sidang Pleno ke-IV CC Partai telah menganalisa dan menjimpulkan adanya tiga matjam kekuatan politik yang hampir seimbang, yaitu kekuatan kepala-batu, kekuatan progresif dan kekuatan tengah yang masing² mempunyai konsep sendiri-sendiri tentang penyelesaian Revolusi Agustus 1945.

Djadi, didalam negeri kita dewasa ini terdapat kontradiksi² diantara tiga kekuatan ini, kontradiksi yang satu lebih tadjam daripada kontradiksi yang lain, ada kontradiksi yang tidak pokok dan ada yang pokok. Kontradiksi antara kekuatan progresif dengan kekuatan tengah adalah kontradiksi yang tidak pokok, kontradiksi dikalangan Rakjat. Sedangkan kontradiksi antara Rakjat dengan kekuatan kepala-batu adalah kontradiksi yang pokok, karena kaum kepala-batu mewakili kepentingan kaum imperialis yang memusuhi Rakjat Indonesia.

Bagaimanakah sekarang keadaan tiap² kekuatan itu? Dan bagaimana pula imbalan diantara ketiga kekuatan? Tentang ini dapat diterangkan sbb.:

Karena politik mereka yang terlalu reaksioner, sangat anti-nasional dan anti-Rakjat, „prestise” kekuatan kepala-batu sudah sangat merosot, mereka sudah kehilangan „perspektif”, mereka tidak mempunyai harapan lagi untuk kembali memimpin dan menguasai pemerintahan sentral lewat djalan parlementer. Oleh karena itulah mereka telah memaksakan konsepnya lewat djalan² extra-parlemen-ter, djalan teror dan sampai mengadakan pemberontakan untuk bisa memegang kembali tampuk pemerintahan. Mereka sudah menempuh djalan fasis. Kekuatan pokok mereka tidak lagi terletak pada kepertjajaan yang mereka dapat dari sebagian Rakjat Indonesia

jang politis paling terbelakang, tetapi pada bantuan uang, sendjata dan perlengkapan² militer lainnja dari imperialis AS, Belanda dan Kuomintang, terletak pada sementara orang² militer jang korup, pada organisasi² teror, pada sabotase² dilapangan militer, ekonomi dan keuangan, pada penjelundupan² dan barter² liar. Pada pokoknja kekuatan mereka sekarang terletak pada bantuan kaum imperialis.

Sudah semakin banjak dari pengikut² kaum kontra-revolusioner jang meninggalkan mereka, tetapi bersamaan dengan itu semakin erat hubungan mereka dengan kaum imperialis jang mendjadi dalangnja, terutama kaum imperialis AS. Djika tidak ada bantuan dari luarnegeri kekuatan kepalabatu ini sudah tidak mempunyai peranan lagi.

Walaupun demikian kekuatan kepalabatu tidak boleh diremehkan, sebab masih ada faktor² jang menguntungkan mereka. Jang pertama dan terpenting ialah kenyataan bahwa Indonesia sekarang pada hakekatnja masih merupakan negeri setengah-djadjahan dan setengah-feodal. Selama negeri kita masih setengah-djadjahan maka berartilah bahwa kekuasaan imperialis masih ada dinegeri kita, dan berarti pula bahwa dinegeri kita masih ada dasar untuk hidupnja kekuatan reaksioner, kekuatan kepalabatu. Selama negeri kita masih setengah-feodal, maka berarti bahwa kekuasaan kelas tuantanah jang kontra-revolusioner masih ada. Feodalisme adalah basis sosial daripada imperialisme. Sisa² feodalisme jang masih berkuasa dalam kehidupan ekonomi, kehidupan sosial dan kebudayaan akan selalu merupakan sumber hidup kekuatan kepalabatu.

Djadi, walaupun kekuatan kepalabatu sudah mendapat pukulan² politik jang berat, walaupun sudah semakin tertelandjangi watak anti-nasionalnja, walaupun semakin terbuka kedoknja jang memperlalat agama dan mensalahgunakan perasaan kesukuan, walaupun ia sudah semakin terang²an memusuhi Rakjat, selama negeri kita masih merupakan negeri setengah-djadjahan dan setengah-feodal, kekuatan kepalabatu masih tetap merupakan salahsatu kekuatan jang harus tidak henti²nja ditelandjangi dan dilawan dengan segenap kekuatan. (Tepuktangan lama).

Mengenai kekuatan tengah, kita telah mempunyai pengalaman². Partai kita telah menjimpulkan, bahwa kekuatan tengah disatu pihak bimbang dalam melawan imperialisme dan feodalisme karena hubungan ekonomi mereka jang belum terputus samasekali dengan kaum imperialis dan tuantanah dan karena mereka djuga termasuk kelas penghisap. Tetapi di pihak lain mereka revolusioner, karena untuk kelanjutan dan kelapangan hidupnja mereka harus menghilangkan perintang² imperialis dan tuantanah. Dengan kekuatan

progresif jang besar ditambah dengan adanya program Partai jang menguntungkan golongan tengah, dengan langgamkerdja Partai jang baik, dan dengan kemampuan kekuatan kaum progresif memberikan pukulan² jang berat dan djitu pada kaum kepalabatu, ada kemungkinan bahwa kekuatan tengah untuk waktu jang lama bersikap setia pada perdjjuangan anti-imperialis dan anti-feodal.

Djuga telah disimpulkan bahwa djika kekuatan tengah ini tidak lagi setia mendjalankan politik anti-imperialisme, djika mereka meninggalkan kepentingan klasnja dan melatjurkan diri pada kaum kepalabatu, mereka bisa ber-sama² dengan kekuatan kepalabatu mengadakan pukulan² terhadap kekuatan progresif sehingga untuk sementara waktu dapat menghalangi perkembangan gerakan demokratis. Tetapi beberapa kali pengalaman besar sudah membuktikan bahwa persekutuan kekuatan tengah dengan kaum kepalabatu, seperti ketika kabinet Hatta dan Sukiman, samasekali tidak menguntungkan kekuatan tengah, sebaliknya kepentingan ekonomi mereka makin terdesak oleh kaum monopolis asing dan komprador serta prestise politik mereka merosot karena dipersalahkan Rakjat telah ikut ambil bagian dalam mendjual Republik Indonesia dan Rakjatnja.

Kaum burdjuis nasional Indonesia pada umumnja adalah burdjuaasi dagang. Kedudukan burdjuaasi Indonesia jang sangat lemah dilapangan ekonomi membikin mereka sangat tergantung pada perdagangan ekspor dan impor, dengan tekanan pada impor, dan dengan demikian berarti tergantung pada kaum imperialis jang menguasai kedua lapangan ini. Djika kedudukan mereka sebagai burdjuaasi dagang sudah demikian lemahnja, maka lebih menjolok lagi kelemahan mereka dilapangan perindustrian.

Seandainya burdjuaasi nasional Indonesia mempunyai kedudukan jang kuat dalam lapangan perindustrian, maka mereka dalam menghadapi kaum monopolis asing akan bersikap lebih berani sebagai saingan, dimana mereka akan mempertahankan hak hidupnja sebagai industrialis dan melawan kaum imperialis. Sebagai industrialis mereka djuga akan lebih melawan sisa² feodalisme karena mereka membutuhkan djaminan pasar dalam negeri. Dalam perlawanan terhadap imperialisme dan sisa² feodalisme mereka akan bertemu dan akan sedjalan dengan massa Rakjat banjak jang djuga anti-imperialisme dan anti-feodalisme. Tetapi dalam kedudukan sebagai burdjuaasi dagang hampir semua usaha mereka tergantung pada kaum imperialis. Mereka harus menyesuaikan diri dengan sjarat² jang ditentukan oleh kaum imperialis. Seandainya ada niat untuk melawan, mereka tidak tjukup kuat. Keadaan² inilah jang mendjadi sebab daripada watak jang sangat bimbang dan sangat tidak

konsekwensi dari burdjuasi nasional Indonesia, keadaan yang telah menjadikan negeri kita tanah yang subur untuk tumbuhnya komprador² dan kapitalis² birokrat. Tetapi, difihak lain, kelemahan kedudukan ekonomis burdjuasi nasional tidak memberikan dasar materiil yang kuat untuk adanya pertentangan yang tajam antara burdjuasi nasional dengan kelas buruh pada umumnya. Hal ini sampai batas² tertentu membantu penggalangan front nasional.

Tetapi, dengan keterangan diatas tidaklah berarti bahwa burdjuasi nasional Indonesia tidak merupakan faktor politik yang penting. Mereka mempunyai pengaruh ideologi dan politik yang berarti dikalangan kaum intelektual dan alat² negara. Oleh karena itu tetap menjadi masalah yang penting soal penggalangan persatuan antara kekuatan progresif dengan kekuatan tengah, disamping berusaha mentjegah mereka berkapitulasi pada kekuatan kepalabatu dan imperialis.

Karena tidak ada kekuatan dan keberanian yang tjukup untuk melawan kaum imperialis dilapangan ekonomi, maka sesuai dengan politik imperialis, golongan² tertentu dari burdjuasi nasional mempertadjam pertentangan antara kapitalis² Indonesia sendiri, yaitu antara yang „asli” dengan yang „tidak asli”, dan bersamaan dengan ini menjebarkan ratjun sovinisme dikalangan Rakjat. Ini namanja melindungi musuh asing yang besar dan memukuli teman sendiri, musuh asing yang besar menjadi makin besar dan makin berbahaya, sedangkan teman sendiri menjadi babak-belur. Ini adalah politik „*merusak rumah sendiri untuk memasukkan pentjuri*”. Bahwa mereka memasukkan pentjuri nampak djelas dari sikap mereka yang bukan hanya tidak menolak investasi modal besar asing, tetapi malahan menjadi arsitek Undang² Penanaman Modal Asing. Kalau mereka benar² anti-modal asing, maka kewadajiban mereka yang nomor satu ialah menolak investasi modal besar asing dan menggerowoti yang sudah ada. Djika mereka tidak menolak investasi modal besar asing, tetapi menjadikan pemilik² toko dan warung ketjil asing sebagai sasarannya, maka ini bukanlah politik yang benar² nasional, tetapi politik tuantanah dan lintahdarat bumiputera yang menggunakan sovinisme untuk memperhebat eksploitasinya sendiri atas Rakjat pekerdja. Padahal kewadajiban sedjarah mereka ialah mempersatukan sebanyak mungkin kapital Indonesia, melawan kaum kapitalis besar asing dan ambil bagian dalam mengindustrialisasi negeri, yaitu menjalankan politik „*memperkuat rumah sendiri dan mengusir pentjuri*”.

Sesudah perdjjuangan anti-kolonialisme melangkah maju dengan mengambilalih perusahaan² kaum kolonialis Belanda, nampaklah dengan djelas watak egois dari sebagian kaum tengah. Setelah

kaum buruh dengan resiko yang besar dan dengan samasekali tidak mementingkan diri sendiri mengambilalih perusahaan² Belanda, maka dengan menggunakan kekuasaannya dalam pemerintahan, kaum tengah yang egois berusaha memindahkan perusahaan² itu ketangan perseorangan mereka. Disinilah bertemu kepentingan kaum tengah dengan kepentingan kaum reaksioner yang bisa merupakan landasan daripada politik reaksioner mereka bersama. Inilah salahsatu latarbelakang yang penting daripada persetudjuan² „tukang kelontong” antara burdjuasi kepalabatu dengan elemen² nasionalis kanan dengan sembojan untuk „membendung Komunisme”. Mereka kira dengan mengoper sembojan imperialis tersebut akan ada Rakjat yang mau memaafkan perbuatan anti-nasional mereka.

Kaum tengah ragu² ketika kaum buruh dengan semangat patriotisme yang tinggi dan resiko besar mengambilalih perusahaan² kolonialis Belanda. Tetapi begitu ada kesempatan tampilah mereka untuk „menjelamatkan” hasil² perdjjuangan kaum buruh, berusaha melarang kegiatan² serikatburuh dan menempatkan dirinya sebagai pengusaha² kolonialis Belanda. Politik mempartikelirkan perusahaan² Belanda yang diambilalih pada pokoknya dapat digagalkan berkat tentangan yang keras dari Rakjat Indonesia dan Presiden Sukarno. (*Tepuktangan*). Tetapi usaha kaum reaksioner untuk mempartikelirkan masih tjukup kuat, dan malahan sudah ada bukti² kearah ini.

Bahaya baru ialah bahwa sedjumlah penguasa perusahaan² tersebut mensalahgunakan kedudukannya untuk menumpuk kekayaan buat diri sendiri dengan kliknya dan merusak produksi untuk mendemonstrasikan „ketidakmampuan Pemerintah dan buruh”, dan bersamaan dengan itu ber-kaok² bahwa pengusaha² partikelir adalah lebih „tjapak”.

Berhubung dengan djatuhnya „prestise” kaum kepalabatu, untuk sementara kaum imperialis Amerika tidak dapat menjalankan politiknja di Indonesia setjara efektif lewat saluran kaum kepalabatu yang dikepalai oleh pemimpin² Masjumi dan PSI. Oleh sebab itu kaum imperialis memang sangat membutuhkan komprador² baru dari kalangan kekuatan tengah, baik sivil maupun militer, sambil berusaha menegakkan kembali kedudukan kaum kepalabatu Indonesia. Inilah latarbelakang sikap sajak kanan dari kekuatan tengah yang berusaha menarik seluruh kekuatan tengah meninggalkan politik bekerdjasama dengan kekuatan progresif.

Tetapi didalam kekuatan tengah itu djuga terdapat sajak kiri dan sentris disamping sajak kanan. Golongan sentris dalam kekuatan tengah biasanja bukanlah golongan yang kuat, tetapi yang

mampu „mengawinkan” (*tawa*) sajak kiri dan kanan, dan mempunyai ketjenderungan untuk memihak yang kuat dalam kekuatan tengah. Oleh karena itulah, kemenangan sajak kiri dalam kekuatan tengah merupakan besi berani yang bisa menarik golongan sentris kekiri, dan dengan demikian dapat mentjegah kekuatan tengah bergeser kekanan.

Sajak kiri dalam kekuatan tengah menentang politik melatjurkan diri pada imperialisme dan kaum reaksioner dalam negeri. Politik sajak kiri dari kekuatan tengah sampai batas² tertentu mentjerminkan perasaan² dan harapan² massa pengikut tengah, yang sebagian besar terdiri dari massa burdjuis ketjil. Sajak kiri dari kekuatan tengah memperlihatkan sifat² anti-imperialisme yang lebih teguh dan tidak mudah masuk perangkap kaum imperialis. Mereka djuga tidak menjetudjui persetudjuan² „tukang kelontong” yang dilakukan oleh golongan nasionalis kanan dengan kaum kepalabatu, sebab tidak sesuai dengan kepentingan langsung dari massa pengikut kekuatan tengah, terutama burdjuasi ketjilnja. Djuga mereka menentang Undang² Penanaman Modal Asing, karena dengan Undang² ini hanya beberapa gelintir pemimpin² kekuatan tengah yang akan kepertjikan komisi atau keuntungan lainnja atas kerugian massa pengikut kekuatan tengah sendiri. Kontradiksi intern yang terdapat dikalangan kekuatan tengah djika tidak terlalu tadjam bisa diselesaikan setjara diam², tetapi djika sudah terlalu tadjam, djika kesadaran sajak kiri sudah tjukup tinggi dan sajak kanannja tetap berkepalabatu, mesti berkesudahan dengan perpetjahan.

Dalam hubungan dengan penyelesaian tuntutan² Revolusi Agustus 1945, telah dapat disimpulkan, bahwa pada taraf sekarang sajak kiri dari kekuatan tengah sudah tidak pertjaja lagi akan kemampuan dan kedjudjuran lapisan atas dari burdjuasi nasional untuk menyelesaikannja. Mereka djuga melihat pertumbuhan kekuatan proletariat Indonesia, dan mulai menjedari bahwa klas buruh menduduki tempat yang penting dalam gerakan kemerdekaan nasional, dalam memimpin penyelesaian tuntutan² Revolusi Agustus. Akan tetapi dengan ini belum berarti bahwa sajak kiri dari kekuatan tengah sudah menerima dan mengakui pimpinan proletariat. Untuk ini proletariat harus lebih memperkuat diri lagi dan harus menunjukkan kemampuannja yang lebih besar dalam membela kepentingan seluruh Rakjat.

Ada lagi satu hal yang perlu dibikin djelas mengenai kekuatan tengah, jaitu tentang adanya tokoh² mereka yang memihak kaum pemberontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta”. Dalam menganalisa hal ini kita harus tidak melupakan bahwa kontradiksi terpokok dinegeri kita sekarang ialah antara Rakjat Indonesia dengan

imperialisme, yang dalam kehidupan politik sehari-hari² diwakili oleh kaum kepalabatu. Perdjjuangan menyelesaikan kontradiksi ini masih membutuhkan waktu pandjang dan Partai kita harus berusaha menghimpun sebesar mungkin kekuatan untuk dipukulkan sekeras mungkin kepada imperialisme dan kakitangan²nja.

Ada berbagai sebab mengapa tokoh² kekuatan tengah memihak kaum kontra-revolusioner. Ada yang sudah sedjak semula memang reaksioner, tetapi sebelum pemberontakan kontra-revolusioner terdjadi mereka berdjubah kaum tengah. Terhadap orang² ini sikap Partai sama seperti sikap terhadap kaum kepalabatu. Tetapi, ada djuga yang memihak kontra-revolusi karena tidak puas berhubung burdjuasi nasional yang berkuasa dipusat tidak mampu atau tidak mau meladeni kepentingan burdjuasi nasional yang ada di-daerah², misalnja, tidak tjepat memberikan otonomi yang luas kepada daerah-daerah, tidak adilnja pembagian „rezeki” yang berupa keuntungan ekonomi atau posisi dalam pemerintahan, dsb. Dalam keadaan tidak puas ini burdjuasi nasional di-daerah² berhadapan dengan kampanye yang luarbiasa kuatnja dari kaum kontra-revolusioner dengan sembojan² „untuk pembangunan daerah”, „persetan dengan orang² pusat”, „orang² pusat hanya mementingkan Djawa”, dsb. Mereka tertipu oleh sembojan² ini, mereka tertarik oleh keuntungan² materiil yang bersifat sementara, dan oleh karena itu mereka memihak kontra-revolusi.

Djadi, kontradiksi dalam tubuh kekuatan tengah yang tidak mendapat penyelesaian telah berakibat memperlemah kekuatan Rakjat dan menambah kekuatan kontra-revolusioner, karena kaum kontra-revolusioner dapat menarik kefihaknja sebagian dari burdjuasi nasional, artinja sebagian dari Rakjat. Sikap Partai kita terhadap mereka yang sudah tersesat ini, tetapi yang sesudah „PRRI-Permesta” dikalahkan menjatakan setia lagi kepada Republik Indonesia, tidaklah seperti terhadap kaum kepalabatu. Kita harus menarik mereka kembali kedalam front persatuan nasional, karena tugas Partai kita bukanlah menghantjurkan burdjuasi nasional, tetapi menghantjurkan kaum kontra-revolusioner. Tentu sadja sikap yang demikian ini samasekali tidak boleh berarti mengurangi kewaspadaan politik. Kesimpulan lain yang dapat kita tarik ialah, bahwa kontradiksi antara Rakjat Indonesia dengan „PRRI-Permesta” samasekali bukan kontradiksi antara Rakjat di Djawa dengan yang diluar Djawa, tetapi antara seluruh Rakjat Indonesia dengan kaum kontra-revolusioner „PRRI-Permesta”, yang diongkosi dan dipersejndjatai oleh kaum imperialis yang dikepalai oleh AS. Ini adalah salahsatu bentuk daripada kontradiksi terpokok, jaitu kontradiksi antara Rakjat Indonesia dengan imperialisme.

Dari uraian diatas djelaslah, bahwa ada kesukaran² tertentu jang sudah dan akan dihadapi oleh Partai kita dalam menggalang front persatuan nasional, jaitu menggalang persatuan antara kekuatan progresif dengan kekuatan tengah. Tetapi, kenjataan bahwa ada sikap dan tindakan bersama antara kekuatan progresif dengan gerakan nasionalis jang dipimpin oleh Presiden Sukarno dalam melawan imperialisme, chususnya dalam memukul kepentingan ekonomi imperialisme Belanda dan dalam menghantjurkan „PRRI-Permesta” serta melemahkan kekuatan kepalabatu pada umumnya, adalah bukti bahwa front persatuan nasional dinegeri kita makin bertambah kuat. Soal jang paling penting sekarang dalam hubungan dengan memperkuat front persatuan nasional ialah : *terus mengembangkan kekuatan progresif dengan mengutamakan kekuatan massa buruh dan tani dan memenangkan sajak kiri didalam kekuatan tengah.* Politik kita mengenai seluruh kekuatan tengah ialah : *mendorong jang sudah maju, menarik jang bimbang dan membangkitkan jang masih terbelakang.*

Mengenai perkembangan kekuatan progresif, peranan kaum buruh Indonesia disekitar pengambilalihan sedikit banjak memberikan gambaran. Laporan Pleno ke-VI CC menegaskan mengenai hal itu a.l. sbb. : *„Dengan pengambilalihan perusahaan² Belanda oleh kaum buruh, sekali lagi proletariat Indonesia menundukkan rol pelopornja jang gagahberani dalam perdjjuangan nasional untuk kemerdekaan tanahair dan kepentingan seluruh nasion. Kaum buruh mengambilalih perusahaan² imperialis bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk diserahkan kepada Republik Indonesia jang pemerintahnja belum pemerintah klas buruh. Semuanya ini dilakukan oleh proletariat Indonesia dengan resiko² jang besar, resiko dibunuh, dipetjat dari pekerdjaan, dihukum dsb. Untuk kepentingan nasional proletariat melakukan semuanya ini tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri”.*

Selandjutnja, pengalaman menghantjurkan pemberontakan „PRRI-Permesta” membikin semakin naiknja martabat PKI dan kaum progresif pada umumnya. Sudah sedjak kaum pemberontak mempersiapkan perebutan kekuasaan di-daerah², orang² Komunis dengan organisasi² massa jang dipimpinnja memberikan perlawanan jang gigih. Orang² Komunis adalah korban² pertama daripada perangkap dan pembunuhan oleh kaum pemberontak. Dalam situasi jang demikian, kekuatan tengah terus dalam kebimbangan. Kekuatan progresif dibawah pimpinan PKI memperlihatkan sikap jang paling tegas mendorong pemerintah dan membantu Angkatan Perang untuk menghantjurkan kaum pemberontak. Tetapi, setelah kaum pemberontak kontra-revolusioner hantjur, maka sibuklah

kaum tengah menempati posisi² jang penting dan dimana mungkin menentang kaum progresif. Dengan perbuatan²nja jang tidak adil ini kaum tengah tidak hanja lebih mendiskreditkan dirinja dimata massa Rakjat Indonesia dan aparat² negara jang patriotik, tetapi mereka djuga telah sangat memperlemah potensi Rakjat Indonesia dalam usaha menghantjurkan kaum kontra-revolusioner.

Baik dalam soal pengambilalihan perusahaan² Belanda maupun dalam soal membasmi kaum pemberontak kontra-revolusioner terbukti, bahwa proletariat Indonesia sudah semakin dapat menempatkan dirinja dan sudah mulai mendapat pengakuan sebagai pelopor dalam perdjjuangan nasional pada tingkat sekarang ini, sebagai pelopor perdjjuangan Rakjat Indonesia dalam menyelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus 1945. Rakjat Indonesia telah menundukkan kepertjajaan jang tidak ketjil lewat 3 kali pemilihan umum kepada PKI dan kekuatan progresif pada umumnya. Lahirnja Konsepsi Presiden Sukarno jang bertudjuan membentuk Kabinet Gotong-rojong berdasarkan perwakilan berimbang, artinja ikutsertanja orang² Komunis didalam pemerintahan sentral, adalah pentjerminan jang wadjar dari harapan seluruh Rakjat pekerdja. Dukungan jang begitu kuatnja untuk mendirikan Kabinet Gotongrojong, tidak akan mungkin djika Rakjat tidak mempunyai kepertjajaan jang besar kepada PKI. Kepertjajaan ini mendjadi lebih besar lagi setelah Rakjat mendapat pengalaman jang langsung dan baik diberbagai daerah dimana orang² Komunis jang memerintah, dimana Rakjat menjaksikan sendiri tentang satunja perkataan orang² Komunis dengan perbuatannja, dimana Rakjat untuk pertamakalinja mempunyai perasaan ikutserta menentukan djalannnja perkembangan masjarakat didaerahnja. (*Tepuktangan*).

Tetapi tidaklah mudah bagi kekuatan progresif untuk mengembangkan dirinja. Sajak kiri dari kekuatan tengah bermaksud, disamping memukul kekuatan kepalabatu, menggunakan dan membatasi kekuatan progresif. Sajak kanan dari kekuatan tengah berusaha menghambat perkembangan dari kekuatan progresif dengan politiknya „pukul kanan dan pukul kiri”, tetapi karena irihati, kuatir dan takut setengah mati pada perkembangan kekuatan progresif mereka lebih banjak memukul kekiri daripada memukul kekanan. (*Tawa*). Untuk politik kanannya, sampai batas² tertentu mereka bersedia berkompromi dengan kekuatan kepalabatu. Kaum kepalabatu berusaha mati²an tidak hanja untuk menghambat perkembangan kekuatan progresif, tetapi untuk „membasminja”.

Ketjuali usaha menghambat perkembangan kekuatan progresif dari fihak kaum nasionalis kanan, usaha memukul dan selandjutnja menghantjurkan dengan kekerasan dari fihak kaum kepalabatu,

dan dorongan yang terus-menerus untuk membasmi gerakan Komunis dari pihak kaum imperialis, juga kaum trotskis merasa sangat berdosa jika tidak turut ambil bagian dalam „memburu Komunis” ini. (Tawa).

Djelaslah sekarang kesulitan² yang dialami oleh kekuatan progresif dalam mengembangkan dirinya. Kaum Komunis tidak boleh mempunyai rasa puas diri dengan sukses² yang telah diperolehnya dalam mengembangkan kekuatan progresif, sebaliknya ia harus senantiasa mempertinggi kewaspadaannya dan tidak djemu²nja terus mengeratkan dan meluaskan hubungannya dengan seluruh lapisan Rakjat. Kekurangan² yang penting dalam pekerjaan menggalang front nasional masih terdapat didalam Partai kita. Dikalangan kader² Partai masih terdapat kekaburan pandangan tentang kontradiksi tidak pokok dan pokok didalam masyarakat Indonesia sekarang, dan kurangnya pengertian bahwa pada suatu keadaan kontradiksi yang antagonis bisa menjadi tidak antagonis, sedangkan yang tidak antagonis bisa menjadi antagonis. Karena kekaburan dan kurangnya pengertian ini, maka kita kurang mampu tepat pada waktunya menggunakan tiap² keadaan untuk memperkuat front nasional. Dengan lebih banyak beladjar teori dan dengan bertambahnya pengalaman, serta tidak lupa *menjimpulkan* pengalaman² yang sudah didapat, kelemahan² ini setjara berangsur akan dapat kita atasi.

Seluruh perkembangan sesudah Kongres Nasional ke-V Partai membuktikan benarnya analisa mengenai „3 kekuatan dan 3 konsep penyelesaian Revolusi Agustus 1945”. Djuga adalah satu kenyataan bahwa tiga kekuatan ini mengalami pergeseran terus-menerus, dan sampai sekarang pergeseran ini adalah kekiri. Dilihat dari sudut pengikutnja, PKI bukan hanya sudah menjadi Partai yang nasional, jaitu meliputi seluruh negeri dan seluruh sukubangsa, tetapi juga Partai yang terbesar dinegeri kita. (Tepuktangan lama).

Sekarang bagaimana imbangan kekuatan sesudah perjuangannya anti-imperialisme Belanda meningkat selangkah maju dengan pengambilalihan perusahaan² Belanda, sesudah „PRRI-Permesta” pada pokoknja digulung dan sesudah kegagalan mereka mentjegah kembali ke UUD '45? Dapat dipastikan bahwa *kekuatan kepala-batu sudah djauh merosot, dan bersamaan dengan itu kekuatan progresif sudah semakin besar, sedangkan kekuatan tengah pada pokoknja tetap*. Walaupun martabat dari pimpinan kekuatan tengah menurun karena sikapnja yang terlalu bimbang dalam melawan kontra-revolusi dan karena persetudjuan² „tukang kelontong” dengan kaum kepala-batu yang dilakukan oleh sajak kanan dari pimpinannya, tetapi posisi kekuatan tengah dapat tertolong

karena adanya sajak kiri kekuatan tengah yang tetap anti-imperialisme, dan juga berhubungan dengan sebagian dari massa kekuatan kepala-batu bergeser ketengah. Garis politik PKI menghadapi tiga kekuatan ini adalah tetap, jaitu : *mengembangkan kekuatan progresif, bersatu dengan kekuatan tengah dan mementjilkan kekuatan kepala-batu*. Ini berarti melaksanakan sembojan : *perbaiki pekerjaan front nasional, pentjilkan lebih lanjut kekuatan kepala-batu!* (Tepuktangan).

(6) PKI Mempertahankan Republik Proklamasi

Dewan Konstituante adalah saluran yang oleh Partai telah dipakai se-baik²nja untuk mempertahankan djiwa dan semangat Republik Proklamasi 17 Agustus 1945, djiwa dan semangat yang dapat mempersatukan seluas mungkin Rakjat Indonesia. Mempertahankan Republik Proklamasi berarti mempertahankan prinsip, bahwa untuk kedjajaannya Rakjat Indonesia harus bersatu, bahwa kedaulatan ada pada Rakjat, bahwa Rakjat mendjalankan kedaulatannya dengan melewati dewan² pilihan Rakjat dan bahwa semua penduduk adalah sama dihadapan Undang². PKI mempertahankan djiwa dan semangat Republik Proklamasi karena Republik Proklamasi selama Revolusi Rakjat tahun 1945-1948 terbukti adalah Republik yang revolusioner, alat perjuangan yang penting dalam mempertahankan kemerdekaan nasional, perdamaian, demokrasi dan persatuan seluruh Rakjat dengan tidak memandang perbedaan keturunan, sukubangsa, laki² atau wanita, agama, filsafat dan kejakinan politik. Mempertahankan Republik Proklamasi berarti mempertahankan Republik, dimana didalamnja didjamin kebebasan beragama dan dihormati kejakinan politik yang tidak bertentangan dengan djiwa Revolusi Agustus 1945 dan dimana badan² keagamaan dipisahkan dari negara.

PKI tetap mempertahankan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang daerahnja meliputi seluruh wilayah „Hindia Belanda” dulu. Dalam negara kesatuan ini didjamin adanya otonomi yang se-luas²nja bagi daerah². PKI mempertahankan isi daripada fasal² mengenai ekonomi yang dimuat dalam Undang² Dasar 1945 yang bertudjuan untuk melikwidasi ekonomi kolonial.

Demikianlah sebab²nja, mengapa setelah Konstituante gagal membikin UUD baru yang memuat pokok² pikiran seperti tersebut diatas, PKI dan golongan patriotik lainnya dengan teguh memperjuangkan supaya UUD Revolusi, jaitu UUD '45 diterima oleh Konstituante. Setelah terbukti Konstituante pada sidang²nja akhir Mei dan permulaan Djuni tahun ini tidak dapat mensahkan UUD

'45, walaupun sudah didukung oleh golongan terbesar daripada anggota² Konstituante, tetapi tidak mentjukupi 2/3 suara yang dibutuhkan menurut UUD Sementara, maka PKI menganggap satu-satunya jalan untuk menyelamatkan negeri dari bentjana perpetjahan nasional lebih landjut hanjalah djika Presiden Sukarno mendekritkan UUD '45 atasnama majoritet Rakjat Indonesia. (*Tepuktangan*). PKI menuntut pendekritan dengan maksud untuk tidak memberi kesempatan kepada elemen² reaksioner guna menimbulkan perpetjahan² nasional yang lebih djauh, dan untuk lebih mengkonsolidasi persatuan anti-imperialisme dari Rakjat. Dengan pendekritan telah dapat ditjegah kompromi yang memalukan dan merugikan Rakjat antara kekuatan tengah yang pro dengan mereka yang kontra UUD '45. Kekurangan² yang terdapat pada UUD '45 akan dapat diisi melalui sidang² Madjelis Permusjawaratan Rakjat (MPR) yang demokratis dikemudian hari. Oleh karena itu PKI dan Rakjat pekerdja Indonesia menjambut pendekritan berlakunja kembali UUD '45 oleh Presiden/Panglima Tertinggi Sukarno pada tanggal 5 Djuli 1959.

(7) Sikap PKI Terhadap Kabinet Sukarno-Djuanda

Dalam menetapkan sikap politik yang praktis, kita harus berpedoman kepada program tuntutan yang disahkan oleh Kongres Nasional ke-V Partai, yang kemudian diperbaharui oleh Sidang Pleno ke-IV CC dan yang sekarang diadjukan lagi kepada Kongres ini, yang sudah disesuaikan dengan perkembangan situasi. Tugas pokok program tuntutan Partai adalah untuk mempersatukan seluruh Rakjat dan untuk memenuhi tuntutan² ekonomi dan politik daripada Rakjat pada tingkat² tertentu sebelum penyelesaian Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja. Dalam lapangan politik program tuntutan kita sekarang pada pokoknja menghendaki pembentukan Pemerintah Koalisi Nasional atau pembentukan Kabinet Gotongrojong, sebagai pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100%.

Dapat atau tidaknja Pemerintah Koalisi Nasional dibentuk tergantung pada pekerdjaan Partai menggalang front persatuan, pengembangan kekuatan progresif dan melakukan pukulan² yang djitu terhadap kekuatan kepalabatu. Tentang duduknja orang² Komunis didalam Kabinet tergantung pada imbalan kekuatan yang riil pada waktu kabinet dibentuk. PKI telah dan akan terus mengadakan tuntutan pembentukan Pemerintah Koalisi Nasional atau Pemerintah Gotongrojong diantara partai², golongan² dan perseorangan² yang suka. PKI harus mempersoalkan duduknja dalam kabinet, ka-

rena PKI bertudjuan memperkuat persatuan nasional dan PKI selamanya merasa bertanggungjawab mengenai keadaan Rakjat dan bangsa Indonesia.

Dalam hal tidak duduk dalam kabinet, Partai telah menentukan sikap sebagai berikut : *Pertama*, PKI bisa menjokong dengan sjarat-sjarat djika programnja madju, komposisinja dan menteri²nja tjukup baik untuk melaksanakan program; *Kedua*, jalah berposisi, djika programnja reaksioner atau sekedar hanja sebagai demagogi sadja, sehingga sangat tidak memenuhi tuntutan² politik dan ekonomi yang paling minimum daripada Rakjat.

Masalah Angkatan Perang merupakan faktor yang tidak boleh dianggap ketjil dalam menggalang front persatuan nasional, dalam mengembangkan kekuatan progresif, dalam mementjilkan kekuatan kepalabatu, dan dalam usaha Rakjat membentuk kabinet yang madju. Setelah kabinet Sukiman turunpanggung sebagai akibat desakan kekuatan demokratis dan sebagai gantinya berdiri kabinet Wilopo atas dukungan kekuatan demokratis, maka kaum sosialis-kanaan dan kaum militeris mentjoba melakukan kudeta (17 Oktober 1952). Kegagalan kaum kontra-revolusioner pada tahun 1952 itu ditjoba untuk ditebus dengan mentjetuskan peristiwa „13 Agustus 1956” dan „16 November 1956”, sebagai pertjobaan melawan kekuasaan yang sah dengan kekuatan tentara. Ketika mereka sempat berkuasa kembali selama kabinet Burhanuddin Harahap (Masjumi), mereka mentjoba mereorganisasi pimpinan Angkatan Darat dan Angkatan Udara dengan menggunakan kekuasaan politik yang ada didalam tangannja. Tetapi semua usaha ini mengalami kegagalan disebabkan oleh antara lain tiga faktor penting jaitu : *Pertama*, Presiden Sukarno yang menjatukan diri dengan Rakjat mempunyai pengaruh yang kuat dikalangan angkatan bersendjata, dan Presiden Sukarno menolak mendjadi diktator militeris. *Kedua*, APRI adalah anak kandung Revolusi Rakjat, karena itu majoritet daripada para perwira, bintang dan tamtama APRI tidak mudah dipaksa untuk mendjalankan perintah yang ditudjukan untuk melikwidasi Republik Proklamasi dengan djalan membentuk diktatur militer atau diktatur perseorangan. (*Tepuktangan*). *Ketiga*, Rakjat Indonesia tidak hanja mentjintai demokrasi, tetapi dibawah pimpinan Partai yang waspada Rakjat aktif membela demokrasi itu. Itulah sebab² pokok mengapa kudeta Masjumi-PSI dan kaum militeris yang memihak mereka menemui kegagalan, dan semuanya ini tetap merupakan kekuatan² yang dapat menggagalkan tiap² usaha perebutan kekuasaan reaksioner. (*Tepuktangan*).

Sebagaimana sudah ber-ulang² dinjatakan, kaum Komunis akan berdjuaug terus supaya diktatur militer seperti yang pernah dialami

Rakjat Indonesia dimasa pendudukan Djepang tidak kembali lagi, walaupun dalam bentuk lain. Bagi perkembangan madju Indonesia, soal jang paling penting buat Rakjat Indonesia ialah mempertahankan dan meluaskan demokrasi. Tetapi, seandainya diktatur militer tidak tertjegah, djadi toch terdjadi djuga, maka kewadajiban tiap² Komunis ialah melawannya dengan sekuat tenaga. (*Tepuktangan lama*). Melawan diktatur militer berarti membela kemerdekaan nasional Indonesia dari serangan kekurangadjaran imperialis. Rakjat tidak suka pada diktatur militer, ini sudah dibuktikan ketika pendjadjahan Djepang dan ketika sebagian Rakjat Indonesia dibeberapa daerah menghadapi kaum militeris-fasis „PRRI” dan „Permesta”. Oleh karena itulah perlawanan terhadap diktatur militer pasti akan menang. Untuk sementara memang mungkin ada orang jang takut pada diktatur militer (*tawa*), tapi ini hanya untuk sementara waktu. Orang bisa takut selama ia belum langsung menghadapinja, tetapi djika sudah langsung berhadapan semua rasa takut dan ke-ragu²an akan hilang dan keberanian serta tekad bulat Rakjat akan bagaikan airbah raksasa mendobrak dan menghantjurluhkan diktatur militer itu. (*Tepuktangan lama*). Ini sudah dibuktikan ketika Rakjat Indonesia menghadapi kaum militeris Djepang, dan sekarang dalam membasmi habis kaum pemberontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta”.

Sekarang perlu dianalisa setjara khusus kemungkinan² tentang perkembangan kabinet Sukarno-Djuanda sebagai kelandjutan dari kabinet Djuanda jang sudah memperoleh hasil² tertentu dalam mematahkan kekuasaan ekonomi Belanda dalam rangka perdjjuangan mengembalikan Irian Barat dan dalam menindas pemberontakan kontra-revolusi „PRRI-Permesta”.

Keadaan jang khusus jang harus kita perhatikan sekitar Pemerintahan Sukarno-Djuanda sekarang adalah masih tetap berlakunja kekuasaan militer. Walaupun SOB bikinan kolonial Belanda sudah dihapuskan dan sudah diganti dengan Undang² Keadaan Bahaja bikinan Parlemen RI, akan tetapi kenjataanja pihak militerlah jang berkuasa. Kekuasaan militer telah memperlihatkan segi² positif, terutama di-daerah² bergolak. Akan tetapi tidak sedikit segi² negatifnja, jang djika tidak segera diachiri bisa ber-larut² dan bisa menutupi segi² jang positif daripada kekuasaan militer itu. Mengenai segi² negatif ini, jang sangat serius ialah pengekekangan hak² demokrasi bagi Rakjat, seperti masih berlakunja Undang² Keadaan Bahaja di-daerah² jang tidak bergolak seperti pembatasan kegiatan politik, pemberangusan koran² demokratis, larangan untuk melangsungkan rapat² jang diselenggarakan oleh partai², termasuk partai² jang melawan pemberontakan kontra-revolusioner dan jang men-

dukung UUD '45, larangan mogok, termasuk mogok di-perusahaan² jang memihak kaum pemberontak kontra-revolusioner, pengusiran kaum tani, larangan untuk mendjadi anggota Partai bagi pegawai negeri tertentu, dan larangan² lain jang sangat mengekang perkembangan gerakan progresif dan demokratis.

Segi negatif jang lain dari kekuasaan militer jang djuga tjukup serius ialah soal tjampurtangan sementara perwira jang masih aktif dalam perekonomian, keuangan dan politik pemerintahan. Djika bekas² perwira Achmad Husein, M. Simbolon, V. Sumual dan perwira² pemberontak lainnja memulai pengchianatannya dengan mengadakan petualangan dilapangan ekonomi dan politik jang bukan bidangnya dan mengachirinja dengan pemberontakan kontra-revolusioner, maka adalah tidak tepat djika perbuatan chianat ini ditiru oleh perwira² jang menentang kaum pemberontak kontra-revolusioner.

Pada waktu² jang diperlukan PKI dan Rakjat bisa memberikan kekuasaan sampai batas² tertentu kepada Angkatan Perang jang patriotik, selama kekuasaan ini tidak disalahgunakan. Kita harus menjjegah timbulnja kontradiksi jang tidak perlu atau jang tadjam antara Rakjat dan Angkatan Perang, dan hal² jang mungkin menudju kearah pertadjaman kontradiksi harus dihindari. Pelaksanaan garis „Dwitunggal Rakjat dan Tentara”, jaitu garis „Rakjat bantu Tentara dan Tentara bantu Rakjat” atau „Salingbantu Rakjat dan Tentara” adalah djaminan dalam mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. (*Tepuktangan lama*).

Dengan pada pokoknja berhasil menumpas kaum pemberontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta”, prestise Pemerintah meningkat, baik dimata Rakjat Indonesia maupun dimata negara² sahabat diluarnegeri. Prestise ini akan bisa terus meningkat djika Pemerintah dapat mempertahankan kedudukannya sebagai pemerintah jang mendjalankan politik sesuai dengan keinginan Rakjat banjak, selalu berorientasi dan bersandar pada Rakjat, selalu dapat mengendalikan semua aparatnja guna pelaksanaan programnja dan sampai batas² tertentu mampu mengadakan perbaikan² dalam tingkat hidup Rakjat.

Dengan berlakunja kembali UUD '45 lewat dekrit Presiden Sukarno pada tanggal 5 Djuli 1959 negara Indonesia adalah tetap negara hukum dan kedaulatan tetap ada ditangan Rakjat, jang dilakukan sepenuhnya oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat (MPR). Sedangkan kekuasaan membentuk undang² ada pada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat (DPR). Berhubung dengan ini segala ketjenderungan untuk berbuat se-wenang² terhadap kebebasan² politik Rakjat seperti sengadja memperlambat pemilihan

umum untuk DPR, nafsu ingin mengebiri dan membubarkan partai-partai; menyingkirkan atau mengebiri DPR sebelum maupun sesudah MPR terbentuk merupakan antjaman² terhadap sendi² demokrasi yang merupakan kepentingan vital Rakjat Indonesia, dan ini berarti menjiderai UUD '45.

Sesudah lewat dekrit Presiden yang didukung oleh majoritet yang meyakinkan, Rakjat Indonesia kembali ke UUD '45, maka adalah sangat masuk-akal bahwa Rakjat mengharapkan terbentuknja Kabinet Gotongrojong dibawah pimpinan Presiden Sukarno, sesuai dengan gagasan² yang ada dalam Konsepsi Presiden Sukarno. Tetapi dengan terbentuknja Kabinet Kerdja yang dipimpin oleh Sukarno-Djuanda, yang bukan Kabinet Gotongrojong, maka untuk sementara harapan Rakjat ini tidak terpenuhi. Rakjat Indonesia tidak akan berhenti ditengah djalan dan tidak akan melupakan pernyataan Presiden Sukarno yang ber-kali² mengatakan, bahwa Rakjat berhak menagih pelaksanaan program Pemerintah, dan bahwa se-waktu² menteri bisa diganti oleh Presiden. Rakjat Indonesia yang tjinta persatuan nasional, yang demokratis dan progresif tidak akan melepaskan tuntutan politiknja yang praktis, jaitu pembentukan Kabinet Gotongrojong, baik lewat penggantian menteri² yang tidak tepat maupun dengan mengadakan perombakan kabinet keseluruhannja. Tuntutan ini sangat adil dan oleh karena itu tjepat atau lambat pasti akan terlaksana! Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dan Dewan Perantjang Nasional (Depernas) yang komposisinja mendekati semangat gotongrojong telah lebih mendorong Rakjat Indonesia untuk meneruskan tuntutan pembentukan Kabinet Gotongrojong.

PKI akan dengan sekuat tenaga membantu pelaksanaan program kabinet Sukarno-Djuanda dan pelaksanaan pokok² fikiran yang terkandung dalam Manifesto Politik Presiden Sukarno yang di-utjapkan pada tanggal 17 Agustus 1959, selama Pemerintah tidak menghalang-halangi perkembangan gerakan kemerdekaan dan gerakan demokratis. Sokongan PKI terhadap Kabinet Sukarno-Djuanda adalah sokongan yang ichlas dan kritis, berpedoman pada prinsip : *menjokong politiknja yang madju tanpa reserve, mengkritik politiknja yang ragu² supaya menjadi madju, dan menentang menteri² yang politiknja merugikan Rakjat*. Dengan membantu perkembangan gerakan kemerdekaan dan gerakan demokratis, kabinet akan dapat memperkuat kedudukannja sendiri dan berdjasa pada perjuangan Rakjat menudju Indonesia yang merdeka penuh dan demokratis, menudju pelaksanaan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja.

(8) Memperkuat dan Memperluas

Ketidakmampuan sistim demokrasi liberal persoalan penting yang dihadapi oleh Rakjat Indonesia menyebabkan bahwa kebangkrutan daripada sistim ini ditutup-tutupi lagi terhadap Rakjat Indonesia. Semakin merosotnja kewibawaan sistim ini makin banyak partai² burdjuis yang telah menggunakan sistim ini untuk memperkaja lapisan atas dari burdjuasi dengan menggunakan kedudukan politik untuk melakukan korupsi dan per-an-perbuatan tertjela lainnja. Sistim yang dalam masa krisis umum kapitalisme sekarang setjara sedjarah sudah bangkrut, djuga di Indonesia sudah terbukti satunja sistim demokrasi liberal dengan korupsi dan birokrasi, dengan ketidakmampuan memetjahkan persoalan-persoalan pokok dan penting yang dihadapi oleh Rakjat Indonesia.

Kaum kanan yang paling reaksioner, setelah melihat gelagat bahwa mereka tidak dapat lagi memperalat demokrasi liberal, sudah sedjak djauh hari berusaha menutupi ketidakmampuan sistim ini dengan pertjobaan merebut kekuasaan politik dengan djalan extra-parlementer untuk mentjiptakan sistim pemerintahan fasis yang berbentuk junta-militer. Setelah gagal pertjobaan mereka dipusat, maka mereka mentjoba dengan mendjagokan tokoh² militer diberbagai daerah untuk merebut kekuasaan politik setjara lokal sebagai alat untuk menekan Pemerintah pusat supaya bertekuk-lutut. Dengan pemberontakan kontra-revolusioner „PRRI-Permesta” pada awal tahun 1958 tokoh² Masjumi-PSI dapat mendjadikan dirinja „Radja² sehari” di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara, berkat bajonet orang² militer yang sefaham dengan mereka dan berkat dorongan dan bantuan negara² imperialis yang dikepalai oleh Amerika Serikat.

Tetapi, meskipun tokoh² reaksioner dan petualang² dari „PRRI-Permesta” telah mengalami kegagalan, kaum reaksioner dan petualang politik masih tjukup banjak dinegeri kita, dan masih ada tuan Hatta (*tawa*) yang dapat didjadikan alat guna pertjobaan menundukkan Rakjat Indonesia, baik dengan djalan membentuk kabinet reaksioner seperti yang dituntut oleh Dr. Sukiman (Masjumi) maupun dengan mendirikan diktatur militer atau diktatur perseorangan.

Tjepatnja kebangkrutan demokrasi liberal di Indonesia disebabkan oleh dua proses. *Pertama*, proses kesedaran Rakjat Indonesia sendiri, yang berdasarkan pengalamannja sendiri melihat bahwa demokrasi liberal identik dengan korupsi, birokrasi dan ketidak-

umum untuk DPR, nafsu ingin mengebiri dan membubarkan partai-partai; menyingkirkan atau mengebiri DPR sebelum maupun sesudah MPR terbentuk merupakan antjaman² terhadap sendi² demokrasi yang merupakan kepentingan vital Rakjat Indonesia, dan ini berarti mentjiderai UUD '45.

Sesudah lewat dekrit Presiden yang didukung oleh mayoritas yang mejakinkan, Rakjat Indonesia kembali ke UUD '45, maka adalah sangat masuk-akal bahwa Rakjat mengharapkan terbentuknja Kabinet Gotongrojong dibawah pimpinan Presiden Sukarno, sesuai dengan gagasan² yang ada dalam Konsepsi Presiden Sukarno. Tetapi dengan terbentuknja Kabinet Kerdja yang dipimpin oleh Sukarno-Djuanda, yang bukan Kabinet Gotongrojong, maka untuk sementara harapan Rakjat ini tidak terpenuhi. Rakjat Indonesia tidak akan berhenti ditengah djalan dan tidak akan melupakan pernyataan Presiden Sukarno yang ber-kali² mengatakan, bahwa Rakjat berhak menagih pelaksanaan program Pemerintah, dan bahwa se-waktu² menteri bisa diganti oleh Presiden. Rakjat Indonesia yang tjinta persatuan nasional, yang demokratis dan progresif tidak akan melepaskan tuntutan politiknja yang praktis, jaitu pembentukan Kabinet Gotongrojong, baik lewat penggantian menteri² yang tidak tepat maupun dengan mengadakan perombakan kabinet keseluruhannja. Tuntutan ini sangat adil dan oleh karena itu tjepat atau lambat pasti akan terlaksana! Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dan Dewan Perantjang Nasional (Depernas) yang komposisinja mendekati semangat gotongrojong telah lebih mendorong Rakjat Indonesia untuk meneruskan tuntutan pembentukan Kabinet Gotongrojong.

PKI akan dengan sekuat tenaga membantu pelaksanaan program kabinet Sukarno-Djuanda dan pelaksanaan pokok² fikiran yang terkandung dalam Manifesto Politik Presiden Sukarno yang di-utjapkan pada tanggal 17 Agustus 1959, selama Pemerintah tidak menghalang-halangi perkembangan gerakan kemerdekaan dan gerakan demokratis. Sokongan PKI terhadap Kabinet Sukarno-Djuanda adalah sokongan yang ichlas dan kritis, berpedoman pada prinsip : *menjokong politiknja yang maju tanpa reserve, mengkritik politiknja yang ragu² supaya menjadi maju, dan menentang menteri² yang politiknja merugikan Rakjat*. Dengan membantu perkembangan gerakan kemerdekaan dan gerakan demokratis, kabinet akan dapat memperkuat kedudukannja sendiri dan berdjasa pada perdjuaan Rakjat menudju Indonesia yang merdeka penuh dan demokratis, menudju pelaksanaan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja.

(8) Memperkuat dan Memperluas Demokrasi

Ketidakmampuan sistim demokrasi liberal memetjahkan berbagai persoalan penting yang dihadapi oleh Rakjat Indonesia telah menjebabkan bahwa kebangkrutan daripada sistim ini tidak dapat ditutup-tutupi lagi terhadap Rakjat Indonesia. Bersamaan dengan makin merosotnja kewibawaan sistim ini merosot pulalah kedudukan partai² burdjuis yang telah menggunakan sistim ini „se-baik²nja” untuk memperkaja lapisan atas dari burdjuasi dengan djalan menggunakan kedudukan politik untuk melakukan korupsi dan perbuatan-perbuatan tertjela lainnja. Sistim yang dalam masa krisis umum kapitalisme sekarang setjara sedjarah sudah bangkrut, djuga di Indonesia sudah terbukti satunja sistim demokrasi liberal dengan korupsi dan birokrasi, dengan ketidakmampuan memetjahkan persoalan-persoalan pokok dan penting yang dihadapi oleh Rakjat Indonesia.

Kaum kanan yang paling reaksioner, setelah melihat gelagat bahwa mereka tidak dapat lagi memperalat demokrasi liberal, sudah sedjak djauh hari berusaha menutupi ketidakmampuan sistim ini dengan pertjobaan merebut kekuasaan politik dengan djalan extra-parlementer untuk mentjiptakan sistim pemerintahan fasis yang berbentuk junta-militer. Setelah gagal pertjobaan mereka dipusat, maka mereka mentjoba dengan mendjagokan tokoh² militer diberbagai daerah untuk merebut kekuasaan politik setjara lokal sebagai alat untuk menekan Pemerintah pusat supaya bertekuk-lutut. Dengan pemberontakan kontra-revolusioner „PRRI-Permesta” pada awal tahun 1958 tokoh² Masjumi-PSI dapat mendjadikan dirinja „Radja² sehari” di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara, berkat bajonet orang² militer yang sefaham dengan mereka dan berkat dorongan dan bantuan negara² imperialis yang dikepalai oleh Amerika Serikat.

Tetapi, meskipun tokoh² reaksioner dan petualang² dari „PRRI-Permesta” telah mengalami kegagalan, kaum reaksioner dan petualang politik masih tjukup banjak dinegeri kita, dan masih ada tuan Hatta (*tawa*) yang dapat didjadikan alat guna pertjobaan menundukkan Rakjat Indonesia, baik dengan djalan membentuk kabinet reaksioner seperti yang dituntut oleh Dr. Sukiman (Masjumi) maupun dengan mendirikan diktatur militer atau diktatur perseorangan.

Tjepatnja kebangkrutan demokrasi liberal di Indonesia disebabkan oleh dua proses. *Pertama*, proses kesedaran Rakjat Indonesia sendiri, yang berdasarkan pengalamannja sendiri melihat bahwa demokrasi liberal identik dengan korupsi, birokrasi dan ketidak-

mampuan dalam memetjahkan persoalan² pokok dan penting dari Rakjat Indonesia. *Kedua*, karena agitasi anti-Parlemen, jang pada hakekatnja anti-kehidupan demokratis oleh promotor² junta-militer dan elemen² fasis lainnja.

Kebangkrutan sistim demokrasi liberal dimata Rakjat Indonesia tidak terdjadi dalam situasi dimana imbanan kekuatan antara Rakjat Indonesia disatu pihak dan kaum imperialis berserta tuan-tanah difihak lain sudah memungkinkan Rakjat Indonesia mengatasi krisis sistim politik ini dengan mentjiptakan kekuasaan Rakjat, jaitu kekuasaan politik dimana kedaulatan sepenuhnya berada ditangan Rakjat, dan dimana musuh² Rakjat ditjabat samasekali hak² politiknya.

Tetapi, walaupun demikian Rakjat Indonesia tidak mengizinkan krisis demokrasi liberal „diatasi” dengan kemenangan kaum reaksioner, jaitu kemenangan „PRRI-Permesta”, kemenangan diktatur militer atau diktatur perseorangan, atau dengan terbentuknja kabinet reaksioner. Didalam tangan Rakjat Indonesia sudah ada sendjata untuk mengatasinja, jaitu Konsepsi Presiden Sukarno dan gagasan Demokrasi Terpimpin. Inilah djawaban Rakjat Indonesia pada waktu sekarang, supaja krisis demokrasi liberal berachir dengan kemenangan Rakjat. (*Tepuktangan*).

Dalam situasi jang demikian ini sangatlah penting arti gagasan Demokrasi Terpimpin dari Presiden Sukarno. PKI menerima Demokrasi Terpimpin dengan pengertian bahwa jang diterimanya adalah demokrasi, meskipun bukan Demokrasi Rakjat, tetapi demokrasi jang anti-liberalisme, anti-diktatur militer dan anti-diktatur perseorangan. Segi positif daripada Demokrasi Terpimpin ialah, disatu pihak anti-diktatur militer dan anti-diktatur perseorangan, dan difihak lain anti-liberalisme. Anti-liberalisme dilapangan politik, tidak bisa diartikan lain ketjuali pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100%, jaitu pembentukan kabinet Gotongrojong berdasarkan perwakilan berimbang diantara partai² dan golongan² pendukung Konsepsi Presiden. Anti-liberalisme dilapangan ekonomi tidak bisa diartikan lain ketjuali anti „persaingan bebas” („free fight liberalism”), dan ini berarti mengutamakan ekonomi sektor negara sebagai sjarat untuk dapat memimpin seluruh perekonomian negeri dan menggerowoti kekuasaan ekonomi kapital besar asing.

Segi² positif dari Demokrasi Terpimpin harus dikembangkan dan ditudjukan untuk pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100%. Demokrasi Terpimpin dan Konsepsi Presiden Sukarno adalah satu kesatuan.

Pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno harus dilakukan diantara partai², golongan² dan perseorangan² jang menjetudjuinja.

Mereka jang menolaknya adalah anti-persa liberalisme, pro-diktatur militer atau pro-d Karena itu adalah keliru djika pelaksanaan gantungkan pada mereka jang menolaknya.

Masih adanya partai², golongan² dan k sepsi Presiden Sukarno dan Demokrasi T kan adanya diktatur militer atau diktatur pers ti, bahwa walaupun Rakjat Indonesia sudah mem tetapi bahaya fasisme masih tetap ada. Oleh karena itu daan revolusioner harus dipertinggi untuk mengalahkan ban ini.

Untuk mengalahkan bahaya fasisme, PKI berpendapat bahwa kewajiban seluruh Rakjat Indonesia ialah dengan gigih memperdjuangkan agar Pemerintah :

- * Sungguh² melaksanakan programnja untuk memenuhi kebutuhan Rakjat akan makanan dan pakaian, mendjamin keamanan Rakjat dan negara dan meneruskan perdjungan melawan imperialisme.
- * Memberikan kebebasan² demokratis jang se-luas²nja kepada Rakjat dan organisasi² Rakjat, membatalkan semua undang² dan peraturan jang membatasi kebebasan gerakan patriotik, dan dimana kaum pemberontak kontra-revolusioner dan gerombolan-gerombolan teroris tidak ada atau sudah dihantjurkan, maka kebebasan² demokratis bagi Rakjat harus segera dipulihkan dengan mentjabat berlakunya Undang² Keadaan Bahaja.
- * Mendjamin semua hak dan kebebasan kepada kaum buruh untuk membela kepentingan²nja jang sah, membatalkan semua undang² dan peraturan jang melarang kaum buruh mogok.
- * Menindas dan membasmi kaum pemberontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta”, DI-TII dan gerombolan² teroris lainnja sampai ke-akar²nja, memberi kebebasan kepada organisasi² Rakjat mengembangkan diri untuk mematahkan pengaruh politik dan kekuatan bersendjata kontra-revolusioner, terutama di-daerah² dimana bandit² „PRRI-Permesta” dan bandit² DI-TII masih leluasa melakukan kakedjamannja. Memberi hak kepada kaum tani untuk mengangkat sendjata dibawah pimpinan APRI buat membela diri terhadap perbuatan² gerombolan² teroris kontra-revolusioner.
- * Menghormati kedudukan dan hak² daripada Dewan² Perwakilan Rakjat Pusat (Parlemen) dan Daerah, mempertahankan sistim kepala daerah jang dipilih oleh Rakjat, (*tepuktangan*), meluaskan wewenang daripada pemerintah² daerah Swatantra

mampuan dalam memetjahkan persoalan² pokok dan penting dari Rakjat Indonesia. *Kedua*, karena agitasi anti-Parlemen, jang pada hakekatnja anti-kehidupan demokratis oleh promotor² junta-militer dan elemen² fasis lainnja.

Kebangkrutan sistim demokrasi liberal dimata Rakjat Indonesia tidak terdjadi dalam situasi dimana imbanan kekuatan antara Rakjat Indonesia disatu fihak dan kaum imperialis berserta tuan-tanah difihak lain sudah memungkinkan Rakjat Indonesia mengatasi krisis sistim politik ini dengan mentjiptakan kekuasaan Rakjat, jaitu kekuasaan politik dimana kedaulatan sepenuhnya berada ditangan Rakjat, dan dimana musuh² Rakjat ditjabut samasekali hak² politiknja.

Tetapi, walaupun demikian Rakjat Indonesia tidak mengizinkan krisis demokrasi liberal „diatasi” dengan kemenangan kaum reaksioner, jaitu kemenangan „PRRI-Permesta”, kemenangan diktatur militer atau diktatur perseorangan, atau dengan terbentuknja kabinet reaksioner. Didalam tangan Rakjat Indonesia sudah ada senjata untuk mengatasinja, jaitu Konsepsi Presiden Sukarno dan gagasan Demokrasi Terpimpin. Inilah djawaban Rakjat Indonesia pada waktu sekarang, supaja krisis demokrasi liberal berachir dengan kemenangan Rakjat. (*Tepuktangan*).

Dalam situasi jang demikian ini sangatlah penting arti gagasan Demokrasi Terpimpin dari Presiden Sukarno. PKI menerima Demokrasi Terpimpin dengan pengertian bahwa jang diterimanja adalah demokrasi, meskipun bukan Demokrasi Rakjat, tetapi demokrasi jang anti-liberalisme, anti-diktatur militer dan anti-diktatur perseorangan. Segi positif daripada Demokrasi Terpimpin jaitu, disatu fihak anti-diktatur militer dan anti-diktatur perseorangan, dan difihak lain anti-liberalisme. Anti-liberalisme dilapangan politik, tidak bisa diartikan lain ketjuali pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100%, jaitu pembentukan kabinet Gotongrojong berdasarkan perwakilan berimbang diantara partai² dan golongan² pendukung Konsepsi Presiden. Anti-liberalisme dilapangan ekonomi tidak bisa diartikan lain ketjuali anti „persaingan bebas” („free fight liberalism”), dan ini berarti mengutamakan ekonomi sektor negara sebagai sjarat untuk dapat memimpin seluruh perekonomian negeri dan menggerowoti kekuasaan ekonomi kapital besar asing.

Segi² positif dari Demokrasi Terpimpin harus dilakukan dianut dan ditunjukkan untuk pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100%. Demokrasi Terpimpin dan Konsepsi Presiden Sukarno adalah satu kesatuan.

Pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno harus dilakukan diantara partai², golongan² dan perseorangan² jang menjetudjuinja.

Mereka jang menolaknya adalah anti-persatuan nasional, pro-liberalisme, pro-diktatur militer atau pro-diktatur perseorangan. Karena itu adalah keliru djika pelaksanaan tjita² jang baik ini digantungkan pada mereka jang menolaknya.

Masih adanja partai², golongan² dan klik² jang menolak Konsepsi Presiden Sukarno dan Demokrasi Terpimpin, dan menginginkan adanja diktatur militer atau diktatur perseorangan adalah bukti, bahwa walaupun Rakjat Indonesia sudah memilih demokrasi, tetapi bahaya fasisme masih tetap ada. Oleh karena itu kewaspadaan revolusioner harus dipertinggi untuk mengalahkan bahaya ini.

Untuk mengalahkan bahaya fasisme, PKI berpendapat bahwa kewajiban seluruh Rakjat Indonesia ialah dengan gigih memperjuangkan agar Pemerintah :

- * Sungguh² melaksanakan programnja untuk memenuhi kebutuhan Rakjat akan makanan dan pakaian, mendjamin keamanan Rakjat dan negara dan meneruskan perjuangn melawan imperialisme.
- * Memberikan kebebasan² demokratis jang se-luas²nja kepada Rakjat dan organisasi² Rakjat, membatalkan semua undang² dan peraturan jang membatasi kebebasan gerakan patriotik, dan dimana kaum pemberontak kontra-revolusioner dan gerombolan-gerombolan teroris tidak ada atau sudah dihantjurkan, maka kebebasan² demokratis bagi Rakjat harus segera dipulihkan dengan mentjabut berlakunja Undang² Keadaan Bahaja.
- * Mendjamin semua hak dan kebebasan kepada kaum buruh untuk membela kepentingan²nja jang sah, membatalkan semua undang² dan peraturan jang melarang kaum buruh mogok.
- * Menindas dan membasmi kaum pemberontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta”, DI-TII dan gerombolan² teroris lainnja sampai ke-akar²nja, memberi kebebasan kepada organisasi² Rakjat mengembangkan diri untuk mematahkan pengaruh politik dan kekuatan bersendjata kontra-revolusioner, terutama di-daerah² dimana bandit² „PRRI-Permesta” dan bandit² DI-TII masih leluasa melakukan kekedjamannja. Memberi hak kepada kaum tani untuk mengangkat sendjata dibawah pimpinan APRI buat membela diri terhadap perbuatan² gerombolan² teroris kontra-revolusioner.
- * Menghormati kedudukan dan hak² daripada Dewan² Perwakilan Rakjat Pusat (Parlemen) dan Daerah, mempertahankan sistim kepala daerah jang dipilih oleh Rakjat, (*tepuktangan*), meluaskan wewenang daripada pemerintah² daerah Swatantra

tingkat I dan II dan melaksanakan pembentukan pemerintah daerah Swatantra tingkat III.

- * Mendemokraskan semua lembaga umum yang menjalankan fungsi yang bersifat ekonomi dan sosial.
- * Mendemokraskan dan mereorganisasi alat² negara, memetjat dari djabatan² sivil dan militer pengchianat² bangsa, orang² reaksioner, penggelap² serta koruptor² dan supaja orang² ini dihukum. Mengisi alat² negara dengan orang² yang bersedia mengabdikan diri kepada kepentingan Rakjat. Mendemokrasi-kan tentara dan mengadakan hubungan yang erat antara Ten-tara dan Rakjat. (*Tepuktangan*).

II

UNTUK MEMPERKUAT FRONT INTERNASIONAL ANTI-KOLONIAL DAN TJINTA DAMAI

Kawan²!

Dari pengalamannya yang banjak sedjak meletusnya Revolusi Agustus 1945 sampai sekarang, Rakjat Indonesia yakin bahwa usaha² serta tjita²nja tidak dapat dipisahkan dari proses kedjadian² didunia dan bahwa haridepan negerinja djuga takterpisahkan dari perdjjuangan Rakjat diseluruh dunia untuk perdamaian dan kema-djuan, untuk kemerdekaan nasional, demokrasi dan Sosialisme.

Pengalaman dan tjita²nja sendiri tidak memungkinkan Rakjat Indonesia bersikap netral atau atjuh-tak-atjuh terhadap kolonialis-me dan kemerdekaan, terhadap fasisme dan demokrasi, terhadap peperangan dan perdamaian, terhadap keterbelakangan dan kema-djuan, terhadap kapitalisme dan Sosialisme. Untuk kepentingan nasionalnja sendiri dan untuk tjita² kemanusiaannya, Rakjat Indo-nesia memihak kemerdekaan, demokrasi, perdamaian, kemajuan dan Sosialisme. Netral atau atjuh-tak-atjuh terhadap semuanya ini adalah bertentangan dengan pendirian dan pandangan hidup Rak-jat Indonesia, bertentangan dengan kepentingan nasional Rakjat Indonesia.

Sedjak hari² permulaan Revolusi Agustus 1945 politik luarnegeri RI merupakan bagian yang penting dari Revolusi. Ini berarti bahwa politik luarnegeri RI harus tegas² diabdikan untuk memenangkan Revolusi Agustus. Djuga sudah terbukti, bahwa kebidjaksanaan politik luarnegeri yang tidak diabdikan kepada tugas nasional me-

menangkan Revolusi Agustus, adalah suatu pengchianatan terha-dap Republik dan Rakjat Indonesia.

Bersamaan dengan mengabdi Revolusi Agustus 1945, politik luarnegeri RI harus mengabdi perdamaian antara bangsa². Dua tugas politik luarnegeri ini, jaitu memenangkan Revolusi Agustus dan perdamaian, tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.

Dalam perkembangannya semendjak 1945, politik luarnegeri RI mengalami kemunduran² dan kemadjuan²nja. Ternjata bahwa tiap kali kebidjaksanaan politik luarnegeri menjeleweng dari tudjuan dan semangat Revolusi Agustus, maka tiap kali pula politik luar-negeri itu dikutuk oleh Rakjat, dan Indonesia mengalami masa yang tjelaka dalam pergaulan antara bangsa². Sebaliknya tiap kali politik luarnegeri ditudjukan untuk mengabdi Revolusi Agustus, maka tiap kali pula politik luarnegeri disokong Rakjat dan mem-bawa RI ke-kemadjuan² digelanggang internasional. Semua ini se-harusnja mendjadi peladjaran bagi pemimpin² Rakjat, para pengu-a-sa dan petugas negara dibidang ini.

Pengalaman Indonesia sudah tjukup banjak untuk dapat me-njimpulkan suatu kebidjaksanaan politik luarnegeri yang objektif dan benar, ditudjukan untuk melaksanakan dua tugas politik luar-negeri seperti tersebut diatas.

Sedjarah diplomasi dan pengalaman Indonesia memberi pela-djaran bahwa politik luarnegeri yang tepat adalah politik luarnegeri yang disokong oleh Rakjat dan yang bisa ditjapai hanya apabila dibentuk dan disusun bersama-sama dengan Rakjat melalui kon-sultasi-konsultasi demokratis dan bentuk² kerdjasama lainnya yang tetap antara Pemerintah dan Rakjat.

Politik luarnegeri yang tepat dan bisa sukses hanyalah politik luarnegeri yang bersandarkan kekuatan dan kepentingan massa Rakjat Indonesia, dan bersandarkan kekuatan dan kepentingan umum Rakjat diseluruh dunia.

Berdasarkan tindjauan dan kebidjaksanaan politik luarnegeri ini, Partai sudah dan akan dapat membangkitkan dan memelihara ke-waspadaan nasional. Partai sudah dan akan dapat mengawasi de-ngan saksama djalannya politik luarnegeri yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, memperbaiki dan mendorongnja madju, atau djika perlu, menentangnja. Dengan demikian Partai akan selalu bisa mensinjalir proletariat dan Rakjat Indonesia terhadap bahaya² provokasi, intervensi dan agresi imperialis yang mengantjam Re-publik terus-menerus.

Partai harus merumuskan politik luarnegerinja yang mampu menghadapi musuh internasional Rakjat Indonesia yang paling berbahaya, jaitu imperialisme AS. Ia harus mampu mentjegah dan

mengalahkan intervensi dan agresi imperialis yang tiap saat mengantjam keutuhan dan kedaulatan Republik Indonesia. Ia harus mampu menghadapi segala muslihat politik reaksioner dan segala komplotan kontra-revolusioner yang bersumber pada politik subversi dan intervensi imperialis terhadap Indonesia. Politik luar-negeri kita harus mampu membantu tertjapainja pelaksanaan pembangunan ekonomi dan perbaikan hidup seperti yang di-tjita²kan oleh Rakjat Indonesia. Ia harus benar² sesuai dan mentjerminkan segala yang madju daripada keadaan dalamnegeri Indonesia.

Politik luarnegeri yang wadjar dan objektif inilah yang harus digariskan oleh Partai dan yang harus dijadikan milik Rakjat, supaya Partai bersama Rakjat memperdjuangkan politik luarnegeri ini untuk lambat-laun dapat dijadikan garis kebidjaksanaan resmi dari Pemerintah Republik Indonesia.

(1) Inti Pokok Zaman Kita Jalah Peralihan Dari Kapitalisme Ke Sosialisme

Dalam rangka menetapkan arah politik luarnegeri Partai kita, adalah sangat penting untuk mengetahui terlebih dahulu perubahan ekonomi dan sosial apakah yang sedang terdjadi didunia kita sekarang. Tentang ini „Deklarasi” 12 Partai Komunis dan Partai Buruh dari negeri² Sosialis, yang dikeluarkan dalam bulan November 1957 antara lain mengatakan, bahwa „Inti pokok dari zaman kita jalah peralihan dari kapitalisme ke Sosialisme yang telah dimulai dengan Revolusi Sosialis Oktober Besar Rusia”. („Deklarasi” halaman 7, Jajasan „Pembaruan” 1958). Kebenaran daripada apa yang telah dinjatakan ini dibuktikan oleh kenjataan, bahwa kira² 1.000 djuta penduduk dunia atau lebih dari sepertiga umatmanusia telah menempuh djalan Sosialisme dan sedang membina hidup baru. (Tepuktangan lama).

Dalam periode antara Kongres Nasional ke-V Partai sampai kini, kehidupan politik internasional sangat kaya dengan perubahan² intensif dan tjepat, dengan pengalaman² dan kemadjuan². Imbangan kekuatan internasional mengalami perubahan besar. Ini disebabkan oleh landjutnja dua proses sosial yang berlawanan satu sama lain dan yang makin tjepat menurut arahnja masing². Disatu pihak dunia imperialis dengan proses sosialnja menudju kehantjurannja sendiri dan difihak lain dunia Sosialis dengan proses sosialnja menudju kearah perluasan dan kemadjuan terus-menerus. Satu dengan proses sosial yang kedua ini adalah perkembangan gerakan kemerdekaan nasional yang sekarang sudah banjak melahirkan negeri² yang

baru merdeka dan dengan se-djelas²nja menundjukkan makin rontoknja sistim kolonial-imperialis. Seluruh perkembangan kedjadian² didunia berkisar disekitar dua proses pokok ini. Tentang ini „Deklarasi” tersebut diatas menjatakan seperti berikut : „Sedang Sosialisme tengah dalam menaik, imperialisme menudju kepenurunan. Kedudukan imperialisme telah sangat mendjadi lemah sebagai akibat menghantjurnja sistim kolonial” (halaman 9).

Kegagalan berbagai avontur imperialis seperti misalnja kegagalan agresi militernja terhadap Mesir dan kegagalan kontra-revolusi terhadap Hongaria pada achir 1956, kegagalan kasak-kusuknja di Kambodja, kegagalan intervensinja yang aktif membantu kaum pemberontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta”, kegagalan agresinja di Libanon dan Jordania sehingga dengan demikian berarti kegagalan rentjana intervensi terhadap Republik Irak yang baru lahir pada waktu itu, kegagalan agresinja diselat Taiwan, kegagalan intervensinja di Tibet, adalah tanda² djelas yang menundjukkan merosotnja kedudukan dan kekuatan kaum imperialis. Perlu djuga disebut ketidakmampuannja mengatasi setjara damai krisis yang kini sedang menimpa lagi ekonomi AS. Seluruh dunia termasuk Rakjat Indonesia sudah tjukup mengenal sifat agresif, intervensionis dan penindas, dan sifat lapuk dan mundur kalau dilawan dari imperialis Amerika Serikat.

Rakjat di Amerika Latin menjatakan perasaan tidak senangnja dengan memberikan sambutan yang mentjemooahkan dan menolak terhadap kundjungan John Foster Dulles dan Wakil Presiden Nixon pada tahun 1958 yang lalu. Makin terdesak kaum imperialis, makin nekad dan biadab pula tindakan²nja sehingga makin dibentji dan dimusuhi oleh Rakjat sedunia. Achirnja dalam keadaan mereka sudah tidak bisa lagi mengatasi kesulitan²nja dengan tjara² yang biasa dilakukannja, maka dalam usahanja untuk mempertahankan kekuasaan kolonialnja, mereka tak segan² untuk menggunakan tjara² kudeta fasis dan junta-militer untuk membentuk pemerintah boneka seperti misalnja sekarang di Korea Selatan, di Vietnam Selatan, di Pakistan, di Muangthai dan dibeberapa negeri lain di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Tetapi djalan pemerintah boneka tidak selalu djalan yang aman bagi imperialis seperti ternjata dari penggulingan kekuasaan Nuri es Said oleh Revolusi Irak. (Tepuktangan lama).

Kaum imperialis AS adalah musuh nomor satu dari seluruh bangsa-bangsa didunia. „Deklarasi” 12 Partai Komunis dan Partai Buruh tersebut tentang ini menjatakan bahwa „Dengan politik mereka golongan² agresif tertentu di Amerika Serikat berusaha keras untuk menghimpun disekitar mereka semua kekuatan reaksioner

dari dunia kapitalis. Dengan bertindak begini mereka menjadi pusat reaksi dunia, menjadi musuh bebujutan Rakjat" (halaman 12). Melawan imperialisme AS dalam situasi dunia sekarang merupakan bagian yang takterpisahkan daripada perjuangan untuk kemerdekaan nasional, demokrasi dan perdamaian abadi. (Tepuk-tangan).

(2) Situasi Ekonomi Dunia Kapitalis Sekarang

Kawan²!

Berbitjara tentang ekonomi dunia kapitalis sekarang berarti berbitjara tentang krisis „kelebihan produksi“ („overproduksi“), tentang pengangguran, tentang kontradiksi² sosial yang makin sulit dapat diatasi. Berbitjara tentang ekonomi dunia kapitalis sekarang berarti berbitjara tentang ekonomi Amerika yang sekarang dengan sekuat tenaga berusaha untuk menguasai seluruh ekonomi dunia kapitalis, dan juga berarti berbitjara tentang semakin tadjamnya persaingan diantara negeri² kapitalis itu sendiri. Berbitjara tentang ekonomi dunia kapitalis dewasa ini tidak dapat terlepas dari hubungannya dengan situasi ekonomi dunia Sosialis yang sedang berkembang dengan megahnja.

Kontradiksi² didalam masyarakat kapitalis berpokok pada keinginan kaum kapitalis untuk memperbesar produksinya dan dengan demikian memperbesar keuntungan²nja setjara tidak terbatas, halmana berlawanan dengan kemampuan dajabeli yang terbatas dari pasaran dalam negeri. Kontradiksi² ini sudah berkali-kali menimbulkan krisis di AS sedjak berachirnya Perang Dunia II dan akibatnya sudah pula dirasakan oleh negeri² kapitalis di Eropa Barat. Kontradiksi-kontradiksi ini bertambah dengan makin sempitnya dunia kapitalis karena meluasnya dunia ekonomi Sosialis dan karena kemadjuan negeri² non-Sosialis yang baru merdeka dan mulai membangun ekonominya yang berindustri. Dengan demikian kesulitan² dalam bentuk krisis ekonomi yang makin mendalam makin sering menimpa dunia kapitalis. Persaingan diantara negeri² kapitalis untuk menguasai pasaran kapitalis semakin menghebat seperti terlihat dari pertarungan sengit yang sedang terdjadi disekitar masalah Pasaran Bersama Eropa diantara 6 negara Eropa Barat (Djerman Barat, Perantjis, Italia, Belanda, Belgia dan Luxemburg) dan konsepsi Inggris tentang Daerah Dagang Bebas yang meliputi 17 negeri anggota Organisasi Kerdjasama Ekonomi Eropa. Pasaran Bersama Eropa maupun Daerah Dagang Bebas, walaupun ada pertentangan-pertentangan diantaranya, ke-dua²nja memusuhi gerakan kemerdekaan nasional dan merintangi usaha peredaran ketegangan

internasional, karena ke-dua²nja tetap bertudju membelian bahan² mentah dengan harga yang se-pertahankan adanya blok² militer.

Dalam beberapa kali krisis ekonomi yang AS sesudah Perang Dunia II, nilai produksi dalam krisis di-tahun² 1948/1949, dengan tahun² 1953/1954, dan dengan 14% dalam krisis 1958. Satu kechususn dari krisis yang sekarang ini berbeda dengan di-tahun² 1948/1949 dan 1953/1954, maka krisis di-tahun² 1957/1958 semua negara kapitalis, tanpa per-tjualan, seluruhnya terkena dan menderita. Dalam enam bulan pertama dari tahun 1958 kemunduran produksi dari seluruh dunia kapitalis berdjumlah sebesar 6% dibanding dengan masa yang sama ditahun 1957, sedangkan kemunduran dari nilai perdagangan dunia kapitalis adalah 8%.

Krisis di AS yang paling belakangan, yang dimulai dalam tahun 1957, dan yang kemudian disusul oleh krisis² di-negeri² kapitalis lainnja sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi di-negeri² yang kurang maju. Harian „Financial Times“ yang terbit di London mengatakan bahwa „salahsatu segi yang paling serius daripada resesi yang baru ini menghinggapi AS dan Eropa adalah pengaruhnya terhadap harga bahan² mentah dan oleh karenanya terhadap ekonomi di-negeri² yang menghasilkan bahan² mentah“. Harian itu menjelaskan bahwa angka² yang dikemukakan dalam „World Economic Survey“ tahun 1958 yang dikeluarkan oleh PBB menunjukkan bahwa „penghasilan expor dari negara² yang menghasilkan bahan² mentah telah turun dengan 7,8% dalam tahun 1958 djika dibandingkan dengan tahun 1957“. Dan djika diingat bahwa harga barang² industri yang dibeli oleh negeri² itu dari negeri² kapitalis terus meningkat selama krisis, maka dapat dibayangkan betapa hebatnya pukulan yang diderita oleh negeri² yang kurang maju sebagai akibat dari krisis ekonomi negeri² kapitalis itu.

Inggris dan umumnja negeri² kapitalis di Eropa selain menghadapi kontradiksi² sosial dalam masyarakat mereka sendiri, djuga menderita karena turunnya penghasilan dan dajabeli dari negeri² yang kurang maju, disebabkan karena krisis di AS yang mengurangi pembelian²nja di-negeri² ini. Akibatnya ialah kemerosotan expor Eropa ke-negeri² yang kurang maju, chususnja expor barang-barang modal. Produksi industri badja Inggris misalnja di-tahun 1958 turun dengan 17% djika dibandingkan dengan tahun 1957, dan dalam triwulan pertama tahun ini turun lagi dengan 15% djika dibandingkan dengan waktu yang sama tahun yang lalu.

Perb
geri
ke
te
n

dari dunia kapitalis. Dengan bertindak begini mereka menjadi pusat reaksi dunia, menjadi musuh bebujutan Rakjat" (halaman 12). Melawan imperialisme AS dalam situasi dunia sekarang merupakan bagian yang takterpisahkan daripada perjuangan untuk kemerdekaan nasional, demokrasi dan perdamaian abadi. (Tepuktangan).

(2) Situasi Ekonomi Dunia Kapitalis Sekarang

Kawan²!

Berbitjara tentang ekonomi dunia kapitalis sekarang berarti berbitjara tentang krisis „kelebihan produksi“ („overproduksi“), tentang pengangguran, tentang kontradiksi² sosial yang makin sulit dapat diatasi. Berbitjara tentang ekonomi dunia kapitalis sekarang berarti berbitjara tentang ekonomi Amerika yang sekarang dengan sekuat tenaga berusaha untuk menguasai seluruh ekonomi dunia kapitalis, dan juga berarti berbitjara tentang semakin tajamnya persaingan diantara negeri² kapitalis itu sendiri. Berbitjara tentang ekonomi dunia kapitalis dewasa ini tidak dapat terlepas dari hubungannya dengan situasi ekonomi dunia Sosialis yang sedang berkembang dengan megahnja.

Kontradiksi² didalam masyarakat kapitalis berpokok pada keinginan kaum kapitalis untuk memperbesar produksinya dan dengan demikian memperbesar keuntungan²nja setjara tidak terbatas, halmana berlawanan dengan kemampuan dajabeli yang terbatas dari pasaran dalam negeri. Kontradiksi² ini sudah berkali-kali menimbulkan krisis di AS sedjak berachirnja Perang Dunia II dan akibatnja sudah pula dirasakan oleh negeri² kapitalis di Eropa Barat. Kontradiksi-kontradiksi ini bertambah dengan makin sempitnja dunia kapitalis karena meluasnja dunia ekonomi Sosialis dan karena kemadjuan negeri² non-Sosialis yang baru merdeka dan mulai membangun ekonominja yang berindustri. Dengan demikian kesulitan² dalam bentuk krisis ekonomi yang makin mendalam makin sering menimpa dunia kapitalis. Persaingan diantara negeri² kapitalis untuk menguasai pasaran kapitalis semakin menghebat seperti terlihat dari pertarungan sengit yang sedang terdjadi disekitar masalah Pasaran Bersama Eropa diantara 6 negara Eropa Barat (Djerman Barat, Perantjis, Italia, Belanda, Belgia dan Luxemburg) dan konsepsi Inggris tentang Daerah Dagang Bebas yang meliputi 17 negeri anggota Organisasi Kerdjasama Ekonomi Eropa. Pasaran Bersama Eropa maupun Daerah Dagang Bebas, walaupun ada pertentangan-pertentangan diantaranya, ke-dua²nja memusuhi gerakan kemerdekaan nasional dan merintangi usaha peredaran ketegangan

internasional, karena ke-dua²nja tetap bertudjuan memonopoli pembelian bahan² mentah dengan harga yang se-murah²nja dan mempertahankan adanya blok² militer.

Dalam beberapa kali krisis ekonomi yang dialami oleh ekonomi AS sesudah Perang Dunia II, nilai produksinja turun dengan 10% dalam krisis di-tahun² 1948/1949, dengan 11% dalam krisis di-tahun² 1953/1954, dan dengan 14% dalam krisis di-tahun² 1957/1958. Satu kechususan dari krisis yang sekarang ini ialah bahwa berbeda dengan di-tahun² 1948/1949 dan 1953/1954, maka selama krisis di-tahun² 1957/1958 semua negara kapitalis, tanpa perke-tjualian, seluruhnja terkena dan menderita. Dalam enam bulan pertama dari tahun 1958 kemunduran produksi dari seluruh dunia kapitalis berdjumlah sebesar 6% dibanding dengan masa yang sama ditahun 1957, sedangkan kemunduran dari nilai perdagangan dunia kapitalis adalah 8%.

Krisis di AS yang paling belakangan, yang dimulai dalam tahun 1957, dan yang kemudian disusul oleh krisis² di-negeri² kapitalis lainnja sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi di-negeri² yang kurang madju. Harian „Financial Times“ yang terbit di London mengatakan bahwa „salahsatu segi yang paling serius daripada resesi yang baru ini menghinggapi AS dan Eropa adalah pengaruhnja terhadap harga bahan² mentah dan oleh karenanja terhadap ekonomi di-negeri² yang menghasilkan bahan² mentah“. Harian itu menjelaskan bahwa angka² yang dikemukakan dalam „World Economic Survey“ tahun 1958 yang dikeluarkan oleh PBB menunjukkan bahwa „penghasilan ekspor dari negara² yang menghasilkan bahan² mentah telah turun dengan 7,8% dalam tahun 1958 djika dibandingkan dengan tahun 1957“. Dan djika diingat bahwa harga barang² industri yang dibeli oleh negeri² itu dari negeri² kapitalis terus meningkat selama krisis, maka dapat dibayangkan betapa hebatnja pukulan yang diderita oleh negeri² yang kurang madju sebagai akibat dari krisis ekonomi negeri² kapitalis itu.

Inggris dan umumnja negeri² kapitalis di Eropa selain menghadapi kontradiksi² sosial dalam masyarakat mereka sendiri, juga menderita karena turunnja penghasilan dan dajabeli dari negeri² yang kurang madju, disebabkan karena krisis di AS yang mengurangi pembelian²nja di-negeri² ini. Akibatnja ialah kemerosotan ekspor Eropa ke-negeri² yang kurang madju, chususnja ekspor barang-barang modal. Produksi industri badja Inggris misalnja di-tahun 1958 turun dengan 17% djika dibandingkan dengan tahun 1957, dan dalam triwulan pertama tahun ini turun lagi dengan 15% djika dibandingkan dengan waktu yang sama tahun yang lalu.

Perbandingan angka rata² pengangguran penuh di beberapa negeri kapitalis dalam tahun 1957, 1958 dan 1959 lebih mendjelaskan keadaan, jaitu sbb.:

	1957	1958	1959
A.S.	2.936.000	4.700.000	4.700.000 (Djan.)
Kanada	274.000	450.000	750.000 (Djan.)
Inggris	347.000	500.000	620.000 (Djan.)
Belgia	116.000	180.000	250.000 (Maret)
Djepang	530.000	600.000	(belum tersedia)

Di AS masalah pengangguran sangat mengchawatirkan umum. Tentang pengangguran di AS ini madjalah "Economist" dari London (Djanuari 1959) mengatakan: „*Bahkan atas dasar perkiraan² yang paling optimis dari produksi total selama 1959, tidak ada harapan bahwa pengangguran akan turun dibawah 3,5 djuta selama seluruh tahun*”. Oleh umum sudah diakui bahwa ekonomi AS harus menyesuaikan diri dengan suatu „*pengangguran kronis yang permanen*” (“*permanent chronic unemployment*”) sebesar kira² 5% dari seluruh tenagakerdja (sebelum 1957/1958 angka tetap ini kira² 3% dari seluruh tenagakerdja). Dikalau menurut dalil ahli² ekonomi burdjuis pengangguran sedjumlah 2,5% dari seluruh tenagakerdja dianggap tidak ada pengangguran, maka golongan yang berkuasa di AS menganggap angka 2,5% itu terlalu ketjil dan merasa perlu diperbesar mendjadi 5% ! (Tawa; seruan: „*Wah, wah!*”). Dengan kenyataan ini maka lenjaplah segala omongan tentang „*masa kemakmuran*” bagi ekonomi AS. Dalam hubungan ini baik pula diperhatikan apa yang dikatakan oleh "U.S. News and World Report" (Februari 1959), jaitu bahwa dalam 10 tahun yang terachir ini (1948-1958) djumlah buruh diindustri AS hanja naik dengan 1%, sedangkan hasil²nja naik dengan 32%. Dalam sistim kapitalisme seperti AS sekarang, kenaikan mutu teknik dalam produksi seperti misalnja otomasi, ternjata tidak membawa kemakmuran bagi Rakjat seperti di-negeri² Sosialis, tetapi sebaliknya membawa pengangguran, kerugian² fisik dan materiil dari kaum buruh serta ketegangan² sosial yang lebih genting. Hal ini dengan djelas dibuktikan oleh pemogokan 500.000 buruh badja AS pada minggu ke-3 bulan Djuli tahun ini yang telah melumpuhkan kira² 90% dari produksi badja AS.

Dengan dalih melawan inflasi, Pemerintah AS yang dikuasai oleh kaum monopolis besar sekarang sedang mempersiapkan diri untuk melawan setiap usaha kaum buruh untuk mentjapai perbaikan nasibnja. Dengan adanja pengangguran kronis, maka teranglah bahwa perdjjuangan kaum buruh di AS untuk perbaikan nasib mendjadi semakin sengit. Ahli² ekonomi di Barat suka membanggakan bahwa krisis, yang oleh mereka masih biasa disebut „*resesi*”, telah dapat diatasi. Tetapi kenjataannja jalah, bahwa kenaikan² dalam nilai produksi yang tertjapai sedjak bulan Mei 1958 belum dapat memulihkan produksi sampai pada tingkatan produksi tahun 1957 dan samasekali tidak membawa perbaikan dalam penghidupan Rakjat.

Dalam hubungan dengan krisis ekonomi dunia sekarang, yang mulai dalam tahun 1957, baik pula kiranja hal yang berikut diperhatikan :

Pertama, situasi expor AS, yang ditahun 1958 telah turun dengan 18% djika dibandingkan dengan tahun 1957 dan yang dewasa ini masih berada dalam tingkatan yang djauh dibawah situasi sebelumkrisis. Berbitjara tentang expor AS madjalah "Economist" (Mei 1959) mengatakan bahwa „*masih sadja belum kelihatan ada perbaikan disektor ini*”.

Kedua, situasi investasi modal, yang telah turun dari angka rata² saban tahun berdjumlah US \$ 37.000 djuta ditahun 1957 mendjadi US \$ 30.000 djuta ditahun 1958. Menurut perkiraan, tingkatan tahun 1957 baru akan dapat ditjapai lagi paling tjepat pada tahun 1960. Tetapi inipun belum lagi berarti perluasan kapasitas produksi dan kesempatan kerdja, karena sebagian besar dari investasi-investasi yang direntjanakan untuk tahun 1959 bukanlah untuk mendirikan pabrik² baru tetapi untuk mengganti dan memodernisasi mesin² yang sekarang sudah ada. Yang terachir ini akan memperbesar lagi pengangguran seperti yang sudah didjelaskan dimuka.

Ketiga, kenaikan dalam produksi industri badja yang memainkan peranan penting dalam kenaikan produksi selama 5 bulan pertama tahun 1959 ternjata disebabkan oleh muslihat kaum monopolis AS untuk menimbun persediaan badja yang tjukup supaja bisa lebih mampu menghadapi aksi² mogok kaum buruh industri badja yang menuntut kenaikan upah. Pemogokan buruh industri badja yang sangat ditakuti oleh kaum monopolis AS sudah terdjadi seperti diterangkan diatas.

Keempat, mengenai sifat umum daripada krisis yang sekarang ini, perlu dikemukakan bahwa proses penarikan negeri² kapitalis kedalam krisis ini berdjalan relatif lambat dan menundjukkan pula ketidak-serentakan. Disaat krisis disatu atau di beberapa negeri

kapitalis se-akan² telah berachir, di-negeri² lain sedang menghebat atau malahan baru mulai, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa krisis telah berachir. Dan pula, setiap adanya krisis disatu negeri kapitalis mempersukar negeri² kapitalis lainnja seperti terlihat dari kenyataan bahwa belumlah terdjadi perbaikan dalam ekspor AS ke-negeri² kapitalis lainnja.

Semuanya ini tjukup mendjelaskan bahwa sekarang ekonomi AS masih belum dapat mengatasi kesulitan² pokok jang dihadapinja dan bahwa kontradiksi² intern dalam masjarakat kapitalis itu sendiri akan makin tadjam, halmana berarti bahwa krisis sekarang diduga akan lebih tjepat disusul oleh krisis lain jang lebih dalam lagi.

Kawan²!

Dalam usahanja untuk mengatasi krisis² ekonomi jang dihadapinja itu, kaum monopolis mengambil djalan memperbesar pengeluaran-pengeluaran militer. Djalan memiliterisasi ekonomi negeri merupakan satu²nja djalan keluar jang masih terbuka bagi mereka. Inilah keterangannja mengapa negara² imperialis mendjalankan politik luarnegeri jang makin agresif terhadap negeri² lain.

Sedjarah ekonomi kapitalis telah membuktikan bahwa pengeluaran militer dari pemerintah memang merupakan satu²nja tindakan anti-krisis jang terpenting dan efektif. Madjalah "U.S. News and World Report" pernah menamakan angkatan perang sebagai „langganan Amerika jang paling besar" ("America's biggest customer").

Depresi besar jang berlangsung selama 10 tahun (1930-1940), jaitu ketika angka pengangguran di AS tidak pernah turun dibawah 10 djuta, baru dapat diatasi hanya setelah AS mulai terlibat dalam persiapan² Perang Dunia II. Krisis ekonomi di-tahun² 1949-1950 baru dapat diatasi setelah kaum imperialis mulai mempersiapkan dan melakukan agresinja terhadap Korea. Dan krisis ekonomi di-tahun² 1953-1954 timbul setelah kaum imperialis terpaksa harus menghentikan perang kolonialnja terhadap Korea karena desakan Rakjat tjinta damai diseluruh dunia.

Ekonomi AS sesungguhnya tidak pernah selengkapnja dikembalikan mendjadi ekonomi damai sesudah berachirnja Perang Dunia II. Pengeluaran² jang dilakukan oleh pemerintah untuk keperluan angkatan perang, jang rata² berdjumlah 60% dari penghasilan, merupakan sumber pokok dan terpenting dari penghasilan kongsi² besar dan seluruh kegiatan ekonomi AS. Ia mewakili bagian jang menentukan dalam „pendapatan nasional" AS dan merupakan sumber jang menentukan bagi kesempatan kerdja di AS. Industri perang AS memakai hampir separo dari seluruh investasi

industri partikelir dan merupakan sampai 39% dari total produksi industri berat AS. Sendjata merupakan bahan ekspor Amerika jang terpenting, djuga dalam rangka „bantuan" jang diberikannja kepada negeri² lain. Sekalipun tidak setingkat seperti selama Perang Dunia II, namun djelas merupakan kenyataan, bahwa ekonomi AS adalah ekonomi perang, dimana pengeluaran dan konsumsi militer merupakan unsur pokok jang paling menentukan.

Ini berarti bahwa AS dan kapitalisme dunia lebih tidak mungkin lagi mengatasi kekatjaan dalam sistim ekonominja sendiri. Satu²nja jang dapat mereka tjoba jalah melalui djalan memperbesar pasaran bagi industri perangnja, jaitu dengan mendjalankan politik luarnegeri jang menimbulkan peperangan² lokal jang baru. Tiap kali ekonomi imperialis mengalami krisis, maka tiap kali pula politik internasional mendjadi lebih tegang dan masalah perang dan damai mendjadi masalah dunia jang paling penting dan menondjol. Tetapi politik militerisasi ekonomi AS tidak lain hanya makin mempertadjam lagi kontradiksi² intern didalam tubuh sistim kapitalisme AS sendiri.

Djelaslah bahwa kepentingan imperialis adalah bertentangan dengan kepentingan hidup seluruh umatmanusia. Ketakutan terhadap kekuatan militer jang unggul dari negeri² Sosialis dan terhadap pendapat umum dunia jang kuat menentang perang menjebabkan kaum imperialis sampai sekarang tidak berani begitu sadja nekad untuk membakar dunia dalam perang dunia jang baru.

Politik kaum imperialis jang bersumber pada djalan buntu daripada sistim kapitalisme, sistim jang tidak mempunjai haridepan lagi, merupakan sumber dan biangkeladi utama dari semua ketegangan internasional dan telah berakibat mempertentangkan bangsa-bangsa tertentu satu sama lain.

Politik ini harus dilawan dan dikalahkan demi keselamatan dan keamanan dunia, demi kemerdekaan dan kemadjuan bangsa². Partai Komunis disemua negeri memelopori dan memimpin perlawanan terhadap perang, terhadap politik pembunuhan massal. Adalah satu kenyataan, apakah orang suka atau tidak suka mengakuinja, bahwa Partai Komunis dan Pemerintah Uni Sovjet memelopori perjuang-an melawan politik perang negara² imperialis jang dikepalai oleh AS. (Tepuktangan lama).

(3) Kubu Sosialis Dan Pengaruh Internasionalnja

Kawan²!

Tidak ada seorangpun dapat membantah bahwa sekarang Sosialisme sedang mengungguli kapitalisme dalam semua hal jang

berarti madju, berguna dan baik bagi Rakjat pekerdja dan umat-manusia. Sekarang tidak lain dari Amerika Serikat sendiri, negara pimpinan daripada kapitalisme, yang sudah memikirkan bagaimana *mengedjar Uni Sovjet* dalam sedjumlah tjabang penting daripada ilmu dan teknologi. Dalam produksi industri Uni Sovjet sudah lama melampaui negara² kapitalis yang terbesar di Eropa jaitu Inggris, Perantjis dan Djerman Barat. Dalam laporannya kepada Kongres ke-21 (Luarbiasa) PKUS, yang dilangsungkan dari tanggal 27 Djanuari — 5 Februari 1959, Kawan Chrusjov a.l. mengatakan, bahwa dalam waktu Rentjana Tudjuh Tahun ditambah dengan kira² 5 tahun, djadi dalam tahun 1970, atau mungkin djuga sebelumnya, „*Uni Sovjet akan menduduki tempat nomor satu didunia, baik dalam volume produksi mutlak, maupun dalam produksi per kapita (tiap djiwa). Hal ini akan merupakan kemenangan Sosialisme yang bersedjarah-dunia dalam perlombaan damai dengan kapitalisme digelanggang internasional*”. (Tepuktangan lama).

Tak dapat dibantah oleh siapapun, bahwa sputnik² dan planit buatan Sovjet adalah bukti yang paling menjolok dari kenyataan bahwa dibawah Sosialisme telah diudjudkan hasrat² yang paling berani dan berhasil daripada manusia. (Tepuktangan).

Kawan²!

Sekarang inipun produksi industri per kapita dari seluruh dunia Sosialis telah menjusul produksi industri per kapita dari seluruh dunia kapitalis. (Tepuktangan). Negeri² Sosialis yang didiami oleh sepertiga penduduk dunia sekarang sudah menghasilkan lebih dari sepertiga produksi industri dunia, hampir separoh dari produksi gandum dan 43% dari produksi kapas. Sesudah Rentjana Tudjuh Tahun Uni Sovjet terlaksana sepenuhnya, dan ditambah lagi dengan ketjepatan yang tinggi dari perkembangan ekonomi negeri² demokrasi Rakjat, maka dalam tahun 1965 sistim dunia Sosialis bukan hanya akan unggul dalam produksi per kapita, tetapi djuga akan menghasilkan lebih dari separoh produksi industri dunia. (Tepuktangan). Sebagaimana sudah dikatakan diatas, dalam tahun 1970 atau sebelumnya Uni Sovjet akan menduduki tempat nomor satu didunia, baik dalam volume produksi mutlak maupun dalam produksi per kapita. Ini berarti bahwa dalam tahun 1970 Uni Sovjet, sebagai pelopor daripada negeri² kubu Sosialis, akan mampu mendjamin tingkat penghidupan yang paling tinggi diseluruh dunia. (Tepuktangan). Ini nanti akan merupakan peristiwa dunia yang bersedjarah dalam perlombaan damai, antara Sosialisme dengan kapitalisme digelanggang internasional, perlombaan yang setjara pasti akan dimenangkan oleh Sosialisme. (Tepuktangan).

Kongres ke-21 PKUS telah menetapkan tugas² pokok untuk me-

wudjudkan segala sjarat materiil dan teknik serta menjiapkan massa Rakjat politis dan ideologis untuk memasuki masa pembangunan Komunisme di Uni Sovjet.

Plan 7 Tahun URSS memang suatu tugas raksasa, sehingga pers burdjuis pun seperti yang dinjatakan oleh madjalah Inggris „*Economist*” terpaksa mentjatat, bahwa rentjana itu menimbulkan „*kesan yang mengagumkan*”. Pekerdjaan raksasa dari Rakjat Sovjet ini menundjukkan bahwa sekarang Uni Sovjet sudah memasuki tingkat yang baru dalam perlombaan ekonomi dengan kapitalisme, suatu tingkat yang menundjukkan bahwa Uni Sovjet sudah bisa „mengadu tenaga” dengan negeri kapitalis yang paling kuat seperti Amerika Serikat. Melebihi AS berarti melebihi angka² kapitalisme yang paling tinggi.

Sedjak sekarang sudah dapat dibayangkan bahwa keadaan dan imbalan kekuatan internasional akan berubah samasekali, apabila nanti Uni Sovjet sudah mendjadi negeri industri nomor satu didunia dan seluruh negeri² Sosialis sudah menghasilkan lebih dari separoh produksi industri dunia. Sukses Sosialisme ini akan berarti diperkokohnya kekuatan tjinta damai diseluruh dunia. Walaupun kemenangan Sosialisme didunia belum tertjapai sepenuhnya, dan disebagian dunia masih ada kapitalisme, namun sudah terdapat tjukup sjarat untuk menghilangkan peperangan dunia dari kehidupan manusia. Keunggulan kubu Sosialis dalam imbalan kekuatan internasional merupakan sjarat objektif yang menentukan bagi tertjapainya kemenangan perdjuaan untuk memaksa kaum imperialis buat se-lama²nja meninggalkan perang sebagai tjara penyelesaian masalah² internasional.

Republik Rakjat Tiongkok, sekalipun masih menghadapi tugas dilapangan politik dan militer untuk membebaskan Taiwan, sekarang sedang melaksanakan tugas² pembangunan Sosialis dengan gaja madju melompat. Pembentukan Komune² Rakjat membuktikan sekali lagi daya kreasi yang tinggi dari Rakjat dan Partai Komunis Tiongkok dalam memperkuat Sosialisme dan dalam menudju ke Komunisme di Tiongkok. Setelah menyelesaikan Plan Lima Tahun Pertama dalam waktu 4 tahun, sekarang Rakjat Tiongkok sedang giat membangun untuk menjusul dan melampaui Inggris, negeri industri yang paling tua didunia, dalam waktu 15 tahun sedjak tahun 1957 dalam djumlah produksi besi dan badja serta hasil² industri lainnya yang terpenting. Melihat perkembangan produksi besi dan badja di Tiongkok sekarang, sangat mungkin bahwa rentjana ini akan tertjapai dalam waktu yang djauh kurang dari 15 tahun.

Kemadjuan² yang ditjapai RRT dalam tahun 1958 memang sa-

ngat mengagumkan. Nilai total produksi industri dalam tahun 1958 adalah 66% lebih tinggi daripada tahun 1957, dan produksi baja, besi, batubara dan hasil² industri lainnja menjadi dua kali lipat. Hasil mesin perkakas ("machine tools") naik 3,2 kali lipat dalam tahun itu. Dilapangan pertanian produksi kapas mentah ditahun 1958 naik lagi dengan 28% daripada tahun 1957, sehingga RRT sekarang menduduki tempat nomor satu didunia sebagai negeri penghasil kapas. Produksi gandum telah naik dengan 35% ditahun 1958, jaitu mentjapai angka 250 djuta ton.

Suksesnja gerakan Komune Rakjat di RRT menandakan suatu tingkat baru dari pembangunan Sosialis di-desa² dan mempunjai arti internasional yang amat penting. Sedjak semula Komune Rakjat telah menarik perhatian seluruh dunia. Terhadap organisasi sosial yang baru ini musuh² Rakjat ber-teriak² se-olah² Komune Rakjat menghantjurkan kehidupan keluarga. Teriakan imperialis AS yang memfitnah RRT itu djuga diikuti oleh teriakan kaum reaksi di Indonesia sematjam Hatta, yang memang tidak bisa melihat sesuatu yang sungguh² baik untuk Rakjat. (Tawa). Komune² Rakjat yang makin berkembang di-desa² RRT sedjak pertengahan tahun 1958 telah „menggabungkan industri, pertanian, perdagangan, pendidikan dan urusan kemiliteran, dan dimana administrasi pemerintahan dan urusan Komune telah dipersatupadukan" (Resolusi Tentang Beberapa Masalah Komune Rakjat, Sidang Pleno ke-VI CC ke-8 Partai Komunis Tiongkok, Desember 1958). Perkembangan Komune Rakjat merupakan bagian yang wajar dari kemadjuan terusmenerus dan setjara melompat disegala lapangan dalam produksi pertanian dan kesadaran politik dari 500 djuta petani Tiongkok yang kian hari kian meningkat. Semua ini mempercepat dan memperkokoh pembangunan Sosialis di RRT, yang berarti sumbangan besar bagi kemenangan Sosialisme didunia. Ratusan djuta Rakjat Tiongkok yang sudah terkonsolidasi dalam Komune² Rakjat dan yang tidak se-mata² berketjimpung dalam urusan ekonomi, tetapi djuga terlatih dalam kebudayaan dan kemiliteran, terang merupakan kekuatan yang luarbiasa dalam perdjuaan untuk membela perdamaian dan untuk mengalahkan imperialisme.

Lawan² Sosialisme tidak dapat membantah adanya kemadjuan² luarbiasa yang telah ditjapai oleh Tiongkok Sosialis. Kenyataan ini menunjukkan bahwa djalan yang diambil oleh RRT adalah djalan yang benar dan djaja dan yang wajar ditempuh pula oleh negeri² Asia lainnja, tentu sadja dengan mengingat kehususn² negeri² itu. (Tepuktangan).

Perkembangan Sosialisme dunia yang dipelopori oleh Uni Sovjet djuga ditandai oleh penyelesaian pembangunan Sosialisme dise-

djumlah negeri lain di Eropa dan Asia. Di Tjekoslowakia penghisapan manusia atas manusia pada dasarnya sudah dihapuskan. (Tepuktangan). Ditinjau dari sudut volume produksi industri, Tjekoslowakia sekarang merupakan salahsatu Republik yang terkemuka didunia. Di Bulgaria Sosialisme sudah menang di-kota² dan desa. Di Republik Demokrasi Djerman, Polandia, Rumania, Hongaria, Albania, Republik Rakjat Demokrasi Korea, Republik Demokrasi Vietnam dan Republik Rakjat Mongolia pembangunan Sosialisme madju dengan pesat.

Keunggulan ekonomi Sosialis djuga terbukti dari tingkat ketjepatan perkembangan yang lebih tinggi dibanding dengan negeri² kapitalis. Selama 40 tahun yang lalu, produksi industri di Uni Sovjet naik dengan rata² 10,1% tiap tahun, sedangkan untuk AS angka ini adalah 3,2%, untuk Inggris 1,9% dan untuk Perantjis 3,2%. Djika hanya tahun² damai sadja yang diperhitungkan, perkembangan ekonomi Sovjet malahan ternyata lebih tjepat lagi. Selama 11 tahun sebelum perang (1930-1940) dan 11 tahun sesudah perang (1947-1957) kenaikan perkembangan produksi industri Sovjet rata² berdjumlah 16,2%, sedangkan AS 2,7%, Inggris 3,2% dan Perantjis 3,1%. Ditahun 1957 total produksi industri di Uni Sovjet berdjumlah 33 kali lipat lebih tinggi djika dibandingkan dengan tahun 1913. Untuk AS angka ini adalah 4,1 untuk Inggris 1,8 dan untuk Perantjis 2.

Kerdjasama dilapangan ekonomi antara negeri² Sosialis menjadi lebih sempurna dengan adanya Dewan Saling Bantu Ekonomi. Kerdjasama ekonomi ini terutama ditujukan untuk memadjukan sumber² bahan mentah dan tenaga listrik serta pada soal mempergunakan segala apa yang paling baru ditjapai dilapangan teknologi. Perhatian khusus diberikan pada kebutuhan kordinasi yang lebih besar dan pada spesialisasi dilapangan permesinan yang akan memungkinkan pelaksanaan massa-produksi setjara besar²an serta modern dan yang akan sangat mengurangi biaya produksi. Dewan Saling Bantu Ekonomi ini merupakan pernjataan yang se-murni²nja dari internasionalisme proletar. Ini adalah bentuk dan sistim kerdjasama internasional bagi masyarakat dunia diharidepan.

Berlainan dengan sistim pembagian kerdja seperti yang terdapat didunia kapitalis, dimana Indonesia djuga termasuk, dimana kemadjuan² yang tertjapai hanya terbatas pada beberapa negeri imperialis yang berkuasa sadja, sedangkan negeri² lainnja tinggal terbelakang dan tidak mengalami kemadjuan, maka sistim pembagian kerdja internasional didunia Sosialis mendjamin adanya kemadjuan yang merata, tjepat dan saling menguntungkan bagi semua negeri pesertanja. Dalam waktu beberapa tahun sadja, semua negeri So-

sialis, tanpa ketjuali, telah mentjapai kemadjuan² jang njata dan mengagumkan dalam membangun industri dan seluruh ekonominja.

Kemadjuan ekonomi jang merata dan tjepat dari semua negeri Sosialis mempunjai arti jang sangat penting bagi negeri² jang mpenduduk dunia. Sampai² kepada tokoh² negara² non-Sosialis jang baru merdeka di Asia dan Afrika dalam berbagai bentuk pernja-taan djuga menghendaki dan ber-tjita² Sosialisme. Kita mungkin tidak sependapat dengan tokoh² ini mengenai tjara² mentjapai So-sialisme dan maksud² jang terkandung dibelakang pernjaan itu, tetapi jang penting ialah bahwa mereka telah menjatakan apa jang mendjadi hasrat Rakjat, jaitu Sosialisme. Sesungguhnya, meluapnja dan menangnja perdjungan kemerdekaan bangsa² di Asia dan Afrika sesudah perang, adalah merupakan satu bagian jang pen-ting dan merupakan salahsatu bentuk peralihan dari proses runtu-hnja kapitalisme dunia dan tumbuhnja Sosialisme. (*Tepuktangan*).

Sosialisme sudah mendjadi sistim dunia, mendjadi simbul dan perwakilan dari segala sesuatu jang baik dan maju serta men-djadi daya penarik internasional dan harapan serta tudjuan hidup bagi be-ratus² djuta manusia jang masih meringkuk dan sengsara dibawah penghisapan dan penindasan kapital.

Sosialisme dalam diplomasi dan politik internasional merupakan pembela jang setia dan teguh dari kemerdekaan bangsa² dan per-damaian dunia, pengandjur dan pelaksana dari hidup berdamping-an setjara damai dan bersahabat antara bangsa², tjontoh daripada kemauan baik dan kesanggupan hidup dan kerdjasama setjara damai antara bangsa² dengan sistim sosial jang berlainan, peng-andjur dari normalisasi perdagangan internasional tanpa diskrimi-nasi dan tukar-menukar hasil ilmu dan kebudayaan setjara damai antara Timur dan Barat.

Sosialisme dilapangan ekonomi merupakan kesanggupan beker-dja setjara berentjana, mengindustrialisasi negeri setjara besar²an, penggunaan otomasi se-luas²nja, mekanisasi pertanian, dan ke-sanggupan membawa kemadjuan dan kemakmuran jang terus-menerus meningkat dalam kehidupan materiil dan kulturil manu-sia. Keunggulan sistim Sosialisme atas kapitalisme ditjerminkan dilapangan kesedjahteraan Rakjat. Angka kematian di Uni Sovjet adalah paling rendah didunia, sedangkan tambahnja penduduk lebih tinggi daripada kebanyakan negara kapitalis. Pada tahun ter-akhir daripada Plan 7 Tahun akan dilaksanakan setjara ber-angsur² 30 djam kerdja seminggu untuk kaum buruh jang bekerdja diba-wah tanah dan dalam produksi dengan sjarat² kerdja jang merugi-kan kesehatan dan 35 djam kerdja seminggu bagi kaum buruh lainnja. Tudjuan lebih djauh ialah untuk melaksanakan minggu-

kerdja 5 hari dengan enam-tudjuh djam kerdja sehari. Pengurang-an djumlah harikerdja seminggu bukan hanja tidak diikuti oleh pengurangan gadji, tetapi malahan diikuti oleh kenaikan gadji jang njata. Pendeknja, dalam waktu jang tidak lama lagi di Uni sih terbelakang, sebab kubu Sosialis semakin merupakan sumber dari barang² jang mereka perlukan bagi pembangunan ekonomi na-sionalnja dan semakin sanggup membeli bahan² mentah jang me-reka hasilkan. Dengan adanya kubu Sosialis jang terus maju, ma-ka tertjita dan terdjaminlah kemungkinan untuk maju bagi ne-geri-negeri jang masih terbelakang. (*Tepuktangan*).

Kawan²!

Proses peralihan dari kapitalisme ke Sosialisme jang berlang-sung dalam abad kita sekarang ini tidak hanja telah melahirkan Sosialisme di-daerah² jang luas dibenua Eropa dan Asia, tetapi djuga telah melahirkan kubu perdamaian jang sangat kuat dan melahirkan gerakan kemerdekaan nasional jang belum pernah ada taranja dalam sedjarah dunia.

Sebelum Perang Dunia II hanja ada satu negeri Sosialis diseper-enam permukaan bumi, jaitu Uni Sovjet dengan penduduk kira² 170,4 djuta. Dalam tahun 1956 penduduk dunia ada 2.737 djuta (angka PBB). Sekarang ini hampir 1.000 djuta dari penduduk dunia hidup di-negeri² Sosialis, 700 djuta di-negeri² jang baru mer-deka dan anti-imperialis seperti Indonesia, India, Irak, Birma, Me-sir, dll, 600 djuta sedang berdjuaug untuk kemerdekaan nasional-nja melawan imperialisme dan hanja 400 djuta tinggal di-negeri² imperialis seperti AS, Inggris, Perantjis, Belgia, Italia, dsb. Tetapi dari jang 400 djuta itu sebagian jang terbesar ambil bagian dalam perdjungan revolusioner melawan imperialisme dan kapitalisme. (*Tepuktangan*).

Sebelum Perang Dunia II keanggotaan serikatburuh diseluruh dunia hanja 40 djuta, tetapi sekarang sudah 4 kali lipat jaitu 160 djuta. (*Tepuktangan*). Gerakan perdamaian jang djuga berwatak anti-kolonial, terutama sesudah Konferensi Stockholm pada per-tengahan tahun 1958, makin hari makin bertambah kuat dan me-luas. Persekutuan kaum buruh dengan kaum tani, sebagai tulang-punggug daripada persatuan Rakjat, makin berkembang diseluruh dunia.

Sebagai tulangpunggug dan sebagai tenaga pimpinan daripada gerakan Rakjat progresif diseluruh dunia, sebelum Perang Dunia II Partai Komunis hanja terdapat di 43 negeri dengan keanggotaan 4,2 djuta. Sekarang Partai Komunis dan Partai Buruh (Komunis) sudah terdapat di 83 negeri dengan keanggotaan 8 kali lipat, jaitu 33 djuta, (*tepuktangan lama*) dimana 1,5 djuta terdapat di Indo-

nesia. (*Tepuktangan dan seruan : „Hidup !”*). Sebelum Perang Dunia II di Indonesia hanya terdapat beberapa ribu orang Komunis yang tidak terorganisasi sebagaimana mestinya.

Sosialisme sebagai ide sudah mengisi pikiran bagian terbesar Sovjet akan ada harikerdja dan minggukerdja yang paling singkat didunia bersamaan dengan perkembangan kesedjahteraan penduduk. Semuanya ini mungkin karena keunggulan Sosialisme, dimana produksi yang makin meningkat tidak ditudjukan untuk memperbesar keuntungan tuan² besar kapitalis, tetapi untuk pemenuhan maksimal kebutuhan² semua anggota masyarakat.

Keunggulan Sosialisme atas kapitalisme adalah djuga dibuktikan oleh keunggulan dilapangan ilmu dan teknologi, dilapangan kebudayaan, moral dan kekuatan militer.

Segala komplotan kontra-revolusioner satu persatu telah dapat digagalkan dimana sadja ia muntjul dinegeri Sosialis. Barisan Sosialis mendjadi makin kokoh, pembangunan Sosialis makin lantjar dan martabat Sosialisme makin menaik.

Intisari dari pengalaman² Komunis yang paling berharga telah dirumuskan dalam „*Deklarasi*” dari 12 Partai Komunis dan Partai Buruh negeri² Sosialis dan „*Manifes Perdamaian*” dari 64 Partai Komunis dan Partai Buruh sebagai hasil dan kesimpulan dari Konferensi Moskow dibulan November 1957. Djuga Partai kita adalah peserta aktif dalam Konferensi yang bersedjarah itu. Suksesnja Konferensi ini menandakan permulaan dari suatu tingkatan baru dalam gerakan Komunis sedunia.

Kedua dokumen tersebut memberikan analisa djelas tentang situasi dunia sekarang beserta perspektif yang terang tentang perkembangannya diharidepan. Kedua dokumen tersebut merupakan pedoman aksi dan program kerdja yang demokratis bagi perjuang-an kaum Komunis dan semua orang yang tjinta damai dan kemerdekaan.

Dalam hubungan ini, orang perlu diingatkan akan usaha² yang hendak mengatjau dan memetjahbelah gerakan Komunis sedunia. Usaha ini adalah sangat berbahaya bagi Sosialisme dunia, bagi front internasional anti-kolonial dan tjinta damai. Jang perlu disebut disini adalah penjelewengan yang berupa revisionisme modern, jang sekarang menghinggapi klik Tito dalam pimpinan Liga Komunis Jugoslavia (LKJ). Atasnama Sosialisme dan atasnama Komunisme, klik Tito menempatkan diri diluar kubu Sosialis dan diluar gerakan Komunis.

Dalam kata², klik Tito ini djuga menempatkan diri diluar kubu imperialis, tetapi dalam kenjataannya mereka samasekali tidak pernah setjara tegas menjalahkan apalagi mengutuk politik pemerin-

tah AS jang agresif. Sebaliknya, bersama Turki dan Junani mereka membikin Pakt Balkan jang menjalurkan mereka ke-NATO. Tidaklah mengherankan apabila klik Tito dengan semangat balas-dendam (semangat revansis) tidak djemu²nja ber-ulang² menuduh dan memfitnah Uni Sovjet sebagai imperialis jang hendak meniadakan kemerdekaan Jugoslavia. Mereka menjatakan dirinja berdiri diluar „dua blok politik militer”. Dengan pernyataan ini mereka memfitnah se-olah² tudjuan politik luarnegeri Uni Sovjet sama dengan tudjuan politik luarnegeri jang agresif dari imperialis AS. Padahal, seseorang tidak perlu mendjadi Komunis untuk mengerti perbedaan antara Sosialisme dan imperialisme dan perbedaan politik luarnegeri dari masing² sistim ini.

Klik Tito dari Liga Komunis Jugoslavia suka ber-teriak² seperti djuga kaum imperialis, tentang „imperialisme Sovjet” dan menuduh negara² Sosialis sebagai „satelit² Sovjet”. Tetapi tahukah mereka bahwa di Jugoslavia sekarang bisa berkuasa kembali radja² djika tidak ada kubu Sosialis jang dipelopori oleh Uni Sovjet, karena kaum imperialis lebih pertjaja kepada radja² daripada kepada pemimpin² LKJ ? Ketjuali kalau pemimpin² LKJ sudah tidak ada bandja lagi dengan radja² ! Karena sekarang sudah ada kubu Sosialis jang dapat mengungguli dunia kapitalis dalam banjak hal, karena sudah ada front internasional anti-kolonial dan tjinta damai jang kuat, penguasaan imperialis setjara lama sudah tidak dimungkinkan lagi. (*Tepuktangan*).

Djelaslah bahwa klik Tito sedang mendjalankan suatu politik jang pada hakekatnja sama dengan politik imperialis, jaitu memetjahbelah persatuan kaum Komunis sedunia. Dengan berbuat demikian mereka djuga mengharap akan dapat menarik pemimpin² burdjuasi nasional jang memerintah di-negeri² non-Sosialis jang baru merdeka di Asia dan Afrika jang mendjalankan politik luarnegeri untuk perdamaian dunia dan anti-kolonial. Dengan djalan ini kaum revisionis berharap akan dapat menarik mereka kedalam apa jang mereka namakan suatu „blok ketiga” sebagai saluran dan aparatur untuk mendjauhkan negara² non-Sosialis di Asia dan Afrika dari kubu Sosialis jang mendjadi inti daripada front perdamaian dan anti-imperialis serta menjeret negara² tsb. keblok imperialis. Dengan demikian mereka bermaksud memetjah front internasional anti-kolonial dan tjinta damai jang sekarang sedang tumbuh diseluruh dunia.

Tetapi hasilnya bukanlah seperti jang diinginkan oleh klik Tito. Kaum Komunis bukannya terpetjahbelah, tetapi malahan makin kokoh bersatupadu. Hanya dikalangan kaum nasionalis di-negeri² Arab, sampai batas² tertentu, Tito berhasil menimbulkan petjah-

belah. Hal ini sangat kita sesalkan, karena ini sedikit atau banyak dapat melemahkan front internasional anti-kolonial dan tjinta damai.

Dalam hubungan ini kita ingin menjebut kedunguan Presiden Nasser dari Mesir yang telah mengorbankan nama baiknja sebagai pedjuang anti-kolonial dengan mengikuti djedjak klik Tito mendjalankan politik anti-Komunis yang reaksioner dari kaum imperialis.

Padahal, kenjataanja sekarang jalah bahwa pemimpin² nasional di-negeri² Asia-Afrika yang baru merdeka dapat dengan lega dan bangga berkata, bahwa negeri mereka tidak akan „mati” djika diboikot oleh AS dan negeri² imperialis lainnja, karena ada negeri² Sosialis yang setiap saat bersedia mengulurkan tangannja untuk membantu dengan tanpa sjarat. (*Tepuktangan*). Mungkinkah ada kebanggaan demikian djika tidak ada kubu Sosialis yang kuat? Djawabnja yang djudjur jalah: tidak mungkin! Djawaban yang lebih djudjur lagi jalah: djika tidak ada kubu Sosialis yang kuat yang dipelopori oleh Uni Sovjet, kaum imperialis masih akan meradja-lela di Asia-Afrika dan di-negeri² yang sekarang sudah merdeka masih bertachta gubernur² djenderal kulitputih dan radja² yang mesum dan korup. Adanja kubu Sosialis objektif menguntungkan dan membantu mempertjepat kemenangan perdjuaan kemerdekaan nasional, tidak perduli apakah kebenaran ini diakui atau tidak. (*Tepuktangan*).

Adanja RRT telah mengubah wadjah dunia. Tetapi untuk Asia, adanja RRT mempunyai arti yang lebih penting lagi. Dengan adanja Republik Rakjat Tiongkok yang berpenduduk kira² 700 djuta ditambah lagi dengan penduduk Republik Rakjat Mongolia, Republik Rakjat Demokrasi Korea dan Republik Demokrasi Vietnam, berarti bahwa lebih separoh dari penduduk Asia sudah masuk kubu Sosialis dan merupakan benteng yang sangat kuat dalam perdjuaan menghantjurkan sisa² kekuasaan imperialis di Asia. (*Tepuktangan*). Bajangkan betapa rupanja Asia sekarang djika Tiongkok masih dikuasai oleh Tjiang Kai-sek dan Amerika Serikat. Dan lihatlah sekarang sesudah Tiongkok mendjadi anggota kubu Sosialis yang kuat! Perdjuaan kemerdekaan nasional negeri² Asia-Afrika mendjadi lebih dipermudah, kaum imperialis tidak berani lagi berbuat serampangan di Asia-Afrika, atau djika mereka berani berbuat serampangan mereka akan menanggung akibat²nja yang berarti kehantjuran mereka sendiri.

Adanja RRT telah memungkinkan lahirnja monumen bersedjarah dalam diplomasi dan politik internasional, jaitu Lima Prinsip Tjou En-lai — Nehru, jaitu prinsip saling menghormati keutuhan

wilayah dan kedaulatan, non-agresi, tidak tjampurtangan dalam urusan dalamnegeri masing², persamaan dan saling menguntungkan, serta hidup berdampingan setjara damai. Lima Prinsip Tjou-Nehru ini sangat membantu dalam kita menindjau berbagai persoalan dan pertikaian internasional. Lima Prinsip ini merupakan sendjata didalam tangan Rakjat didunia untuk menilai kebidjaksanaan politik luarnegeri pemerintahnja masing², untuk mengawasi politik luarnegeri imperialis dan mengenal serta menilai politik luarnegeri Sosialis. Lima Prinsip tsb. adalah Lima Prinsip Keamanan dan Perdamaian Internasional. Ini adalah sumbangan Asia pada dunia diplomasi dan politik internasional, salahsatu pernjataan daripada hembusan angin Timur yang mengalahkan angin Barat. Ini adalah djuga pembenaran apa yang setjara profetis sudah dikatakan oleh Lenin dalam tahun 1913 tentang „*Eropa yang terbelakang dan Asia yang madju*”. (*Tepuktangan*).

Dengan demikian djelaslah, bahwa gerakan Komunis sedunia dan kubu Sosialis belum pernah begitu kuat dan begitu bersatu seperti sekarang ini, terutama setelah sukses² besar dalam pembangunan Sosialisme, chususnya berhubung dengan dimulainja pembangunan Komunisme di URSS dan gerakan Komune Rakjat yang djaja di RRT.

Kawan²!

Demikianlah kenjataan masjarakat dunia sekarang. Dua sistim sosial, kapitalisme dan Sosialisme, adalah sebagai kenjataan dan hidup berdampingan. Jang satu, kapitalisme, sistim yang sudah lapuk dan sedang dalam proses menudju keruntuhannja. Jang lain, Sosialisme, sistim dunia baru, yang mendapat simpati kaum pekerdja disemua negeri, sistim yang sedang berkembang dengan tjepatnja, yang mempunyai haridepan yang gemilang dengan kemungkinan-kemungkinan yang takterhingga. Memang hal ini tidak bisa terus berlangsung se-lama²nja dan harus disudahi sistim mana yang objektif dan sesuai dengan kebutuhan dan kemadjuan hidup umat-manusia. Soalnja jalah bagaimana tjara menjudahinja, dengan saling bermusuhan, saling mengisolasi dan berperang, atau dengan bersaing setjara damai.

Mengenai hal ini, kaum Komunis sudah lama menundjukkan djalan keluar yang paling demokratis dan paling menguntungkan bagi seluruh umatmanusia, jaitu djalan yang dikemukakan Lenin tentang prinsip hidup berdampingan antara negara² yang sistim sosialnja berlainan, prinsip ko-existensi setjara damai antara negara-negara kapitalis dan Sosialis. Sedjak tahun 1917 sedjarah sudah membuktikan bahwa sistim kapitalisme tidak mungkin bisa dipaksakan dengan djalan apapun, djuga tidak dengan djalan perang

kepada suatu masyarakat yang memang sudah tjukup sjarat²nja untuk Sosialisme.

Sosialisme sebagai sistim dunia yang baru adalah suatu kenja-taan. Adalah pula suatu kenyataan bahwa kapitalisme sebagai sis-tim dunia masih ada dan belum lenjap samasekali dari dunia. Tidak bisa lain, kapitalisme dan Sosialisme harus hidup berdampingan dan bersaing setjara damai, dan harus melakukan hubungan² yang normal dan damai antara satu sama lain dilapangan sosial, kebu-dajaan, ekonomi dan politik. Dalam laporannja kepada Kongres ke-21 PKUS, Kawan Chrusjov mengatakan bahwa „*rentjana yang disahkan oleh Kongres kita itu ditudjukan untuk mendjamin hidup berdampingan setjara damai dan memperkuat ichtiar untuk per-damaian diseluruh dunia*” dan bahwa „*Program ekonomi dari pem-bangunan damai di URSS untuk djangka waktu 1959-1965 mem-berikan perspektif² yang luas untuk memperkembangkan perdagang-an Uni Sovjet dengan semua negeri*” dan Uni Sovjet „*se-kurang²-nja bisa dua kali memperbesar perdagangan luarnegeri*”.

Salahsatu pernajaan yang sangat penting daripada prinsip hidup berdampingan setjara damai adalah diadakannja hubungan dagang yang bebas, normal dan ramai antara Barat dan Timur. Adalah satu kenyataan bahwa di-tahun² belakangan ini perdagangan antara negara² kapitalis sendiri pada umumnja menurun, sedangkan per-dagangan antara Barat dan Timur menaik sampai dua kali lipat, jaitu US \$ 6.000 djuta dalam tahun 1957 dan US \$ 3.000 djuta dalam tahun 1953. Pemimpin² Uni Sovjet sudah berulangkali me-majukan adjakan dan tawaran berdagang bebas kepada Barat, hal mana, djika diterima oleh Barat, akan merupakan saluran djalan keluar dan bantuan yang meringankan kesulitan² ekonomi yang se-dang dihadapi oleh Barat sekarang.

Pernajaan lain yang penting daripada prinsip ko-existensi se-tjara damai adalah pertukaran internasional antara wakil² peme-rintah dan wakil² Rakjat dari berbagai negeri. Dalam rangka ini adalah penting sekali disedari arti dan pengaruh yang sangat baik daripada kontak² pribadi dan pergaulan² setjara langsung dari para pemimpin negara² seperti yang misalnja dilakukan dengan kun-djungan Wakil² PM Anastas Mikojan dan kemudian Frol Kozlov ke AS, kundjungan PM Inggris MacMillan dan Wakil Presiden Amerika Serikat Richard Nixon ke Uni Sovjet dan salingkundjung yang akan diadakan antara Nikita Chrusjov dan Dwight Eisenho-ver dalam tahun ini djuga. Tak dapat dilupakan betapa pentingnja arti pergaulan erat yang pernah terdjadi antara para Perdana Men-teri yang telah berhasil melahirkan Konferensi Asia-Afrika yang bersedjarah di Bandung dan demikian pula kontak² dan pertemuan²

langsung antara Presiden Sukarno dengan para pemimpin tertinggi dari negara² lain. Hal ini perlu diperluas lebih landjut, terutama dengan kontak² dan pergaulan² langsung dari para sardjana, seni-man, olahragawan, wartawan dan wakil organisasi² Rakjat Indo-nesia dengan para terkemuka negeri² lain.

Satu-satunja alternatif daripada ko-existensi setjara damai ada-lah djalan perang, djalan bentjana pembunuhan dan penghantjuran setjara massal. Sudah djelas bahwa djalan perang adalah djalan keneraka, djalan anti-kemanusiaan yang tidak bisa dibenarkan. Kaum Komunis akan terus berbuat se-gala²nja untuk mentjegah djangan sampai djalan perang bisa dipaksakan kepada dunia. Da-lam „*Deklarasi*” 12 Partai Komunis dan Partai Buruh ditegaskan bahwa „*soal perang atau ko-existensi setjara damai sekarang men-djadi soal yang menentukan dalam politik dunia*” (halaman 15). Satu²nja pilihan yang benar adalah djalan damai, djalan ko-exis-tensi dan bersaing setjara damai antara sistim kapitalisme dan sis-tim Sosialisme !

Tidaklah mengherankan apabila umatmanusia makin meninggalk-an kapitalisme dan makin mengerumuni Sosialisme. Inilah sesung-guhnja yang mendjadi hakekat pokok dari perkembangan dan per-golakan internasional sekarang.

(4) Situasi Politik Internasional

Keadaan masyarakat dunia seperti diuraikan diatas beserta per-soalan²nja tertjermin djelas dalam persoalan² dan pertikaian² po-litik internasional, yang pada dasarnya terbagi dalam dua aliran, jaitu aliran yang membela dan mempertahankan kapitalisme dan aliran yang membela dan memperdjauangkan Sosialisme. Pertarung-an antara kedua aliran ini meliputi seluruh dunia dan djuga ter-dapat di Indonesia dan di-negeri² non-Sosialis lainnja di Asia, Afrika dan di Amerika Latin.

Kedua aliran ini memang mentjerminkan proses objektif yang sedang terdjadi dimasyarakat dunia. Oleh karenanja, adalah suatu kepalsuan reaksioner untuk mendjadikan situasi yang objektif ini sebagai hanja soal pertentangan kepentingan ekonomi dan politik antara Amerika Serikat dan URSS se-mata².

Sedjarah perdjuangan untuk Sosialisme sudah membuktikan da-lam teori dan praktek bahwa yang ternjata terudji benar adalah Sosialisme ilmu seperti yang telah disimpulkan dan dirumuskan oleh K. Marx dan F. Engels dan dikembangkan lebih landjut oleh W.I. Lenin dan pemimpin² Partai² Komunis lainnja.

Aliran politik yang membela dan memperdjauangkan Sosialisme

tampil kemuka dengan tudjuan yang djudjur dan dinjatakan se-tjara terus-terang seperti yang tertjermin dalam politik Partai² Komunis dan diplomasi Sosialis. Aliran politik ini, yang mewakili proses sosial yang objektif dan benar, tidak memerlukan penipuan atau bersembunyi dibelakang sembojan² yang kosong dan palsu.

Tetapi sebaliknya, aliran yang hendak membela dan mempertahankan kapitalisme terpaksa dan terbukti harus bersembunyi di-belakang sembojan² kosong dan palsu dan harus membontjeng ke-pada demagogi „sosialis“, seperti yang dilakukan oleh Perdana Menteri Nehru dari India. Ini tidak lain jalah karena tudjuan orang² dari aliran ini berlawanan dengan proses objektif, dan oleh karena itu sukar untuk mendapatkan pasaran dikalangan massa Rakjat. Hal ini djuga terlihat di Indonesia. Ada pembela² setia dari kapitalisme dan mati²an memusuhi Sosialisme, tetapi dalam omongan se-hari² mereka berkedok dibelakang merk „sosialis“ dan „Marxis“. (Tawa). Berbagai variasi sembojan „sosialis“ dipergu-nakannya, misalnja oleh kaum sosialis kanan, tetapi pada hakekat-nja kesemuanya itu hanjalah bentuk² konsepsi burdjuasi yang se-dang mentjoba untuk membela kepentingan klasnja yang memusuhi Sosialisme. Ini sekali lagi membuktikan apa yang sudah digambar-kan oleh Lenin dalam tahun 1913 dengan perkataan : „Dialektika sedjarah adalah demikian rupa sehingga kemenangan teoritis Marx-isme memaksa musuh²nja menjamar sebagai kaum Marxis“ (Lenin dalam „Nasib Sedjarah Adjaran Karl Marx“).

Pertarungan antara kedua aliran ini dalam politik internasional mengambil berbagai bentuk dan mengakibatkan timbulnja berbagai persoalan yang menjangkut kepentingan umum seluruh dunia. Yang terpokok diantaranya adalah masalah perang dan damai, masalah perang dingin, masalah kolonialisme, masalah pangkalan militer dinegeri lain, masalah perdagangan bebas dan normal antara Ti-mur dan Barat, masalah larangan digunakannya sendjata² nuklir, masalah dihentikannya pertjobaan² bom nuklir, masalah perlutjutan persendjataan, dan masalah² hangat lainnya seperti misalnja ma-salah remiliterisasi Djepang, masalah penjatuan kembali Vietnam dan Korea, masalah Berlin Barat, masalah perdjandjian perdamai-an dengan Djerman, masalah pakt² militer agresif SEATO, NATO dll. Semua soal itu menjangkut kepentingan dan keamanan umum dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu Rakjat Indonesia tidak boleh bersikap pasif terhadap masalah² tersebut, tetapi harus meng-hadapinja dan mengambil bagian aktif dalam menjelesaikannya.

Diantara semua masalah hangat itu, masalah Berlin Barat dan Djerman adalah yang paling mendesak dewasa ini. Adalah memang tidak masuk akal bahwa setelah hampir 15 tahun perang dunia

berachir Berlin Barat masih sadja diduduki oleh tentara asing dan perdjandjian perdamaian dengan Djerman belum lagi ditanda-tangani. Politik damai dan demokratis dari Uni Sovjet dan semua negeri Sosialis ditudjukan untuk mengachiri situasi yang pintjang di Eropa ini. Sebaliknya, negara² Barat hendak terus memelihara kepintjangan ini, karena dengan berbuat demikian mereka berha-rap dapat mempertahankan kekuasaannya di Eropa. Adenauer dan Pemerintah Djerman Barat yang mewakili kepentingan kaum im-perialis Djerman, merupakan biangkeladi utama yang bersama de-ngan negara² Barat lainnya terus menunda-nunda penjelesaian masalah Berlin Barat dan masalah Djerman. Hal ini ditentang se-tjara luas oleh Rakjat Djerman sendiri. Imperialis Djerman yang dihidupkan kembali dengan bantuan kaum monopoli AS merupa-kan bahaya yang sangat mengganggu keamanan dan perdamaian di Eropa. Untuk menjelesaikan masalah² ini Uni Sovjet sudah sampai mengusulkan diadakannya Konferensi Tingkat Tertinggi dari Em-pat Besar. Fihak Barat bukannya kompak dalam menghadapi usul² Sovjet itu. Tiga Besar Barat, jaitu Amerika Serikat, Inggris dan Perantjis, masing² berusaha untuk mendjalankan politiknya sen-diri-sendiri, sekalipun keluar nampaknya satu. Tetapi bagi dunia demokratis dan tjinta damai, termasuk Rakjat Indonesia, sudahlah sewadarnya untuk menjokong politik diadakannya KTT, karena politik ini langsung memperkuat perdamaian. (Tepuktangan).

Kawan² !

Sedjalan dengan berlangsungnya dua proses didunia, jaitu proses kehantjuran kapitalisme dan proses kenaikan Sosialisme, maka da-lam politik dan diplomasi internasional terdapat dua matjam ke-bidjaksanaan, dengan tudjuan, tjara² dan semangatnja sendiri². Yang satu adalah politik luarnegeri imperialis yang membela dan mempertahankan penghisapan dan penindasan, kolonialisme dan perang. Yang lain politik luarnegeri negara² Sosialis yang berdjua-ng untuk menghapuskan penghisapan, kolonialisme dan perang, dan untuk mentjiptakan masjarakat baru didunia yang adil dan mak-mur, damai dan madju.

Ber-turut² dan terusmenerus imperialisme melakukan intervensi dan agresi terhadap negeri² lain, dan ber-turut² dan terusmenerus pula negeri² Sosialis menentangnja dan membela hak dan kepen-tingan negara² korban intervensi dan agresi imperialis. Ber-turut² dan terusmenerus negeri² Sosialis mengambil inisiatif dan mema-djukan usul² damai dan demokratis serta memberi tjontoh untuk mengurangi ketegangan² internasional, tetapi ber-turut² dan terus-menerus pula Amerika Serikat dan negara² imperialis lainnya me-nolak dan menggagalkannya.

Dalam Kongres Nasional ke-V Partai kita telah mengkonstatasi perimbangan kekuatan internasional dan prospek perkembangannya menudju kearah yang makin lebih menguntungkan bagi kemerdekaan nasional, perdamaian dan Sosialisme. Dalam periode sesudah itu perkembangan internasional benar² menunjukkan pergeseran kekiri, kearah yang makin mementjilkan dan merugikan kaum imperialis, terutama imperialis AS yang terusmenerus nekad mempertahankan kolonialisme, terus menimbulkan ketegangan² baru, terus mengadakan subversi, intervensi dan agresi dan mengubah perang dingin mendjadi perang panas. Sebagai akibatnja, belum pernah imperialisme Inggris-Perantjis begitu terisolasi dan begitu dibentji Rakjat sedunia seperti diwaktu mereka melantjarkan agresi militernja terhadap Mesir. Djuga belum pernah kaum imperialis AS-Inggris begitu terisolasi dan begitu dibentji Rakjat sedunia seperti diwaktu mereka mendaratkan pasukan²nja di Libanon dan Jordania.

AS mendapat pukulan bukan main hebatnja dengan meletusnja revolusi di Irak pada tanggal 14 Djuli 1958. Peristiwa ini menandakan adanya pasang baru dalam gerakan revolusi nasional sedunia. Revolusi Irak ini kemudian diikuti oleh proklamasi Republik Aldjazair dan Guinea. Belum pernah AS begitu terpentjil sendirian seperti ketika AS melakukan agresi terhadap RRT disekitar Selat Taiwan. Bandingkanlah keadaan ini dengan keadaan ketika pada tanggal 25 Djuni 1950 AS melantjarkan agresinja terhadap Korea yang berlangsung terus sampai tanggal 27 Djuli 1953. Pada waktu itu AS masih dapat memaksakan kehendaknja pada banjak negeri didunia, termasuk Indonesia, misalnja mengenai embargo terhadap RRT.

Pendapat umum sedunia makin mengenal betapa tidak sungguh²nja AS dalam mengusahakan persetudjuan internasional untuk menghentikan pertjobaan² sendjata nuklir dengan segera, tanpa sjarat dan untuk se-lama²nja. Padahal Uni Sovjet sudah menunjukkan kemauan baiknja dengan menghentikan setjara sefihak mulai tanggal 31 Maret 1958 pertjobaan² sendjata nuklir untuk waktu 6 bulan. Uni Sovjet terusmenerus mengadjak AS dan Inggris untuk mentjapai persetudjuan internasional mengenai hal ini, meskipun djumlah pertjobaan bom nuklir yang sudah dilakukannja kurang daripada yang pernah dilakukan oleh AS maupun oleh Inggris. Tetapi usaha baik ini tidak berhasil, Amerika dan Inggris tetap mau meneruskan pertjobaan² sendjata nuklir.

Kebangunan anti-kolonial dari bangsa² Asia dan bangsa² Arab terus meluas dan mentjapai kemadjuan² penting. Beberapa pengalaman dan peladjaran penting dapat disimpulkan dari perlawanan

sengit bangsa² Arab terhadap kaum imperialis. Jang terpenting diantaranya adalah tersesatnja djalan Nasser dari Mesir. Pengalaman Mesir ini memberi peladjaran bahwa tidak mungkin politik luar-negeri jang madju dipertahankan, selama politik dalam negerinja anti-demokratis dan anti-Komunis. Pengalaman Mesir telah membuktikan bahwa politik anti-Komunis, politik mengekang dan menindas hak² demokratis dari Rakjat² Mesir dan Siria, adalah berlawanan dengan prinsip² anti-kolonial dan tjinta damai dari Putusan² Bandung, dan njatanja sedjalan dengan politik imperialis jang mempertahankan kekuasaan kolonialnja di-negeri² Arab, di Asia dan di-bagian² dunia lainnja. Politik anti-demokratis ini djuga didjalankan oleh kalangan jang berkuasa di India, chususnja jang merupakan tindakan membubarkan Pemerintah negara-bagian Kerala jang dipimpin oleh kaum Komunis, jang setia pada Konstitusi India dan jang telah bertindak menguntungkan Rakjat Kerala. Ini merupakan peladjaran praktis bagi Rakjat pekerdja sedunia, betapa gampangnja burdjuasi melemparkan UUD dan demokrasi djika kepentingan mereka terantjam, dan betapa burdjuasi tidak sukarela menerima djalan damai untuk perubahan sosial jang ditempuh oleh proletariat.

Berbeda dengan Mesir adalah Irak, jang setelah kemenangan Revolusi 14 Djuli 1958 mendjalankan politik luar dan dalam negeri jang bersandar atas kepentingan dan kekuatan Rakjatnja, jang tidak anti-Komunis, jang anti-kolonial dan tjinta damai dan berkerdjasama dengan kubu Sosialis menudju kekebangunan dan persatuan Arab. Djalan Mesir dan djalan Irak merupakan konfrontasi pilihan bagi dunia Arab. Tidak disangsikan lagi bahwa djalan Irak sekarang, djalan kerdjasama Nasional dan Komunis, adalah djalan Arab dan djalan kemerdekaan nasional jang sedjati. (*Tepuktangan*).

Dalam tahun² belakangan ini imperialisme makin terpuuk lagi dengan makin meluapnja perdjjuangan anti-imperialisme dari Rakjat² di Afrika dan di Amerika Latin. Konferensi se-Afrika di Accra, Ghana, jaitu Konferensi Pemerintah Negara² se-Afrika pada bulan April 1958 dan Konferensi Rakjat² se-Afrika, djuga di Accra, pada bulan Desember 1958, melandjutkan dan memperluas semangat anti-kolonial Bandung kebenua Afrika. Aksi² massa sesudah Accra sangat meluas ke Kongo, Nyasa, Rhodesia dan keempatir semua negeri di Afrika Barat, Tengah dan Selatan. Perlawanan bersendjata tidak lagi hanya terbatas pada Aldjazair, tetapi sudah meluas kedaerah Kamerun, Uganda dan Afrika Tengah. Djuga di Amerika Latin aksi² massa demokratis makin meluas dan mentjapai kemenangan². Negeri² seperti Argentina, Venezuela, Brazilia,

Chili dll., menjadi daerah² yang tidak aman lagi bagi kapital AS. Kemenangan Revolusi di Kuba merupakan sumber inspirasi yang penting bagi perjuangan pembebasan Rakyat diseluruh Amerika Latin. (*Tepuktangan lama*).

Kemenangan mutlak „Partai Aksi Rakyat” dalam pemilihan umum di Singapura pada awal tahun ini merupakan demonstrasi penolakan Rakyat terhadap pendudukan Inggris dipulau ini, dan sekaligus menelandjangi kebangkrutan politik pro-Inggris Tengku Abdul Rachman dari Malaja. (*Tepuktangan*).

Pukulan² dan kekalahan² ber-tubi² yang diderita oleh imperialisme dunia mengharuskan Rakyat untuk makin mempertinggi kewaspadaannya. Imperialisme tidak akan mau menjerah setjara sukarela tetapi harus dipaksa untuk menjerah oleh kekuatan aksi massa proletariat dan massa Rakyat lainnya sedunia. Tiap usaha imperialis untuk menjeret dunia kedalam api peperangan dunia baru ber-sama² dengan kehantjuran mereka harus dilawan.

Meluapnya kebangkitan anti-kolonial ini yang sekarang meliputi seluruh daerah Asia, Afrika dan Amerika Latin sangat berpengaruh didalam mengubah imbalanced kekuatan internasional yang menguntungkan kemerdekaan, demokrasi, Sosialisme dan perdamaian.

Dalam hubungan ini harus dijakini arti internasional yang amat penting dari gerakan dunia untuk menentang perang dan membela perdamaian abadi. „Deklarasi” 12 Partai Komunis dan Partai Buruh menegaskan: „Partai² Komunis memandang perjuangan untuk perdamaian sebagai tugas mereka yang terutama. Mereka, ber-sama² dengan semua kekuatan yang tjinta damai, akan berusaha dengan sekuat tenaga mereka mentjegah perang”. (halaman 17). (*Tepuktangan*).

Pengalaman Rakyat sendiri telah memberi pelajaran betapa benarnya kesimpulan yang telah diambil oleh Biro Perdamaian Dunia dalam sidangnja di Moskow pada tanggal 21-25 Februari 1959, jaitu bahwa musuh² perdamaian adalah pula musuh² kemerdekaan bangsa², dan bahwa gerakan perdamaian dan gerakan anti-kolonial adalah satu dan tak bisa di-pisah²kan. Gerakan kemerdekaan nasional tanpa gerakan perdamaian tidak akan dapat menjapai hasil sepenuhnya. Hal ini sesuai sekali dengan sembojan Rakyat Indonesia: „Kami tjinta perdamaian, karena kami tjinta kemerdekaan”. Tepat sekali apa yang sering dikatakan oleh Presiden Sukarno, bahwa tidak ada perdamaian selama masih ada kolonialisme. Oleh karena itu, gerakan perdamaian dunia yang sekarang sudah menjadi gerakan massa demokratis yang paling luas didunia, adalah gerakan untuk mentjegah peperangan dan anti-kolonial

Penghentian samasekali pertjobaan² sendjata nuklir dan pelarangan penggunaan sendjata² tersebut, pengachiran perang dingin, serta terdjaminnja kemerdekaan bagi semua bangsa adalah tuntutan² terpenting daripada gerakan perdamaian dunia.

Rakyat Indonesia telah memberikan sumbangannya kepada ter-tjapainya tjita² perdamaian didunia. Peranan Rakyat dan Pemerintah Indonesia dalam pembelaan hak Mesir ketika menghadapi agresi militer Inggris, Perantjis dan Israel, dan dalam mensukseskan Konferensi Asia-Afrika di Bandung, adalah sumbangan² penting dan berharga. Pernyataan² dan pidato² yang bersemangat anti-imperialisme dan tjinta damai dari Presiden Sukarno di Washington, di Moskow, di Peking, di Ankara, di Pnompenh, di Hanoi dan pada kesempatan² lain mempunyai pengaruh yang baik dalam meluaskan dan membesarkan kekuatan² damai didunia. Pengakuan segera oleh Pemerintah Indonesia atas desakan Rakyat terhadap Republik Irak, Pemerintah Sementara Aljazair, Republik Ghana dan Guinea penting sekali artinja bagi perjuangan anti-kolonial dan tjinta damai.

Pengalaman perjuangan Rakyat telah pula membuktikan betapa benarnya kesimpulan Partai selama ini bahwa *kebangunan nasional dalam bentuk meluapnya gerakan dan aksi-aksi anti-kolonial dari bangsa² di Asia, Afrika dan Amerika Latin bukanlah merupakan suatu kekuatan yang tersendiri didunia atau merupakan kekuatan blok ketiga yang berdiri diantara kekuatan imperialis dan Sosialis, melainkan satu kekuatan bagian yang memang amat penting dari kebangunan seluruh umat manusia, yang bersama kubu Sosialis menentang imperialisme menuju kemerdekaan nasional semua bangsa, demokrasi, perdamaian dan Sosialisme*. (*Tepuktangan*).

Adalah suatu kenjataan, bahwa imbalanced kekuatan internasional yang menguntungkan bagi Sosialisme merupakan sjarat objektif yang menentukan bagi berhasilnja perjuangan mempertahankan perdamaian dunia dan mentjegah petjahnja perang dunia yang baru. Tentang ini Kawan Mikojan antara lain menjatakan, bahwa „imbangan kekuatan baru itu dan prospek² selanjutnja dari perkembangan memberikan alasan untuk menjatakan pada Kongres ke-21 PKUS bahwa „suatu kemungkinan yang njata tentang disingkirkannya perang dunia dari kehidupan masyarakat akan mendapat bentuk, malahan sebelum Sosialisme menang diseluruh dunia, dengan kapitalisme masih berlangsung dibeberapa bagian dunia”. Ini akan merupakan sumbangan Sosialisme yang tak ternilai pada sedjarah manusia, perwujudan harapan² serta hasrat² yang paling dikandung semua Rakyat”.

Partai kita telah mengkonstatasi adanya front internasional anti-kolonial dan tjinta damai. Partai telah menjimpulkan bahwa Indonesia sudah semestinya menempatkan diri sebagai partisipan yang aktif dalam front ini, sesuai dengan djiwa dan tudjuan Proklamasi 17 Agustus 1945 yang ber-tjita² masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dan masyarakat dunia yang aman dan damai. Partai selalu berusaha untuk mendorong Pemerintah Indonesia supaya bertindak dan menjalankan kebidjaksanaan politik luar-negeri kearah ini.

Bagi kaum Komunis pekerjaan dalam gerakan perdamaian dunia bukanlah suatu muslihat atau sikap pura² sebagaimana yang selalu difitnahkan oleh kaum imperialis dan kakitangan²nja, tetapi adalah merupakan tugas perjuangan yang serius dan sungguh² harus dilakukan dengan sepenuh-hati.

Seluruh kekuatan Rakjat anti-kolonial, kekuatan pedjuang² perdamaian dan kekuatan Sosialis merupakan suatu front internasional yang luas dan meliputi semua negeri, menghadapi satu musuh, yaitu imperialisme dunia yang dikepalai oleh Amerika Serikat. Front internasional ini, yang disukai atau tidak berintikan kubu Sosialis, harus terusmenerus diperkuat, diperluas dan dikonsolidasi untuk keselamatan umatmanusia, untuk keamanan internasional dan untuk kemajuan umatmanusia diseluruh dunia.

(5) Soalnya Bukan „Memilih Blok”, Tetapi Mendjalankan Politik Luarnegeri yang Menguntungkan Rakjat Indonesia

Sedjarah Republik Indonesia sendiri tjukup membuktikan bahwa kerdjasama dengan Uni Sovjet dan negeri² kubu Sosialis lainnya dalam front internasional untuk perdamaian dan anti-kolonial memberikan djaminan bagi keselamatan, kemajuan dan haridepan yang lebih baik bagi Rakjat Republik Indonesia. Ini bukan „memilih blok” tetapi ini hanyalah soal mengakui suatu kenyataan se-mata². Seribu kali orang bisa mengatakan „Indonesia tidak memilih salahsatu blok” tetapi njatanja jalah, bahwa tiap kebidjaksanaan yang memusuhi Uni Sovjet dan kubu Sosialis sudah terbukti menguntungkan imperialisme, dan ini adalah bertentangan dengan kepentingan Indonesia dan pasti menemui kegagalan. Sebaliknya, tiap tindakan yang bersahabat dan kerdjasama dengan Uni Sovjet dan negeri² kubu Sosialis lainnya adalah sesuai dan sejalan dengan kepentingan Indonesia dan pasti berhasil. Se-orang kepalabatu anti-Komunis seperti Dr. Hatta (*tawa*) terpaksa mengakui kebenaran ini dan mengatakan pada pertengahan tahun 1948, bahwa „benar djuga bahwa Sovjet Rusia membela kemer-

dekaan negeri² yang terdjadjah, berdasarkan kepada ideologinja sendiri” (Hatta dalam „Mendajung Diantara Dua Karang”).

Hanya dengan meluaskan kerdjasama dengan negeri² Sosialis, politik luarnegeri yang bebas dan aktif menudju perdamaian dan anti-kolonial bisa diletakkan diatas sendi² dan dalam proporsi yang sebenarnya. Hanya dengan demikian, politik ini tidak akan salah tumbuh menjadi suatu politik netral yang bantji dan tidak berani memihak dalam menghadapi berbagai masalah internasional, atau tumbuh menjadi suatu politik „tidak pilih kasih antara kedua blok” yang berarti bersikap dan memberikan perlakuan yang sama baiknja kepada imperialisme seperti kepada Sosialisisme. Disinilah tepatnja apa yang berulang kali dikatakan oleh Presiden Sukarno, bahwa dalam masalah perang dan damai, dalam masalah imperialisme dan kemerdekaan, kita tidak netral tetapi tegas berpihak pada perdamaian dan kemerdekaan. Inilah politik luarnegeri yang sungguh² anti-kolonial dan tjinta damai, politik yang pasti akan mentjapai sukses dan akan membawa kemajuan bagi Indonesia.

Apa sesungguhnya politik yang bebas dan aktif yang dianut oleh Pemerintah Indonesia?

Pada mulanja apa yang dinamakan politik bebas adalah tjiptaan Sutan Sjahrir (soska) yang menguasai politik luarnegeri Indonesia dalam tahun² pertama Revolusi Agustus, dan kemudian di-lanjutkan oleh Dr. Hatta ketika ia memegang pemerintahan. Sementara kalangan ada yang hendak menondjolkkan seolah-olah Sutan Sjahrir adalah pembentuk politik luarnegeri Indonesia yang di-djalankan sekarang.

Tetapi apakah sesungguhnya konsepsi politik luarnegeri Sjahrir? Dalam tulisannja „Perjuangan Kita” yang ditulis dua bulan sesudah Republik Indonesia berdiri, antara lain dikatakannja bahwa „Letak Indonesia didalam lingkungan daerah pengaruh kapitalisme-imperialisme Inggris-Amerika. Nasib Indonesia tergantung daripada nasib kapitalisme-imperialisme Inggris-Amerika (halaman 12). Alangkah malangnja Rakjat Indonesia, karena nasibnja digantungkan pada nasib kaum imperialis Inggris-Amerika!

Selanjutnja dikatakan oleh Sjahrir dalam tulisannja tersebut, bahwa dalam batas² pertentangan antara kepentingan politik AS dan politik Inggris, yang masing² dikatakannja ingin menggunakan kekuasaan Belanda di Indonesia, terletak „kemungkinan untuk kita mendapatkan kedudukan yang baru yang tjotjok dengan kehendak politik raksasa Pasifik ini” (halaman 13). Dari konsepsinya itu Sjahrir mengakui, bahwa kemerdekaan yang mungkin kita dapat tidak lebih daripada „kemerdekaan” seperti yang terlihat pada negeri² lain yang berada dibawah pengaruh negara imperialis

besar, jaitu berupa kemerdekaan dalam nama sadja. Djelaslah bahwa konsepsi politik luarnegeri Sjahrir hanya mengakui suatu maximum objektif yang tidak lebih daripada suatu kemerdekaan boneka model Filipina, Malaja, Vietnam Selatan atau Korea Selatan.

Inipun hanya bisa didapat, kata Sjahrir, djika Pemerintah RI bisa „menghindarkan kekatjauan yang akan mengantjam keinginan dan kemungkinan modal luarnegeri”, sebab, demikian katanja selanjutnja, „djika dianggapnja benar² merugikan, ia (kaum kapitalis luarnegeri) akan mengerahkan sekalian tenaga untuk menentang kita, serta ia akan tidak ragu² menjabarkan intervensi militer untuk membela kepentingan modalnja” (halaman 9). Kiranja tidak perlu di-ragu²kan lagi, bahwa fikiran kapitulasi ini pulalah yang menjabarkan tuan Hatta mengeluarkan Manifes Politik 1 November 1945 yang mendjamin akan dikembalikannja perusahaan² imperialis, termasuk perusahaan² Belanda.

Pendeknja, sudah sedjak semula Sjahrir memegang peranan penting dalam politik luarnegeri Indonesia, ia sudah menakutkan Rakjat Indonesia dan mengandjurkan supaya menjerah kepada imperialisme dan supaya djangan merugikan atau membikin marah kaum imperialis. Politik kapitulasi ini diselimuti dengan istilah „politik kekuatan ketiga”. Apa yang dapat diharapkan dari konsepsi politik seperti ini, selain daripada kapitulasi dan sekali lagi kapitulasi?

Djadi, djelaslah, bahwa politik bebas Sjahrir langsung bertentangan dengan politik luarnegeri yang bebas dan aktif untuk perdamaian dan anti-kolonial yang dengan disokong oleh Rakjat, didjalankan oleh Pemerintah² Indonesia sedjak Kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama dan yang kedua sampai sekarang. Sjahrir bukan pembentuk politik luarnegeri Indonesia yang sekarang didukung oleh Rakjat Indonesia, sebaliknya, ia adalah lawannja.

Dalam kata² maupun dalam praktek politik luarnegeri Hatta tidak lebih daripada kelanjutan politik luarnegeri Sutan Sjahrir yang chianat itu. Dalam djawaban Dr. Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri kepada Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia Pusat dalam bulan September 1948 antara lain dikatakan, bahwa „berhubung dengan letak tanahair kita di-tengah² perhubungan internasional itu, yang masa sekarang masih dilingkungi oleh negara-negara besar kapitalis, adalah suatu politik yang bidjaksana bahwa kita tidak memperbesar lingkungan musuh kita” (dalam „Mendajung Diantara Dua Karang”). Kata² ini diutjapkan oleh Hatta djustru pada saat semangat anti-imperialisme daripada Rakjat sedang me-luap², dan ketika AS lewat „penasehat²nja”

setjara langsung mentjampuri persoalan dalam negeri Republik Indonesia untuk mengadakan pengedjaran terhadap kaum Komunis. Oleh sebab itu mendjadi djelaslah bahwa dengan „politik bebas”-nja itu Hatta bermaksud agar Indonesia tidak memusuhi dan tidak menimbulkan amarah imperialis. Kelanjutannja ialah, karena kaum imperialis menghendaki supaya me-ngedjar² dan men teror kaum Komunis, maka agar kaum imperialis tidak marah, didjalankanlah kehendak imperialis itu. Agar kaum imperialis tidak marah dan tidak memusuhi Indonesia maka ditimbulkanlah tragedi nasional Provokasi Madiun. Karena kaum imperialis menghendaki Indonesia menjerah pada Belanda, maka dilahirkanlah persetudjuan KMB yang chianat. Karena kaum imperialis menghendaki Indonesia sekali lagi me-ngedjar² kaum Komunis agar dengan „tenteram dan aman” bisa ditandatangani persetudjuan MSA yang akan mengikatkan RI pada Amerika, maka agar kaum imperialis tidak marah, berdasarkan „politik bebas” model Sjahrir-Hatta diadakanlah Razzia Agustus oleh tuan Sukiman. Inilah praktek politik bebas Sjahrir dan Hatta yang didasarkan atas politik menjerah kepada imperialisme. Padahal siapakah musuh kemerdekaan Indonesia kalau bukan imperialisme? Bagaimana bisa mempertahankan kemerdekaan dengan tidak mengambil sikap menentang imperialisme? „Politik bebas” mereka adalah politik bebas memilih imperialisme!

Politik luarnegeri Sjahrir dan Hatta yang meremehkan kekuatan Rakjat Indonesia sendiri dan kekuatan anti-kolonial didunia dan yang sebaliknya menjerah pada intimidasi² dan kehendak² imperialisme achirnja tumbuh mendjadi politik komprador, jaitu politik tunduk pada imperialisme dan memusuhi perjuangn kemerdekaan Rakjat Indonesia untuk membela dan menjempurnakan Republik Proklamasi. Memang ini adalah politik luarnegeri Sjahrir dan Hatta yang hanya menghendaki kemerdekaan sematjam Filipina, dimana pada hakekatnja bukan Rakjat Filipina yang berkuasa ditanahairnja. Atau seperti Malaja sekarang, dimana pemerintah Malaja tidak lebih daripada perisai Inggris untuk menghantjurkan kekuatan Rakjat Malaja yang sedjati, yang dipelopori oleh Tentara Pembebasan Rakjat dan Partai Komunis Malaja. (Tepuktangan lama).

Bagaimana Irian Barat akan dapat dimasukkan kedalam wilayah kekuasaan RI, djika sedjak semula sudah berpendirian tidak melawan imperialis? Tidaklah mengherankan apabila politik luarnegeri Sjahrir dan Hatta yang ternjata telah bangkrut dan mentjelakkan Indonesia itu di-pudji² oleh kaum imperialis disatu pihak, sedangkan difihak lain ditentang oleh Rakjat Indonesia, se-

hingga sekarang sudah menjadi politik yang sudah tidak laku lagi.

Yang perlu diperhatikan ialah bahwa politik luar negeri Sjahrir-Hatta yang anti-nasional dan pro-imperialis itu, dewasa ini belum lagi lenjap samasekali. Diantara para diplomat dan para penguasa dalam politik luar negeri Republik Indonesia masih terdapat tjukup banyak oknum² yang dalam jalan pikirannya dan dalam praktek pekerjaannya sesungguhnya masih berdjawa dan bersemangat konsep politik luar negeri Sjahrir-Hatta. Ini sangat menghambat perkembangan dan kemajuan RI sehingga oleh karenanya perlu segera dibersihkan oleh pemerintah mana saja yang ingin politik luar negerinya diabdikan kepada tjita² Revolusi Agustus 1945 dan perdamaian dunia.

Sesungguhnya tradisi politik luar negeri Republik Indonesia semendjak berdirinya adalah berdasar hubungan dan kerdjasama persahabatan dengan Timur, walaupun Sutan Sjahrir merintanginya. Pembelaan pertama terhadap RI oleh wakil Ukraina Sovjet dalam PBB, D. Manuilsky, adalah salahsatu sendi penting yang telah diletakkan untuk menegaskan kedudukan Indonesia dalam dunia internasional. Ini diperkuat lagi oleh berhasilnya perlawanan Rakjat terhadap politik pro-Barat Sjahrir dengan diadakannya hubungan diplomatik pertama tingkat duta antara Republik Indonesia dengan Republik Tjekoslowakia dalam tahun 1947 dan kemudian hubungan konsuler dengan Uni Sovjet dalam bulan Mei tahun 1948. Negara² Sosialis adalah pembela² dan penjokong² setia yang sedjak tahun² pertama Revolusi sudah membela Republik Indonesia. Ini menguntungkan Indonesia. Djuga menguntungkan Indonesia, dan tidak mungkin diabaikan arti-pentingnya bantuan dan pengakuan negara² Asia-Afrika pada tahun² permulaan Revolusi. Semuanya ini adalah bukti, bahwa sahabat² tradisionil RI dan sahabat² di-waktu² yang sulit adalah negara² Timur dan bukan negara² Barat. (*Tepuktangan*). Tidak ada satu hidungpun dapat membantah, bahwa pada saat² Indonesia dalam kesukaran, negara² Barat selamanya berdiri difihak Belanda.

Dalam hubungan ini Rakjat Indonesia perlu menyatakan penghargaan dan rasa terimakasih yang se-besar²nya kepada proletariat Nederland beserta Partainya, yaitu Partai Komunis Nederland yang dari sedjak semula selalu melawan politik kolonial Pemerintah Nederland dan selalu membela kemerdekaan Indonesia dan hak Republik Indonesia atas Irian Barat. Djuga terimakasih Rakjat Indonesia perlu dinjatakan kepada proletariat dan Rakjat sedunia yang selamanya memihak Rakjat Indonesia dalam perjuangannya. (*Tepuktangan*).

Dalam perkembangannya lebih lanjut, ternyata bahwa politik

bebas model Sjahrir-Hatta tidak bisa dipertahankan karena bertentangan dengan kepentingan Indonesia dan bertentangan dengan hasrat Rakjat Indonesia. Keadaan inilah yang menyebabkan adanya penjesuaian² tertentu sehingga akhirnya dinamakan „politik luar negeri yang bebas dan aktif menudju perdamaian” dari Kabinet Wilopo, kabinet pertama yang disokong oleh PKI semendjak adanya persetudjuan KMB. Semendjak itu politik bebas Sjahrir dan Hatta mulai ditinggalkan, tetapi kesanggupan untuk menempatkan Indonesia tegas² dalam front internasional anti-kolonial dan tjinta damai belum tjukup pada Kabinet Wilopo. „Politik bebas” berada dalam krisis dan terombang-ambing antara disatu pihak kenyataan bahwa kepentingan Republik Indonesia memang terletak dan terjamin dalam kerdjasama dengan negara² kubu Sosialis, sedangkan difihak lain masih kuat ke-ragu²an dan ketakutan burdjuasi yang berkuasa untuk menentang dan melawan imperialis. Dalam keadaan demikian Partai menghadapi tugas penting untuk membantu dan mendorong burdjuasi nasional dan Pemerintah Indonesia supaya berani dan sanggup melawan politik perang imperialis, melawan kolonialisme dan berani serta sanggup bekerjasama yang djudjur dengan negeri² kubu Sosialis.

Salahsatu akibat dan puntjak dari politik anti-Komunis dan politik luar negeri anti-Timur yang terbukti anti-Indonesia adalah yang dilakukan oleh kaum pemberontak bersendjata „PRRI-Permesta” yang dilakukan dengan mendapat inspirasi atas perongkasan dan perintah AS. Keselamatan dan keutuhan Republik telah dapat tertolong oleh kebidjaksanaan Pemerintah Djuanda yang mau mengakui kenyataan² dan sampai batas² tertentu mau meninggalkan politik anti-Komunis dan politik luar negeri yang anti-Timur. Sekarang kelanjutan keamanan dan kemajuan Republik sepenuhnya tergantung pada kesetiaan dan kesanggupan Pemerintah untuk meneruskan dan mengembangkan pekerjaan dalam arah yang benar ini.

Atas desakan kekuatan progresif, dasar politik luar negeri Indonesia yang agak maju telah diletakkan, terutama oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo yang telah berhasil mendorong lahirnya Prinsip² dan Semangat Bandung yang bersedjarah. Politik luar negeri ini dilanjutkan oleh Kabinet Djuanda dengan menundjukkan tanda² kesediaan untuk memperbesar kerdjasama ekonomi dan kebudayaan dengan negeri² kubu Sosialis dan dengan menempuh politik „jalan lain” mengenai Irian Barat. Umum mengetahui betapa politik „jalan lain” mengenai Irian Barat ini mengakibatkan timbulnya kekuatan² baru dalam negeri dan menggontjangkan kedudukan kelas yang berkuasa di Nederland.

Dengan politiknya yang tegas menentang pendaratan tentara AS di Pakan Baru pada awal tahun 1958, pemerintah Djuanda dengan dukungan Rakjat Indonesia telah berhasil menyelamatkan RI. Politik luarnegeri RI akan dapat lebih banyak menguntungkan Rakjat Indonesia, jika dilanjutkan dan dikembangkan kerdjasama yang lebih erat dengan Timur, hidup berdampingan setjara damai dengan semua negara dan teguh menentang intervensi asing. Tetapi bahwasanja hal ini masih sadja belum wadjar, ternjata diantaranya dari sikap Pemerintah RI yang belum djuga mau mengadakan hubungan diplomatik dengan Republik Rakjat Demokrasi Korea dan dengan Republik Demokrasi Djerman, padahal dengan Djerman Barat Indonesia sudah lama mengadakan hubungan diplomatik dan ekonomi yang sangat luas.

Adalah mendjadi tugas Partai untuk lebih mengembangkan lagi hasil² positif yang telah ditjapai oleh politik luarnegeri Indonesia. Yang per-tama² perlu mendapat perhatian adalah pelaksanaan yang kongkrit dan sungguh² dari Putusan² Bandung. Sangat disajangkan, bahwa dalam menghadapi persoalan² politik internasional yang sangat mendesak seperti misalnja usul mengadakan Konferensi Tingkat Tertinggi, usul untuk menghentikan pertjobaan² sendjata nuklir, agresi militer AS terhadap Libanon dan agresi militer Inggris terhadap Jordania, agresi militer AS terhadap RRT disekitar Selat Taiwan, pengatjauan AS dan SEATO di Laos, Konferensi 4 Besar Menlu di Djenewa mengenai masalah Berlin Barat dan perdjandjian perdamaian dengan Djerman, dll. lagi, para anggota terkemuka dari kerdjasama Asia-Afrika, chususnja Lima Negara Kolombo tidak sampai bisa bersama membitjarakannja dan memberikan suara²nja, sedangkan Indonesia tidak menundjukkan inisiatifnja kearah ini.

Didalam lingkungan PBB kerdjasama kelompok A-A perlu dipererat dan lebih diaktifkan lagi, karena sjarat² objektif ada bagi kelompok ini untuk mengeluarkan suara dan sikapnja yang berpengaruh dibadan internasional ini. Kepada Rakjat Indonesia terletak tugas untuk lebih mengaktifkan saluran², baik resmi maupun organisasi² Rakjat, dan bentuk² kerdjasama Asia-Afrika sebagai pelaksanaan dan kelanjutan dari Putusan² Bandung.

Satu segi positif yang penting dari Putusan² Bandung adalah masalah hubungan tetangga baik atas dasar azas² memelihara perdamaian dan anti-kolonial. Untuk keselamatan dan keamanan RI sendiri, adalah penting sekali untuk mendjamin agar Indonesia dilingkungi oleh negara² tetangga yang bersahabat dan yang politik luarnegerinja sedjiwa dengan putusan² Konferensi A-A di Bandung. Untuk ini Pemerintah perlu mengadakan usaha² yang inten-

sif terhadap negara tetangga satu persatu. Usaha ini akan lebih berhasil apabila dilakukan bersama oleh Pemerintah dan Rakjat. Bagi Indonesia, masalah politik tetangga baik adalah masalah yang kongkrit dan mendesak. *Haruslah mendjadi kesedaran yang dalam bahwa Indonesia berada dibarisan terdepan dalam melawan SEATO yang berarti menghadapi tugas nasional dan internasional yang tidak enteng.* Pengalaman dengan pemberontakan DI-TII dan „PRRI-Permesta” djelas membuktikan kebenaran ini.

Sekarang Belanda mendjalankan taktik bersekutu dengan SEATO melalui Australia untuk maksud mempertahankan kekuasaannya di Irian Barat. Ini berarti bahwa bagi Indonesia politik tetangga baik adalah sama dengan politik menghalaukan subversi dan intervensi imperialis, sama dengan politik melawan dan mengalahkan SEATO. Adalah mendjadi kepentingan Rakjat Indonesia untuk menjokong perdjungan Rakjat² Malaja, Laos, Kambodja dll., untuk mentjegah negeri² ini masuk mendjadi anggota SEATO, dan menjokong perdjungan Rakjat² Filipina, Muangthai, Pakistan dan Australia untuk dapat membebaskan negeri² mereka dari ikatan SEATO serta tekanan² AS. (*Tepuktangan*).

Rakjat Indonesia sudah seharusnya dengan teliti memperhatikan Djepang yang berada dibawah kekuasaan AS dan kaum monopolis Djepang sendiri. Golongan yang berkuasa di Djepang sampai sekarang masih belum menundjukkan kesedaran untuk mendjalankan suatu politik luarnegeri yang tjinta damai, demokratis dan bersahabat terhadap negeri² tetangga di Asia. Sikap pemerintah Djepang yang memusuhi RRT dan yang hendak meneruskan politik „saudara tua”-nja terhadap bangsa² di Asia Tenggara yang pernah didjadjahnja, menimbulkan antipati dan kegusaran yang besar dikalangan Rakjat² Asia. Sikap ini menundjukkan bahwa imperialisme Djepang masih merupakan bahaya yang mengganggu perdamaian dan kemerdekaan negeri² Asia. Sikap ini adalah bertentangan dengan hasrat dan kepentingan Rakjat Djepang sendiri yang dengan gigih melawan kekuasaan pendudukan Amerika dan penindasan imperialisme Djepang dan yang pada waktu² belakangan ini mentjapai kemadjuan² penting. Dengan teguh dan setia Rakjat Djepang berdjung untuk persamaan dan persahabatan antara bangsa² Asia, untuk perdamaian kekal di Asia dan didunia. Ini mendapat simpati dan setiakawan sepenuhnya dari Rakjat Indonesia. Tetapi sebaliknya oknum² burdjuis tertentu di Indonesia harus lekas tahu diri, lekas meninggalkan sikap mendjilat terhadap kaum monopolis yang berkuasa di Djepang dan supaja mendjundjung kehormatan bangsa Indonesia yang merdeka. (*Tepuktangan*).

Adalah satu politik luarnegeri yang realis dan sesuai dengan

aspirasi² nasional Rakjat Indonesia djika Pemerintah Indonesia ber-sama² dengan kelompok A-A meneruskan perjuangannya dengan lebih teguh didalam PBB dan diforum internasional lainnja untuk memasukkan RRT dan Republik Rakjat Mongolia di PBB, untuk menghapuskan perbedaan rasial di Afrika Selatan dan di-bagian² dunia lainnja, dan untuk memelihara keamanan internasional di Timur Tengah dan Timur Djauh dengan menuntut penarikan mundur semua tentara asing dari daerah² tersebut dan untuk pembentukan daerah perdamaian dan per-tama² daerah bebas atom di Timur Tengah, Timur Djauh dan diseluruh Pasifik. (*Tepuktangan*).

Mengenai perjuangan pembebasan Irian Barat politik luar-negeri mempunyai tugas yang tidak ketjil. Adalah kewadajiban Pemerintah Indonesia untuk meneruskan perjuangan Irian Barat di-dalam dan diluar PBB dan dengan lebih mejakinkan negara² di-dunia, terutama negara² di Asia, Afrika dan djuga negara² sahabat di Amerika Latin tentang adil dan benarnya tuntutan Indonesia. Rakjat Indonesia tidak mungkin menjetudju sikap dan kebidjaksanaan yang tidak mau membawa masalah Irian Barat ke PBB, karena ini berarti tidak menggunakan semua djalan dan menutupi kedjahatan politik kolonial AS yang menolak tuntutan Indonesia atas Irian Barat dan menjokong Belanda untuk terus bertjokol di-wilayah RI ini. Untuk perjuangan Irian Barat Pemerintah harus bertindak lebih bidjaksana dengan mengadakan konsultasi dan kerdjasama yang lebih erat dengan organisasi² Rakjat.

Dilapangan hubungan ekonomi luarnegeri pada waktu² belakangan ini kelihatan kemadjuan², terutama karena lebih banjaknja bantuan ekonomi dari negeri² Sosialis dan lebih banjaknja kesediaan dari fihak Pemerintah Indonesia untuk berhubungan dagang dengan negeri² Sosialis.

Dilapangan kebudayaan dan kerdjasama ilmu dan teknik terdapat sedikit kemadjuan dengan dikirimkannja lebih banjak mahasiswa Indonesia untuk beladjar di-negeri² Sosialis, dengan didatangkannja ahli² dan guru² besar dari negeri² tersebut dsb.

Tetapi djika dibandingkan dengan politik luarnegeri Pemerintah yang agak madju dalam melawan kolonialisme dan tjinta damai, luasnja kerdjasama dilapangan ekonomi, kebudayaan, ilmu dan teknik dengan negeri² Sosialis masih belum seimbang, masih terlalu sedikit, masih berat ke Barat.

Menghadapi situasi politik internasional yang serba pelik seperti sekarang ini, terutama sekali perlu ada kedjernihan dan kedjelasan dalam pandangan dan pengertian politik luarnegeri, bahwa yang mendjadi musuh dan penghalang utama dari keselamatan dan keutuhan Republik Indonesia adalah imperialisme dunia yang dike-

palai oleh AS. Karena adanya imperialismelah maka kedudukan dan kemerdekaan Indonesia mendjadi terantjam terus-menerus. Tiap fikiran, tiap kemauan dan tiap tindakan yang tidak melawan imperialisme adalah merugikan Indonesia, adalah bertentangan dengan kepentingan nasional Rakjat Indonesia.

Adalah mendjadi kebiasaan dan sifat dari politik imperialis untuk menggunakan tjara² intimidasi dan intervensi terhadap negeri² lain agar dapat menguasainja. Bagi Indonesia dan bangsa² yang hendak membela dan mempertahankan keselamatan dan keutuhan negerinja, tidaklah ada sikap dan djalan lain ketjuali menghadapinja dan melawannja dengan sungguh². Sudah mendjadi pengetahuan umum, bahwa *kekuatan imperialis bukannya tidak terbatas, bahwa imperialisme adalah matjan-kertas yang bukannya tidak terkalahkan*. Bukti sudah terlalu banjak bahwa *kaum imperialis mundur djika dilawan*. (*Tepuktangan*).

Pemerintah selamanya akan berhasil dalam politik luarnegerinja, djika Pemerintah dengan sadar menggunakan sistim konsultasi dengan organisasi² Rakjat untuk makin memperbaiki pekerdjaannja dibidang politik internasional. Rakjat Indonesia dewasa ini sudah lebih dewasa dan tidak akan mungkin bisa ditinggalkan dalam hal² yang mengenai kepentingan negerinja. Sedjarah diplomasi menundjukkan bahwa massa Rakjat mempunyai pengaruh dan rol yang tidak ketjil dalam menentukan arah dan kebidjaksanaan politik luarnegeri. Zaman diplomasi rahasia, yang merahasiakan segala sesuatu terhadap Rakjat, sekarang sudah lalu dan sudah diganti dengan diplomasi terbuka, jaitu diplomasi bersama dan untuk Rakjat.

Dengan tak henti² dan tak djemu-djemunja PKI selalu dan terus akan membantu dan mendorong Pemerintah untuk menentang dan melawan intervensi imperialis di Indonesia dan dinegeri manapun djuga.

Partai harus selalu waspada dan selalu memimpin dan memobilisasi Rakjat untuk melawan intervensi imperialis terhadap Indonesia yang dilakukannja melalui politik pro-imperialis Masjumi-PSI, melalui gerombolan teroris DI-TII, melalui pemberontakan anti-Republik dari „PRRI-Permesta” dan melalui beberapa petua-lang politik Indonesia yang atasnama sembojan „anti-Komunis” ingin mendjual kemerdekaan Indonesia kepada imperialis AS dengan tudjuan memasukkan Indonesia kedalam pakt militer SEATO.

Sudah mendjadi kenyataan sedjarah, bahwa politik anti-Komunis sama artinja dengan mengundang subversi dan intervensi imperialis dan ini berarti mentjiderai kepentingan nasional Rakjat In-

donesia. Rakjat harus senantiasa waspada terhadap berbagai matjam pandangan dan usaha jang pada dasarnya memusuhi Rakjat Indonesia, jang mula² hanja bermain mata, tapi kemudian bekerdjasama dengan imperialis dengan mendjalankan konsepsi „politik berdamai” dengan imperialis, „politik minta²” kepada imperialis. Ini adalah bentuk baru dari politik „kekuatan ketiga” Sjahrir dan Hatta jang sudah bangkrut dan dikutuk Rakjat itu. Adalah bidjaksana apabila Pemerintah djuga waspada dan mendjauhi politik sematjam ini, demi keselamatan Indonesia, demi kemadjuan Republik Indonesia.

Untuk pelaksanaan semua pekerdjaan tersebut diatas, Pemerintah perlu mempunyai aparaturnjag jang dapat dipertjaja dan mampu, jang patriotik, demokratis dan ahli. Elemen² „PRRI-Pcrmesta” dan elemen² anti-Republik lainnja jang masih bersembunyi di-aparat² Kementerian Luarnegeri dan di Perwakilan² RI diluarnegeri harus dibersihkan. (*Tepuktangan lama*).

Kawan²!

Demikianlah kedudukan internasional Indonesia dan tugas² Partai dan Rakjat Indonesia dilapangan politik luarnegeri. Sedjalan dengan perkembangan kekuatan front persatuan nasional didalam negeri, dan sesuai dengan semangat dan djiwa Revolusi Agustus 1945, maka djuga dibidang politik luarnegeri terdapat tjukup sjarat-sjarat jang memungkinkan tertjapainja persatuan antara semua golongan demokratis, dan antara Pemerintah dengan Rakjat, untuk mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan nasional Indonesia dan untuk perdamaian di Asia dan didunia. (*Tepuktangan*).

III

MENERUSKAN PEMBANGUNAN PARTAI

(1) Perkembangan Partai Antara Kongres Nasional ke-V Dan ke-VI

Kawan²!

Selama masa antara Kongres Nasional ke-V dan ke-VI, bersamaan dengan makin madjunja gerakan untuk kemerdekaan nasional jang penuh dan demokrasi dinegeri kita, Partai telah mengalami perubahan² jang besar, telah berkembang meluas keseluruh negeri sedangkan dibeberapa pulau djuga sudah mulai mendalam dan berakar. Dilihat dari djumlah pengikutnja, Partai sekarang dengan pemilihnja jang lebih dari 8 djuta sudah merupakan Partai

terbesar dinegeri kita. (*Tepuktangan*). Kemadjuan melompat dari-pada Partai tidak hanja dalam peningkatan djumlah anggota dan pengikut, tetapi djuga dalam peningkatan kesedaran ideologi, politik dan organisasi.

Perbandingan antara anggota dan tjalonanggota Partai, jang seluruhnja sekarang berdjumlah lebih dari 1.500.000, adalah hampir sama. Djadi berbeda dengan ketika Kongres Nasional ke-V dimana anggota berdjumlah 49.042 dan tjalonanggota 116.164, artinya tjalonanggota merupakan kira² 70% daripada seluruh keanggotaan.

Djumlah anggota pada waktu sekarang seharusnya sudah djauh lebih banjak daripada djumlah tjalonanggota, tetapi karena adanya kelengahan sementara Komite dan karena keadaan diberbagai daerah jang dikatjau kaum pemberontak kontra-revolusioner, maka peningkatan tjalonanggota mendjadi anggota tidak dapat dilakukan tepat pada waktunja. Masih banjak tjalonanggota jang sudah ber-tahun² lamanja mengerdjakan tugas² Partai dengan baik dan bersemangat, tetapi karena hal² tsb. mereka belum ditingkatkan mendjadi anggota. Kelengahan ini telah menjebabkan perbandingan antara anggota dengan tjalonanggota tidak tjepat dapat diperbaiki. Lebih daripada itu, ketentuan dalam Konstitusi tidak berdjalan dengan baik dan hak tjalonanggota jang baik untuk mendjadi anggota tepat pada waktunja sudah diabaikan oleh Komite² jang bersangkutan.

Dengan makin baiknja pekerdjaan Partai dikalangan kaum tani, prosentase keanggotaan Partai dari kalangan ini sekarang sudah lebih besar djumlahnja. Kalau dalam Kongres jang lalu anggota jang berasal dari kaum tani kurang dari 50% dari seluruh keanggotaan, maka sekarang mayoritas anggota Partai adalah berasal dari kaum tani. (*Tepuktangan*). Djuga perbaikan pekerdjaan Partai dikalangan intelektual dan wanita telah menjebabkan lebih banjak dari kalangan² ini jang masuk mendjadi anggota atau bersimpati pada Partai. Dari elemen buruh djuga sudah bertambah banjak didalam Partai kita, tetapi prosentasenja tidak mengalami perubahan penting.

Ringkasnja, peluasan keanggotaan Partai telah mengalami lompatan² sbb.: Ketika Konferensi Nasional Partai pada permulaan tahun 1952 tertjatat djumlah anggota dan tjalonanggota 7.910. Konferensi ini memutuskan meluaskan keanggotaan mendjadi 100.000 dalam 6 bulan. Ketika akhir tahun 1952 diperiksa hasil peluasan, maka tertjatat 126.671 anggota dan tjalonanggota. Pada waktu Kongres Nasional ke-V Partai, jaitu pada bulan Maret 1954 tertjatat anggota dan tjalonanggota 165.206. Pada pertengahan

1959 sudah tertjatat lebih dari 1.500.000 anggota dan tjalonanggota dimana terdapat kira² 250.000 atau 17% wanita. (*Tepuktangan*). Pada waktu Konferensi Nasional tahun 1952 anggota² dan organisasi² Partai baru tersebar di Djawa dan Sumatera, dan tersebarnya juga sangat tidak merata. Sesudah peluasan keanggotaan dalam tahun 1952, organisasi Partai mulai tersebar juga di Madura, Sulawesi, Kalimantan, Nusatenggara dan Maluku. Sekarang tersebar organisasi Partai diseluruh negeri sudah lebih merata, sedangkan di Djawa dan Sumatera sudah lebih intensif daripada di-pulau² lain.

Penyebaran Partai setjara merata dan intensif lebih didorong lagi dengan dilaksanakannya *Plan 3 Tahun Pertama Mengenai Organisasi Dan Pendidikan* yang diputuskan oleh Sidang Pleno ke-IV CC dalam bulan Djuli 1956.

Sebagian besar anggota Partai kita telah mengalami penggemblengan dalam perdjuaan revolusioner. Sebagian dari anggota Partai yang masuk sebelum Konferensi Nasional tahun 1952 telah mengalami pukulan² yang berat dari kaum kolonialis Belanda, diantaranya ada yang dipendjarakan sampai ber-tahun² atau dibuang ke Digul (Irian Barat), sebagian lagi mengalami perdjuaan berat melawan militerisme Djepang, dan sebagian besar telah ambil bagian aktif dalam Revolusi 1945-1948, dalam perang² gerilja melawan agresi Belanda, dalam melawan provokasi Madiun tahun 1948 dan Razzia Agustus Sukiman tahun 1951.

Mereka yang masuk Partai sesudah Konferensi Nasional 1952, djadi sesudah pembaruan dalam pimpinan sentral Partai, telah ambil bagian aktif dalam perlawanan terhadap pertjobaan² kudeta kontra-revolusioner yang mau memfasiskan sistim pemerintahan, terhadap berbagai kekedjamaan yang ditudjukan kepada kaum buruh dan kaum tani, terhadap gerombolan² teroris DI-TII, terhadap provokasi² yang dilantjarkan terhadap Partai, terhadap pensalahgunaan Undang² Keadaan Bahaja dan terhadap pemberontakan kontra-revolusioner „PRRI-Permesta”. Jang terakhir ini terutama di Sumatera Barat, Riau Daratan, Tapanuli, Sulawesi Utara dan Tengah. Perlawanan² gagahberani dan pengorbanan besar yang sudah diberikan oleh anggota² Partai ini telah menggembleng seluruh barisan Partai kita, telah sangat meningkatkan martabat Partai kita dimata Rakjat, telah lebih mengeratkan hubungan Partai kita dengan massa Rakjat dan dengan alat² negara yang patriotik. Bersamaan dengan itu ia juga telah membadjakan persatuan didalam Partai, persatuan dikalangan pimpinan atasan, persatuan antara pimpinan atasan dengan bawahan dan persatuan antara pimpinan dengan massa anggota. (*Tepuktangan*).

Ketjintaan dan solidaritet antara sesama Komunis adalah semangat jang berkuasa didalam Partai kita, dan semangat ini pulalah jang telah memberi inspirasi kepada anggota² Partai untuk lebih sungguh² mengabdikan diri kepada kepentingan tanahair dan Rakjat pekerdja.

Apa sebabnja dapat didjalankan peluasan organisasi dan keanggotaan Partai begitu tjepat? Apa sebabnja PKI bisa mendjadi Partai massa jang besar?

Sedjak Revolusi Agustus 1945 sampai sebelum terdjadinja teror putih dalam Peristiwa Madiun tahun 1948 pengaruh Partai adalah luas dan meliputi semua golongan. Pengaruh Partai tidak hanya dikalangan kaum buruh dan kaum tani, tetapi juga dikalangan pemuda dan peladjar, dikalangan Angkatan Perang dari tamtama sampai perwira, dikalangan pegawai² negeri, dikalangan pengusaha-pengusaha nasional dan dikalangan pekerdja² kebudayaan. Akan tetapi simpati jang begitu besar terhadap Partai tidak diorganisasi dan dikonsolidasi setjara sistimatis. Partai tidak memberikan program perdjuaan jang tepat untuk mendjawab persoalan² jang dihadapi oleh Revolusi Indonesia dan massa Rakjat. Sebaliknya Partai melakukan kesalahan² dilapangan politik dan organisasi seperti jang sudah dibahas dalam resolusi „*Djalan Baru Untuk Republik Indonesia*”. Dalam politik front nasional Partai pada waktu itu lebih mementingkan kerdjasama dengan kaum sosialis kanan jang tidak mempunyai tradisi revolusioner dan tidak dikenal oleh Rakjat, daripada mementingkan kerdjasama dengan kaum nasionalis jang mempunyai tradisi revolusioner dan dikenal oleh Rakjat; selanjutnja pada waktu itu ada 3 Partai politik jang menamakan dirinja Partai Marxis-Leninis, jaitu Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis dan Partai Buruh Indonesia.

Mendjelang Peristiwa Madiun orang² Komunis jang agak baik terorganisasi dan terdidik dari 3 Partai Marxis-Leninis tsb. berdjumlah hanya kira² 10.000 orang. Sudah tentu dengan kaum Komunis jang hanya 10.000 orang, sedangkan penduduk Indonesia kira² 80.000.000 ketika itu dan tersebar diribuan pulau besar dan ketjil, pekerdjaan revolusioner tak mungkin dapat terpimpin dengan baik. Ketika terdjadi teror putih Hatta akibat² dari kesalahan² politik dan organisasi tsb. diatas sangat terasa. Ber-djuta² orang jang selama itu mengelilingi Partai, tetapi tidak diorganisasi dan tidak mendapat pendidikan politik dan teori revolusioner dari Partai, mendjadi takut dan malahan sebagian memihak kaum kontra-revolusioner; tetapi jang paling berat dirasakan ialah kekurangan pekerdjaan Partai dikalangan kaum tani.

Pengalaman² pahit tsb. diatas telah mendorong Politbiro baru

yang dibentuk pada permulaan tahun 1951 untuk merombak Partai menjadi Partai massa yang luas, yang meliputi seluruh negeri dan mempunyai jumlah anggota yang besar. Tetapi untuk mentjapai tujuan itu harus terlebih dulu diperbaiki kesalahan² fondamentil dari Partai dilapangan politik dan organisasi. Maka dirumuskanlah garis politik front persatuan nasional yang konsekwen anti-imperialisme dan yang berdasarkan persekutuan buruh dan tani dibawah pimpinan klas buruh. Kerdjasama dengan kaum nasionalis diperbaiki. Dengan berpedoman pada resolusi „Djalan Baru” organisasi Partai dibangun kembali. Untuk bisa menarik kaum tani menjadi sekutu klas buruh yang tertetia, Partai menjusun program agraria. Selain itu Partai senantiasa memperluas hubungannya dengan Rakjat diluar kaum buruh dan kaum tani, jaitu dengan massa burdjuis ketjil, kaum intelektuil, kaum pengusaha nasional dan golongan² penduduk lainnja. Mereka ber-angsur² memandang Partai kita sebagai satu²nja Partai yang djudjur dan yang dapat setjara tepat menganalisa dan memetjahkan persoalan² nasional yang dihadapi oleh Rakjat Indonesia. (*Tepuktangan lama*).

Program Partai untuk mentjapai kemerdekaan nasional dengan melepaskan Indonesia dari Uni Indonesia-Belanda; mengirim kembali „Misi Militer Belanda” dan semua „penasehat” Belanda serta membatalkan persetudjuan KMB; menasionalisasi semua perusahaan² vital kepunjaan kaum pendjadjah Belanda, dan selandjutnja mempertahankan Irian Barat sebagai wilayah sah Republik Indonesia dimengerti dan disokong kuat oleh massa Rakjat. Demikian djuga politik Partai yang menuntut perlindungan bagi industri nasional terhadap persaingan barang² asing, yang menuntut persiapan sjarat² mengindustrialisasi negeri, perdjuaan Partai supaya ada kesempatan kerdja yang lebih luas dan perlakuan² istimewa terhadap para ahli Indonesia yang dengan sungguh² bekerdja untuk kemandjuan ilmu dan kebudajaan. Semuanya ini menarik lebih banyak massa Rakjat yang luas, termasuk kaum pengusaha dan kaum intelektuil disekeliling Partai.

Bagi Rakjat Indonesia sudah merupakan kenjataan bahwa Partai kita tidak hanya bisa berpropaganda, akan tetapi djuga mampu menundjukkan djalan² pemetjahan yang tepat bagi persoalan² nasional dan persoalan² lain yang dihadapi oleh Rakjat Indonesia. Selandjutnja Partai djuga sudah menundjukkan kemampuannya mengambil dan mengembangkan sari² yang berharga yang bersifat nasional dan progresif dari sedjarah, kebudajaan dan tradisi² Rakjat kita. Inilah antara lain sebab²nja mengapa Partai kita bisa dalam waktu yang singkat mempunyai djumlah keanggotaan yang besar dan tumbuh menjadi Partai massa. Kenjataan ini adalah dja-

waban yang paling djitu pada semua fitnahan terhadap Partai. Kebenaran politik Partai telah sangat besar artinja bagi pekerdjaan pembangunan Partai, bagi pekerdjaan memperkuat dan meluaskan Partai.

Hubungan Partai kita dengan Partai² sekawan makin hari makin bertambah erat, baik dengan djalan mempeladjadi pengalaman Partai² sekawan, maupun dengan menghadiri kongres² mereka atau kontak² pribadi antara pemimpin² Partai kita dengan pemimpin² Partai sekawan. Ikutsertanja wakil² Partai kita dalam Konferensi Partai Komunis dan Partai Buruh di Moskow dalam bulan November 1957, yang telah melahirkan „Deklarasi” dan „Manifest Perdamaian” sangat mempererat hubungan Partai kita dengan Partai² sekawan. „Deklarasi” dan „Manifest Perdamaian” telah sangat besar artinja dalam mengkonsolidasi Partai kita dilapangan politik dan ideologi.

Dalam rangka mempererat hubungan Partai kita dengan Partai² Marxis-Leninis sekawan, sangatlah penting arti daripada hadirnja delegasi persahabatan PKI dalam Kongres ke-21 PKUS, tidak hanya karena Kongres ini adalah Kongres kaum pembangun Komunisme, tetapi djuga karena dalam Kongres ini Kawan Chrusjov menegaskan bagaimana seharusnja hubungan antara Partai² Komunis. Kawan Chrusjov antara lain mengatakan bahwa :

„dalam gerakan Komunis dan djuga dalam kubu Sosialis baik dulu maupun sekarang, ada persamaan² hak² dan kemerdekaan antara semua Partai Komunis dan Partai Buruh dan antara negeri² Sosialis. Sesungguhnya PKUS samasekali tidak memimpin Partai lain. Uni Sovjet tidak memimpin negara² lain. Dalam gerakan Komunis tak ada Partai atasan dan bawahan. Semua Partai Komunis dan Partai Buruh sama dan bebas, semua bertanggungjawab atas nasib gerakan Komunis, atas kekalahan dan kemenangannya.” (*Tepuktangan !*).

Bagi kaum Komunis yang mengerti benar hakekat gerakan Komunis dan gerakan buruh sedunia, apa yang ditegaskan oleh Kawan Chrusjov ini adalah menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, dan puluhan tahun yang lalu sudah diadjudkan oleh Lenin. Tetapi diadjudkannya soal ini dalam situasi sekarang, dimana kaum imperialis dan begundal-begundalnya sedang memperhebat fitnahannya terhadap kaum Komunis, adalah penting artinja. Penegasan ini tidak hanya untuk membantah fitnah kaum reaksioner, tetapi djuga merupakan dorongan bagi kaum Komunis di-tiap² negeri untuk dapat melihat dengan djelas apa yang menjadi tugas² klas, tugas² nasional dan tugas² internasionalnja. Dengan djelasnja semua tugas ini, maka djuga kita kaum Komunis Indonesia akan lebih

mampu menghimpun banjak kaum demokrat dan patriot sedjati disekeliling Partai kita.

(2) Pendidikan Marxisme-Leninisme Sjarat Mutlak Untuk Persatuan Didalam Partai

Ketika pada pertengahan tahun 1948 Partai kita mengadakan koreksi besar, sangat ditekankan tentang pentingnja pekerdjaan dilapangan organisasi. Ini adalah tepat, karena pada waktu itu, sesudah kesalahan dilapangan politik pada pokoknja selesai disesudah koreksi, maka kelemahan dilapangan organisasi adalah jang paling menonjol. Pada waktu itu ada 3 Partai jang berazaskan Marxisme-Leninisme dan djumlah anggota dari semua Partai ini hanya 10.000. Partai memang telah membikin kesalahan jang serius dilapangan organisasi.

Kesalahan dilapangan organisasi ini sudah lama kita perbaiki. Dengan kebanggaan Komunis dapat kita simpulkan bahwa garis umum pembangunan Partai jang ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-V, jaitu „meneruskan pembangunan PKI jang dibolsjewikkan, jang meluas diseluruh negeri, jang mempunjai karakter massa jang luas, jang sepenuhnya terkonsolidasi dilapangan ideologi, politik dan organisasi” pada pokoknja sudah kita kerdjakan dengan baik. (Tepuktangan). Tetapi pelaksanaan sepenuhnya daripada garis umum pembangunan Partai ini bukanlah sesuatu jang dapat dilaksanakan dalam masa antara Kongres Nasional ke-V dan ke-VI. Penjempurnaan pelaksanaan garis umum pembangunan Partai masih harus kita teruskan.

Dalam hubungan dengan pembangunan Partai, sekarang timbul persoalan jang sangat mendesak sebagai akibat dari bertambahnja djumlah anggota Partai dengan tjepat. Bertambahnja keanggotaan dengan tjepat akan tidak baik akibatnja djika tidak disertai dengan pendidikan setjara besar²an didalam Partai. Mengingat hal ini, maka setiap kali dilakukan gerakan peluasan keanggotaan semenjak tahun 1952, selalu disertai dengan gerakan mempeladjar program dan Konstitusi Partai untuk anggota² baru, sedang anggota² lama diwadjabkan mempeladjar dokumen² Partai serta buku² teori Marxisme-Leninisme.

Ketika Sidang Pleno ke-IV CC dalam bulan Djuli 1956 menjusun Plan 3 Tahun Pertama Partai jang pada waktu itu sudah beranggota lebih dari 1 djuta, pimpinan sentral Partai telah memperingatkan tentang *tidak boleh dilupakan, bahwa massa anggota Partai berasal dari ber-matjam² klas, bahwa lingkungan keluarga mereka sekarang djuga ber-matjam² dan bahwa tingkat kebudaja-*

annya serta pengalaman revolusionernja ber-beda². Maka tidak heran, bahwa masih terdapat dan terus akan terdapat ber-matjam² fikiran dikalangan kaum Komunis. Djadi, soal persatuan dalam fikiran dikalangan kaum Komunis adalah soal pendidikan bagi seluruh anggota Partai. Sidang Pleno ke-IV CC itu djuga mengambil keputusan untuk memperkuat pekerdjaan pendidikan dan penjelidikan keadaan kongkrit guna mempertinggi taraf Marxisme-Leninisme daripada Partai. Disinilah arti jang sangat penting daripada Plan 3 Tahun Pertama Mengenai Organisasi Dan Pendidikan.

Berdasarkan Plan 3 Tahun Pertama, maka diadakan pendidikan diseluruh Partai tentang prinsip² fondamentil Marxisme-Leninisme dan tentang mempertahankan pendirian, pandangan dan metode klas buruh. Pendidikan ini mula² untuk kader² tinggi Partai, kemudian semua fungsionaris Partai dan selandjutnja ditudjukan kepada semua anggota Partai. Pendidikan dihubungkan setjara erat dengan tugas² Partai, dan dipandang sebagai usaha untuk menghilangkan rintangan² ideologis agar tugas² Partai sekarang dapat dilaksanakan dengan baik dan agar para kader tidak asing mengenai tugas jang akan dilakukan dikemudian hari.

Sekarang majoritet daripada kader² sentral sampai ke Komite² basis sudah terdidik menurut plan pendidikan baru. Tetapi majoritet daripada anggota belum terdidik menurut plan ini. Salahsatu pekerdjaan Partai sesudah Kongres ke-VI ialah mendidik semua fungsionaris dan aktivis Partai, dan mendidik majoritet daripada massa anggota menurut sistim pendidikan baru. Dalam djangka waktu Plan 3 Tahun Kedua Partai semua anggota jang masuk Partai sebelum Kongres ke-VI dan sebagian besar anggota jang masuk sesudah Kongres ke-VI harus selesai dididik menurut sistim pendidikan baru.

Dengan dilaksanakannja plan pendidikan, maka kebulatan fikiran mendjadi terdjamin, semangat Komunis mendjadi lebih kuat berkuasa didalam Partai. Pilihan matapeladjaran untuk seluruh tingkatan pendidikan, jaitu tentang sedjarah perkembangan masyarakat, tentang soal² pokok revolusi Indonesia, tentang front persatuan nasional dan tentang pembangunan Partai sudah diudji ketepatannja.

Matapeladjaran filsafat dan matapeladjaran tentang gerakan buruh internasional jang selama ini hanya diberikan di Sekolah² Partai jang diselenggarakan oleh CC dan CDB² tertentu, sudah waktunja didjadikan matapeladjaran disemua Sekolah dan Kursus Partai.

Matapeladjaran tentang gerakan buruh internasional sangat

penting artinja bagi pelaksanaan politik Partai dalam memadukan semangat patriotisme dan internasionalisme, politik untuk mengalahkan nihilisme nasional dan sovisme burdjuis. Untuk mempertinggi taraf teori kader² Partai sangat penting arti konferensi² teori, konsultasi² teori dan keharusan bagi para kader tinggi dan menengah untuk mempelajari buku² teori klasik, baik yang ditentukan oleh CC maupun yang dipilihja sendiri.

Agar semua anggota dapat ambil bagian dalam menikmati beladjar sendiri dari harian dan penerbitan² Partai lainja, maka pekerjaan memberantas butahuruf didalam barisan Partai harus lebih digiatkan, disamping djuga terus menggiatkan pemberantasan butahuruf diluar barisan Partai. Bersamaan dengan itu kader² Partai tidak boleh henti²nja meningkatkan pengetahuan umumja dan mempertinggi keahlian dalam djurusan atau vaknja masing². (Tepuktangan).

Tepat sekali kesimpulan yang pernah diambil oleh Partai kita jaitu, bahwa „*Persatuan didalam Partai hanya mungkin djika didasarkan atas persatuan fikiran, persatuan ideologi, jaitu fikiran atau ideologi Marxisme-Leninisme. Hanya djika ada persatuan fikiran dari orang² Komunis, barulah ada persatuan yang sungguh didalam politik dan organisasi Partai Komunis, barulah ada persatuan didalam aksi² Rakjat yang dipimpin oleh Partai Komunis*”. Oleh karena itu, semua bentuk dan djalan yang dapat mempersatukan fikiran seluruh anggota Partai harus ditempuh oleh Partai.

Kongres Nasional ke-V Partai telah memberi djawaban mengenai semua masalah penting dan pokok daripada Revolusi Indonesia. Kongres itu telah meletakkan dasar² untuk pekerjaan Partai yang lebih baik dalam menggalang front persatuan nasional, telah memberikan djawaban tentang semua masalah pokok pembangunan Partai. Perkembangan sesudah Kongres menunjukkan bahwa semuanya ini adalah benar. Berdasarkan pengalaman² selama masa yang kita tindjau, dapatlah kita simpulkan bahwa pada pokoknja, garis politik dan garis organisasi yang sudah ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-V masih tetap berlaku sampai sekarang, sehingga pada pokoknja ia adalah djuga garis daripada Kongres Nasional ke-VI. Tentu sadja kita harus mengadakan perubahan² disana-sini; bagian² yang sudah lewat waktu harus kita tiadakan, bagian² yang kurang harus kita tambah, sedangkan yang kurang tepat harus dibikin lebih tepat.

Dalam melaksanakan garis politik dan garis organisasi yang sudah ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-V Partai tentu ada kesukaran² yang kita temui dan ada kesalahan² yang kita buat. Hal² ini tidak bisa kita hindari. Djika tidak terdapat pada CC, maka

terdapat pada Komite² bawahan atau pada ke-dua²nja. Djuga dimasa yang akan datang kitapun tidak akan terluput dari kesukaran² dan kemungkinan² membuat kesalahan.

Jang penting jalah asal kita selamanja mengerti apa yang menjadi sebab daripada semua kesukaran dan kesalahan itu. Dalam Kongres Nasional ke-V sudah kita simpulkan bahwa segala kesalahan, baik kesalahan karena dogmatisme maupun kesalahan karena empirisme, adalah bersumber pada ideologi subjektivisme. Dalam melaksanakan tugas kita selanjutnja, dan tugas ini pasti akan lebih berat karena makin peliknja keadaan dan makin tadjamnja pertentangan² diantara klas² didalam masyarakat kita, maka kitapun pasti akan menemui lagi kesukaran² dan kemungkinan² akan membikin kesalahan².

Pengalaman kita selama ini djuga menundjukkan, bahwa setiap kali Partai memperoleh kemajuan dan kemenangan, setiap kali pula timbul kesulitan² baru dan timbul kemungkinan membuat kesalahan² baru. Ini adalah satu hukum. Oleh karena itu adalah kewajiban pimpinan Partai untuk mempelajari dan menganalisa kesalahan²nja dimasa lampau, menarik pelajaran dari kesalahan² yang lampau itu, agar sebagaimana dikatakan oleh Kawan Liu Sau-tji „*dalam pekerjaan selanjutnja membuat lebih sedikit kesalahan, dan sedapat mungkin tidak mengulangi kesalahan yang pernah terdjadi serta tidak menjejabkan kesalahan ketjil menjadi kesalahan besar*” (Laporan Politik CC PKT kepada Kongres Nasional ke-VIII). (Tepuktangan).

(3) Subjektivisme Harus Terus Kita Perangi

Dalam Kongres Nasional ke-V sudah kita simpulkan, bahwa untuk melawan subjektivisme didalam Partai adalah sangat penting untuk melakukan dua hal : *Pertama*, mengadjar anggota² Partai untuk memakai metode Marxis-Leninis dalam menganalisa situasi politik dan dalam mengukur kekuatan klas. Dengan demikian kita menentang analisa dan perhitungan setjara subjektif. *Kedua*, memimpin perhatian anggota² kearah penjelidikan dan studi dilapangan sosial dan ekonomi agar dapat menentukan taktik perdjuaan dan metode kerdja, dan dengan demikian membikin kawan² kita mengerti bahwa kesalahan dalam penjelidikan sesuatu keadaan yang njata akan menjejabkan mereka tenggelam dalam fantasi dan avonturisme.

Melakukan dua hal tersebut diatas berarti bahwa kita mempertinggi taraf Marxisme-Leninisme daripada Partai. Ini berarti bahwa kita harus dengan sepenuh hati mempelajari Marxisme-

Leninisme setjara sistimatis, terutama dikalangan kader tinggi, agar mereka pandai menggunakan pendirian, pandangan dan metode klas buruh untuk menindjau dan memetjahkan soal² praktis yang dihadapi. Ini berarti, bahwa kader² Partai harus mengadakan pemeriksaan dan penjelidikan dengan sikap sungguh² dan djudjur terhadap massa dengan memakai tjarakerdja „dari massa kembali kemassa”. Pokoknja kita harus memadukan teori dengan praktek. Pekerdjaan ini hanya bisa berhasil dan dapat dikonsolidasi djika kita mendidik dan menjusun barisan pekerdja² teori Partai untuk pekerdjaan² ilmiah mengenai Marxisme-Leninisme dan meneruskan gerakan „turun kebawah”.

Singkatnja, kita harus tahu Marxisme-Leninisme dan kenal keadaan untuk meningkatkan hasil pekerdjaan. Tahu Marxisme-Leninisme dan kenal keadaan, inilah sembojan beladjar dan sembojan bekerdja kita.

Dalam Kongres Nasional ke-V Partai telah kita simpulkan, bahwa sumber sosial daripada subjektivisme ialah karena negeri kita sekarang adalah negeri burdjuis ketjil. Partai kita seperti sebuah perahu yang sedang berlajar dilautan burdjuis ketjil. Partai tidak hanya dilingkungi oleh klas burdjuis ketjil, tetapi djuga sebagian besar anggota Partai berasal dari klas ini. Djadi, bahwa kemurnian ideologi Partai dapat ditjairkan oleh ideologi klas yang tidak sah didalam Partai bukanlah sesuatu kemustahilan. Dalam kita terus-menerus melawan ideologi burdjuis ketjil didalam Partai, kita tidak boleh melupakan bahwa ideologi burdjuis adalah djuga antjaman yang terus-menerus terhadap kemurnian ideologi dan politik Partai. Demikianlah kalau dilihat sumber sosial daripada kesalahan² kita.

Tapi kesalahan² kita bisa djuga tidak berpangkal pada sumber sosial, tetapi berpangkal pada sumber pengertian yang salah. Tentang ini dikatakan oleh Kawan Liu Sau-tji sbb. : „Djika seseorang tidak mengetahui, bahwa pendapat yang tepat itu tidak lain daripada pentjerminan objektif yang meliputi segala sudut dari kenjataan, dan bertindak menurut keinginanja yang subjektif dan beratsebelah, maka dia tetap akan membikin kesalahan yang besar atau ketjil, sungguhpun segala motifnja itu mengandung maksud yang baik. Karena itu, untuk mengelakkan kesalahan kita harus dengan tepat memahami kenjataan objektif dan dengan tepat membedakan mana yang benar dan mana yang salah”.

Sedjarah Partai kita menundjukkan, bahwa sedjak berdirinja sampai tahun 1951 Partai membikin kesalahan², atau oportunisme kanan atau oportunisme „kiri”, atau ke-dua²nja sekaligus, yang sudah menimbulkan banjak kerusakan dan kerugian pada Partai.

Tapi sedjak tahun 1951, jaitu tahun pembaruan pimpinan sentral Partai, kita tidak lagi membikin kesalahan yang demikian seriusnja. Dan kemungkinan membikin kesalahan yang demikian mendjadi lebih diperketjil sesudah ada garis politik, ada program Partai dan garis organisasi Partai yang tepat yang ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-V.

Kenjataan pada waktu sekarang ialah, bahwa kaum reaksioner sukar memukul politik Partai, karena begitu satunja politik Partai dengan kepentingan² ekonomi dan politik yang langsung daripada massa Rakjat dan dengan kepentingan² nasional. Mereka djuga sukar menjerang program Partai, karena menjerang ini berarti menjerang kepentingan vital daripada Rakjat dan bangsa.

Oleh karena itu mereka lebih banjak mentjuraikkan kegiatannja dalam gelanggang ideologi, dimana mereka setjara diam² menjelundupkan pandangan² dunia idealis dalam menjelaskan masalah² politik, hukum, kesenian, dsb., sehingga menimbulkan kekatjauan dalam dunia ideologi. Dengan demikian mereka berharap dapat menghalang-halangi kemajuan gerakan progresif, kemajuan perdjuaan anti-imperialisme dan anti-feodalisme pada umumnja.

Dalam filsafat, kaum imperialis dan kakitangannja serta kaum burdjuis dalam negeri pada hakekatnja berada dalam satu front dan sangat aktif menjerang benteng filsafat klas buruh. Menghadapi serangan frontal dilapangan filsafat ini adalah keliru sekali untuk bersikap pasif, karena ini berarti membiarkan benteng filsafat klas buruh dimasuki dan diobrak-abrik oleh elemen² perusak, yang akan melemahkan semua bidang kegiatan gerakan buruh dan gerakan Rakjat pekerdja pada umumnja.

Djelaslah bahwa salahsatu tugas terpenting sekarang, ialah meneruskan pembangunan Partai dengan penekanan pada segi pembangunan ideologi. Dengan mengemukakan ini tidak berarti bahwa kita boleh menganggap remeh masalah pembangunan organisasi. Pembangunan organisasi adalah tetap penting, tetapi lebih penting lagi pembangunan ideologi.

Djika kita sekarang lebih mementingkan ideologi Partai, tidaklah berarti bahwa selama ini belum ada usaha Partai dilapangan ideologi, tetapi yang dimaksud ialah bahwa pekerdjaan kita belum tjukup banjak dan belum tjukup baik dalam membentuk ideologi anggota² Partai. Untuk memperbaiki pekerdjaan Partai dalam lapangan ideologi, di-masa² datang kita harus lebih mengutamakan peladjaran filsafat Marxisme-Leninisme, jaitu filsafat materialisme dialektik dan histori. Kita harus lebih banjak mengadjarkannja kepada kader² Partai dan memperkenalkannja kepada massa anggota baik dengan mendjadikannja matapeladjaran di Sekolah² dan

Kursus² Partai, maupun dengan melalui berbagai matapelajaran lain dan dengan menghubungkan filsafat Marxisme-Leninisme dengan semua lapangan kehidupan.

Mengenai pentingnja pembangunan ideologi pada waktu² belakangan ini sudah mulai disadari sungguh² oleh kader² Partai. Sudah semakin disadari bahwa Partai kita adalah Partai yang berdisiplin badja, tetapi disiplin tidak bisa hanya bersandar pada organisasi sadja, melainkan harus terutama bersandar pada kesadaran anggota. Ini berarti bahwa lebih tinggi kesadaran anggota, lebih tinggi pula rasa disiplinnya. Djuga makin disadari bahwa tidak ada tugas Partai yang dapat dilaksanakan dengan baik djika tidak ada persiapan ideologi, dan Partai hanya bisa kokoh djika bersandar pada kesatuan ideologi. Oleh karena itu bagi kita kaum Komunis, ideologi adalah djenderal. Tanpa ideologi yang tepat tidak ada yang bisa berdjalan beres sebagaimana halnya tanpa djenderal yang baik tidak ada tentara yang bisa menang.

Fikiran sementara anggota bahwa filsafat sama dengan mistik adalah keliru. Begitu djuga anggapan bahwa filsafat sukar dimengerti dan hanya bisa dimengerti oleh ahli² dan teoritikus² adalah keliru. Penghantjuran fikiran² yang keliru ini merupakan sjarat pertama untuk bisa meluaskan peladjaran filsafat dalam Partai kita. Mempeladjar filsafat adalah sama sadja dengan mempeladjar teori² Marxisme-Leninisme lainnya. Djika mempeladjar filsafat terlepas dari kenjataan, maka menjadi sukar difahami. Tetapi djika filsafat dipeladjar sebagaimana mestinya, jaitu menghubungkan dengan praktek kehidupan, dengan kenjataan², dengan dokumen² Partai, dengan garis umum dan politik se-hari² daripada Partai, maka mempeladjar filsafat tidak akan menimbulkan kesukaran-kesukaran yang besar, karena persoalannya menjadi kongkrit.

Selama ini masih banyak anggota² Partai yang dapat mengatakan bahwa garis umum dan politik Partai adalah baik dan tepat, tetapi mereka tidak bisa menerangkan mengapa baik dan mengapa tepat. Hanya dengan memahami filsafat Marxisme-Leninisme, kader² Partai dapat menguraikan mengapa garis umum dan politik Partai tepat. Dengan memahami filsafat bagi mereka akan menjadi djelas bahwa filsafat itu adalah dasar teori daripada segala taktik, garis, pedoman dan politik Partai, dan dengan demikian kader² tidak hanya „tahu kebenaran”, tetapi djuga „tahu sebab kebenaran” garis politik Partai.

Kesalahan politik yang paling mungkin dibikin oleh Partai sudah ada garis politik dan Program Partai yang tepat, jalah bahwa kita tidak bisa membedakan antara Program Partai yang umum,

yang akan dilaksanakan oleh Partai djika Partai memimpin pemerintahan, dengan program tuntutan atau program khusus yang harus diperdjualkan oleh Partai, yang harus dituntut oleh Partai kepada kekuasaan yang ada sekarang.

Karena subjektivisme, kita bisa membikin kesalahan menuntut pelaksanaan Program Umum sepenuhnya sekarang. Sebagai tjontoh tentang kesalahan subjektivisme jalah Manifes Pemilihan Umum Parlemen yang pertama yang disahkan dalam Kongres Nasional ke-V, tetapi yang kemudian dikoreksi oleh Sidang Pleno ke-III CC. Kesalahan ini tidak sampai menimbulkan akibat² yang sangat merugikan berkat selalu adanya kebulatan dalam pimpinan Partai.

Sebaliknya, djuga karena subjektivisme, jaitu karena tidak mengutamakan kepentingan bagian yang sangat terbesar daripada Rakjat, kita bisa tidak menerangkan kepada Rakjat Program Umum kita, sehingga Rakjat tidak tahu perbedaan antara program kita dengan program partai² burdjuis liberal.

Kemungkinan membikin kesalahan subjektivisme seperti tersebut diatas sudah sangat diperketjil sesudah Sidang Pleno ke-IV CC, dimana dengan tegas kita bedakan antara Program Umum dengan program khusus atau program tuntutan, tetapi dengan tegas pula kita tundjukkan hubungan yang satu dengan yang lain. Dengan Program Umumnya Partai memperlengkapi tugas² dan sembojan² Revolusi Agustus 1945. Djika tugas² dan sembojan² ini dilaksanakan sama artinja dengan menyelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus yang bersifat nasional dan demokratis sampai ke-akar²nja. Program tuntutan kita adalah tuntutan² pada kekuasaan yang ada sekarang, yang bisa ber-ubah² sesuai dengan perubahan dan perbedaan keadaan.

Dalam memperdjualkan program tuntutan harus ditjegah gejala birokrasi yang menghinggapi sementara fungsionaris Partai, jaitu kurang tjepat memberikan tuntunan aksi dalam memenangkan tuntutan² massa yang mendesak dan tidak tjukup memikirkan, bagaimana membikin tuntutan itu menjadi persoalan massa dan kegiatan massa. Rasa puasdiri karena sudah dapat membikin pernyataan atau membikin pidato di-dewan² perwakilan Rakjat dan di-tempat² lain yang dilengkapi dengan angka² dan fakta² harus dihindarkan. Membuktikan segala sesuatu dengan angka² dan fakta² adalah sangat penting, tetapi tidak boleh ada fungsionaris Partai yang „terpaku” kepada angka² dan fakta² tanpa memetjahkan persoalannya sehingga dapat membangkitkan, memobilisasi, dan mengorganisasi massa, untuk melaksanakan program tuntutan Partai pada tiap² situasi.

Pendeknja pada waktu sekarang Partai sudah diperlengkapi dengan strategi dan taktik² pokok yang terang, sehingga tidak mudah lagi terdjerumus menjadi mangsa daripada fikiran ke-kiri²an dan fikiran menjerah, tidak mudah lagi terprovokasi dan tidak mudah lagi menjadi lupa daratan jika memperoleh kemenangan².

Tetapi mengerti strategi dan taktik² pokok saja belum cukup. Partai kita harus senantiasa menguasai situasi yang sedang berdjalan setjara lengkap atau agak lengkap, menetapkan sikap terhadap situasi itu dan menentukan langkah² dan aksi² yang menguntungkan Rakjat serta mendorong maju gerakan revolusioner. Dengan demikian kita tidak hanya mengerti taktik² pokok tetapi juga taktik sehari². Adalah tepat sekali putusan CC untuk mengintensifkan pemeriksaan dan penyelidikan atas berbagai keadaan dan penghidupan massa, dan putusan bahwa semua anggota CC dan kader² penting lainnya harus turun ke bawah buat ambil bagian dalam pemeriksaan dan penyelidikan ini dan bertanggungjawab akan kemajuan organisasi Partai lokal yang meliputi sejumlah organisasi² basis yang pemeliharaannya diserahkan kepadanya. Ini salahsatu jaminan bahwa pemimpin² Partai kita tidak akan terpisah dari massa anggota dan dari kehidupan massa Rakjat pekerdja.

Hendaklah senantiasa diingat, bahwa diantara strategi dan taktik² pokok Partai atau garis politik Partai yang sudah benar, dengan pelaksanaannya masih ada jarak pemisah. Walaupun kita sudah beladjar teori Marxisme-Leninisme, sudah berusaha mengenal keadaan, dan juga menguasai garis politik Partai dengan baik, kemungkinan kita membuat kesalahan masih tetap ada. Untuk mengurangi kemungkinan membuat kesalahan ini, Partai kita sudah dipersendjatai dengan sendjata yang ampuh, yaitu sendjata kritik dan selfkritik. Dengan melakukan kritik dan selfkritik setjara serius, tetapi juga setjara sabar dan *bidjaksana*, maka kita akan berhasil menemukan kesalahan² dan kekurangan² dalam pekerdjaan kita, agar dengan demikian kita dapat „menarik pelajaran dari kesalahan yang sudah² sebagai peringatan bagi hari kemudian” dan kita juga dapat „mengobati penyakit untuk menjembuhkan sisakit”.

Didalam Partai harus dibangun keberanian melakukan kritik, terutama kritik dari bawah kepada atasan, dengan berpegang pada pedoman yang dikemukakan oleh Kawan Mau Tje-tung yaitu „bertitik pangkal pada kemauan bersatu, dan melalui kritik dan selfkritik, mentjapai persatuan baru atas dasar yang baru”. Dengan setia mengamalkan kritik dan selfkritik berarti kita memerangi subjektivisme, dan dengan demikian kemungkinan membikin ke-

salahan menjadi diperketil serta persatuan didalam Partai lebih diperkuat.

Hanya dengan terus-menerus memerangi subjektivisme, baik dalam tjara berfikir maupun dalam tjarakerdja, Partai kita dapat menjadi pimpinan yang objektif dan realis, dapat mengikis birokratisme dan sektarisme dalam mengembangkan Partai, dalam menggalang persatuan Rakjat di-mana² dan dalam mengorganisasi aksi² massa sehingga dapat memimpin dan mendjuruskan perkembangan situasi. Dengan melaksanakan semuanya itu kita mewujudkan suatu langgamkerdja yang membedakan Partai kita dengan partai² lain, yaitu langgamkerdja Partai yang dengan singkat dapat dirumuskan sbb. : *Memadukan teori dengan praktek, berhubungan erat dengan massa Rakjat dan melaksanakan selfkritik. (Tepuktangan lama).*

(4) Teruskan Bekerdja Dengan Plan 3 Tahun

Putusan Sidang Pleno ke-IV CC untuk memimpin perkembangan Partai dengan mengadakan Plan 3 Tahun Pertama tentang Organisasi dan Pendidikan adalah putusan yang bersedjarah. Inilah untuk pertama kalinya perkembangan yang meluas dan mendalam daripada Partai dipimpin oleh suatu Plan yang jangka waktunya agak panjang, mengenai semua organisasi Partai dan semua anggota Partai. Plan ini telah menimbulkan suasana baru, telah membawa kesegaran dan kegembiraan bekerja dalam barisan Partai. Plan ini telah mempertinggi daya memobilisasi daripada Partai. Didalam Partai mulai dibiasakan tjarakerdja yang rasionil dan efektif. Para fungsionaris dan aktivis Partai menjadi makin terlatih untuk bekerja „banjak segi”, pandangan mereka tidak lagi hanya terbatas pada lapangannya masing², tetapi sudah melihat hubungan lapangannya sendiri dengan pekerdjaan Partai keseluruhannya. Dengan adanya Plan ini para fungsionaris dan aktivis Partai menjadi lebih didorong untuk memperdalam pengertian mereka mengenai pekerdjaan² masing², untuk mempelajari lebih baik keadaan daerahnya masing² dan keadaan sukubangsa² yang ada di daerahnya. Tanpa melakukan semuanya ini, para fungsionaris dan aktivis Partai tidak dapat ikut ambil bagian yang aktif didalam pelaksanaan Plan 3 Tahun Partai.

Mengenai lapangan pendidikan, di Sekolah² dan Kursus² Partai dilakukan pendidikan pedjuang² revolusioner, untuk memberikan semangat dan pandangan dunia Komunis, yang akan membikin anggota² Partai dalam keadaan bagaimanapun tetap yakin, bahwa djalan revolusioner yang sudah dipilihnya adalah djalan yang se-

tepat²nja, djalan hidup baru dan untuk masjarakat baru. Berdasarkan Plan 3 Tahun Partai semua Komite ambil bagian aktif dalam penjelenggaraan plan pendidikan, sedangkan anggota² yang terpilih untuk mengikuti Sekolah atau Kursus Partai menerima penempatan itu sebagai suatu kehormatan yang tinggi.

Dengan adanya perlombaan dalam melaksanakan Plan 3 Tahun Pertama Partai, pimpinan kolektif dan pekerdjaan massa daripada Partai mendjadi lebih berkembang, sebab pelaksanaan Plan tidak mungkin berhasil baik djika tidak ada pimpinan kolektif dan pekerdjaan massa. Dengan adanya pimpinan kolektif yang disertai kritik dan selfkritik, demokrasi didalam Partai mendjadi berkembang dan dengan ini berkembang pula kepribadian, dajatjipta dan militansi para anggota Partai. Berkembangnja demokrasi didalam Partai memperkuat sentralisme Partai. (*Tepuktangan*).

Garis massa ber-angsur² mendjadi sungguh² garis politik, garis organisasi dan garis moral daripada Partai. Telah mendjadi keajaiban Partai kita bahwa untuk suksesnja Plan dan untuk suksesnja semua pekerdjaan Partai dan semua pekerdjaan massa daripada Partai, Partai harus setia pada pimpinan kolektif, pada kritik dan selfkritik dan pada garis massa. Hanya dengan memadukan pimpinan kolektif dengan kritik dan selfkritik dan dengan garis massa kita akan dapat mewujudkan pimpinan kolektif yang kritis, objektif dan realis, yang sempurna dan kuat, yang akan memperbesar kemampuan dan otoritet Partai.

Tetapi situasi revolusioner berkembang tjepat, lebih tjepat daripada perkembangan Partai. Perjuangan anti-kolonialisme Rakjat Indonesia makin sengit dan meningkat kefase yang baru, jaitu kembalinja semangat Revolusi Agustus 1945 yang disertai dengan kesadaran Rakjat tentang besarnja kekuatannja sendiri, kesadaran tentang murninja dan pentingnja sokongan Rakjat pekerdja diseluruh dunia dan sokongan negara² kubu Sosialis. Ini disatu fihak, sedangkan difihak lain tumbuhnja kesadaran Rakjat akan terbatasnja kekuatan imperialis dan kekuatan kaum reaksioner dalam negeri. Didalam situasi yang demikian inilah berlangsung Sidang Pleno ke-VI CC yang mengambil resolusi tentang keharusan untuk menjesuaikan badan² pimpinan Partai dengan perkembangan situasi revolusioner yang tjepat yang dimulai dari CC sampai kepada Komite² yang paling bawah. Dengan tindakan penjesuaian ini dimaksudkan agar hubungan Partai dengan massa dapat lebih dieratkan lagi agar semua persoalan massa dapat terdjawab atau terpetjahkan oleh Partai. Penjesuaian ini tidak hanya terbatas pada badan² pimpinan Partai, tetapi djuga mengenai seluruh Partai dan seluruh

organisasi massa revolusioner yang berada dibawah pimpinan Partai.

Pimpinan sentral Partai disempurnakan dengan membentuk Dewan Harian Politbiro CC; untuk melantjarkan pekerdjaan Sekretariat CC dibentuk Biro² baru yang ditudjukan untuk mengurus daerah² tertentu; di CC dan Komite² bawahan dibentuk Biro Plan yang mengontrol pelaksanaan Plan 3 Tahun; Departemen² dan Bagian² baru dibentuk; promosi kader dilakukan diseluruh Partai dan mutasi kader dilakukan ke-tempat² yang sangat kekurangan kader. Semuanya ini telah meningkatkan semangat dan hasil pekerdjaan Partai.

Perkembangan situasi revolusioner yang tjepat seperti diterangkan diatas tidak mungkin kita tampung djika seandainya kita tidak mempunyai Plan Tiga Tahun, artinja djika kita tidak mempunyai pengalaman bekerdja sistimatis dan tidak meluaskan Partai serta mendidik anggota² Partai. Oleh karena itu, kita harus meneruskan pekerdjaan dengan Plan Tiga Tahun, djika selesai dengan yang pertama harus disusul dengan yang kedua dan seterusnya. Kontrol yang intensif, yang sistimatis dan terus-menerus mengenai pelaksanaan Plan harus dianggap sebagai salahsatu pekerdjaan terpenting untuk suksesnja Plan. Disamping itu kita harus meningkatkan subjektivisme dalam menjusun Plan.

Bagaimana mengenai djatah² yang ditetapkan dalam Plan 3 Tahun Pertama? Dilapangan organisasi ditetapkan djatah² tentang peluasan keanggotaan dan organisasi; penggrupn tiap anggota; peningkatan tjalonanggota mendjadi anggota setelah melalui masa-tjalon yang terpimpin; pengaktifan bagian² daripada Komite²; penjelenggaraan konferensi² dan rapat² periodik dari Komite² dan Grup²; pemetjahan masalah perlengkapan kantor dan perpustakaan Partai oleh tiap Komite; pengintensifan pengumpulan iuran serta peluasan donasi dan usaha² produktif, dsb. Pelaksanaan djatah² dilapangan organisasi seperti yang ditetapkan dalam Plan 3 Tahun Pertama sudah sangat membantu dalam usaha meluaskan dan mengkonsolidasi Partai, tetapi masih belum berhasil seluruhnja sehingga masih perlu mendapat penekanan-penekanan lagi dalam Plan 3 Tahun Kedua.

Djatah dalam lapangan pendidikan meliputi pengorganisasian Sekolah² Partai, Kursus² Partai dan Sekolah² Politik. Djuga ditetapkan djatah mengenai djumlah konferensi² teori yang harus diselenggarakan; djatah yang harus ditjapai dalam pemberantasan butahuruf; selandjutnja ketentuan tentang mendirikan badan² pendidikan bagi orang² progresif diluar Partai dengan mendirikan „Universitas Rakjat“ diibukota Republik dan kota² lainnja, djatah

mengenai peluasan penerbitan dan peredaran literatur Partai, khususnya mengenai kenaikan oplah „Harian Rakjat”.

Pada umumnya djatah² yang ditjapai dalam lapangan pendidikan lebih baik daripada djatah² yang ditjapai dalam lapangan organisasi, bahkan beberapa Komite sampai berhasil melampaui djatah yang ditetapkan mengenai penyelenggaraan Sekolah Partai atau Kursus Partai. Tetapi ada juga bagian² penting yang belum tertjapai, diantaranya yang sangat serius ialah mengenai peredaran literatur Partai, khususnya peningkatan oplah „Harian Rakjat”.

Mengenai pentingnya HR didalam kehidupan Partai sehari-hari sudah tjukup djelas dan sudah tjukup difahami oleh kader² Partai. Tetapi mengenai pekerjaan praktis untuk perbaikan distribusi HR masih belum tjukup disadari. Belum tjukup disadari bahwa distribusi HR adalah pekerjaan politik yang penting. Peluasan pengaruh Partai lewat HR sangat tergantung pada besarnya oplah HR, dan oplah hanya dapat diperbesar jika distribusinya luas dan baik. Masalah distribusi adalah masalah pemeliharaan para langganan dengan telaten, masalah ketelitian dalam pembukuan dan dalam surat-menjurat, dan selanjutnya masalah ketertiban dalam pencairan uang langganan kepada administrasi HR. (Tawa). Hal² inilah yang tidak dilakukan setjara baik oleh sementara Komite.

Jang paling baik ialah jika Komite Partai sendiri memegang semua keagenan HR, akan tetapi pada tingkat organisasi kita sekarang hal yang demikian terlampaui banyak meminta tenaga dan fikiran dari fungsionaris² Komite. Oleh karena itu adalah keliru, jika sesuatu Komite mengambilalih keagenan dari agen yang sudah berdjalan lantjar, hanya dengan alasan bahwa agen tersebut bukan orang yang ditunduk oleh Komite. Tindakan sematjam itu mungkin bisa memetjahkan kesulitan keuangan Komite yang bersangkutan untuk waktu yang sangat pendek, tetapi sebaliknya bisa menimbulkan kerugian² yang besar dalam politik dan organisasi Partai.

Djadi, titikberat dalam memajukan HR sekarang ialah dalam memperbaiki distribusi. Distribusi HR harus dianggap sebagai pekerjaan politik yang penting. Hanya dengan perbaikan distribusi oplah HR dapat ditingkatkan, dan hanya jika oplahnya besar pengaruh politik Partai yang dibawa HR dapat mentjapai massa yang luas. Masalah distribusi HR harus menjadi tanggungjawab sekretaris² Komite dan semua kader penting Partai.

Di-tengah² kesibukan seluruh Partai melaksanakan Plan Tiga Tahun Pertama dan menjesuaikan organisasi Partai dengan situasi revolusioner yang berkembang tjepat, ada beberapa kawan kita yang tidak mau tahu dengan semuanya ini. Kawan² ini bukannya sibuk dengan mengkonsolidasi Partai dan kemenangan² Rakjat,

tetapi mereka sibuk dengan „mengkonsolidasi diri”, jaitu „memperkaja diri”, (tawa), menjadi „pahlawan keluarga” (tawa) atau tenggelam dalam kemesuman moral burdjuis. Sebagai orang yang mendapat kepertjajaan Rakjat dan Partai untuk duduk di Dewan² Perwakilan Rakjat pusat atau daerah, di-dewan² pemerintah daerah atau di-kedudukan² lain, mereka „bukannya mentjurahan segenap tenaga dan fikirannya untuk memenuhi mandat Rakjat dan Partai, tetapi sibuk dengan „urusan sendiri”. Kita mengetahui bahwa kawan² ini sering berkata dalam hatinya, bahwa orang² Partai² lain yang berkedudukan sama dengan mereka berbuat djauh lebih buruk. Tetapi kawan², bukanlah orang² yang berbuat buruk itu harus ditjontoh! (Tawa).

Dalam masalah ideologi pimpinan Partai tidak kenal ampun, tetapi tidak akan buru² mengambil tindakan memetjati kawan² ini dan akan dengan telaten menjedarkan mereka bahwa mereka sedang berada didjalan yang salah dan supaya kembali kedjalan yang benar. Pimpinan Partai selamanya menjajang dan mentjintai anggota² Partai, dan jika ada yang berbuat salah, pimpinan dengan telaten, sabar dan dengan tjara meyakinkan berusaha mengembalikannya kedjalan yang benar selama yang bersangkutan masih mau memperbaiki diri. Tetapi jika ternyata bahwa keadaannya sudah berlaut² dan tidak ada tanda² bahwa „sisakit” akan sembuh, malahan sudah ada tanda² bahwa penjakitnya akan menular kepada kawan² lain sehingga akan mengendorkan persatuan dan disiplin didalam Partai, maka tidak ada djalan lain ketjuali terhadap pembawa „penjakit menular” itu harus diambil tindakan disiplin dengan memetjatnya dari Partai berdasarkan Konstitusi Partai. (Tepuktangan lama).

Tetapi senantiasa hendaklah diingat, bahwa kelemahan ideologi didalam Partai tidak mungkin diberantas hanya dengan memetjati elemen² yang korup dan bermoral bedjat sadja. Ia harus diatasi dengan meningkatkan kesadaran Marxis-Leninis diseluruh Partai, dan oleh karena itulah bagian pendidikan dari Plan Tiga Tahun Partai harus senantiasa mendapat perhatian yang utama, baik ketika menjusun Plan maupun dalam pelaksanaannya.

Berhubung dengan itu didalam menjusun Plan 3 Tahun Kedua yang akan datang peladjaran filsafat Materialisme Dialektik dan Histori harus menjadi matapeladjaran terpenting disemua Sekolah dan Kursus Partai. Selanjutnya Sekolah Partai Central dan Sekolah² Partai Daerah Besar harus mendjamin kesatuan teori Marxisisme-Leninisme dengan praktek revolusi Indonesia disamping merupakan perpaduan badan pendidikan dengan badan penjelidikan (research). Sekolah Partai Central dan Sekolah Partai Daerah

Besar selanjutnya mempunyai tugas untuk mendidik kader² pekerdja teori; harus meneruskan mendidik pekerdja² politik dan organisasi; dan selanjutnya mendidik guru² untuk berbagai mata-pelajaran untuk Sekolah² Partai Daerah Besar. Berhubung dengan itu sjarat² untuk menjadi siswa harus lebih disesuaikan dengan tugas² ini dan Akademi Ilmu Sosial „Aliarcham“ harus ambil bagian penting dalam melaksanakan tugas² tersebut.

Mengingat pengalaman dalam menyusun dan kemudian merevisi Plan 3 Tahun Pertama, maka penjurusan dan penetapan Plan 3 Tahun Kedua harus dilakukan lebih objektif dan realis. Untuk ini, laporan² detail yang objektif dari CDB² kepada Biro Plan CC merupakan sjarat yang tidak boleh tidak harus dipenuhi.

(5) Memperkuat, Memperluas dan Memperbaharui Partai

Didalam menghadapi tugas² baru dari Partai yang akan diletakkan oleh Kongres Nasional ke-VI, kita harus membikin Partai dan gerakan massa kita menjadi satu tubuh perkasa, yang berdiri tegak, dan menatap kedepan, karena mempunyai tulang punggung yang kuat. Tulangpunggung Partai ialah pemimpin²nja yang sudah terdidik dan terus mendidik diri dalam ilmu Marxisme-Leninisme dan dalam perjuangan revolusioner. Tulangpunggung gerakan massa ialah seluruh Partai kita. Dengan tulangpunggung Partai yang kuat kita menjadikan seluruh Partai tulangpunggung dari-pada gerakan massa.

Tugas² urgen daripada Partai sesudah Kongres Nasional ke-VI pada pokoknya masih tetap seperti sebelum Kongres Nasional ke-VI, yaitu menggalang front persatuan nasional dalam arti memperbaiki pekerdjaan dilapangan ini, dan bersamaan dengan itu meneruskan pembangunan Partai dalam arti mengkonsolidasi dan meluaskan Partai. Dua tugas ini tak dapat di-pisah²kan satu sama lain. Berhubung dengan ini harus terus digembleng kesatuan fikiran dan kesatuan sikap didalam Partai mengenai front persatuan nasional, sebab kalah atau menangnya revolusi Indonesia ditentukan oleh berhasil atau tidaknya klas proletar menggalang front persatuan nasional. Tetapi supaya Partai bisa bulat mengenai persoalan front persatuan nasional, maka haruslah senantiasa terdapat kebulatan mengenai ideologi, mengenai ajaran² Marxisme-Leninisme dan pentrapannya di Indonesia.

Setiap fikiran dan perbuatan yang merugikan front persatuan nasional, harus dianggap sebagai suatu kesalahan terhadap Partai, terhadap Rakjat, terhadap revolusi dan harus segera diambil tindakan untuk membetulkannya. Setiap fikiran dan perbuatan yang

merugikan persatuan didalam Partai, yaitu sjarat utama untuk ada dan kuatnya front persatuan nasional, harus dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap Konstitusi Partai, dan oleh sebab itu tidak boleh dibiarkan.

Sedjak bulan Maret 1958 pekerdjaan menyesuaikan organisasi Partai dengan situasi yang berkembang tjepat sudah kita mulai setjara menjeluruh. Ini berarti terus menyesuaikan organisasi dengan kebutuhan gerakan revolusioner, sehingga dapat diselesaikan dengan tepat dan pada waktunya kontradiksi antara organisasi dan situasi, antara pimpinan dan anggota, antara Partai dan massa. Tetapi, walaupun tidak sedikit jumlah kader yang sudah dipromosikan dan diberi tugas² yang lebih bertanggungjawab, walaupun pembagian pekerdjaan dan pembagian waktu sudah diatur lebih efisien, kenjataanja pekerdjaan masing² kader tidak bertambah ringan, bahkan sebaliknya. Kenjataan ini membuktikan, bahwa sebelum *penjesuaian* banjak hal² yang harus dikerdjakan, tetapi tidak dikerdjakan, banjak persoalan Rakjat yang harus dipetjahkan, tetapi tidak dipetjahkan.

Sekarang, sesudah dimulai dengan *penjesuaian* memang rangkaian pekerdjaan masing² kader umumnya belum berkurang, tetapi kita sudah menjadi lebih mampu dalam memetjahkan semua persoalan dan dalam mengerdjakan semua pekerdjaan Partai dan massa. Pekerdjaan *penjesuaian* masih djauh dari selesai dan masih harus lebih dipertjepat, antara lain dengan djalan memperluas jumlah anggota² Pleno Komite² Partai, mengadakan pembagian pekerdjaan dan pembagian waktu kerdja yang lebih rasionil, menemukan bentuk² baru yang lebih tjepat dalam mendidik dan melatih kader di-sektor² yang diperlukan. Satu hal yang sudah pasti ialah, bahwa sesudah dimulai dengan *penjesuaian* pada umumnya kader² Partai bekerdja dengan gembira, dengan penuh djiwa dan bersemangat, karena semua persoalan yang dihadapi oleh Partai dan massa dapat dipetjahkan, dan semua pekerdjaan yang harus dikerdjakan dapat dilaksanakan.

Kewadajiban kita sekarang ialah meneruskan pembangunan Partai. Sembojan kita untuk ini sekarang ialah „*memperkuat, memperluas dan memperbaharui Partai*“. Hanya dengan Partai yang demikian akan ada djaminan untuk mentjapai sukses dalam memperbaiki pekerdjaan front persatuan nasional dinegeri kita.

Memperkuat Partai berarti per-tama² mengkonsolidasi dan mengembangkan hasil² Plan 3 Tahun Pertama; menjusun Plan 3 Tahun Kedua yang lebih objektif dan realis serta mensukseskan pelaksanaannya; memeriksa kembali seluruh barisan Partai untuk mentjari kelemahan-kelemahan Partai supaya dapat dilikwidasi,

selain itu mempergiat pekerdjaan untuk memelihara kemurnian ideologi Partai. Kita harus tidak henti²nja mengintensifkan pelajaran teori Marxisme-Leninisme, terutama dikalangan pimpinan Partai disemua tingkat. Kita harus meningkatkan gerakan Komunis yang sudah besar sekarang mendjadi organisasi Komunis, jang tidak hanja besar karena ia meliputi seluruh negeri dan sukubangsa, melainkan djuga merupakan organisasi jang aktif dan jang memimpin di-tiap² lingkungan Rakjat jang berdjuaang untuk perbaikan nasib dan haridepan jang lebih baik, sampai pada lingkungan jang se-ketjil²nja. (*Tepuktangan*). Setiap anggota Partai harus merupakan elemen jang aktif dilingkungannya masing², berarti mengembangkan individualitet masing² anggota untuk tudjuan membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa.

Ringkasnja, memperkuat Partai berarti mempertinggi kwalitet Partai, mempertinggi kwalitet dari semua organisasi Partai, jaitu Komite, Fraksi, Basis, Grup dan badan-badan Partai lainnja, dan semuanya ini berarti mempertinggi kwalitet tiap anggota Partai. Dengan Partai jang diperkuat bukan hanja kepribadian dan kewibawaan Partai terhadap Rakjat mendjadi lebih besar, tetapi bersamaan dengan itu kepribadian dan kewibawaan Rakjat Indonesia djuga mendjadi lebih besar. (*Tepuktangan*).

Memperluas Partai berarti mengembangkan dan mengeratkan hubungan Partai dengan Rakjat dari semua sukubangsa diseluruh negeri. Ini berarti menjempurnakan badan² transmisi daripada Partai dan memperbanyaknja, mulai dari serikatburuh² sampai kepada organisasi-organisasi kepanduan, olahraga, rekreasi, turisme, gerakan dan pendidikan kanak², dsb. jang dapat menghubungkan Partai dengan massa penduduk jang paling terbelakang atau paling atjuh-tak-atjuh terhadap persoalan² umum, jang sampai sekarang masih paling sulit diorganisasi. Pekerdjaan massa daripada Partai harus lebih disempurnakan, per-tama² dengan meresapkan pengertian didalam Partai bahwa antara kepentingan Partai dengan kepentingan massa tidak ada perbedaan. Kita harus terus mengadakan perlawanan terhadap sektarisme jang berakibat menjdauhkan Partai dari massa banjak dan bisa membikin Partai terisolasi. Achirnja memperluas Partai berarti menambah djumlah anggota dan djumlah organisasi Partai. Hanja dengan djumlah anggota jang besar dan masing² aktif bisa dibangun front persatuan nasional jang luas dan betul² kokoh. Hanja dengan organisasi Partai jang luas bisa ditijptakan gerakan massa jang luas, jang memusat dan kuat untuk mempertahankan dan meluaskan hak² politik daripada Rakjat dan untuk mengubah imbalanced kuatan. Hanja dengan meluasnja keanggotaan dan organisasi

Partai, bisa terdjadi perkembangan jang tjepat, dan hanja dengan demikian Partai mampu memusatkan ketjerdasan Rakjat seluruh negeri dan mendjadikan ketjerdasan itu sebagai tekad jang bulat dan aksi jang berdisiplin.

Ringkasnja, dengan memperbesar djumlah anggota dan organisasi Partai, dengan lebih mengkonsolidasi dan memperluas hubungan² seluruh anggota Partai dengan berdjuta-djuta Rakjat pekerdja Indonesia, dengan perdjuaangan jang lebih gigih dalam mempertahankan kepentingan² pokok Rakjat pekerdja dan seluruh Rakjat Indonesia, kaum Komunis Indonesia akan melaksanakan dengan penuh kehormatan tugas² jang dihadapinja dalam zaman kini.

Memperbaharui Partai per-tama² berarti memperbaharui Konstitusi Partai, jaitu memasukkan kedalam Konstitusi Partai kembangan² jang telah ditjapai semendjak Kongres Nasional ke-V dalam lapangan politik dan organisasi. Seluruh Konstitusi Partai dan tiap fasal daripada Konstitusi harus mentjerminkan kebenaran prinsip² organisasi Partai tipe Lenin. Fasal² daripada Konstitusi ditudjukan untuk memperbesar daja memobilisasi, daja mengorganisasi serta daja memimpin daripada Partai.

Memperbaharui Partai djuga berarti bahwa Partai harus senantiasa bekerdja menurut Plan, Plan jang meliputi seluruh Partai dan seluruh negeri. Selandjutnja kader² Partai tidak boleh bekerdja setjara spontan atau dengan me-raba², atau menetapkan politik dan bekerdja hanja berdasarkan perasaan sadja, tetapi mereka harus bekerdja berdasarkan hasil² penjelidikan (*research*) atau bekerdja setjara ilmiah untuk memperbaiki pekerdjaan praktis mereka dalam membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa, terutama massa kaum buruh dan kaum tani. Ini berarti bahwa Partai kita harus membiasakan diri bekerdja setjara ilmiah, bekerdja dengan mengadakan penjelidikan², eksperimen², pentjataan tiap² perkembangan dengan teliti jang disusul dengan perenungan. Jang terachir, dan ini jang masih sering dilupakan oleh kawan² kita, jalah penjimpulan daripada hasil² penjelidikan², eksperimen², pentjataan² dan perenungan-perenungan. Kemalasan atau kelengahan menjimpulkan ini berarti mengerdjakan pekerdjaan separoh², tidak serius dan dengan sendirinja tidak membantu mengembangkan pekerdjaan Partai. Hanja dengan bekerdja setjara ilmiah kita dapat menghindari bekerdja sebagai mesin jang mendjemukan, dan setiap persoalan, djuga jang nampaknja biasa dan remeh, dapat kita petjahkan setjara kreatif sesuai dengan tempat dan waktunja.

Memperbaharui Partai djuga diartikan mempertinggi kehidupan intern Partai, terutama dengan senantiasa setia pada azas sentral-

isme-demokratis dan dengan mengembangkan kritik dan selkritik. Partai harus senantiasa berada dalam suasana berlomba dalam melaksanakan Plan, dalam mengembangkan daja-tjipta masing² anggota dan dalam memperkuat kesatuan Partai dalam segala hal. Oleh sebab itu fasal² mengenai hal² anggota harus didjundj-tinggi dan setiap pelanggaran atas hak² anggota itu harus dianggap sebagai kesalahan yang serius.

Memperbaharui Partai samasekali tidak berarti membikin „Partai Baru“. Partai kita adalah tetap Partai tipe Lenin, Partai yang terus-menerus memperbaharui diri agar selamanja dapat memimpin keadaan.

Dalam rangka memperbaharui Partai adalah sangat penting untuk mengadakan gerakan memperbaiki tjara² memimpin yang didasarkan atas perpaduan seruan² umum dengan tuntunan² kongkrit dan perpaduan pimpinan dengan massa. Gerakan memperbaiki tjara² memimpin ini dimulai oleh kader² atasan yang bertanggungjawab, dengan sembojan „*atasan memberi tjontoh kepada bawahan*“. Perbaikan tjara² memimpin ini terutama ditudjukan untuk mentjegah tjara² memimpin yang birokratis, sektaris dan subjektif, singkatnja yang tidak konsekwen memegang garis massa. Perbaikan tjara² memimpin ini akan membawa Partai lebih tjepat terkonsolidasi dilapangan politik, organisasi dan ideologi dan akan lebih mengeratkan hubungannja dengan massa Rakjat sebagai djaminan untuk dapat mendorong perkembangan situasi lebih tjepat.

Sembojan „*atasan memberi tjontoh kepada bawahan*“ tidak boleh dibatasi pada lapangan kehidupan politik dan kehidupan organisasi sadja, melainkan setjara berangsur-angsur seluruh kehidupan se-hari² dari kader² atasan harus dapat didjadikan tjontoh, misalnja tentang kesederhanaan, kebedjaksanaan dan tentang moral Komunis.

Memperkuat, memperluas dan memperbaharui Partai hanja dapat terlaksana djika didalam Partai betul² terdjamin hegemoni daripada ideologi proletariat, djika ideologi burdjuis ketjil dan ideologi burdjuis selalu dikikis dan dibersihkan dari Partai, sehingga terdjamin kemurnian Partai dilapangan politik, organisasi dan ideologi.

Pekerdjaan memperkuat, memperluas dan memperbaharui Partai bukan „pekerdjaan musiman“, tetapi pekerdjaan yang terus-menerus harus kita lakukan. Dengan demikian kita mentjiptakan sjarat bagi Partai untuk selamanja dalam kedudukan berinisiatif dan selamanja militan.

Pekerdjaan memperkuat, memperluas dan memperbaharui Partai

berarti djuga, bahwa kesalahan² yang sudah pernah diperbuat diusahakan djangan sampai terulang lagi dan dipeladjar sungguh² sumber² daripada kesalahan-kesalahan itu. Disinilah pentingnja bagi kader² Partai untuk mempeladjar se-dalam²nja sedjarah Partai kita, sedjarah kesalahan², kegagalan² dan sukses²nja. *Djika terdapat kesalahan baru harus diusahakan melokalisasinja, dan melawannja dalam waktu yang pendek. Djika satu kesalahan sudah dapat diatasi djangan ada fikiran se-olah² kita sudah sembuh samasekali daripada penjakit itu sehingga mengurangi kewaspadaan kita.*

Jang terpenting sekarang dalam mempertinggi kewaspadaan adalah melawan dengan sekuat tenaga bahaya revisionisme-modern. Melawan ini berarti menegakkan semua prinsip Marxisme-Leninisme; melawan segala fitnahan terhadap benteng utama Sosialisme dan perdamaian, jaitu Uni Sovjet, dan terhadap PKUS; aktif mendjelaskan peranan yang menentukan dan peranan pelopor dari PKUS dan Uni Sovjet dalam menghantjurkan imperialisme sampai ke-akar²nja. (*Tepuktangan lama*). Melawan revisionisme-modern berarti melawan sovinnisme sebagai musuh terbesar daripada perdjuaan proletariat internasional untuk membebaskan dirinja, berarti menegakkan pandji² internasionalisme proletar dan membikin internasionalisme proletar mendjadi sesuatu yang wadjar dikalangan Rakjat yang sedang mendjalankan perdjuaan anti-imperialis. Melawan revisionisme-modern berarti melawan rasa puas-diri yang bersumber pada subjektivisme burdjuis ketjil.

Gerakan Komunis di Indonesia, seperti halnja dengan gerakan Komunis sedunia, sekarang ini sudah lebih kokoh daripada masa-masa yang lampau. Gerakan Komunis sedunia yang semakin monolit (bulat) telah memberikan pukulan yang menentukan pada revisionisme-modern. Akan tetapi kaum Marxis-Leninis tidak boleh menganggap sepi kenyataan bahwa revisionisme Tito masih ada, dan oleh karena itu perdjuaan melawan revisionisme, bahaya utama dalam gerakan Komunis sedunia, tidak boleh mendjadi lemah. (*Tepuktangan lama*).

Untuk memelihara kewaspadaan didalam Partai harus dikembangkan kebiasaan yang sudah kita tanamkan sesudah Kongres Nasional ke-V, jaitu kebiasaan mengadakan gerakan pembetulan fikiran. Partai sudah ber-kali² mengorganisasi gerakan pembetulan fikiran dengan mewadjabkan anggota² Partai mempeladjar buku² teori yang ditentukan atau melaksanakan suatu instruksi yang khusus untuk tudjuan itu. Sebagai tjontoh, untuk melawan fikiran ke-kiri²an semua kader Partai diwadjabkan mempeladjar buku Lenin „*Komunisme Sajak Kiri, Penjakit Kanak²*“, dan untuk mem-

perbaiki pekerdjaan dilapangan front nasional diwadjibkan mem-
peladjar buku Kawan Mau Tje-tung „*Tentang Mengurus Setjara
Tepat Kontradiksi Dikalangan Rakjat*”; untuk mempertahankan
kesederhanaan dalam kehidupan se-hari² dan djangan mendjadi
sombong sesudah Partai keluar sebagai pemenang dari tiga kali
pemilihan, Politbiro pernah mengeluarkan instruksi gerakan pem-
betulan fikiran; ketika persatuan kaum Komunis sedunia diserang
oleh revisionis² LKJ, Politbiro melantjarkan gerakan pembetulan
fikiran untuk mempertebal semangat patriotisme dan internasional-
isme proletar. Begitulah selandjutnja Partai harus sering melantjar-
kan gerakan² pembetulan fikiran untuk mempertinggi kewaspada-
an dan memperbaiki pekerdjaan Partai.

(6) Pimpinan Partai Pada Gerakan Massa

Perjuangan untuk memperkuat, memperluas dan memperbaha-
rui Partai tidak mungkin berhasil djika tidak erat dihubungkan
dengan perjuangan untuk memperkuat dan memperluas demok-
rasi. Sedangkan perjuangan untuk memperkuat dan memperluas
demokrasi tidak akan berhasil dengan baik djika tidak setjara
erat dihubungkan dengan pimpinan Partai pada gerakan massa
melawan kaum kapitalis monopoli dan monopoli tuantanah² atas
tanah. Undang² Dasar sekarang memang tidak memuat tentang
melikwidasi hubungan² produksi kapitalis, tetapi ia memungkin-
kan adanya perubahan² (reform²) yang bersifat menggerowoti
susunan pra-kapitalis yang sangat terbelakang dan mengurangi
atau menghapuskan susunan² monopoli yang paling menindas dan
paling menghisap (parasiter).

Perjuangan melawan kapitalis² monopoli dan perjuangan me-
lawan monopoli tuantanah² atas tanah untuk mengadakan reform²
berarti mengkonsolidasi dan meluaskan gerakan massa dibawah
pimpinan Partai berdasarkan politik persatuan seluruh massa
Rakjat. Ini berarti bahwa PKI harus meneruskan dan memperbaiki
pekerdjaannya membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi
massa, terutama kaum buruh dan kaum tani. Meneruskan pema-
ngnan Partai tidak bisa dipisahkan dari pekerdjaan massa ini.

Sampai sekarang pekerdjaan massa daripada Partai masih belum
memuaskan. Salahsatu sebab mengapa belum memuaskan ialah
karena masih belum tjukup banjak perhatian yang diberikan kader²
Partai pada persoalan² praktis daripada massa. Sementara kader
yang bekerdja didalam organisasi² massa ada yang meremehkan
pekerdjaan² praktis se-hari², sebab dianggapnja „kurang penting”
dan „kurang revolusioner”. Perhatian mereka terbatas pada „pe-

kerdjaan² yang berat”, umpamanja memimpin rapat raksasa dan
demonstrasi, memimpin pemogokan dan aksi² ber-kobar² lainnja.
Semua pekerdjaan ini memang penting, tetapi ini bukan pekerdja-
an saban hari. Tidak mungkin saban hari ada rapat raksasa, de-
monstrasi dan mogok. Apakah djika tidak ada pekerdjaan-peker-
djaan ini berarti Partai tidak ada kerdjanja? Sudah tentu tidak
demikian! Massa mempunyai banjak sekali persoalan sehari-hari
yang pemetjahannya mengharapkan bantuan Komunis. Umpamanja
disatu pabrik, si-buruh-muda ingin berolahraga tetapi tidak tahu
bagaimana menggunakan waktu terluangnja, si-buruh-tua memi-
kirkan harituannya, si-buruh-ahli ingin memperdalam pengetahuan
kedjuruannya, sebagian lagi ingin membangun atau mengembang-
kan koperasi, yang lain ingin berrekreasi, dsb. Semuanya ini adalah
persoalan se-hari² kaum buruh, dan Partai harus membantu mereka
dengan pekerdjaan massa se-hari².

Djadi, angota² Partai yang bekerdja dikalangan massa harus
membantu memetjahkan kesulitan² se-hari² daripada massa, harus
melakukan pekerdjaan se-hari² untuk massa. Tanpa pekerdjaan
se-hari² yang baik tidak mungkin ada pekerdjaan² yang ber-kobar².

Untuk memperbaiki pekerdjaan massa daripada Partai kita ha-
rus berpedoman „*berdjalan dengan dua kaki*”, jaitu mengkombina-
sikan pekerdjaan ber-kobar², dengan pekerdjaan tekun. Dengan
pekerdjaan ber-kobar² diartikan pekerdjaan yang mengobarkan
semangat massa Rakjat seperti gerakan pembatalan KMB, anti-
subversi asing, untuk pelaksanaan konsepsi Presiden Sukarno, un-
tuk pembebasan Irian Barat, untuk penghantjuran „Dewan² Par-
tikelir”, untuk pembasmian DI-TII dan „PRRI-Permesta”, untuk
mendekritkan Undang² Dasar 1945 dsb. Gerakan yang ber-kobar²
adalah penting, sebab ia mendemonstrasikan kebulatan tekad dan
kekuatan persatuan Rakjat, dan membikin gerakan kemerdekaan
dan gerakan untuk demokrasi tidak pernah berhenti, tetapi terus
madju dengan langkah² yang makin lama makin tegap.

Gerakan ber-kobar² bisa terdjadi dari dua djurusan, yang per-
tama ialah yang dari semula sudah bersifat nasional seperti sudah
terbukti dari gerakan dengan sembojan² „bebaskan Irian Barat”,
„laksanakan konsepsi Presiden Sukarno”, „dekritkan Undang²
Dasar '45”, „tjabut larangan kegiatan politik”, „batalkan Undang²
Penanaman Modal Asing” dsb. Yang kedua ialah dimulai sebagai
gerakan lokal, tetapi kemudian mendjadi nasional, seperti gerakan
„stop traktor maut”, gerakan „bebaskan Maesuri”, dsb. Gerakan
ber-kobar² ada djuga yang hanya meliputi selapangan kerdja, se-
perti umpamanja gerakan „batalkan UU Darurat Tedjasukmana”.
Pengalaman Rakjat Indonesia membuktikan, bahwa gerakan yang

ber-kobar² adalah sangat penting guna mengembangkan gerakan revolusioner. Hanja kaum reaksioner jang takut dan berusaha menghalangi adanja gerakan massa jang ber-kobar². Ini bukan soal baru. Bung Karno biasa menjebutnja massa-aksi. Hanja kaum kepalabatu jang anti massa-aksi. (*Tepuktangan lama*).

Tetapi hanja dengan gerakan ber-kobar² sadja tidak akan bawa hasil jang banjak. Sebab itu pekerdjaan jang mendalam dan teliti, pekerdjaan jang memetjahkan persoalan² praktis se-hari² daripada massa adalah perlu sekali. Umpamanja memekikkan „Ambilalih perusahaan Belanda!“ adalah tidak sukar, akan tetapi untuk melaksanakannja kita menghadapi soal² jang pelik. Untuk mengambilalih sebuah kapal KPM jang sedang berlajar ditengah laut banjak persoalan jang harus dipetjahkan, baik sebelum maupun sesudah pengambilalihan. Begitu djuga menjerukan „bebaskan Irian Barat!“ adalah gampang, tetapi untuk melaksanakannja banjak persoalan jang harus dipetjahkan dan dikerdjakan. Usaha untuk memetjahkan seribu-satu persoalan ini, itulah jang termasuk dalam pekerdjaan se-hari², pekerdjaan tekun, jang meliputi pekerdjaan organisasi, pendidikan, politik dan ideologi. Tanpa mengerdjakan pekerdjaan se-hari² ini dengan teliti dan telaten djangan diharap akan adanja aksi jang ber-kobar² jang berdisiplin. Hanja dengan mengerdjakan pekerdjaan tekun dengan baik maka gerakan jang ber-kobar² dapat membawa hasil seperti jang diharapkan.

Djadi pekerdjaan jang mendalam dan teliti adalah penting sekali dan dikerdjakan sebelum gerakan ber-kobar². Semua persoalan harus difikirkan setjara komplit dan baru kemudian sesudah diteliti dengan seksama Partai menentukan garis jang bisa melahirkan gerakan jang ber-kobar². Selandjutnja sesudah selesai gerakan ber-kobar² itu harus kembali bekerdja dikalangan massa setjara tekun untuk lebih mempertinggi kesedaran politik dan kesedaran organisasi daripada massa dengan menemukan segala kekurangan serta menarik peladjaran² baru dari gerakan ber-kobar² jang sudah berdjalan itu. Tetapi tidak selalu harus dimulai dengan pekerdjaan tekun, sebab kebalikannja bisa djuga terdjadi, jaitu dimulai dengan gerakan ber-kobar². Tetapi jang perlu jalah mengkombinasikan kedua pekerdjaan itu sehingga kita selalu „berdjalan dengan dua kaki“.

Kapan dapat dikatakan bahwa pekerdjaan massa daripada Partai itu sudah baik, bahwa gerakan ber-kobar² sebagai kelanjutan dari pekerdjaan tekun sudah membawa hasil jang diharapkan? Aksi jang berhasil dari sesuatu organisasi massa selamnja mengeratkan persatuan diantara anggotanja dan memperkokoh serta

memperluas organisasi basis dari organisasi massa itu. Sesuatu aksi dapat dikatakan berhasil djika membawa persatuan jang lebih erat dikalangan massa, bersamaan dengan itu berhasil mengkonsolidasi pengaruh Partai dan selandjutnja berhasil mempertinggi kwalitet tjarakerdja Partai dan mempertinggi tingkat ideologi aktivis² Partai. Djika tidak demikian, maka aksi itu tidak berhasil, dan aksi jang pasti tidak akan berhasil sudah semestinja tidak diadakan.

Pekerdjaan massa daripada Partai kita selama ini dapat berhasil, karena Partai mampu mengeluarkan seruan² politik jang sesuai dengan kehendak dan perasaan massa jang luas, seperti ketika Partai menjerukan pembasmian DI-TII dan „PRRI-Permesta“. Rakjat di-daerah² jang bersangkutan, bahkan diseluruh negeri bangkit serentak dan mendjadikan seruan itu sebagai seruannja sendiri jang akan dilaksanakannja sendiri. Begitu djuga sekarang dengan seruan jang tepat dari Partai mengenai tuntutan 6 : 4, jang sepenuhnya sesuai dengan kehendak dan perasaan buruhtani dan tanimiskin Indonesia, kita yakin bahwa ber-djuta² buruhtani dan tanimiskin diseluruh tanahair akan bangun dan mendjadikan tuntutan Partai itu mendjadi tuntutanja sendiri. (*Tepuktangan lama*).

Sampai sekarang pekerdjaan Partai dikalangan kaum tani masih tetap belum memuaskan. Hal ini tidak boleh dibiarkan. Anggota² Partai jang berasal dari kalangan tani, walaupun sudah banjak bertambah djika dibandingkan dengan ketika Kongres Nasional ke-V Partai, tetapi menurut perbandingan belumlah banjak. Kader-kader Partai umumnja belum mengerti benar tentang hubungan-hubungan agraria. Fungsionaris² Partai masih banjak jang menghindari pekerdjaan didesa. Semua kekurangan ini mesti diatasi dengan segala kekuatan.

Apa jang sekarang sudah mulai kita kerdjakan, seperti misalnja mengirim anggota pimpinan Partai jang penting ke-desa² untuk mengadakan penjelidikan tentang hubungan agraria dan penghidupan kaum tani untuk waktu jang agak lama, mengadakan seminar² dan konferensi² tentang hubungan agraria dan penghidupan kaum tani semuanya ini harus kita teruskan dengan lebih teratur dan lebih sungguh². Pekerdjaan mengkonsolidasi dan meluaskan organisasi tani revolusioner harus mendjadi pekerdjaan jang utama daripada Partai. Kita tetap berpegang teguh pada apa jang sudah¹ disimpulkan dalam Kongres Nasional ke-V, bahwa „tidak mungkin ada front nasional jang sungguh²“, dan bahwa „tidak mungkin kita berbitjara tentang peranan memimpin dari Partai Komunis dalam front ini selama Partai kita belum dapat mengeratkan organisasi dan memimpin massa kaum tani jang luas“.

Gerakan „turun kebawah” dengan mendjalankan „tiga sama” telah membikin lebih terang bagi kita tentang hubungan² agraria, tentang masih mendalamnja sisa² feodalisme di-desa². Pengetahuan-pengetahuan jang kita peroleh setjara langsung ini adalah djauh lebih berharga dan lebih berkesan daripada pengetahuan jang kita peroleh dari membatja ber-puluh² buku mengenai persoalan jang sama. Gerakan itu djuga telah membikin djelas, bahwa persoalan pokok dalam gerakan tani ialah masalah sandaran dan masalah pimpinan. Dalam keadaan jang bagaimanapun djuga kita harus selalu bersandar pada buruhtani dan tanimiskin, selandjutnja hanja dengan pimpinan kaum Komunis gerakan kaum tani bisa menjadi sekutu jang akrab dari klas buruh dalam melawan semua musuh Rakjat pekerdja.

Pekerdjaan mengkonsolidasi organisasi tani revolusioner tidak boleh dianggap sama seperti mengkonsolidasi serikatburuh. Menurut sifatnja organisasi serikatburuh selalu menghendaki pemusatan, sampai pada pemusatan setjara nasional dan pemusatan setjara internasional. Sebaliknya sasaran dari organisasi tani revolusioner terdapat ditiap desa jang masing² mempunjai kechususan-nja. Berhubung dengan itu tjara² pengorganisasian kaum buruh pabrik tidaklah dapat digunakan oleh organisasi tani, karena hal ini hanja akan membikin gerakan tani kaku dan sulit berkembang.

Pengalaman jang lain jang diperoleh dari gerakan „turun kebawah” itu ialah bahwa untuk bisa memobilisasi se-banyak²nja kaum tani diperlukan tidak hanja sebuah organisasi tani revolusioner dan sebuah organisasi koperasi, tetapi ber-puluh² matjam bentuk organisasi lain jang sesuai dengan keadaan penghidupan didesa dan dengan tingkat kebudajaan penduduk jang pada umumnya masih rendah. Semua bentuk perkumpulan, walaupun hanja untuk menghadapi sesuatu kedjadian atau keadaan tertentu, seperti kumpulan arisan atau kumpulan kematian, pendeknja semua usaha jang dapat mempersatukan kaum tani guna meringankan penderitaannja, harus didirikan dan didorong.

Selandjutnja memperbaiki pekerdjaan Partai dikalangan kaum tani tidak dapat dipisahkan dari pekerdjaan memperkuat ideologi Partai, sebab hanja dengan kebulatan ideologi bisa terdapat antusiasme jang penuh didalam melaksanakan politik agraria Partai. Seperti telah didjelaskan diatas, politik perubahan agraria dari Partai tidaklah dilaksanakan sekaligus, melainkan selangkah demi selangkah, dan pada tingkat sekarang ini Partai baru tampil dengan tuntutan „turun sewa” dan tuntutan „ketjil hasil” lainnja jang bersifat tuntutan bagian.

Pelaksanaan tiap tuntutan bagian memerlukan kebulatan tekad

didalam pimpinan organisasi tani revolusioner jang langsung memimpin gerakan itu, dan djuga menuntut kebulatan ideologi didalam Komite² Partai. Umpamanja untuk mensukseskan tuntutan setjara nasional 6 : 4 harus tidak ada kontradiksi antara kepentingan perseorangan dari anggota pimpinan organisasi tani revolusioner serta fungsionaris Partai jang bertugas dengan tudjuan dari gerakan itu. Dengan perkataan lain, tidak boleh terdapat ideologi tuantanah dalam pimpinan supaja gerakan bisa berkembang dan dipimpin setjara antusias.

Dalam melantjarkan gerakan² nasional jang berat harus senantiasa disesuaikan ideologi pimpinan dengan tudjuan gerakan, djika perlu dengan mendjalankan perubahan didalam pimpinan; kebulatan ideologi dalam pimpinan akan melahirkan aksi² jang antusias, dan sebaliknya aksi² jang demikian akan mengkonsolidasi pimpinan dan gerakan. Sudah barang tentu hal ini tidak boleh diartikan penggantian pimpinan terus-menerus pada tiap kali pelaksanaan sesuatu aksi, dan tidak seharusnya diartikan pemetjatan atau pengisolasian terhadap fungsionaris jang perlu digeser itu.

Konferensi Nasional Tani PKI jang dilangsungkan pada pertengahan April 1959 adalah sangat penting artinja dalam usaha memperbaiki pekerdjaan Partai dikalangan kaum tani. Dalam Konferensi itu antara lain disimpulkan bahwa :

Tugas terpenting revolusi Indonesia pada tingkat sekarang ialah menggulingkan kekuasaan musuh dari luar, jaitu imperialisme, dan menggulingkan kekuasaan tuantanah feodal dalam negeri. Tetapi dikatakan djuga dalam dokumen² Partai kita, bahwa jang primer ialah menggulingkan imperialisme. Djadi ada 2 musuh pokok, jaitu imperialisme dan feodalisme, tetapi musuh jang terpokok ialah imperialisme.

Dalam pelaksanaan garis umum ini, jaitu pelaksanaan dari dua tugas pokok ini, ada dua ketjenderungan terdapat dikalangan kader-kader Partai. Jang pertama ialah ketjenderungan mau melaksanakan dua tugas ini, se-olah² satu samalain tidak ada hubungan-nja. Sedangkan jang kedua ialah ketjenderungan jang mau membikin identik (sama) dua tugas ini sedjak permulaan. Kedua ketjenderungan ini harus kita lawan.

Dilihat dari sudut strategi atau dilihat dari tugas menjelesaikan Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja, dua tugas tersebut diatas sangat erat hubungannja dan tak terpisahkan satu dengan lainnja. Strategi kita atau penjelesaian Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja berarti menggulingkan kekuasaan imperialisme dan feodalisme.

Selandjutnja disimpulkan, bahwa :

Dilihat dari sudut taktik, dua tugas tsb. diatas, jaitu tugas menggulingkan kekuasaan imperialisme dan kekuasaan feodalisme tidak bisa dilakukan sekaligus. Dilihat dari sudut taktik pada waktu dan keadaan tertentu seperti sekarang ini, udjung tombak daripada revolusi per-tama² harus ditudjukan kepada musuh² asing (imperialisme) dan tuantanah² serta burdjuasi *jang mendjadi agen² musuh-musuh asing itu.* (Tepuktangan).

Tetapi dengan kesimpulan² diatas tidaklah berarti bahwa PKI sekarang tidak menggabungkan diri pada kaum tani dalam melawan kaum tuantanah. PKI tetap berdiri dibarisan paling depan sekarang dan dikemudian hari, dalam membela kepentingan kaum tani, dan tentang ini disimpulkan sbb.:

Berdasarkan garis umum tsb. diataslah, maka dalam program tuntutan PKI tidak ditjantumkan soal mensita milik tanah semua tuantanah. PKI hanya menuntut supaya milik tanah tuantanah² imperialis asing dan milik tanah tuantanah² bumiputera jang memihak DI-TII dan „PRRI-Permesta” disita dan dibagikan dengan tjuma² kepada kaum tani. (Tepuktangan. Seruan: „Betul!”). Ini adalah adil dan ini adalah keharusan djika kita mau mengalahkan sampai ke-akar²nja gerombolan² bandit DI-TII dan „PRRI-Permesta”, karena disamping dapat bantuan kaum imperialis, gerombolan² bandit ini mempunyai penjokong² dari kalangan tuantanah bumiputera.

Berdasarkan garis umum tsb. diatas, dalam program tuntutannya PKI hanya menuntut pengurangan sewatanah bagi penggarap. Djika sekarang pada umumnja pembagian hasil panen antara penggarap dan tuantanah diatur 5 : 5, maka sekarang PKI menuntut supaya pembagian diatur 6 : 4, artinja untuk penggarap minimum 6 bagian sedangkan untuk tuantanah maximum 4 bagian. Bahwa PKI tidak bermaksud mensita tanah² tuantanah jang tidak memihak imperialis, djelas sekali dari kesimpulan, bahwa tuantanah tidak akan mendapat kurang dari 25%, ketjuali jang selama ini memang sudah mendapat kurang dari 25%.

Kesimpulan penting lainnja jang diambil oleh Konferensi Nasional Tani jalah mengenai pembentukan Koperasi Rakjat pekerdja di-desa². Partai sudah bertekad bulat untuk mengibarkan *tiga bendera* koperasi, jaitu *koperasi kredit, koperasi produksi dan koperasi djual-beli*, guna melawan penindasan dan pemerasan serta untuk memperbaiki penghidupan Rakjat pekerdja didesa.

Djuga telah disimpulkan, bahwa lewat koperasi² produksi orang² Komunis harus mengusahakan sedapat mungkin supaya produksi pertanian meningkat dengan mengadakan 5 prinsip mengerdjakan tanah, jaitu : „*Luku dalam, tanam rapat, perbanjak rabuk, per-*

baiki bibit dan pengairan”. (Tepuktangan). Disamping 5 prinsip ini sudah tentu ada prinsip² lain jang harus dilaksanakan untuk mendjamin produksi pertanian jang lebih besar, misalnja „*siangi sawah, lawan hama, perbaiki alat pertanian, dsb.*”. Disementara daerah 5 prinsip andjuran Partai ini sudah disambut dengan gairah oleh kaum tani. Kaum tani pertjaja penuh akan maksud baik Partai dan karena itu menjambut dengan gembira Regu² Kerdjabakti Partai jang membantu kaum tani mengerdjakan tanahnja dalam rangka menjambut Kongres Nasional ke-VI Partai. Regu² Kerdjabakti ini harus kita bentuk se-banjak²nja, sebagai tanda bukti bahwa Partai kita memang ingin sungguh² bersatupadu dengan kaum tani dan sebagai alat pendorong perkembangan koperasi² produksi di-desa². (Tepuktangan).

Dengan sungguh² melaksanakan putusan² Konferensi Nasional Tani jang dilangsungkan pada pertengahan April 1959 Partai melaksanakan andjuran guru besar kita, Friedrich Engels, jang mengatakan bahwa „..... untuk memenangkan kekuasaan politik partai ini harus per-tama² pergi dari kota² kedesa, harus mendjadi satu kekuatan didesa”. (Tepuktangan). (Friedrich Engels dalam „Masalah Tani di Perantjis dan Djerman”). Karena Indonesia negeri kepulauan, maka „kedesa” harus djuga diartikan kepantai, untuk membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi berdjuta-djuta kaum nelayan jang pada umumnya senasib dengan kaum tani. Persiapan politik dan ideologi untuk kedesa dan kepantai sudah tjukup, sekarang langkah² jang tegap dan organisasi jang rapi harus menjusul segala persiapan jang sudah ada. Lumpur sawah menjuburkan padi dan PKI, para petani bersatu, berdjuang, menjanji dan menari. (Tepuktangan).

Terus-menerus memperbaiki pekerdjaan dikalangan kaum tani tidaklah berarti harus menterlantarkan pekerdjaan Partai dikalangan kaum buruh. Sebaliknya PKI harus terus-menerus memperkuat kedudukannya dikalangan kaum buruh dan menarik bagian jang terbesar daripada massa kaum buruh kefihaknja. Sudah ternjata bahwa pelaksanaan tuntutan² atas dasar prinsip „ketjil hasil” dan prinsip „keadilan, menguntungkan dan tahu batas” telah mempertinggi otoritet Partai dikalangan kaum buruh. Itu berarti bahwa bekerdja ber-kobar² dari Partai dikalangan kaum buruh sudah semakin baik, dan selandjutnja jang masih harus lebih diperbaiki jalah pekerdjaan jang tekun, mendalam dan teliti dikalangan massa kaum buruh jang meliputi pekerdjaan ideologi, pendidikan dan mempersatukan seluruh kaum buruh.

Berdasarkan pengalamannya kaum buruh Indonesia telah menjedari bahwa perdjuaannya untuk tuntutan² sosial-ekonomi

tidak mungkin dapat dipisahkan dari perjuangan politik, dan adalah perlu sekali untuk meluaskan kesedaran ini dalam rangka melawan sisa² penjakit „ekonomisme” dalam gerakan serikatburuh. Disamping itu setiap perjuangan politik serikatburuh, seperti politik menuntut terbentuknja Kabinet Gotongrojong, politik ambilalih perusahaan² Belanda, harus selalu disertai dengan perjuangan perbaikan nasib. Demikian djuga politik mengambilalih perkebunan-perkebunan Belanda oleh kaum buruh perkebunan tak dapat dipisahkan dari politik meluaskan transpor laut agar dapat mengangkut hasil² perkebunan itu.

Pekerdjaan di-basis² serikatburuh harus mendapat perhatian lebih besar. Ketidakstabilan ekonomi dinegeri kita sudah tentu membawa akibat yang buruk bagi penghidupan se-hari² daripada Rakjat; massa-onslah masih terus mengantjam kaum buruh; ditambah lagi dengan usaha² mengurangi hak² serikatburuh. Semuanya ini menimbulkan rasa gelisah dikalangan massa kaum buruh dan dapat mengakibatkan tindakan² putusasa atau tindakan² radikal²an djika tidak mendapat pimpinan yang tepat. Itulah sebabnja mengapa harus lebih banjak ditjurahkan perhatian untuk memperbaiki pekerdjaan di-basis².

Serikatburuh² Indonesia tidak seharusnya ragu² untuk memberikan pendidikan tentang Sosialisme kepada massa anggotanja, sebab tidak diragukan lagi bahwa massa kaum buruh Indonesia memandang Sosialisme sebagai satu²nja yang dapat mengachiri nasibnja yang tjelaka untuk se-lama²nja.

Harus ditjiptakan segala matjam usaha guna mempertahankan dan meluaskan demokrasi di-basis²; penempelan koran² progresif di-pabrik² tidak seharusnya hanja bersifat insidentil tetapi harus mendjadi aktivitet se-hari² dari serikatburuh². Semua kegiatan ini harus dipadukan dengan tuntutan² politik dan ekonomi dari kaum buruh dipabrik yang bersangkutan. Hanja dengan demikianlah serikatburuh² kita ber-angsur² mendjadi sekolahan bagi Komunisme.

Pada tahun² belakangan ini bersama dengan seluruh Rakjat kaum buruh Indonesia memusatkan aktivitetnja untuk turut ambil bagian dalam menghantjurkan pemberontakan² kontra-revolusioner diberbagai daerah. Selain itu kaum buruh Indonesia telah membuktikan ketangkasannja dalam melaksanakan politik ambilalih perusahaan² Belanda.

Kaum buruh Indonesia djuga telah membuktikan kemampuan untuk turut memetjahkan kesulitan² ekonomi negeri kita. Ketjuali semakin tjakap untuk membela nasibnja, djuga makin tinggi rasa tanggungjawab nasionalnja. Serikatburuh² mengadakan usul²

yang kongkrit dan praktis guna melantjarkan transpor, menjehtakan djawatan² dan mempertinggi produksi serta memperbaiki kwalitetnja. Dalam hubungan ini semakin djelas bahwa pekerdjaan kita dikalangan buruh transpor masih belum sesuai dengan tuntutan situasi yang dihadapi negeri dewasa ini. Begitu djuga masih harus diperbaiki pekerdjaan untuk mempersatukan pegawai² dan mendorong mereka supaya memiliki semangat Revolusi Agustus 1945, sehingga mereka menduduki tempat yang terhormat sebagai pegawai yang patriotik dan setia mengabdikan kepada kepentingan Rakjat dan kepentingan revolusi. Kaum buruh yang bagian terbesar sudah memihak Partai harus terus-menerus dididik dan ditingkatkan kesedaran politiknya oleh Partai.

Bekerdja dikalangan kaum buruh dan kaum tani tetap merupakan bentuk kegiatan yang terpenting dan pokok daripada PKI. Berhasil atau tidaknja pekerdjaan front nasional sangat tergantung pada berhasil atau tidaknja pekerdjaan dikalangan kaum buruh dan tani. Front nasional adalah front persatuan antara Rakjat pekerdja, jaitu klas buruh, kaum tani dan burdjuasi ketjil diluar kaum tani, dengan kaum penghisap, jaitu burdjuasi nasional. Tanpa adanja front persatuan yang kuat antara Rakjat pekerdja, terutama klas buruh dan kaum tani, tidak mungkin ada front persatuan nasional yang kuat dan konsekwen anti-imperialisme. Front nasional tanpa persekutuan buruh dan tani yang kuat adalah front nasional tanpa basis yang tahan udji.

Bekerdja dikalangan massa pemuda pada waktu sekarang adalah salahsatu pekerdjaan massa yang terpenting daripada Partai. Pemuda Rakjat dalam Kongres kelimanja, jaitu dalam bulan November tahun 1956 telah memutuskan bahwa organisasi pemuda ini senantiasa akan berusaha untuk mendjadi pembantu yang setia dan terpertjaja dari Partai dalam melaksanakan tugas-tugas politiknya. (*Tepuktangan*). Ini adalah kemenangan yang besar bagi Partai kita, dan Partai harus mendjaga supaya pernajaan kesediaan Pemuda Rakjat mendjadi pembantu Partai harus disertai dengan kesediaan dan kesanggupan seluruh Komite Partai memberi pimpinan dan pendidikan yang lebih baik kepada Pemuda Rakjat. Ini tidak berarti bahwa Partai membatasi diri hanja dengan bekerdja dikalangan Pemuda Rakjat. Partai harus mendorong madju seluruh gerakan pemuda dan menjadikannja pengabdian yang setia kepada Rakjat pekerdja, tanahair dan revolusi.

Sifat organisasi massa daripada Pemuda Rakjat harus senantiasa didjaga, tetapi bersamaan dengan itu Pemuda Rakjat adalah organisasi massa pemuda yang mempunjai kesedaran klas buruh, organisasi pemuda yang paling revolusioner, paling militan dan

paling patriotik. Sifat² yang baik ini hanya mungkin dimiliki oleh Pemuda Rakjat dibawah pimpinan Partai Komunis, dengan beladjar Marxisme-Leninisme dan dengan terus-menerus memperkuat kepertjajaan dan kesetiaannya pada Partai Komunis. Pendidikan teori dan politik revolusioner sudah menjadi soal yang urgen dalam Pemuda Rakjat yang sekarang beranggota lebihkurang 1 djuta orang. (*Tepuktangan*).

Untuk memperbaiki pekerdjaan Partai dikalangan intelektual, persoalan intelektual di Indonesia perlu mendapat penindjauan yang lebih mendalam. Proses kelahiran dan pertumbuhan dari kaum intelektual dinegeri kita tidak dapat dipisahkan dari perdjuaan melawan kolonialisme. (*Tepuktangan*). Seluruh „pendidikan” yang diberikan oleh kaum pendjadjah kepada kaum intelektual Indonesia ditudjukan untuk kepentingan exploitasinja dan oleh karena itu dibatasi hanya pada apa yang dibutuhkan oleh sistim pendjadjahan. Dengan demikian djumlah orang yang mendapat pendidikan menengah atau tinggi sangat terbatas dan pekerdjaan dalam lapangan mengembangkan ilmu oleh putera² Indonesia selalu dihalang-halangi. Oleh sebab itu, semendjak zaman pendjadjahan kaum intelektual Indonesia bersama Rakjat sudah bangkit untuk melawan penindasan dan penghinaan sehingga dengan demikian lahirlah suatu tipe kaum intelektual yang patriotik dan berdjiva anti-kolonialisme. (*Tepuktangan*). Sedjarah kebangkitan nasional bangsa Indonesia mentjatat puntjak² seperti lahirnja *Budi Utomo* pada tahun 1908, lahirnja *Sumpah Pemuda* pada tahun 1928 dan metelusnja Revolusi Rakjat pada 17 Agustus 1945. Ketiga peristiwa sedjarah ini djuga ditandai oleh aktivitet revolusioner dari kaum peladjar Indonesia. Bagian tertentu dari mereka tidak ragu² memihak Rakjat dan gerakan revolusioner.

Tjita² yang terkandung didalam Revolusi Agustus 1945 mempertemukan dan mempersatukan seluruh kekuatan yang hendak menumpas kolonialisme sampai ke-akar²nja. Tjita² revolusi itu mempersatukan kaum buruh dan tani dengan kaum intelektual serta sampai batas² tertentu mempertemukan ilmu dengan praktek revolusi Rakjat, sehingga dengan demikian mendekatkan ilmu pada Rakjat dan menanamkan semangat kerakjatan pada kaum intelektual Indonesia.

Tetapi sesudah revolusi Rakjat 1945 mengalami kegagalan dan kaum burdjuis Indonesia sudah terbukti tidak mampu memberikan djalan keluar dari kesulitan² yang dihadapi oleh Rakjat dan negeri kita, maka dikalangan kaum intelektual nampak gejala² pesimisme. Kedudukan burdjuasi Indonesia yang sangat lemah dilapangan ekonomi dan politik, yang memaksa mereka harus menyesuaikan diri

dengan sjarat² yang ditentukan oleh kaum imperialis, mendapatkan pentjerminannya pada ideologi dari sebagian kaum intelektual yang djuga menundjukkan sifat bimbang dan tidak konsekwen yang merugikan dunia keilmuan. Malahan djuga ideologi kaum kepalabatu mendapatkan pembela²nja dikalangan intelektual seperti Prof. Dr. Sumitro dan Prof. Drs. Tan Goan Po yang menjadi tokoh² kaum pemberontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta”. Demikian djuga usaha² dari segolongan kaum terpeladjar untuk menentang Konsepsi Presiden Sukarno dengan dalih² „ilmiah” dan penjelenggaraan diskusi² terbuka diantara kaum intelektual yang ditudjukan untuk mentorpedo pelaksanaan „gagasan kembali ke UUD '45”, tidaklah mempertinggi martabat kaum intelektual tersebut, melainkan sebaliknya, mendiskreditkan dan menjauhkan mereka dari Rakjat banjak. (*Tepuktangan*).

Disamping mensinjalir gejala² buruk yang ada, dengan rasa bangga Partai kita dapat berbitjara tentang kaum intelektual yang sudah mulai dilahirkan dan ditjiptakan oleh Rakjat pekerdja Indonesia yang berusaha melandjutkan tradisi kerakjatan dari kaum intelektual Indonesia.

Tetapi adalah satu kenjataan bahwa kemadjuan pekerdjaan Partai dikalangan kaum intelektual masih terlampau lambat dan tidak seimbang dengan kemadjuan² yang diperoleh di-lapangan² lain. Sebab itu para kader Partai dilingkungan kaum intelektual harus bekerdja lebih giat dan lebih baik dan harus berusaha supaya menjadi tjontoh dalam memperkaja dan mengembangkan ilmu untuk kepentingan Rakjat.

Partai bersama Rakjat akan tetap memberikan penghormatan yang tinggi kepada kaum intelektual yang berdjiva progresif, seperti Dr. A. Rivai, Dr. Tjiptomangunkusumo dan Dr. Ki Hadjar Dewantara, dan yang sekarang antara lain diwakili oleh Presiden Dr. Ir. Sukarno. (*Tepuktangan lama*). Partai harus selalu memberikan bantuan dan dorongan dalam mempersatukan kaum intelektual Indonesia dan dalam usahanja yang mulia untuk menumpas semua yang kolot dan lapuk serta memperkaja dan mempertinggi taraf ilmu dinegeri kita.

Para sardjana dan pekerdja² kebudayaan anggota Partai, disamping mempertinggi mutu pengertian Marxisme-Leninisme masing², mereka berkewadajiban memperluas dan memperdalam keahlian dan pengetahuannya untuk dapat membantu Partai dalam memberi djawaban yang se-baik²nja mengenai soal² yang timbul dilapangan ilmu dan kebudayaan atau mempersiapkan diri se-baik²nja agar dapat menjawab soal² apa saja yang dihadapi oleh negeri dan Rakjat. Para guru anggota Partai, disamping harus berusaha untuk

mendjadi Marxis yang baik, juga harus mendjadi pengadjar dan pendidik tipe baru, yang ahli dalam vaknja dan ditjintai oleh para murid dan orangtua² murid.

Partai harus meneruskan pekerdjaannya dikalangan kaum mahasiswa dan pemuda peladjar sekolah menengah. Sebagaimana juga massa pemuda, maka kaum mahasiswa dan peladjar sekolah menengah, ketjuali yang sudah mendjadi korban ratjun ideologi imperialis dan tuantanah, juga mempunyai semangat revolusioner dan tekad untuk mengabdikan kepada Rakjat pekerdja. Sukses² yang ditjapai oleh Partai dalam pekerdjaan dikalangan para mahasiswa dan peladjar sekolah menengah pada waktu² belakangan ini menunjukkan, bahwa dikalangan mahasiswa dan peladjar sekolah menengah Partai mempunyai banyak sahabat dan pentjinta. Pergeseran kekiri daripada seluruh kehidupan politik dinegeri kita telah mempengaruhi golongan² ini, telah membukakan mata mereka bahwa kaum sosialis kanan (PSI), Masjumi dan kaum reaksioner lainnya bukanlah sahabat Rakjat dan bukan pengabdikan kepentingan Indonesia. Dalam hubungan dengan ini adalah sangat penting, bahwa anggota² Partai yang mendjadi mahasiswa atau peladjar sekolah menengah dengan sungguh² mendjadi mahasiswa atau peladjar yang radjin dan baik.

Majoritet yang sangat terbesar dari massa wanita adalah yang paling tertindas hidupnya sebagai akibat daripada krisis ekonomi yang terus-menerus menjengkeram negeri kita. Mereka adalah korban pertama daripada meradjalelanja pengangguran, kemiskinan, keterbelakangan, ketidakadilan ekonomi dan sosial dinegeri kita. Baik setjara umum maupun didalam Partai sendiri, Partai memberikan perhatian khusus terhadap masalah wanita. (*Tepuktangan*).

Peristiwa penting telah terdjadi dalam kehidupan Partai kita dengan dilangsungkannya Konferensi Wanita Komunis, baik yang setjara regional maupun setjara nasional. Partai mendidik para wanita Komunis mendjadi wanita² yang inteleknya, kemauannya dan perasaannya berkembang se-luas²nja dan se-dalam²nja, agar mereka tidak hanya dapat membeberkan kekurangan² masyarakat sekarang, tetapi juga tahu menjinari semua problem perjuangan wanita untuk emansipasi dan untuk Indonesia Baru dan dunia baru dari semua segi, agar semua problem dapat dipetjahkan. Bersamaan dengan mengkonsolidasi dan meluaskan keanggotaan Partai dikalangan wanita, adalah kewajiban Partai kita untuk menggalang organisasi massa wanita revolusioner yang besar, yang anggotanya ber-djuta², sebagai sjarat yang penting untuk memperkuat

seluruh gerakan wanita dan gerakan massa pekerdja Indonesia pada umumnya.

Pekerdjaan khusus Partai untuk mengembangkan kebudayaan dan meningkatkan taraf kesedaran politik sukubangsa² merupakan pekerdjaan yang sangat penting berhubungan dinegeri kita terdapat banyak sukubangsa yang tidak sama besar dan tingkat kemadjuannya. Mengenai hal ini dalam program umum Partai sudah dijelaskan, bahwa kita menghendaki pemerintahan² daerah yang demokratis dan otonomi sukubangsa yang luas, sedangkan program tuntutan PKI menjetudjui otonomi daerah, artinja belum otonomi sukubangsa, asal untuk daerah² itu diadakan pemilihan² DPRD² dan Kepala² Daerah setjara demokratis dan dibentuk DPD² berdasarkan perwakilan berimbang. Dengan duduknja kaum Komunis dalam pemerintahan² daerah, bahkan disedjumliah daerah swatantra II Kepala Daerahnja orang Komunis dan majoritet mutlak anggota DPRD-nja terdiri dari orang² Komunis, pekerdjaan Partai dikalangan sukubangsa² dapat kemadjuannya². Berdasarkan pengalaman², djalan untuk memperbaiki pekerdjaan dikalangan sukubangsa ialah terutama dengan memperbaiki pekerdjaan Partai dikalangan kaum tani tiap² sukubangsa, karena kaum tani merupakan golongan terbesar dari penduduk tiap daerah. Ketjuali itu usaha Partai untuk mengembangkan kebudayaan sukubangsa perlu lebih dipergiat.

Selanjutnja mengenai pekerdjaan Partai dikalangan minoritet keturunan asing, seperti keturunan Arab, Tionghoa dan Eropa, perlu diperhatikan bahwa kaum soviniis selalu berusaha untuk mengobarkan rasa purbasangka rasial terhadap warganegara² keturunan asing dengan ber-matjam² dalih seperti „melindungi kepentingan ekonomi nasional“, „melindungi kaum yang lemah“ dll. Politik rasial yang berbahaja ini tadinja di-kobar²kan oleh „Gerakan Asaat“, jaitu gerakan yang dipimpin oleh Asaat, sekarang tokoh pemberontak „PRRI-Permesta“. Tapi sekarang nampaknja politik ini juga dianut oleh bagian² tertentu daripada golongan tengah, sehingga perhatian mereka tidaklah per-tama² ditujukan kepada musuh nasional kita yang pokok, jaitu imperialisme. Sebaliknya mereka menjari „musuh“ yang sebenarnya bukan musuh.

Partai berpendapat dan berkejakinan bahwa warganegara keturunan asing tidak berbeda dengan warganegara² lainnya dan mereka merupakan potensi yang berguna dalam membangun suatu Indonesia Baru yang demokratis. Partai harus senantiasa mendjelaskan kepada Rakjat bahwa musuh yang sebetulnja dari Rakjat Indonesia adalah imperialisme. Kita harus mengakui kenjataan, bahwa pekerdjaan Partai masih belum tjukup intensif dikalangan warganegara² keturunan asing, sedangkan mereka didalam meng-

hadapi serangan² rasial dan sovini itu sangat memerlukan bantuan. Bantuan yang dijudjur hanya dapat diberikan oleh Partai kita karena patriotisme dan internasionalisme proletarnya yang bebas dari segala bentuk soviniisme dan rasialisme. (*Tepuktangan*).

(7) Djadikan Koperasi Djuga Sendjata Ditangan Rakjat Pekerdja

Pekerdjaan yang selama ini sangat kurang mendapat perhatian Partai ialah pekerdjaan mengembangkan koperasi Rakjat pekerdja. Ini mudah dimengerti karena kader² Partai yang terbatas jumlahnya harus ditempatkan dalam organisasi² massa yang paling mendesak dan langsung untuk pembangunan Partai sendiri.

Kita akan tetap waspada dan menentang tiap² propaganda dari kaum reaksioner, yang mengatakan se-olah² dengan koperasi sadja kita dapat mengachiri kekuasaan imperialis, bahwa kalau koperasi sudah besar dan luas, ekonomi imperialis „dengan sendirinya” akan tidak berdaja lagi. Ini adalah propaganda agen² imperialis yang bermaksud membius Rakjat Indonesia supaya tidur pulas dengan rajuan lagu koperasi, agar Rakjat Indonesia tidak mengorganisasi dan memobilisasi diri untuk setjara revolusioner mengachiri kekuasaan imperialis dan tuantanah. Kita djuga akan terus menentang penggunaan nama „koperasi” oleh perusahaan² kapitalis dengan maksud untuk menghindari kewadajiban² sebagai perusahaan kapitalis dan untuk menipu Rakjat.

Tetapi, adalah keliru djika kaum Komunis tidak dengan sungguh-sungguh memakai djalan koperasi untuk mempersatukan Rakjat pekerdja, untuk mengurangi penghisapan² tuantanah, lintahdarat dan kapitalis atas diri Rakjat pekerdja, dan untuk meningkatkan hasil produksinya.

Sembojan² „tanah untuk kaum tani”, „pembagian tanah kepada kaum tani” dan „milik perseorangan tani atas tanah”. serta tuntutan² seperti „turunkan setoran dan bunga uang”, „naikkan upah buruh tani”, dll. adalah sembojan² dan tuntutan² yang tepat. Sembojan² dan tuntutan² ini dapat mempersatukan seluruh kaum tani berkerumun disekeliling Partai. Kaum buruhtani dan tanimiskin menjambut hangat sembojan² dan tuntutan² ini, sedangkan kaum tanisedang dapat menjokongnya.

Tetapi djangan kita lupakan, bahwa tanisedang dan tanimiskin yang mempunyai sedikit tanah, menginginkan agar mereka dapat lepas dari tjengkeraman tukangidjon dan lintahdarat sekarang djuga, agar mereka dapat pasar yang baik bagi hasil pertaniannya, dapat membeli barang² kebutuhan mereka dengan harga yang pan-

tas, dan bahwa mereka djuga ingin supaya produksi pertaniannya meningkat. Untuk ini tidak ada djalan lain ketjuali kaum tanisedang dan tanimiskin harus diorganisasi didalam koperasi² yang dapat memberikan kredit, dapat mengusahakan pasar yang baik bagi barang² produksi mereka, dapat membeli barang² konsumsi dengan harga yang pantas dan dapat membantu mempertinggi produksi pertanian, peternakan dan perikanan. *Kaum tanimiskin dan tanisedang yang hanya mungkin mentjapai kebebasanja dengan pimpinan proletariat, akan lebih tebal kepertjajaannya kepada proletariat, djika Partai proletariat dapat mengorganisasi dan memimpin mereka dalam koperasi² untuk meringankan beban mereka sekarang djuga.*

Koperasi tidak hanya dapat didjadikan sendjata kaum tani, tetapi djuga dapat didjadikan sendjata Rakjat pekerdja lainnya. Kaum keradjinan tangan dan kaum nelajan memerlukan organisasi koperasi agar mereka dengan teratur dan dengan harga yang pantas mendapatkan bahan² dan alat² untuk bekerdja, dan agar hasil pekerdjaan mereka tidak djatuh ketangan tengkulak sehingga harganya sangat murah. Kaum buruh, para pegawai dan kaum miskin-kota djuga membutuhkan koperasi agar dapat memenuhi kebutuhan² mereka akan barang² konsumsi dengan harga yang pantas. Kaum pedagang ketjil djuga dapat dikoperasikan agar mereka dapat mengurangi penghisapan kaum kapitalis besar dan lintahdarat. Ja, kaum peladjar sekolah menengah dan mahasiswa dapat menggunakan koperasi untuk mengatasi kesulitan²nya akan rumah pondokan, akan buku, menggunakan masa libur setjara baik, rekreasi, dan sebagainya.

Undang² Koperasi yang sudah ada sekarang dapat dipakai untuk memadjukan gerakan koperasi asal dipimpin oleh orang² yang djudjur. Untuk suksesnya, gerakan koperasi harus merupakan gerakan yang berdiri sendiri, mempunyai Peraturan Dasar yang demokratis dan dapat mempersatukan sebanyak mungkin koperator² setjara sukarela. Kesukarelaan adalah sjarat mutlak daripada koperasi. Selain daripada itu, sifat berdiri sendiri dan sifat non-politik daripada koperasi harus didjaga dengan keras.

Dalam membangun koperasi djanganlah kita lupa akan satu kenyataan, jaitu bahwa Rakjat pekerdja Indonesia sudah sedjak lama diketjewakan oleh koperasi² karena dipimpin oleh orang² yang tidak djudjur dan tidak tjakap, oleh orang² yang mendirikan koperasi untuk dengan sendajaja menipu Rakjat. Kaum Komunis harus memberikan bukti, bahwa ada perbedaan besar antara koperasi² yang dipimpin oleh kaum Komunis dengan yang dipimpin oleh burdjuasi. Komite² Partai harus mengawasi dengan teliti dan

keras anggota² Partai jang memimpin koperasi, dan tepat pada waktunya mengkritik mereka atau menarik mereka dari koperasi djika ternyata mereka berbuat merugikan kepentingan Rakjat pekerdja jang tergabung dalam koperasi jang dipimpinnja. Elemen² jang militan dan tidak mementingkan diri sendiri, jaitu elemen pemuda harus banjak ditarik dalam kegiatan koperasi, sebagai pembantu² jang setia daripada koperasi. (*Tepuktangan*).

**

Kawan²!

Partai kita yakin, bahwa dengan memperkuat dan memperluas gerakan massa, dengan memperkuat dan memperluas demokrasi dan dengan memperkuat, memperluas dan memperbaharui Partai, PKI akan mentjapai hasil² jang lebih besar dalam mengubahimbangan kekuatan antara kaum imperialis, klas tuantanah dan burdjuasi komprador disatu fihak, dan kekuatan Rakjat difihak lain. Ini berarti bahwa kita mentjari djaln keluar dari keadaan negeri kita jang belum merdeka penuh dan setengah feodal sekarang.

Kawan², marilah kita tetap bersatu untuk dengan segenap kekuatan jang ada pada kita masing² membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa, untuk melaksanakan tuntutan² mendasak dari Rakjat dan Partai kita, jaitu peluasan hak² demokrasi dan pembentukan Pemerintah jang memenuhi rasa keadilan Rakjat, pembentukan Kabinet Gotongrojong seperti jang dimaksudkan oleh Konsepsi Presiden Sukarno. (*Tepuktangan lama*). Ini berarti kita mendekatkan Rakjat Indonesia kepada pelaksanaan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja, kepada Indonesia jang bebas dari semua imperialisme dan bebas dari feodalisme, jaitu Indonesia Baru jang merdeka penuh dan demokratis. Ini berarti kita memperkuat front internasional anti-kolonial dan tjinta damai. (*Tepuktangan lama*).

Kawan²!

Segera sesudah Kongres ini selesai kita akan berangkat kemedan perjuangan jang membentang dari Sabang sampai ke Merauke, dimana lebih dari 1,5 djuta Komunis dengan hati berdebar-debar menanti-nantikan hasil² Kongres jang bersedjarah ini, dimana lebih dari 88 djuta Rakjat Indonesia makin memerlukan adanya pengabdian jang tulus dari kaum Komunis, dimana seribusatu masalah besar dan ketjil jang pelik menunggu pemetjahan jang tepat. Menghadapi semuanya itu, kawan², asal sadja kita senantiasa menggunakan Marxisme-Leninisme jang djaja sebagai pedoman

aksi² kita, asal sadja kita selalu kreatif melaksanakan hasil² Kongres ini, akan dapat kita atasi dan dengan PKI didepan Rakjat Indonesia pasti akan dapat merebut kemenangannya satu demi satu. (*Tepuktangan*).

Hidup Rakjat Indonesia dan Partai Komunis Indonesia! (*Tepuktangan. Pekik : „Hidup!“*).

Hidup persatuan nasional dan Republik Indonesia! (*Tepuktangan. Seruan : „Hidup!“*).

Hidup Partai² Komunis dan Partai² Buruh diseluruh dunia, Partai² Lenin jang mendjadi inspirator dan organisator Rakjat pekerdja untuk dunia baru, dunia damai dan Sosialisme! (*Tepuktangan lama sekali. Semua berdiri dan berseru : „Hidup PKI! Hidup Kawan Aidit!“*).



PIDATO PENGANTAR UNTUK RENTJANA PERUBAHAN KONSTITUSI PARTAI

Disampaikan oleh Kawan M.H. LUKMAN, Wakil Sekretaris
Djenderal I CC PKI, pada tanggal 9 September 1959

Kawan²,

Sudah hampir lima setengah tahun sedjak Partai kita mengadakan Kongres Nasional Ke-V pada bulan Maret 1954. Selama masa itu Partai kita dibawah pimpinan Komite Central yang diketuai oleh Kawan Aidit telah mengalami perubahan² besar. (*Tepuktangan*). Djumlah keanggotaan Partai telah meningkat dari 165.206 menjadi lebih dari 1.500.000. (*Tepuktangan lama, teriakan: „Hidup!”*). Begitu juga djumlah organisasi Partai telah meluas dan merata keseluruh tanahair. Pengaruh politiknya juga telah meningkat dengan tjepat, sehingga baik kawan maupun lawan tidak sedikit yang merasa kagum. (*Tepuktangan*). Antara lain sebagai bukti daripada meningkatnya pengaruh politik yang setjara mengedjutkan itu ialah hasil yang telah ditjapai oleh Partai kita dalam pemilihan umum. Djika dalam pemilihan untuk Parlemen dan Konstituante pada tahun 1955 Partai kita memperoleh suara seluruhnya masing² lebih dari 6 djuta, maka dua tahun kemudian, dalam pemilihan untuk DPRD² pada tahun 1957, yang sampai sekarang belum dilakukan diseluruh daerah, Partai kita telah memperoleh suara seluruhnya kuranglebih 8 djuta. (*Tepuktangan lama*). Ini berarti bahwa djika pemilihan untuk DPRD itu dilakukan diseluruh daerah, maka suara yang bisa ditjapai oleh Partai kita pasti lebih dari 8 djuta.

Kawan²,

Gambaran yang lengkap mengenai perubahan yang dialami oleh Partai kita selama masa antara Kongres Nasional Ke-V dan Ke-VI, terutama yang mengenai kedudukan Partai kita dalam gelanggang politik nasional Indonesia, telah diuraikan dalam Laporan Umum CC yang diberikan oleh Kawan Aidit.

Tetapi apakah yang menjebabkan Partai kita boleh dikatakan telah bisa maju melompat dalam segala lapangan?

Ada memang faktor² objektif dalam dan luarnegeri yang menguntungkan Partai kita, dalam arti membantu Partai kita dalam

mentjapai kemadjuan². Faktor² dalam negeri yang membantu kemadjuan Partai kita ialah semangat revolusioner yang tinggi dikalangan massa Rakjat yang terutama telah ditjapkan oleh Revolusi Agustus '45; dan kegagalan Revolusi Agustus itu sendiri bukan saja tidak mematahkan semangat, tetapi malahan merupakan bahan pembangkit kesedaran politik dan semangat revolusioner dikalangan massa Rakjat. (*Tepuktangan*). Dengan faktor luarnegeri dimaksudkan kemadjuan² yang ditjapai oleh kekuatan² Sosialisme, kekuatan² anti-kolonialisme dan tjinta-damai. Kemadjuan² dilapangan ekonomi, teknik dan kebudayaan yang ditjapai oleh negeri² kubu Sosialis semakin njata menunjukkan keunggulan² sistim Sosialisme atas kapitalisme. (*Tepuktangan*). Bukti yang hidup daripada keunggulan sistim Sosialisme atas kapitalisme mempunyai daya-tarik yang sangat kuat bagi kaum buruh, kaum tani dan kaum intelektual disemua negeri. Hal ini berarti sangat membantu dalam membangkitkan dan meningkatkan kesedaran politik daripada massa Rakjat umumnya dan membikin mereka lebih menaruh harapan dan keper-tjajaan kepada Sosialisme, kepada Partai Komunis. (*Tepuktangan*). Tidak perlu diterangkan lagi bahwa faktor dalam dan luarnegeri ini timbal-balik saling mempengaruhi.

Tetapi disamping faktor² objektif ini, ada faktor lain lagi yang bersifat menentukan juga bagi kemadjuan melompat yang ditjapai oleh Partai kita, jaitu faktor intern Partai, faktor yang lahir dari dalam tubuh PKI sendiri. Yang dimaksudkan dengan faktor intern ini ialah adanya program politik dan program organisasi yang benar, atau biasa djuga disebut adanya garis politik dan garis organisasi yang benar daripada Partai.

Dalam bentuk apakah setjara pokok²nja program politik dan organisasi itu dirumuskan? Tidak lain ialah dalam bentuk Konstitusi Partai.

Djadi, dengan perkataan lain dan setjara singkat dapat djuga dikatakan bahwa kemadjuan melompat daripada Partai kita pada pokoknya adalah djuga sebagai hasil daripada pelaksanaan Konstitusi Partai.

Kawan²,

Partai kita memang baru mempunyai Konstitusi yang agak sempurna mulai tahun 1951. Berhubung dengan kegagalan rentjana Kongres pada tahun 1948, karena didahului oleh Provokasi Madiun, maka Konstitusi Partai tahun 1947 yang kurang memenuhi syarat sebagai Konstitusi daripada Partai Marxis-Leninis terpaksa masih berlaku sampai akhir tahun 1950. Baru pada permulaan tahun 1951 Komite Central yang disusun baru dibawah pimpinan Kawan Aidit membuat Konstitusi Sementara untuk menggantikan

Konstitusi tahun 1947.

Dengan Konstitusi Sementara inilah kita berhasil membangun Partai, meskipun begitu kita mulai, begitu kita mengalami keadaan setengah dibawah tanah selama lebihkurang satu tahun, yaitu dengan mengamuknya Razia Agustus Sukiman. Dengan berpedoman pada program politik dan program organisasi yang dirumuskan pokok²nja dalam Konstitusi Sementara itu, kita telah berhasil mengubah kedudukan Partai kita dari Partai yang ketjil dan terisolasi menjadi Partai yang agak besar dan mulai mampu menggalang front persatuan nasional. Keanggotaan Partai kita yang pada permulaan tahun 1952 hanya berdjumlah 7.910 dapat kita perluas menjadi 126.671 pada akhir tahun itu (*tepuktangan*) dan menjadi 165.206 ketika Kongres Nasional Ke-V pada bulan Maret 1954. (*Tepuktangan*). Sedjalan dengan bertambah besarnya kekuatan organisasi Partai, bertambah besar pula kemampuan Partai kita untuk memberikan pukulan² kepada kekuatan² reaksi dan untuk menarik kekuatan tengah kedalam front persatuan nasional. Demikianlah seterusnya perkembangan Partai kita dan perkembangan front persatuan nasional itu timbal-balik saling mempengaruhi. Dan dengan kekuatan front persatuan nasional inilah kita dapat memberikan pukulan² yang lebih keras lagi satu demi satu kepada kekuatan² pendukung utama daripada kaum imperialis dan tuantanah di Indonesia yaitu Masjumi-PSI, dimulai dengan pukulan yang mengakibatkan jatuhnya Pemerintah Sukiman. (*Tepuktangan*).

Hasil² dari pembangunan Partai berdasarkan Konstitusi Sementara Partai tahun 1951 inilah yang menjadi syarat menentukan bagi berhasilnya Kongres Nasional Ke-V Partai pada bulan Maret 1954.

Dalam Kongres Nasional Ke-V itu Konstitusi Sementara Partai, sesudah mengalami perbaikan², disahkan sebagai Konstitusi tetap.

Dengan sedikit pendjelasan diatas ini dapatlah disimpulkan, bahwa kemajuan melompat yang ditjapai oleh Partai kita selama ini merupakan bukti daripada kebenaran dan tepatnya garis politik yang ditetapkan oleh Kongres Nasional Ke-V dan kebenaran serta tepatnya pimpinan politik yang dijalankan oleh Komite Central Partai kita sesudah Kongres Nasional Ke-V. Djuga kemajuan melompat itu merupakan bukti daripada kebenaran dan tepatnya garis organisasi yang ditetapkan oleh Kongres Nasional Ke-V dan kebenaran serta tepatnya pimpinan organisasi yang dijalankan oleh Komite Central Partai kita sesudah Kongres Nasional Ke-V. (Tepuktangan).

Kebenaran garis politik memanglah harus sejalan dengan ke-

benaran garis organisasi. Partai tidak akan bisa maju dan berkembang djika hanya salahsatu saja yang benar dan tepat.

Sebelum Konstitusi Partai tahun 1947 diganti, kelemahan dan kesalahan yang fundamental dan karena itu sangat besar membawa kerugian kepada Partai kita, ialah kelemahan dan kesalahan dilapangan organisasi. Dengan Konstitusi Partai tahun 1947 memang tidak mungkin dijalankan garis organisasi dan pimpinan organisasi yang benar dan tepat. Konstitusi Partai tahun 1947 bukan saja sangat kurang sempurna, tetapi djuga malahan memuat fasal² yang samasekali tidak sesuai dengan prinsip² organisasi Partai Komunis. Untuk menjabutkan satu tjontoh saja misalnja : dalam bab keanggotaan ada dimuat fasal mengenai apa yang disebut anggota istimewa yang terdiri dari organisasi massa. Sedangkan kesalahan pimpinan organisasi yang fundamental pada waktu itu, yang telah mengakibatkan Partai sebagai organisasi samasekali tidak merupakan kekuatan yang berarti, ialah terutama terletak pada pembentukan organisasi² Partai yang memakai nama Partai Sosialis dan Partai Buruh disamping mempertahankan organisasi PKI yang dibawah tanah. *Kesalahan ini sumbernja terletak pada kesalahan pimpinan organisasi yang setjara sukarela menempatkan diri pada kedudukan illegal atau semi-illegal. Ini berarti setjara sukarela membatasi aktivitet dan menjempitkan lapangan bergerak daripada Partai.* Sudah dengan sendirinja bahwa sebagai akibatnja yang wadjar ialah Partai tidak bisa menjadi besar dan kuat. Adalah satu prinsip organisasi Partai Komunis bahwa ia tidak boleh *setjara sukarela* bekerdja illegal atau semi-illegal.

Kesalahan dilapangan organisasi ini pada waktu itu tidak menonjol dimata umum, karena ia tidak difahami oleh umum dan djuga oleh kebanyakan anggota Partai sendiri. Kesalahan fundamental yang menonjol pada waktu itu ialah kesalahan dilapangan politik, yaitu kesalahan mengenai persetudjuan Linggardjati dan Renville. Padahal sebenarnya kesalahan Partai kita yang djuga fundamental pada waktu itu ialah kesalahan dilapangan organisasi. Kesalahan dalam pimpinan organisasi yang telah mengakibatkan Partai sebagai organisasi samasekali tidak merupakan kekuatan yang berarti, sesungguhnya djuga merupakan salahsatu sumber daripada politik kompromi Linggardjati dan Renville. Sikap yang sedjak semula telah mem-besar²kan kekuatan Belanda dan imperialisme lainnja, dan mengetjilkan kekuatan Revolusi Indonesia dengan sekutu²nja, yaitu kekuatan² anti-imperialis, ditambah dengan kesalahan dalam pimpinan organisasi yang menjabutkan ketjilnja kekuatan Partai telah lebih mendorong kedjurusan politik kompromi itu. Itulah sebabnja Partai kita pada waktu itu tidak

sadja dikatakan telah membuat kesalahan karena melepaskan atau kehilangan kebebasan dilapangan politik, tetapi djuga karena melepaskan atau kehilangan kebebasan dilapangan organisasi. Malahan Kawan Musso pada waktu itu suka mengatakan bahwa kesalahan politik Linggardjati dan Renville tidak akan berakibat begitu djauh, djika kita tidak membikin kesalahan dilapangan organisasi jang begitu berat dan prinsipiil. Oleh karena itu djelaslah, bukan suatu kebetulan bahwa koreksi dilapangan organisasi djustru mendjadi bab jang pertama didalam Resolusi „Djalan Baru”. Kesalahan dilapangan organisasi pada waktu itu pada pokoknja ialah tidak menempatkan PKI pada kedudukan jang semestinja sebagai Partai klas buruh dan pelopor revolusi, dan oleh Kawan Musso biasa djuga dikatakan „menempatkan Partai dibawah latji”.

Kawan²,

Dengan sedikit mengingatkan kembali kepada kesalahan Parlemb lebih djelas lagi dapat kita fahami bahwa Konstitusi Partai jang disahkan oleh Kongres Nasional Ke-V sungguh² merupakan partai dilapangan organisasi selama tahun² Revolusi Agustus '45 seperti jang dikemukakan didalam „Djalan Baru” maka mendjadi laksanaan jang sempurna daripada koreksi „Djalan Baru” dilapangan organisasi.

Sekarang didalam Kongres ini kita djuga akan membitjarakan perubahan² daripada Konstitusi Partai kita jang telah ditetapkan oleh Kongres Ke-V itu. Apakah ini tidak berarti bahwa didalam Konstitusi itu masih terdapat kekurangan² dan kesalahan²?

Pada umumnja garis dan prinsip² organisasi serta peraturan² jang ditetapkan didalam Konstitusi jang disahkan oleh Kongres Ke-V telah diperkuat kebenarannya oleh pengalaman pekerdjaan praktek dilapangan organisasi selama ini. Djadi, adanja usul² perubahan sekarang ini samasekali tidaklah mengenai prinsip²nja jang telah ditetapkan oleh Kongres jang lalu. Disatu fihak usul² perubahan itu lebih bersifat penjempurnaan dan memperdjelas pengertian daripada perumusan² garis dan prinsip² organisasi serta peraturan² jang pada umumnja sudah benar; difihak lain usul² perubahan itu merupakan pengembangan jang wadjar daripada prinsip² organisasi jang telah ditetapkan didalam Konstitusi berdasarkan pengalaman jang didapat dari pekerdjaan praktek selama ini.

Dibawah ini saja akan memberikan pendjelasan mengenai alasan² daripada beberapa usul perubahan dan pendjelasan² lainnya mengenai beberapa bagian daripada Konstitusi jang meskipun tidak mengalami perubahan tetapi menurut pengalaman ternyata masih

kurang tjukup djelas difahami atau masih memerlukan penekanan² didalam pelaksanaannya.

I

PREAMBUL KONSTITUSI

Kawan²,

Konstitusi Partai kita terdiri dari dua bagian pokok, jaitu Program Umum Konstitusi dan fasal² peraturan Konstitusi. Dua bagian ini merupakan suatu kesatuan. Seorang anggota jang menjetudjui Konstitusi Partai berarti bukan sadja menjetudjui fasal² peraturan Partai jang dimuat didalam Konstitusi, tetapi djuga menjetudjui Program Umumnja sebagai dasar dan pedoman untuk aktivitetnja. Program Umum Konstitusi adalah program politik dan program organisasi jang terpokok daripada Partai, sedangkan fasal² peraturan Konstitusi adalah ketentuan² pokok jang mengatur kehidupan intern daripada Partai.

Dalam Rentjana Perubahan Konstitusi¹ sekarang ini, dengan samasekali tidak merubah maksud dan isi pokoknja, kita merubah penamaan Program Umum Konstitusi mendjadi Preamble Konstitusi. Dengan Program Umum Konstitusi sebenarnya djuga dimaksudkan tidak kurang dan tidak lebih sebagai preamble Konstitusi. Djadi dalam hal ini kita hanya mengganti nama Program Umum mendjadi Preamble. Maksud penggantian nama ini hanjalah sekedar supaja tidak terdjadi kekeliruan lagi diwaktu kita menjebutkan Program Umum Konstitusi dengan Program Partai, jang merupakan dokumen Partai tersendiri dan jang biasa djuga dikatakan terdiri dari dua bagian pokok, jaitu Program Umum dan Program Tuntutan.

Preamble Konstitusi sekarang ini adalah sama seperti Program Umum Konstitusi jang lama, jaitu ia djuga tetap berisi program politik dan program organisasi jang terpokok daripada Partai. Itulah sebabnja kita katakan bahwa dengan merubah nama Program Umum mendjadi Preamble kita samasekali tidak merubah maksudnja. Djuga mengenai isi pokoknja kita tidak mengadakan perubahan samasekali. Ia tetap seperti semula berisi keterangan singkat tentang sifat dan teori daripada Partai, tentang watak, tenaga² penggerak, tugas² dan tjiri² jang menonjol daripada revolusi Indonesia, tentang politik pokok daripada Partai dan sjarat² jang harus dimiliki oleh Partai, tentang kritik-selfkritik didalam Partai, tentang garis massa dan tentang prinsip² organisasi daripada Partai.

Kawan²,

Mengenai teori daripada Partai, didalam Preambul kita mengadakan perubahan² perumusan. Misalnja, kita sekarang mengatakan bahwa „Seluruh pekerdjaan PKI didasarkan atas teori Marxisme-Leninisme”. Kita hanya menjebutkan teori Marxisme-Leninisme dan tidak menjebutkan nama² murid yang besar dari Marx, Engels dan Lenin, yang telah mengembangkan Marxisme-Leninisme itu sendiri, seperti Kawan Stalin dan Kawan Mau Tje-tung. Djuga kita tidak mentjantumkan „Koreksi Besar Musso”. Dengan perubahan ini samasekali tidak berarti bahwa perumusan yang dulu itu adalah salah. Karena memang banjak adjaran² Kawan Stalin dan Kawan Mau Tje-tung yang pada waktu itu kita djadikan dasar untuk perdjuaan memperbaharui Partai kita. Djuga pada waktu itu kita sedang berdjuaan untuk sepenuhnya melaksanakan Koreksi Besar Musso.

Sekarang ini tidak akan salah djika kita mengatakan bahwa „Koreksi Besar Musso” yang dirumuskan didalam Resolusi „Djalan Baru” sudah sepenuhnya kita laksanakan. Oleh karena itu sudah tidak terasa kepentingannya untuk mentjantumkannya didalam Preambul.

Mengenai adjaran² Kawan Stalin dan Kawan Mau Tje-tung, kita bisa mengatakan bahwa kebenaran² umum yang terkandung didalamnya, yang berlaku untuk Indonesia, djuga sudah termasuk dalam kebenaran² umum Marxisme-Leninisme. Perumusan dalam Preambul sekarang mengatakan bahwa „Karena Marxisme-Leninisme bukanlah suatu dogma melainkan suatu pedoman untuk aksi, maka dalam aktivitetnya PKI berpegang kepada prinsip memadukan kebenaran² umum Marxisme-Leninisme dengan praktek yang njata daripada perdjuaan revolusioner Indonesia”. Dengan perumusan ini bukan sadja adjaran² Kawan Stalin dan Kawan Mau Tje-tung sudah tertjakup didalamnya, tetapi djuga sekaligus mengingatkan kita supaya djangan sampai kita mendjadi dogmatis.

Mengenai bahaya² yang harus kita lawan, Preambul sekarang memasukkan djuga bahaya revisionisme, baik yang lama maupun yang modern. Ini adalah penting. Sebab berdjuaan melawan revisionisme modern sekarang ini berarti berdjuaan untuk solidaritet dan kesatuan gerakan Komunis sedunia. Sebagaimana kita ketahui, bahaya revisionisme modern terletak dalam rolnja merusak solidaritet dan memetjahbelah persatuan gerakan Komunis sedunia seperti yang dilakukan oleh pemimpin² Liga Komunis Jugoslavia. Dalam ideologi, revisionisme itu baik yang lama maupun yang modern, adalah sama sadja dengan reformisme dan sosial demokrasi.

Kemudian mengenai pandangan-dunia yang kita tentang, peru-

musan dalam Preambul sekarang menjatakan bahwa PKI menentang pandangan-dunia idealisme dan metafisika. Dengan perubahan perumusan ini kita bermaksud menundjukkan lawan yang langsung daripada pandangan-dunia materialisme dialektik. Sebab lawan yang langsung daripada materialisme ialah idealisme dan lawan yang langsung daripada dialektika ialah metafisika.

PKI menentang pandangan-dunia idealisme, sebab orang yang berpandangan-dunia idealis dalam tjara menerangkan atau memahami sesuatu menganggap kedjiwaan (spirituil) lebih utama daripada kebendaan. Dalam praktek hidup se-hari² orang yang berpandangan-dunia idealis tidak mau melihat dan tidak mau mentjari setiap kebenaran didalam kenyataan. Sebaliknya, kita yang berpandangan-dunia materialis, samasekali bukannya mengabaikan sesuatu yang bersifat kedjiwaan, seperti yang selalu difitnahkan terhadap kita oleh kaum reaksioner, melainkan kita menganggap kebendaanlah yang lebih utama daripada kedjiwaan. Dalam praktek hidup se-hari², sebagai kebalikan dari kaum idealis, kita kaum materialis selalu menundjukkan dan mentjari setiap kebenaran didalam kenyataan.

PKI djuga menentang metafisika atau tjara berfikir metafisik, sebab orang yang berfikir setjara metafisik memandang sesuatu setjara terpisah dari keadaan njatannya dan setjara terpisah dari perubahan dan perkembangannya. Orang yang berfikir setjara metafisik memandang sesuatu setjara terpisah satu dari yang lainnya, mengabaikan saling hubungannya, memandang sesuatu seakan² tetap dan beku, mengabaikan perubahan dan perkembangannya. Sebaliknya, kita yang berfikir setjara dialektik, memandang sesuatu selalu didalam gerak dan saling hubungannya yang njata dan bertudjuan menjelidiki perubahan² dan saling hubungannya yang njata didunia.

Dengan penegasan bahwa pandangan-dunia PKI ialah materialisme dialektik dan materialisme histori Marxis-Leninis, berarti bahwa yang kita maksudkan dengan materialisme ialah materialisme Marxis-Leninis, dengan dialektika ialah dialektika Marxis-Leninis, dan dengan materialisme histori ialah prinsip² metode dialektik dan filsafat materialisme Marxis-Leninis yang diluaskan dalam mempeladjar kehidupan masyarakat dan sedjarah masyarakat. Sebab memang ada matjam² materialisme yang bukan Marxis-Leninis, antara lain materialisme yang tidak dialektik, ialah materialisme mekanik, dan ada djuga dialektika yang bukan Marxis-Leninis, ialah dialektikannya Hegel yang tidak materialis.

Setiap anggota dan tjalonanggota Partai harus memiliki atau beladjar untuk memiliki pandangan-dunia materialisme dialektik.

Ini berarti memiliki atau belajar untuk memiliki pandangan-dunia materialisme dan tjara berfikir dialektik. Pandangan-dunia materialisme dialektik sama djuga artinja dengan filsafat materialisme dialektik. Sebab itu dengan perkataan pandangan-dunia dimaksudkan djuga filsafat.

Tetapi bisakah anggota Partai kita yang kebanyakannya terdiri dari kaum buruh dan kaum tani mempunyai filsafat atau belajar filsafat? Bukankah filsafat itu suatu ilmu yang sangat sukar dan hanya bisa dimiliki dan dipelajari oleh orang² yang terpeladjar sadja?

Memang untuk menjusun dan merumuskan sesuatu pandangan filsafat setjara pasti dan sistematik tidaklah mudah. Pekerdjaan ini hanya dilakukan oleh ahli² filsafat. Tetapi hal ini samasekali tidak berarti bahwa filsafat itu tidak bisa dimiliki atau tidak bisa difahami oleh massa Rakjat. Sebab filsafat jalah tidak lain daripada pandangan kita yang paling umum mengenai sifat dunia dan tempat kita didalamnya, jaitu pandangan-dunia kita. Oleh karena itu, sesungguhnya setiap orang mempunyai sesuatu matjam filsafat, sekalipun mereka tidak pernah mempeladjarinja. Dan setiap orang tentu dipengaruhi oleh pandangan² filsafat meskipun mereka tidak merasa telah memikirkannya dan tidak bisa merumuskannya. Misalnya, pendapat seseorang bahwa soal kaya dan miskin didunia ini adalah soal takdir, dan bahwa setiap penderitaan atau kenikmatan yang kita alami adalah takdir dan pertjobaan yang harus sama² kita terima dengan perasaan sjukur, (*tawa*) ini adalah suatu pandangan filsafat.

Penjusunan dan perumusan pandangan² filsafat adalah hasil pekerdjaan dari ahli² filsafat. Tetapi isi dari pandangan² itu sendiri tidak boleh tidak mempunyai dasar sosialnja dalam fikiran² yang mentjerminkan aktivitas masyarakat dan hubungan² masyarakat. Karena masyarakat itu terbagi didalam klas², maka setiap pandangan filsafat adalah djuga pandangan klas.

Pandangan-dunia atau filsafat materialisme dialektik dan materialisme histori Marxis-Leninis adalah pandangan-dunia atau filsafat klas buruh. Ia bisa membantu Rakjat untuk bisa mengerti sifat dunia dan tempat manusia didalamnya, sehingga bisa merubah dunia dan merubah masyarakat, mengembangkan kekuasaan manusia atas alam dan membebaskan manusia dari penindasan dan tachajul.

Oleh karena itu djelaslah, bahwa mendjadi kewadajiban Partai untuk mendidik semua anggota supaja dengan sadar bisa memiliki dan menggunakan pandangan-dunia atau filsafat Marxis-Leninis. Hanya dengan djalan demikian filsafat Marxis-Leninis akan bisa

diluaskan mendjadi milik massa Rakjat dan mendjadi sendjata didalam perjuangannya melawan klas² penghisap. Tidak menggunakan filsafat, didalam kenjataanja berarti setjara tidak kritis menerima dan menggunakan filsafat klas penghisap. (*Tawa*).

Untuk membentuk pandangan materialis dikalangan anggota Partai, kita harus mendjalankan pendidikan yang berisi bimbingan kepada para anggota untuk mentjari setiap kebenaran didalam kenjataan. Ambillah sebagai tjontoh tentang peristiwa² kebakaran yang banjak terdjadi di Djakarta achir² ini. Untuk menemukan kebenaran mengenai sebab² kebakaran² itu, kita harus mentjarinja pada hal² yang njata. Kita harus menundjukkan kenjataan bahwa kebakaran² itu selalu terdjadi djustru di-perkampungan² Rakjat dimana rumah² Rakjat itu lebih banjak merupakan gubug² yang berdempet² dan dibikin dari bahan² yang gampang dimakan api pada musim panas. Sebaliknya, didaerah Menteng, dimana tinggal orang² besar dalam gedung² yang besar dengan pekarangan² yang luas, disana tidak pernah terdjadi kebakaran.

Kawan²,

Mengenai bagian yang menerangkan watak, tenaga² penggerak, tugas² dan tjiri² yang menonjol daripada revolusi Indonesia, Preambul sekarang hanya mengalami sedikit perbaikan redaksionil disana-sini.

Untuk memahami bagian ini setjara lebih djelas, membuatja brosur Kawan Aidit mengenai soal² pokok revolusi Indonesia („Masjarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia“) adalah sangat membantu. Tetapi berhubungan dengan berbagai pertanyaan yang timbul ketika mendiskusikan rentjana perubahan Konstitusi ini, maka dirasa perlu untuk memberikan sedikit pendjelasan mengenai bagian ini.

Didalam Preambul sekarang dipakai dua istilah mengenai kedudukan Indonesia, jaitu „belum merdeka penuh“ dan „setengah-djadjahan“. Kita memakai dua istilah ini dalam arti kata yang sama. Karena kenjataan bahwa sebagian wilayah Indonesia, jaitu Irian Barat masih didjadjah sepenuhnya oleh imperialisme Belanda, sedangkan ekonomi dibagian wilayah yang sudah berada dibawah kekuasaan Republik Indonesia bukan sadja untuk sebagian besarnya masih dikuasai oleh kaum imperialis tetapi djuga sangat bergantung kepada ekonomi negeri² imperialis karena keterbelakangannya, maka setjara politik, ketjuali di Irian Barat, kita bisa mengatakan bahwa sudah ada kemerdekaan politik, tetapi setjara ekonomi, Indonesia masih didjadjah oleh kaum imperialis asing. Seandainya seluruh wilayah Indonesia sudah berada dibawah kekuasaan Republik Indonesia, tetapi ekonomi Indonesia masih di-

kuasai atau sangat bergantung kepada negeri² imperialis, dalam keadaan yang demikianpun Indonesia belum bisa dikatakan telah merdeka penuh. Sebab kekuasaan politik tidaklah mungkin dipisahkan dari kekuasaan ekonomi, malahan kekuasaan ekonomi itulah yang djustru mendjadi dasar daripada kekuasaan politik. Oleh karena itu tidak mungkin sesuatu negeri bisa berkuasa penuh dilapangan politik, djika ekonomi negeri itu masih dikuasai atau sangat bergantung kepada negeri² lain, negeri² imperialis. Dengan demikian djelaslah, bahwa sesuatu negeri yang belum merdeka dilapangan ekonomi berarti djuga belum merdeka penuh dilapangan politik. Itulah sebabnja, sebagaimana diuraikan didalam laporan umum Kawan Aidit, kita bisa menjimpulkan bahwa, meskipun setjara politik Indonesia sudah bisa dikatakan merdeka, tetapi karena ekonominja masih kolonial, maka pada hakekatnja ia masih djuga merupakan setengah-djadjahan.

Tetapi meskipun perkataan „belum merdeka penuh” dan perkataan „setengah-djadjahan” pada hakekatnja mengandung isi yang sama, orang biasanja mendengar kedua perkataan itu dengan perasaan yang berlainan. Supaja bisa didjalankan kebidjaksanaan didalam menggunakan kedua matjam istilah yang maksudnja sama itu, maka didalam Preambul kita pakai ke-dua² istilah itu.

Untuk bisa mengerti siapa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan sekutu revolusi Indonesia, kita lebih dulu harus mengerti dengan djelas hakekat daripada revolusi Indonesia. Didalam Preambul diterangkan bahwa revolusi Indonesia dalam tingkat sekarang adalah revolusi burdjuis-demokratis tipe baru, atau revolusi Demokrasi Rakjat, jaitu revolusi daripada massa Rakjat yang luas, yang dipimpin oleh proletariat. Ini berarti bahwa meskipun pada dasarnya revolusi Indonesia pada tingkat sekarang berwatak burdjuis-demokratis, tetapi tudjuannja bukan lagi terbentuknja masjarakat kapitalis dan negara dibawah diktatur burdjuis, melainkan masjarakat Sosialis melalui sistim kekuasaan diktatur bersama dari semua klas yang revolusioner, jaitu kekuasaan Demokrasi Rakjat. Oleh karena itu sudah dengan sendirinja bahwa tugas dan tanggungjawab yang ditentukan oleh sedjarah untuk memimpin revolusi Indonesia supaja bisa mentjapai tudjuannja yang objektif, tidak bisa lain ketjuali djatuh diatas pundak klas buruh. Bedanja dengan revolusi burdjuis-demokratis tipe lama ialah dalam tudjuan objektifnja, jaitu revolusi burdjuis-demokratis tipe lama bertudjuan mentjiptakan masjarakat kapitalis dan negara diktatur burdjuis. Karena itu, pimpinan revolusi burdjuis-demokratis tipe lama tidak boleh tidak mesti ada ditangan klas burdjuis.

Tetapi faktor² apakah yang menentukan bahwa revolusi Indo-

nesia pada tingkat sekarang mesti berwatak burdjuis-demokratis tipe baru?

Kawan²,

Didalam Preambul diterangkan bahwa faktor² yang menentukan watak burdjuis-demokratis tipe baru daripada revolusi Indonesia ialah: Indonesia yang belum merdeka penuh dan masih setengah-feodal, tenaga penggerak revolusi Indonesia adalah klas buruh, kaum tani, klas burdjuis ketjil dan elemen² demokratis lainnja yang dirugikan oleh imperialisme, di Indonesia sudah ada Partai Komunis yang makin lama bertambah kuat dan berpengaruh, dan keadaan² internasional sekarang. Faktor² ini saling menentukan satu sama lain, sehingga semuanya itu sebenarnja merupakan kesatuan yang tak terpisahkan.

Indonesia yang masih belum merdeka penuh, atau masih setengah-djadjahan dan masih setengah-feodal, berarti bahwa ekonomi kapitalis di Indonesia masih terbelakang dan sebagian besar ekonominja adalah ekonomi pertanian yang masih terbelakang dan setengah-feodal. Pada pokoknja, ekonomi Indonesia masih bersifat kolonial, ekonomi impor-expor dan sangat bergantung kepada pasaran luarnegeri. Suatu negeri yang bukan sadsja ekonomi kapitalisnja belum madju, tetapi malahan sebagian besar ekonominja masih ekonomi pertanian yang setengah-feodal, tidak akan bisa langsung melahirkan revolusi Sosialis. Revolusi dinegeri sematjam ini pada pokoknja tidak bisa lain ketjuali merupakan revolusi agraria, jaitu revolusinja kaum tani untuk mendapatkan tanah garapan. *Revolusi yang pada pokoknja tidak menghapuskan tetapi malahan akan memberikan hakmilik perseorangan atas alat² produksi, jaitu memberikan tanah sebagai hakmilik perseorangan kepada kaum tani, sudah terang bukanlah revolusi Sosialis, melainkan revolusi burdjuis-demokratis.* Itulah sebabnja revolusi di-negeri² djadjan biasa djuga dinamakan revolusi agraria, jaitu revolusinja kaum tani.

Tetapi revolusi Indonesia, meskipun berwatak burdjuis-demokratis, karena zamannja, ia tidak bisa lagi berwatak burdjuis-demokratis tipe lama, jaitu tidak bisa sepenuhnya berwatak burdjuis. Revolusi burdjuis-demokratis tipe lama hanja terdjadi pada zaman mulai berkembangnja kapitalisme. Tetapi revolusi Indonesia terdjadi djustru pada zaman imperialisme, zaman revolusi proletar dunia, dan malahan pada zaman dimana sudah berdiri negeri² Sosialis, dimana Sosialisme sudah mendjadi sistim dunia. Dilihat dari sudut zamannja sadsja, karena revolusi Indonesia langsung memukul dan melemahkan imperialisme dunia, maka ia mendjadi bagian daripada revolusi proletar dunia. Mau atau tidak mau revolusi

Indonesia berarti tambahan kekuatan bagi negeri² Sosialis yang sudah ada dan bagi gerakan kelas buruh sedunia. Ini berarti bahwa mau atau tidak mau revolusi Indonesia adalah sekutu daripada negeri² kubu Sosialis dan gerakan kelas buruh sedunia. (*Tepuktangan*). Sebaliknya, negeri² kubu Sosialis dan gerakan kelas buruh sedunia, karena mereka itu telah dan akan terus semakin melemahkan kekuatan imperialisme yang justru menjadi musuh utama daripada revolusi Indonesia, maka mereka itu, diakui atau tidak, merupakan kekuatan bagi revolusi Indonesia. Dan kenyataannya memang tidak bisa disangkal, bahwa negeri² kubu Sosialis dan gerakan kelas buruh sedunia telah dan masih terus memberikan bantuan kekuatan kepada revolusi Indonesia. (*Tepuktangan*). Oleh karena itu, diakui atau tidak, negeri² kubu Sosialis dan gerakan kelas buruh sedunia adalah sekutu yang tepertjaja daripada revolusi Indonesia. (*Tepuktangan, teriakan : „Betul !”*).

Dilihat dari sudut kedudukan kelas buruh Indonesia sendiri, memang suatu kenyataan yang harus kita terima, bahwa kelas buruh Indonesia adalah ketjil djumlahnya jika dibandingkan dengan kaum tani, usianya sebagai kelas buruh masih muda jika dibandingkan dengan kelas buruh di Eropa dan tingkat kebudayaannya masih rendah jika dibandingkan dengan kelas burdjuis. Tetapi berkat perjuangannya sendiri yang ulet dan dibawa oleh kemajuan gerakan kelas buruh sedunia, terutama oleh gerakan kelas buruh yang sudah mentjapai kemenangan dengan mendirikan negeri² Sosialis, yang telah dipelopori oleh gerakan kelas buruh Rusia dengan terdjadinja Revolusi Sosialis Oktober Besar tahun 1917, kelas buruh Indonesia telah bisa mentjapai tingkatan kesadaran politik dan organisasi yang memungkinkannya untuk berdiri sendiri sebagai kekuatan kelas. Ini dibuktikan oleh adanya Partai kita, Partai Komunis Indonesia.

Dengan adanya Partai Komunis Indonesia, yakni Partai kelas buruh Indonesia, berartilah bahwa kelas buruh dan Rakjat pekerdja Indonesia lainnya sudah mempunyai pimpinan politiknya sendiri, dan tidak perlu mengikuti pimpinan politik kelas burdjuis. Djuga didalam revolusi, kelas buruh yang sudah sadar akan klasnya dan sudah mempunyai pimpinan politiknya sendiri, sudah tentu tidak akan menjerahkan pimpinan revolusi kepada kelas burdjuis. (*Tepuktangan*).

Dengan demikian djelaslah, adanya Partai Komunis Indonesia, apalagi Partai Komunis yang makin lama bertambah kuat dan berpengaruh, merupakan salahsatu faktor yang menentukan bahwa revolusi Indonesia tidak bisa lagi berwatak burdjuis-demokratis tipe lama, melainkan berwatak burdjuis-demokratis tipe baru se-

bagai suatu bentuk peralihan kerevolusi Sosialis. (*Tepuktangan*).

Karena revolusi Indonesia adalah revolusi Demokrasi Rakjat yang akan berdjalan terus dan meningkat kerevolusi Sosialis, maka tenaga² penggeraknya tidak bisa lain ketjuali kelas² yang bisa menerima Sosialisme. Diluar kelas buruh hanyalah kaum tani dan kelas burdjuis ketjil lainnya (diluar kaum tani) yang bisa menerima Sosialisme. Kaum buruh, kaum tani dan kelas burdjuis ketjil bisa menerima Sosialisme karena mereka pada pokoknya bukanlah kelas² yang menghisap, melainkan Rakjat (kelas²) pekerdja dan dalam banjak hal dihisap oleh kelas tuantanah dan kelas kapitalis.

Kelas burdjuis nasional, meskipun nasional, adalah tetap kelas penghisap. Karena itu ia tidak bisa menerima Sosialisme, terutama sebelum kekuatan revolusi tjukup besar. Karena itu pula kelas burdjuis nasional bukanlah tenaga penggerak revolusi Demokrasi Rakjat. Kelas burdjuis nasional memang dalam periode² tertentu dan sampai batas² tertentu bisa ambil bagian didalam revolusi melawan imperialisme, dan dengan demikian menjadi kekuatan revolusioner. Tetapi pada waktu dan keadaan² tertentu yang lain ia bisa meninggalkan revolusi dan berfihak kepada kelas burdjuis komprador.

Dari sini djelaslah, bahwa yang dimaksudkan didalam Preambul dengan „elemen² demokratis lainnya yang dirugikan oleh imperialisme” sebagai tenaga penggerak revolusi Indonesia, bukanlah kelas burdjuis nasional, melainkan *orang² atau golongan* dari kelas lain diluar kelas buruh, kaum tani dan kelas burdjuis ketjil yang dengan lebih konsekwen mengambil bagian didalam revolusi. Djadi bisa djuga orang² atau golongan dari kelas burdjuis nasional.

Djika sudah djelas bahwa tenaga penggerak pokok daripada revolusi Indonesia adalah kelas buruh, kaum tani dan kelas burdjuis ketjil, yang dengan demikian bisa djuga diartikan bahwa revolusi Indonesia adalah revolusinya kelas buruh, kaum tani dan kelas burdjuis ketjil, maka djelas pula siapa² atau kelas² mana sadja yang bisa dimasukkan sebagai sekutu daripada revolusi Indonesia. Didalam negeri yang bisa dimasukkan sebagai sekutu daripada revolusi ialah kelas dan elemen² diluar kelas buruh, kaum tani dan burdjuis ketjil, yang bisa turut mengambil bagian didalam revolusi, seperti kelas burdjuis nasional. Diluar negeri, ialah semua kekuatan yang bisa membantu memperkuat revolusi Indonesia setjara langsung ataupun tidak langsung, seperti kelas buruh internasional, negeri² Sosialis, Rakjat dan bangsa² yang terdjadjah di Asia, Afrika dan Amerika Latin, dsb.

Kawan²,

Mengenai tjiri yang menondjol daripada revolusi Indonesia,

didalam Preambul diterangkan bahwa revolusi Indonesia berkembang setjara tidak sama, memakan waktu lama dan bersifat pelik. Faktor² yang menjebabkannya ialah pertama, Indonesia yang belum merdeka penuh dan masih setengah-feodal, yang berarti masih besarnya kekuatan musuh. Kedua, Indonesia adalah negeri kepulauan yang luas, yang banyak penduduknya tetapi tidak merata dan terdiri dari banyak sukubangsa serta tidak sama kemadjuannya, yang semuanya ini mengandung arti sukarnya perhubungan, dan ber-beda²nja tingkat kesedaran serta pengalaman gerakan Rakjat dari berbagai sukubangsa diberbagai daerah dan kepulauan. Semuanya ini sampai batas² tertentu berarti tambahan kekuatan bagi musuh.

Djadi, meskipun Rakjat Indonesia, terutama kaum buruh dan kaum tani, mempunyai tradisi revolusioner, tetapi djalan revolusi yang harus ditempuhnya menghadapi rintangan² yang besar. Itulah sebabnja didalam Preambul diterangkan, bahwa untuk bisa memimpin revolusi yang memakan waktu lama dan bersifat pelik itu, kita harus memiliki sifat² yang berupa kesabaran revolusioner dan keuletan yang didasarkan pada keyakinan teori yang dalam dan pada watak yang teguh untuk melawan ketjenderungan kapitulasi dan avonturisme.

Kawan²,

Dalam menghubungkan lahirnja Partai kita sebagai pewaris dan penerus perdjuaan yang heroik dan revolusioner daripada Rakjat Indonesia dengan bukti² perdjuaan Rakjat yang heroik itu, Preambul Konstitusi kita sekarang mentjantumkan lebih banyak lagi peperangan² dan pemberontakan² yang bersedjarah melawan kolonialisme Belanda dan pendudukan militerisme Djepang. Hal ini adalah penting, karena ia menundjukkan bahwa Partai kita ditiap daerah semakin mengenal sukubangsa² didaerahnja, semakin mengenal sedjarah perdjuaan didaerahnja masing², semakin mengenal pahlawan²nja, yang kesemuanya ini akan membikin Partai kita menjadi lebih dirasakan wadjarnya sebagai pewaris dan penerus tradisi yang heroik dan revolusioner dari Rakjat setjara regional maupun nasional.

Mengenai Revolusi Agustus 1945, didalam Preambul ditundjukkan bahwa ia merupakan salahsatu tonggak sedjarah perdjuaan Rakjat Indonesia yang terpenting, karena ia merupakan puntjak daripada perdjuaan heroik yang memberikan tradisi revolusioner yang paling luas dan mendalam kepada seluruh Rakjat Indonesia. Meskipun kaum Komunis pada waktu itu mengambil bagian yang sangat aktif, baik dalam waktu persiapan untuk Proklamasi maupun dalam mendjalankan setiap bagian daripada roda revolusi

sampai kepada pertempuran difront yang terdepan, tetapi Revolusi Agustus 1945 telah mengalami kegagalan. Sebagai sebabnja yang terpokok, disamping pengchianatan burdjuasi komprador yang telah menimbulkan Provokasi Madiun dan selanjutnja mengadakan persetudjuan KMB, ialah karena massa tani yang ber-djuta² tidak dibangkitkan dan ditarik kedalam revolusi.

Apakah yang dimaksudkan dengan massa tani yang ber-djuta² tidak dibangkitkan dan ditarik kedalam revolusi?

Didalam Preambul ada diterangkan mengenai kelemahan klas buruh Indonesia didalam Revolusi Agustus 1945, ialah bahwa klas buruh pada waktu itu kurang sadar akan rolnja sebagai pemimpin revolusi. Hal ini membawa akibat bahwa PKI sebagai Partai klas buruh pada waktu itu telah kehilangan kebebasannya dalam lapangan organisasi dan politik. Karena kelemahan ini, maka Partai kita pada waktu itu belum bisa mengemukakan program agraria yang revolusioner dan tepat untuk dilaksanakan setjara sadar dalam perdjuaan se-hari². Padahal revolusi Indonesia pada hakekatnja adalah revolusinja kaum tani untuk melepaskan diri mereka dari belenggu penindasan dan penghisapan sisa² feodalisme.

Djadi teranglah, bahwa yang dimaksudkan dengan massa tani yang ber-djuta² tidak dibangkitkan dan ditarik kedalam revolusi, ialah tidak diadjukannya program agraria yang revolusioner dan dilaksanakannya setjara sadar program agraria sematjam itu dalam perdjuaan se-hari² oleh Partai kita.

Kawan²,

Berhubung telah dapat diatasinja kerusakan² Partai sebagai akibat kesalahan² diwaktu yang lampau dan sebagai akibat Provokasi Madiun, maka dalam Preambul sekarang tidak ditjantumkan lagi soal menjembuhkan luka² Partai yang ditimbulkan oleh kesalahan² yang lampau dan oleh Provokasi Madiun itu.

Dalam hubungan dengan masalah penggalangan front persatuan nasional, didalam Preambul sekarang ada diterangkan, bahwa PKI memperdjuaan pelaksanaan politik hak sama bagi semua sukubangsa dengan tidak memandang perbedaan besar atau ketjil, dan madju atau terbelakangnja dan pelaksanaan hak sama bagi semua warganegara dengan tidak memandang asal keturunan dan kepertjajaan agamanya. Dengan keterangan ini kita bermaksud memberikan pengertian, bahwa dalam melakukan pekerdjaan front persatuan nasional, disamping dan terutama harus dilihat dari sudut klas² yang bisa dipersatukan karena memang mempunyai dasar persamaan kepentingan untuk bersatu, kita djuga harus selalu ingat akan adanya dua faktor lain yang sangat penting, jaitu faktor sukubangsa dan minoritet keturunan asing, serta faktor agama.

Karena Rakjat Indonesia terdiri dari banjak sukubangsa dan minoritet keturunan asing, dan karena adanja pengaruh agama, terutama agama Islam, dikalangan massa Rakjat, maka djika kita tidak menetapkan sikap politik jang tepat mengenai sukubangsa dan minoritet keturunan asing serta mengenai agama, pekerdjaan front persatuan dari Partai kita akan menghadapi lebih banjak kesulitan dan rintangan, bahkan bisa mengalami kegagalan.

Kawan²,

Dalam Preambul sekarang dimasukkan keterangan mengenai kemungkinan peralihan ke Sosialisme setjara damai. Ini mempunjai arti jang penting baik setjara teori maupun setjara praktis.

Para pembela dan propagandis imperialis, termasuk pemimpin² Masjumi-PSI jang setjara terbuka atau tertutup, langsung atau tidak langsung, turut mengambil bagian atau membantu pemberontakan dan teror buas „PRRI-Permesta” dan DI-TII, selalu memfitnah kita kaum Komunis dengan menggambarkan se-akan² kaum Komunis itu terdiri dari orang² jang haus darah, jang selalu dan dimana sadja menghendaki kekerasan dalam mentjapai tujuannja.

Djelaslah, dari sudut ini sadja, jaitu dari sudut pekerdjaan praktis se-hari² dalam menghadapi propaganda fitnahan kaum reaksioner jang terusmenerus mentjoba menakut-nakuti massa Rakjat dengan momok jang mengerikan tentang djalan kekerasan, kita bisa merasakan pentingnja untuk mengemukakan tentang kemungkinan peralihan ke Sosialisme dengan djalan damai. Dengan ketegasan bahwa kita berdjuaug dengan sekuat tenaga untuk mendjadikan kemungkinan itu suatu kenjataan, kita sekaligus dapat menundjukkan bahwa djika terdjadi djuga kekerasan, maka hal itu, sebagaimana selalu dibuktikan, tidak dimulai atau tidak datang dari fihak kaum Komunis dan samasekali bukan jang dikehendaki oleh kaum Komunis. (*Tepuktangan*).

Setjara teori, mengemukakan soal kemungkinan peralihan ke Sosialisme dengan djalan damai berarti mengemukakan kebenaran bahwa Marxisme-Leninisme memang tidak menundjukkan djalan jang mutlak sama menudju Sosialisme bagi semua negeri dalam masa jang berbeda-beda dan dalam keadaan internasional jang ber-beda² pula. Ini berarti djuga bahwa kita kaum Marxis-Leninis tidak mengikat diri pada soal² bentuk, pada metode² dan tjara² melaksanakan revolusi, karena segala sesuatunja bergantung pada perimbangan kekuatan² klas jang kongkrit, pada tingkat organisasi klas buruh dan lawannja, pada ketjakapan klas buruh untuk menarik sekutu² kefihaknja, terutama kaum tani, dan dengan mem-

perhitungkan lembaga² demokrasi, kebiasaan² dan tradisi masing² negeri.

Pada zamannja, Marx pernah mengemukakan, bahwa ada negeri² seperti Amerika dan Inggris dimana kaum buruh dapat mentjapai tudjuan mereka dengan djalan damai. Marx membikin perketjualian ini dengan memperhitungkan lembaga², kebiasaan² dan tradisi² dari negeri² jang bersangkutan. Tetapi Lenin dalam tahun 1917 menulis bahwa dalam keadaan² baru dari kapitalis monopoli, karena pertumbuhan aparat polisi-birokratis di Inggris dan Amerika Serikat, maka perketjualian jang dinjatakan oleh Marx itu tidak berlaku lagi. Dalam pada itu Lenin selalu menekankan bahwa klas buruh sudah tentu lebih suka mengambil kekuasaan kedalam tangannja setjara damai. Djuga Lenin pernah meramalkan, bahwa disebuah negeri burdjuis jang ketjil peralihan ke Sosialisme mungkin berlangsung setjara damai djika ada negeri² tetangga jang Sosialis. Ini menundjukkan bahwa bukan sadja perimbangan kekuatan² klas dinegeri jang bersangkutan, tetapi djuga adanja Sosialisme jang menang di-negeri² tetangga mempengaruhi atau turut menentukan djalannja peralihan ke Sosialisme dinegeri itu. Ini berarti djuga bahwa dalam menindjau masalah djalan² revolusi didalam periode sekarang, kita harus berpedoman pada perhitungan jang tepat mengenai perimbangan kekuatan² klas di-masing² negeri dan perimbangan kekuatan² klas jang meliputi seluruh dunia. Sesuai dengan adjaran² Marx dan Lenin inilah, jaitu dengan memperhitungkan keadaan² objektif dalam perimbangan kekuatan dunia diantara kekuatan² Sosialisme dan demokrasi disatu fihak, dan kekuatan² imperialisme difihak lain, dan berdasarkan pengalaman negeri² Eropa Timur jang peralihannja ke Sosialisme tidak semuanja melalui peperangan didalamnegeri, Kawan Chrusjov didalam Kongres ke-XX PKUS mengemukakan satu kesimpulan bahwa dalam keadaan² sekarang negeri² tertentu mempunjai kemungkinan jang njata untuk beralih ke Sosialisme setjara damai.

Bagi kita di Indonesia, djika kita berbitjara tentang kemungkinan peralihan ke Sosialisme setjara damai, maka jang dimaksudkan ialah kemungkinan ditjapainja kekuasaan Demokrasi Rakjat setjara damai. Sebab, djika sistim Demokrasi Rakjat, sebagai suatu bentuk peralihan ke Sosialisme, bisa ditjapai dengan djalan damai, maka hal ini berarti djuga suatu kemungkinan diteruskannja pengembangan sistim Demokrasi Rakjat itu ke Sosialisme dengan djalan damai.

Tetapi apakah kemungkinan ditjapainja kekuasaan Demokrasi Rakjat dinegeri kita setjara damai merupakan suatu kemungkinan jang kongkrit?

Didalam Preambul diterangkan bahwa PKI dengan sekuat tenaga berdjuaug untuk mendjadikan kemungkinan ini suatu kenjataan. Dan djika bergantung kepada PKI, djalan damai, djalan parlementerlah jang dipilih. Ini berarti bahwa selama ada kebebasan² demokratis bagi Rakjat dan ada parlemen, PKI akan berdjuaug untuk mendapatkan majoritet jang stabil didalam parlemen dengan dukungan aksi² massa, sehingga bisa mendjamin bahwa parlemen sungguh² mendjadi alat kemauan Rakjat terbanjak untuk mengadakan perubahan² jang fundamental dilapangan ekonomi, sosial dan susunan negara. (*Tepuktangan*). Dan kemungkinan untuk mentjapai ini ada, mengingat semakin tjepat meningkatnja kesedaran politik dan organisasi daripada Rakjat dalam melawan kekuatan² kepalabatu dari kaum tuantanah dan kaum burdjuis komprador, dan mengingat keadaan² internasional sekarang jang menguntungkan.

Tetapi soalnya, apakah klas² jang reaksioner akan membiarkan Rakjat pekerdja dibawah pimpinan Partai kita untuk mentjiptakan kekuasaan Rakjat dengan djalan damai? (*Terdengar utjapan: „Tidaak” dan tawa*). Apakah mereka tidak akan menggunakan kekerasan untuk menekan dan menindas pertumbuhan kekuatan Rakjat, misalnja dengan kekerasan menghapuskan hak² kebebasan demokratis daripada Rakjat dan dengan kekerasan pula melumpuhkan atau meniadakan samasekali parlemen? (*Terdengar utjapan: „Waah”*).

Pengalaman Rakjat di Pakistan, dan baru² ini sadja di Kerala, India, harus benar² mendjadi peladjaran bagi kita. Oleh karena itu, didalam membitjarakan soal kemungkinan ditjapainja kekuasaan Demokrasi Rakjat setjara damai, didalam Preambul dinjatakan bahwa PKI harus menundjukkan kewaspadaan jang se-besar² nja. Ketjuali itu kita harus tetap ingat bahwa menurut ajaran Marxisme-Leninisme djalan damai itu adalah sebagai perketjualian jang menguntungkan Rakjat pekerdja, dan bahwa setiap peralihan ke Sosialisme, meskipun setjara damai, adalah revolusi. Dan tentang revolusi Lenin mengatakan: „..... tjiri jang lebih dalam dan tetap daripada revolusi ini dan sjarat bagi kemenangannya, dulu dan sekarang, ialah organisasi massa proletar, organisasi Rakjat pekerdja. Didalam organisasi djutaan Rakjat pekerdja inilah terletak sjarat² terbaik bagi revolusi, sumber jang paling dalam bagi kemenangan²nja”.

Dalam hubungan ini adalah penting apa jang dinjatakan didalam Preambul sekarang, bahwa dengan tetap mengingat sifat² khusus daripada revolusi Indonesia, jang akan menetapkan djalan jang khusus bagi Indonesia menudju ke Sosialisme, Partai kita

menarik peladjaran dari pengalaman jang kaya dari gerakan klas buruh seluruh dunia, chusunya gerakan klas buruh jang sudah berhasil membangun Sosialisme. Ini berarti bahwa disamping mengakui adanya kebenaran jang khusus berlaku di-satu² negeri, tetapi se-kali² tidak boleh melupakan kebenaran umum jang berlaku untuk semua negeri mengenai peralihan ke Sosialisme, jaitu bahwa faktor jang menentukan dan mutlak ialah pimpinan politik dari klas buruh jang dipimpin oleh pelopornja, Partai Marxis-Leninis. (*Tepuktangan lama*).

Kawan²,

Bagian² jang terachir daripada Preambul menerangkan dengan perumusan² jang djelas tentang kritik-selfkritik, tentang garis massa dan tentang prinsip sentralisme-demokratis, sebagai sjarat mutlak bagi pengembangan dan pembulatan Partai dalam politik, ideologi dan organisasi. Mengenai semuanya ini tidak diperlukan pendjelasan lagi, karena disamping sudah tjukup djelas, djuga akan bisa lebih diperdjelas lagi pengertiannya didalam memahami peraturan² Konstitusi. Kritik-selfkritik, garis massa dan prinsip sentralisme-demokratis adalah isi djiwa dan semangat daripada peraturan² Konstitusi Partai kita.

Sekianlah mengenai Preambul.

II

PERATURAN² KONSTITUSI

Kawan²,

Diantara fasal² peraturan Konstitusi jang dirasa perlu diberikan sekedar pendjelasan adalah fasal² dari bab² jang berikut ini.

1. Bab Keanggotaan

Menurut peraturan Konstitusi, seseorang baru boleh diterima mendjadi anggota Partai sesudah ia mentjapai usia 18 tahun. Ini adalah berdasarkan pertimbangan, bahwa pada umumnya seseorang baru bisa mempunyai pendirian politik jang boleh dikatakan teguh sesudah mentjapai usia 18 tahun.

Perlu ditegaskan disini bahwa jang dimaksudkan dengan diterima mendjadi anggota Partai adalah sedjak diterima sebagai tjalonanggota. Hal ini tidak perlu dinjatakan didalam peraturan karena kedudukan dan tanggungjawab anggota dan tjalonanggota Partai sesungguhnya adalah sama — kewajiban²nja sepenuhnya sama, sedangkan mengenai hak²nja hanya berbeda dalam hal

hak memilih dan dipilih serta hak suara dalam mengambil putusan. Ketjuali itu, seseorang yang mau masuk Partai sedjak semula adalah memang dengan niat menjadi anggota. Soal keharusan melalui masatjalon lebih dulu, hal ini hanyalah sekedar prosedur yang harus ditempuh djustru untuk bisa memenuhi niatnja menjadi anggota Partai.

Selain sjarat usia didalam penerimaan anggota, peraturan Konstitusi djuga membagi orang² yang mau diterima menjadi anggota dalam empat golongan berdasarkan asal sosial mereka masing².

Golongan pertama terdiri dari kaum buruh, buruhtani, tanimiskin atau kaum miskin kota. Sjarat bagi penanggung mereka dan lama masatjalonnja boleh dikatakan sangat ringan. Ini berarti bahwa penerimaan anggota dari kalangan proletar dan semi-proletar tidak ada pembatasan² yang istimewa. Atau bisa djuga dikatakan bahwa Partai memberikan hak istimewa bagi orang² dari kalangan kaum proletar dan semi-proletar untuk menjadi anggota Partai. Ini adalah sesuatu yang wajar, karena Partai Komunis adalah Partainja klas buruh.

Kaum miskin kota, seperti diterangkan didalam laporan Kawan Aidit, antara lain terdiri dari bakul yang menjadjakan barang-dagangan yang diterimanja dari djuragan, tukang loak, tukang betjak yang memiliki betjak untuk ditarik sendiri, tukang warung ketjil, tukang sol sepatu, tukang pateri, tukang potong rambut, dsb.

Golongan kedua terdiri dari orang² revolusioner dari kalangan burdjuasi ketjil. Penerimaannja menjadi anggota harus ditanggung oleh anggota Partai yang sudah lebih berpengalaman dan masatjalonnja adalah selama satu tahun. Sjarat² ini diperlukan berhubungan dengan kenjataan, bahwa ideologi dari orang² yang berasal dari klas ini biasanja agak rumit, dan mereka seringkali mempunyai fikiran yang ragu terhadap disiplin Partai dan dalam menghadapi perdjjuangan revolusioner yang sengit.

Pegawai kantor yang dimasukkan dalam golongan kedua ini, tidak termasuk pegawai rendahan, karena mereka termasuk dalam golongan pertama.

Golongan ketiga terdiri dari orang² revolusioner yang dulunja termasuk lapisan tengah dan atas dari klas penghisap. Ideologi mereka sudah tentu lebih rumit dan lebih sukar untuk menerima Program dan disiplin Partai. Oleh karena itu, penerimaan mereka menjadi anggota harus ditanggung oleh anggota² Partai yang sungguh² sudah berpengalaman dan harus disetudjui oleh Komite Partai yang agak tinggi dengan melalui masatjalon selama dua tahun.

Golongan keempat, terdiri dari orang² yang sudah pernah me-

nerima kejakinan politik lain dan pernah menjadi anggota partai lain. Penerimaan mereka menjadi anggota Partai menurut peraturan Konstitusi harus dengan tanggungan anggota² Partai yang sudah lebih berpengalaman lagi dan harus disetudjui oleh Komite Partai yang djuga lebih tinggi lagi. Tetapi dari bekas anggota² partai lain harus dibedakan antara bekas anggota biasa dan bekas anggota pimpinan. Djuga harus dibedakan orang² yang masuknja kepartai lain hanya karena sesuatu yang bersifat paksaan atau karena didaftar sadja setjara serampangan tanpa persetudjuannja. Terhadap mereka ini, djika selama mereka sebagai anggota tidak turut dalam aktivitet politik dari partai itu, berlakulah peraturan Konstitusi mengenai prosedur penerimaan anggota sesuai dengan asal klas mereka masing².

Berbeda dengan yang sebelum dirubah, dalam Konstitusi sekarang ditetapkan peraturan bahwa anggota Partai yang sudah pernah dipetjat bisa diterima kembali menjadi anggota atas putusan Komite Partai yang telah memetjatnja dan menurut ketentuan tjara² mengatur penerimaan anggota. Usia keanggotaan yang lama dari seseorang yang pernah dipetjat dan diterima kembali menjadi anggota Partai tidak dihitung.

Djuga dalam peraturan Konstitusi sekarang ada dinjatakan, bahwa tjalonanggota atau anggota Partai bebas untuk keluar dari Partai. Oleh karena itu, djika ada permintaan keluar dari seorang tjalonanggota atau anggota, rapat Resort harus mengambil putusan untuk menghapuskan nama orang tersebut dari daftar keanggotaan Partai dan melaporkannja kepada Komite Partai yang langsung diatassnja. Hanya djika dianggap perlu Komite Partai yang bersangkutan dapat mentjoba untuk menjarankan supaja anggota atau tjalonanggota itu membatalkan niatnja untuk keluar. Tetapi djika seseorang anggota atau tjalonanggota yang meminta keluar itu telah melakukan pelanggaran² disiplin yang berat yang bisa menjadi alasan untuk pemetjatannja, maka putusan pemberhentiannja itu dinjatakan sebagai pemetjatan. Semuanya ini menjelaskan bahwa keluar dari Partai adalah bebas, tetapi untuk masuk menjadi anggota Partai ada sjarat²nja dan tidak bebas.

Mengenai anggota Partai yang sudah pernah keluar dari Partai atas kemauan sendiri tidak ditentukan peraturannja yang pasti djika ia mau masuk menjadi anggota Partai kembali. Hal ini adalah dengan pertimbangan untuk membedakan penerimaan kembali menjadi anggota dari seseorang yang pernah dipetjat dengan seseorang yang keluar dari Partai atas kemauan sendiri. Dengan ini dibuka berbagai matjam kebidjaksanaan dalam mene-

rima kembali anggota yang pernah keluar dari Partai. Kebidjaksanaan itu bisa berupa kemungkinan untuk menghitung kembali usia keanggotaannya yang lama sebagian atau sepenuhnya, memperpendek masatjalon atau tidak melalui masatjalon samasekali, dan bisa juga tidak menghitung samasekali usia keanggotaannya yang lama. (*Tepuktangan lama*). Semuanya ini harus dipertimbangkan dengan mengingat alasan² yang menyebabkan anggota yang bersangkutan ini sampai keluar dari Partai dan mengingat aktivitasnya sesudah dan selama diluar Partai. Memang satu kenyataan, bahwa seseorang anggota Partai yang pernah minta keluar dari Partai menundukkan kebimbangan dan ketidakteguhan pendirian politiknya. Tetapi berdasarkan pengalaman dan kepentingan pembangunan Partai di-daerah² yang baru, kebidjaksanaan yang longgar ini perlu ditempuh. Dalam pada itu, satu hal yang pasti untuk membedakan dengan penerimaan kembali anggota Partai yang sudah pernah dipetjat ialah se-kurang²nja penerimaan kembali anggota yang sudah pernah keluar dari Partai masatjalonnja bisa diperpendek atau tidak melalui masatjalon samasekali.

Mengenai anggota Partai yang karena terpaksa oleh keadaan menyebabkan terputus hubungannya dengan Partai, dengan segera harus diterima kembali sebagai anggota sesudah menjampaikan permintaan, dan keterangannya mengenai sebab terputusnya hubungan dengan Partai dibenarkan oleh Komite Daerah Besar yang bersangkutan.

Menurut peraturan Konstitusi setiap permintaan menjadi anggota, yang harus disertai dengan keterangan yang bertanggungjawab dari anggota² Partai yang menanggungnja, harus dibitjarkan dan diputuskan oleh rapat Resort dan disahkan oleh Komite Partai yang lebih tinggi. Upatjara penerimaan tjalonanggota dilakukan dengan mengutjapkan Sumpah Partai oleh tjalonanggota yang bersangkutan. Ada yang mengusulkan supaya upatjara pengutjapan Sumpah Partai itu dilakukan sekali saja, jaitu pada waktu penerimaan menjadi tjalonanggota, atau pada waktu penetapan menjadi anggota. Berdasarkan pengalaman bahwa dua kali pengutjapan Sumpah Partai itu mempunyai pengaruh dan mengandung arti pendidikan yang dalam bagi tiap anggota yang bersangkutan, maka dua kali upatjara pengutjapan Sumpah Partai itu dalam Konstitusi sekarang tetap dipertahankan.

Dalam soal penerimaan anggota baru, pengalaman selama ini menundukkan, bahwa peraturan² Konstitusi yang bersangkutan belum atau kurang dipatuhi sepenuhnya. Misalnja, seseorang yang diterima menjadi tjalonanggota tidak mengetahui untuk berapa lama harus mendjalani masatjalonnja. Hal ini menundukkan bah-

wa ketentuan mengenai pembagian menjadi empat golongan dari orang² yang mau masuk menjadi anggota Partai, dimana bersamaan dengan itu ditetapkan juga masatjalonnja masing², belum atau kurang diperhatikan sepenuhnya. Sebagai akibatnja ialah bahwa peningkatan dari seseorang tjalonanggota menjadi anggota tidak bisa dilakukan sebagaimana mestinya. Dalam hubungan ini, perlu juga diperingatkan soal masih kurang dipenuhinja tanggungjawab dari para penanggung tjalonanggota, seperti yang ditentukan dalam peraturan Konstitusi. Jaitu masih sering terdjadi bahwa seseorang anggota menjadi penanggung tjalonanggota padahal ia sendiri tidak atau kurang mengenal tjalonanggota itu. Ia turut menjadi penanggung tjalonanggota hanya atas permintaan seseorang kawan anggota yang akan menanggung tjalonanggota itu, djadi hanya berdasarkan kepertjajaan kepada keterangan yang diberikan oleh kawan anggota yang meminta bantuannya untuk turut menjadi penanggung. Kelemahan ini harus diatasi, sebab hal ini menundukkan sikap yang tidak sungguh² disamping menundukkan kurang kewaspadaan.

Pengalaman selama ini juga menundukkan bahwa Komite² Partai yang bersangkutan kurang memenuhi kewadjabannya terhadap para tjalonanggota dalam hal memberikan didikan elementer Partai dan mengawasi kualitas politik tjalonanggota. Ada gejala bahwa Komite² Partai hendak mengambil gampangnja saja dalam meningkatkan seseorang tjalonanggota menjadi anggota, jaitu hanya dengan memperhatikan ketjakaapan dan aktivitas yang lebih tjepat tampak dari seseorang tjalonanggota yang sedikit atau banyak mempunyai pengetahuan sekolah. Bahwa tinggi rendahnya tingkat pengetahuan seseorang tjalonanggota mempengaruhi lambat atau tjepatnja peningkatan pengertiannya mengenai Program dan Konstitusi Partai, hal ini tidak dapat disangkal. Tetapi soalnya disini ialah, bantuan apa yang telah diberikan oleh Komite Partai terhadap para tjalonanggota yang berasal dari kaum buruh dan kaum tani, yang kebanyakannya memang tidak mendapat kesempatan untuk menerima pendidikan sekolah, supaya bisa lebih tjepat memahami Program dan Konstitusi Partai.

Djika sikap seperti yang diterangkan diatas ini diteruskan, maka akibatnja tidak bisa lain ketjuali memperlemah kedudukan elemen proletar dan semi-proletar didalam Partai. Sebagaimana ditentukan didalam Konstitusi, usia keanggotaan menjadi salahsatu sjarat yang penting untuk bisa dipilih menjadi anggota Komite² Partai dan untuk menjadi penanggung bagi penerimaan anggota² baru. Djika peningkatan menjadi anggota dari para tjalonanggota yang berasal dari kalangan kaum buruh dan kaum tani men-

jadi terlambat karena kelalaian Komite² Partai untuk memberikan didikan pertama kepada mereka supaya bisa memenuhi kwalitet yang diperlukan untuk penetapannya menjadi anggota, maka hal ini sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, berarti mengurangi hak dan kesempatan bagi elemen² proletar dan semi-proletar untuk memegang pimpinan didalam Partai dan bisa mengurangi prosentase elemen proletar dan semi-proletar dalam komposisi keanggotaan Partai seluruhnya.

Untuk mengachiri gejala seperti yang diterangkan diatas ini, pada pokoknya Komite² Partai harus berusaha mematuhi sepenuhnya peraturan² Konstitusi yang bersangkutan dengan prosedur penerimaan anggota baru, dan tetap berorientasi kepada klas buruh dan Rakyat pekerja lainnya dalam penarikan anggota² baru.

Dalam hubungan ini adalah sangat penting untuk mentjiptakan petugas² yang terlatih yang khusus untuk mengurus penerimaan anggota² baru. Djika tjukup mempunyai petugas² yang demikian ini, maka akan bisa dilaksanakan peraturan Konstitusi yang menjatakan, bahwa sebelum mengambil putusan atau mensahkan penerimaan seseorang tjalonanggota, Komite Partai yang bersangkutan menundjuk fungsionaris Partai untuk bertukar fikiran seluas²nja dengan orang yang mau menjadi tjalonanggota itu supaya dapat mengetahui ke-sungguh²an akan niatnya memasuki Partai.

Orientasi kepada klas buruh dikota dan didesa didalam penarikan anggota baru adalah penting untuk menjaga komposisi keanggotaan Partai supaya prosentase elemen proletar didalam Partai walaupun tidak merupakan mayoritas, se-kurang²nja seimbang djika dibandingkan dengan elemen² dari klas lain diluar klas buruh. Untuk mentjapai ini, jaitu supaya prosentase elemen proletar dalam komposisi keanggotaan merupakan jumlah yang besar, Komite² Partai harus sungguh² menaruh perhatian dalam memberikan didikan elementer Partai kepada para tjalonanggota yang berasal dari kalangan kaum buruh ataupun buruhtani, sehingga mereka bisa ditingkatkan menjadi anggota tepat pada waktunya dan selanjutnya bisa dengan lebih aktif menjalankan tugas²nja. Adalah sangat penting mendidik para tjalonanggota untuk membantu mereka memahami Konstitusi, Program dan politik Partai dan untuk membentuk dasar pandangan Komunis mereka dengan sikap yang tepat terhadap organisasi, kerja, dan terhadap massa, dan untuk membentuk pandangan materialis mereka dalam bentuk bimbingan supaya menjari setiap kebenaran dalam kenyataan.

Dengan mengemukakan pentingnja soal komposisi klas daripada keanggotaan Partai kita, tidaklah berarti bahwa asal sosial dari-

pada keanggotaan Partai kita merupakan satu²nja faktor yang menentukan berkuasanya ideologi proletar dan garis proletar didalam Partai. Sebab, seperti pernah dikatakan oleh Kawan Liu Sau-tji: „Faktor² yang menentukan jalah perjuangan² politik dan kehidupan politik Partai kita, pendidikan ideologi dan pimpinan ideologi serta pimpinan politiknya”. Djadi asal sosial daripada keanggotaan Partai kita tidaklah menentukan watak daripada Partai kita, seperti halnya komposisi klas daripada keanggotaan Partai Buruh di-negeri² Eropa yang tertentu tidak menentukan watak mereka. Meskipun mayoritas daripada anggota mereka berasal dari klas buruh, tetapi Partai² Buruh itu tidak mewakili klas buruh.

Tetapi dengan prosentase elemen proletar yang tidak ketjil didalam Partai, ditambah dengan pendidikan yang luas dan dalam mengenai Marxisme-Leninisme sebagai ideologi ilmiah daripada proletariat, maka sudah tentu akan lebih terdjamin lagi berkuasanya ideologi proletar didalam Partai dan kuatnja garis proletar daripada Partai.

Mengenai kewajiban dan hak² anggota, perumusan dalam peraturan Konstitusi sekarang telah mengalami perbaikan, sehingga kiranya akan bisa lebih mendjamin perkembangan yang normal daripada kehidupan intern Partai kita, bisa lebih meningkatkan aktivitas dan rasa tanggungjawab para anggota terhadap perjuang-an Partai dan mendjamin kesatuan aksi daripada Partai.

Dalam peraturan Konstitusi sekarang, per-tama² ditjantumkan sebagai kewajiban anggota Partai ialah: mengundjungi rapat² dan kursus² Partai, membatja dan menjebarkan harian serta perbitan² Partai. Ini adalah karena memang kewajiban² inilah yang per-tama² harus dilakukan oleh setiap anggota, dan kewajiban² ini pula yang paling mungkin dilakukan oleh setiap anggota sedjak ia mulai diterima menjadi tjalonanggota. Dengan menjalankan kewajiban² yang pertama ini, tersedialah sjarat² untuk menjalankan kewajiban yang kedua, jaitu: berusaha dengan radjin mempeladjar dan terusmenerus mempertinggi pengertian tentang Marxisme-Leninisme serta menggunakannya dalam memetjahkan masalah² kongkrit. Kewajiban² yang kedua ini adalah djuga merupakan kewajiban² yang sangat penting, karena disinilah terletak faktor yang menentukan apakah seseorang anggota Partai bisa memberikan sumbangan yang lajak kepada perjuangan Rakyat. Tanpa tingkatan kesadaran dan pengertian yang tinggi tentang Marxisme-Leninisme, tidaklah mungkin seseorang anggota Partai memberikan sumbangan kepada perjuangan Rakyat setjara sadar dan tepat, dan tidak mungkin ia menjadi anggota Partai yang baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnja kesadaran

dan pengertian seseorang anggota tentang Marxisme-Leninisme menjadi ukuran daripada banyak sedikitnya sumbangan yang bisa diberikan oleh seseorang anggota kepada Partai dan kepada perjuangan Rakjat. Semakin tinggi kesadaran dan pengertian seseorang anggota tentang Marxisme-Leninisme, semakin besarlah sumbangan yang bisa diberikannya kepada Partai dan perjuangan Rakjat, sebaliknya, semakin rendah, semakin terbataslah sumbangan yang bisa diberikannya.

Tentang betapa pentingnya kewajiban mempertahankan solidaritet dan persatuan Partai, yang tertantun sebagai kewajiban nomor tiga dalam urutan, bisa kita fahami tanpa penjelasan yang panjang lebar, jika kita ingat, seperti yang diterangkan dalam Preambul, bahwa solidaritet dan persatuan Partai merupakan jiwa dan kekuatan daripada Partai. Didalam perjuangan, Partai kita bisa mentjapai kemenangan jika politiknya benar dan tepat. Tetapi dengan kebenaran dan ketepatan politik saja, kita masih belum bisa mengalahkan musuh² kita. Untuk ini politik Partai kita yang benar dan tepat itu harus didukung dan diperjuangkan oleh massa Rakjat yang bersatu. Tegasnya, untuk mentjapai kemenangan kita harus sungguh² bisa menggalang persatuan dikalangan massa Rakjat. Tetapi bagaimanakah kita akan bisa mempersatukan massa Rakjat jika didalam Partai kita sendiri tidak ada solidaritet dan persatuan.

Partai kita yang sudah bertambah besar sekarang ini, yang sudah harus menghadapi segala lapangan pekerjaan, lebih daripada diwaktu yang sudah², memerlukan solidaritet dan persatuan tidak hanya dikalangan para anggotanya, tetapi, dan terutama, dikalangan para kadernya. Partai kita yang sudah bertambah besar sekarang ini semakin banyak mempunyai kader yang ber-beda² dalam usia, dalam asal sosial dan dalam sifat serta lapangan pekerjaan. Partai kita semakin banyak mempunyai kader tua dan muda, semakin banyak mempunyai kader yang berasal dari kaum buruh, dari kaum tani, dari kalangan mahasiswa, intelektual, dsb. Mereka masing² disamping mempunyai segi² kekuatannya yang harus dikembangkan, juga mempunyai segi² kelemahannya yang harus terus-menerus dikikis. Semua kader ini merupakan kekuatan tulang-punggung daripada Partai, dan kekuatan Partai akan menjadi berlipat-ganda jika terdapat persatuan dan solidaritet dikalangan mereka. Untuk mentjapai ini diperlukan sikap saling menghargai dan saling beladjar.

Kewajiban² lainnya yang ditetapkan didalam peraturan Konstitusi, disamping kewajiban² untuk melaksanakan kritik-selfkritik, menentang rasa puas diri yang ber-lebih²an dan sikap sombong,

kewajiban untuk setia dan jujur pada Partai dan senantiasa waspada, adalah kewajiban² untuk melaksanakan garis massa dalam politik, organisasi dan moral.

Seperti sudah diterangkan diatas, kemenangan perjuangan Partai kita bergantung kepada bantuan massa. Sudah tentu massa Rakjat hanya mau membantu perjuangan Partai kita jika mereka sudah mengenal Partai kita. Tetapi sebelum massa Rakjat mengenal Partai kita dari program politiknya, mereka lebih dulu mengenal dari orang²nya yang menjadi anggota Partai, artinya mereka lebih dulu mengenal Komunis sebagai perseorangan. Dan perkenalan pertama dengan orang² Komunis itu tidak selalu terjadi didalam aksi² perjuangan, melainkan didalam pergaulan biasa se-hari². Massa Rakjat mengenal kita sebagai Komunis pertama² dari sikap hidup dan tingkah-laku kita didalam pergaulan se-hari² dan dari kehidupan rumahtangga kita. Jika kita sebagai Komunis dikenal oleh massa sebagai orang yang tidak baik tingkah-lakunya didalam pergaulan se-hari², atau dikenal dalam kehidupan rumahtangganya yang tidak beres, misalnja sering ramai² bertengkar sebagai suami-isteri, dsb., maka semuanya ini sudah terang akan menjauhkan kita sebagai Komunis dari massa Rakjat, yang berarti juga menjauhkan Partai kita dari massa Rakjat. Itulah sebabnya didalam Sumpah Partai ada dinyatakan bahwa kita sebagai Komunis harus tidak saja menjadi tonton didalam perjuangan untuk tanahair dan Rakjat, tetapi juga harus berusaha menjadi tonton dalam kehidupan se-hari². (*Tepuktangan*). Inilah yang dimaksudkan didalam peraturan Konstitusi tentang kewajiban menjunjung tinggi moral Komunis.

Mengenai hak² anggota yang ditetapkan didalam peraturan Konstitusi, ada satu hal yang memerlukan sedikit penjelasan. Jaitu mengenai hak anggota untuk mempertahankan pendiriannya jika tidak menyetujui sesuatu putusan, disamping harus melaksanakan putusan itu dengan tidak bersyarat.

Solidaritet dan persatuan didalam Partai kita ditijatkan atas dasar kesatuan ideologi. Oleh karena itu, kesatuan yang dituntut oleh Partai kita ialah kesatuan didalam segala soal pokok yang prinsipil. Meskipun demikian, didalam Partai kita tidak bisa dihindari kemungkinan timbulnya perbedaan pendapat, sedangkan kesatuan pendapat tidak bisa ditijatkan dengan paksaan. Tetapi disamping itu Partai kita mutlak menuntut adanya kesatuan tindakan didalam segala soal praktis. Oleh karena itu pemetjahan yang se-tepat²nya daripada dua kontradiksi ini tidak bisa lain ketjuali prinsip: setiap anggota Partai harus tunduk kepada organisasi Partai, suara tersedikit harus tunduk kepada suara terba-

njak, organisasi bawahan harus tunduk kepada organisasi di atasnya, dan seluruh organisasi Partai harus tunduk kepada Komite Central. Dengan ini berarti bahwa Partai mengharuskan setiap anggota yang berpendirian lain untuk melaksanakan putusan² Partai tanpa syarat dalam tindakan² praktis. Meskipun demikian, anggota Partai tersebut tetap berhak untuk mempertahankan pendiriannya, dan berhak untuk menjampaiannya kepada organisasi Partai dimana ia tergabung dan kepada badan pimpinan Partai yang lebih tinggi, dan organisasi Partai tidak boleh memaksa supaya melepaskan pendiriannya dengan kekuatan disiplin. Hal ini bukan saja tidak merugikan Partai, tetapi malahan bisa juga ada manfaatnya. Asal saja putusan² Partai itu memang benar, dan anggota yang berpendirian lain itu suka tunduk kepada kebenaran, maka akhirnya ia dengan senang hati dan dengan penuh kejakinan akan mengakui kebenaran daripada Partai dan mengakui kesalahannya sendiri. Tetapi jika, misalnya, kemudian terbukti bahwa kebenaran ada di pihak suara yang tersedikit, maka hal ini berarti bahwa perlindungan terhadap hak dari golongan yang mendapat suara sedikit bisa membantu memudahkan Partai untuk menemukan kebenaran.

Achirnya, dengan dihapuskannya „Bab Penghargaan dan Disiplin” yang tersendiri, dan dengan dihapuskannya samasekali peraturan² mengenai penghargaan, dalam Bab Keanggotaan sekarang ini dimasukkan peraturan² mengenai disiplin Partai. Disamping dirumuskan dalam fasal² yang tersendiri mengenai tjara² untuk mengambil putusan tindakan disiplin dan bentuk² daripada tindakan² disiplin itu, didalam fasal² yang mengenai kewadajiban dan hak² anggota juga dimasukkan peringatan² mengenai tindakan disiplin. Hal ini dianggap penting sebagai peringatan supaya peraturan² Konstitusi mengenai kewadajiban dan hak² anggota itu sungguh² dipatuhi sepenuhnya, dan karena adanya tindakan disiplin itu pada dasarnya ditimbulkan oleh pelanggaran terhadap kewadajiban dan hak² anggota.

Tentang dihapuskannya peraturan mengenai penghargaan, ada dua alasannya. Pertama, dalam praktek selama ini sangat sukar untuk menjatakan setiap matjam tanda penghargaan itu dalam bentuknya yang formil. Pemberian tugas yang lebih penting dan lebih bertanggungjawab kepada setiap anggota dan kader Partai adalah sesungguhnya merupakan salahsatu bentuk utama daripada penghargaan Partai terhadap mereka sesuai dengan kwalitet dan ketjakapannya masing². Selama ini ternjata bahwa tanda penghargaan yang formil itu tidak diperlukan. Alasan kedua dan yang terpenting ialah, bahwa adanya fasal ini tidak memberikan pendidikan

yang baik. Pada dasarnya, kita kaum Komunis bekerdja bukan untuk mendapatkan penghargaan. Kita bekerdja untuk kepentingan Rakjat banjak. Djika kita mendapat kepertjajaan dari massa Rakjat, karena hasil² dan kegiatan kita didalam pekerdjaan, maka inilah penghargaan yang se-tinggi²nya bagi kita sebagai anggota Partai Komunis. (*Tepuktangan*). Tetapi ini tidak berarti bahwa sudah tidak ada samasekali kemungkinan Komite atasan memberi penghargaan kepada Komite bawahan, atau Komite memberi penghargaan kepada anggota Partai yang menundukkan djasa²nya yang luarbiasa.

2. Bab Susunan dan Prinsip² Organisasi

Kawan²,

Dalam susunan organisasi Partai, peraturan Konstitusi sekarang menetapkan adanya satu bentuk organisasi Partai yang lebih tinggi dari organisasi Seksi Partai tetapi masih tetap dibawah CDB, jaitu organisasi Partai Pulau dan Kota yang didirikan dipulau² dan kota² yang ditetapkan oleh CC, dan organisasi Partai Daerah Istimewa Jogjakarta. Dengan bentuk organisasi ini dimaksudkan supaya kepada organisasi Partai disesuaikan pulau, yang kehidupan masjarakatnya sesungguhnya merupakan suatu kesatuan, dan kepada organisasi Partai disesuaikan kota yang dianggap penting, misalnya karena vital atau besarnya djumlah penduduknya, bisa diberikan pimpinan setjara yang lebih baik oleh CDB yang bersangkutan.

Adanya organisasi Partai Daerah Istimewa Jogjakarta adalah se-mata² karena kenjataan masih adanya daerah istimewa ini, sehingga diperlukan adanya Komite Partai yang tersendiri untuk mengkordinasi dan memimpin Seksi² Partai yang ada didaerah ini.

Dengan berlakunya Undang² No. 1 tahun 1957 mengenai otonomi daerah, yang menghapuskan nama provinsi, maka hapus pulalah sebutan organisasi Partai Provinsi dan Komite Provinsi. Sebagai gantinya disebutlah organisasi Partai Daerah Besar dan Komite Daerah Besar. Sebagai nama untuk organisasi Partai Daerah Besar, tjukuplah djika ia disebut dengan nama Daerah Besar itu saja, sebagai tjontoh : untuk organisasi Partai Daerah Besar Djawa Timur tjukup disebut „PKI Djawa Timur” dan Comitenja disebut „Komite PKI Djawa Timur”.

Djuga terhubung tidak ada lagi nama kabupaten, maka untuk Seksi Partai dikota dan dibekas kabupaten yang sama namanya perlu diadakan perbedaan sebutan. Jaitu untuk Seksi Partai dikota perlu disebutkan „kotanja” dan untuk yang dibekas kabupaten tjua-

kup disebut „nama daerahnja”. Tjontohnja : untuk Komite Seksi kota Bogor disebut „Komite Seksi Kota Bogor” dan untuk bekas kabupaten Bogor disebut „Komite Seksi Bogor”.

Untuk Kongres dan Konferensi² Partai yang akan mengadakan pemilihan Komite, peraturan Konstitusi sekarang mengharuskan dibentuknja Komisi Pemilihan yang bertugas mengusulkan tjara² pemilihan dan daftar tjalon berdasarkan tjalon² yang diadjudkan.

Mengenai tjara pilihannja sendiri, apakah setjara tertulis dan rahasia atau setjara terbuka, peraturan Konstitusi tidak menetapkan salahsatunya. Ini adalah karena pemilihan yang dilakukan setjara rahasia ataupun setjara terbuka masing² mempunjai segi² baik dan tidak baiknja, sedangkan pertimbangan mengenai hal ini bisa ber-lain²an pada waktu dan mengenai persoalan² yang tertentu. Oleh karena itu, penetapannja diserahkan kepada kebidjaksanaan sidang yang bersangkutan atas usul Komisi Pemilihan.

Peraturan Konstitusi sekarang menetapkan sjarat usia keanggotaan seseorang untuk bisa ditjalonkan mendjadi anggota Komite Partai. Ini adalah penting sebagai sjarat untuk membentuk Komite Partai yang stabil, karena usia keanggotaan merupakan salahsatu ukuran daripada kwalitet seseorang anggota Partai. Tetapi usia keanggotaan sadja tidaklah tjukup untuk mengukur kwalitet seseorang anggota Partai. Masih ada hal² lain yang tidak kurang pentingnja yang harus dipertimbangkan dengan masak², seperti mengenai kemurnian ideologinja dilihat dari sudut politik dan moralnja, mengenai kewibawaan dan keichlasannja, dsb. Soal² sematjam ini sukar untuk bisa didiskusikan dengan teliti dan penuh kebidjaksanaan didalam sidang yang luas. Disinilah letak pentingnja tugas Komisi Pemilihan yang harus menjusun daftar tjalon. Oleh karena itu anggota² Komisi Pemilihan harus terdiri dari anggota² Partai yang sungguh² tepertjaja. (*Tepuktangan*).

Untuk kepentingan pembangunan Partai yang merata dengan pembagian kader yang se-baik²nja atau dengan penempatan kader untuk sementara, peraturan Konstitusi sekarang memberikan keleluasaan kepada Komite Partai yang lebih tinggi untuk, bila dianggap perlu, memindahkan fungsionaris² organisasi Partai bawahan.

Achirnja, yang bersangkutan dengan Bab ini perlu disebutkan peraturan Konstitusi yang mengenai hak organisasi bawahan untuk mengusulkan perubahan kepada organisasi diatasnja mengenai putusannja yang dianggap tidak sesuai dengan keadaan yang njata didaerahnja atau dengan sesuatu lapangan tertentu. Ini adalah ditudjukan untuk melaksanakan prinsip sentralisme-demokratis yang sedjati dalam hubungan antara organisasi atasan dengan organi-

sasi bawahan. Ada yang mengchawatirkan bahwa kesempatan ini bisa disalahgunakan sebagai alasan untuk menunda-nunda pelaksanaan sesuatu putusan. Hal ini memang bisa sadja terdjadi. Tetapi sebaliknya, djika benar terdjadi demikian, hal ini malahan bisa membantu untuk mengetahui ketidakberesan dari sesuatu organisasi bawahan. Yang terang jalah, bahwa ketentuan demikian ini akan memberikan dorongan bagi setiap organisasi bawahan untuk melaksanakan putusan² organisasi atasannja dengan penuh keja-jinan dan setjara kreatif. (*Tepuktangan*).

3. Bab Organisasi Pusat Partai

Kawan²,

Mengenai peraturan² yang bersangkutan dengan organisasi Pusat Partai hanya ada dua hal yang perlu diterangkan. Yang pertama jalah bersangkutan dengan soal Kongres Nasional Partai. Dalam peraturan Konstitusi sekarang, Kongres Nasional Partai diadakan 5 tahun sekali. Ini adalah karena mengingat beratnja sjarat² untuk bisa melangsungkan Kongres, dan mengingat lamannja waktu yang diperlukan untuk melaksanakan putusan²nja. Djika waktu antara dua Kongres tidak diperpanjang, maka mengingat bahwa untuk mempersiapkan Kongres diperlukan waktu yang tidak sedikit, dan begitu djuga untuk melaksanakan putusan²nja, yang semuanya ini antara lain disebabkan karena keadaan tanahair kita yang luas dan berupa kepulauan dengan alat² perhubungannja yang sukar, berartilah bahwa setiap Komite Central yang baru sadja dipilih oleh Kongres, akan hanya mempunjai sedikit waktu sadja untuk melaksanakan putusan² Kongres itu karena sudah harus segera mengadakan persiapan untuk Kongres lagi.

Mengenai sahnja Kongres, peraturan Konstitusi menetapkan bahwa ia tidak hanya didasarkan atas djumlah utusan yang mewakili lebih dari separoh djumlah anggota, tetapi djuga harus sekurang²nja mewakili 1/3 djumlah organisasi² Daerah Besar. Ini adalah penting untuk mendjaga persatuan dan kebulatan Partai kita setjara nasional, mengingat bahwa organisasi² Daerah Besar Partai kita tidak hanya harus dinilai dari segi kekuatan djumlah anggotanja, tetapi djuga harus dari segi unsur kesukuannja.

Djuga Konstitusi sekarang mengatur kedudukan anggota dan tjalonanggota CC dalam Kongres, jaitu mereka yang tidak mendjadi utusan, hadir dalam Kongres dengan hak bitjara tetapi tanpa hak suara dalam mengambil putusan. Ini adalah suatu penjempuraan.

Jang kedua jalah yang bersangkutan dengan CC. Dalam Kon-

stitusi sekarang ditetapkan bahwa CC disamping membentuk Politbiro dan Sekretariat, juga membentuk Dewan Harian Politbiro. Perlunya ada Dewan Harian Politbiro ialah supaya Sekretariat CC bisa sepenuhnya melakukan pekerjaan sehari-hari dari CC, sedangkan pekerjaan pimpinan harian CC dilakukan oleh Dewan Harian Politbiro. Tindakan ini diambil berdasarkan pengalaman seperti yang diterangkan oleh Kawan D.N. Aidit dalam laporannya kepada Sidang Pleno Ke-VI CC, bahwa karena Politbiro tidak bisa sering² mengadakan rapat, maka tidak jarang Sekretariat CC tidak hanya harus melakukan pekerjaan sehari-hari dari CC, tetapi juga dipaksa oleh keadaan untuk mengambil peran badan pimpinan pusat Partai.

Ketjuali itu sebutan Sekretaris Djendral dalam Konstitusi sekarang diganti dengan sebutan Ketua. Hal ini tidak mengandung perubahan isi apa². Sebab, selama ini kedudukan Sekretaris Djendral adalah juga sebagai Ketua CC, yaitu Ketua seluruh Partai.

Djuga dalam Konstitusi sekarang ditetapkan sebutan Sekretaris² CC bagi Kepala dan Wakil Kepala Sekretariat CC.

4. Bab Organisasi Daerah Partai

Kawan²,

Mengenai peraturan² Konstitusi yang bersangkutan dengan organisasi² daerah Partai hanya ada satu soal yang perlu diterangkan, yaitu mengenai Konferensi Partai daerah.

Dalam Konstitusi sekarang ditetapkan adanya dua matjam Konferensi. Yang pertama, ialah Konferensi yang berkedudukan sebagai Kongres Daerah, yaitu sebagai badan pimpinan yang tertinggi dari sesuatu organisasi daerah Partai. Utusan² untuk Konferensi ini dipilih oleh Konferensi Partai yang langsung dibawahnya, dan Konferensi ini dipimpin oleh Presidium, yang disamping bertugas memimpin jalannya Konferensi juga melakukan fungsi dan kekuasaan Komite Partai selama Konferensi.

Yang kedua, ialah Konferensi antar-waktu yang diadakan diantara dua Konferensi. Djika dibandingkan dengan yang dipusat, Konferensi antar-waktu ini adalah sama kedudukan dan fungsinya seperti Konferensi Nasional Partai. Sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, Konferensi antar-waktu dihadiri oleh utusan² yang dipilih oleh Sidang Pleno Komite yang langsung dibawahnya dan putusan²nya baru berlaku sesudah disahkan oleh Komite Partai yang bersangkutan. Kiranya tidak perlu diterangkan lagi bahwa pimpinan Konferensi antar-waktu ada ditangan Komite Partai yang mengadakannya.

5. Bab Organisasi Basis Partai

Kawan²,

Mengenai organisasi basis Partai, peraturan Konstitusi sekarang menentukan tjara yang lain dalam penjabutannya. Djika tadi-nja dinjatakan bahwa organisasi basis Partai ialah Resort Partai, atau sebaliknya Resort Partai ialah organisasi basis Partai, maka dalam Konstitusi sekarang hal ini dikemukakan setjara lain. Jaitu : organisasi basis Partai bentuknya ada dua matjam. Yang pertama, ialah organisasi basis Partai yang beranggota kurang dari 100 orang, yang disebut Resort Partai. Yang kedua ialah organisasi basis Partai yang beranggota 100 orang atau lebih, yang disebut Resort Besar Partai.

Dibawah Resort Besar Partai dibentuk beberapa Resort Partai. Meskipun Resort Partai dibawah Resort Besar ini mempunyai kedudukan yang sama seperti Resort Partai biasa, dalam arti mempunyai kewadajiban² yang sama seperti yang ditetapkan dalam Konstitusi, tetapi ia tidak bisa dinamakan organisasi basis Partai. Sebab yang berkedudukan sebagai organisasi basis Partai ialah Resort Besarnya. Hal ini adalah karena peraturan Konstitusi menetapkan, bahwa ditiap pabrik, tambang, desa, kampung, djalan, perusahaan, sekolahan, perguruan tinggi, kantor dan tempatkerja² lainnya, dengan tidak pandang berapa banyaknya anggota Partai (dari tiga orang sampai ratusan), hanya dibentuk satu kesatuan organisasi Partai.

Djadi, djika misalnja, suatu Komite Subseksi menerangkan bahwa ia memimpin sekian Resort, maka ini dengan sendirinya tidak termasuk Resort yang berada dibawah Resort Besar Partai. Sebab, kedudukan dan tugas Komite Subseksi ialah mengkoordinasi dan memimpin organisasi basis Partai, sedangkan Resort Partai yang berada dibawah atau didalam Resort Besar Partai bukan organisasi basis Partai.

Mengenai jumlah anggota Grup, peraturan Konstitusi sekarang memberikan kelonggaran sampai sebanjak-banyaknya 10 orang. Dalam menjusun Grup, meskipun hal ini tidak ditjantumkan didalam Konstitusi, patutlah diperhatikan supaya anggota² wanita dimasukkan dalam Grup tersendiri. Hal ini menurut pengalaman adalah baik sebagai dorongan dan kesempatan untuk timbulnya kader² dan anggota² wanita yang lebih aktif. Djuga perlu diperingatkan bahwa karena adanya Grup ini hanya sekedar untuk memudahkan pekerjaan, maka bagaimanapun djuga aktifnya Grup ia harus dijaga djangan sampai mengambil peran Resort Partai. Aktivitet segenap anggota dalam Grup² harus dipersatukan dan

dipusatkan oleh Resort Partai, sehingga merupakan aktivitas Resort sebagai kesatuan. Ini untuk lebih jelasnya berarti, bahwa tidak boleh kedudukan Komite Resort ditingkatkan sebagai badan pimpinan yang lebih tinggi, melainkan ia harus tetap merupakan badan pimpinan yang langsung memimpin pekerjaan para anggota.

Organisasi basis Partai merupakan matarantai yang pokok yang menghubungkan Partai dengan massa Rakyat yang luas. Oleh karena itu adalah tugas politik yang penting dari badan² pimpinan Partai untuk selalu memeriksa dan memperbaiki pekerjaan organisasi basis ini. Kelemahan yang menonjol selama ini ialah berupa kebiasaan dari badan² pimpinan Partai yang lebih tinggi yang hanya sibuk menjuruh organisasi² basis supaya menjalankan instruksi² yang diberikannya, tetapi kurang sekali memeriksa bagaimana organisasi² basis itu bekerja dan kurang sekali memberikan didikan dan bantuan yang kongkrit kepada anggota² dalam organisasi basis. Kelemahan ini harus dengan sekuat tenaga diusahakan untuk mengatasinya.

6. Bab Fraksi² Partai Dalam Organisasi² Bukan-Partai

Kawan²,

Mengenai Bab ini, Konstitusi sekarang mengadakan dua macam perubahan yang merupakan penjemputan. Yang pertama ialah mengenai Fraksi Partai dalam Dewan² Perwakilan dipusat dan didaerah. Mengingat pentingnya pekerjaan dalam Dewan² Perwakilan, maka peraturan mengenai Fraksi dalam Dewan² Perwakilan dirumuskan dalam satu pasal tersendiri setjara lebih lengkap.

Pekerjaan dalam Dewan² Perwakilan, baik dipusat maupun didaerah, adalah penting dilihat dari sudut pekerjaan politik Partai dan dari sudut perjuangan mentjapai perbaikan² kongkrit, bagaimanapun ketjilnja, bagi massa Rakyat. Djika setiap anggota Fraksi Partai kita dalam Dewan² Perwakilan sungguh² melakukan pekerjaannya dengan dipimpin oleh pengertian ini, maka dengan melihat pekerjaan kita itu, massa Rakyat akan menjadi lebih mengerti dan lebih yakin lagi akan pentingnya Dewan² Perwakilan sebagai badan dimana dapat dibela dan diperjuangkan hak² serta tuntutan² massa Rakyat. Dan dari sinilah datangnya kekuatan dari massa Rakyat untuk berjuang mempertahankan dan meluaskan hak² Dewan Perwakilan.

Tetapi pekerjaan dalam Dewan² Perwakilan mengandung bahaya yang bisa merusak atau melemahkan ideologi anggota² Fraksi Partai kita, karena fasilitas² yang bisa didapat dari kedudukan se-

bagai anggota Dewan Perwakilan. Oleh karena itu, peraturan Konstitusi sekarang menetapkan bahwa anggota² Fraksi dalam Dewan² Perwakilan harus menjaga namabai² dirinya masing², yang berarti menjaga namabai² Partai, tetap hidup setjara sederhana, tetap bersikap rendah hati dalam hubungan dengan Rakyat dan tetap menempatkan Partai diatas dirinya sendiri.

Perubahan yang kedua ialah, bahwa kedudukan dan hak² Fraksi Partai dalam Kongres Nasional dan Konferensi² ditentukan oleh Komite Partai yang bersangkutan. Ini berarti bahwa Komite² Partai bisa menetapkan kebijaksanaan untuk mengatur tjara yang sebaik²nja supaya Fraksi² Partai bisa diwakili dalam Kongres Nasional dan Konferensi² Partai.

7. Bab Badan Kontrol Partai

Kawan²,

Mengenai Bab ini, Konstitusi sekarang menunjukkan adanya perubahan yang agak besar. Disamping penetapan tentang pembentukan Komisi Verifikasi, Konstitusi sekarang menetapkan bahwa Komisi Kontrol tidak hanya dibentuk dipusat tetapi setjara pasti dibentuk djuga di-organisasi² daerah Partai sampai ke Seksi.

Untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan Partai dan mengkonsolidasi hasil² pembangunan Partai yang telah ditjapai, rol Komisi Kontrol ini adalah sangat penting.

Tugas Komisi Kontrol sekarang tidak hanya menerima pengaduan² dan permintaan banding, melainkan djuga harus dengan aktif dan teratur memeriksa pelaksanaan Konstitusi Partai dilapangan organisasi, politik, ideologi dan moral.

Berbeda dengan Komisi Verifikasi yang harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya langsung kepada Kongres Nasional Partai atau kepada Konferensi Partai, Komisi Kontrol dibentuk oleh dan bekerja dibawah pimpinan Komite Partai yang setingkat. Ini berarti bahwa setiap putusan dari Komisi Kontrol adalah sudah dengan persetujuan Komite Partai yang bersangkutan.

Adapun mengenai Komisi Verifikasi, didalam peraturan Konstitusi diterangkan bahwa kewajibannya ialah : mengontrol administrasi Partai, pembukuan dan penggunaan keuangan Partai, inventaris Partai dan usaha² produktif Partai. Pelaksanaan kewajiban ini tidaklah semata² bersifat administratif belaka. Adalah menjadi tugas Komisi Verifikasi untuk menjegah timbulnja birokrasi dalam Komite² Partai dalam melakukan pekerjaan²nja, misalnja didalam mengurus surat-menjurat, laporan², instruksi², pemasukan

dan pengeluaran keuangan Partai, dsb.

Sedikit menjangkut Bab Keuangan Partai, perlu diterangkan bahwa dalam peraturan Konstitusi sekarang tidak tegas² dinjatkan keharusan setiap anggota Partai untuk menjangkau sendiri iuran dan segala pembayaran untuk Partai yang sudah menjadi kewajibannya kepada anggota Komite Partai yang berkewajiban menerimanya. Hal ini dimaksudkan sebagai dorongan bagi petugas² Partai yang berkewajiban menerima dan mengumpulkan iuran dan sokongan untuk Partai, supaya juga melakukan usaha² dan tjara² yang bisa lebih mempermudah dan melantjarkan pemasukan keuangan Partai.

Ketjuali itu, dalam menetapkan djumlah iuran dinjatakan „sekurang²nja”. Ini berarti diperlukan kedadjaksanaan didalam menetapkan djumlah iuran dari anggota² Partai yang termasuk didalam satu golongan. Sebagai tjontoh, kita ambil misalnja golongan anggota yang berpenghasilan kotor dari Rp. 251,— sampai Rp. 500,—. Dengan mempertimbangkan, misalnja, djumlah keluarga dari anggota² yang bersangkutan, maka sudah selajaknja djika anggota² yang berpenghasilan kotor Rp. 251,— dan Rp. 500,— itu, tidak sama semuanya harus membayar iuran masing² hanya Rp. 1,—.

8. Bab Hubungan Partai Dengan Pemuda Rakjat

Kawan²,

Bab ini adalah Bab yang baru samasekali.

Sedjarah perdjjuangan kemerdekaan kita menundjukkan betapa besarnya rol yang telah dan masih akan terus dilakukan oleh pemuda. Kita sekarang bisa menjaksikan betapa banjaknja kader² Partai dan kader² yang memimpin organisasi² massa buruh, tani, wanita dll. yang berasal dari gerakan pemuda. Kita juga bisa menjaksikan betapa besarnya bantuan pemuda dalam aksi² dan kampanye² yang besar, seperti misalnja dalam kampanye² pemilihan umum dan pada aksi² pengambilalihan perusahaan² Belanda. Semuanya ini menundjukkan bahwa pemuda merupakan tenaga tjadangan yang tepertjaja dan pembantu yang kuat bagi Partai kita. (*Tepuktangan*).

Organisasi Pemuda manakah yang telah terbukti menjadi sumber tenaga tjadangan dan pembantu Partai kita?

Pengalaman selama ini dan kenjataan sekarang menundjukkan, bahwa organisasi pemuda itu ialah Pemuda Rakjat. (*Tepuktangan, seruan : „Hidup Pemuda Rakjat !”*).

Ditetapkannja hubungan Partai dengan Pemuda Rakjat didalam Konstitusi berarti meletakkan kewajiban kepada Partai seperti

yang dirumuskan didalam peraturan Konstitusi, jaitu : bahwa organisasi² Partai dari semua tingkat harus memberikan perhatian yang besar kepada pekerdjaan Pemuda Rakjat dilapangan ideologi dan organisasi, memberikan bimbingan kepada Pemuda Rakjat dalam pendidikan teori Marxis-Leninis untuk para anggotanja, dan mendjaga supaya terdjamin hubungan yang erat antara Pemuda Rakjat dengan massa pemuda yang luas.

Dengan semuanya ini berarti bahwa Pemuda Rakjat sebagai organisasi massa pemuda adalah berdiri sendiri, hanya pimpinan politik dan pimpinan ideologinja yang ada pada Partai kita.

Pemuda adalah hari depan kita, pewaris seluruh perdjjuangan kita. Karena itu kita yakin bahwa segenap organisasi Partai kita tidak akan mengabaikan tugas yang telah ditetapkan dalam Konstitusi.

*
**

Kawan²,

Demikianlah seluruh pendjelasan yang saja anggap perlu diberikan kepada Rentjana Perubahan Konstitusi Partai kita.

Komisi Perubahan Konstitusi yang kebetulan saja ketua telah menerima tjukup banjak usul² perubahan dan saran², djuga sambutan² sebagai pernyataan persetudjuan terhadap Rentjana Perubahan Konstitusi yang disampaikan keseluruh organisasi Partai sebagai bahan diskusi persiapan Kongres bersama dengan Rentjana Tesis dan Rentjana Perubahan Program. Komisi menerima tidak kurang dari 158 usul² perubahan. Ada diantara usul² itu yang dapat diterima, ada yang diterima tetapi tidak sepenuhnya dan ada djuga yang tidak diterima samasekali, karena meskipun tidak salah tetapi dianggap kurang perlu. Tetapi pada umumnya usul² perubahan itu tidak bersifat bertentangan dengan rentjana, melainkan bersifat penjempurnaan.

Naskah yang sekarang sudah ada pada kawan² itu adalah naskah yang sudah mengalami perubahan dan perbaikan² berdasarkan usul² yang kita terima. Djika ada diantara kawan² yang masih merasa perlu untuk mengusulkan perubahan² baru lagi, maka saja usulkan supaya hal ini tjukup diselesaikan dengan Komisi Resolusi. (*Suara : „Setudju”*).

Achirnja kawan², sebagai penutup laporan ini ingin saja mengingatkan bahwa, seperti diwaktu yang sudah², Partai kita masih akan banjak menghadapi udjian² yang berat. Tetapi saja bisa mengatakan dengan pasti bahwa kesulitan² yang dihadapi oleh Partai dan oleh kebanyakan anggota Partai kita dimasa yang lampau, begitu pula penjelewengan² yang sebenarnya tidak perlu terdjadi, se-

bab pokoknja jalah terletak pada kurangnya persiapan teori dari pada Partai kita.

Partai kita memang adalah Partai dari suatu negeri yang masih terbelakang, negeri yang masih setengah-feodal dimana proletariatnja tidak saja ketjil djumlahnja djika dibandingkan dengan djumlah kaum tani dan klas burdjuis ketjil umumnja, tetapi djuga usianja masih muda djika dibandingkan dengan proletariat Eropa, dan kebudajaannja masih ketinggalan djika dibandingkan dengan kebudayaan klas burdjuis. Tetapi dengan gembleran perdjuaan politik, disertai dengan pendidikan ideologi dan pimpinan ideologi serta pimpinan politik yang Marxis-Leninis, seperti yang selama ini telah dilakukan oleh Komite Central Partai kita dibawah pimpinan Kawan Aidit (*tepuktangan*), Partai kita tentu akan terus bisa berkembang dan maju memenuhi sjarat² dan kwalitet sebagai Partai Marxis-Leninis (*tepuktangan lama*), seperti Partai² Komunis dinegeri² kapitalis yang sudah maju, sehingga bisa mendjadi kebanggaan Rakjat pekerdja Indonesia dan gerakan buruh sedunia. (*Tepuktangan*).

Dengan Partai yang demikian itu, betapapun djuga besarnya rintangan dan kesulitan yang dihadapi kita pasti akan bisa mengatasinja. (*Tepuktangan*).

Hiduplah Partai Komunis Indonesia („Hidup!“) bersama segenap pentjinta dan ketuanja, Kawan Aidit! („Hidup!“ *Tepuktangan lama semua berdiri*).



PIDATO PENGANTAR UNTUK RENTJANA PERUBAHAN PROGRAM PKI

*Disampaikan oleh Kawan NJOTO, Wakil Sekretaris Djenderal II
CC PKI pada sidang tgl. 9 September 1959*

Kongres yang mulja,
Kawan² yang tertjinta,

Disepandjang sedjarah PKI yang kini hampir berusia 40 tahun Kongres kita sekali ini adalah Kongres yang terbesar. (*Tepuktangan*).

Kongres ini mendjadi perhatian kawan² tetapi djuga lawan² didalamnegeri (*tawa, tepuktangan*); Kongres ini mendjadi perhatian kawan² tetapi djuga lawan² diluarnegeri. (*Tepuktangan*). Kongres ini adalah mertjusuar disamudera perdjuaan klas Indonesia — daripadanya akan memantjar pidjar dan sinar, menerangi djalan perdjuaan proletariat dan Rakjat Indonesia. (*Tepuktangan lama*).

Adalah suatu kehormatan yang besar bagi saja, bahwa kepada saja dipertjajakan tugas mengantarkan Rentjana Perubahan Program Partai ini. Saja pergunakan kesempatan ini untuk menjam-paikan terimakasih yang tidak terhingga kepada Kongres yang besar ini dan kepada Partai kita yang besar! (*Tepuktangan*).

1

Kawan²,

Kalau kita bagi sedjarah modern Indonesia mendjadi dua periode: periode sebelum Revolusi Agustus dan periode sesudahnja, maka njatalah bahwa dari 6 Kongres Partai kita 3 dilaksanakan dalam periode yang pertama dan 3 lagi dalam periode yang kedua. Tiap² Kongres itu merupakan tugu yang menghubungkan masa-lampau, masakini dan masadepan Partai kita. (*Tepuktangan*).

Dari ke-lima² Kongres yang lampau, baru Kongres ke-V-lah yang berhasil merumuskan suatu program yang mendjawab semua masalah pokok dan penting dari revolusi Indonesia setjara menjeluruh dan tepat.

Kongres ke-I yang dilangsungkan di Semarang pada bulan Desember 1921, Kongres ke-II — Djakarta Februari 1924, Kongres ke-III — Kotagede Desember 1924, dan Kongres ke-IV — Solo Djanuari 1947, karena berbagai faktor, karena keterbatasan² historis, belum sempat menjusun program Partai yang menjeluruh. Program² yang disusun ketika itu atau kurang lengkap dan hanya meliputi beberapa soal tertentu saja, atau tidak bebas dari kesalahan² tertentu, "kiri" maupun kanan. Seandainya Kongres ke-V Partai kita djadi berlangsung pada bulan September 1948, nistjajalah pokok² fikiran yang tertjantum didalam Resolusi Konferensi Nasional Agustus '48 "Djalan Baru untuk Republik Indonesia" akan mendjadi pokok² Program Partai. Tetapi baru ditahun 1954 kita sempat melangsungkan Kongres ke-V.

Dengan berhasilnja Kongres Nasional ke-V Partai merumuskan suatu Program yang menjeluruh dan tepat, maka Kongres Nasional ke-V itu benar² merupakan lompatan maju yang penting sekali dalam sedjarah PKI. Kawan Aidit menamakan Kongres itu "membawa PKI dan gerakan revolusioner dinegeri kita puluhan tahun lebih maju". (*Tepuktangan*).

Seperti dikatakan didalam Laporan Umum: "Kongres Nasional ke-V Partai telah memberi djawaban mengenai semua masalah yang penting dan pokok daripada Revolusi Indonesia. Kongres itu telah meletakkan dasar² untuk pekerdjaan Partai yang lebih baik dalam menggalang front persatuan nasional, telah memberikan djawaban tentang semua masalah pokok pembangunan Partai. Perkembangan sesudah Kongres menunjukkan bahwa semuanya ini adalah benar".

Sedjarah 5 tahun terachir ini membenarkan sepenuhnya kesimpulan ini, djuga membenarkan pernyataan Kawan Aidit bahwa Kongres ke-V "membawa PKI dan gerakan revolusioner dinegeri kita puluhan tahun lebih maju". Proses, yang dalam keadaan non-revolusioner akan memakan waktu ber-puluh² tahun, dalam keadaan revolusioner dinegeri kita telah selesai dalam waktu beberapa tahun saja. Selama 14 tahun ini perdjuaan kemerdekaan Rakjat kita berdjalan benar² melalui hukum dialektika: ofensif mendjadi defensif, defensif mendjadi ofensif, dst. Di-hari² Revolusi Agustus 1945-1948 perdjuaan Rakjat ofensif dan pemerintahan² yang memegang kekuasaan ketika itu adalah pemerintah² front persatuan nasional. Antara tahun 1948 dan 1952 ofensif berbalik mendjadi defensif dan pemerintah² yang berkuasa ketika itu adalah pemerintah² kepalabatu Masjumi-PSI dengan Hatta sebagai kepalanja. Mulai tahun 1952, dengan aksentuasi sedjak Kongres ke-V Partai kita, maka perdjuaan Rakjat kembali ofen-

sif, dan dengan hanya interupsi singkat kabinet badut Burhanuddin Harahap (*tawa, tepuktangan*) maka pemerintah² berada ditangan kaum Nasionalis, yang bekerdjasama dengan kaum Islam demokratis dan dengan sokongan Partai Komunis. Demikianlah selama 7 dan chususnya 5 tahun belakangan ini, kaum kepalabatu kian hari kian terpentjil dan kian hari kian terbuka djuga hubungan² mereka dengan kaum imperialis asing.

Seandainya kita tidak mempunjai program yang tepat, program Kongres Maret 1954, tidak mungkin perkembangan ditana-hair kita sepesat sekarang, karena tanpa program yang tepat, proletariat ibarat pedjuang dengan tangan telandjang, pedjuang tanpa sendjata.

Berkat program yang tepat, yang merupakan sendjata strategi dan taktik yang tadjam, diikuti oleh pelaksanaannya yang gemilang dibawah pimpinan Komite Central kita, maka tanahair kita sekarang berwadjah seperti adanja sekarang: sekalipun melalui berbagai rintangan yang pedih dan sakit, tetapi perkembangan tidak kekanan, melainkan kekiri, dan dominasi makin lama bukan makin djatuh ketangan kaum imperialis, kaum tuantanah dan burdjuasi komprador, melainkan ketangan burdjuasi nasional, burdjuasi ketjil, kaum tani dan kaum buruh. (*Tepuktangan*).

Dengan tidak meremehkan rintangan² besar yang masih mungkin dan akan kita djumpai, namun perkembangan negeri kita se'ama ini telah menggugah kegembiraan pada setiap Komunis Indonesia, bahkan pada setiap orang progresif Indonesia dan pada setiap orang progresif diseluruh dunia.

2

Kawan²,

Didalam Laporan Umum dinjatakan: „Berdasarkan pengalaman² selama masa yang kita tindjau, dapatlah kita simpulkan bahwa pada pokoknja, garis politik dan garis organisasi yang sudah ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-V masih tetap berlaku sampai sekarang, sehingga pada pokoknja ia adalah djuga garis daripada Kongres Nasional ke-VI. Tentu saja kita harus mengadakan perubahan² disana-sini; bagian² yang sudah lewat waktu harus kita tiadakan, bagian² yang kurang harus kita tambah, sedangkan yang kurang tepat dibikin lebih tepat".

Berdasarkan penilaian didalam Laporan Umum ini, yang terlebih dulu telah disimpulkan didalam "Rentjana Tesis", maka kepada Kongres ini tidak diadjukan usul atau rentjana program baru,

melainkan diadakan suatu rentjana perubahan atas Program Partai yang telah disahkan oleh Kongres Nasional ke-V.

Sebagai kawan² maklum, Rentjana Perubahan itu telah disusun oleh Sidang Pleno ke-VII Komite Central dan ber-sama² dengan "Rentjana Tesis" dan "Rentjana Perubahan Konstitusi" telah disampaikan keseluruh Partai, bahkan juga kepada orang² patriotik diluar Partai. Rentjana Perubahan Program itu telah didiskusikan didalam be-ribu² diskusi diseluruh negeri, dan sebagai puncak dari pembahasan yang demokratis dan massal itu oleh Konferensi² Daerah² Besar dan Konferensi² Pulau² telah disampaikan kepada CC sejumlah kuranglebih 100 amandemen.

Dengan ini saja dapat memaklumkan kepada Kongres bahwa diantara kuranglebih 100 amandemen itu tidak ada sebuahpun yang bersifat menentang Rentjana Perubahan Program (*tepuktangan*) dan tidak ada sebuahpun yang bersifat prinsipil. Semua amandemen bersifat penjempurnaan. (*Tepuktangan*). Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pada pokoknya Rentjana Perubahan Program telah disetujui oleh seluruh Partai setjara bulat. (*Tepuktangan*).

Ini mendemonstrasikan kebulatan Partai dalam ideologi dan politik. Kebulatan yang mulja ini harus kita pupuk, kita bina, kita tumbuhkan dan kita kembangkan, agar sampai kapanpun, se-lama²-nja Partai kita dilimpahi kebulatan ideologi, kebulatan politik dan kebulatan moral. (*Tepuktangan*).

Sungguhpun diantara kuranglebih 100 amandemen itu tidak ada sebuahpun yang bersifat prinsipil, tetapi amandemen² itu bermutu tinggi dan membuktikan daya-kritis yang tinggi dari Partai kita.

Diantara kuranglebih 100 amandemen itu, disamping sebagian besar yang objektif, juga ada sebagian kecil yang subjektif, yang kurang perlu atau kurang tepat. Juga ada amandemen² yang bersamaan atau hampir bersamaan satu dengan lainnya. Amandemen² yang objektif dan perlu pada umumnya disetujui oleh Sidang Pleno ke-VIII Komite Central untuk dimasukkan kedalam Rentjana Perubahan Program. Jika kawan² bandingkan Rentjana Perubahan Program yang sekarang dikemukakan kepada kawan² sebagai hasil Sidang Pleno ke-VIII CC dengan Rentjana Perubahan Program yang terdahulu hasil Sidang Pleno ke-VII, maka perbedaan² yang terdapat didalamnya adalah akibat amandemen² yang diterima seperti yang saja sebutkan tadi.

Kebulatan Partai kita dalam penerimaan Rentjana Perubahan Program tertjermin pula dalam penilaian yang telah diberikan oleh Konferensi² Daerah² Besar dan Konferensi² Pulau², juga oleh hasil² diskusi fraksi² pusat Partai.

Bahkan orang² terkemuka diluar Partai, mulai pengusaha sampai menteri, mulai perwira, seniman sampai mahaguru, banjak yang menjatakan persetujuannya atas Rentjana Perubahan Program karena seluruh ataupun sebagian dari Rentjana Perubahan Program itu sesuai benar dengan kebutuhan² mereka dan oleh sebab itu merupakan pembelaan atas kepentingan² mereka. (*Tepuktangan*).

Mengenai Konferensi² Daerah² Besar, Konferensi² Pulau² dan diskusi² fraksi² pusat Partai, mereka ada yang mengatakan bahwa Rentjana Perubahan Program "sudah lengkap mencakup dan menjawab" persoalan² yang dihadapi Rakyat kita, ada yang mengatakan bahwa Rentjana Perubahan Program mengandung melulu "kebenaran², dan oleh sebab itu sangat meyakinkan", ada lagi yang menilainya sebagai "analisa setjara padat dan objektif", dan oleh karena itu dengan Rentjana Perubahan Program itu Partai kita "akan lebih mampu mengorganisasi dan memobilisasi perjuangan Rakyat untuk menyelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus '45 sampai ke-akar²nja", (*tepuktangan*), dan ada pula yang sudah membayangkan bahwa dengan Rentjana Perubahan Program kita akan lebih berhasil "menarik massa Rakyat sekeliling Partai".

Ber-turut² akan saja jelaskan peniadaan, penambahan serta perbaikan didalam Rentjana Perubahan ini jika dibandingkan dengan Program Kongres Nasional ke-V.

Terlebih dulu akan saja jelaskan dalam hal² apa Program Kongres ke-V tetap berlaku.

3

Dalam hal² apa Program Kongres ke-V tetap berlaku?

Hal-hal²nya sebenarnya sudah ternjata dari Rentjana Perubahan Program hasil Sidang Pleno ke-VII CC, dari "Rentjana Tesis" tempohari dan sekarang dari Laporan Umum Kawan Aidit.

Hal² yang tetap berlaku itu per-tama² adalah konstataasi bahwa Indonesia sekarang adalah negeri yang belum merdeka penuh dan masih setengah-feodal. Kedua, bahwa musuh kita yang pertama adalah tetap imperialisme Belanda. Ketiga, bahwa Indonesia masih tetap berada dalam tjengkeraman krisis ekonomi. Keempat, bahwa pengangguran, kemiskinan, ketidakadilan ekonomi dan sosial masih terus berlangsung. Selandjutnja, bahwa perlu mentjapai Indonesia yang merdeka penuh dan demokratis; bahwa djalan satu²nja untuk mentjapai tudjuan ini adalah pembentukan persatuan nasional atas dasar persekutuan kaum buruh dan kaum tani dibawah

pimpinan klas buruh ; bahwa kuntji soalnya terletak dalam mengubah imbalan kekuatan antara Rakjat disatu pihak dan musuh² Rakjat dipihak lain, jaitu dalam membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa ; bahwa diatas se-gala²nja klas buruh sendiri harus meningkatkan aktivitetnja dan mendidik dirinja sendiri sehingga mendjadi kekuatan jang besar dan sadar, sehingga mendjadi pelopor dan pemimpin perjuangan seluruh Rakjat Indonesia.

Kita menjimpulkan bahwa semua hal ini tetap berlaku, bukan karena pandangan² jang subjektif, melainkan karena pertimbangan² objektif jang ditjapai melalui diskusi² jang seksama dan mendalam.

Misalnja mengenai watak masjarakat Indonesia sekarang, diskusi² itu telah menindjau adanja tiga kemungkinan : Indonesia sekarang negeri jang masih kolonial dan masih feodal ; Indonesia sekarang sudah merdeka penuh dan sudah demokratis ; atau Indonesia sekarang belum merdeka penuh — djadi masih setengah-djadjahan — dan masih setengah-feodal. Kesimpulan kita ialah bahwa Indonesia sekarang belum merdeka penuh dan masih setengah-feodal.

Mengenai hal jang kedua, ditindjau adanja dua kemungkinan : apakah imperialisme Belanda, ataukah imperialisme Amerika musuh kita nomor satu dewasa ini. Kesimpulan kita ialah bahwa imperialisme Belanda masih tetap musuh kita nomor satu.

Demikianlah seterusnya, tiap² soal ditindjau dari berbagai kemungkinan, dikadji faktor² objektifnja, dan akhirnya disimpulkan. Kesimpulan²nja tidak hanja ternjata dari Rentjana Perubahan Program, tetapi djuga dari Laporan Umum dan dari Rentjana Perubahan Konstitusi.

Karena watak masjarakat kita jang tetap sama seperti ketika kita langsung Kongres ke-V, maka watak revolusi kitapun tetap sama dan tuntutan²njapun pada pokoknja tetap sama. Oleh sebab itu, seperti djuga Program Kongres ke-V, Rentjana Perubahan Program kita sekarang terbagi kedalam dua bagian pokok : Program Umum dan Program Tuntutan. Program Umum kita adalah program Demokrasi Rakjat, program jang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Demokrasi Rakjat sendiri, sedang Program Tuntutan adalah program jang kita adjukan kepada setiap pemerintah sebelum Demokrasi Rakjat.

4

Dalam hal² apa Program Kongres ke-V telah lewat waktu sehingga sekarang perlu ditiadakan ?

Tuntutan² seperti agar MMB dipulangkan, melepaskan Indonesia dari Uni Indonesia-Belanda dan pembatalan KMB, sudah terang tidak perlu lagi. Djuga tuntutan untuk pembatalan embargo terhadap Tiongkok, untuk pampasan perang Djepang, untuk dibatakkannja persetudjuan MSA, untuk adanja pemilihan umum untuk Konstituante, tuntutan² ini sudah lewat waktu.

Tetapi bahwa ada diantara tuntutan² Program Kongres ke-V jang mendjadi lewat waktu, mendjadi daluwarsa, hal ini sedikit-pun tak perlu disesalkan, (*tawa*), bahkan sebaliknya, ia harus membikin kita gembira. Hal² itu mendjadi lewat waktu, karena per-duangan kita menang dan mentjapai hasil ! (*Tepuktangan*). Ini sekali lagi merupakan suatu demonstrasi tentang tepatnja Program Kongres ke-V.

Kemenangan² jang telah ditjapai itu sekarang kita pakukan didalam Rentjana Perubahan Program.

Tetapi ada pula tuntutan² Kongres ke-V jang walaupun telah tertjapai, kelandjutannja sangat mengetjewakan. Ja, tjukup banyak kita alami bahwa sesuatu jang djelek dihapuskan untuk kemudian digantikan oleh hal lain jang sama atau hampir sama djeleknja. (*Tawa*).

Misalnja, undang² larangan mogok jang terkutuk dibawah nama "undang² Tedjasukmana" benar telah dihapuskan, tetapi apakah hakmogok bagi kaum buruh sudah pulih ? Apakah hak itu tidak masih sangat dibatasi dan dalam hal² tertentu mogok bahkan masih dilarang samasekali ?

Misal lain, pengchianat² bangsa, orang² reaksioner, penggelap², koruptor² dan elemen² fasis jang menentang UUD kita tuntutan² supaya dipetjat dan dihukum. Kaharkusmen Sosrodanukusumo dan Suprpto sudah dipetjat, tetapi apakah Kedjaksanaan Agung khususnya dan aparat kedjaksanaan umumnja sudah bersih dari elemen² djelek ? (*Suara dalam ruangan : „Belum !”*). Hakim Sjarif dan hakim Lim Wan-to sudah diontjlang, tetapi apakah aparat kehakiman sudah bersih ? (*Suara : „Belum !”*). Sjafruddin sudah dipetjat, tetapi apakah aparat ekonomi-keuangan khususnya dan aparat sivil umumnja sudah bersih ? (*Suara : „Belum !”*). Zulkifli Lubis, Ahmad Husen, Simbolon, Sumual dan beberapa lainnja sudah dipetjat, tetapi apakah aparat militer sudah bersih ? (*Suara : „Belum !”*). Sumitro dan Tan Goan-po sudah dipetjat, tetapi apakah aparat universiter sudah bersih ? (*Suara : „Belum !”, tawa*).

Misal lain lagi, sudah ada peraturan jang melarang perampasan tanahgarapan kaum tani, suatu peraturan jang menentukan keadaan stand-fast. Tetapi apakah perampasan tanahgarapan kaum tani sudah tidak terdjadi lagi ? (*Suara : „Masih !”*). Apakah pihak

perkebunan mentaati peraturan itu dan apakah aparat negara sudah mentaatinja? (*Suara: „Tidak!”*).

Misal lain lagi, melalui sebuah undang², jaitu Undang² No. 1 tahun 1958, tanah² partikelir ditentukan dibeli oleh pemerintah. Tetapi undang² itu, disamping mengandung hal² yang kurang baik, hal²nja yang baikpun belum dilaksanakan dengan sungguh². (*Tepuktangan*).

Akan saja achiri tjontoh² ini dengan soal merindas dan membasmi gerombolan DI dan gerombolan² teroris lainnja serta soal memberi hak kepada kaum tani untuk angkat sendjata membela diri terhadap gerombolan DI dan gerombolan² teroris lainnja. Dalam hal anti-DI dan anti-gerombolan² teroris lainnja, sedjak Kongres ke-V 5 tahun j.l., memang banjak sudah kita tjapai kemajuan. DI, yang tadinja begitu dianakemaskan oleh pemerintah² Hatta-Natsir-Sukiman (*tawa*) dan kemudian BH (*tawa*), sudah dinjatakan sebagai musuh negara yang harus dibasmi. (*Tepuktangan*). Begitu djuga apa yang dinamakan "PRRI-Permesta", yang kekuatan pokoknja telah dipatahkan, berkat kerdjasama Tentara dan Rakjat. Tetapi selain pembentukan OKD², OKN² atau OPR² yang djuga masih terbatas, kepada kaum tani umumnja belum diberikan hak untuk angkat sendjata membela diri terhadap DI-TII, "PRRI-Permesta" ataupun gerombolan² teroris lainnja. Malahan, masih terlalu sering pikiran dititikberatkan kepada "menambah pasukan TNI" yang memakan persiapan lama dan ongkos banjak daripada kepada usaha memobilisasi kekuatan Rakjat yang terang dekat dan sederhana. (*Tepuktangan*). Ini mengakibatkan bahwa di Jawa Barat, di Sumatera maupun di Sulawesi kaum pemberontak kontra-revolusioner masih mempunyai kekuatan yang tidak bisa diabaikan begitu sadja dan bahwa gembong²nja belum djuga tertangkap atau terbunuh. (*Tawa*). Padahal kalau memobilisasi kekuatan Rakjat dan kerdjasama dwitunggal Tentara dan Rakjat yang diutamakan, gerombolan² teroris tentu akan mengalami pengalaman bukan sebagai "ikan didalam air" tetapi sebagai "ikan didalam minjakgoreng". (*Tawa, tepuktangan*).

Apa² yang tersebut dalam tjontoh² ini terdjadi, karena pihak yang berkuasa disatu pihak harus bertindak, akibat desakan² Rakjat yang deras, tetapi dipihak lain mereka tidak rela menerima tuntutan² Rakjat dan makaitu mentjoba untuk mempertahankan yang lama atau menghidupkan kembali yang lama dalam bentuk yang baru. (*Tawa*). Berdasarkan pengalaman² dan kenjataan² ini maka didalam Rentjana Perubahan Program sekarang ini diadjudkan perumusan baru yang memformulasikan pendirian dan hasrat Rakjat terbanjak, baik mengenai hakmogok, elemen² djelek dalam peme-

rintahan, hak kaum tani mempertahankan tanahgarapan, nasionalisasi tanah² partikelir, pembasmian gerombolan² teroris maupun mengenai soal² lainnja yang serupa.

5

Kemudian, dalam hal² apa Program Partai kita ditambah?

Selama 5 tahun ini banjak peristiwa² besar terdjadi, peristiwa² didalam kehidupan Partai maupun yang meliputi seluruh bangsa.

Imperialisme Amerika Serikat makin lama makin mendesak kedudukan imperialisme Belanda dan makin mendapat kedudukan dilapangan ekonomi, politik dan kebudayaan di Indonesia. Ini dilakukan Amerika disamping mereka bersekongkol dengan Belanda didalam NATO dan bersekongkol pula dalam ber-sama² mendjadjah Irian Barat sesuai dengan tudjuan pakt agresif SEATO. Yang paling kurangadjar adalah intervensi kaum imperialis Amerika ketika petjah pemberontakan kontra-revolusioner "PRRI-Permesta". Iring²an kapalperang² mereka meng-geretak² kita di-batas² perairan kita bahkan sudah beberapa kali melanggar batas perairan kita dan kekurangadjaran mereka memuntjak ketika mereka "memberitahukan" kepada pemerintah RI akan mendaratkan pasukan²nja di Pakanbaru. Adalah tekad yang kuat dari Rakjat Indonesia yang melawan usaha itu mati²an yang telah mendorong pemerintah untuk menolak pendaratan gila itu. (*Tepuktangan lama*).

Berhubung dengan kenjataan² ini, maka didalam Rentjana Perubahan Program dirumuskan bahwa, disamping imperialisme Belanda merupakan musuh nomor satu Rakjat Indonesia, imperialisme Amerika sekarang merupakan musuh Rakjat Indonesia yang paling berbahaya. (*Suara: „Betul!", tepuktangan*).

Dan berhubung dengan kesimpulan ini maka kita rumuskan tuntutan baru, sbb.: Perlakukan perusahaan² AS sama dengan perusahaan² Belanda, djika AS terus-menerus mempersendjatai gerombolan² kontra-revolusioner atau membantu Belanda dengan sendjata dalam agresinja terhadap RI. (*Suara: „Betul!", tepuktangan lama*). Hal ini sudah diutjapkan oleh Presiden Sukarno dalam *Manifesto Politik* dan sudah kita beritahukan kepada Jones. (*Tepuktangan*).

Mengenai imperialisme Belanda, perdjjuangan kita terhadapnja telah menempuh lompatan madju sedjak Rakjat Indonesia, dipelopori oleh kaum buruhnja mengambilalih praktis semua perusahaan mereka.

Berhubung dengan ini tuntutan kita sekarang adalah: mobilisasi

dan koordinasi seluruh kekuatan nasional untuk merebut kemerdekaan ekonomi yang lebih besar, dengan jalan a.l. menasionalisasi semua perusahaan² Belanda termasuk modal Belanda didalam perusahaan² tjampuran, a.l. BPM. (*Tepuktangan lama*). Kita juga menuntut agar perusahaan² bekas milik Belanda dijadikan perusahaan² pemerintah dan agar ditjegah pemartikeliran perusahaan² pemerintah.

Mengenai perdjuaan kaum tani, Partai kita telah menjimpulkan pengalaman²nja dan merumuskan tugas² selanjutnja ketika Partai melangsungkan untuk pertama kalinya Konferensi Nasional Tani beberapa waktu j.l.

Berhubung dengan ini kita masukkan kedalam Rentjana Perubahan Program jaitu didalam Program Tuntutan kesimpulan² terpenting dari Konferensi Tani itu, yakni: pertama, agar diperbaiki keadaan kaum tani dengan mewadjabkan tuantanah² menurunkan sewatanah, sehingga kaum tani penjewa tanah menerima minimum 60% dan tuantanah menerima maximum 40% dari hasil panen (*tepuktangan*); kedua, agar dibatasi milik tanah tuantanah serta dibeli tanah² kelebihan dari tuantanah itu dengan tjara dan harga yang ditentukan oleh pemerintah dan agar dibagikan tanah² itu kepada kaum tani takbertanah dan tanimiskin (*tepuktangan*); ketiga, agar disita tanah dan milik lain dari kaum tuantanah yang memihak gerombolan pengatjau kontra-revolusioner dan gerombolan² teroris lainnja, dan agar dibagikan tanah² itu kepada kaum tani takbertanah dan tanimiskin. (*Tepuktangan*).

Mengenai perdjuaan untuk suatu Konstitusi yang demokratis, perkembangannja sudah demikian rupa sehingga kita sekarang kembali sudah ke UUD 1945.

Berhubung dengan ini kita rumuskan tuntutan: Laksanakan UUD 1945 sesuai dengan djiwa, semangat dan watak Revoiusi Agustus 1945, yang anti-imperialis dan demokratis.

Mengenai susunan pemerintah, Presiden Sukarno telah melantunkan Konsepsinja yang terkenal sebagai Konsepsi Presiden. Konsepsi itu, seperti diketahui, pada pokoknja mengandjurkan dibentuknja suatu pemerintah gotongrojong, djadi suatu pemerintah koalisi nasional atau boleh dinamakan Kabinet Ho-lopis-kuntulbaris. (*Tepuktangan*).

Berhubung dengan ini, sekalipun Program Tuntutan yang kita susun bisa dilaksanakan oleh setiap pemerintah yang menghendaki bantuan Rakjat, apabila pemerintah mau menempuh jalan kemerdekaan nasional, demokrasi dan kemadjuan bagi Indonesia, tetapi tegas² pula kita njatakan bahwa Program Tuntutan itu yang

paling baik ialah djika dilaksanakan oleh suatu pemerintah gotongrojong. (*Tepuktangan*).

Dan berhubung dengan Sidang Pleno ke-IV Komite Central, yang barangkali merupakan Sidang Pleno CC yang terpenting selama masa antara Kongres yang lalu hingga Kongres yang sekarang, yang telah merumuskan sembojan "selesaikan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja", maka didalam Rentjana Perubahan Program pendirian suatu pemerintah Demokrasi Rakjat kita rumuskan djuga sebagai penjelesaian tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja.

Demikianlah tambahan² terpenting yang dimasukkan kedalam Rentjana Perubahan Program. Penambahan ini tidak mengurangi sedikitpun kebenaran Program Kongres ke-V diwaktu yang sudah dan penambahan itu mendjadi perlu se-mata² karena perkembangan keadaan, djadi karena adanya situasi² baru.

6

Sekarang, dalam hal² apa Program Kongres ke-V kurang tepat sehingga sekarang harus dibikin lebih tepat?

Baiklah segera saja terangkan, bahwa kurang-tepatan inipun pada umumnja akibat dari perkembangan keadaan. Seperti kawan² maklum, adalah sudah mendjadi hukum bahwa apa yang tepat buat satu ketika belum tentu tepat buat ketika lain.

Dalam Program Umum misalnja, djika tadinja kewadjaban beladjar yang tjuma² bagi anak lelaki maupun perempuan ditentukan sampai umur 12 tahun, sekarang kita robah mendjadi sampai umur 13 tahun, a.l. mengingat kenjataan, bahwa djika tadinja anak beladjar dinegeri kita dimulai pada umur 6 tahun, sekarang dimulai pada umur 7 tahun.

Dalam Program Tuntutan, untuk perbaikan nasib kaum buruh, djika tadinja kita menitikberatkan pada tuntutan mendjamin semua hak dan kebebasan kepada kaum buruh untuk membela kepentingan²nja yang sah, sekarang, disamping meneruskan tuntutan ini dikemukakan perumusan agar diperbaiki upah riil kaum buruh dan pegawai negeri dan agar diperbaiki djaminan sosial dan sjarat² kerdja mereka.

Dalam Program Tuntutan djuga, untuk perbaikan nasib kaum tani, djika tadinja yang kita tuntutan dilarang adalah perampasan tanahgarapan kaum tani terutama dalam hubungannja dengan "perkebunan² asing", sekarang "asing"nja kita tiadakan dan tuntutan pelarangan itu kita bela dalam hubungannja dengan semua

perkebunan, karena kenjataanja perampasan tanahgarapan sekarang dilakukan terkadang oleh perkebunan² asing, terkadang lagi oleh perkebunan² bukan asing; djika tadinja belum djelas pembelaan kita terhadap nasib pamongdesa, ini sekarang kita perdjelas; begitu djuga, akibat Konfernas Tani jang bersedjarah itu, sekarang kita perdjelas pula pembelaan terhadap kaum nelajan dan terhadap koperasi² Rakjat.

Dalam Program Tuntutan pula, mengenai Irian Barat, djika tadinja tuntutan kita hanja berbunji "mempertahankan Irian Barat tetap sebagai daerah Republik Indonesia", sekarang, sesudah mendapatkan pengalaman² akibat berkembangnja gerakan pembebasan Irian Barat, tuntutan kita rumuskan sbb.: "Perhebat lebih landjut perdjjuangan pembebasan Irian Barat dengan djalan menjusun kekuatan dalam negeri, menggalang semua potensi nasional, modernisasi perlengkapan AD, ALRI dan AURI, dan menarik solidaritet internasional, untuk menghadapi segala kemungkinan". (*Tepuktangan*).

Demikianlah, kawan², beberapa tjontoh tentang bagaimana kita bikin Program kita lebih tepat.

Penjempurnaan² ini adalah penting, karena bagi kita kaum Komunis, Program Partai haruslah perumusan jang paling representatif mengenai kepentingan² objektif massa Rakjat serta pikiran dan perasaan massa Rakjat tentang hal² tertentu pada ketika² tertentu.

7

Kawan²,

Pengalaman² apa jang kita perdatap selama kita 5 tahun memperdjjuangkan Program Kongres ke-V?

Pada pokoknja ada dua matjam pengalaman: jang tepat dan jang tidak tepat.

Jang tepat ditandai oleh dua tjiri: pertama, memahami hubunganja antara Program dan kehidupan aktuil; kedua, memahami hubunganja antara Program Umum dan Program Tuntutan.

Barangsiapa hanja kenal Program tetapi tak kenal kehidupan aktuil, mereka itu seperti orang² kenal sendjata tetapi tak kenal sasaran. (*Tawa*). Sebaliknya, barangsiapa hanja kenal kehidupan tetapi tak kenal Program, mereka itu seperti orang² kenal sasaran tetapi tak kenal sendjata. Ke-dua²nja tidak bisa menembak! (*Tepuktangan*).

Memahami hubungan antara Program dan kehidupan aktuil ber-

arti memahami bahwa ada persatuan tetapi djuga ada pertentanganja antara jang dua itu. Ada persatuan antara Program dan kehidupan aktuil, karena Program itu sendiri lahir dari kehidupan aktuil dan karena Program itu mentjerminkan kehidupan aktuil dalam perkembangannja jang progresif. Tetapi djuga ada pertentangan antara Program dan kehidupan aktuil, karena banyak hal² jang sudah ada didalam Program tetapi belum ada didalam kehidupan, sehingga harus diubah, harus dirombak kehidupan itu sampai ia mendjadi sesuai dengan jang dirumuskan didalam Program.

Memahami hubungan antara Program Umum dan Program Tuntutan berarti memahami bahwa Program Tuntutan adalah sebagian daripada Program Umum dan makaitu memperdjjuangkanja harus memudahkan djalan bagi Program Umum, dan sebaliknya, Program Umum hanja bisa dilaksanakan melalui pelaksanaan Program Tuntutan.

Seperti dikatakan Kawan Aidit didalam Laporrannja kepada Sidang Pleno ke-IV Komite Central: "Program Umum dengan Program Tuntutan adalah berbeda, tetapi satusamalain ada hubungannja, tidak terpisah".

Lebih landjut Kawan Aidit dalam Sidang Pleno tsb. mengatakan:

"Dengan program umumnja PKI mengemukakan apa jang mendjadi tudjuannja, apa jang diperdjjuangkannja dalam seluruh tingkat revolusi nasional dan demokratis, atau disebut djuga tingkat revolusi burdjuis-demokratis. Pokok² daripada program umum ini tidak akan berubah selama tuntutan² Revolusi Agustus 1945 jang bersifat nasional dan demokratis belum dilaksanakan sampai ke-akar²nja. Djadi, program umum akan tetap mendjadi program PKI selama Demokrasi Rakjat belum mendjadi kenjataan. Program Umum PKI adalah program jang terusmenerus harus dipropagandakan oleh kaum Komunis dan simpatisan² Komunis sampai selesainja pelaksanaan tuntutan Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja. Program Umum PKI adalah program djangka pandjang atau dasar kerdjasama taraf tinggi antara PKI dengan semua partai, dengan semua golongan dan perseorangan jang demokratis dan patriotik lainnja dalam menjelesaikan seluruh tuntutan Revolusi Agustus".

"Tetapi PKI tidak hanja mempropagandakan program djangka pandjangnja, tidak hanja mempropagandakan program umumnja. PKI djuga menundjukkan djalan untuk memetjahkan soal² kongkrit sekarang. Disamping mempropagandakan program umumnja, PKI mempersatukan Rakjat berdasarkan tuntutan² politik dan

ekonomi yang kongkrit sekarang dan mendjadikan tuntutan kongkrit sekarang sebagai alas (platform) untuk bekerdjasama waktu sekarang dengan semua partai, semua golongan dan perseorangan yang demokratis dan patriotik".

Demikian pendjelasan Kawan Aidit.

Adapun mengenai pengalaman yang tidak tepat, inipun ada dua matjamnja : pertama, yang tidak melihat perbedaannja dan maka itu mentjampuradukkan Program Umum dan Program Tuntutan ; dan kedua, yang tidak melihat salinghubungannja dan makaitu memisah²kan setjara mutlak Program Umum dan Program Tuntutan.

Kesalahan yang pertama membikin kita tidak meletakkan titik-berat pada Program Tuntutan dan langsung memperdjuangkan Program Umum, sehingga dengan demikian mempersempit front, sedang kesalahan yang kedua bisa membikin kita berhenti pada Program Tuntutan dan tidak memperdjuangkannja untuk tudjuan Program Umum.

Sedikitbanjaknja kesalahan² seperti ini pernah ada didalam Partai, kalau tidak setjara nasional, setjara lokal, kalau tidak untuk waktu lama, untuk waktu singkat. Tetapi djustru pengalaman² itu, sekalipun lokal dan untuk waktu singkat, telah membikin Partai kita lebih dewasa dan lebih matang dalam memahami, menggunakan dan memperdjuangkan Program Partai. Kesalahan diwaktu yang sudah akan menghindarkan kesalahan yang sama diwaktu yang akan datang, asal kita menjimpulkan kesalahan² itu dan mendjadikannja peladjaran. Ini sangat penting bagi perkembangan Partai kita di-waktu² yang akan datang.

8

Bagaimana sebenarnja hubungan setjara teori dan setjara praktek antara Program Umum dan Program Tuntutan ?

Hubungan ini sesungguhnya adalah hubungan antara revolusi dan reform, yang seperti dikatakan oleh Kawan Lenin hanya bisa didefinisikan setjara presis dan tepat oleh Marxisme.

Untuk memahami masalah ini setjara setepatnja, adalah sangat berguna djika kita mempeladjar tulisan² dan pidato² Kawan Lenin mengenai Revolusi Sosialis Oktober, yang terutama disusunnja antara tahun 1918 dan 1922.

Didalam salahsatu tulisannja itu Kawan Lenin menegaskan bahwa tingkat revolusi yang satu dan tingkat revolusi yang lain "tidak dipisahkan..... oleh tembokbesar Tiongkok". Djadi, dari sini dapatlah kita menarik kesimpulan, bahwa antara sesuatu Pro-

gram Umum dan sesuatu Program Tuntutan pada sesuatu tingkat revolusi tertentupun tidak ada "tembokbesar Tiongkok" yang memisahkannja.

Marilah saja ambil tjontoh yang kongkrit.

Didalam Program yang belum diubah, jaitu Program Kongres ke-V, kita menuntut dilepaskannja Indonesia dari Uni Indonesia-Belanda, dikirimkannja kembali MMB dan dibatakkannja KMB didalam Program Tuntutan, tetapi djuga didalam Program Umum. Artinja, ketika itu kita mempersiapkan diri untuk kemungkinannja tuntutan² itu baru terlaksana didalam Demokrasi Rakjat. Tetapi apa djadinja ? Kita masih djauh atau agak djauh dari Demokrasi Rakjat, tuntutan² pembatalan "Uni", pemulangan MMB dan pembatalan KMB itu sudah terlaksana ke-tiga²nja.

Sebaliknya, didalam Rentjana Perubahan Program sekarang kita memasukkan soal Irian Barat didalam Program Tuntutan. Tetapi ini bukannya berarti kepastian bahwa Irian Barat akan bebas sebelum Demokrasi Rakjat. Kita harus siap untuk kemungkinannja Irian Barat belum berhasil kita bebaskan, sekalipun Demokrasi Rakjat sudah ditjapai di-bagian² lain Indonesia. Se-kurang²nja teoritis kemungkinan ini ada, dan praktisapun dia bukan suatu kemustahilan. (*Tepuktangan*).

Bahwa sebagian dari apa yang tertjantum didalam Program Umum bisa ditjapai sebelum Demokrasi Rakjat, sedang sebaliknya sebagian dari apa yang tertjantum didalam Program Tuntutan bisa belum tertjapai diwaktu Demokrasi Rakjat sudah berdiri, kemungkinan² yang bukan "harga mati" (*tawa*) ini hanya membuktikan tidak adanja "tembokbesar Tiongkok" yang memisahkan antara Program Umum dan Program Tuntutan.

Djadi, bagaimana hubungan antara Program Umum dan Program Tuntutan, atau antara tuntutan pokok dan tuntutan bagian, antara revolusi dan reform ?

Kawan Lenin memberikan batasan begini : "reform adalah hasil-sampingan dari perdjuangan kelas revolusioner proletariat". Hubungan ini, kata Kawan Lenin selandjutnja, "merupakan dasar daripada taktik revolusioner proletariat", merupakan "ABC"nja.

Disepandjang perdjuangan kelas revolusioner proletariat, tuntutan-tuntutan bagian atau reform² dimenangkan sebagai "hasil-sampingan". Tetapi tanpa dia, tidak mungkin kita memenangkan tuntutan pokok atau revolusi. Tertjapainja Program Tuntutan djadinja meretas djalan bagi tertjapainja Program Umum.

Barangsiapa mentjoba memenangkan Program Umum tanpa melalui perdjuangan untuk Program Tuntutan, mereka itu tak tahu samasekali ABC-Marxisme tentang taktik. (*Tawa*). Mereka men-

djalani kesalahan "kiri". Sebaliknya, barangsiapa puas dengan hasil² reform dan berhenti pada hasil² reform, tidak meneruskannya kepada pentjapaian Program Umum, mereka itu bukan Marxis samasekali. (*Tepuktangan*). Mereka mendjalani kesalahan kanan. Untunglah bahwa dua matjam penjelewengan besar ini pada pokoknja tidak terdapat lagi didalam Partai kita. (*Tepuktangan*).

9

Kawan²,

Djika kita didalam Kongres ini mengkonstatasikan bahwa pada pokoknja penjelewengan² besar, baik jang ke "kiri" maupun jang kekanan mengenai pelaksanaan Program Partai, tidak terdapat lagi didalam Partai kita, kitapun sedar bahwa keadaan jang baik ini bukannya terdjadi dalam waktu sehari-semalam.

Peranan besar telah dimainkan oleh Plan 3 Tahun ke-I Pendidikan.

Kawan Aidit mengatakan bahwa "persatuan didalam Partai hanya mungkin djika didasarkan atas persatuan fikiran, persatuan ideologi, jaitu fikiran atau ideologi Marxisme-Leninisme". Kemudian dikatakan oleh Kawan Aidit, bahwa "soal persatuan dalam fikiran dikalangan kaum Komunis adalah soal pendidikan bagi seluruh anggota Partai".

Dengan Plan 3 Tahun ke-I Pendidikan jang telah kita lakukan ialah "pendidikan tentang prinsip² fundamenteil Marxisme-Leninisme, dan pendidikan mempertahankan pandangan klas, sikap klas dan metode klas, melawan semua ideologi jang salah".

Ketika mengantarkan usul Plan 3 Tahun ke-I Pendidikan itu didalam Sidang Pleno ke-IV CC saja telah mengatakan bahwa "djika rantjangan ini kita selesaikan, maka tiga tahun lagi kita akan mempunyai beberapa ribu kader jang dididik langsung oleh CC, oleh Provcom² dan Komite² lainnya".

Dari laporan jang akan disampaikan Kawan A. Anwar Sanusi saja kira akan ternyata bahwa djatah jang dirantjangkan ini telah tertjapai dengan baik.

Didalam Sidang Pleno ke-IV CC djuga telah dikatakan bahwa "djika rentjana ini kita laksanakan, maka kita akan terbebas dari perdebatan² jang tidak perlu, dan kita akan mempersoalkan semua soal kita dengan titikpangkal jang satu dan sama, dengan landasan jang satu dan sama. Ini akan lebih mendewasakan Partai kita".

Demikianlah peranan plan pendidikan jang kita bajangkan

tempohari, dan demikianlah peranan plan pendidikan menurut pengalaman kita sekarang.

Karena kita telah menjelesaikan Plan 3 Tahun ke-I Pendidikan itu dengan baik, maka jang dikatakan Kawan Aidit "persatuan fikiran" itu telah terdjamin didalam Partai, dan djustru inilah jang telah membikin Partai kita, seluruh Partai kita, melaksanakan Program Partai setjara tepat, setjara pada pokoknja terbebas dari penjelewengan² serius ke "kiri" maupun kekanan. (*Tepuktangan*).

Seandainya tidak ada Plan 3 Tahun ke-I Pendidikan, tak tahulah kita apa akan djadinja Partai kita sekarang: mungkin ia besar dalam djumlah anggota, tetapi tidak bersatu dalam fikiran. Ini akan menjalahi dalil Marx, bahwa sekalipun benar kekuatan proletariat itu per-tama² dalam djumlahnja, tetapi djumlah sadja tidak tjukup dan jang akan membikin bilangan djumlah itu berbitjara adalah persatuannja. (*Tepuktangan*).

Plan 3 Tahun ke-I Pendidikan telah mempersatukan Partai dalam fikiran. Plan 3 Tahun ke-II Pendidikan tentulah harus dan akan lebih memperkokoh persatuan fikiran didalam Partai itu. (*Tepuktangan*).

10

Sampailah saja sekarang membitjarakan peranan slogan atau sembojan didalam perdjjuangan mentjapai Program Partai.

Tentang menetapkan dan menggunakan sembojan Partai kita telah mempunyai pengalaman² jang tidak sedikit.

Sedjak tahun 1950 kita mempunyai satu sembojan pokok, jang pelaksanaannja ternyata telah menentukan arah perdjjalanan sedjarah dinegeri kita. Sembojan pokok itu ialah: *Batalkan KMB!* (*Tepuktangan*).

Dengan sembojan inilah kita melangsungkan perdjjuangan anti-imperialisme, dengan sembojan inilah kita menggalang front persatuan nasional, dengan sembojan ini pulalah kita melaksanakan pembangunan Partai.

Sekarang, sesudah semakin djauh kita terdjarak dari pembatalan KMB, semakin djelaslah bagi setiap kita betapa besar, bahkan betapa menentukan peranan slogan "Batalkan KMB!" itu dalam kehidupan politik, ekonomi, kultur dan militer dinegeri kita.

Didalam Kongres Nasional ke-V Partai kita menetapkan sembojan pokok "*Mentjapai kemerdekaan nasional jang penuh dan perubahan² demokratis*", dengan melalui "Djalan ke Demokrasi Rakjat bagi Indonesia".

Djuga sembojan tentang "kemerdekaan penuh dan demokrasi" ini telah memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan politik dinegeri kita, dan dengan sembojan ini pulalah kita melaksanakan dua tugas urgen menggalang front persatuan dan membangun Partai.

Didalam Sidang Pleno ke-IV CC yang terkenal itu, sembojan pokok Kongres ke-V itu dituangkan pula kedalam bentuk baru yang lebih sesuai dengan bentuk² historis negeri kita dan dengan tuntutan situasi yang aktuil. Sembojan tsb. adalah: *Selesaikan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja!*

Kedua sembojan yang hakekatnja sama ini — "mentjapai kemerdekaan nasional yang penuh dan perubahan² demokratis" dan „menjelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja" — adalah sembojan² strategis kita, yang akan tetap berlaku sampai terdjadi perubahan² fundamentil dalam masyarakat negeri kita, perubahan² Demokrasi Rakjat.

Dan setelah pada hari 21 Februari 1957 Presiden Sukarno memaklumkan Konsepsi Presiden yang mendjadi masjhur itu, Sidang Pleno ke-V CC segera sesudah itu, merumuskan sembojan baru: *"Ubah imbangan kekuatan untuk melaksanakan Konsepsi Presiden Sukarno 100%"*.

Ini adalah sembojan untuk mentjapai suatu Pemerintah Koalisi Nasional atau suatu Pemerintah Gotongrojong, sembojan yang mentjerminkan hasrat yang paling adil dari massa Rakjat sebelum kita sampai pada Demokrasi Rakjat. Dan sembojan tersebut masih dalam rangka perjuangan reform dilapangan politik, sembojan taktis.

Pengalaman kita mengenai sembojan² taktispun sudah agak banyak. Djika sesuatu sembojan dirumuskan setjara tepat, dan djika untuk memperjuangkannya dilakukan persiapan² yang tjukup, maka sembojan² demikian biasanja mentjapai hasil. Kita ingatlah bagaimana segera sesudah Kabinet Sukiman djatuh kita rumuskan sembojan taktis "Bentuk kabinet yang membebaskan semua tahanan Razzia Agustus" — sembojan ini mentjapai hasil (*tepuktangan*); kita ingatlah bagaimana segera sesudah Kabinet Wilopo djatuh kita rumuskan sembojan taktis "Bentuk kabinet tanpa Masjumi" — sembojan ini mentjapai hasil. (*Tepuktangan*). Begitulah, dalam menghadapi setiap situasi politik yang gawat Partai selalu tampil dengan sembojannja yang tersendiri. Ini kita lakukan diwaktu kita mendorong Pemerintah untuk tegas² membasmi DI-TII, ini kita lakukan diwaktu kita mendorong Pemerintah melawan intervensi Amerika, subversi Kuomintang dan kontra-revolusi "PRRI-Permesta". Disaat melabrak "PRRI-Permesta" itu kita lantjarkan sem-

bojan "dwitunggal Tentara dan Rakjat", dan sesudah perusahaan² bekas Belanda yang diambilalih oleh kaum buruh dioper oleh Pemerintah, kita lantjarkan sembojan: "pimpinan patriotik, pertinggi produksi, tjegah korupsi dan sabotase, djamin demokrasi dan perbaiki nasib buruh". (*Tepuktangan*). Sembojan² taktis ini, satu demi satu, telah berlaku sebagai obor yang bernjala dan didjundjung dibagian depan barisan kita, yang menerangi djalan kita dan yang membawa keadaan madju.

Pada saat² achir² ini kitapun merumuskan sebuah sembojan baru dalam memimpin perjuangan kaum tani, yang bunjinja singkat sekali, tetapi yang djika berhasil kita laksanakan akan menentukan sedjarah yang pandjang, jaitu sembojan: „6 : 4". (*Tepuktangan*).

Dan mendjelang Kongres kita yang sekarang ini, Komite Central telah merumuskan 4 sembojan pokok yang terkenal.

Sembojan pertama "Dengan PKI didepan meneruskan perjuangan Rakjat untuk Indonesia yang merdeka penuh dan demokratis" ditudjukan untuk merealisasi rol pimpinan Partai dalam perjuangan mentjapai Indonesia yang merdeka penuh dan demokratis, djadi untuk mentjapai tudjuan strategis.

Sembojan kedua "Perbaiki pekerdjaan front nasional, pentjilkan lebih landjut kekuatan kepalabatu" (*tepuktangan*) ditudjukan untuk menggalang kekuatan bangsa seluas mungkin guna mengalahkan kaum kepalabatu. Sembojan ini adalah sembojan untuk tudjuan taktis maupun tudjuan strategis.

Sembojan ketiga "Perkuat front internasional anti-kolonial dan untuk perdamaian" (*tepuktangan*) adalah medium politik luar-negeri Partai, yang berarti penerusan setjara konsekwen dari keputusan² Konferensi Asia-Afrika yang besar di Bandung itu.

Sembojan keempat "Landjutkan pembangunan Partai diseluruh negeri yang bersatu erat dengan massa, yang terkonsolidasi dilapangan ideologi, politik dan organisasi" (*tepuktangan*) adalah sembojan garis umum pembangunan Partai.

Ke-empat² sembojan ini harus per-tama² diabdikan kepada sembojan "Untuk Demokrasi dan Kabinet Gotongrojong" (*seruan: „Hidup!, Hidup!", tepuktangan lama*) djadi untuk tudjuan taktis Partai yang terpenting, tetapi yang sekaligus akan mendekatkan kita pada tudjuan strategis.

Dalam perjuangan politik sembojan tidak bisa ditinggalkan. Ia adalah sjarat mutlak. Sudah tentu, yang saja maksudkan, sembojan yang tepat. (*Tawa*). Kitapun tentu sadja harus mengingat, bahwa sembojan yang tepat sadja tidak tjukup, dan bahwa yang tidak kalah pentingnja adalah persiapan² disegala bidang untuk terlaksananya sesuatu sembojan.

Apakah sesungguhnya sembojan itu?

Sembojan, tidak lain adalah, perumusan yang singkat dan jelas tentang sesuatu tujuan atau soal, yang diadakan pada saat² tertentu dalam keadaan² tertentu.

Djuga dalam kehidupan-intern Partai kita membutuhkan dan memang menggunakan sembojan², seperti misalnja sembojan "turun kebawah" atau sembojan yang dalam Kongres ini diadakan jaitu "tahu Marxisme-Leninisme dan kenal keadaan".

Pendeknja, didalam kehidupan Partai maupun dalam kehidupan politik nasional atau internasional, sembojan itu selalu diperlukan. Dan pengalaman Partai kita selama ini, khususnja antara Kongres Nasional ke-V hingga Kongres yang sekarang ini, telah mengadjar kepada kita betapa ruginja djika kita tidak memahami dan makaitu mengabaikan peranan sembojan, sebaliknya, betapa menguntungkanja djika kita memahami dan makaitu menempatkan dan menggunakan se-tepat²nja peranan sembojan² revolusioner dalam perjuangannya revolusioner.

11

Kawan²,

Perjuangan kelas revolusioner selalu adalah perjuangan yang bersegi banyak, perjuangan yang meliputi kepentingan kaum buruh, kaum tani, kaum inteligensia, dll, perjuangan yang mempunyai segi² politik, ekonomi dan kulturil, perjuangan yang mempunyai segi² nasional dan internasional.

Oleh sebab itu perjuangan kelas revolusioner selalu menghimpun, selain kaum buruh djuga kaum tani, kaum inteligensia, dan elemen² demokratis lainnja; ia selalu menyatakan dirinja dengan medium² politik seperti parlementarisme, rapat² dan demonstrasi² massa, pers dan literatur politik, medium² ekonomi seperti pemogokan dan boikot, salingbantu dan gotongrojong, dan medium² kulturil seperti musik, sastra, film, senidrama, ilmu, dll.

Tiap² segi sudah tentu mempunyai pernyataan²nja sendiri², bentuknja sendiri², tetapi kesemuanya selalu berputar pada satu poros, dan poros itu ialah tujuan politik yang langsung yang menjadi tuntutan keadaan pada satu² ketika, sebagaimana yang diformulasikan didalam sembojan² taktik Partai.

Bukankah kita semua masih ingat bahwa ketika sembojan taktik Partai yang pokok "Batalkan KMB!", segala sesuatu berdjalan dengan "pembatalan KMB" sebagai poros? Gerakan buruh dan gerakan pemuda, gerakan tani, wanita, veteran, mahasiswa dan kebudayaan, semuanya ketika itu untuk pembatalan KMB.

Hanya berkat pemusatan yang demikianlah maka sembojan taktik Partai yang pokok itu mentjapai hasilnja dengan gilang-gemilang.

Sekarang, kita melangsungkan Kongres Nasional ke-VI Partai ini dibawah sembojan "Untuk Demokrasi dan Kabinet Gotongrojong". Ini berarti bahwa aktivitas Partai di-hari², di-bulan² dan di-tahun² sesudah Kongres ini akan ditujukan untuk mempertahankan hak² dan bahkan meluaskan hak² demokrasi bagi Rakjat, dan untuk terbentuknja suatu kabinet gotongrojong, yang seperti dikatakan Presiden Sukarno ketika melantik anggota² DPA, Depernas dan Bapekan pertengahan bulan j.l. merupakan sjarat mutlak bagi kelangsungan hidup Republik kita. (*Tepuktangan*).

Djadi, untuk demokrasi dan kabinet gotongrojong haruslah menjadi poros yang akan memutar seluruh roda perjuangan revolusioner dinegeri kita untuk tahun² j.a.d. ini. (*Tepuktangan*).

Dan djika kita bandingkan sembojan "Batalkan KMB!" dari Kongres j.l. dengan sembojan Kongres sekarang "Untuk Demokrasi dan Kabinet Gotongrojong", maka djelaslah dimana letak perbedaannya: dulu kita ditjoba diisolasi oleh kaum reaksioner Masjumi-PSI, sekarang tukang² isolasinja yang terisolasi! (*Tawa, tepuktangan lama*).

12

Kawan² yang tertjinta,
Kongres yang mulja,

Demikianlah pengantar saja atas Rentjana Perubahan Program yang diadakan kepada Kongres ini untuk dimintakan persetujuannya.

Dengan Program yang telah diperbarui ini, yang terdiri dari 10 Program Umum dan 50 Program Tuntutan, Partai kita dipersembajatai dengan sangkur yang baru diasah (*tawa*), yang akan mudahkannya untuk membatat rintangan demi rintangan yang ada didepannja, dan dengan demikian memperlebar djalan Rakjat Indonesia menuju kemasjarakat yang benar² adil dan makmur, jaitu masjarakat yang merdeka penuh dan demokratis, dimana tuntutan² Revolusi Agustus 1945 telah terlaksana sampai ke-akar²nja.

Selama ini telah terbukti bahwa djalannya sedjarah membenarkan Program Partai Komunis Indonesia. Kita tidak ragu sedikitpun, bahwa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi atau lebih, Rakjat akan menjadi saksi bahwa lagi² djalan sedjarah membenarkan Program PKI. (*Tepuktangan lama, seruan: „Hidup!”*).

Ini mungkin dan ini akan terdjadi, karena, seperti dikatakan Karl Marx didalam "Kritik atas Program Gotha", sebuah program

itu "harus dipersiapkan oleh suatu masa pandjang aktivitet bersama". Masa aktivitet bersama dari Rakjat kita jang mempersiapkan Program ini telah berlangsung 14 tahun.

PKI menjusun Programnja bukan hanja untuk diumumkan, tetapi untuk dilaksanakan dalam kehidupan aktuil. Dan PKI tidak pernah gagal melaksanakan Programnja didalam praktek, selama PKI bersandar kepada massa, selama PKI setia kepada garis massa, selama PKI beladjar dari massa agar bisa mengadjar massa untuk kemudian beladjar lagi dari massa. (*Tepuktangan*).

Langit pagi sudah memerah (*tawa, tepuktangan*), tanda hari bahagia bagi Rakjat Indonesia akan tiba. (*Tepuktangan*). Mari kita perhebat usaha untuk menjongsong datangnya hari idam²an itu!

Hidup Partai Komunis dan Rakjat Indonesia jang djaja! (*Tepuktangan lama, seruan²: „Hidup PKI!, Hidup PKI!“*).



PILIHAN COMITE CENTRAL DAN KOMISI VERIFIKASI

Pidato Kawan D.N. AIDIT sebagai Ketua Komisi Pemilihan Badan² Central PKI pada tgl. 10 September 1959

Kongres jang mulia!

Kawan² jang tertjinta!

Komisi Pemilihan jang dibentuk oleh Kongres Nasional ke-VI PKI telah mengadakan beberapa kali sidang untuk melaksanakan tugasnja.

Kepada Komisi Pemilihan telah masuk banjak usul dari para utusan, baik tertulis maupun lisan, baik untuk Komite Central maupun untuk Komisi Verifikasi. Semua usul ini membantu Komisi dalam melaksanakan tugasnja dan untuk itu atasnama Komisi saja mengutjapkan terimakasih. Disamping itu, Komisi djuga mendapat banjak bantuan mengenai keterangan² tentang kader² Partai, baik dipusat maupun didaerah, untuk dipertimbangkan buat mendjadi anggota dua badan jang harus dipilih oleh Kongres ini.

Dalam Konstitusi Partai jang baru diterima dengan suara bulat oleh Sidang Kongres pada siang kemarin, tanggal 9 September, menurut fasal 28 a.l. dikatakan, bahwa:

„Pemilihan Komite² Partai dilakukan setjara tertulis dan rahasia atau setjara terbuka dari daftar tjalon² dengan djaminan, bahwa pemilih² berhak mengkritik dan mengganti setiap tjalon dalam daftar“.

Djuga dikatakan dalam fasal tsb. bahwa tugas Komisi Pemilihan ialah „mengusulkan tjara² pemilihan“.

Berhubung dengan ketentuan dalam fasal 28 Konstitusi tsb. ter-serahlah pada Kongres apakah CC dan Komisi Verifikasi jang akan kita pilih sekarang akan dilakukan setjara tertulis dan rahasia atau setjara terbuka.

Mengingat kebulatan jang monolit daripada Partai kita, jang dengan kuat telah didemonstrasikan oleh Kongres Nasional ke-VI Partai ini, Komisi mengusulkan supaja pemilihan dilangsungkan setjara terbuka. (*Tepuktangan, seruan: „Hidup! Hidup!“*).

Saja usulkan kepada Presidium supaja menanjakan kepada Kongres, apakah usul Komisi dapat disetudju.

(Semua mengangkat kartu-pesertanja tanda setudju pemilihan dilakukan setjara terbuka — tepuktangan lama).

Kawan²! Kenyataan bahwa Kongres dengan suara bulat menjadui pemilihan setjara terbuka tidak hanya merupakan demonstrasi persatuan intern jang djaja daripada Partai kita, tetapi djuga menundjukkan moral Komunis jang tinggi (*tepuktangan*). moral jang tidak merahasiakan sesuatu dalam soal jang menjangkut kepentingan Partai dan kepentingan Rakjat. (*Tepuktangan lama*). Djika kita harus merahasiakan kesesuatu, maka keharusan ini hanya berlaku terhadap musuh² Rakjat. (*Tepuktangan*).

Kawan²! Partai kita sekarang bukan lagi Partai lima tahun jang lalu. Partai kita sekarang adalah Partai jang sudah meliputi seluruh negeri, didukung oleh lapisan² Rakjat jang termadju dari tiap² suku, mendapat simpati dan ketjintaan jang dalam dari massa kaum buruh, kaum tani, pekerdja kebudayaan dan intelektuul pekerdja lainnja, massa pemuda, wanita, peladjar, dan golongan² Rakjat jang progresif lainnja. (*Tepuktangan*). Partai kita telah mendjadi Partai jang besar dan ditjintai oleh massa Rakjat jang luas, adalah berkat pekerdjaan jang tidak mementingkan diri sendiri, baik oleh anggota² Partai jang bekerdja dipusat maupun di daerah, didalam Komite² Partai maupun dalam organisasi² massa dan oleh semua angkatan Komunis Indonesia. (*Tepuktangan lama*). Semua mereka jang telah mengambil bagian dalam membesarkan dan memperkuat Partai ini dipertimbangkan oleh Komisi Pemilihan dalam menjusun Komite Central maupun dalam menjusun Komisi Verifikasi. Setelah mempertimbangkan semua faktor ini Komisi Pemilihan mengusulkan kepada Kongres kawan² untuk Komite Central sbb.:

(Kawan Aidit mengumumkan daftar nama).

Semuanja diusulkan sebagai anggota CC. Sebagai tjalonanggota² CC diusulkan:

(Kawan Aidit menyebut nama kawan² jang diusulkan. Daftar nama anggota dan tjalonanggota CC dimuat pada halaman 219).

Lewat Presidium saja tanjakan: Apakah ada jang ingin mengajukan kritik kepada tjalon²? (Kongres menjatakan: „Tidak ada!”).

Lewat Presidium saja menanjakan kepada Kongres apakah nama-nama jang diusulkan oleh Komisi Pemilihan Badan² Central PKI ini dapat disetudjui? (Semua mengangkat kartu tanda setudju, semua berdiri dan tepuktangan lama).

Mengenai Komisi Verifikasi, Komisi Pemilihan mengusulkan nama² sbb.:

(Daftar nama anggota, Ketua dan Wakil Ketua Komisi Verifikasi dimuat pada halaman 220).

Lewat Presidium saja tanjakan: Apakah ada jang ingin meng-

ajukan kritik kepada tjalon²? (Kongres menjatakan: „Tidak ada!”).

Lewat Presidium saja menanjakan kepada Kongres apakah nama-nama jang diusulkan oleh Komisi Pemilihan untuk Komisi Verifikasi ini dapat disetudjui? (Kongres menjadui dengan semua mengangkat kartu tanda setudju, semua berdiri dan tepuktangan lama).

Kawan²!

Sekali lagi kita telah mendemonstrasikan persatuan jang monolit daripada Partai kita, dan kali ini mengenai pimpinan central daripada Partai, jang oleh Kongres jang mewakili semua anggota dan tjalonanggota Partai, dipertjajakan untuk memimpin Partai selama antara Kongres Nasional ke-VI dan ke-VII.

Atasnama semua kawan jang baru mendapat kepertjajaan Kongres untuk memimpin seluruh Partai kita, izinkanlah saja mengutjapkan terimakasih jang se-besar²nja kepada Partai jang telah memberi kepertjajaan begitu besarnja kepada kami. Kami sadar, bahwa segala jang terbaik jang ada pada kami tidak tjukup baik untuk diberikan kepada Partai dan proletariat. Kami akan mendjungtinggi kepertjajaan jang telah diberikan oleh Partai dan akan memberikan apa sadja jang ada pada kami jang diminta oleh Partai.

Izinkanlah saja pada kesempatan ini untuk atasnama kawan² jang baru terpilih mendjadi anggota dan tjalonanggota Komite Central dan jang mendjadi anggota Komisi Verifikasi mengulangi sumpah kami kepada Partai seperti jang sudah pernah kami utjapkan berdasarkan fasal 4 Konstitusi Partai:

Kami bersumpah akan memenuhi semua kewadajiban Partai; memelihara kesatuan Partai; melaksanakan putusan² Partai; mendjadi tjontoh dalam perdjuaan untuk tanahair dan Rakjat; berusaha mendjadi tjontoh dalam kehidupan sehari-hari; meneguhkan hubungan massa dengan Partai; berusaha memperdalam kesedaran dan menguasai prinsip² Marxisme-Leninisme, berterusterang dan djudjur kepada Partai; mendjaga keselamatan Partai. (*Tepuktangan lama*).

Kawan²! Demikian pengulangan sumpah kami semua, jang kami njatakan dalam menerima kedudukan kami sebagai anggota dan tjalonanggota Komite Central dan anggota Komisi Verifikasi.

Sekian.

(*Tepuktangan lama, semua berdiri*).

KEMBANGKAN SEMANGAT KONGRES NASIONAL ke-VI PKI

*Sambutan pada pesan² tamu² luarnegeri dan pidato penutupan
Kongres Nasional Ke-VI PKI diutjapkan oleh Ketua CC PKI
Kawan D.N. AIDIT pada malam tgl. 14 September 1959*

Sebelum Kawan Aidit berpidato, pemimpin sidang Kawan Lukman mengumumkan, bahwa sidang pertama CC PKI yang baru telah memilih dengan suara bulat D.N. Aidit sebagai Ketua CC PKI (Tepuktangan lama, semua berdiri menjerukan: „Hidup Aidit!“)

Kawan Dimo Ditchew dari Bulgaria, Kawan Jerzy Albrecht dari Polandia, Kawan Morris Hughes dari Australia, Kawan Ursinio Rojas dari Kuba, Kawan Pal Ilku dari Hongaria, Kawan Kurt Barthels dari Djerman dan Kawan Giuseppe Boffa dari Italia, izinkanlah saya atasnama semua peserta Kongres Nasional Ke-VI PKI, atasnama lebih dari 1,5 djuta Komunis Indonesia dan atasnama Rakjat pekerdja Indonesia mengutjapkan rasa terimakasih yang se-dalam²nja kepada kawan², kepada Partai kawan² dan kepada Rakjat kawan². (Tepuktangan lama). Kami sungguh terharu mendengar pesan² kawan². Sungguh besar solidaritet Partai kawan² dan Partai² sekawan lainnja terhadap Partai Komunis dan Rakjat pekerdja Indonesia. (Tepuktangan lama).

Pesan² Partai² sekawan kepada Kongres kami, kepada Partai Komunis dan Rakjat Indonesia memberi kekuatan yang besar kepada kami dalam meneruskan perdjuaan kami yang berat, yang memakan waktu panjang dan rumit. Solidaritet Partai² sekawan dan Rakjat²nja merupakan tambahan kekuatan yang penting bagi kami. (Tepuktangan).

Dengan datangnya delegasi persahabatan dari tudjuh Partai sekawan ke Indonesia dengan tudjuan untuk menghadiri Kongres Nasional ke-VI PKI, maka gagallah usaha kaum reaksioner untuk mengisolasi Partai Komunis Indonesia dari gerakan Komunis sedunia. (Seruan dalam ruang: „Hidup! hidup!“ Tepuktangan lama). Seandainya kawan² tidak djadi memberikan pesan² dengan lisan kepada para peserta Kongres, inipun sudah merupakan kemenangan, karena pada pokoknja rintangan sudah dipatahkan dengan

kenjataan kawan² datang untuk Kongres kami, sedangkan kami dengan penuh antusiasme menjambut kedatangan kawan². (Seruan: „Hidup!“ Tepuktangan lama). Apalagi sekarang, setelah kawan² berada di-tengah² kami dan sudah memberikan pesan² yang sangat mendjiwai kami, benar² sudah merupakan kegagalan total kaum reaksioner untuk memisahkan kaum Komunis Indonesia dari gerakan Komunis sedunia. (Seruan: „Hidup!“ Tepuktangan lama). Internasionalisme proletar ternyata djauh lebih kuat daripada uang dolar yang sudah di-hambur²kan untuk mengisolasi PKI dari gerakan Komunis sedunia. (Tepuktangan). Kekuatan progresif ternyata lebih besar daripada kekuatan reaksioner. (Tepuktangan lama).

Hidup solidaritet internasional! (Seruan: „Hidup! Hidup!“ Tepuktangan lama).

Hidup semua Partai sekawan kita! (Seruan: „Hidup!“ Tepuktangan lama).

Selanjutnja, izinkanlah saya mengumumkan badan² pimpinan Central sebagai hasil pilihan Kongres Nasional Ke-VI Partai. (Kawan Aidit mengumumkan susunan Komisi Kontrol Central, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II CC, Politburo dan Sekretariat CC dengan sambutan yang gemuruh. Daftar nama anggota² badan² pimpinan ini dimuat pada halaman 219 dan 220).

Kawan², satu peristiwa bersedjarah sudah berlalu dengan selamat dan gembira, jaitu Kongres Nasional Ke-VI PKI. Adalah sangat mengharukan, bahwa Laporan Umum CC, Perubahan Konstitusi, Perubahan Program, Komite Central yang baru, Komisi Verifikasi Central dan putusan² lainnja telah diterima oleh Kongres dengan suara bulat. (Tepuktangan). Ini adalah Kongres PKI yang terbesar selama umurnja yang hampir 40 tahun. (Tepuktangan). Kongres ini merasuk sangat dalam kelubuk hati kaum Komunis dan Rakjat pekerdja Indonesia. (Tepuktangan). Rintangan² yang dipasang orang untuk menghalang-halangi Kongres ini djustru telah lebih merapatkan barisan kaum Komunis dan lebih mempersatukan massa Rakjat pekerdja dengan kaum Komunis. (Seruan: „Hidup!“ Tepuktangan). Dihati massa Rakjat pekerdja Indonesia Kongres ini adalah Kongresnja sendiri, (tepuktangan), lebih² lagi karena Kongres ini mendapat berbagai rintangan. (Tepuktangan lama).

Pidato saja ketika menutup Kongres Nasional Ke-V lebih dari 5 tahun yang lalu berkepala „Kembangkan periode 1951“, jaitu periode sesudah Partai bangkit kembali dengan garis politik dan garis organisasi yang Leninis. Kita sudah mengembangkan periode ini dan hasilnja jalah, bahwa kita sekarang sudah memiliki Partai

jang sudah lebih tersebar diseluruh negeri, jang mempunjai karakter massa jang lebih luas, jang sudah lebih terkonsolidasi di lapangan ideologi, politik dan organisasi. (*Tepuktangan lama*). Kongres Nasional Ke-VI kita adalah bukti jang paling menjolok dari semuanya ini. Tidak ada satu Daerah Besar, satu Pulau atau satu angkatan Komunis Indonesia jang tidak diwakili dalam Kongres Nasional Ke-VI kita, putera² jang terbaik dari banjak suku-bangsa hadir dalam Kongres dan terpilih duduk dalam Badan² Pimpinan Central daripada Partai. (*Tepuktangan lama*).

Rintangan² jang dialami Kongres bukannya mengurangi simpati massa kepada Kongres, sebaliknya, membikin me-luap²nja sambutan massa, baik jang berupa sumbangan² materiil maupun jang berupa seribusatu bentuk lainnja. (*Tepuktangan*).

Kongres ini kita langsung dengan semangat patriotisme jang tinggi, semangat membela kebebasan² demokratis, semangat membela Republik Proklamasi dan semangat anti-imperialisme jang kuat. (*Tepuktangan*).

Djuga semangat internasionalisme proletar adalah semangat Kongres Nasional Ke-VI Partai kita, jang dinjatakan oleh dokumen² jang disahkan oleh Kongres, oleh sambutan² Kongres pada pesan² Partai² sekawan, baik jang disampaikan oleh delegasi² persahabatan Partai² sekawan, maupun jang dengan perantaraan surat² dan tilgram. (*Tepuktangan lama*).

Kongres Nasional ke-VI PKI dilangsungkan dengan semangat dan kesedaran proletariat jang tinggi. Semangat dan kesedaran ini merupakan djaminan, bahwa Partai kita, dalam keadaan bagaimanapun akan terus mendaki dan akan sampai kepuntjak gunung kemenangan Rakjat. (*Tepuktangan lama*).

Djika pidato saja sekarang ini berkepala „Kembangkan semangat Kongres Nasional Ke-VI“, maka jang saja maksudkan ialah supaja semangat ini makin lama makin dalam mendjiwai semua pekerdjaan Partai. Tetapi jang terutama saja maksudkan ialah semangat persatuan didalam Partai, semangat pengabdian kepada Rakjat dan bersatu dengan massa. (*Tepuktangan lama*). Tidak ada bidadari jang akan dapat melemahkan hati kita, dan tidak ada setan jang dapat menakut-nakuti kita (*tawa*) djika Partai sudah benar² bersatupadu dengan massa. (*Tepuktangan*). Partai akan tetap berdiri tegak bagaikan batukarang ditengah lautan walaupun ada gelombang tinggi dan dahsjat. (*Tepuktangan lama*).

Dengan semangat Kongres Nasional Ke-VI Partai kita harus bersatupadu dengan bagian terbesar daripada kaum buruh, dengan bagian terbesar daripada kaum tani, dengan bagian terbesar daripada kaum intelektual pekerdja dan dengan bagian terbesar daripada

massa Rakjat pekerdja lainnja. (*Tepuktangan lama*). Semuanya ini adalah mungkin, karena Kongres Nasional Ke-VI PKI sudah membuka djalan untuk itu. (*Tepuktangan lama*).

Tetaplah setia pada nama jang sudah kita setudjui untuk Kongres Nasional Ke-VI Partai, jaitu Kongres daripada penggalang² front persatuan nasional dan Kongres daripada pembangun² Partai Komunis Indonesia jang djaja. (*Tepuktangan lama*). Inilah kita, kawan²! (*Tepuktangan*). Djundjunglah tinggi nama ini, dan berikanlah semua jang diminta untuk mendjaga kehormatan nama ini. Ini berarti kita setia pada patriotisme dan internasionalisme proletar, ini berarti kita setia pada Marxisme-Leninisme jang kreatif. Ini berarti kita berdjuaug untuk demokrasi dan Kabinet Gotongrojong. (*Tepuktangan lama*).

Kawan², tahun depan, tahun 1960, adalah ulangtahun ke-40 Partai kita dan ulangtahun ke-15 Republik kita. Marilah kita songong hari² bersedjarah ini dengan semangat berkompetisi dalam „tahun pertama periode Kongres Nasional Ke-VI“. (*Tepuktangan lama*).

Tepat sekali kata Kawan Njoto, jaitu bahwa langit pagi sudah memerah, tanda hari bahagia bagi Rakjat Indonesia akan tiba. (*Tepuktangan*). Benar pula kata Kawan Fachrul dari Kalimantan Timur, jaitu bahwa bagi kaum reaksioner hari sudah hampir magrib. (*Tawa, tepuktangan*).

Marilah kita bekerdja terus dengan semangat Kongres Nasional Ke-VI maju menjongsong fadjar harapan Rakjat, dan supaja magrib segera disusul gelapgelita bagi kaum reaksioner. (*Seruan : „Jaah !“ Tepuktangan lama*).

Partai kita sekarang bukan hanja anak zaman jang gagah perkasa, tetapi ia sekarang sedang dalam proses melahirkan zaman baru bagi Rakjat Indonesia. (*Tepuktangan lama*).

Hidup Partai Komunis Indonesia, pengabdi jang tersetia dari Rakjat dan tanahair Indonesia ! (*Seruan : „Hidup !“ Tepuktangan lama*).

Kembangkan semangat Kongres Nasional Ke-VI ! (*Tepuktangan lama, semua berdiri dan menjanjikan lagu „Internasionale“*).

SUKSESJA KONGRES NASIONAL ke-VI PKI ADALAH KEMENANGAN DEMOKRASI JANG BESAR!

Pidato Ketua CC PKI, Kawan D.N. AIDIT pada malam resepsi penutupan Kongres Nasional Ke-VI PKI tgl. 16 September 1959

Paduka Jang Mulia Presiden Sukarno, Bung Karno jang tertjinta!

Jang Mulia para Menteri, Anggota² Dewan Pertimbangan Agung, Anggota² Parlemen, Anggota² Dewan Perantjang Nasional dan para pembesar lainnja!

Para tamu dari Perwakilan negara² sahabat!

Para saudara dan kawan²!

Pertama-tama izinkanlah saja atasnama Komite Central dan semua peserta Kongres Nasional Ke-VI PKI mengutjapkan selamat datang dan banjak terimakasih kepada saudara² jang sudah memerlukan datang keresepsi penutupan Kongres Nasional Ke-VI PKI ini. Kami merasa berhutang budi dan mendapat kehormatan besar berhubung dengan kedatangan para tamu kami jang mulia. Peribahasa kita mengatakan „*Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati*”. (*Tepuktangan lama*). Tetapi orang² Komunis jang sekarang masih hidup sudah berbulat tekad, bukan untuk membayar hutang budi karena ini memang tidak mungkin dibayar, tetapi untuk memberikan segala apa jang ada pada kami untuk melaksanakan tugas urgen PKI jang nomor satu, jaitu tugas menggalang dan memperkuat front persatuan nasional sebagai djaminan untuk tertjapainja kemerdekaan nasional kita jang penuh, untuk kemerdekaan politik dan ekonomi negeri kita. (*Tepuktangan*).

Kongres Nasional Ke-VI PKI djuga telah menamakan dirinja Kongres daripada penggalang² front nasional. Kaum Komunis Indonesia memang belum puas dengan hasil² jang sudah ditjapainja dalam pekerdjaan ini, tetapi se-kurang²nja kami ingin mendjadi penggalang² jang sungguh² daripada front nasional dinegeri kita.

Para saudara dan kawan²!

Kongres Nasional Ke-VI PKI dilangsungkan dari tanggal 7 sampai tanggal 14 September 1959. Ini adalah Kongres PKI jang terbesar selama umur PKI jang sudah hampir 40 tahun. Semua daerah dan pulau, semua angkatan Komunis Indonesia dan semua anggota dan tjalonanggota jang djumlahnja lebih dari 1,5 djuta

diwakili dalam Kongres ini. (*Tepuktangan*). Praktis semua suku-bangsa diwakili dan banjak putera² jang terbaik dari sukubangsa² duduk dalam Presidium jang memimpin Kongres dan djuga terpilih untuk duduk dalam badan² pimpinan central PKI. (*Tepuktangan lama*). Kongres Nasional Ke-VI PKI adalah Kongres persatuan djaja daripada kaum Komunis dan Rakjat pekerdja Indonesia.

Kenjataan bahwa PKI dalam usianja jang hampir 40 tahun baru enam kali dapat melangsungkan Kongresnja, jaitu 3 kali dalam masa pendjadjahan Belanda dan 3 kali dalam zaman Republik Indonesia, adalah djuga menunjukkan betapa beratnja masa² lampau PKI. Sedjak pemberontakan tahun 1926 dizaman pendjadjahan Belanda, melalui kekuasaan militerisme Djepang sampai ke Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, djadi hampir 20 tahun, PKI terpaksa bekerdja dibawahtanah. Kongres pertama, kedua dan ketiga sudah tentu dilangsungkan dalam keadaan jang sangat sulit dengan pengawasan keras dan pembatasan² jang luarbiasa dari penguasa² kolonial. Kongres keempat dan kelima dilangsungkan dalam suasana Indonesia merdeka, tanpa pengawasan dan pembatasan² seperti dizaman kolonial. Kongres Nasional Ke-VI jang baru sadja selesai djuga dilangsungkan dalam suasana Indonesia merdeka, tetapi dengan pembatasan² jang mengingatkan kita kembali kepada suasana zaman jang tidak enak dulu. (*Tawa*).

Tapi pada saat² terachir dari Kongres ini, berkat adanja saling mengerti antara PKI dengan para penguasa, keadaan berubah, kelonggaran² didapat oleh Kongres dan tamu² luarnegeri PKI diberi kesempatan untuk menjampaikan pesan² Partai² dan Rakjat²nja kepada para peserta Kongres. (*Tepuktangan*). Lebih daripada itu, tamu² luarnegeri dari Kongres Nasional Ke-VI PKI telah mengadakan pertemuan ramahtamah dengan Menteri Inti Pertahanan dan Keamanan, Letnan Djenderal A.H. Nasution, (*tepuktangan*) dan Menteri Inti Luarnegeri Dr. Subandrio. (*Tepuktangan*). Malahan malam ini tamu² luarnegeri kita berada dalam ruangan ini ber-sama² dengan Presiden Sukarno (*tepuktangan lama*) dan pembesar² Indonesia lainnja. Dengan semuanya ini, maka usaha² kaum imperialis untuk mengisolasi PKI dari gerakan Komunis sedunia mengalami kegagalan total. Persaudaraan antara umatmanusia, persahabatan antara pedjuang² revolusioner sedunia adalah djauh lebih kuat daripada keinginan² jang aneh dan daluwarsa daripada kaum reaksioner. (*Tepuktangan lama*).

Sungguh² kami sesalkan, bahwa pada waktu Kongres akan dimulai tersiar desas-desus, se-olah² Kongres Nasional Ke-VI PKI adalah persiapan untuk perebutan kekuasaan atau kudeta oleh PKI

dalam tahun 1960. (*Tawa*). Saja kagum akan „kekreatifan” (*tawa*) tukang² desas-desus ini. Enam bulan sebelum Kongres dilangsungkan CC PKI sudah mengeluarkan Rentjana Tesis yang sangat jelas menundukkan djalan mana yang mau ditempuh oleh PKI dalam usahanya untuk mengadakan perubahan dalam politik Indonesia. Kudeta adalah djalan orang yang kehilangan akal, (*tepuktangan*, teriak : „Betul, betul!”), yang tidak mempunyai kepertjaan pada Rakjat dan demokrasi. Sedangkan PKI mempunyai kepertjaan yang tidak terbatas pada Rakjat sebagai sumber segala kekuatan.

PKI mendasarkan perjuangannya pada apa yang dinamakan oleh Bung Karno „massa actie”. (*Tepuktangan lama*). Rakjat Indonesia makin lama makin bergeser kekiri dan makin lama makin banjak yang berdiri difihak PKI. Kenyataan bahwa dalam hanya dua tahun, jaitu dari pemilihan umum Parlemen yang pertama sampai pemilihan DPRD, PKI telah tumbuh dari Partai no. 4 dengan pemilih 6 djuta lebih menjadi Partai no. 1 dengan pemilih 8 djuta lebih, (*tepuktangan lama*) adalah bukti segedé gadjah (*tawa*) bahwa perubahan dalam politik dapat diadakan dengan djalan² demokratis. (*Tepuktangan*).

Djadi, kalau mau mentjari tukang² kudeta djanganlah mentjari-nya dalam tubuh PKI, tetapi tjariilah pada fihak² lain. (*Tawa, tepuktangan*). Selama masih terbuka djalan demokratis, PKI akan menempuh djalan ini. Kalau pemilihan umum Parlemen kedua tertunda-tunda bukanlah salahnya PKI. PKI senantiasa siap kapan sadja pemilihan umum ini mau diadakan, (*tepuktangan*), makin tjepat makin baik. (*Tepuktangan lama*).

PKI memang pernah memimpin pemberontakan dalam tahun 1926 (*tepuktangan*) dan orang² PKI memang turut ambil bagian dalam pemberontakan terhadap kaum militeris Djepang dan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia, tetapi harus diingat bahwa pada waktu itu memang tidak ada djalan demokratis yang mungkin ditempuh oleh PKI.

Jang lebih mentertawakan lagi jalah, desas-desus tentang Kongres PKI akan menjiapkan kudeta diembel-embeli lagi dengan keterangan, bahwa Kongres PKI merupakan „nationaal gevaar” (*bahaya nasional*). (*Tawa*). Kalau kaum kolonialis Belanda atau kaum imperialis Amerika Serikat atau imperialis² lain berbitjara begini tidaklah mengherankan. Tetapi bahwa „hollands denken” (*tawa*) atau „imperialistisch denken” (*tawa*) ini masih ada pada orang² penting dalam aparat² Republik, ini adalah keterlaluan. (*Tepuktangan*). Jang merupakan „nationaal gevaar” bukanlah PKI, tetapi justru fikiran² sementara pendjabat yang masih ketjekokan

„hollands denken”, „PID-isme”, „Djenakum-isme”, „Sarekat Hedjo-isme”, „Kenpeitaisme”, (*tepuktangan lama*), atau jang biasa disebut oleh Bung Karno „tjetjunguk-isme”. (*Tepuktangan*).

Tetapi walaupun bagaimana, Kongres Nasional Ke-VI PKI sudah berlangsung dengan selamat. Pada tempatnya saja mengutjapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pembesar sivil dan militer, kepada tokoh² ilmu, kebudayaan dan masyarakat yang telah membantu dan telah memberi utjapan selamat kepada Kongres ini. Utjapan selamat dari banjak Menteri dan pembesar² lainnya kepada Kongres Nasional Ke-VI adalah segi lain yang lajak dapat penilaian djika mau mengerti situasi politik yang sesungguhnya di Indonesia. Kalau dizaman kolonial dulu pekerdjaan yang terpenting daripada kepala polisi ialah mentjari Komunis untuk dipendjarakan dan dibuang ke Boven Digul, tapi sekarang Kepala Polisi Negara, yang djuga Menteri Negara ex officio, mengutjapkan selamat dan mengharapkan sukses bagi Kongres PKI. (*Tepuktangan*).

Pokoknya, aparat² yang masih „hollands denken”, yang masih sama dengan kaum kolonialis Belanda menganggap kaum Komunis sebagai „bahaja”, (*tawa*), masih tjukup banjak. Tetapi yang sudah melepaskan diri dari tjara berfikir lama dan menerima nilai² baru daripada perkembangan dinegeri kita sedjak proklamasi 17 Agustus 1945 djuga sudah banjak. Terhadap yang pertama Rakjat dan PKI akan meneruskan perlawanannya, sedangkan terhadap yang kedua Rakjat dan PKI akan terus mengusahakan kerdjasama. (*Tepuktangan*).

Suksesnya Kongres Nasional Ke-VI PKI bukanlah hanya sukses bagi PKI dan klas buruh Indonesia, tetapi djuga adalah sukses bagi seluruh gerakan patriotik dan demokratis. (*Tepuktangan*). Ini adalah kemenangan besar daripada demokrasi dan merupakan satu bukti jang menjolok, bahwa walaupun masih ada orang² jang „hollands denken”, tapi orang² ini bukan takterkalahkan. „PID-isme”, „tjetjunguk-isme”, (*tawa*), „Djenakum-isme” dan „tjoro-isme” sudah ternjata bukan zamannya lagi. (*tepuktangan*), walaupun ada orang² jang masih mau mempraktekannya.

Para saudara dan kawan²!

Kongres Nasional Ke-VI PKI disiapkan dengan semangat pengabdian Komunis yang besar pada Rakjat. Kongres ini disongsong dengan gerakan amal kaum Komunis kepada Rakjat lewat pembentukan ribuan Regu² Kerdjabakti (*tepuktangan*) dimana pemimpin² dan anggota² PKI ambil bagian didalamnya. Sebagai hasil dari pekerdjaan gotongrojong Regu² Kerdjabakti ini telah diperbaiki atau dibikin djalan sepanjang 3.249 Km, (*tepuk-*

tangan), telah diperbaiki atau dibikin *selokan* sepanjang 985 Km. (*tepuktangan*), telah diperbaiki atau dibikin *rumah* sebanyak 2.280 buah, (*tepuktangan*), telah diperbaiki atau dibikin *rumah*² *sekolah* sebanyak 80 buah, (*tepuktangan*), telah dibikin *bendungan* sebanyak 138 buah, (*tepuktangan*), telah diperbaiki atau dibikin *djem-batan* sebanyak 1477 buah, (*tepuktangan*), telah dibikin atau diperbaiki *kakus umum* sebanyak 5119 buah, (*tepuktangan*), telah dibersihkan atau diperbaiki *kuburan* sebanyak 1608 buah, (*tepuktangan*), telah dibikin atau diperbaiki *kolam* sebanyak 432 buah, (*tepuktangan*), telah diperbaiki *hasil bumi* dengan mengerdjakan tanah 362 HA, (*tepuktangan*), telah diberantas *tikus* sebanyak 186.698 ekor, (*tepuktangan*), telah didirikan kursus PBH di 351 tempat, (*tepuktangan*), telah dibikin atau diperbaiki *tempat*² *pe-mandian umum* sebanyak 3133 buah. (*Tepuktangan*). Selain dari-pada itu djuga telah dibuat atau diperbaiki *balai*² *Rakjat*, *lapangan olahraga*, dan atas permintaan Rakjat setempat djuga mesdjid atau geredja, dll. (*Tepuktangan*).

Regu² kerdjabakti jang ribuan djumlahnja ini adalah merupakan sukses Kongres Nasional Ke-VI PKI sebelum Kongres itu dimulai. (*Tepuktangan*). Ia tidak hanja telah lebih mengeratkan hubungan PKI dengan massa, tidak hanja telah membantu massa Rakjat pe-kerdja dalam mengatasi berbagai kesulitannja, tetapi djuga telah membikin pemimpin² PKI lebih kenal kehidupan, dan pemimpin² PKI jang biasanja hanja bekerdja otak telah mentjeburkan diri dalam kerdja badan. Berdasarkan pengalaman² jang baik dan sukses² ini, Kongres Nasional Ke-VI telah memutuskan untuk sesudah Kongres meluaskan pembentukan Regu² Kerdjabakti, baik jang hanja terdiri dari orang² Komunis ataupun jang menggabungkan diri dengan Regu² Kerdjabakti jang dibentuk oleh pemerintah² setempat atau Regu² Kerdjabakti ber-sama² dengan golongan² lain. Kaum Komunis jakin, karena tjotjok dengan semangat gotong-rojong Rakjat, Regu² Kerdjabakti jang dibentuk atas prinsip suka-rela, lambatlaun akan merupakan organisasi sosial jang sangat dibutuhkan dan ditjintai oleh Rakjat pekerdja Indonesia.

Tetapi pembentukan Regu² Kerdjabakti tidak semudah meng-utjapkannya. Ia menghendaki ketelatenan, kesabaran revolusioner dan keberanian. Perintahisme atau komandoisme tidak mendorong pembentukan Regu² Kerdjabakti. Prinsip suka-rela dan prinsip ke-sedaran harus didjundjung setinggi-tingginja. Keberanian djuga diperlukan, karena dibanjak tempat pembentukan Regu² Kerdja-bakti djuga dihalang-halangi oleh pendjabat² setempat jang masih ketjekokan „hollands denken” (*tawa, tepuktangan*) dan difitnah sebagai persiapan PKI untuk mengadakan pemberontakan. Belum

berapa lama berselang Mas Kartopawiro dan Hardjosenu didja-tuhi hukuman oleh pengadilan Bojolali karena bekerdjabakti membikin djembatan, sedangkan Mas Hadimuljono dan Sukoto dituntut dan dihukum karena bekerdjabakti membersihkan selokan. Inilah keadjaiban, orang bekerdjabakti dan beramal ke-pada Rakjat dituntut dan dihukum, sedangkan orang² jang korup dan penuh dengan „hollands denken” diperlindungi. Keadjaiban ini harus diachiri. Ketjurigaan tidak harus ditudjukan kepada Rakjat, tetapi kepada musuh² Rakjat. (*Tepuktangan lama*).

Para saudara dan kawan²!

Walaupun sangat banjak kesulitan² jang kami alami dalam me-laksanakan Kongres Nasional Ke-VI PKI, tetapi sekarang Kongres sudah berlalu dengan sukses. Malam ini kaum Komunis merasa sangat berbahagia. Besar Bukit Barisan, tapi lebih besarlah hati kaum Komunis pada malam terang bulan ini. (*Tepuktangan lama*).

Mengapa para saudara?

Betapa tidak! Di-tengah² kaum Komunis jang sedang bergem-bira menjambut Kongresnja jang sukses, ada Bung Karno (*tepuk-tangan*), patriot Indonesia jang besar dan djuru pemersatu Rakjat Indonesia. (*Tepuktangan lama*). Walaupun Bung Karno sedang menghadapi berbagai persoalan negara jang sulit, tetapi memerlu-kan djuga datang keresepse ini. (*Tepuktangan, teriakan: „Hidup Bung Karno”*). Bersama-sama dengan Presiden Sukarno djuga da-tang keresepse ini pembesar² lainnja jang telah terbukti patriotisme-nja dalam perdjjuangan untuk kemerdekaan negeri kita. (*Tepuk-tangan*).

Ditengah-tengah kita sekarang djuga ada wakil² Partai² seka-wan, (*tepuktangan lama*), jaitu dari Partai Persatuan Buruh Po-landia, (*tepuktangan*), Partai Komunis Bulgaria, (*tepuktangan*), Partai Komunis Australia, (*tepuktangan*), Partai Sosialis Rakjat Kuba, (*tepuktangan lama*), Partai Buruh Sosialis Hongaria, (*te-puktangan*), Partai Persatuan Sosialis Djerman (*tepuktangan*), dan Partai Komunis Italia. (*Tepuktangan*). Wakil² Partai² sekawan ini adalah patriot² besar tanahairnja, (*tepuktangan*), tetapi ber-samaan dengan itu mereka mengerti benar apa jang mendjadi aspi-rasi² daripada bangsa² dan Rakjat² negeri² lain. (*Tepuktangan*). Karena adanja pengertian inilah, maka mereka datang dari negeri² jang beribu-ribu kilometer ketanahair kita. Atasnama CC PKI dan seluruh anggota serta petjinta PKI, sekali lagi saja mengutjapkan banjak terimakasih kepada Partai² kawan² jang telah mengirim kawan² dari negeri² jang beribu-ribu kilometer dari Indonesia untuk menjampaikan perasaan solidaritet dan simpati jang besar pada perdjjuangan Rakjat dan Partai Komunis Indonesia.

Sungguh, para saudara dan kawan², sukarlah untuk menemukan malam terang bulan seindah malam ini dalam hidup kita. Pada malam ini kehangatan patriotisme dan internasionalisme bersatupadu. (*Tepuktangan*). Tentu bukan patriotismenja kaum soviniis dan bukan internasionalismenja kaum kosmopolit, tetapi patriotismenja internasionalis dan internasionalismenja patriot. Kebangsaan dan kemanusiaan, dua sila dari Pantjasila, berada dalam paduan jang harmonis malam ini. (*Tepuktangan*).

Bung Karno! Izinkanlah saja menjampaiakan utjapan terimakasih jang khusus dari semua peserta Kongres Nasional Ke-VI PKI kepada Bung Karno. Kami jang diwadjabkan oleh Partai mempeladjar sedjarah Partai dan perjuangan Rakjat Indonesia, tahu betapa eratnja hubungan batin antara PKI dan Bung Karno. (*Tepuktangan lama*). Tidak lain adalah Bung Karno, ketika masih berusia sangat muda, jang dengan simpati besar menjambut pemberontakan heroik tahun 1926 dibawah pimpinan PKI. Kita bisa sependapat atau tidak sependapat tentang berbagai hal mengenai pemberontakan itu, tetapi jang sudah terang tidak pernah ada perbedaan pendapat antara Bung Karno dengan kaum Komunis jalah, bahwa pemberontakan terhadap pendjadjahan adalah selamanya benar. (*Tepuktangan lama*). „Tjatjingpun kalau diindjak akan berontak”, (*tawa*), demikian sering dikatakan oleh Bung Karno.

Adalah djuga Bung Karno, jang dimasa masih meradjalelanja kaum militeris Djepang, bersedia menerima kedatangan dan mendengar pendapat² orang² jang bagi Bung Karno terang orang² Komunis jang pada waktu itu bekerdja dibawah tanah, padahal Kenpeitai mondar-mandir didepan rumah. Bung Karno bukanlah seseorang jang mendjadi putjat-pasi djika dizaman kekuasaan kaum militeris Djepang dulu kedatangan orang Komunis ditengah malam buta. (*Tepuktangan lama*).

Bung Karno, tjerita² lama ini, walaupun hanya satu-dua jang saja ungkapkan, adalah sangat penting bagi kami dalam mengikuti langkah² Bung Karno jang sekarang memegang tampuk pimpinan tertinggi daripada negara. Peribahasa mengatakan, bahwa sahabat jang sedjati adalah sahabat diwaktu sukar. (*Tepuktangan lama*). Adakah waktu jang lebih sukar bagi kaum Komunis Indonesia daripada ketika pendjadjahan Belanda dan pendjadjahan kaum militeris Djepang? Orang djahil mungkin berkata: Ja, tapi pernah ada pertentangan pendapat antara Bung Karno dan PKI. Saja tidak membantahnja. Saja hanya bertanja: apakah pernah ada dua sahabat karib jang samasekali tidak pernah bertentangan pendapat? (*Teriakan: „Tidak”*). Persahabatan jang kekal bukanlah per-

sahabatan jang samasekali tidak pernah mengalami perselisihan faham, tetapi jang selamanya dapat mengachiri perselisihan faham setjara sahabat dan tepat pada waktunya. (*Tepuktangan*). Adalah tjerita² lama seperti diatas jang memudahkan kami menangkap maksud² baik dari tindakan² Bung Karno.

Sedjak dari brosur Bung Karno *Mentjapai Indonesia Merdeka*, melalui *Lahirnja Pantjasila, Konsepsi Presiden, Gagasan Demokrasi Terpimpin* dan sampai pada *Manifesto Politik R.I. tanggal 17 Agustus 1959*, nampak dengan djelas merentang didalamnja bagaikan benang merah tjita² Bung Karno untuk mempersatukan Rakjat Indonesia, untuk membebaskan Rakjat Indonesia dari semua imperialisme. (*Tepuktangan lama*). Lima wasiat Bung Karno, jaitu *Mentjapai Indonesia Merdeka, Lahirnja Pantjasila, Konsepsi Presiden, Gagasan Demokrasi Terpimpin* dan *Manifesto Politik 17 Agustus 1959* merupakan mertjusuar² jang sangat membantu kami dalam menetapkan garis² politik dimasa dekat jang kita hadapi. Lima wasiat ini djelas menundjukkan kepada Rakjat Indonesia apa jang mendjadi musuh terpokoknja, jaitu imperialisme. (*Tepuktangan*).

Kongres Nasional Ke-VI PKI memang telah memutuskan bahwa musuh² pokok Rakjat Indonesia adalah imperialisme dan feodalisme, tetapi jang terpokok pada waktu sekarang jalah imperialisme. (*Tepuktangan*). Untuk mengalahkan musuh terpokok ini segala pertentangan jang terdapat dikalangan Rakjat Indonesia harus dapat diselesaikan setjara berunding. Saling tjuriga jang tidak menentu dikalangan Rakjat Indonesia harus dilenjakkan. Djadi, seluruh kekuatan Rakjat Indonesia harus dipersatukan dan harus terusmenerus dikonsolidasi. Tiap² usaha untuk mempertadjam pertentangan dikalangan Rakjat, artinja dikalangan mereka jang menentang imperialisme, harus dianggap bermain dengan kartu imperialis, karena ini melemahkan kekuatan Rakjat, melemahkan potensi nasional.

Dengan djelasnja musuh terpokok, maka dengan sendirinja mendjadi djelas pula tugas terpokok Revolusi Indonesia sekarang, jaitu melenjakkan imperialisme dari mukabumi Indonesia. (*Tepuktangan*). Tidak hanya melenjakkan imperialisme dari Irian Barat, tidak hanya melenjakkan imperialisme dilapangan politik, tetapi djuga dilapangan ekonomi, kebudayaan dan sosial. (*Tepuktangan*). Kami setudju dengan gagasan Bung Karno, jaitu sebelum sampai kemasjarakat adil dan makmur, kita harus lebih dulu melalui masa peralihan, jaitu „fase ekonomi nasional” sebagai pengganti ekonomi kolonial jang sekarang masih bertjokol. Tugas menasionalkan ekonomi Indonesia sudah tentu tidak bisa dipisahkan daripada ke-

wadajiban mengachiri sifat tergantung daripada ekonomi Indonesia dari pasaran kapitalis, dengan djalán ber-angsur² mengindustrialisasi negeri dan setjara konsekwen melaksanakan politik bebas dan aktif dilapangan perdagangan luarnegeri Republik Indonesia. Sekarang perdagangan Republik Indonesia dengan negeri² sosialis berada dibawah 10% sedangkan dengan negeri² kapitalis diatas 90%, padahal negeri² sosialis sekarang adalah produsen lebih daripada sepertiga produksi industri dunia. (*Tepuktangan*). Oleh karena itulah, Kongres Nasional Ke-VI PKI antara lain memutuskan, bahwa kita baru dapat berkata perdagangan luarnegeri kita sesuai dengan politik luarnegeri yang bebas dan aktif, djika perdagangan R.I. dengan negeri² sosialis sudah mentjapai paling kurang 30% daripada seluruh perdagangan luarnegeri kita.

Para saudara dan kawan²!

Kongres Nasional Ke-VI PKI dilangsungkan dengan sembojan tepokok „Untuk Demokrasi Dan Kabinet Gotongrojong”. (*Tepuktangan*). Kenapa kami tekankan kepada dua hal ini, jaitu „Demokrasi” dan „Kabinet Gotongrojong”? Kami berpendapat, tidak ada djalán lain. Alternatif lain jalah diktatur militer atau diktatur perseorangan, dan perpetjahan nasional yang tidak habis²nja. Soal demokrasi sekarang mendjadi sangat menondjol, karena memang ada ketjenderungan di-negeri² yang baru merdeka di Asia dan Afrika untuk penjelewengan kediktatur militer. Sebabnja jalah, karena fihak yang berkuasa, berhubung dikatjau terusmenerus oleh imperialis, tidak bisa memetjahkan masalah ekonomi yang paling mendesak, sedangkan tuntutan Rakjat untuk perbaikan nasib makin lama makin santar. Dalam keadaan demikian, satu²nja djalán keluar bagi kaum penguasa yang pendek fikiran jalah diktatur militer. Saja katakan pendek fikiran, karena belum ada dan tidak akan ada diktatur militer atau diktatur perseorangan yang mampu memetjahkan masalah² ekonomi negeri yang paling mendesak dan memenuhi tuntutan perbaikan nasib dari Rakjat. (*Tepuktangan*).

Saja berpendapat, bahwa ketjenderungan kearah diktatur militer seperti disementara negeri² Asia dan Afrika harus dengan sekuat tenaga kita hindari di Indonesia. Sjarat² untuk menghindari ini tjukup dinegeri kita. *Pertama*, gerakan demokratis dan revolutioner dinegeri kita sudah madju; *kedua*, Bung Karno sudah menundjukkan djalán demokratis yang harus ditempuh, jaitu djalán *Konsepsi Presiden, Gagasan Demokrasi Terpimpin* dan *Manifesto Politik 17 Agustus 1959*; dan *ketiga*, tokoh² penting militer Indonesia yang mempunjai rasa tanggungjawab besar tidak menginginkan diktatur militer. (*Tepuktangan*).

Saja berpendapat, bahwa djika kita di Indonesia berhasil me-

laksanakan Gagasan Demokrasi Terpimpin dengan Kabinet Gotongrojongnja, sebagai sjarat yang tidak boleh tidak untuk menjelaksanakan fase sosial-ekonomi daripada revolusi Indonesia, maka sudah dapat dipastikan bahwa Gagasan Demokrasi Terpimpin dan sistim Kabinet Gotongrojong djuga akan mendjadi djalán keluar bagi banjak negeri di Asia dan Afrika yang baru merdeka. (*Tepuktangan lama*).

Diktatur militer atau diktatur perseorangan hanja akan menimbulkan bentrokan² sosial yang tadjam dan yang banjak korbannja. Adalah satu lamunan djika mengira bahwa dengan melemparkan demokrasi dan memungut diktatur militer, keadaan akan dapat diperbaiki. Satu²nja djalán yang menguntungkan bangsa Indonesia jalah, supaja demokrasi tetap dipertahankan dan yang dilemparkan jalah exces²nja yang berupa anarki dan liberalisme.

Sesuai dengan semangat yang terdapat dalam Kongres Nasional Ke-VI PKI, demi suksesnja gagasan Demokrasi Terpimpin, saja ingin menjampaikan harapan kepada Bung Karno supaja kita semua hati² dan waspada terhadap penumpang² gelap (*tawa dan tepuktangan*) dalam kapal Demokrasi Terpimpin dan UUD '45. Djika penumpang² gelap ini berhasil memainkan peranannja, maka bukan hanja perkembangan madju mendjadi terhenti, tetapi Gagasan Demokrasi Terpimpin dan UUD '45 pun tidak akan memenuhi amanat penderitaan Rakjat, sebaliknya akan menambah penderitaan Rakjat. Gedjala² tentang kegiatan penumpang² gelap ini sungguh mengkuatirkan.

Para saudara dan kawan²!

Dengan keterangan singkat saja diatas, djelaslah bahwa segala desas-desus tentang Kongres Nasional Ke-VI PKI akan mengubah politik PKI dari menjokong mendjadi menentang Kabinet Sukarno-Djuanda dan oleh karenanja ber-siap² untuk kudeta, adalah isapan djempol orang² djawatan rahasia imperialis yang goblok, (*tawa*), yang tidak mengenal PKI, tidak mengenal Presiden Sukarno dan tidak mengenal Rakjat Indonesia. (*Tepuktangan*). Jang mereka kenal hanja hasil bumi, hanja bau minjak, (*tawa*), hasil keringat dan darah Rakjat Indonesia. Biarkanlah mereka tetap dalam kegoblokannja!

Djuga desas-desus sebelum dan selama Kongres, bahwa PKI akan memperhebat serangannja pada tentara adalah impian orang² seberang lautan yang setjara tolol di-sebar²kan di Indonesia oleh tjetjunguk² dan tjoro². (*Tawa dan tepuktangan*). Sebaliknya, PKI sudah lama melontarkan sembojan „Dwitunggal Tentara dan Rakjat”. (*Tepuktangan*). Orang² seberang laut, terutama djawatan² rahasia serta mesin² propaganda mereka sudah sedjak lama menjiar-

kan dongengan tentang adanya „duel antara PKI dan Tentara”, „duel antara Aidit dan Nasution”. (*Tawa*). Dengan ini mereka ingin menutupi duel yang sebenarnya harus diadakan, yaitu duel antara seluruh Rakjat Indonesia dengan kaum imperialis. (*Tepuktangan lama*). Utjapan selamat Letnan Djenderal A.H. Nasution pada Kongres Nasional Ke-VI PKI, yang dengan gemuruh disambut oleh semua peserta Kongres ketika pesan itu dibatjkan, adalah dijawab yang paling djitu pada desas-desus yang berbisa itu.

Djadi, djelaslah apa yang diinginkan oleh kaum imperialis, yaitu pertjektjokan antara Presiden Sukarno dan oknum² dalam pimpinan tentara dengan massa Rakjat yang revolusioner. Mereka tahu benar, bahwa persatuan antara Presiden Sukarno, tentara dan massa Rakjat yang revolusioner merupakan vonnis hukuman mati bagi mereka untuk selama-lamanya. (*Tepuktangan lama*). Djawab kita yang paling tepat ialah : *persatukan semua kekuatan yang akan menghukum mati kaum imperialis ditanahair kita !* (*Tepuktangan*). Ini adalah djuga semangat daripada Kongres Nasional Ke-VI PKI. Memindjam perkataan Bung Karno, „*biarlah mereka geger*” (*tawa*) melihat kita bersatu dan mengkonsolidasi diri. Sekarang kegegeran mereka ditambah lagi dengan pendaratan roket kosmos Uni Sovjet di Bulan. (*Tepuktangan lama*). „*Biarkan mereka geger*”, asal kita Rakjat Indonesia dengan tenang dan rukun menjusun kekuatan kita untuk mengachiri samasekali kekuasaan asing disemua lapangan kehidupan negeri kita.

Kaum Komunis Indonesia, sesuai dengan semangat Kongres Nasional Ke-VI PKI, akan berlaku se-tulus²nja dalam bekerdjasama dengan semua klas, semua golongan dan semua orang yang demokratis dan patriotik. Kami bersedia untuk dikritik oleh siapapun djuga djika kami membuat kekeliruan dalam melaksanakan tugas yang paling urgen ini, tugas mempersatukan semua kekuatan Rakjat Indonesia.

Bertentangan dengan yang di-harap²kan kaum imperialis dan kakitangannya, Kongres Nasional Ke-VI PKI telah lebih mengeratkan hubungan PKI dengan klas², golongan² dan orang² yang demokratis dan patriotik didalamnegeri. Djuga telah lebih mengeratkan hubungan antara PKI dan klas buruh Indonesia dengan gerakan Komunis dan gerakan klas buruh sedunia. Ini tentu akan membikin kaum imperialis lebih geger lagi. (*Tepuktangan*). Tetapi, „*biarkan mereka geger*”. Kawanan monjet yang mengetahui, bahwa pohon yang ditempatinja sedang dibakar orang dari bawah tentu geger tak menentu dan me-lompat² kesana-kemari. (*Tepuktangan*). Tetapi achirnja ialah, bahwa monjet² yang geger itu mati dibakar

oleh api, (*tepuktangan*), dan geger² yang ramai² itu tidak ada gunanya samasekali.

Para saudara dan kawan² !

Biarkan mereka geger, kita berdjalan terus. Langit pagi sudah memerah, tanda hari kemenangan Rakjat sudah hampir tiba. (*Tepuktangan*). Sebaliknja bagi kaum reaksioner, bagi monjet² tukang geger, hari sudah magrib (*tawa*) dan sebentar lagi akan disusul oleh malam gelapgelita. (*Tepuktangan lama*).

Hidup Rakjat Indonesia yang gagah perwira ! (*Seruan : „Hidup, hidup !” Tepuktangan lama*).

Hidup Partai Komunis Indonesia, pengabdii tersetia kepentingan Rakjat dan tanahair Indonesia ! (*Seruan : „Hidup, hidup !” Tepuktangan lama*).

Hidup Bung Karno, djuru pemersatu Rakjat Indonesia ! (*Seruan : „Hidup, hidup !” Tepuktangan lama*).



Susunan Presidium Kongres Nasional ke-VI PKI

Adjitorop, Jusuf; Aidit, D.N.; Alimin, *Angkatan '26*; Anwar Sanusi, Amir; Djadi Wirosbroto, *pemimpin Gerakan Tani*; Djoko Sudjono, *Angkatan '35*; Gunawan, Hendra, *pelukis*; Jakup, *Djawa Barat*; Jasin, Muslimin, *Nusatenggara Tengah*; Kandel, Ktut, *Bali*; Ko Jong Tjay, *golongan keturunan asing*; Kusen, *Angkatan '26*; Lukman, M.H.; Madjid, Mr. Abdul, *Kepala Daerah Kotapradja Semarang*; Martono, *Kalimantan Timur*; Mangkudun Sati, *Angkatan '26*; Muchlis, Aminuddin, *Sulawesi Selatan Tenggara*; Muna-siah, *Angkatan '26*; Nirahua, M., *Maluku*; Njono, *pemimpin Gerakan Buruh*; Njoto; Nursuhud, *Sumatera Barat*; Paiso, *Angkatan '26*; Ramelan, Utomo, *Kepala Daerah Kotapradja Surakarta*; Rissi, Thobias Paulinus, *Nusatenggara Timur*; Rokaja, Enok, *Djawa Barat*; Ruslan Kamaludin, *Djawa Timur*; Sakirman, Ir.; Moh. Samikidin, *Atjeh*; Sardjono, Nj.; Satrio, Dr., *Kepala Daerah Kotapradja Surabaya*; Setijo, *Kalimantan Barat*; Sjarifudin, Nj. Amir; Sjiadj, Dasuki, *Angkatan '26*; Sofjan, Sajid Achmad, *Kalimantan Selatan*; Sudisman; Sukatno, *pemimpin Pemuda Rakjat*; Sumarni, Nj., *Ketua DPRD Kabupaten Tjilatjap*; Supit, Karel, *Sulawesi Utara*; Surasto, Nj. Setiati, *pemimpin Gerakan Buruh*; Suwardiningsih, *Djawa Timur*; Taib, Barmawi, *Kalimantan Selatan*; Tanggap Peleng, Messer, *Kalimantan Tengah*; Thajeb, Ir. Thaher, *Atjeh*; Torey, Jean, *Irian Barat*; Utarjo, S., *Djakarta Raja*; Widodo, *Angkatan '35*; Zaelani, M., *Sumatera Selatan*.



Sekretariat Kongres

Ketua : Siswojo

Komisi Mandat

Wakil Ketua : Supeno

Komisi Redaksi

Ketua : Peris Pardede

Ketua : Anwar Kadir

Wakil Ketua : Tjugito

Komisi Pemilihan Badan²

Central PKI

Ketua : D.N. Aidit

Komisi Resolusi

Ketua : Anwar Sanusi

Wakil Ketua : Nursuhud

Komisi Pemberian Pandji²

Ketua : Sudjito

Wakil Ketua : Hendaja

Badan² Pimpinan Baru Hasil Pilihan Kongres Nasional ke-VI PKI

COMITE CENTRAL PKI

Anggota²:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Achmad Sumadi | 25. Sudisman |
| 2. Adjitorop, Jusuf | 26. Sudojo |
| 3. Aidit, D.N. | 27. Suharti, Nj. |
| 4. Amar Hanafiah | 28. Sundjono |
| 5. Anwar Kadir | 29. Supit, Karel |
| 6. Anwar Sanusi, Amir | 30. Suwardiningsih |
| 7. Dahlan Rivai | 31. Tjoo Tik Tjun |
| 8. Djoko Sudjono | 32. Tjugito |
| 9. Imron, A. | 33. Utarjo, S. |
| 10. Ismail Bakri | 34. Wikana |
| 11. Lukman, M.H. | 35. Zaelani, M. |

Tjalonanggota²:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 12. Muhammad Samikidin | 1. Adenan Rachman |
| 13. Nasution, Djalaludin Jusuf | 2. Alihamy, Abdullah |
| 14. Njono | 3. Baraqbah, Sajid Fachru |
| 15. Njoto | 4. Harahap, Banda |
| 16. Nungtjik, A.R. | 5. Jasin, Muslimin |
| 17. Nursuhud | 6. Kandel, Ktut |
| 18. Pardede, Peris | 7. Lesteluhu, Umar |
| 19. Rewang | 8. Muchlis, Aminuddin |
| 20. Ruslan Kamaludin | 9. Rissi, Thobias Paulinus |
| 21. Sakirman, Ir. | 10. Sukatno |
| 22. Sidartojo | 11. Tanggap Peleng, Messer. |
| 23. Siswojo | |
| 24. Sofjan, Sajid Achmad | |

Ketua CC PKI: D.N. Aidit

Wakil Ketua I CC PKI: M.H. Lukman

Wakil Ketua II CC PKI: Njoto

**

KOMISI KONTROL CENTRAL

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Dahono | 5. Suhaemi Rachman |
| 2. Mangkudun Sati | |
| 3. Pane, M.A. | Ketua : Peris Pardede |
| 4. Pardede, Peris | |

**

KOMISI VERIFIKASI CENTRAL

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Busjari Latif | 7. Sundari, Nj. |
| 2. Djadi Wirosbroto | 8. Supeno |
| 3. Kertapati, Sidik | 9. Tambunan, Laurens Darman |
| 4. Ngadiman Hardjosubroto | 10. Tan Ling Djie |
| 5. Singgih Tirtosubroto | 11. Thajeb, Ir. Thaher |
| 6. Sujono Pradigdo | |

Ketua : Sujono Pradigdo
Wakil Ketua : Tambunan, Laurens Darman

**

POLITBIRO CC PKI

Anggota² :

1. Aidit, D.N.
2. Lukman, M.H.
3. Njoto
4. Sakirman, Ir.
5. Sudisman

Tjalonanggota² :

1. Adjitorop, Jusuf
2. Njono

**

SEKRETARIAT CC PKI

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Adjitorop, Jusuf | 5. Pardede, Peris |
| 2. Anwar Kadir | 6. Siswojo |
| 3. Anwar Sanusi, Amir | 7. Sudisman |
| 4. Djoko Sudjono | 8. Supit, Karel |

Kepala Sekretariat CC PKI : Sudisman (Sekretaris)
Wakil Kepala Sekretariat CC PKI : Jusuf Adjitorop (Sekretaris)

Pemenang² Pandji² Kongres Nasional ke-VI PKI berdasarkan hasil pelaksanaan Plan 3 Tahun Pertama Organisasi, Pendidikan, Gerakan Amal dan Kesenian

	Organisasi.	Pendidikan.	Amal.	Kesenian.
Pemenang ke I	Kalimantan Selatan.	Djawa Barat.	Djawa Barat.	Djawa Tengah.
ke II	Djawa Tengah.	Djawa Timur.	Sumatera Utara.	Djawa Barat.
ke III	Djawa Barat.	Djawa Tengah.	Djawa Timur.	Djawa Timur.



RESOLUSI TENTANG LAPORAN UMUM CC PKI KEPADA KONGRES NASIONAL KE-VI

Kongres Nasional ke-VI Partai Komunis Indonesia, yang dilaksanakan pada tanggal 7-14 September 1959 di Djakarta, setelah mendiskusikan Laporan Umum CC yang disampaikan oleh Sekretaris Djenderal CC, Kawan D.N. Aidit, yang berdjudul „UNTUK DEMOKRASI DAN KABINET GOTONGROJONG”, berpendapat bahwa CC Partai pada pokoknja telah dapat melaksanakan dengan baik tugas² yang ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-V dan bahwa tugas² baru dilapangan ideologi, politik dan organisasi yang dirumuskan dalam Laporan ini adalah tepat sepenuhnya, dan karenanya dengan suara bulat menjetudjui Laporan Umum tersebut.

Sedjak Kongres Nasional ke-V banjak pengalaman² yang kaya telah disimpulkan, dan apapun yang sudah terdjadi serta betapapun kesulitan yang pernah dihadapi Rakjat dan Partai, sekarang kita berada dalam situasi dalam dan luarnegeri, dan situasi intern Partai, yang djauh lebih baik, lebih maju dan lebih terkonsolidasi. Dapat dikatakan bahwa Partai selalu berada dalam kedudukan memegang inisiatif dalam kehidupan politik negeri, kepertjajaan massa Rakjat akan kebenaran garis politik Partai semakin besar, kenyataan mana membikin makin beratnja kewadjaban dan tanggungjawab Partai, karena persoalan² yang dihadapi Partai semakin luas dan pelik.

Kongres menjetudjui kesimpulan bahwa tugas² urgen kita belum berubah dari yang ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-V Partai, jaitu, *pertama*, menggalang front persatuan nasional anti-imperialis yang berbasiskan persekutuan kaum buruh dan kaum tani anti-feodal dibawah pimpinan klas buruh; dan *kedua*, meneruskan pembangunan Partai yang tersebar diseluruh negeri dan mempunyai karakter massa yang luas, yang sepenuhnya terkonsolidasi dilapangan ideologi, politik dan organisasi. Berdasarkan kedua tugas urgen kita itu, Kongres djuga menjetudjui empat sembojan pokok yang dikemukakan didalam Laporan, jaitu: „Dengan PKI didepan meneruskan perdjuaan Rakjat untuk Indonesia yang merdeka penuh dan demokratis”, „Perbaiki pekerdjaan front nasional, pentjilkan lebih landjut kekuatan kepalabatu”, „Perkuat front internasional anti-kolonial dan tjinta damai” dan „Landjutkan pembangunan

Partai diseluruh negeri yang bersatu erat dengan massa, yang terkonsolidasi dilapangan ideologi, politik dan organisasi”, yang selandjutnja akan mendjiwai semua kegiatan kita, terutama kegiatan² untuk demokrasi dan Kabinet Gotongrojong, sesudah Kongres Nasional ke-VI Partai, yang berarti bahwa kita menunaikan tugas² nasional dan internasional kita.

I

1. Imperialisme Belanda Musuh Pertama, Imperialisme Amerika Serikat yang Paling Berbahaja

Kongres membenarkan kesimpulan, bahwa apa yang dinjatakan dalam program PKI, jaitu tentang tugas² pembebasan nasional dan perubahan² demokratis di Indonesia yang belum lagi terlaksana, sampai sekarang masih tetap berlaku. Walaupun telah tertjapai hasil² dalam perdjuaan melawan kolonialisme Belanda dan dalam pendemokrasian sistim pemerintahan, samasekali tidaklah berarti bahwa tugas² pembebasan nasional dan perubahan² demokratis dinegeri kita telah rampung.

Dari kenyataan bahwa *perdjuaan Rakjat Indonesia untuk mengachiri kekuasaan kaum imperialis Belanda masih belum selesai, bahwa tugas pembebasan nasional samasekali belum rampung, bahwa Indonesia masih belum merdeka penuh atau pada hakekatnja masih setengah-djadjahan*, maka oleh karena itu *imperialisme Belanda masih tetap merupakan musuh pertama Rakjat Indonesia*.

Dari kenyataan masih bertjokolnja sisa² feodalisme di-desa², maka djelaslah bahwa kita tidak mungkin berbitjara tentang sudah terlaksananja tugas² perubahan demokratis, dan bahwa oleh karena itu *Indonesia masih tetap merupakan negeri setengah-feodal*.

Selain daripada itu, kita samasekali belum dapat berbitjara tentang selesainja tugas² pembebasan nasional, karena imperialisme Amerika Serikat makin lama makin mendesak kedudukan imperialisme Belanda dan makin menempati kedudukan² penting di Indonesia dilapangan ekonomi, politik dan kebudajaan, sehingga dari kenyataan ini Laporan menarik kesimpulan bahwa *imperialisme AS adalah musuh Rakjat Indonesia yang paling berbahaja berhubung imperialisme ini adalah yang paling agresif, paling mampu melaksanakan maksud² djahatnja, berhubung karena penanaman modalnja yang makin besar di Indonesia, berhubung masih agak banjaknja orang² Indonesia yang berkedudukan penting yang naif mengira imperialisme AS tidak begitu djahat*. Politik anti-

imperialisme tanpa melawan infiltrasi dan intrik² AS adalah omongkosong.

Oleh karena itu Kongres membenarkan kesimpulan, bahwa kewajiban pembebasan nasional kita sekarang ialah membersihkan sisa² kolonialisme Belanda dan dengan teguh melawan kegiatan subversif AS dengan SEATO-nja, mentjegah bertambahnya penanaman modal AS dan imperialis lainnja serta memperlakukan perusahaan² AS sama dengan perusahaan² Belanda, apabila AS terusmenerus mempersendjatai gerombolan² kontra-revolusioner atau memberikan bantuan bersendjata kepada Belanda dalam melakukan agresinja terhadap Republik Indonesia. Dalam hubungan ini adalah sangat penting untuk meneruskan perjuangannya menuntut dibatalkannya Undang² Penanaman Modal Asing.

2. Indonesia Masih Tetap Dalam Tjengkeraman Krisis Ekonomi

Indonesia masih tetap berada dalam tjengkeraman krisis ekonomi yang terusmenerus sebagai akibat sifat ekonomi yang kolonial. Krisis ekonomi Amerika Serikat dalam tahun 1957-1958, yang berakibat sangat luas pada dunia kapitalis lebih memperdalam lagi tjengkeraman krisis pada tubuh ekonomi Indonesia.

Mengenai sebab² pokok yang menyebabkan masih berlangsungnya keadaan ekonomi yang suram itu, Kongres membenarkan Laporan yang menjimpulkan sbb.:

Pertama, pembagian kerdja internasional setjara kapitalis, dimana Indonesia termasuk didalamnya, mengakibatkan (a) perbedaan yang semakin besar diantara negeri² industri dan negeri² terbelakang, dan (b) tetap terbelakangnya keadaan negeri² yang sudah terbelakang itu. Hal ini telah membikin Indonesia praktis tidak mempunyai potensi dan kemampuan untuk mengatur dan memperbesar produksinja dalam segala lapangan. Kedudukan bahan² ekspor kita yang makin tak terjamin dipasaran dunia kapitalis, karena menghadapi saingan barang² sintetis, spekulasi dan manipulasi harga dari kaum monopoli besar, kegontjangan permintaan yang semakin sering dan hebat serta pasaran kapitalis yang semakin terbatas, telah membikin tidak mampunya Indonesia mengimpor barang² yang diperlukan, terutama barang² modal dan ini menyebabkan tidak adanya dasar samasekali bagi Indonesia untuk memperbesar produksi barang² yang didjual dalam pasaran kapitalis itu.

Kedua, sisa² feodalisme yang masih meradjalela tidak memungkinkan pembebasan tenaga² produktif di-desa² dan tidak memungkinkan adanya kenaikan produksi bahan² makanan dan hasil² pertanian lainnja.

Ketiga, krisis ekonomi Indonesia djuga disebabkan oleh sangat lemahnja ekonomi sektor negara, yang seharusnya menempati „posisi komando” dan yang seharusnya mendorong, memimpin serta memupuk perkembangan industri dalam negeri, chususnja perkembangan industri berat. Lemahnja ekonomi sektor negara djuga menyebabkan pemerintah tidak akan dapat mengatasi kesukaran² keuangan, berupa defisit yang terusmenerus meningkat dalam anggaran belandja negara dan kenaikan uang yang dipindjam dari bank sentral.

Singkatnja, krisis ekonomi Indonesia yang bersifat kematjetan dalam produksi, kelemahan karena masih tergantung pada ekspor-impor yang terusmenerus mengalami kegontjangan, semakin banjaknja uang beredar yang tidak produktif dan semakin meradjalelanya inflasi dan kenaikan harga barang² pokok, adalah berpangkal pada sifat kolonial daripada ekonomi Indonesia, ekonomi yang masih sangat tergantung kepada pasaran kapitalis.

Kongres membenarkan Laporan yang mentjela tindakan mengadakan sistim BE, yang ternyata tidak dapat memperbaiki ekspor-impor kita, yang semakin memerosotkan nilai rupiah dan yang mengakibatkan naiknya harga barang². Walaupun sekarang BE sudah dihapuskan, tetapi ini tidak berarti bahwa orientasi perdagangan luarnegeri dengan sendirinja akan berubah. Adanja tindakan dilapangan keuangan pada tanggal 24 Agustus tahun ini belum menunjukkan tanda² akan turunnya harga barang, walaupun tindakan² ini, djika diikuti oleh tindakan² lain yang maju bisa menimbulkan kemungkinan² untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan keuangan negeri.

Pemerintah seharusnya melaksanakan politik harga rendah yang ditetapkan dan dikendalikan setjara konsekwen oleh pemerintah. Tjaranja ialah dengan mengharuskan pasar mengikuti harga rendah barang² pokok yang ditetapkan pemerintah, dengan membantjiri pasar dengan barang² pokok dan dengan langsung melaksanakan distribusi barang² pokok melalui koperasi² Rakjat pekerdja, RK² dan RT² serta warung². Dalam hubungan ini, pemerintah seharusnya memberikan lebih banjak proteksi dan fasilitas tanpa diskriminasi kepada koperasi² yang didirikan oleh Rakjat pekerdja.

Mengenai perusahaan² Belanda yang diambilalih dan dinasionalisasi, setelah usaha² untuk mempartikelirkan perusahaan² tsb. pada pokoknja dapat digagalkan, Kongres membenarkan Laporan yang menekankan tentang pentingnya didjamin komposisi badan pelaksana nasionalisasi yang demokratis, dimana serikatburuh² diikutsertakan, untuk ketertiban perusahaan dan meningkatkan produksi dan lebih² untuk mentjegah penguasa² tertentu yang masih ingin

untuk mempartikelirkan perusahaan² itu atau mendjalankan kekuasaan direksi setjara bebas untuk mengadakan manipulasi² dan korupsi. Kongres memperkuat Laporan jang memperingatkan bahwa perusahaan² Belanda jang diambilalih dan kemudian dinasionalisasi itu, jang merupakan salahsatu hasil kongkrit dan penting dari Kabinet Djuanda, haruslah didjaga agar tidak dirusak oleh kaum egois anti-nasional, agen² modal asing, kaum pedagang spekulan, tukang tjatut, koruptor, baik sivil maupun militer.

Karena Indonesia adalah negeri jang luas dengan ribuan pulau, maka dalam hubungan dengan memperbaiki ekonomi negeri, adalah sangat penting masalah komunikasi dan transpor, jang meliputi transpor laut, pembangunan djalan raja dan transpor sungai, pengangkutan kereta-api dan pengangkutan bermotor serta pengangkutan udara. Adalah sepenuhnya benar kesimpulan jang menjatakan, bahwa kebaikan sesuatu pemerintah akan diukur antara lain dari seriusnja pemerintah itu memetjahkan masalah komunikasi dan transpor, dan bahwa masalah kesatuan Indonesia djuga banjak tergantung dari pemetjahan masalah ini.

3. Memperluas Perdagangan Dengan Negeri² Sosialis

Untuk mengatasi kematjetan daiam pembangunan ekonomi di-negeri kita, Kongres memperkuat kesimpulan bahwa kedudukan Indonesia jang tergantung kepada dunia kapitalis harus diachiri dan bahwa Indonesia harus memperluas hubungan ekonomi dengan pasaran dunia Sosialis jang stabil dan jang tak mengenal krisis. Tetapi kenjataan sekarang, menundjukkan bahwa, walaupun sudah ada kemadjuan dalam perdagangan dengan negeri² Sosialis, terutama dengan Uni Sovjet dan RRT, politik perdagangan luarnegeri Indonesia masih tetap berat ke Barat. Dalam kata² sudah banjak diutjapkan tentang mengubah orientasi perdagangan luarnegeri, tetapi dalam perbuatan orientasi perdagangan luarnegeri masih tetap berat ke AS, Inggris, Djerman Barat, Djepang dan negeri² imperialis lainnja. Karena negeri² Sosialis merupakan produsen lebih dari sepertiga produksi industri dunia, maka barulah dapat dikatakan tidak beratsebelah apabila volume perdagangan luarnegeri Indonesia dengan negeri² tersebut ditingkatkan menjadi se-kurang²nja sepertiga dari seluruh perdagangan luarnegeri Indonesia.

Sistim liberal dalam perdagangan luarnegeri jang membikin Indonesia tergantung kepada negeri² imperialis itu menjukarkan kita untuk bisa mengambil langkah² jang njata guna memperluas

perdagangan luarnegeri dengan negeri² Sosialis. Padahal, negeri² Sosialis adalah bukan hanja pasar jang stabil, luas dan tak terbatas bagi barang² ekspor kita, tetapi djuga merupakan sumber jang terpertjaja untuk mendapatkan barang² modal dan barang² konsumsi jang kita butuhkan.

Dalam hubungan ini, Kongres membenarkan Laporan jang menilai sistim pembayaran dengan djalan „clearing” (clearing payment) jang ditjiptakan oleh Pemerintah Ali Sastroamidjojo jang pertama sebagai usaha untuk menerobos ikatan sistim liberal tersebut jang membawa perbaikan dalam struktur dan nilai perdagangan luarnegeri kita. Dari sini dapat disimpulkan, bahwa *kalau Indonesia ingin mengatasi kematjetan dalam pembangunan ekonominja, dan mendapat barang² jang sangat diperlukan untuk memperbaiki keadaan ekonominja, maka djalan jang se-baik²nja ialah menghapuskan sistim jang liberal ini dan kembali kesistim pembayaran dengan djalan „clearing”, terutama dengan negeri² Sosialis dan dengan negeri² Asia-Afrika dan djuga dengan negeri² Amerika Latin. Politik impor kita harus disesuaikan dengan rentjana pembangunan jang kongkrit dan urgen sehingga barang² jang diimpor sungguh² berguna untuk mengatasi krisis ekonomi sekarang. Dengan djalan ini orientasi jang masih sangat berat ke Barat dalam struktur perdagangan luarnegeri kita dapat dirombak.*

Mengenai peraturan impor baru dari Pemerintah Djuanda, dapat dikatakan bahwa peraturan ini mempunyai segi² positif, karena menurut peraturan ini Pemerintah menguasai impor barang² penting sedjumlah 75% daripada nilai seluruh impor jang berupa devisa, jang disalurkan melalui „8 besar”, jaitu CTC, Usindo, PT Indestin, PT Indivitra, PT Juda Bhakti, PT Mira Sari, PT Satya Negara dan PT Triangle. Tetapi peraturan ini harus lebih disempurnakan lagi dengan tindakan² antara lain sbb. : perusahaan² „8 besar” agar tetap sepenuhnya milik negara, mendirikan *Badan Impor dan Ekspor Negara jang tunggal* dan mengatur status jang ber-matjam² dari semua perusahaan negara dalam Undang² Perusahaan Negara berdasarkan prinsip² jang demokratis dan anti-liberalisme.

Untuk menghentikan kemerosotan terusmenerus dilapangan ekonomi dan terutama untuk melepaskan Indonesia dari akibat buruk krisis dunia kapitalis, adalah penting untuk mengadakan tuntutan² sbb. :

Pertama : supaya produksi dalam negeri diperbesar, antara lain dengan djalan menasionalisasi perusahaan² Belanda jang diambilalih, termasuk bank Belanda di Indonesia ; saham² Belanda dalam BPM harus dioper ; perusahaan² KMT harus disita dan didjadi-

kan milik negara ; perusahaan² negara harus menduduki „posisi komando” ; politik memenuhi kebutuhan sendiri dalam perekonomian, terutama mengenai bahan makanan dan pakaian, harus direalisasi ; di-perusahaan² negara harus dilaksanakan prinsip „pimpinan patriotik, pertinggi produksi, tjegah korupsi dan sabotage, djamin demokrasi dan perbaiki nasib buruh” ; areal tanah-garapan harus diperluas, tjara mengerdjakan tanah harus lebih diintensifkan dan tingkat hidup kaum tani harus diperbaiki.

Kedua : supaya ekspor-impor dan distribusi bahan² penting sepenuhnya ditangan Pemerintah ; politik harga yang disesuaikan dengan dajabeli Rakjat harus dilaksanakan ; penjelundupan dan barter liar harus diberantas ; ekonomi sektor negara harus diutamakan sebagai djaminan dapatnja Pemerintah mengendalikan seluruh perekonomian negeri dan menggerowoti kekuasaan ekonomi modal besar asing.

Ketiga : prinsip perdagangan luarnegeri harus diubah ; orientasi perdagangan luarnegeri yang berat ke-negara² imperialis harus dirombak dengan meluaskan hubungan dagang dengan negara² A-A dan Sosialis ; supaya didatangkan barang² modal dan bahan² baku untuk mendirikan dan mengembangkan industri dalam negeri ; dan supaya produksi perusahaan² minjak asing diawasi dan distribusinja dikuasai oleh Pemerintah, djuga devisen yang dihasilkan oleh perusahaan² minjak asing itu supaya dikuasai Pemerintah.

Keempat : supaya Pemerintah berusaha memenuhi keperluan akan barang² modal dan teknik dari luarnegeri melalui pindjaman luarnegeri dengan bunga yang se-rendah²nja dan tanpa ikatan politik atau militer untuk keperluan rehabilitasi dan pembangunan industri negeri kita dan untuk mengeksploitasi pelikan yang banjak ragam dan djumlahnja yang terdapat didalam bumi negeri kita. Undang² Penanaman Modal Asing harus dibatalkan.

Selanjutnja Kongres membenarkan bahwa pelaksanaan tuntutan² ekonomi ini tidak bisa dipisahkan dari usaha membasmi habis sisa² pemberontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta” dan DI-TII serta komplotan² pengatjau ekonomi dari kaum modal besar asing yang bersekongkol dengan komprador dan elemen² parasiter, baik sivil maupun militer, didalam badan² ekonomi dan aparat² Pemerintah. Djuga tuntutan² ini tidak bisa dipisahkan dari tuntutan pembentukan Kabinet Gotongrojong dibawah pimpinan Presiden Sukarno, dimana diwakili setjara adil partai² dan golongan² karja yang mempunyai ke-sungguh²an untuk melaksanakan tjita² Revolusi Agustus 1945 yang bersifat nasional dan demokratis.

4. Pengangguran, Kemiskinan, Ketidakadilan Ekonomi Dan Sosial

Kongres membenarkan konstataasi bahwa, sebagai akibat krisis ekonomi yang makin mendalam, pengangguran, kemiskinan, ketidakadilan ekonomi dan sosial adalah tak terhindarkan.

Kaum buruh dihadapkan kepada kesulitan² pokok antara lain sbb. : kemerosotan terusmenerus daripada tingkat hidup kaum buruh, pegawai dan Rakjat pekerdja pada umumnya ; terus membubungnja harga barang² kebutuhan yang pokok dengan tjepat ; bertambah besarnja antjaman pemetjatan dan meluasnja pengangguran ; dan bertambah sempitnja kesempatan kerdja karena tidak berkembangnja industri sektor negara dan partikelir nasional. Oleh karena itu kewadajiban Partai dan serikatburuh² ialah dengan gigih melawan pemetjatan, mentjegah kenaikan harga, berdjuaug untuk kenaikan upah, kenaikan pangkat dan perbaikan sosial ekonomi kaum buruh dan pegawai.

Kaum tani mengalami penindasan dari fihak tuantanah dan lintahdarat berhubung masih bertjokolnja sisa² feodalisme, gangguan gerombolan DI-TII dan sisa² bandit „PRRI-Permesta”, dan seribusatu matjam kesulitan lainnja dilapangan penghidupan dan pertanian. Walaupun ada beberapa usaha Pemerintah untuk memperbaiki keadaan didesa dan kedudukan kaum tani, tetapi kenja-taannja nasib kaum tani belum mengalami perubahan fundametil, bahkan mendjadi lebih buruk. Oleh karena itu, disamping Partai harus lebih tekun lagi membangkitkan kaum tani untuk tuntutan² bagiaannja, sekedjappun tidak boleh dilupakan bahwa tudjuan terpenting dari gerakan tani ialah menghapuskan samasekali sisa² feodalisme.

Kaum miskin kota yang terdiri dari bakul, tukang loak, tukang betjak yang memiliki betjak sendiri, tukang warung ketjil, tukang sol sepatu, tukang pateri, tukang potong rambut dll. dan yang djumlahnja tidak sedikit itu pada umumnya djuga mengalami nasib yang sengsara. Diantara mereka banjak yang masih muda² dan djumlah mereka makin lama makin besar berhubung adanja urbanisasi. Kaum miskin kota, sebagaimana halnja dengan burdjuasi ketjil pada umumnya, termasuk tenaga penggerak revolusi. Dalam keadaan penghidupan yang terlalu sukar, sebagian dari mereka dapat dipergunakan oleh madjikan² sebagai pematah pemogokan atau bisa sampai tertarik kepada fikiran² yang extrim atau liar. Mereka djuga mudah merosot mendjadi orang gelandangan. Oleh karena itu, Partai harus bekerdja lebih baik dikalangan kaum miskin kota dan mengorganisasi mereka untuk perbaikan peng-

hidupannya.

Ber-djuta² kaum nelayan yang mempunyai peranan penting dalam memproduksi bahan makanan yang berupa ikan, kadang² juga dalam melindungi keamanan dan menjelamatkan negeri serta dalam melantarkan pengangkutan laut dan sungai, pada umumnya hidup dalam keadaan sengsara dan terbelakang. Sebagian dari mereka hidup sebagai buruh nelayan yang dihisap oleh djuragan² sero dan djuragan² perahu besar, tingkat kebudayaan mereka pada umumnya masih rendah, alat² kerdjanja kuno, sedangkan hubungan kerdjanja masih bersifat feodal. Oleh karena itu semakin urgenlah pekerdjaan Partai dikalangan nelayan untuk mengorganisasi dan membangkitkannya dalam aksi² untuk perbaikan nasib, untuk kebebasan² demokratis dan untuk perbaikan alat² kerdja.

Inteligensia, termasuk para pekerdja ilmu dan kebudayaan masih tetap mengalami kesukaran² berupa kurangnya alat², kurangnya biaja, sukarnya sjarat² kerdja dan tingginya pajak. Partai harus dengan sepenuh-hati bersatu dengan mereka dan membantu mereka dalam mengatasi kesulitan²nja dan mengembangkan bakat²nja.

Keadaan penghidupan yang buruk daripada kaum buruh, kaum tani, kaum miskin kota, nelayan dan inteligensia kita itu menunjukkan penderitaan sebagian besar Rakjat Indonensia yang semakin berat, yang menjadi korban daripada krisis ekonomi sekarang, korban daripada politik Pemerintah yang kurang mentjerminkan kepentingan nasional dan kepentingan Rakjat.

5. Memperbaiki Pekerdjaan Front Nasional Dan Mementjilkan Lebih Landjut Kekuatan Kepala batu

Mengenai masalah front nasional, Kongres membenarkan analisa bahwa setjara politik dalam tahun² belakangan ini Indonesia bergeser kekiri. Demikian juga membenarkan analisa Sidang Pleno ke-IV CC yang menjimpulkan adanya tiga matjam kekuatan politik yang hampir seimbang, yaitu kekuatan kepala batu, kekuatan progresif dan kekuatan tengah, yang masing² mempunyai konsep sendiri² tentang penyelesaian Revolusi Agustus 1945. Diantara tiga kekuatan ini terdapat kontradiksi². Ada kontradiksi pokok dan ada kontradiksi yang tidak pokok. Kontradiksi antara kekuatan progresif dengan kekuatan tengah adalah kontradiksi yang tidak pokok, kontradiksi dikalangan Rakjat. Sedangkan kontradiksi antara Rakjat dengan kekuatan kepala batu adalah kontradiksi yang pokok, karena kaum kepala batu mewakili kepentingan kaum imperialis yang memusuhi Rakjat Indonesia.

Dewasa ini keadaan dari tiga kekuatan itu adalah sebagai berikut :

Kekuatan kepala batu, karena politik mereka yang terlalu reaksioner, sangat anti-nasional dan anti-Rakjat, „prestise” mereka sudah sangat merosot, mereka sudah tak mungkin lagi menguasai pemerintahan sentral lewat djalan parlementer, sedang kekuatan mereka sekarang pada pokoknja terletak pada bantuan kaum imperialis, terutama kaum imperialis AS. Walaupun demikian kekuatan kepala batu tidak boleh diremehkan karena negeri kita yang masih setengah-djadjahan dan setengah-feodal, yang berarti masih adanya kekuasaan kaum imperialis dan kekuasaan kelas tuantanah, merupakan sumber bagi kehidupan kekuatan kepala batu. Oleh karena itu kekuatan kepala batu masih tetap merupakan kekuatan yang harus tidak henti²nja ditelandjangi dan dilawan dengan segenap tenaga.

Mengenai *kekuatan tengah*, berhubung watak mereka yang bimbang, Partai telah menjimpulkan, bahwa dengan kekuatan progresif yang besar ditambah dengan adanya program yang menguntungkan golongan² dalam kekuatan tengah, dengan langgam-kerdja Partai yang baik, dan dengan kemampuan kekuatan progresif memberikan pukulan² yang berat dan djitu kepada kaum kepala batu, ada kemungkinan bahwa kekuatan tengah untuk waktu yang lama bersikap setia pada perdjuaan anti-imperialis dan anti-feodal. Djuga telah disimpulkan bahwa djika mereka tidak lagi setia menjalankan politik anti-imperialisme, mereka bisa ber-sama² dengan kekuatan kepala batu mengadakan pukulan² terhadap kekuatan progresif sehingga untuk sementara waktu dapat menghalangi perkembangan gerakan demokratis.

Sebagai akibat dari kedudukan ekonomis yang lemah daripada burdjuasi nasional, yang pada umumnya adalah burdjuasi dagang, kita melihat adanya dua tjiri. *Pertama*, keadaan ini menjejabkan watak yang sangat bimbang dan sangat tidak konsekwen daripada burdjuasi nasional Indonesia, yang telah menjadikan negeri kita tanah yang subur untuk tumbuhnja komprador² dan kapitalis² birokrat. *Kedua*, keadaan ini tidak memberikan dasar materiil yang kuat untuk adanya pertentangan yang tajam antara burdjuasi nasional dengan kelas buruh pada umumnya, halmana sampai batas² tertentu membantu penggalangan front nasional. Burdjuasi nasional Indonesia adalah faktor politik yang penting, karena mereka mempunyai pengaruh politik yang berarti dikalangan kaum intelektual dan alat² negara.

Politik sovins dari golongan² tertentu dari burdjuasi nasional yang mempertadjam pertentangan² antara kapitalis² Indonesia,

jaitu antara „asli” dan jang „tidak asli” dan sikap mereka jang ragu² dalam mengambilalih perusahaan² Belanda pada hakekatnja djuga bersumber pada watak mereka jang bimbang dan ketidakberanian mereka dalam melawan ekonomi imperialis. Tetapi setelah pengambilalihan jang dipelopori oleh kaum buruh mendjadi suatu kenjataan, kekuatan tengah jang berwatak egois itu berusaha untuk memindahkan perusahaan² itu ketangan perseorangan mereka. Disinilah bertemunya kepentingan kaum tengah dengan kepentingan kaum reaksioner jang bisa merupakan landasan politik reaksioner mereka bersama. Inilah latarbelakang persetudjuan² „tukang kelontong” antara burdjuasi kepalabatu dengan elemen² nasionalis kanan dengan sembojan untuk „membendung Komunisme”.

Dalam kekuatan tengah terdapat sajak kanan, golongan sentris dan sajak kiri.

Dengan dorongan kaum imperialis *sajak kanan* dalam kekuatan tengah berusaha menarik seluruh kekuatan tengah meninggalkan politik kerdjasama dengan kekuatan progresif. Latarbelakang daripada sikap ini ialah bahwa berhubung djatuhnja „prestise” kaum kepalabatu, imperialisme AS untuk sementara tidak dapat lagi mendjalankan politiknya di Indonesia setjara efektif lewat saluran kaum kepalabatu jang dikepalai oleh partai² Masjumi-PSI, dan oleh karena itu sangat membutuhkan komprador² baru dari kalangan kaum tengah, baik sivil maupun militer, sambil berusaha menegakkan kembali kedudukan kaum kepalabatu.

Golongan sentris dalam kekuatan tengah biasanja bukanlah golongan jang kuat, tetapi jang mampu „mengawinkan” sajak kiri dan kanan, dan mempunjai ketjenderungan untuk memihak jang kuat dalam kekuatan tengah. Oleh karena itu kemenangan sajak kiri dalam kekuatan tengah akan merupakan besi-berani jang bisa menarik golongan sentris kekiri, dan dengan demikian dapat mentjegah kekuatan tengah bergeser kekanan.

Sajak kiri dalam kekuatan tengah menentang politik melatjurkan diri kepada imperialisme dan kaum reaksioner dalam negeri. Politik sajak kiri dalam kekuatan tengah sampai batas² tertentu mentjerminkan perasaan² dan harapan² massa pengikut kekuatan tengah, jang sebagian besar terdiri dari massa burdjuis ketjil. Dalam hubungan penyelesaian Revolusi Agustus 1945, sajak kiri ini pada waktu sekarang sudah tidak pertjaja lagi kepada pimpinan lapisan atas dari burdjuasi nasional. Walaupun mereka belum menerima dan mengakui pimpinan proletariat, tetapi mereka sudah mulai menjedari bahwa klas buruh memainkan peranan jang penting dalam gerakan kemerdekaan nasional dan dalam memim-

pin penyelesaian Revolusi Agustus 1945. Karena itu supaja mereka lambatlaun dapat menerima dan mengakui pimpinan proletariat, proletariat harus memperkuat diri lagi dan harus menundukkan kemampuannya jang lebih besar dalam membela kepentingan seluruh Rakjat.

Mengenai tokoh² kekuatan tengah jang memihak kaum pemberontak kontra-revolusioner, Partai menetapkan sikap jang tidak menjamaratakan. Terhadap mereka jang sedjak semula memang sudah reaksioner tetapi sebelum pemberontakan terdjadi berdjubah kaum tengah, sikap kita sama seperti sikap terhadap kaum kepalabatu. Terhadap mereka jang tersesat tetapi sesudah „PRRI-Permesta” dikalahkan menjatakan setia lagi kepada Republik Indonesia, sikap kita bukanlah seperti terhadap kaum kepalabatu. Kita harus menarik mereka kembali kedalam front persatuan nasional, karena tugas Partai bukanlah menghantjurkan burdjuasi nasional, tetapi menghantjurkan kaum kontra-revolusioner.

Walaupun ada kesukaran² tertentu dalam menggalang front persatuan nasional, tetapi dari kenjataan adanya sikap dan tindakan bersama antara kekuatan progresif dengan gerakan nasionalis revolusioner jang dipimpin oleh Presiden Sukarno dalam melawan imperialisme dan dalam melemahkan kekuatan kepalabatu, harus ditarik kesimpulan bahwa front persatuan nasional dinegeri kita bertambah kuat.

Untuk memperkuat front persatuan nasional lebih lanjut, maka tugas kita jang penting ialah : *terus mengembangkan kekuatan progresif dengan mengutamakan kekuatan massa buruh dan tani dan memenangkan sajak kiri dalam kekuatan tengah*. Politik kita mengenai seluruh kekuatan tengah ialah : *mendorong jang sudah maju, menarik jang bimbang dan membangkitkan jang masih terbelakang*.

Mengenai *kekuatan progresif* dapat ditarik kesimpulan, bahwa dari kenjataan besarnya rol proletariat dalam pengambilalihan perusahaan² Belanda dan dalam membasmi kaum pemberontak kontra-revolusioner dan dari kenjataan besarnya kepertjajaan Rakjat kepada PKI, proletariat Indonesia sudah semakin dapat menempatkan dirinya dan sudah mulai mendapat pengakuan sebagai pelopor dalam perdjjuangan nasional dan dalam perdjjuangan Rakjat Indonesia menjelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus 1945.

Dalam mengembangkan dirinya, kekuatan progresif selalu akan menemui kesulitan². Sajak kiri dari kekuatan tengah bermaksud, disamping memukul kekuatan kepalabatu, menggunakan dan membatasi kekuatan progresif. Sajak kanan dari kekuatan tengah berusaha menghambat perkembangan dari kekuatan progresif dengan

politiknja „pukul kanan dan pukul kiri”, tetapi lebih banjak memukul kekiri daripada memukul kekanan. Untuk politik kanannja sampai batas² tertentu mereka bersedia berkompromi dengan kekuatan kepalabatu. Kaum kepalabatu dengan dorongan terusmenerus dari kaum imperialis berdjuaang mati²an untuk membasmi gerakan Komunis. Djuga kaum trotskis tidak mau ketinggalan dalam usaha „memburu Komunis” ini.

Berhubung dengan itu kaum Komunis harus senantiasa mempertinggi kewaspadaannja dan tidak djemu²nja terus mengeratkan dan meluaskan hubungannja dengan seluruh lapisan Rakjat serta mengatasi kekurangan²nja. Dewasa ini dikalangan kader² Partai masih terdapat kekaburan² pandangan tentang kontradiksi tidak pokok dan pokok didalam masjarakat Indonesia sekarang, dan kurangnja pengertian bahwa pada suatu keadaan kontradiksi jang antagonistis bisa mendjadi tidak antagonistis, sedangkan jang tidak antagonistis mendjadi antagonistis, sehingga kita kurang mampu tepat pada waktunja menggunakan tiap² keadaan untuk memperkuat front nasional.

Mengenai imbalan diantara tiga kekuatan itu pada waktu sekarang dapat disimpulkan bahwa „*kekuatan kepalabatu sudah djauh merosot, dan bersamaan dengan itu kekuatan progresif sudah semakin besar, sedang kekuatan tengah pada pokoknja tetap*”. Garis politik Partai menghadapi tiga kekuatan ini adalah tetap, jaitu *mengembangkan kekuatan progresif, bersatu dengan kekuatan tengah dan mementjilkan kekuatan kepalabatu*. Ini berarti melaksanakan sembojan : *Perbaiki pekerdjaan front nasional, pentjilkan lebih landjut kekuatan kepalabatu*.

6. PKI Mempertahankan Republik Proklamasi

Kongres membenarkan seluruh kebidjaksanaan Partai dalam Dewan Konstituante dan sikap Partai jang mendukung pendekritan UUD 1945 oleh Presiden Sukarno. Dengan adanya pendekritan tsb. telah ditutup kemungkinan bagi elemen² reaksioner untuk menimbulkan perpetjahan² nasional jang lebih djauh setelah Konstituante tidak dapat mensahkan UUD 45. Djuga telah dapat ditjegah kompromi² jang memalukan dan merugikan Rakjat antara kekuatan tengah jang pro UUD 45 dengan mereka jang kontra UUD 45.

7. Sikap PKI Terhadap Kabinet Sukarno-Djuanda

Tentang pembentukan Pemerintah Koalisi Nasional atau pembentukan Kabinet Gotongrojong, Kongres membenarkan kesim-

pulan bahwa dapat atau tidaknja pemerintah ini dibentuk tergantung pada pekerdjaan Partai menggalang front persatuan, pengembangan kekuatan progresif dan pada kemampuan Partai melakukan pukulan² jang djiu terhadap kekuatan kepalabatu. Tentang duduknja orang² Komunis didalam kabinet tergantung pada imbalan kekuatan jang riil. PKI harus mempersoalkan duduknja dalam kabinet, karena PKI bertudjuan memperkuat persatuan nasional dan PKI selamnja merasa bertanggungjawab mengenai keadaan Rakjat dan bangsa Indonesia. Dalam hal tidak duduk dalam kabinet, sikap Partai adalah sbb : *Pertama*, PKI bisa menjokong djika programnja madju, komposisi menteri²nja tjukup baik untuk melaksanakan programnja jang madju itu; *kedua*, jalah berposisi, djika programnja reaksioner atau sangat tidak memenuhi tuntutan² politik dan ekonomi jang paling minimum daripada Rakjat.

Dalam menggalang front persatuan nasional, dalam mengembangkan kekuatan progresif dan mementjilkan kekuatan kepalabatu, dan dalam usaha membentuk kabinet jang madju, masalah Angkatan Perang tidak boleh dianggap ketjil. Masjumi-PSI dan kaum militeris jang memihak mereka ber-kali² mentjoba mengadakan kudeta, tetapi senantiasa gagal. Kegagalan ini disebabkan antara lain oleh tiga faktor penting : *Pertama*, Presiden Sukarno jang menjatukan diri dengan Rakjat mempunjai pengaruh jang kuat dikalangan angkatan bersendjata, dan Presiden Sukarno menolak mendjadi diktator militeris; *kedua*, APRI adalah anak kandung Revolusi Rakjat, karena itu mayoritas daripada para perwira, bintang dan tamtama APRI tidak mudah dipaksa untuk mendjalankan perintah jang ditudjukan untuk melikwidasi Republik Proklamasi dengan djalan membentuk diktatur militer atau diktatur perseorangan; *ketiga*, Rakjat Indonesia tidak hanya mentjintai demokrasi, tetapi dibawah pimpinan Partai jang waspada Rakjat aktif membela demokrasi itu.

Bagi perkembangan madju Indonesia, PKI akan terus berdjuaang melawan bahaya diktatur militer atau diktatur perseorangan dan bersamaan dengan itu mempertahankan dan meluaskan demokrasi. Tetapi, seandainya diktatur militer atau diktatur perseorangan tidak tertjegah, djadi toch terdjadi djuga, maka kewadajiban tiap Komunis jalah melawannja dengan sekuat tenaga.

Djuga dalam menganalisa kemungkinan² perkembangan Kabinet Sukarno-Djuanda sebagai kelanjutan dari Kabinet Djuanda jl., keadaan khusus jang harus mendapat perhatian jalah masih tetap berlakunja kekuasaan militer. Kekuasaan militer telah memperlihatkan segi² positif, terutama di-daerah² bergolak. Tetapi djuga

ada segi² negatifnja, yang terpenting diantaranya ialah pergekangan hak² demokrasi bagi Rakjat dan tjampurtangan sementara perwira yang masih aktif dalam perekonomian, keuangan dan politik pemerintahan yang bukan bidangnya.

Pada waktu² yang diperlukan, PKI dan Rakjat bisa memberikan kekuasaan sampai batas² tertentu kepada Angkatan Perang yang patriotik, selama kekuasaan ini tidak disalahgunakan. Kita harus mentjegah timbunja kontradiksi yang tidak perlu atau yang tadjam antara Rakjat dan Angkatan Perang, dan hal² yang mungkin menjudu kearah pertadjaman harus dihindari. Pelaksanaan garis „Dwitunggal Rakjat dan Tentara“, jaitu garis „Rakjat bantu Tentara dan Tentara bantu Rakjat“ atau „Saling-bantu Rakjat dan Tentara“ adalah djaminan dalam mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan nasional Indonesia.

Walaupun sesudah kembali ke UUD 45 belum terbentuk Kabinet Gotongrojong, Kongres menganggap tepat sikap realis daripada Partai yang menjokong Kabinet Sukarno-Djuanda serta yang sudah dan akan membantu dengan sekuat tenaga pelaksanaan programnja dan pelaksanaan pokok² fikiran yang terkandung dalam Manifesto Politik Presiden Sukarno yang diutjapkan pada tanggal 17 Agustus 1959, selama kabinet ini tidak meng-halang²i perkembangan gerakan kemerdekaan dan demokratis. Sokongan PKI terhadap kabinet ini adalah sokongan yang ichlas dan kritis berpedoman pada prinsip : *menjokong politiknya yang maju tanpa reserve, mengkritik politiknya yang ragu² supaya menjadi maju, dan menentang menteri² yang politiknya merugikan Rakjat.*

Tetapi Rakjat Indonesia tidak akan berhenti didjalan dan tidak akan melepaskan tuntutan politiknya yang praktis, jaitu pembentukan Kabinet Gotongrojong. Dalam hubungan ini Rakjat Indonesia tidak akan melupakan utjapan Presiden Sukarno yang mengatakan bahwa Rakjat Indonesia berhak menagih pelaksanaan program dan bahwa se-waktu² menteri² bisa diganti oleh Presiden. Dibentuknja DPAS dan Depernas yang komposisinya mendekati semangot gotongrojong telah lebih mendorong Rakjat Indonesia untuk meneruskan tuntutan pembentukan Kabinet Gotongrojong.

8. Memperkuat Dan Memperluas Demokrasi

Dalam menganalisa perkembangan demokrasi di Indonesia, Kongres membenarkan kesimpulan bahwa sistim demokrasi liberal telah menjadi bangkrut dimata Rakjat Indonesia. Tjepatnya kebangkrutan ini disebabkan oleh dua proses. *Pertama*, proses kesadaran Rakjat Indonesia sendiri, yang berdasarkan pengalaman-

nja sendiri melihat bahwa demokrasi liberal identik dengan korupsi, birokrasi dan ketidakmampuan dalam memetjahkan persoalan² pokok dan penting dari Rakjat Indonesia. *Kedua*, karena agitasi anti Parlemen, yang pada hakekatnja anti kehidupan demokratis oleh promotor² junta-militer dan elemen² fasis lainnja.

Kebangkrutan sistim demokrasi liberal dimata Rakjat Indonesia terdjadi dalam keadaan dimana imbanan² kekuatan dalam negeri belum memungkinkan diatasinja krisis sistim politik ini dengan mentjiptakan kekuasaan Rakjat.

Tetapi, walaupun demikian Rakjat Indonesia tidak mengizinkan krisis demokrasi liberal „diatasi“ dengan kemenangan „PRRI-Permesta“, kemenangan diktatur militer atau diktatur perseorangan, atau dengan terbentuknja kabinet reaksioner. Dalam keadaan sekarang pelaksanaan Konsepsi Presiden dan Demokrasi Terpimpin adalah djalan yang se-tepat²nja, supaya krisis demokrasi liberal berachir dengan kemenangan difihak Rakjat.

PKI menerima Demokrasi Terpimpin dengan pengertian bahwa yang diterimanja adalah demokrasi, meskipun belum Demokrasi Rakjat, tetapi demokrasi yang anti diktatur militer dan diktatur perseorangan. Anti-liberalisme dilapangan politik tidak bisa diartikan lain ketjuali pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100%, jaitu pembentukan Kabinet Gotongrojong. Anti-liberalisme dilapangan ekonomi tidak bisa diartikan lain ketjuali mengutamakan ekonomi sektor negara sebagai sjarat untuk dapat memimpin seluruh perekonomian negeri dan menggerowoti kekuasaan ekonomi kapital besar asing.

Kongres menjetudju bahwa untuk mengalahkan bahaya fasisme yang masih tetap mengantjam adalah kewadajiban seluruh Rakjat Indonesia untuk memperdjungkan agar pemerintah melaksanakan programnja dengan sungguh² serta memperkuat dan memperluas kehidupan demokratis disegala lapangan, antara lain dengan mendjamin kebebasan² demokratis yang se-luas²nja bagi Rakjat dan organisasi² Rakjat dan mendjamin semua hak dan kebebasan kaum buruh untuk membela kepentingan²nja yang sah.

II

Dalam menganalisa politik luarnegeri Republik Indonesia, Kongres membenarkan Laporan yang menjimpulkan bahwa *politik luarnegeri Indonesia harus diabdikan untuk kemenangan Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja, dan bersamaan dengan itu ia djuga harus mengabdikan perdamaian dan kerukunan internasional antara bangsa², mengabdikan perdjungan anti-imperialisme pada umumnya.*

Dua tugas politik luarnegeri ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dalam hubungan ini politik luarnegeri Indonesia harus dibentuk dan disusun ber-sama² dengan Rakjat dan berdasarkan kekuatan dan kepentingan Rakjat Indonesia dan Rakjat² sedunia.

Atas dasar ini, Kongres menjetudjui kesimpulan bahwa politik luarnegeri yang wadjar dan objektif ialah politik luarnegeri yang mampu menghadapi musuh internasional Rakjat Indonesia yang paling berbahaja, yaitu imperialisme AS, yang mampu mentjegah dan mengalahkan intervensi dan agresi imperialis, yang mampu menghadapi segala muslihat politik reaksioner dan segala komplotan kontra-revolusioner yang bersumber pada politik subversif imperialis terhadap Indonesia, dan bersamaan dengan itu ia djuga harus mampu membantu tertjapainja pelaksanaan pembangunan ekonomi dan perbaikan hidup seperti yang di-tjita²kan oleh Rakjat Indonesia. Pendeknja, ia harus benar² sesuai dan mentjerminkan segala yang madju daripada keadaan dalamnegeri Indonesia.

1. Inti Pokok Zaman Kita Jalah Peralihan Dari Kapitalisme ke Sosialisme

Kongres sepenuhnya menjetudjui Laporan Umum yang menunjukkan bahwa inti pokok dari zaman kita sekarang ialah peralihan dari kapitalisme ke Sosialisme yang telah dimulai dengan Revolusi Sosialis Oktober Besar Rusia, dan bahwa didunia sekarang sedang berlangsung dua proses sosial yang berlawanan satu sama lain dan yang perkembangannja makin tjepat menudju arahnja masing². Disatu pihak dunia imperialis dengan proses sosialnja menudju kehantjurannja sendiri dan difihak lain dunia Sosialis dengan proses sosialnja menudju kearah peluasan dan kemadjuan terusmenerus. Satu dengan proses sosial yang kedua ini adalah perkembangan gerakan kemerdekaan nasional yang sekarang sudah banjak melahirkan negeri² yang baru merdeka dan dengan se-djelas²nja menunjukkan makin rontoknja sistim kolonial imperialis. Kongres dengan gembira menjambut konstataasi bahwa sebagai akibat landjutnja dua proses ini banjak perubahan² intensif dan kemadjuan² telah terdjadi dalam kehidupan bangsa² dan dalam kehidupan politik internasional selama periode antara Kongres Nasional ke-V sampai kini.

Dari kenyataan bahwa golongan² yang berkuasa di AS berusaha keras untuk menghimpun disekitar mereka semua kekuatan reaksioner dari dunia kapitalis dan dari kenyataan sifat²nja yang agresif, intervensionis dan penindas, Kongres menganggap tepat kesimpulan yang menjatakan bahwa kaum imperialis AS adalah musuh

nomor satu seluruh bangsa² didunia, dan bahwa melawan imperialisme AS dalam situasi dunia sekarang merupakan bagian yang terpenting daripada perdjjuangan untuk kemerdekaan nasional, demokrasi dan perdamaian.

2. Situasi Ekonomi Dunia Kapitalis Sekarang

Dalam menganalisa situasi ekonomi dunia kapitalis sekarang Kongres membenarkan Laporan Umum yang menunjukkan berkali² terdjadinja krisis ekonomi yang menimpa AS dan dunia kapitalis sedjak Perang Dunia II, sebagai akibat dari makin meruntjingnja kontradiksi² dalam masjarakat kapitalis sendiri antara keinginan untuk memperbesar produksi dan terbatasnja kemampuan dajabeli dari pasaran dalamnegeri, sebagai akibat dari makin sempitnja dunia kapitalis dengan meluasnja dunia ekonomi Sosialis dan oleh kemadjuan negeri² non-Sosialis yang baru merdeka dan yang mulai membangun ekonominja yang berindustri. Djuga persaingan diantara negeri² kapitalis untuk menguasai pasaran kapitalis semakin menghebat seperti terlihat dari pertarungan sengit mengenai masalah Pasaran Bersama Eropa diantara enam negara Eropa Barat dan konsepsi Daerah Dagang Bebas dari Inggris. Dalam pada itu angka² pengangguran di-negeri² kapitalis terus-menerus menaik. Di AS masalah pengangguran sangat mengawatirkan umum. Oleh umum sudah diakui bahwa ekonomi AS harus menjesuaikan diri dengan suatu „pengangguran kronis yang permanen”.

Kongres djuga membenarkan Laporan yang menunjukkan bahwa dalam usahanja untuk mengatasi krisis² ekonomi yang dihadapinja kaum monopolis AS mengambil djalan memperbesar pengeluaran militer, djalan memiliterisasi ekonomi negeri, yang memang adalah satu²nja djalan yang terbuka bagi mereka. Industri perang AS memakai hampir separoh dari seluruh investasi industri partikelir dan merupakan sampai 39% dari total produksi industri berat AS. Sendjata merupakan bahan ekspor Amerika yang terpenting, djuga dalam rangka „bantuan” yang diberikannja kepada negeri² lain. Oleh karena itulah mereka senantiasa mendjalankan politik luarnegeri yang menimbulkan ketegangan² sampai ketepi perang dan menimbulkan peperangan² lokal yang baru, agar dapat memperbesar pasaran bagi industri perangnja. Politik kaum imperialis yang bersumber pada djalan buntu daripada sistim kapitalisme, sistim yang tidak mempunjai haridepan lagi, merupakan sumber dan biangkeladi utama dari semua ketegangan internasional dan telah berakibat mempertentangkan bangsa² tertentu satu sama lain.

Hanja ketakutan terhadap kekuatan militer jang unggul dari negeri² Sosialis dan terhadap pendapat umum dunia jang kuat menentang perang menjebabkan kaum imperialis sampai sekarang tidak berani begitu sadja nekad untuk membakar dunia dalam perang dunia jang baru.

Oleh karena itu untuk keselamatan dan keamanan dunia, untuk kemerdekaan dan kemajuan bangsa², politik ini harus dilawan dan dikalahkan. Adalah satu kenyataan bahwa Partai² Komunis disemua negeri memelopori dan memimpin perlawanan terhadap perang. Adalah djuga kenyataan, bahwa Partai Komunis dan Pemerintah Uni Sovjet memelopori perdjungan melawan politik perang negara² imperialis jang dikepalai oleh AS.

3. Kubu Sosialis Dan Pengaruh Internasionalnja

Mengenai perkembangan negeri² kubu Sosialis dan pengaruh internasionalnja, Kongres dengan gembira membenarkan konstata-si dalam Laporan, bahwa sekarang Sosialisme sedang mengungguli kapitalisme dalam semua hal jang berarti maju, berguna dan baik bagi Rakjat pekerdja dan umatmanusia. Dalam sedjumlah tjabang penting daripada ilmu dan tekhologi Uni Sovjet telah meninggalkan AS. Dalam produksi industri Uni Sovjet sudah lama melampaui negara² kapitalis jang terbesar di Eropa, jaitu Inggris, Perantjis dan Djerman Barat. Dalam tahun 1970, djadi 5 tahun sesudah melaksanakan Plan 7 Tahunnja, Uni Sovjet sudah akan menempati kedudukan nomor satu didunia, baik dalam volume produksi mutlak maupun produksi per kapita. Sputnik² dan lunik² buatan Sovjet adalah bukti jang paling menjolok dari kenyataan bahwa dibawah Sosialisme telah diudjudkan hasrat² jang paling berani dan berhasil daripada umatmanusia.

Disamping itu, Laporan menundjukkan bahwa sekarangpun produksi industri per kapita dari seluruh dunia Sosialis telah menjusul produksi per kapita dari seluruh dunia kapitalis. Negeri² Sosialis jang didiami oleh sepertiga penduduk dunia sekarang sudah menghasilkan lebih dari sepertiga produksi dunia, hampir separoh dari produksi gandum dan 53% dari produksi kapas. Sesudah Rentjana 7 Tahun Uni Sovjet terlaksana sepenuhnya, dan ditambah lagi dengan ketjepatan jang tinggi dari perkembangan ekonomi negeri² kubu Sosialis lainnja, maka dalam tahun 1965 sistim dunia Sosialis bukan hanja akan unggul dalam produksi per kapita, tetapi djuga akan menghasilkan lebih dari separoh produksi dunia. Sukses besar ini akan merubah samasekali keadaan dan imbalanced kekuatan internasional demikian rupa, sehingga lahirilah kemungkinan jang

njata untuk menjingkirkan peperangan dunia dari kehidupan manusia, walaupun kemenangan Sosialisme didunia belum tertjapai sepenuhnya dan disebagian dunia masih ada kapitalisme.

Selandjutnja Laporan menundjukkan bahwa perkembangan Sosialisme dunia ditandai oleh sukses² besar jang ditjapai oleh sedjumlah negeri kubu Sosialis dalam membangun atau dalam penyelesaian pembangunan Sosialisme. Republik Rakjat Tiongkok sedang melaksanakan tugas² pembangunan Sosialis dengan gaja maju melompat. Dalam melaksanakan tugas² ini Partai Komunis dan Rakjat Tiongkok jang berbakat telah menundjukkan dajakreasinja jang tinggi dengan mentjiptakan Komune² Rakjat jang merupakan suatu tingkat baru dari pembangunan Sosialis di-desa² dan mempunjai arti internasional jang penting. Komune² Rakjat jang makin berkembang di-desa² RRT sedjak tahun 1958 dan jang telah *„menggabungkan industri, pertanian, perdagangan, pendidikan dan urusan kemiliteran dan dimana administrasi pemerintah dan urusan Komune telah dipersatukan”*, terang merupakan kekuatan raksasa dalam perdjungan untuk membela perdamaian dan untuk mengalahkan imperialisme. Di Tjekoslowakia penghisapan manusia oleh manusia pada dasarnya telah dihapuskan dan merupakan salahsatu Republik jang terkemuka didunia dalam produksi industri. Di Bulgaria Sosialisme telah menang dikota dan desa. Di Republik Demokrasi Djerman, Polandia, Rumania, Hongaria, Albania, Republik Rakjat Demokrasi Korea, Republik Demokrasi Vietnam dan Republik Rakjat Mongolia, pembangunan Sosialisme maju dengan pesat.

Selandjutnja Laporan menundjukkan bahwa dengan adanja Dewan Saling Bantu Ekonomi kerdjasama dilapangan ekonomi antara negeri² kubu Sosialis telah mendjadi lebih sempurna lagi. Kerdjasama ekonomi ini terutama ditudjukan untuk memadjukan sumber² bahan mentah dan tenaga listrik serta pada soal mempergunakan segala apa jang paling baru ditjapai dilapangan teknologi. Perhatian khusus diberikan pada kebutuhan kordinasi jang lebih besar dan pada spesialisasi dilapangan permesinan jang akan memungkinkan pelaksanaan massa-produksi setjara besar²an serta modern dan jang akan sangat mengurangi biaya produksi. Ini adalah bentuk dan sistim kerdjasama internasional bagi masyarakat dunia diharidepan.

Kongres membenarkan Laporan jang menjimpulkan bahwa proses peralihan dari kapitalisme ke Sosialisme dalam abad kita sekarang tidak hanja telah melahirkan Sosialisme di Eropa dan Asia, tetapi djuga telah melahirkan kubu perdamaian jang sangat kuat dan melahirkan gerakan kemerdekaan nasional jang belum pernah

ada taranja dalam sedjarah dunia.

Adalah tak diragukan lagi bahwa Sosialisme sebagai ide sudah mengisi fikiran bagian terbesar penduduk dunia, bahwa Sosialisme sudah mendjadi sistim dunia, mendjadi simbol dan perwakilan dari segala sesuatu yang baik dan maju serta mendjadi daja-penarik internasional dan harapan serta tudjuan hidup bagi be-ratus² djuta manusia yang masih meringkuk dan sengsara dibawah peng-hisapan dan penindasan kapital.

Dalam diplomasi dan politik internasional Sosialisme merupa-kan pembela yang setia dan tegas dari kemerdekaan bangsa² dan perdamaian dunia, pengandjur dan pelaksana dari hidup berdamp-plingan setjara damai dan bersahabat antara bangsa², tjontoh dari-pada kemauan baik dan kesanggupan hidup dan bekerdjasama setjara damai antara bangsa² dengan sistim sosial yang berlainan, pengandjur dari normalisasi perdagangan internasional tanpa dis-kriminasi dan tukar-menukar hasilbumi dan kebudayaan antara Ti-mur dan Barat. Dilapangan ekonomi Sosialisme merupakan kesang-gupan kerdja setjara berentjana, mengindustrialisasi negeri setjara besar²an, penggunaan otomasi se-luas²nja, mekanisasi pertanian dan kesanggupan membawa kemajuan dan kemakmuran yang terusmenerus meningkat dalam kehidupan materiil dan kulturil ma-nusia. Keunggulan Sosialisme atas kapitalisme djuga terbukti di-lapangan ilmu dan teknologi, dilapangan kebudayaan, moral dan kekuatan militer.

Tingkatan baru dalam gerakan Komunis sedunia telah tertjapai dengan adanya „Deklarasi“ dari 12 Partai Komunis dan Partai Buruh negeri-negeri Sosialis dan „Manifes Perdamaian“ dari 64 Partai Komunis dan Partai Buruh sebagai hasil Konferensi Mos-kow dalam bulan November 1957, dimana telah dirumuskan inti-sari dari pengalaman² Komunis sedunia yang paling berharga.

Adanja RRT telah mengubah wadja dunia dan bagi Asia RRT mempunyai arti yang luarbiasa. Dengan adanya RRT ditambah dengan adanya Republik Rakjat Mongolia, Republik Rakjat De-mokrasi Korea dan Republik Demokrasi Vietnam, berarti lebih separoh dari penduduk Asia telah masuk kubu Sosialis dan meru-pakan benteng yang sangat kuat dalam perdjuaan menghantjur-kan sisa² kekuasaan imperialis di Asia.

Tetapi kendatipun telah terdjadi kemajuan² penting dan ber-sedjarah dalam gerakan Komunis sedunia, Kongres menganggap tepat bahwa Laporan mengingatkan kita akan bahaya revisionisme modern dari klik Tito di Jugoslavia, yang hendak mengatjau dan memetjahbelah gerakan Komunis sedunia.

Dari kenyataan bahwa sukses² besar telah ditjapai dalam pem-

angunan Sosialisme, terutama dengan dimulainja pembangunan Komunisme di URSS dan gerakan Komune Rakjat yang djaja di RRT, Kongres menjtudjui Laporan yang menjimpulkan bahwa ge-rakan Komunis sedunia dan kubu Sosialis belum pernah begitu kuat dan begitu bersatu seperti sekarang ini.

Mengenai hubungan² yang seharusnja antara Sosialisme sebagai suatu sistim dunia yang terus berkembang dan kapitalisme sebagai suatu sistim dunia yang masih belum lenjap, Laporan mengingat-kan bahwa kaum Komunis telah lama menundjukkan djalan keluar, jaitu prinsip hidup berdampingan antara negara² yang sistim sosial-nja berlainan, prinsip ko-exsistensi setjara damai antara negara² kapitalis dan Sosialis, dan bahwa kaum Komunis akan terus ber-buat segala-galanja untuk mentjegah djangan sampai djalan perang bisa dipaksakan kepada dunia. Memang sistim kapitalisme tidak akan pernah dapat dipaksakan meski dengan djalan perang se-kalipun terhadap suatu masyarakat yang sudah tjukup sjarat²nja untuk Sosialisme.

Dalam hubungan ini, Laporan menundjukkan bahwa pernajaan² yang sangat penting daripada prinsip hidup berdampingan setjara damai antara lain ialah diadakannja hubungan dagang yang bebas, normal dan ramai antara Barat dan Timur dan pertukaran interna-sional antara wakil² pemerintah dan wakil² Rakjat dari berbagai negeri.

4. Situasi Politik Internasional

Berbitjara tentang situasi politik internasional, Kongres mem-benarkan kesimpulan bahwa didunia sekarang terdapat dua aliran mengenai persoalan² dan pertikaian² politik internasional, jaitu aliran yang membela dan memperdjuangkan Sosialisme dan aliran yang membela dan mempertahankan kapitalisme, sebagai pentjer-minan dari proses objektif yang sedang terdjadi dimasyarakat dunia. Karena mewakili dua proses yang berbeda, kedua aliran ini djuga mempunyai watak yang berbeda pula. Yang pertama tampil kedepan dengan tudjuan yang djudjur dan dinjatakan setjara terusmenerus seperti yang tertjermin dalam politik Partai² Komunis dan diplomasi Sosialis. Yang kedua terpaksa dan terbukti harus tersembunji dan harus membontjeng kepada demagogi „Sosialis“, seperti yang di-lakukan oleh Perdana Menteri Nehru dari India.

Laporan menundjukkan bahwa pertarungan antara kedua aliran ini dalam politik internasional meliputi masalah² yang menjangkut kepentingan umum seluruh dunia. Yang terpokok diantaranya ialah masalah perang dan damai, masalah perang dingin, masalah kolo-

nialisme, masalah pangkalan militer dinegeri lain, masalah perdagangan bebas dan normal antara Timur dan Barat, masalah larangan digunakannya senjata² nuklir, masalah dihentikannya pertjobaan² bom nuklir, masalah perlutjutan persendjataan dan masalah hangat lainnya, misalnya, masalah remiliterisasi Djepang, masalah penjatuan kembali Vietnam dan Korea, masalah Berlin Barat, masalah perdjandjian perdamaian dengan Jerman, masalah pakt² militer agresi SEATO, NATO dll. Laporan menegaskan bahwa diantara semua masalah hangat ini, masalah Berlin Barat dan Jerman adalah yang paling mendesak dewasa ini. Militerisme Jerman yang dihidupkan kembali dengan bantuan kaum monopolis AS merupakan bahaya yang sangat mengganggu keamanan dan perdamaian Eropa dan dunia.

Kongres juga membenarkan kesimpulan bahwa sedjalan dengan berlangsungnya dua proses didunia, yaitu proses kehantjuran kapitalisme dan proses kenaikan Sosialisme, dalam politik diplomasi internasional terdapat dua matjam kebidjaksanaan dengan tudjuan, tjara² dan semangatnya sendiri². Yang satu adalah politik luarnegeri yang membela dan mempertahankan penghisapan dan penindasan, kolonialisme dan perang. Yang lain politik luarnegeri negeri² Sosialis yang berdjuaug untuk menghapuskan penghisapan, kolonialisme dan perang, dan untuk mentjiptakan masjarakat baru didunia yang adil dan makmur, damai dan madju.

Adalah satu kenyataan bahwa kaum imperialis kepalabatu, terutama kaum imperialis AS, karena terusmenerus nekad mempertahankan kolonialisme, terusmenerus menimbulkan ketegangan² baru, karena terus mengadakan subversi, intervensi dan agresi, dewasa ini sudah semakin terisolasi dan dibentji oleh Rakjat sedunia. Disamping itu meluapnya kebangunan anti-kolonial yang sekarang meliputi seluruh daerah Asia, Afrika dan Amerika Latin, adalah pula merupakan pukulan² yang berat bagi imperialisme dunia. Dalam hubungan ini perlu ditjatat kemenangan mutlak „Partai Aksi Rakjat“, dalam pemilihan umum di Singapura pada awal tahun ini yang merupakan pukulan berat bagi kolonialisme Inggris dan politik pro-Inggris Tengku Abdul Rachman dari Malaja. Adalah tidak berlebih-lebihan djika berdasarkan kenyataan ini Kongres menjetudjui kesimpulan bahwa dalam periode yang ditindjau perkembangan internasional benar² menundjukkan pergeseran ke kiri kearah yang lebih mementjilkan dan merugikan kaum imperialis, terutama imperialis AS.

Dalam hubungan dengan kebangunan anti-kolonial dari bangsa² Asia dan bangsa² Arab, Kongres menganggap penting bahwa Laporan mengkonfrontasikan djalan Mesir dari Nasser yang tersesat

dengan djalan Irak dari Kasim yang benar. Pengalaman Mesir menundjukkan bahwa tidak mungkin politik luarnegeri yang madju dipertahankan selama politik dalam negerinya adalah anti-demokratis dan anti-Komunis dan bahwa politik anti-Komunis dan anti-demokratis adalah berlawanan dengan prinsip anti-kolonial dan tjinta damai dari Putusan² Bandung dan sedjalan dengan politik imperialis yang mempertahankan kekuasaan kolonialnya di-negeri² Arab, di Asia dan di-bagian² dunia lainnya. Tak disangsikan lagi bahwa djalan Irak sekarang, djalan kerdjasama nasionalis dan Komunis, adalah djalan Arab dan djalan kemerdekaan nasional yang sedjati.

Dalam hubungan kebangkitan anti-kolonial di Asia, Afrika dan Amerika Latin, yang telah mengubah imbalanced kekuatan internasional yang menguntungkan bagi kemerdekaan, demokrasi, Sosialisme dan perdamaian, Laporan menekankan perlunya djakini arti internasional yang amat penting dari gerakan² dunia untuk menentang perang dan membela perdamaian abadi. Bagi berhasilnya perdjuaugan mempertahankan perdamaian dan mentjegah perang dunia yang baru, Laporan menundjukkan bahwa sjarat yang menentukan ialah imbalanced kekuatan internasional yang menguntungkan bagi Sosialisme.

Dalam hubungan dengan tugas² kita dilapangan politik luarnegeri Kongres memperkuat kesimpulan² Partai dimasa yang lalu bahwa Indonesia seharusnya menempatkan diri sebagai partisipan yang aktif dalam front internasional anti-kolonial dan tjinta damai, bahwa Partai harus selalu berusaha untuk mendorong Pemerintah Indonesia supaya bertindak dan mendjalankan politik luarnegeri kearah ini, dan bahwa bagi kaum Komunis bekerdja dalam gerakan perdamaian merupakan tugas perdjuaugan yang serius dan sungguh² yang harus dilakukan dengan sepenuh-hati.

5. Soalnja Bukan „Memilih Blok“, Tetapi Mendjalankan Politik Luarnegeri Yang Menguntungkan Rakjat Indonesia

Dalam menganalisa politik luarnegeri Indonesia, Kongres sepenuhnya menjetudjui kesimpulan bahwa kerdjasama dengan Uni Sovjet dan negeri² kubu Sosialis lainnya dalam front internasional untuk perdamaian dan anti-kolonial memberikan djaminan bagi keselamatan, kemadjuan dan haridepan yang lebih baik bagi Republik Indonesia. Hanya dengan meluaskan kerdjasama dengan negeri-negeri Sosialis, politik luarnegeri yang bebas dan aktif menudju perdamaian dan anti-kolonial bisa diletakkan diatas

sendi² dan dalam proporsi yang sebenarnya. Hanya dengan demikian, politik ini tidak akan salah tumbuh menjadi suatu politik netral yang bantiji yang tidak berani memihak dan menghadapi berbagai masalah internasional, atau tumbuh menjadi suatu politik „tidak pilih kasih antara kedua blok” yang berarti bersikap dan memberikan perlakuan yang sama baiknja kepada imperialisme seperti kepada Sosialisme.

Berbitjara tentang politik bebas dan aktif, Kongres sepenuhnya menjetudjui Laporan yang menjimpulkan bahwa politik bebas Sjahrir langsung bertentangan dengan politik luarnegeri yang bebas dan aktif untuk perdamaian dan anti-kolonial yang dengan disokong oleh Rakjat didjalankan oleh Pemerintah² Indonesia sedjak Kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama dan yang kedua sampai sekarang, dan bahwa karenanja Sjahrir samasekali bukan pembentuk politik luarnegeri Indonesia yang sekarang didukung oleh Rakjat Indonesia tetapi adalah lawannja. Dalam hubungan ini, Laporan mendjelaskan bahwa sudah sedjak semula Sjahrir memegang peranan penting dalam politik luarnegeri Indonesia, ia sudah menakut-nakuti Rakjat Indonesia dan mengandjurkan supaya menjerah kepada imperialisme dan supaya djangan merugikan atau membikin marah kaum imperialis, dan bahwa karena itu kemerdekaan yang bisa ditjapai oleh Indonesia menurut konsepsinja tidak lebih dari „kemerdekaan” dalam nama sadja yang tetap berada dibawah pengaruh negeri kapitalis besar.

Mengenai politik luarnegeri Hatta, Laporan mendjelaskan bahwa ia adalah tidak lebih daripada kelanjutan politik luarnegeri Sutan Sjahrir yang chianat itu. Adalah sepenuhnya benar kesimpulan yang menjatakan bahwa politik luarnegeri Sjahrir dan Hatta yang meremehkan kekuatan Rakjat Indonesia sendiri dan kekuatan anti-kolonial didunia dan yang sebaliknya menjerah pada intimidasi² dan kehendak² imperialis achirnja tumbuh menjadi politik komprador, jaitu politik tunduk pada imperialisme dan memusuhi perdjungan kemerdekaan Rakjat Indonesia untuk membela dan menjempurnakan Republik Proklamasi.

Dalam hubungan ini, Kongres menganggap tepat peringatan dalam Laporan bahwa politik luarnegeri Sjahrir-Hatta yang antirasional dan pro-imperialis itu dewasa ini belum lenjap samasekali dan bahwa diantara para diplomat dan para penguasa dalam politik luarnegeri Republik Indonesia masih terdapat tjukup banyak oknum² yang masih berdjawa dan bersemangat konsepsi politik luarnegeri Sjahrir-Hatta. Ini sangat menghambat perkembangan dan kemajuan Republik Indonesia sehingga oleh karenanja perlu segera dibersihkan.

Adalah kenjataan sedjarah bahwa sesungguhnya tradisi politik luarnegeri Republik Indonesia semendjak berdirinja adalah berdasarkan hubungan dan kerdjasama persahabatan dengan Timur, walaupun dirintangi oleh Sutan Sjahrir. Berdasarkan kenjataan sedjarah, Kongres membenarkan Laporan bahwa negara² Sosialis adalah pembela² dan penjokong² setia sedjak tahun² pertama Revolusi dan demikian djuga negara² Asia-Afrika, dan bahwa sahabat² tradisionil Republik Indonesia dan sahabat² di-waktu² yang sulit adalah negara² Timur dan bukan negara² Barat, yang selamanya memihak Belanda.

Dalam hubungan ini Rakjat Indonesia perlu menjatakan penghargaan dan rasa terimakasih yang se-besar²nja kepada proletariat Nederland beserta Partainja, jaitu Partai Komunis Nederland, yang dari sedjak semula selalu melawan politik kolonial Pemerintah Nederland dan selai² membela kemerdekaan Indonesia dan hak Republik Indonesia atas Irian Barat.

Mengenai politik luarnegeri Kabinet Wilopo, kabinet pertama yang disokong oleh PKI sesudah KMB, yang dirumuskan sebagai „politik luarnegeri yang bebas dan aktif menudju perdamaian” Kongres membenarkan Laporan yang menjimpulkan bahwa dengan ini politik bebas model Sjahrir-Hatta mulai ditinggalkan, meskipun kesanggupan untuk menempatkan Indonesia tegas² dalam front internasional anti-kolonial dan tjinta damai belum tjukup pada kabinet ini.

Kongres membenarkan kesimpulan bahwa atas desakan kekuatan progresif, dasar² politik luarnegeri Indonesia yang agak maju telah diletakkan terutama oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo yang telah berhasil mendorong terlaksananja konferensi Bandung yang telah melahirkan prinsip² dan semangat Bandung yang bersedjarah, dan bahwa politik ini dilandjutkan oleh Kabinet Djuanda dengan menundjukkan tanda² kesediaan untuk lebih memperluas hubungan ekonomi dan kebudayaan dengan negeri² kubu Sosialis dan dengan menempuh „djalan lain” mengenai Irian Barat. Dengan politiknya yang tegas menentang pendaratan tentara AS di Pakanbaru pada awal tahun 1958, Pemerintah Djuanda dengan dukungan Rakjat Indonesia telah berhasil menjelamatkan Republik Indonesia.

Dalam keadaan sekarang adalah kewadajiban Partai untuk lebih mengembangkan hasil² positif yang telah ditjapai oleh politik luarnegeri Indonesia. Yang per-tama² perlu mendapat perhatian adalah pelaksanaan yang kongkrit dan sungguh² dari putusan² Bandung. Didalam lingkungan PBB kerdjasama kelompok A-A perlu dipererat dan lebih diaktifkan lagi.

Mengingat Indonesia berada dibarisan paling depan dalam menghadapi SEATO, adalah penting supaya Pemerintah mengadakan usaha² yang intensif dalam merealisasi politik tetangga baik atas dasar azas² memelihara perdamaian dan anti-kolonial, agar Indonesia dilindungi oleh negara² tetangga yang bersahabat. Dju-ga sudah pada tempatnja djika Pemerintah Indonesia ber-sama² dengan kelompok A-A meneruskan perđuangan dengan lebih teguh lagi didalam PBB dan diforum internasional lainnja untuk memasukkan RRT dan Republik Rakjat Mongolia kedalam PBB, untuk menghapuskan perbedaan rasial di Afrika Selatan dan di-bagian² dunia lainnja dan untuk memelihara keamanan di Timur Tengah dan Timur Djauh dengan menuntut penarikan mundur semua tentara asing dari daerah² tsb. Demikian pula perđuangan Irian Barat harus diteruskan, djuga di PBB dan lebih meyakinkan negara² didunia, terutama negara² Asia-Afrika dan djuga negara² Amerika Latin tentang adil dan benarnja tuntutan Rakjat Indone-sia. Selanjutnja demi kepentingan Indonesia sendiri, kerdjasama dilapangan ekonomi, ilmu dan kebudayaan dengan negeri² kubu Sosialis harus lebih diluaskan lagi sesuai dengan politik luarnegeri Pemerintah yang agak madju, yang anti-kolonial dan tjinta damai.

Dalam hubungan dengan SEATO, Kongres menganggap tepat pada waktunja bahwa Laporan memperingatkan sikap Pemerintah Djepang yang belum menundjukkan kesadaran untuk mendjalan-kan suatu politik luarnegeri yang tjinta damai, demokratis dan ber-sahabat terhadap negeri² tetangga di Asia, yang menundjukkan bahwa imperialisme Djepang masih merupakan bahaya yang meng-ganggu perdamaian dan kemerdekaan Asia.

Laporan menekankan pentingnja adanja kedjernihan dan ke-djelasan dalam pandangan dan pengertian politik luarnegeri bahwa yang mendjadi musuh dan penghalang utama dari keselamatan dan keutuhan Republik Indonesia adalah imperialisme dunia yang di-kepalai oleh AS, dan oleh karena itu harus dilawan dengan sung-guh² dan berani tanpa menjerah sedikitpun djuga. Sudah men-djadi kenyataan umum, bahwa kekuatan imperialis bukannya tidak terbatas, bahwa imperialisme adalah matjan kertas yang bukannya tidak terkalahkan dan bahwa imperialis mundur djika dilawan.

Kongres memperkuat Laporan yang menjimpulkan bahwa untuk melaksanakan tugas² politik luarnegerinja, Pemerintah perlu mem-punyai aparatur yang dapat dipertjaja dan mampu, yang patriotik dan ahli, bahwa korps diplomat dan pedjabat² dinas luarnegeri perlu dibersihkan dari kutu² elemen² „PRRI-Permesta” dan bersamaan dengan itu diperkuat dengan patriot² yang memiliki keahlian be-

kerdja yang lebih tinggi dan lebih mampu menguasai dan meme-tjahkan masalah²nja.

III

1. Perkembangan Partai Antara Kongres Nasional ke-V Dan ke-VI

Dalam membitjarakan masalah pembangunan Partai, Kongres Nasional ke-VI dengan gembira membenarkan kesimpulan, bahwa selama masa antara Kongres ke-V dan ke-VI, Partai kita telah mengalami perubahan besar dan sudah mendjadi Partai terbesar dinegeri kita. Partai telah berkembang meluas keseluruh negeri dan dibeberapa pulau djuga sudah mulai mendalam dan berakar. Kemadjuan melompat daripada Partai tidak hanja dalam pening-katan djumlah anggota dan pengikut, tetapi djuga dalam pening-katan ideologi, politik dan organisasi. Berbeda dengan waktu Kon-gres Nasional ke-V, perbandingan djumlah anggota dan tjalon-anggota sekarang sudah hampir sama, walaupun djumlah anggota seharusnya djauh lebih banjak dari djumlah tjalonanggota. Pro-sentase keanggotaan dari kalangan kaum tani telah lebih besar, sedangkan dari kalangan kaum intelektual dan wanita sudah lebih banjak yang masuk mendjadi anggota atau bersimpati pada Par-tai. Dari elemen buruh djuga sudah bertambah banjak didalam Partai, tetapi prosentasenja tidak mengalami perubahan penting.

Sepandjang sedjarahnja, sebagian besar dari anggota Partai kita telah mengalami penggemblengan dalam pelbagai perđuangan revolusioner. Perlawanan gagahberani dan pengorbanan besar yang sudah diberikan oleh anggota² Partai dalam perđuangan² ini telah menggembleng seluruh barisan Partai, telah sangat meningkatkan martabat Partai dimata Rakjat, telah lebih mengeratkan hubungan Partai dengan massa Rakjat dan dengan alat² negara yang pa-triotik. Bersamaan dengan itu ia djuga telah membadjukan per-satuan dalam Partai, persatuan dikalangan pimpinan atasan, per-satuan antara pimpinan atasan dan bawahan dan persatuan antara pimpinan dengan massa anggota. Ketjintaan dan solidaritet antara sesama Komunis adalah semangat yang berkuasa dalam Partai.

Mengenai sebab² mengapa Partai dalam waktu singkat ini bisa mempunyai djumlah keanggotaan yang besar dan tumbuh mendjadi Partai massa, Kongres membenarkan Laporan yang menundjukkan pentingnja hal² sbb. : diadakannja koreksi atas kesalahan² funda-mentil dari Partai dilapangan politik dan organisasi seperti yang dibahas dalam resolusi „Djalan Baru”; kemudian tindakan² Polit-biro yang dibentuk pada permulaan tahun 1951, yang telah ber-

hasil menjusun rentjana Konstitusi baru Partai, yang telah merumuskan garis politik front persatuan nasional yang konsekwen anti-imperialisme dan yang berbasiskan persekutuan buruh dan tani dan garis organisasi tentang pembangunan Partai yang dibolsjewikkan, yang meluas diseluruh negeri, yang mempunyai karakter massa yang luas; penjusunan program agraria revolusioner; penjusunan program Partai yang tepat; dan selandjutnja kemampuan Partai dalam mengambil sari² yang berharga, yang bersifat nasional dan progresif dari sedjarah, kebudajaan dan tradisi Rakjat kita. Adalah sepenuhnya terbukti, bahwa kebenaran politik Partai telah sangat besar artinja bagi pekerdjaan memperkuat dan meluaskan Partai.

Kongres djuga dengan gembira menjambut konstatasi didalam Laporan bahwa hubungan Partai kita dengan Partai² sekawan yang berdasarkan persamaan hak dan kemerdekaan masing², makin hari makin bertambah erat, baik dengan djalan mempeladjar pengalamannya Partai² sekawan maupun dengan menghadiri Kongres² mereka atau kontak² pribadi antara pemimpin² Partai kita dengan pemimpin² Partai sekawan.

2. Pendidikan Marxisme-Leninisme Sjarat Mutlak Untuk Persatuan Didalam Partai

Berbitjara tentang pendidikan Marxisme-Leninisme, Kongres menganggap tepat putusan pimpinan Partai untuk, sesudah kesalahan dilapangan organisasi diperbaiki dan sesudah garis umum pembangunan Partai yang diletakkan oleh Kongres Nasional ke-V dilaksanakan dengan berhasil, melaksanakan pendidikan setjara besar²an didalam Partai. Dalam hubungan ini sangat penting artinja gerakan² semendjak tahun 1952 untuk mempeladjar Program dan Konstitusi Partai bagi anggota² baru setiap kali diadakan gerakan perluasan keanggotaan, gerakan² yang mewadjabkan anggota² lama mempeladjar dokumen² Partai serta buku² Marxisme-Leninisme, dan lebih² lagi Plan 3 Tahun Mengenai Organisasi dan Pendidikan.

Berdasarkan Plan 3 Tahun Pertama, maka diadakan pendidikan diseluruh Partai tentang prinsip² fundamenteil Marxisme-Leninisme dan tentang mempertahankan pendirian, pandangan dan metode klas buruh. Pendidikan dihubungkan setjara erat dengan tugas urgen Partai, dan dipandang sebagai usaha untuk menghilangkan rintangan² ideologis agar tugas² Partai sekarang dapat dilaksanakan dengan baik dan agar para kader tidak asing mengenai tugas yang akan dilakukan dikemudian hari.

Kongres menjedari pentingnja kesimpulan, bahwa salahsatu pe-

kerdjaan Partai sesudah Kongres Nasional ke-VI ialah mendidik semua fungsionaris dan aktivis Partai, dan mendidik mayoritas daripada massa anggota menurut sistim pendidikan baru.

Dengan dilaksanakannja pendidikan, maka kebulatan fikiran mendjadi terdjamin, semangat Komunis mendjadi lebih kuat berkuasa dalam Partai. Dalam hubungan ini, tepat sekali kesimpulan Sidang Pleno ke-IV CC, yang menjatakan bahwa „*Persatuan didalam Partai hanya mungkin djika didasarkan atas persatuan fikiran, persatuan ideologi, jaitu fikiran atau ideologi Marxisme-Leninisme. Hanya djika ada persatuan fikiran dari orang² Komunis, barulah ada persatuan yang sungguh² didalam politik dan organisasi Partai Komunis, barulah ada persatuan didalam aksi² Rakjat yang dipimpin oleh Partai Komunis*”.

Mengenai kesukaran² dan kesalahan² yang kita temui dan kita perbuat dalam melaksanakan garis politik dan organisasi yang ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-V serta kesukaran² dan kemungkinan² membuat kesalahan dimasa datang Kongres membenarkan kesimpulan bahwa yang penting ialah supaya kita selamannya mengerti apa yang mendjadi pokok dan sebab daripada semua kesukaran dan kesalahan itu. Dalam Kongres Nasional ke-V sudah disimpulkan, bahwa segala kesalahan, baik kesalahan karena dogmatisme maupun kesalahan karena emperisme, adalah bersumber pada ideologi subjektivisme. Adalah kewadjaban pimpinan Partai untuk mempeladjar dan menganalisa kesalahan² dimasa lampau, menarik pelajaran dari kesalahan² yang lampau itu, agar sebagaimana dikatakan oleh Kawan Liu Sau-tji „*dalam pekerdjaan selandjutnja membuat lebih sedikit kesalahan, dan sedapat mungkin tidak mengulangi kesalahan yang pernah terdjadi serta tidak menjebabkan kesalahan ketjil mendjadi kesalahan besar*”.

3. Subjektivisme Harus Terus Kita Perangi

Untuk melawan ideologi subjektivisme, Kongres membenarkan Laporan yang menundjukkan kesimpulan Kongres ke-V yang menjatakan bahwa adalah sangat penting untuk melakukan dua hal: *Pertama*, mengadjar anggota² Partai untuk memakai metode Marxis-Leninis dalam menganalisa situasi dan dalam mengukur kekuatan klas. Dengan demikian kita menentang analisa dan perhitungan setjara subjektif. *Kedua*, memimpin perhatian anggota² kearah penjelidikan dan studi dilapangan sosial dan ekonomi. Dengan melakukan dua hal ini, kita dapat menentukan taktik perdjuaan dan metode kerdja, dan dengan demikian membikin kawan² kita mengerti bahwa kesalahan dalam penjelidikan sesuatu

keadaan yang nyata akan menjebak mereka tenggelam dalam fantasi dan avonturisme.

Melakukan dua hal tsb. diatas berarti bahwa kita mempertinggi taraf Marxisme-Leninisme daripada kader² Partai dan mendidik mereka memadukan teori dengan praktek. *Singkatnja, kita harus tahu Marxisme-Leninisme dan kenal keadaan untuk meningkatkan hasil pekerjaan. Tahu Marxisme-Leninisme dan kenal keadaan, inilah sembojan beladjar dan sembojan bekerdja kita.*

Sumber sosial daripada subjektivisme ialah keadaan negeri kita yang merupakan negeri burdjuis ketjil. Tetapi kesalahan² kita bisa djuga tidak berpangkal pada sumber sosial, tetapi berpangkal pada sumber pengertian yang salah. Untuk menghindarkan kesalahan ini, kita harus dengan tepat memahami kenjataan objektif dengan segala sudutnja dan dengan tepat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan tidak bertindak menurut keinginan kita yang subjektif dan berat sebelah.

Selanjutnja Kongres membenarkan sepenuhnya kesimpulan, bahwa dalam usahanya untuk menghalang-halangi kemadjuan gerakan progresif dan kemadjuan perjuangan anti-imperialisme dan anti-feodalisme pada umumnya, berhubung sukarnja untuk memukul politik dan program PKI, kaum imperialis dan kakitangannya serta kaum burdjuis dalam negeri pada waktu sekarang lebih banyak mentjurahkan kegiatannya dalam gelanggang ideologi, dimana mereka setjara diam² menjelundupkan pandangan² dunia idealis dalam mendjelaskan masalah² politik, hukum, kesenian dsb., sehingga menimbulkan kekatjauan dalam dunia ideologi. Oleh karena itu adalah tepat kesimpulan, bahwa *salahsatu tugas terpenting sekarang, ialah meneruskan pembangunan Partai dengan penekanan pada segi pembangunan ideologi. Dengan mengemukakan ini tidak berarti bahwa kita boleh menganggap remeh masalah organisasi. Pembangunan organisasi adalah tetap penting, tetapi lebih penting lagi pembangunan ideologi.* Bagi kaum Komunis, ideologi adalah djenderal. Tanpa ideologi yang tepat tidak ada yang bisa berdjalan beres sebagaimana tanpa djenderal yang baik tidak ada tentara yang bisa menang.

Untuk memperbaiki pekerjaan Partai dilapangan ideologi, dimasa² datang kita harus lebih mengutamakan pelajaran filsafat Marxisme-Leninisme, jaitu materialisme dialektik dan histori. Dengan memahami filsafat akan menjadi djelas bagi kader² kita bahwa filsafat itu adalah dasar teori daripada segala taktik, garis, pedoman dan politik dan dengan demikian kader² kita tidak hanya tahu kebenaran, tetapi djuga tahu sebab kebenaran garis politik Partai.

Untuk menghindarkan kemungkinan kesalahan subjektivisme yang tidak bisa membedakan antara Program Umum Partai dan Program Tuntutan atau program khusus, Laporan menunjukkan pentingnja Sidang Pleno ke-IV CC, dimana dengan tegas didjelaskan perbedaan antara kedua program tsb. dan hubungannya satu sama lain.

Kongres membenarkan Laporan yang menekankan bahwa mengerti strategi dan taktik² pokok s saja belum lah tjukup. Partai harus senantiasa menguasai situasi setjara lengkap atau sekurang-kurangnya agak lengkap, menetapkan sikap terhadap situasi itu dan menentukan langkah dan aksi² yang menguntungkan Rakjat dan mendorong maju gerakan revolusioner sesuai dengan situasi.

Selanjutnja untuk mengurangi kemungkinan² membuat kesalahan yang masih tetap ada, meskipun kita sudah beladjar teori Marxisme-Leninisme, sudah menguasai keadaan dan djuga menguasai garis politik Partai dengan baik, Partai harus terus menerus melakukan kritik dan selfkritik dengan berpedoman kepada prinsip yang diadjukan Kawan Mau Tje-tung „bertitik pangkal pada kemauan bersatu, dan melalui kritik dan selfkritik, mentjapai persatuan baru atas dasar yang baru”. Keberanian melakukan kritik harus dibangun, terutama kritik dari bawah kepada atasan dengan serius dan sungguh² tetapi djuga setjara sabar dan bidjaksana, sehingga kita dapat „menarik pelajaran dari kesalahan yang sudah² sebagai peringatan bagi hari kemudian” dan kita djuga dapat „mengobati penjakit untuk menjembuhkan sisakit”. Dengan setia melakukan kritik dan selfkritik berarti kita memerangi subjektivisme. Dengan demikian kemungkinan membikin kesalahan diperketjil serta persatuan didalam Partai lebih diperkuat. Dengan demikian Partai sungguh² akan menjadi pimpinan yang objektif dan realistis dan akan dapat membersihkan dirinya dari birokratisme dan sektarisme. Semuanya ini berarti bahwa Partai mewujudkan suatu langgamkerdja yang membedakannya dari partai² lain, yang dengan singkat dapat dirumuskan sbb.: *Memadukan teori dengan praktek, berhubungan erat dengan massa Rakjat dan melaksanakan selfkritik.*

4. Teruskan Bekerdja Dengan Plan 3 Tahun

Mengenai arti daripada Plan 3 Tahun Organisasi dan Pendidikan Kongres membenarkan kesimpulan, bahwa Plan tsb. mempunyai arti yang luarbiasa besarnya baik bagi mempertinggi kwalitet anggota² Partai maupun bagi kemadjuan Partai setjara keseluruhan. Plan ini telah menimbulkan suasana baru dalam Partai,

telah membawa kesegaran dan kegembiraan bekerdja dalam barisan Partai. Ia djuga telah mempertinggi daja memobilisasi daripada Partai; melatih para fungsionaris dan aktivis Partai untuk bekerdja „banjak segi”; mendorong mereka untuk memperdalam pengertian mengenai pekerdjaan masing², untuk mempeladjar lebih baik keadaan daerahnja masing² dan keadaan sukubangsa² jang ada didaerahnja; menanamkan semangat dan pandangan-dunia Komunis dalam dada anggota² Partai; dan memperkembangkan pimpinan kolektif serta pekerdjaan massa dari Partai. Adanja pimpinan kolektif jang disertai kritik dan selfkritik menjebabkan makin berkembangnja demokrasi dalam Partai dan bersamaan dengan itu berkembang pula kepribadian, daja-tjipta dan militansi para anggota Partai. Berkembangnja demokrasi dalam Partai memperkuat sentralisme Partai, sedangkan garis massa ber-angsur² mendjadi sungguh² garis politik, garis organisasi dan garis moral daripada Partai.

Adalah benar, bahwa perkembangan situasi jang tjepat ditanah-air kita tidak mungkin bisa ditampung seandainya kita tidak mempunyai Plan 3 Tahun, artinja djika kita tidak mempunyai pengalaman bekerdja sistimatis dan tidak meluaskan Partai dan mendidik anggota² Partai. Dalam hubungan ini penting sekali arti daripada Sidang Pleno ke-VI CC jang mengambil resolusi tentang keharusan untuk menjesuaikan badan² pimpinan Partai dengan perkembangan situasi revolusioner jang tjepat jang dimulai dari CC sampai kepada Komite² jang paling bawah. Pekerdjaan menjesuaikan badan² pimpinan Partai dengan situasi ini adalah pekerdjaan jang harus kita kerdjakan terusmenerus.

Oleh karena itu Kongres menjetudjui Laporan, bahwa kita harus meneruskan pekerdjaan dengan Plan 3 Tahun, djika selesai jang pertama disusun dengan jang kedua dan seterusnya. Kontrol jang intensif, jang sistimatis dan terusmenerus mengenai pelaksanaan Plan harus dianggap sebagai salahsatu pekerdjaan terpenting untuk suksesnja Plan.

Mengenai djatah² jang ditetapkan dalam Plan 3 Tahun, dapat disimpulkan, bahwa pada umumnja djatah jang ditjapai dalam lapangan pendidikan lebih baik daripada djatah jang ditjapai dalam lapangan organisasi, bahkan beberapa Komite sampai berhasil melampaui djatah jang ditetapkan mengenai penjelenggaraan Sekolah dan Kursus Partai. Namun demikian ada djuga bagian² penting jang belum tertjapai, diantaranya jang sangat serius ialah mengenai peredaran literatur Partai dan chususnya djatah untuk memperbesar oplah „Harian Rakjat”. Masalah distribusi HR harus mendjadi tanggungjawab Sekretaris² Komite dan semua ka-

der penting Partai.

Berhubung adanja kelemahan² ideologi jang menghinggapi sementara kawan, Kongres menjetudjui kesimpulan bahwa tjara untuk mengatasinja jang pokok ialah dengan djalan meningkatkan kesedaran Marxis-Leninis diseluruh Partai, dan oleh karena itulah bagian pendidikan didalam Plan 3 Tahun Partai harus senantiasa mendapat perhatian jang utama. Disini djuga harus ditarik kesimpulan, bahwa didalam menjusun Plan 3 Tahun Kedua jang akan datang peladjaran filsafat Materialisme Dialektik dan Histori harus mendjadi matapeladjaran pokok disemua Sekolah dan Kursus Partai. Sekolah Partai Central dan Sekolah² Partai Daerah Besar harus mendidik pekerdja² teori, mendidik pekerdja² politik dan organisasi dan mendidik guru² Sekolah² dan Kursus² Partai. Selandjutnja harus mendjamin kesatuan teori Marxisme-Leninisme dengan praktek revolusioner Indonesia, disamping merupakan perpaduan badan pendidikan dengan badan penjelidikan (research).

5. Memperkuat, Memperluas dan Memperbaharui Partai

Dalam menghadapi tugas² baru dari Partai sesudah Kongres Nasional ke-VI, Kongres membenarkan kesimpulan bahwa kewadajiban kita sekarang ialah meneruskan pembangunan Partai dengan sembojan „memperkuat, memperluas dan memperbaharui Partai”.

Memperkuat Partai berarti per-tama² mengkonsolidasi dan mengembangkan hasil² Plan 3 Tahun, menjusun dan melaksanakan Plan 3 Tahun Kedua, memeriksa kembali seluruh barisan Partai untuk mentjari kelemahan² Partai supaya dapat dilikwidasi dan mempergiat pekerdjaan untuk memelihara kemurnian ideologi Partai, dan mempertinggi kwalitet semua organisasi Partai jang berarti mempertinggi kwalitet tiap anggota Partai.

Memperluas Partai berarti mengembangkan dan mengeratkan hubungan Partai dengan massa Rakjat dari semua sukubangsa diseluruh negeri, menjempurnakan pekerdjaan massa daripada Partai, mengadakan perlawanan terhadap sektarisme dan menambah jumlah anggota serta djumlah organisasi Partai.

Memperbaharui Partai per-tama² berarti memperbaharui Konstitusi Partai, jaitu memasukkan kedalam Konstitusi Partai kemenangan² jang telah ditjapai semendjak Kongres Nasional ke-V dalam lapangan politik dan organisasi. Partai harus senantiasa bekerdja menurut Plan, jang meliputi seluruh Partai dan seluruh negeri. Kader² Partai tidak boleh bekerdja setjara spontan atau

dengan meraba-raba, atau menetapkan politik dan bekerdja hanya berdasarkan perasaan saja, tetapi mereka harus bekerdja berdasarkan hasil² penyelidikan atau bekerdja setjara ilmiah untuk memperbaiki pekerdjaan praktis mereka dalam membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa, terutama massa kaum buruh dan kaum tani. Hasil² penyelidikan, eksperimen², pentjataan² dan perenungan² harus selalu diachiri dengan kesimpulan² untuk lebih memperbaiki pekerdjaan dimasa datang. Kehidupan intern Partai harus dipertinggi, terutama dengan setia kepada azas sentralisme-demokratis dan dengan mengembangkan kritik dan selfkritik. Partai harus senantiasa dalam suasana menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi, suasana berlomba dalam melaksanakan plan untuk mengembangkan daja-tjipta masing² anggota dan dalam suasana kesatuan Partai dalam segala hal. Djadi memperbaharui Partai samasekali tidak berarti membikin „Partai Baru“.

Dalam rangka memperbaharui Partai, Kongres menekankan pentingnja diadakan gerakan memperbaiki tjara memimpin yang didasarkan atas pepaduan seruan² umum dengan tuntutan² kongkrit dan pepaduan pimpinan dengan massa dengan sembojan „atasan memberi tjontoh kepada bawahan“. Soal „atasan memberi tjontoh kepada bawahan“ tidak hanya dilapangan kehidupan politik dan organisasi, tetapi djuga dilapangan kehidupan se-hari².

Dalam hubungan memperkuat, memperluas dan memperbaharui Partai, perlu ditegaskan bahwa hal ini hanya bisa terlaksana djika didalam Partai betul² terdjamin hegemoni daripada ideologi proletariat, djika ideologi burdjuis ketjil dan ideologi burdjuis selalu dikikis dan dibersihkan dari Partai, sehingga terdjamin kemurnian Partai dilapangan politik, organisasi dan ideologi. Pekerdjaan memperkuat, memperluas dan memperbaharui Partai tidak boleh dianggap sebagai „pekerdjaan musiman“, melainkan pekerdjaan yang harus terusmenerus dilakukan. Selandjutnja perlu ditjatkan bahwa pekerdjaan memperkuat, memperluas dan memperbaharui Partai djuga berarti bahwa kesalahan² yang sudah pernah dibuat diusahakan djangan sampai terulang lagi dan dipeladjar sungguh² sumber dari kesalahan itu. Disinilah pentingnja bagi kader² Partai untuk mempeladjar se-dalam²nja sedjarah Partai kita, sedjarah kesalahan²nja, kegagalan²nja dan sukses²nja.

Berbitjara tentang kewaspadaan, Kongres membenarkan Laporan yang menegaskan pentingnja melawan dengan sekuat tenaga bahaya revisionisme modern. Meskipun perkembangan gerakan Komunis di Indonesia sekarang sudah lebih bersatu dari masa yang lampau dan meskipun gerakan Komunis sedunia yang semakin monolit telah memberikan pukulan yang menentukan kepada revisio-

nisme modern, namun kaum Marxis-Leninis tidak boleh mengangap sepi kenyataan adanya revisionisme klik Tito. Oleh karena itu perjuangan melawan revisionisme modern, bahaya utama gerakan Komunis sedunia, tidak boleh menjadi lemah.

Dalam hubungan kewaspadaan ini, djuga adalah penting untuk mengembangkan kebiasaan yang sudah ditanamkan sesudah Kongres Nasional ke-V, jaitu kebiasaan mengadakan gerakan pembetulan fikiran.

6. Pimpinan Partai Pada Gerakan Massa

Mengenai pekerdjaan massa daripada Partai, Kongres membenarkan kesimpulan bahwa hal ini masih belum memuaskan. Belum tjukup banjak perhatian yang diberikan kader² Partai pada persoalan² praktis daripada massa, malahan sementara kader ada yang meremehkannya, sebab dianggapnya kurang penting dan kurang revolusioner. Perhatian mereka hanya terbatas pada pekerdjaan² dan aksi² yang berkobar-kobar saja. Sudah barang tentu semuanya ini adalah penting, tetapi disamping pekerdjaan² yang berkobar² massa mempunyai banjak sekali persoalan² se-hari² yang pemetjahannya mengharapakan bantuan kaum Komunis. Oleh karena itu benar sekali kesimpulan bahwa untuk memperbaiki pekerdjaan massa daripada Partai kita harus berpedoman „berdjalan dengan dua kaki“, jaitu mengkombinasikan pekerdjaan ber-kobar² dengan pekerdjaan tekun, yang meliputi pekerdjaan organisasi, pendidikan, politik dan ideologi.

Perlu ditegaskan bahwa sesuatu aksi baru dapat dikatakan berhasil, djika ia membawa persatuan yang lebih erat dikalangan massa, bersamaan dengan itu berhasil mengkonsolidasi pengaruh Partai dan selandjutnja berhasil mempertinggi kwalitet tjarakerdja daripada Partai dan mempertinggi tingkat ideologi daripada aktivis² Partai.

Mengenai pekerdjaan Partai dikalangan kaum tani, Kongres membenarkan kesimpulan bahwa kader² Partai umumnya belum mengerti benar tentang hubungan² agraria dan fungsionaris² Partai masih saja banjak yang menghindari pekerdjaan didesa. Dalam hubungan ini perlu ditekankan kembali salahsatu kesimpulan Kongres Nasional ke-V, jaitu bahwa „tidak mungkin ada front nasional yang sungguh²“ dan bahwa „tidak mungkin kita berbitjara tentang peranan memimpin dari Partai Komunis dalam front ini selama Partai kita belum dapat mengorganisasi dan memimpin massa kaum tani yang luas.“

Gerakan „turun kebawah“ dengan mendjalankan „tiga sama“

mempunyai arti yang besar. Ia telah membikin lebih terang bagi kita, bahwa sisa² feodalisme masih mendalam di-desa² kita; bahwa persoalan pokok dalam gerakan tani ialah masalah sandaran dan pimpinan, bahwa dalam keadaan yang bagaimanapun juga kita harus bersandar pada buruhtani dan tanimiskin dan bahwa hanya dengan pimpinan kaum Komunis gerakan kaum tani bisa menjadi sekutu yang akrab dari kelas buruh dalam melawan semua musuh Rakjat pekerdja; bahwa berhubung sasaran perjuangan kaum tani terdapat di tiap desa yang masing² mempunyai kekhususannya, tjara² pengorganisasian kaum buruh pabrik yang memusat tidaklah dapat digunakan untuk mengorganisasi kaum tani; bahwa untuk bisa memobilisasi se-banyak²nya kaum tani diperlukan tidak hanya sebuah organisasi tani revolusioner dan organisasi koperasi, tetapi ber-puluh² matjam bentuk organisasi lainnya sesuai dengan keadaan penghidupan di desa dan dengan tingkat kebudayaan penduduk yang pada umumnya masih rendah; dan bahwa memperbaiki pekerjaan Partai di kalangan kaum tani tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan memperkuat ideologi Partai, sebab hanya dengan kebulatan ideologi bisa terdapat antusiasme yang penuh didalam melaksanakan politik agraria Partai. Memang dalam melantjarkan gerakan² nasional yang berat harus senantiasa disesuaikan ideologi pimpinan dengan tujuan daripada gerakan, jika perlu dengan mendjalankan perubahan dalam pimpinan; kebulatan ideologi dalam pimpinan akan melahirkan aksi² yang antusias dan sebaliknya aksi² yang demikian akan mengkonsolidasi pimpinan dan gerakan.

Dalam usaha memperbaiki pekerjaan Partai di kalangan kaum tani, Kongres membenarkan kesimpulan² Konferensi Nasional Tani PKI yang dilangsungkan pada pertengahan April 1959. Antara lain yang terpenting adalah sbb. :

Pertama, dalam melaksanakan dua tugas pokok Revolusi Indonesia, yaitu menggulingkan imperialisme dan feodalisme, terdapat dua ketjenderungan. Yang pertama ketjenderungan memisahkan dua tugas ini se-olah² satu sama lain tidak ada hubungannya, sedangkan yang kedua ialah ketjenderungan yang mau membikin identik dua tugas ini sedjak permulaan. Dalam hubungan ini adalah tepat sepenuhnya kesimpulan yang menyatakan, bahwa jika dilihat dari sudut strategi Revolusi Indonesia dua tugas tsb. sangat erat hubungannya dan tak terpisahkan satu sama lain, tetapi jika dilihat dari sudut taktik dua tugas tsb. tidak bisa dilakukan sekaligus. Dilihat dari sudut taktik pada waktu dan keadaan tertentu seperti sekarang ini, udjung tombak daripada Revolusi pertama² harus ditunjukkan kepada imperialisme dan tuantanah² serta burdjuasi yang menjadi agen² imperialisme. Sudah barang tentu ini

tidaklah berarti bahwa PKI sekarang tidak menggabungkan diri pada kaum tani dalam melawan tuantanah. PKI tetap berdiri di-harisan paling depan sekarang dan dikemudian hari dalam membela kepentingan kaum tani. Berdasarkan garis umum ini pada tingkat sekarang PKI memang hanya menuntut pensitaan tanah² milik tuantanah² imperialis asing dan milik tuantanah bumiputera yang membantu kaum pemberontak kontra-revolusioner, sedangkan mengenai tuantanah² bumiputera pada umumnya PKI menuntut penurunan sewa tanah dengan mengadakan sembojan 6 : 4.

Kedua, pembentukan koperasi Rakjat pekerdja di-desa², terutama dengan mengibarkan tiga *bendera koperasi*, yaitu koperasi kredit, koperasi produksi dan koperasi jual-beli, untuk melawan penindasan dan pemerasan serta untuk memperbaiki penghidupan Rakjat pekerdja.

Ketiga, lewat koperasi² produksi mengusahakan sedapat mungkin supaya produksi pertanian meningkat dengan mengadakan 5 prinsip mengerjakan tanah, yaitu *„Luku dalam, tanam rapat, per-banjak rabuk, perbaiki bibit dan pengairan“*.

Mengenai pekerjaan Partai di kalangan kaum buruh, Kongres membenarkan kesimpulan bahwa PKI harus terusmenerus memperkuat kedudukannya di kalangan kaum buruh dan menarik bagian terbesar dari massa kaum buruh kefihaknya. Pekerjaan ber-kobar² dari Partai di kalangan kaum buruh sudah makin baik, tetapi pekerjaan tekun, mendalam dan teliti, yang meliputi pekerjaan ideologi, pendidikan dan mempersatukan seluruh kaum buruh, masih harus banyak diperbaiki. Setiap perjuangan untuk tuntutan² sosial ekonomi tidak mungkin dapat dipisahkan dari perjuangan politik. Sebaliknya, setiap perjuangan politik harus selalu disertai dengan perjuangan perbaikan nasib. Pekerjaan di-basis² serikat-buruh harus mendapat perhatian yang lebih besar. Serikatburuh² harus memberikan pendidikan tentang Sosialisme kepada massa anggotanya. Demokrasi di-basis² harus dipertahankan dan diluaskan. Penempelan koran² progresif di-pabrik² dan di-tempatkerdja² lainnya harus menjadi aktivitas se-hari² dari serikatburuh². Semuanya ini harus dipadukan dengan tuntutan² politik dan ekonomi dari kaum buruh dipabrik dan lapangan kerdja lainnya yang bersangkutan. Hanya dengan demikian serikatburuh² ber-angsur² menjadi sekolahan Komunisme. Terutama pekerjaan di kalangan buruh transpor harus lebih diperbaiki lagi.

Kongres memperkuat kesimpulan, bahwa *„bekerdja di kalangan kaum buruh dan kaum tani tetap merupakan bentuk kegiatan yang terpenting dan pokok daripada PKI. Berhasil atau tidaknya pekerjaan front nasional sangat tergantung pada berhasil atau tidak-*

nja pekerdjaan dikalangan kaum buruh dan tani. Front nasional adalah front persatuan antara Rakjat pekerdja, jaitu klas buruh, kaum tani dan burdjuasi ketjil diluar kaum tani, dengan kaum penghisap, jaitu burdjuasi nasional. Tanpa adanya front persatuan yang kuat antara Rakjat pekerdja, terutama klas buruh dan kaum tani, tidak mungkin adanya front persatuan nasional yang kuat dan konsekwen anti-imperialisme".

Mengenai pekerdjaan dikalangan massa pemuda, Kongres menjetudjuai bahwa bekerdja dikalangan massa pemuda pada waktu sekarang adalah salahsatu pekerdjaan massa yang terpenting daripada Partai. Partai harus mendjaga supaya pernajaan kesediaan Pemuda Rakjat mendjadi pembantu Partai harus disertai dengan kesediaan dan kesanggupan seluruh Komite Partai memberi pimpinan dan pendidikan yang lebih baik kepada Pemuda Rakjat. Sifat organisasi massa daripada Pemuda Rakjat harus senantiasa didjaga, tetapi bersamaan dengan itu Pemuda Rakjat adalah organisasi massa pemuda yang mempunyai kesadaran klas buruh, organisasi pemuda yang paling revolusioner, paling militan dan paling patriotik. Disamping itu Partai harus mendorong madju seluruh gerakan pemuda dan mendjadikan seluruh gerakan pemuda pengabdian yang setia daripada Rakjat pekerdja dan revolusi.

Mengenai pekerdjaan Partai dikalangan kaum intelektual, Kongres membenarkan analisa bahwa berhubung proses kelahiran dan pertumbuhannya dalam perjuangan melawan kolonialisme, kaum intelektual Indonesia pada umumnja adalah patriotik dan berdjawa anti-kolonialisme yang kuat. Tjita² Revolusi Agustus 1945 telah lebih menanamkan djiwa kerakjatan pada mereka.

Tetapi sesudah Revolusi Rakjat 1945 mengalami kegagalan dan kaum burdjuis Indonesia sudah terbukti tidak mampu memberikan djalan keluar dari kesulitan² yang dihadapi oleh Rakjat dan negeri kita, maka dikalangan kaum intelektual tampak gedjala² pesimisme. Pada waktu sekarang terdapat dua tipe kaum intelektual dinegeri kita. *Pertama*, kaum intelektual yang menundjukkan sifat bimbang dan tidak konsekwen yang merugikan dunia keilmuan. Mereka ini adalah wakil² ideologi dari burdjuasi Indonesia, yang kedudukannya lemah dilapangan ekonomi dan politik, dan yang oleh karena itu terpaksa menjesuaikan diri dengan sjarat² yang ditentukan oleh kaum imperialis. Malahan djuga ideologi kaum kepalabatu mempunyai wakil²nya dalam kalangan kaum intelektual Indonesia. *Kedua*, kaum intelektual yang sudah mulai dilahirkan dan ditjiptakan oleh Rakjat pekerdja Indonesia yang berusaha mengibarkan tinggi tradisi kerakjatan dari kaum intelektual kita.

Tetapi walaupun demikian pekerdjaan Partai dikalangan kaum

intelektuil masih djauh dari memuaskan. Sebab itu para kader Partai yang bekerdja dikalangan kaum intelektual harus bekerdja lebih giat dan lebih baik lagi dan harus berusaha supaya mendjadi tjontoh dalam memperkaja dan mengembangkan ilmu serta memperkuat azas kerakjatan pada perkembangan ilmu. Para sardjana, pekerdja kebudayaan dan para guru anggota Partai, disamping mempertinggi mutu pengertian teori Marxisme-Leninisme, berkewadajiban memperluas dan memperdalam keahlian dan pengetahuan mereka masing² untuk dapat membantu Partai dalam memberi djawaban yang se-baik²nya mengenai soal² yang timbul dilapangan ilmu dan kebudayaan atau mempersiapkan diri se-baik²nya agar dapat mendjawab soal² apa sadja yang dihadapi oleh negeri dan Rakjat.

Mengenai kaum mahasiswa dan peladjar sekolah menengah, disimpulkan bahwa pergeseran kekiri daripada keadaan seluruh kehidupan politik dinegeri kita mempunyai pengaruh yang tidak ketjil dikalangan mereka. Berhubung dengan itu adalah sangat penting bahwa anggota² Partai yang mendjadi mahasiswa atau peladjar sekolah menengah dengan sungguh² mendjadi mahasiswa atau peladjar yang baik.

Mengenai pekerdjaan dikalangan massa wanita, Kongres membenarkan kesimpulan bahwa Partai harus memberikan perhatian khusus terhadap masalah wanita, baik setjara umum maupun didalam Partai sendiri. Partai harus mendidik para wanita Komunis mendjadi wanita yang inteleknya, kemauannya dan perasaannya berkembang se-luas²nya dan se-dalam²nya. Bersamaan dengan mengkonsolidasi dan meluaskan keanggotaan Partai dikalangan wanita, Partai harus meneruskan usaha menggalang organisasi wanita revolusioner yang besar sebagai sjarat untuk memperkuat seluruh gerakan wanita dan gerakan massa pekerdja Indonesia pada umumnja.

Mengenai pekerdjaan dalam lingkungan sukubangsa² yang merupakan salahsatu lapangan yang sangat penting Kongres membenarkan Laporan yang menekankan bahwa dengan duduknya kaum Komunis dalam pemerintahan² daerah, bahkan disedjumlah daerah Swatantra II yang Kepala Daerahnya orang Komunis, dan mayoritas mutlak anggota DPRD-nya terdiri dari orang² Komunis, pekerdjaan Partai dikalangan sukubangsa² mengalami kemadjuan² penting. Adapun tjara yang pokok untuk memperbaiki pekerdjaan Partai dikalangan sukubangsa² ialah dengan memperbaiki pekerdjaan Partai dikalangan kaum tani tiap² sukubangsa, karena kaum tani merupakan golongan terbesar daripada penduduk tiap daerah, disamping Partai harus mempergiat usahanya untuk mengembang-

kan kebudajaan tiap² sukubangsa.

Selanjutnya mengenai pekerdjaan dikalangan minoritet keturunan asing, seperti keturunan Arab, Tionghoa dan Eropa Kongres membenarkan kesimpulan bahwa warganegara² keturunan asing tidak berbeda dengan warganegara² lainnya dan bahwa mereka merupakan potensi yang berguna dalam membangun suatu Indonesia Baru yang demokratis. Partai harus lebih intensif membantu kaum minoritet keturunan asing dalam melawan serangan² rasial dan soviniis. Partai harus senantiasa menjelaskan kepada Rakjat bahwa musuh yang sedjati dari Rakjat Indonesia adalah imperialisme. Bantuan yang djudjur kepada warganegara keturunan asing hanya dapat diberikan oleh Partai kita, karena Partai Komunis memiliki patriotisme dan internasionalisme proletar yang bebas dari segala bentuk soviniisme dan rasialisme.

7. Djadikan Koperasi Djuga Sendjata Ditangan Rakjat Pekerdja

Mengenai koperasi, Kongres membenarkan kesimpulan bahwa, disamping kita akan tetap waspada dan menentang tiap propaganda dari kaum reaksioner yang mengatakan se-olah² dengan koperasi sadja kita dapat mengachiri kekuasaan kaum imperialis, kaum Komunis djuga harus dengan sungguh² memakai djalan koperasi untuk mempersatukan Rakjat pekerdja guna mengurangi penghisapan² tuantanah, lintahdarat dan kapitalis atas diri Rakjat pekerdja, dan untuk meningkatkan hasil produksi. *Kaum tanimiskin dan tanisedang yang hanya mungkin mentjapai kebebasannya dengan pimpinan proletariat, akan lebih tebal kepertjajaannya kepada proletariat, djika proletariat dapat mengorganisasi dan memimpin mereka dalam koperasi² untuk meringankan beban mereka sekarang djuga.*

Koperasi tidak hanya dapat didjadikan sendjata kaum tani, tetapi djuga dapat didjadikan sendjata kaum keradjinantangan, kaum nelajan, kaum buruh, para pegawai, kaum miskinkota, kaum pedagang ketjil, dan malahan djuga kaum peladjar sekolah menengah dan mahasiswa. Undang² koperasi yang sudah ada sekarang dapat dipakai untuk memadjukan gerakan koperasi asal dipimpin oleh orang² yang djudjur.

Adalah penting untuk tetap memegang teguh prinsip bahwa gerakan koperasi harus merupakan gerakan yang berdiri sendiri, mempunyai Anggaran Dasar yang demokratis dan dapat mempersatukan sebanyak mungkin koperator² setjara sukarela. Kesukarelaan adalah sjarat mutlak daripada koperasi. Selain daripada itu,

sifat berdiri sendiri dan sifat non-politik daripada koperasi harus didjaga dengan teguh.

Dengan memperkuat dan memperluas gerakan massa dan demokrasi serta dengan memperkuat, memperluas dan memperbaharui Partai, Kongres yakin bahwa PKI pasti mentjapai sukses² yang lebih besar dalam memimpin perdjjuangan Rakjat Indonesia untuk mentjapai tudjuan strategisnya, jaitu Indonesia yang merdeka penuh dan demokratis.

Kongres berseru agar kaum Komunis lebih bersatu lagi untuk dengan sekuat tenaga membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa untuk melaksanakan tuntutan² mendesak Rakjat dan Partai, jaitu peluasan hak² demokrasi dan pembentukan Kabinet Gotongrojong.



RESOLUSI

PENSAHAN PERUBAHAN KONSTITUSI PKI

Kongres Nasional ke-VI PKI, yang dilangsungkan di Djakarta pada tanggal 7 sampai dengan 14 September 1959, setelah mendengar pidato pengantar tentang perubahan Konstitusi PKI yang disampaikan oleh Kawan M.H. Lukman, mensahkan dengan suara bulat perubahan Konstitusi PKI.

Kongres berkejakinan bahwa Konstitusi yang telah disempurnakan berdasarkan pengalaman² PKI sendiri dan pengalaman² gerakan kelas buruh sedunia itu merupakan sendjata yang ampuh untuk menjadikan PKI makin tersebar diseluruh negeri dan berkarakter massa luas, serta semakin bulat persatuannya dalam ideologi, organisasi dan politik.



KONSTITUSI PKI

P R E A M B U L

Partai Komunis Indonesia (PKI) ialah barisan depan yang terorganisasi dan bentuk organisasi kelas yang tertinggi daripada kelas proletar Indonesia. PKI mewakili kepentingan² nasion dan Rakjat Indonesia. Dalam tingkat sekarang PKI berdjuaug untuk mentjiptakan sistim Demokrasi Rakjat di Indonesia, sedangkan tudjuannya yang lebih landjut ialah mewujudkan masyarakat Sosialis dan masyarakat Komunis Indonesia.

Seluruh pekerdjaan PKI didasarkan atas teori Marxisme-Leninisme. Karena Marxisme-Leninisme bukanlah suatu dogma, melainkan suatu pedoman untuk aksi, maka dalam setiap aktivitetnya PKI berpegang kepada prinsip memadukan kebenaran² umum Marxisme-Leninisme dengan praktek yang njata daripada perdjuaugan revolusioner Indonesia. PKI berdjuaug melawan tiap fikiran yang tidak kritis, melawan dogmatisme dan empirisme. PKI djuga berdjuaug melawan revisionisme, baik yang lama maupun modern.

Dengan berdasarkan pandangan-dunia materialisme dialektik dan materialisme histori Marxis-Leninis, PKI menerima setjara kritis peninggalan² sedjarah Indonesia maupun luarnegeri dan menentang pandangan-dunia idealisme dan metafisika.

Karena Indonesia masih belum merdeka penuh dan masih setengah-feodal, karena tenaga penggerak revolusi Indonesia adalah kelas buruh, kaum tani, kelas burdjuis ketjil dan elemen² demokratis lainnja yang dirugikan oleh imperialisme, karena di Indonesia sudah ada Partai Komunis yang makin lama bertambah kuat dan berpengaruh, dan karena keadaan² internasional sekarang, semuanya ini menentukan bahwa revolusi Indonesia dalam tingkat sekarang adalah revolusi burdjuis-demokratis tipe baru atau revolusi burdjuis-demokratis dalam zaman imperialisme dan revolusi proletar dunia. Revolusi Indonesia dalam tingkat sekarang adalah revolusi Demokrasi Rakjat, jaitu revolusi daripada massa Rakjat yang luas, yang dipimpin oleh proletariat, dan ditudjukan untuk melawan imperialisme, feodalisme dan burdjuasi komprador. Revolusi Indonesia mempunyai banjak sekutu didalam dan diluarnegeri. Oleh sebab itu kewajiban PKI dalam tingkat sekarang ialah : *kedalam*, mengorganisasi dan mempersatukan kaum buruh, kaum tani dan nelajan, kaum intelektual, pengusaha ketjil, pengusaha nasional, warganegara keturunan asing, semua sukubangsa dan semua elemen anti-imperialis dan anti-feodal, pendeknja, mempersatukan keseluruhannya ini didalam satu front nasional dengan menjadikan persekutuan kelas buruh dan kaum tani sebagai dasarnya dan dipimpin oleh kelas buruh; *keluar*, bersatu dengan proletariat internasional, dengan semua Rakjat yang tertindas, bangsa² yang terdjadjah dan nasion² yang memandang kita sederadja, yang mentjintai kemerdekaan nasional, demokrasi dan perdamaian dunia. Semuanya ini adalah untuk mentjiptakan sjarat² bagi pembentukan Pemerintah Republik Indonesia yang konsekwen anti-imperialis dan anti-feodal, yang mampu melikwidasi kekuasaan kaum imperialis, tuantanah dan burdjuasi komprador, sehingga bisa mengubah Indonesia dari negeri setengah-djadjahan dan setengah-feodal menjadi negeri yang merdeka penuh, demokratis, makmur dan madju. Pemerintah yang demikian ini adalah Pemerintah yang mendasarkan dirinya atas massa, pemerintah front persatuan nasional yang dibentuk atas dasar persekutuan kaum buruh dan kaum tani dibawah pimpinan kelas buruh, jaitu Pemerintah Demokrasi Rakjat. Pemerintah Demokrasi Rakjat bukanlah diktatur proletariat, melainkan diktatur Rakjat, ialah diktatur bersama dari semua kelas revolusioner anti-imperialisme dan anti-feodalisme; dan ia tidak melaksanakan perubahan² sosialis melainkan perubahan²

demokratis.

Selanjutnya, jika revolusi Indonesia yang bersifat nasional dan demokratis sudah mentjapai kemenangan sepenuhnya, kewadajiban PKI nanti ialah mengambil langkah² yang diperlukan untuk mewujudkan sistim Sosialisme dan sistim Komunisme di Indonesia sesuai dengan kebutuhan perkembangan sosial dan ekonomi Indonesia serta sesuai dengan kehendak Rakjat Indonesia.

Indonesia yang belum merdeka penuh dan masih setengah-feodal adalah negeri kepulauan yang luas, yang banyak penduduknya tetapi tidak merata dan terdiri dari banyak sukubangsa dan yang kemadjuannya tidak sama. Disatu pihak, massa Rakjat Indonesia, terutama kaum buruh dan kaum tani, mempunyai tradisi revolusioner didalam perjuangan melawan penindasan kolonial, difihak lain, terdapat rintangan² yang besar yang menghalangi djalannya revolusi. Faktor² inilah yang menentukan perkembangan yang tidak sama daripada revolusi Indonesia, menjebabkan revolusi memakan waktu lama dan bersifat pelik. Untuk bisa memimpin revolusi yang memakan waktu lama dan bersifat pelik ini, PKI harus menjalankan taktik membawa maju perjuangan revolusioner daripada Rakjat dengan pelahan dan ber-hati², tetapi pasti, dan dengan tidak henti²nja melawan dua ketjenderungan, jaitu ketjenderungan kapitulasi dan avonturisme yang ke-dua²nja bersumber kepada ketidakuletan burdjuis ketjil. Perjuangan yang memakan waktu lama memang bisa menimbulkan bahaya bahwa orang² yang lemah dalam teori dan tidak berkarakter akan menjalankan politik kapitulasi atau avonturisme. Pengalaman revolusi Indonesia menunjukkan bahwa penjakit oportuniste, penjakit kapitulasi dan avonturisme, adalah musuh² revolusi yang berbahaya. Supaja stabil dan kuat, PKI harus melakukan perjuangan yang tepat dan tidak mengenal ampun terhadap anasir berbahaya ini.

PKI yang didirikan pada 23 Mei 1920 adalah pewaris dan penerus perjuangan yang heroik dan revolusioner dari Rakjat Indonesia. Perjuangan yang heroik dari Rakjat Indonesia dibuktikan oleh perlawanan² Rakjat terhadap pendjadjahan Belanda dengan adanya Perang Banten, Perang Surapati, Perang Timor, Perang Tondano, Perang Diponegoro, Perang Pattimura, Perang Hasanuddin, Perang Bondjol, Perang Palembang, Perang Bandjar/Dajak, Perang Atjeh, Perang Batak, Perang Lombok, Perang Puputan, Perang Djambi dan lain²nja, pemberontakan Rakjat tahun 1926, pemberontakan „Zeven Provinciën“, perlawanan terhadap fasis Djepang, diantaranya di Blitar, Singaparna, Tanah Karo, Baju dan Pandrah, perlawanan terhadap provokasi Madiun dan perlawanan terhadap pemberontakan² separatistis dan kontra-

revolusioner.

Revolusi Agustus 1945 dengan perlawanan² terhadap perang² kolonial yang diadakan oleh kaum kolonialis Belanda adalah puncak daripada perdjjuangan heroik yang memberikan tradisi revolusioner yang paling luas dan mendalam kepada seluruh Rakjat Indonesia. Dalam Revolusi Agustus ini kaum Komunis mengambil bagian yang sangat aktif, baik dalam waktu persiapan untuk Proklamasi maupun dalam menjalankan setiap bagian daripada roda revolusi sampai kepada pertempuran² difront yang terdepan melawan tentara kolonial Belanda. Tetapi Revolusi Agustus 1945 telah gagal, karena terutama massa tani yang ber-djuta² tidak dibangkitkan dan ditarik kedalam revolusi, disamping karena pengchianatan burdjuasi komprador. Klas buruh pada waktu itu kurang sadar akan rolnja sebagai pemimpin revolusi. PKI sebagai Partai klas proletar telah kehilangan kebebasannya dalam lapangan organisasi dan politik. PKI kurang faham akan watak khusus daripada revolusi Indonesia dan kurang faham akan hakekat daripada front persatuan nasional. Semua kekurangan ini bersumber pada kelemahan dilapangan ideologi. Dengan dilaksanakannya Resolusi „Djalan Baru untuk Republik Indonesia“, maka kekurangan² itu setjara ber-angsur² dapat diatasi. Dan dengan suksesnya Kongres Nasional ke-V Partai dalam tahun 1954 kekurangan² tersebut telah dapat diatasi.

Pekerdjaan Partai sekarang adalah berat dan pelik. Masalah yang langsung dan segera kita hadapi ialah masalah penggalangan front persatuan nasional yang berbasiskan persekutuan kaum buruh dan kaum tani, dan masalah pembangunan Partai. Sebab itu, berkerdja dikalangan kaum buruh dan kaum tani adalah bentuk kegiatan Partai yang terpenting dan pokok. Anggota² Partai harus memimpin aksi² yang mengenai kepentingan langsung dari massa serta memberikan pendjelasan² yang terusmenerus, dengan tidak djemu², dengan sistematik kepada massa Rakjat banyak (kaum buruh, kaum tani dan nelajan, kaum intelektual, kaum pengusaha ketjil, pengusaha nasional dan golongan² Rakjat yang demokratis lainnya) supaja mereka ini bisa dipisahkan dari kaum burdjuis komprador dan kaum tuantanah yang erat hubungannya dengan kekuasaan imperialisme. Untuk persatuan seluruh bangsa dan Rakjat Indonesia yang terdiri dari banyak sukubangsa dan minoritet keturunan asing, seperti keturunan Arab, Eropa dan Tionghoa, dan yang menganut berbagai kepertjajaan agama, PKI memperdjjuangkan pelaksanaan politik hak sama bagi semua sukubangsa dengan tidak memandang perbedaan besar atau ketjil, dan maju atau terbelakangnja dan pelaksanaan politik hak sama bagi semua war-

ganegara dengan tidak memandang asal keturunan dan kepertjaan agamanja.

PKI berdjuaug untuk perdamaian dunia dan kerdjasama setjara damai diantara semua negeri atas dasar kemerdekaan dan persamaan penuh semua Rakjat dan nasion. PKI menjokong perdjuaug-an anti-imperialis dari Rakjat negeri² djadjahan dan tergantung.

Berhubung dengan keadaan dunia sekarang, jaitu disatu fihak kekuatan² Sosialisme dan demokrasi telah sangat bertambah besar diseluruh dunia, dan ide² Sosialisme sedang semakin menguasai hati seluruh umatmanusia pekerdja karena keunggulan² sistim Sosialisme atas kapitalisme semakin hari semakin njata menampakkan diri, sedangkan difihak lain kekuatan² imperialisme telah menjadi djauh lebih lemah, dan karena kekuatan yang terpokok daripada klas tuantanah serta komprador Indonesia sebenarnya terletak pada bantuan imperialisme, maka adalah suatu kemungkinan bahwa sistim Demokrasi Rakjat sebagai tingkat peralihan ke Sosialisme di Indonesia ditjapai dengan djalan damai, djalan parlementer. PKI dengan sekuat tenaga berdjuaug untuk mendjadikan kemungkinan ini suatu kenyataan. Djika bergantung kepada PKI, djalan damai, djalan parlementer inilah yang dipilih.

Tetapi Marxisme-Leninisme mengadjarkan kepada kita, bahwa klas² yang berkuasa — untuk Indonesia ialah kaum imperialis, tuantanah dan komprador — tidak pernah menjerahkan kekuasaan mereka dengan sukarela. Tadjam atau kurang tadjamnja perdjuaug-an, digunakan atau tidak digunakannja kekerasan dalam peralihan ke Sosialisme adalah bergantung kepada klas penghisap, bergantung kepada apakah klas penghisap itu sendiri menggunakan kekerasan, dan bukan bergantung kepada klas buruh.

Oleh karena itulah PKI harus tetap menundjukkan kewaspadaan yang se-besar²nja. Apapun djuga bentuk peralihan kesistim Demokrasi Rakjat di Indonesia, namun faktor yang menentukan dan mutlak ialah : pimpinan PKI dalam membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa Rakjat, terutama kaum buruh dan kaum tani, untuk mengubah imbalanced kekuatan antara kaum imperialis, tuantanah dan burdjuis komprador disatu fihak, dan kekuatan Rakjat difihak lain.

Dengan tetap mengingat sifat² khusus daripada revolusi Indonesia, yang menetapkan djalan yang khusus bagi Indonesia menuju Sosialisme, PKI menarik pelajaran dari pengalaman yang kaya dan banjak dari gerakan kaum buruh seluruh dunia, dari Uni Sovjet dan Tiongkok serta negeri² kubu Sosialis umumnja. Dalam perdjalan revolusi yang lama, PKI harus mempunyai tjukup keberanian, keuletan, pengalaman dan keahlian dalam membangkit-

kan, mengorganisasi dan memobilisasi Rakjat yang ber-djuta², harus bisa mengatasi semua kesulitan dan rintangan² serta menghindarkan diri dari bentjana² yang mungkin datang untuk madju kemuka kearah tudjuannja, dan bersamaan dengan itu tidak henti²nja memperbadja barisannja sendiri.

Dalam perdjuaug-an revolusioner, PKI harus berusaha menjadi teras daripada semua organisasi massa revolusioner. PKI djuga harus melakukan perdjuaug-an yang tidak mengenal ampun melawan aktivitet didalam dan diluar Partai yang bermaksud merusak revolusi dengan djalan memetjahbelah persatuan klas buruh dan memetjah persekutuan antara klas² yang revolusioner.

PKI tidak boleh menutup-nutupi kesalahan² dan kekurangan² dalam pekerdjaannja. Tidak ada partai politik atau orang yang bebas dari kekurangan dan kesalahan² didalam pekerdjaan. Oleh karena itu PKI dan segenap anggotanja harus terusmenerus melaksanakan kritik dan selfkritik untuk memeriksa kesalahan² dan kekurangan²nja, sehingga dapatlah dikoreksi kesalahan² dan kekurangan² itu tepat pada waktunja dan dapat mendidik anggota, kader serta Rakjat. PKI menentang sikap sombong, sikap yang tidak mau mengakui kesalahan² dan kekurangan² serta takut pada kritik dan selfkritik. Sebaliknya PKI menuntut kepada setiap organisasi dan anggotanja untuk mengembangkan kritik dan selfkritik, terutama sekali untuk mendorong dan membantu kritik dari bawah didalam Partai dan kritik terhadap Partai oleh massa Rakjat. PKI melarang segala bentuk tekanan terhadap kritik. Terhadap anggota² Partai yang membuat kesalahan, Partai dengan tudjuan „mengobati penjakit dan menjembuhkan sisakit” harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk tetap didalam Partai dan menerima pendidikan serta membantu mereka untuk memperbaiki kesalahan²nja, asal sadja kesalahan² itu bisa diperbaiki didalam Partai dan anggota yang berbuat salah itu sendiri bersedia untuk memperbaiki kesalahan²nja. Tetapi terhadap mereka yang mempertahankan kesalahan²nja dan melakukan aktivitet yang merugikan Partai, adalah suatu keharusan untuk melakukan perdjuaug-an yang gigih terhadap mereka bahkan sampai kepada pemertjatan mereka dari Partai.

Kaum Komunis Indonesia harus mentjuraikan segenap tenaga dan fikirannja untuk mengabdikan kepada Rakjat. Kaum Komunis Indonesia harus mengadakan hubungan² yang luas dengan massa buruh, kaum tani dan semua Rakjat revolusioner lainnja serta terusmenerus mentjuraikan perhatiannja untuk memperkuat dan memperluas hubungan² ini. Tiap anggota Partai harus mengerti bahwa kepentingan² Partai adalah sama dengan kepentingan² Rakjat, dan

bahwa tanggungjawab terhadap Partai adalah sama dengan tanggungjawab terhadap Rakjat. Tiap anggota Partai harus memperhatikan dengan teliti suara Rakjat, mengerti kebutuhan²nja yang urgen dan membantu mereka berorganisasi untuk memperjuangkan kebutuhan²nja. Tiap anggota Partai harus senantiasa bersedia untuk beladjar dari massa Rakjat dan bersamaan dengan itu, dengan tidak djemu²nja senantiasa bersedia mendidik Rakjat dalam semangat revolusioner untuk membangkitkan dan meninggikan kesedarannja. PKI harus yakin bahwa terpisah dari Rakjat berarti bahaya. PKI harus senantiasa mengawasi, mentjegah dan memberantas segala penjakit subjektivisme yang bisa mengasingkan Partai dari massa, seperti sektarisme, komandoisme, birokrasi, liberalisme, dsb.

PKI diorganisasi atas dasar sentralisme-demokratis, yang berarti sentralisme diatas dasar demokrasi dan demokrasi dengan pimpinan yang terpusat. Sentralisme-demokratis menghendaki bahwa setiap organisasi Partai mentaati sepenuhnya prinsip pimpinan kolektif yang dipadukan dengan pertanggungjawab perseorangan, dan bahwa setiap anggota dan organisasi Partai wadjib tunduk kepada pengawasan Partai dari atas dan dari bawah.

Demokrasi didalam Partai tidak boleh terpisah dari sentralisme. PKI adalah organisasi yang bersatu dan militan dengan disiplin yang berdasarkan keinsjafan dan berlaku untuk semua anggotanja. Kekuatan PKI terletak didalam solidaritetnja yang teguh, dalam kesatuan kemauannja dan kesatuan aksinja. Didalam Partai tidak boleh melakukan perbuatan yang melanggar garis politik dan prinsip² organisasi Partai, djuga tidak boleh melakukan aktivitas yang bisa memetjah Partai atau aktivitas faksionil, tidak boleh melakukan tindakan semaunja sendiri lepas dari Partai atau menempatkan perseorangan diatas badan kolektif Partai.

PKI mewajibkan kepada setiap anggotanja mentaati Konstitusi Partai, menempatkan kepentingan Partai diatas kepentingan perseorangan, beladjar dan bekerdja aktif serta bersedia berkorban untuk melaksanakan Program dan putusan² Partai guna menjapai kebebasan dan kebahagiaan nasion serta Rakjat Indonesia.

Bab I

Bendera, Lambang, Lagu dan Sumpah Partai

Fasal 1. Bendera Partai berwarna merah, berukuran pandjang dan lebar 3 : 2, dengan palu-arit berwarna kuning disudut kiri atas dalam ruangan seperenam luas bendera.

Fasal 2. Lambang Partai adalah sebagai berikut :

- Bintang merah berudjung lima dengan palu-arit ditengah-tengahnja;
- Bendera nasional Merah-Putih diatasnja;
- Padi dan kapas dikanan kirinja; dan
- Nama PKI sebagai singkatan resmi Partai Komunis Indonesia dibagian bawah.

Fasal 3. Lagu klas buruh sedunia „Internasionale” adalah djuga lagu PKI.

Fasal 4. Sumpah Partai adalah sebagai berikut :

„Saja, , menjatakan persetudjuan saja pada Program dan Konstitusi Partai Komunis Indonesia, dan dengan ini menjatakan kesediaan saja untuk mendjadi tjalonanggota/anggota PKI.

„Saja bersumpah akan memenuhi semua kewadajiban Partai; memelihara kesatuan Partai; melaksanakan putusan² Partai; mendjadi tjontoh dalam perjuangn untuk tanahair dan Rakjat; berusaha mendjadi tjontoh dalam kehidupan se-hari²; meneguhkan hubungan massa dengan Partai; berusaha memperdalam kesedaran dan menguasai prinsip Marxisme-Leninisme; berterusterang dan djujur kepada Partai; mentaati disiplin Partai; mendjaga keselamatan Partai.

„Demikianlah pernjavaan dan sumpah saja kepada Partai Komunis Indonesia, Partai yang saja djundjung tinggi dan saja tjintai”.

Sumpah ini diutjapkan pada saat seseorang diterima mendjadi tjalonanggota Partai dan pada saat seseorang tjalonanggota di-sahkan mendjadi anggota Partai.

Bab II

Keanggotaan

Fasal 5. Yang dapat diterima mendjadi anggota Partai ialah setiap warganegara Indonesia yang berumur se-kurang²nja 18 tahun, yang menjetudjui Program dan Konstitusi Partai, menjetudjui untuk masuk dan bekerdja didalam salahsatu organisasi Partai, untuk mendjalankan putusan² Partai dan membayar uang pangkal dan iuran Partai.

Fasal 6. Kewadajiban² anggota Partai adalah sebagai berikut :

- a. Mengundjungi rapat² dan kursus² Partai, membatja dan menjebarkan harian serta penerbitan² Partai;
- b. Berusaha dengan radjin mempeladjadi dan terusmenerus mempertinggi pengertian tentang Marxisme-Leninisme serta menggunakannja dalam memetjahkan masalah² kongkrit;
- c. Memperteguh solidaritet dan persatuan Partai;
- d. Terusmenerus mempertinggi pengertian tentang garis politik

Partai dan kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dengan demikian dapat lebih aktif mengambil bagian dalam gerakan revolusioner di Indonesia;

- e. Sungguh² mentaati Konstitusi Partai dan mendjunjung tinggi moral Komunis;
- f. Menempatkan kepentingan Partai, yaitu kepentingan massa Rakjat diatas kepentingan perseorangan;
- g. Mengabdikan dengan sepenuh jiwa dan raga kepada massa Rakjat dan mengeratkan hubungan dengan massa Rakjat, beladjar dari massa Rakjat, dengan sungguh² memperhatikan keinginan dan suara massa Rakjat serta melaporkannya kepada Partai tepat pada waktunya, menjelaskan politik dan putusan² Partai kepada massa Rakjat;
- h. Menjadi tjontoh dalam menjalankan disiplin organisasi² revolusioner, menguasai garis pekerdjaannya dan menjadi teladan dalam berbagai lapangan pekerjaan revolusioner;
- i. Melaksanakan kritik dan selfkritik, mengemukakan kekurangan dan kesalahan dalam pekerjaan dan berusaha sungguh² untuk mengatasi serta membetulkannya; dan menentang rasa puas diri yang berlebih² dan sikap sombong karena mendapatkan hasil² dalam pekerjaan;
- j. Setia dan jujur kepada Partai, tidak menutup-nutupi dan memutarbalikkan keadaan yang sebenarnya;
- k. Senantiasa waspada menghadapi segala sesuatu didalam maupun diluar Partai yang membahayakan keselamatan Partai serta melawan gejala² yang merugikan kepentingan Partai dan Rakjat.

Setiap anggota Partai tanpa memandang jasa dan fungsinya yang tidak memenuhi kewajiban² tersebut diatas dikritik dan dididik. Setiap pelanggaran yang serius terhadap kewajiban² itu, berarti pelanggaran terhadap disiplin Partai dan dikenakan tindakan disiplin.

Fasal 7. Hak² anggota Partai adalah sebagai berikut :

- a. Mengambil bagian dalam diskusi yang bebas dalam rapat² atau penerbitan² Partai tentang masalah² teoritis dan praktis yang bersangkutan dengan politik Partai;
- b. Memilih dan dipilih didalam Partai;
- c. Mengajukan usul, keterangan, atau pengaduan kepada tiap organisasi Partai, sampai kepada Komite Central (CC);
- d. Mengkritik sesuatu organisasi Partai atau seseorang fungsionaris dalam rapat² Partai;
- e. Meminta turut hadir pada waktu organisasi Partai memutuskan tindakan disiplin atau menetapkan penilaian atas watak dan

pekerdjaannya;

- f. Mempertahankan pendiriannya jika tidak menyetujui sesuatu putusan, disamping harus melaksanakan putusan itu dengan tidak bersyarat. Perbedaan pendirian itu hanya boleh dikemukakan kepada badan pimpinan Partai.

Anggota² Partai dan anggota² yang bertanggungjawab dari organisasi Partai yang tidak menghargai hak² tersebut diatas dikritik dan dididik; pelanggaran hak² anggota merupakan pelanggaran terhadap disiplin Partai dan dikenakan tindakan disiplin.

Fasal 8. Keanggotaan Partai berlaku hanya atas perseorangan sesuai dengan tjara² mengatur penerimaan anggota sebagai berikut :

- a. Kaum buruh, buruhtani, tanimiskin atau kaum miskin kota dapat menjadi anggota Partai atas tanggungan 2 orang anggota Partai, dan sesudah diterima oleh putusan rapat Resort serta disahkan oleh Komite Subseksi (CSS), dan sesudah melalui masatjalon selama 6 bulan;
- b. Tanisedang, pegawai kantor, kaum intelektual atau pekerdja merdeka (dokter, advokat dll.), dapat menjadi anggota Partai atas tanggungan 2 orang anggota Partai yang masing² sudah menjadi anggota se-kurang²nja 1 tahun terusmenerus, dan sesudah diterima oleh putusan rapat Resort serta disahkan oleh CSS, dan sesudah melalui masatjalon selama 1 tahun;
- c. Seseorang yang kedudukan sosialnya lain daripada yang tertjantum dalam a atau b diatas dapat menjadi anggota Partai atas tanggungan 2 orang anggota Partai, yang masing² sudah menjadi anggota se-kurang²nja 3 tahun terusmenerus, dan sesudah diterima oleh putusan rapat Resort serta disahkan oleh Komite Seksi (CS), dan sesudah melalui masatjalon selama 2 tahun;
- d. Anggota biasa dari partai politik lain yang sudah keluar dan akan masuk Partai kita dapat menjadi anggota Partai atas tanggungan 2 orang anggota Partai yang masing² sudah menjadi anggota se-kurang²nja 3 tahun terusmenerus dan sesudah diterima oleh putusan rapat Resort serta disahkan oleh CS. Untuk anggota pengurus daerah dari partai politik lain yang sudah keluar dan akan masuk Partai kita kedua penanggung-nja sudah menjadi anggota Partai se-kurang²nja 5 tahun terusmenerus, dan sesudah diterima oleh putusan rapat Resort dan disahkan oleh Komite Daerah Besar (CDB) atau CC. Untuk anggota pengurus yang mempunyai kedudukan tinggi (pengurus pusat) dari partai politik lain yang sudah keluar dan masuk kedalam Partai kita, pensahannya harus oleh CC. Dalam se-

mua keadaan tersebut, dibutuhkan masatjalon selama 2 tahun.

Anggota Partai jang sudah dipetjat bisa diterima kembali mendjadi anggota hanja atas putusan Komite Partai jang pernah memetjatnja, atau oleh Komite Partai jang lebih tinggi, menurut ketentuan tjara² mengatur penerimaan anggota.

Fasal 9. Setiap anggota Partai jang menanggung seseorang jang akan mendjadi tjalonanggota Partai harus memberikan keterangan jang bertanggungjawab dan benar kepada Partai tentang ideologi, karakter dan riwayat hidup dari orang jang bersangkutan, dan sebelum mengusulkan harus memberi keterangan tentang Program dan Konstitusi Partai kepada orang tersebut. Tiap² orang jang mau masuk Partai harus mengajukan permintaan dengan mengisi formulir jang sudah ditentukan oleh Partai.

Sebelum mengambil putusan atau mensahkan penerimaan seseorang tjalonanggota, Komite Partai jang bersangkutan menundjuk fungsionaris Partai untuk bertukar fikiran se-luas²nja dengan orang jang mau mendjadi tjalonanggota itu supaya dapat mengetahui dan memeriksanya setjara teliti.

Fasal 10. Dalam keadaan istimewa, CSS dan Komite² Partai jang lebih tinggi bisa langsung menerima anggota baru.

Fasal 11. Selama masatjalon organisasi² Partai jang bersangkutan memberikan didikan elementer Partai dan mengawasi kwalitet politik tjalonanggota.

Kewajiban² dan hak² tjalonanggota sama dengan anggota Partai, hanja sadja tidak berhak untuk memilih, dipilih dan tidak mempunyai hak suara dalam mengambil putusan.

Fasal 12. Setelah masatjalon selesai, penerimaan mendjadi anggota ditetapkan tepat pada waktunja oleh rapat Resort dan disahkan oleh CSS atau oleh Komite Partai jang lebih tinggi.

Rapat Resort atau Komite Partai bisa memperpanjang atau memperpendek masatjalon seseorang tjalonanggota, berdasarkan belum atau sudah dipenuhinja sjarat² keanggotaan Partai.

Perpanjangannya bisa diberikan paling lama sama dengan lama masatjalon dari tjalonanggota jang bersangkutan.

Kedudukan tjalonanggota ditjabat apabila ternyata selama masatjalon tidak memenuhi sjarat untuk mendjadi anggota Partai.

Fasal 13. Masatjalon dihitung mulai dari tanggal penetapan penerimaan sebagai tjalonanggota oleh rapat Resort.

Usia keanggotaan Partai dihitung sedjak tanggal penetapan penerimaan dari tjalonanggota mendjadi anggota Partai oleh rapat Resort.

Anggota jang sudah pernah dipetjat dan masuk kembali dalam Partai, usia keanggotaannya dihitung sedjak tanggal penetapan

penerimaannya kembali sebagai anggota.

Fasal 14. Anggota atau tjalonanggota jang pindah ketempat lain, mendjadi anggota atau tjalonanggota dari organisasi Partai ditempat jang baru dengan memberikan surat keterangan dari Komite Partai jang ditinggalkan.

Fasal 15. Tjalonanggota atau anggota Partai mempunyai kebebasan untuk keluar dari Partai. Djika seseorang minta keluar dari Partai, rapat Resort mengambil putusan untuk menghapuskan nama orang tersebut dari daftar keanggotaan Partai, dan melaporkannya kepada Komite Partai jang langsung diatasnja.

Komite jang bersangkutan djika menganggap perlu dapat mentjoba untuk menjarankan supaya tjalonanggota atau anggota tersebut membatalkan keinginannya untuk keluar.

Apabila seseorang anggota minta keluar dari Partai, padahal telah melakukan pelanggaran² disiplin jang berat jang bisa mendjadi alasan untuk pemetjatannya, maka pemberhentiannya dinjatakan sebagai pemetjatan.

Fasal 16. Anggota atau tjalonanggota jang dalam tempo 6 bulan, sesudah diperingatkan tetap tidak mengambil bagian dalam kehidupan Partai, tidak mendjalankan pekerdjaan Partai atau tidak membayar iuran Partai, tanpa alasan jang sah, dianggap dengan sendirinja keluar dari Partai, dan putusan untuk menghapuskan namanya dari daftar keanggotaan Partai dilakukan oleh Rapat Resort dan dilaporkan kepada Komite Partai jang langsung diatasnja untuk disahkan.

Fasal 17. Terhadap anggota Partai jang melanggar disiplin Partai, organisasi Partai dari semua tingkat dapat mengambil tindakan disiplin sesuai dengan kesalahannya seperti peringatan, peringatan keras, pemindahan dari pekerdjaan jang sudah ditentukan, pemberian tugas pertjobaan atau pemetjatan dari Partai.

Waktu untuk anggota Partai jang diberi tugas pertjobaan tidak boleh lebih dari setahun, dan selama itu hak serta kewajibannya sama dengan tjalonanggota. Anggota Partai jang mendjalankan tugas pertjobaan setelah terbukti dapat membetulkan kesalahannya, haknya sebagai anggota Partai dipulihkan, dan masa selama mendjalankan tugas pertjobaan itu terhitung djuga dalam usia keanggotaannya; tetapi apabila ternyata tidak lajak lagi mendjadi anggota Partai, dipetjat dari Partai.

Fasal 18. Setiap tindakan disiplin jang dikenakan pada anggota Partai diputuskan oleh Rapat Resort dan disetudjui oleh Komisi Kontrol atau Komite Partai jang lebih tinggi.

Dalam keadaan istimewa setiap Komite Partai bisa mengambil tindakan disiplin terhadap anggota Partai dengan persetudjuan

dari Komisi Kontrol atau Komite Partai yang langsung di atasnya.

Fasal 19. Setiap putusan mengenai pemindahan dari pekerjaan yang sudah ditentukan, pemberian tugas pertunjukan atau pemetjatan dari Partai terhadap anggota Komite Partai hanya boleh diambil oleh Konferensi yang memilihnya. Dalam keadaan mendesak, putusan itu bisa diambil oleh Sidang Pleno Komite Partai yang bersangkutan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota Pleno dan disahkan oleh Komite yang langsung di atasnya.

Fasal 20. Setiap putusan mengenai pemindahan pekerjaan yang sudah ditentukan, pemberian tugas pertunjukan atau pemetjatan terhadap anggota atau tjalonanggota Komite Central diambil oleh Sidang Pleno Komite Central dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota Komite Central dan disahkan oleh Kongres Nasional Partai.

Fasal 21. Pemetjatan dari Partai adalah tindakan disiplin yang paling keras. Dalam mengambil atau mensahkan putusan pemetjatan itu, setiap organisasi Partai harus sangat berhati-hati, memeriksa dan mempelajari setjara seksama bahan-bahan persoalan dan dengan teliti mendengarkan pembelaan anggota Partai yang bersangkutan.

Fasal 22. Setiap organisasi Partai yang akan mendiskusikan atau memutuskan tindakan disiplin terhadap anggota Partai, terketjuali dalam keadaan istimewa, harus memberitahu anggota tersebut supaya hadir dalam rapat untuk membela diri. Apabila anggota Partai yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan disiplin itu, ia boleh mengajukan permintaan supaya persolannya dipertimbangkan kembali dan mengajukan banding kepada Komite Partai yang lebih tinggi, kepada Komisi Kontrol sampai kepada Komite Central. Organisasi Partai dari semua tingkat harus mengurus dengan sungguh-sungguh atau meneruskan permintaan banding secepatnya.

Bab III

Susunan dan Prinsip Organisasi Partai

Fasal 23. Partai disusun berdasarkan prinsip sentralisme-demokratis. Sentralisme-demokratis berarti sentralisme yang berdasarkan demokrasi dan demokrasi dibawah pimpinan yang terpusat.

Syarat-syarat yang pokok adalah sebagai berikut :

- a. Badan pimpinan Partai dari semua tingkat dipilih;
- b. Badan pimpinan Partai bertanggungjawab kepada organisasi

Partai yang memilihnya dengan memberi laporan pada waktu yang tertentu;

- c. Putusan Partai harus dilaksanakan dengan tidak bersyarat. Setiap anggota Partai tunduk kepada putusan organisasi Partai dimana ia tergabung; jumlah tersedikit tunduk kepada jumlah terbanyak; organisasi Partai bawahan tunduk kepada organisasi Partai di atasnya dan segenap organisasi Partai tunduk kepada Kongres Nasional Partai dan CC;
- d. Badan pimpinan Partai harus senantiasa memperhatikan pendapat organisasi bawahan dan massa anggota Partai, mempelajari pengalaman dan memberikan bantuan dalam memetjahkan persolannya tepat pada waktunya;
- e. Organisasi Partai bawahan harus setjara periodik memberikan laporan mengenai pekerjaannya kepada organisasi atasannya, dan meminta instruksi tepat pada waktunya tentang soal-soal yang memerlukan putusan organisasi yang lebih tinggi;
- f. Semua organisasi Partai bekerja atas prinsip memadukan pimpinan kolektif dengan tanggungjawab perseorangan; semua soal yang penting diputuskan setjara kolektif, dan bersama dengan itu masing-masing orang diberi kemungkinan untuk melaksanakan peranannya yang penuh dalam batas yang semestinya.

Fasal 24. Organisasi Partai didirikan atas dasar pembagian geografi atau tempatkerja.

Organisasi yang mengatur pekerjaan Partai disesuatu daerah tertentu adalah badan tertinggi daripada semua organisasi Partai dalam daerah itu.

Organisasi yang mengatur pekerjaan Partai disesuatu tempatkerja adalah badan tertinggi daripada semua organisasi Partai dalam tempatkerja itu.

Fasal 25. Badan pimpinan Partai yang tertinggi dari berbagai tingkat adalah sebagai berikut :

- a. Untuk seluruh Indonesia ada Kongres Nasional Partai dan Komite Central (CC);
- b. Untuk tiap daerah Swatantra tingkat I ada Konferensi Partai Daerah Besar dan Komite Daerah Besar (CDB);
- c. Untuk ibukota RI (Djakarta Raja) ada Konferensi Partai Djakarta Raja dan Komite Djakarta Raja (CDR) yang kedudukannya sama dengan CDB;
- d. Untuk pulau atau pulau-pulau yang ditentukan oleh CC ada Konferensi Partai Pulau atau Pulau-pulau dan Komite Pulau atau Pulau-pulau (CP) yang dipimpin langsung oleh CC atau CDB;
- e. Untuk Daerah Istimewa Jogjakarta dan Kota yang ditentukan oleh CC ada Konferensi Partai Daerah Jogjakarta dan Kon-

- terensi Partai Kota serta Komite Daerah Jogjakarta (CDJ) dan Komite Kota (CK) yang dipimpin langsung oleh CDB;
- f. Untuk daerah Swatantra tingkat II dan daerah dibawah Swatantra tingkat II yang ditentukan oleh CC ada Konferensi Seksi Partai dan Komite Seksi (CS);
 - g. Untuk daerah Swatantra tingkat III atau Ketjamatan atau daerah dibawah Ketjamatan yang ditentukan oleh CDB atau CP ada Konferensi Subseksi Partai dan Komite Subseksi (CSS);
 - h. Untuk pabrik, tambang, desa, kampung, djalan, perusahaan, sekolahan, perguruan tinggi, kantor dan tempatkerdja² lainnja ada Rapat Resort dan Komite Resort (CR) atau Konferensi Resort Besar dan Komite Resort Besar (CRB).

Fasal 26. Diantara masa dua Kongres Nasional Partai, dua Konferensi Partai dan diantara dua Rapat Resort Partai, Komite² Partai yang dipilih olehnya adalah badan pimpinan tertinggi dari organisasi² Partai yang sesuai dengan tingkatannya masing².

Fasal 27. Semua badan pimpinan Partai dipilih :

- a. CC dipilih oleh Kongres Nasional Partai;
- b. CDB, CP, CK, CS dan CSS dipilih oleh Konferensi² Partai daerah masing²;
- c. CR dipilih oleh Rapat Resort, dan CRB dipilih oleh Konferensi Resort Besar.

Dimana keadaan tidak mengizinkan untuk mengadakan pemilihan², badan² pimpinan Partai dapat ditundjuk oleh Komite yang lebih tinggi.

Fasal 28. Pemilihan² Komite² Partai dilakukan setjara tertulis dan rahasia atau setjara terbuka dari daftar tjalon², dengan djaminan, bahwa pemilih² berhak mengkritik dan mengganti setiap tjalon dalam daftar.

Untuk tiap² pemilihan Komite Partai, Kongres Nasional atau Konferensi Daerah membentuk Komisi Pemilihan yang bertugas mengusulkan tjara² pemilihan dan daftar tjalon berdasarkan tjalon² yang diadjukan.

Untuk dapat ditjalonkan mendjadi anggota Komite Partai, harus dipenuhi sjarat usia keanggotaan sebagai berikut :

- a. Untuk CC se-kurang²nja 8 tahun;
- b. Untuk CDB se-kurang²nja 5 tahun;
- c. Untuk CP, CK dan CS se-kurang²nja 3 tahun;
- d. Untuk CSS se-kurang²nja 2 tahun; dan
- e. Untuk CR se-kurang²nja 1 tahun.

Fasal 29. Badan² pimpinan Partai atau anggota²nja dapat diberhentikan oleh masing² badan yang memilihnja sebelum habis masa djabatannya.

Selama masa antara dua Konferensi Daerah Partai dari semua tingkat, Komite Partai yang lebih tinggi, bila menganggap perlu boleh memindahkan fungsionaris² organisasi Partai bawahan.

Fasal 30. Untuk menjampaikan atau mendiskusikan putusan² penting dari organisasi² Partai yang lebih tinggi, untuk merentjakan pekerjaan, memeriksa pelaksanaan atau menindjau kembali putusan², setiap organisasi Partai dapat mengadakan berbagai matjam rapat dengan kader atau dengan anggota²nja yang aktif, Konferensi² Kerdja, Seminar² dan lain²nja.

Fasal 31. Sebelum badan pimpinan Partai mengambil putusan tentang politik Partai, organisasi² Partai bawahan dan anggota² Komite Partai dapat mendiskusikannya didalam organisasi Partai dan rapat² Partai setjara bebas dan praktis, dan mengadjukan usulnja kepada badan pimpinan Partai. Tetapi sesudah putusan diambil oleh badan pimpinan Partai, mereka harus tunduk. Bila organisasi Partai bawahan berpendapat bahwa putusan organisasi atasan tidak sesuai dengan keadaan² yang njata didaerahnja atau dengan sesuatu lapangan tertentu, ia harus mengusulkan kepada organisasi atasan yang bersangkutan supaya mengubah putusannya; tetapi djika organisasi atasan tetap mempertahankan putusannya, maka organisasi Partai bawahan wadajib melaksanakannya tanpa sjarat.

Fasal 32. Sebelum CC mengeluarkan keterangan atau putusan bagian² atau organisasi Partai bawahan atau orang²nja yang bertanggungjawab tidak boleh semaunya sendiri mengeluarkan keterangan atau mengambil putusan tentang politik yang bersifat nasional, walaupun mereka diperbolehkan mendiskusikan dan mengadjukan pendapat kepada badan² pimpinan pusat.

Mengenai soal² daerah, organisasi Partai daerah berhak mengambil putusan² sendiri, asalkan tidak bertentangan dengan putusan dari organisasi Partai yang lebih tinggi atau dengan putusan CC.

Fasal 33. Harian² dan madjalah² yang diterbitkan oleh organisasi Partai dari semua tingkat harus mempopulerkan putusan² dan politik organisasi² pusat, organisasi² atasan dan organisasi Partai-nja sendiri.

Organisasi² Partai dari semua tingkat harus menjiarkan penerbitan² CC.

Penerbitan harian, madjalah atau brosur daerah harus dengan persetudjuan Komite Partai yang langsung diatasnja.

Fasal 34. Pembentukan organisasi Partai yang baru atau pembubaran organisasi Partai yang sudah ada harus diputuskan oleh organisasi yang langsung diatasnja.

Fasal 35. Politbiro CC mengadakan Departemen², dan Dewan

Harian Comité² Partai mulai dari CSS sampai ke CDB mengadakan Bagian² menurut keperluan; djuga bisa membentuk Biro², Komisi² atau badan² lain jang dibutuhkan.

Bab IV Organisasi Pusat Partai

Fasal 36. Kongres Nasional Partai diputuskan dan diadakan oleh CC.

Dalam keadaan biasa, Kongres Nasional Partai diadakan sekali dalam 5 tahun. Dalam keadaan² luarbiasa, Kongres Nasional Partai bisa ditunda atau dipertjepat menurut putusan CC.

Kalau se-kurang²nja 1/3 djumlah organisasi² Daerah Besar jang mewakili lebih dari separoh djumlah seluruh anggota Partai atas putusan Konferensinja masing² meminta supaya diadakan Kongres Nasional Partai, maka CC harus meluluskannya.

Kongres Nasional Partai adalah sah apabila dikundjungi oleh utusan² dari se-kurang²nja 1/3 djumlah organisasi² Daerah Besar dan mewakili lebih dari separoh djumlah seluruh anggota Partai.

Djumlah utusan untuk Kongres Nasional Partai dan tjara² mengatur pemilihannya ditentukan oleh CC.

Anggota² dan tjalonanggota² CC ketjuali jang mendjadi utusan hadir dalam Kongres Nasional Partai dengan hak berbitjara, tetapi tidak mempunjai hak suara dalam mengambil putusan².

Pengumuman akan berlangsungnja Kongres Nasional Partai dan atjaranja harus dilakukan se-kurang²nja 1 bulan sebelumnja; sedangkan Kongres Nasional Partai luarbiasa diumumkan sekurang-kurangnya 2 bulan sebelumnja.

Fasal 37. Fungsi dan kekuasaan Kongres Nasional Partai adalah sebagai berikut :

- a. Menerima, mendiskusikan dan mensahkan laporan² jang diberikan oleh CC, Komisi Verifikasi dan Badan² Pusat lainnja;
- b. Menentukan garis politik Partai;
- c. Mengubah Program dan Konstitusi Partai;
- d. Memilih Komisi Verifikasi;
- e. Memilih CC.

Kongres Nasional memilih Presidium untuk memimpin djalannya Kongres dan melakukan fungsi dan kekuasaan CC selama Kongres.

Fasal 38. Djumlah anggota dan tjalonanggota CC ditentukan oleh Kongres Nasional Partai.

Kalau terdjadi lowongan didalam keanggotaan CC, lowongan itu diisi dengan tjalonanggota CC jang ditentukan oleh CC.

Fasal 39. Selama masa antara dua Kongres Nasional Partai,

CC memimpin seluruh pekerdjaan Partai, melaksanakan putusan² Kongres Nasional Partai, mewakili Partai dalam hubungan²nja dengan partai² dan organisasi² lain, mendirikan badan² Partai dan memimpin aktivitet²nja, mengurus dan menempatkan kader² Partai.

Fasal 40. Sidang Pleno CC diadakan sekali tiap 6 bulan oleh Politbiro CC. Sesuai dengan keadaan Politbiro CC bisa menunda atau mempertjepat Sidang Pleno itu. Tjalonanggota² CC hadir dalam Sidang Pleno CC dengan mempunjai hak untuk menjatakan pendapatnja, tetapi tidak mempunjai hak suara dalam mengambil putusan².

Fasal 41. CC dalam Sidang Plenonja memilih Politbiro, Dewan Harian Politbiro, Sekretariat CC, Ketua CC dengan wakil²nja, Sekretaris² CC sebagai Kepala dan Wakil Kepala Sekretariat CC.

Politbiro serta Dewan Hariannya melaksanakan fungsi dan kekuasaan CC selama masa antara 2 Sidang Pleno CC.

Sekretariat CC melakukan pekerdjaan harian CC, dibawah pimpinan Politbiro dan Dewan Hariannya.

Ketua dan Wakil² Ketua CC adalah djuga Ketua dan Wakil² Ketua Politbiro.

Djumlah anggota dan tjalonanggota Politbiro, djumlah anggota Dewan Harian Politbiro dan djumlah anggota Sekretariat CC ditentukan oleh CC.

Djika terdjadi lowongan didalam badan² tersebut, pengisian lowongan itu ditetapkan oleh CC.

Fasal 42. Selama masa antara 2 Kongres Nasional Partai, CC bisa mengadakan beberapa Konferensi Nasional Partai untuk mendiskusikan dan memutuskan soal² politik dan organisasi jang mendesak.

Fasal 43. Konferensi Nasional Partai adalah sah apabila dikundjungi se-kurang²nja oleh utusan² jang mewakili lebih dari separoh djumlah seluruh organisasi Daerah Besar.

Djumlah utusan dan tjara² mengatur pemilihannya ditentukan oleh CC.

Fasal 44. Konferensi Nasional Partai dapat memperhentikan anggota² atau tjalonanggota² CC jang tidak melakukan kewadajiban sebagaimana mestinja, dan dapat memilih penggantinya dari tjalonanggota² CC untuk mendjadi anggota CC dan memilih tjalonanggota CC jang baru, asalkan djumlah anggota dan tjalonanggota CC jang diganti atau djumlah tjalonanggota CC jang dipilih itu, pada tiap Konferensi tidak lebih dari 1/5 djumlah semua anggota dan tjalonanggota CC.

Fasal 45. Putusan² jang diambil oleh Konferensi Nasional

Partai dan pemberhentian serta pemilihan anggota atau tjalon-anggota CC oleh Konferensi itu hanya berlaku sesudah disahkan oleh CC.

Bab V Organisasi Daerah Partai

Fasal 46. Konferensi² Partai daerah diadakan oleh Comitenja masing²; untuk Daerah Besar tiap 3 tahun sekali; untuk Pulau atau Pulau², Kota dan Seksi tiap 2 tahun sekali; dan untuk Subseksi tiap 1 tahun sekali.

Dalam keadaan luarbiasa Konferensi² tersebut dapat ditunda atau dipertjepat oleh Komite Partai yang bersangkutan.

CDB, CP, CK, CS dan CSS harus mengadakan Konferensinja masing² atas permintaan lebih dari separoh djumlah seluruh organisasi Partai yang langsung dibawahnja atau atas usul organisasi Partai yang langsung diatasnja.

Konferensi adalah sah apabila dikundjungi oleh utusan² dari se-kurang²nja separoh djumlah organisasi Partai yang langsung dibawahnja dan mewakili lebih dari separoh djumlah anggota di-daerahnja.

Utusan² untuk Konferensi² Daerah Besar, Pulau atau Pulau², Kota, dan Seksi dipilih oleh masing² Konferensi Partai yang langsung dibawahnja; untuk Konferensi Subseksi dipilih oleh Konferensi Resort Besar atau Rapat Resort.

Djumlah utusan dan tjara² mengatur pemilihannja ditentukan oleh Komite yang menjelenggarakan Konferensi.

Anggota² Komite lama ketjual yang mendjadi utusan hadir dalam Konferensi dengan hak berbitjara, tetapi tidak mempunjai hak suara dalam mengambil putusan².

Fasal 47. Fungsi dan kekuasaan dari Konferensi Daerah Besar, Pulau atau Pulau², Kota, Seksi dan Subseksi ialah :

- a. Menerima, mendiskusikan dan mensahkan laporan² yang diberikan oleh Komite Partai, Komisi Verifikasi dan Badan² Partai lainnja dari Komite Partai masing²;
- b. Memilih Komisi Verifikasi;
- c. Memilih Comitenja masing².

Konferensi Daerah Besar djuga memilih utusan² ke Kongres Nasional Partai.

Konferensi memilih Presidium untuk memimpin djalannja Konferensi dan melakukan fungsi dan kekuasaan Komite selama Konferensi.

Fasal 48. Djumlah anggota Komite ditetapkan oleh Konferen-

sinja masing².

CDB, CP dan CK mengadakan Sidang Plenonja 4 bulan sekali, CS 3 bulan sekali, dan CSS 2 bulan sekali.

CDB, CP, CK, CS dan CSS dalam Sidang Plenonja masing² memilih Dewan Harian, Sekretariat, Sekretaris dan Wakilnja.

Sekretaris dan Wakilnja mengetuai Sidang² Pleno, Dewan Harian dan Sekretariat dari Comitenja masing².

Anggota² Dewan Harian dan Sekretariat dari CDB, CP, CK, CS dan CSS harus disetudjui oleh Komite Partai yang langsung diatasnja.

Djika terdjadi lowongan pada Dewan Harian atau Sekretariat, lowongan itu diisi dengan anggota Komite Pleno oleh Dewan Harian yang bersangkutan dengan persetudjuan Komite Partai yang langsung diatasnja. Untuk mengisi lowongan didalam keanggotaan Komite Pleno, Komite Partai yang bersangkutan dalam Sidang Plenonja melakukan pengangkatan dengan persetudjuan Komite Partai yang langsung diatasnja.

Fasal 49. CDB, CP, CK, CS dan CSS harus mendjalankan putusan² Konferensinja masing² dan mendjalankan putusan² organisasi Partai yang lebih tinggi, mendirikan Badan² Partai dan memimpin aktivitet²nja, mengurus dan menempatkan kader² Partai.

Fasal 50. Selama masa antara 2 Konferensi Partai daerah, CDB mengadakan Konferensi antar-waktu 2 kali dan CP, CK, CS dan CSS masing² 1 kali yang dihadiri oleh utusan² yang dipilih oleh masing² Sidang Pleno Komite yang langsung dibawahnja.

Konferensi antar-waktu Subseksi dihadiri oleh utusan² yang dipilih oleh CRB atau CR.

Djumlah utusan dan tjara² mengatur pemilihannja ditentukan oleh Komite yang menjelenggarakan Konferensi.

Konferensi antar-waktu adalah sah apabila dikundjungi oleh utusan² dari se-kurang²nja separoh djumlah organisasi Partai yang langsung dibawahnja.

Konferensi² antar-waktu dapat memperhentikan anggota² Komite yang bersangkutan dan memilih penggantinya, asalkan djumlah anggota yang diganti itu tidak lebih dari $\frac{1}{4}$ djumlah semua anggota Komite.

Putusan² yang diambil oleh Konferensi antar-waktu baru berlaku sesudah disahkan oleh Komite Partai yang bersangkutan.

Bab VI Organisasi Basis Partai

Fasal 51. Organisasi basis Partai didirikan menurut tempat

tinggal atau tempatkerdja. Disesuatu pabrik, tambang, desa, kampung, djalan, perusahaan, sekolahan, perguruan tinggi, kantor dan di-tempatkerdja² lainnja dimana terdapat 3 atau lebih anggota Partai, didirikan organisasi basis Partai. Djika ditempat itu terdapat kurang dari 3 anggota Partai, anggota² tersebut harus mengabungkan diri dalam organisasi basis Partai jang terdekat.

Fasal 52. Bentuk organisasi basis Partai adalah sebagai berikut :

- a. Organisasi basis Partai jang beranggota kurang dari 100 orang disebut Resort Partai;
- b. Organisasi basis Partai jang beranggota 100 orang atau lebih disebut Resort Besar Partai. Dibawah Resort Besar Partai dibentuk beberapa Resort Partai.

Fasal 53. Organisasi basis Partai harus mengeratkan hubungan Partai dengan massa Rakjat.

Kewajiban² umum organisasi basis Partai adalah sebagai berikut :

- a. Mendjalankan propaganda dan pekerdjaan organisasi dikalangan massa untuk melaksanakan politik Partai dan putusan² organisasi² Partai jang lebih tinggi;
- b. Selalu memperhatikan perasaan² dan tuntutan² massa Rakjat, melaporkannja tepat pada waktunya kepada organisasi² Partai jang lebih tinggi, memperhatikan kehidupan politik, ekonomi dan kebudayaan dari Rakjat, dan mengorganisasi massa Rakjat untuk memetjahkan masalah² mereka sendiri;
- c. Menarik anggota² baru, mengumpulkan iuran anggota Partai, memeriksa laporan² dari anggota² Partai dan mendjaga disiplin Partai dikalangan anggota²;
- d. Mengorganisasi pendjualan harian, madjalah dan penerbitan² lainnja dari Partai;
- e. Mendidik anggota² Partai dan mengorganisasi peladjaran² mereka, termasuk pemberantasan butahuruf.

Fasal 54. Rapat Resort diadakan se-kurang²nja sebulan sekali dan dihadiri oleh Kepala² Grup.

Konferensi Resort Besar diadakan se-kurang²nja 2 bulan sekali dan dihadiri oleh utusan² dari CR.

Rapat Resort dan Konferensi Resort Besar menerima dan mendiskusikan laporan² jang diberikan oleh Comitenja masing²; menentukan pekerdjaan² ditempatnja masing² dan memilih CR dan CRB.

CR dipilih untuk waktu 6 bulan.

CRB dipilih untuk waktu 1 tahun.

CR memilih seorang Sekretaris dan djika perlu seorang Wakil

Sekretaris.

CRB memilih Sekretariat, Sekretaris dan Wakilnja.

Suatu organisasi basis jang beranggota kurang dari 10 orang, tidak membentuk Komite, tetapi tjukup memilih seorang Sekretaris dan seorang Wakilnja.

Fasal 55. Resort Partai jang beranggota banyak, harus membagi anggota²nja dalam Grup², jang masing² terdiri dari sebanjak-banjaknja 10 orang.

Anggota² wanita Partai dapat diorganisasi dalam Grup² tersendiri.

Grup memilih seorang Kepala Grup dan kalau perlu seorang Wakil Kepala.

Dengan persetujuan Komite Partai jang lebih tinggi, seorang anggota Partai dapat merangkap mendjadi anggota Resort tempatkerdja dan Resort tempattinggal dengan ketentuan bahwa anggota tersebut mempunyai hak suara dalam mengambil putusan dan kewajiban membayar iuran hanja pada salahsatu Resort sadja.

Bab VII

Fraksi Partai Dalam Organisasi² Bukan-Partai

Fasal 56. Dalam badan² pimpinan organisasi² bukan-Partai, dimana terdapat 3 atau lebih anggota Partai jang berkedudukan penting, dibentuk fraksi Partai. Kewajiban² fraksi Partai ialah : bertanggungjawab atas pelaksanaan politik dan putusan² Partai, memperkuat persatuan dengan kader² non-Partai dan mengeratkan hubungan dengan massa dalam organisasi² bukan-Partai jang bersangkutan.

Fasal 57. Anggota² Partai dalam Dewan² Perwakilan dipusat dan didaerah merupakan Fraksi Partai.

Anggota² Fraksi Partai dalam Dewan² Perwakilan harus dengan teguh membela kepentingan Rakjat. Pekerdjaan mereka dalam Dewan² Perwakilan harus membawa suara dari gerakan massa Rakjat dan membela serta mempopulerkan politik Partai.

Anggota² Fraksi Partai dalam Dewan² Perwakilan harus memelihara hubungan² jang erat dengan massa pemilih, setjara teratur memberikan laporan kepada massa pemilih tentang aktivitet dan pekerdjaannja dalam Dewan Perwakilan dan senantiasa berusaha mendapatkan saran² dan nasehat dari massa pemilih.

Anggota² Fraksi Partai dalam Dewan² Perwakilan harus mendjaga namabaik dirinja masing² jang berarti mendjaga namabaik Partai, tetap hidup setjara sederhana, tetap bersikap rendah hati dalam hubungan dengan Rakjat dan tetap menempatkan Partai

diatas dirinja sendiri.

Pimpinan Fraksi Partai dalam Dewan² Perwakilan ditentukan oleh Komite yang memimpinnja berdasarkan pertimbangan² yang diajukan oleh Fraksi yang bersangkutan.

Fasal 58. Keanggotaan Fraksi ditentukan oleh Komite Partai yang memimpinnja. Fraksi Partai mempunyai Sekretaris. Fraksi Partai yang mempunyai lebih dari 10 anggota membentuk Komite Kerdja, Sekretaris dan anggota² Komite Kerdja lainnja ditentukan oleh Komite Partai yang memimpinnja berdasarkan pertimbangan² yang diajukan oleh Fraksi yang bersangkutan.

Kedudukan dan hak² Fraksi Partai da'am Kongres Nasional dan Konferensi Partai ditentukan oleh Komite Partai yang memimpinnja.

Fasal 59. Dalam segala soal Fraksi Partai harus tunduk kepada Komite Partai yang memimpinnja.

Bab VIII

Badan Kontrol Partai

Fasal 60. CC, CDB, CP, CK dan CS dalam Sidang Plenonja masing² membentuk Komisi Kontrol.

Kongres Nasional dan Konferensi² Daerah memilih Komisi Verifikasi.

Susunan Komisi Kontrol bawahan harus disahkan oleh Komite Partai yang langsung diatasnja.

Fasal 61. Kewajiban Komisi Kontrol ialah : setjara teratur memeriksa dan mengurus perkara² pelanggaran anggota² terhadap Konstitusi Partai, disiplin Partai dan moral Komunis; menjatuhkan atau mentjabut tindakan disiplin atas anggota Partai; dan mengurus pengaduan dan permintaan banding anggota Partai.

Fasal 62. Komisi Kontrol dari semua tingkat menjalankan pekerdjaan dibawah pimpinan Komite² Partai yang setingkat.

Komisi Kontrol yang lebih tinggi berhak memeriksa pekerdjaan Komisi Kontrol bawahan dan mensahkan atau merobah putusan-putusannja.

Komisi Kontrol bawahan harus melaporkan pekerdjaan kepada Komisi Kontrol yang lebih tinggi, dan memberikan laporan yang teliti dan tepat tentang pelanggaran² anggota terhadap disiplin Partai.

Fasal 63. Kewajiban Komisi Verifikasi ialah : mengontrol administrasi Partai, pembukuan dan penggunaan Keuangan Partai, inventaris Partai dan usaha² produktif Partai.

Bab IX

Keuangan Partai

Fasal 64. Partai dibelandjai oleh uang pangkal dan iuran anggota, oleh usaha² produktif Partai, dan oleh sokongan² yang tidak mengikat.

Fasal 65. Seseorang yang mau masuk Partai berkewajiban membayar uang pangkal sebanyak uang iuran.

Uang iuran dibayar tiap² bulan dan ditetapkan sekurang-kurangnya sbb. :

Penghasilan kotor :

	sampai Rp. 250,—	Djumlah iuran	Rp. 0,50
Rp. 251,—	sampai „ 500,—	Djumlah iuran	„ 1,—
„ 501,—	sampai „ 750,—	Djumlah iuran	„ 2,50
„ 751,—	sampai „ 1000,—	Djumlah iuran	„ 5,—
„ 1001,—	keatas se-kurang ² nja 1% dari penghasilan kotor, dibulatkan keatas dengan	„	0,50.

Fasal 66. Anggota Partai yang mendapat kedudukan berpenghasilan atas nama Partai menjerahkan semua penghasilannja kepada Partai dan ia mendapat honorarium menurut peraturan² yang ditentukan oleh Partai.

Fasal 67. CDB atau CP mendapat 90% dari pendapatan uang pangkal, iuran dan pendapatan² lainnja setiap bulannja untuk Kas CDB atau CP, CK, CS, CSS dan CR. Keperluan keuangan untuk CK, CS, CSS dan CR diatur oleh CDB atau CP.

Sisa yang 10% dikirim ke CC.

Bab X

Hubungan Partai Dengan Pemuda Rakjat

Fasal 68. Pemuda Rakjat dalam Kongresnja yang ke-V telah menjatakan sebagai pembantu yang setia dan tepertjaja daripada Partai Komunis Indonesia. Pimpinan Pusat Pemuda Rakjat menerima pimpinan CC PKI.

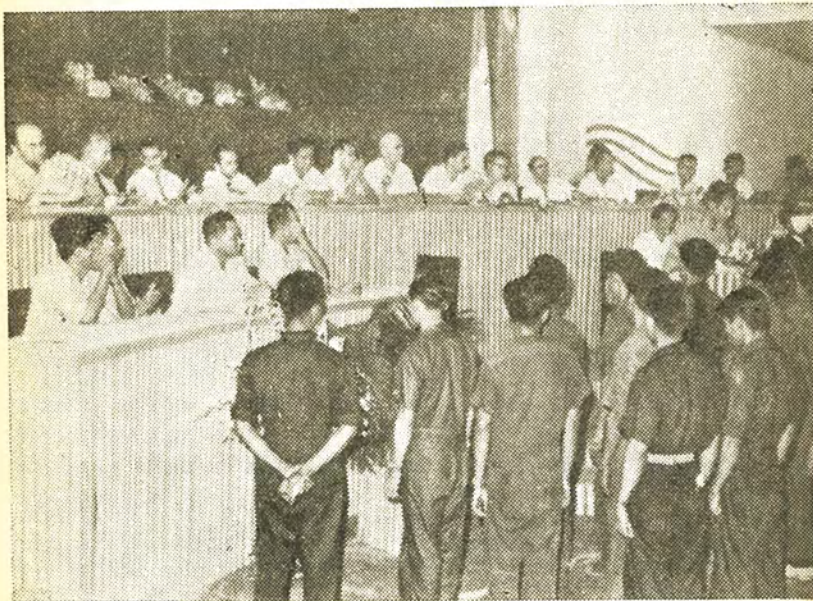
Organisasi² Pemuda Rakjat harus memberikan bantuan yang efektif dalam melaksanakan politik dan putusan² Partai, serta mengadakan saran² kepada Komite Partai yang setingkat.

Fasal 69. Organisasi² Partai dari semua tingkat harus memberikan perhatian yang besar kepada pekerdjaan Pemuda Rakjat dilapangan ideologi dan organisasi, memberikan bimbingan kepada Pemuda Rakjat dalam pendidikan teori Marxis-Leninis untuk para anggotanja, dan mendjaga supaya terdjamin hubungan yang erat antara Pemuda Rakjat dengan massa pemuda yang luas.

Bab XI

Organisasi Partai Dalam Keadaan Luarbiasa

Fasal 70. Djika Partai tidak dimungkinkan oleh keadaan untuk melakukan fungsinya setjara biasa, maka bentuk² organisasi dan tjarakerdja Partai ditentukan oleh CC.



RESOLUSI

PENSAHAN PERUBAHAN PROGRAM PKI

Kongres Nasional ke-VI PKI, jang dilangsungkan di Djakarta pada tanggal 7 sampai dengan 14 September 1959, setelah mendengar pidato pengantar tentang perubahan Program PKI jang disampaikan oleh Kawan Njoto, mensahkan dengan suara bulat perubahan Program PKI.

Kongres berkejakinan bahwa Program jang telah lebih dilengkapkan dan lebih tepat dirumuskan berdasarkan pengalaman² kaja massa Rakjat Indonesia, jang disimpulkan setjara ilmiah dengan menggunakan teori Marxisme-Leninisme setjara kreatif, akan mendjadi milik Rakjat diseluruh negeri, dan dengan PKI didepan akan dapat diwujudkan Indonesia jang merdeka penuh dan demokratis.

Kongres menginstruksikan kepada Partai untuk mendjelaskan Program Partai kepada Rakjat Indonesia dan mendjadikan pedoman praktis dalam perdjjuangan dibidang apapun sehingga Program Partai benar² mendjadi Program Rakjat Indonesia.



PROGRAM PKI

I

Indonesia Sekarang Adalah Negeri Jang Belum Merdeka Penuh Dan Masih Setengah-feodal

Revolusi Agustus 1945 menggariskan tugas² pembebasan nasional dan perubahan² demokratis bagi Rakjat Indonesia. Tetapi tugas² ini belum lagi terlaksana. Hasrat Rakjat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan nasional jang penuh, untuk kebebasan² demokratis dan untuk memperbaiki penghidupannya masih belum terpenuhi.

Selama revolusi Rakjat 1945-1948 massa Rakjat Indonesia telah melakukan tindakan² anti-imperialis seperti mendjadikan perusahaan² penting milik asing sebagai „milik Republik Indonesia”,

menghapuskan pemerintahan perseorangan dan membentuk dewan² yang bernama „Komite Nasional Indonesia”, membentuk badan² keamanan Rakjat sampai ke-desa², mem-bagi²kan di beberapa daerah tanah² perkebunan asing kepada kaum tani, dsb.

Hanya sesudah persetudjuan KMB yang chianat, yang didahului oleh provokasi² terhadap kaum Komunis, ditandatangani oleh pemerintah Hatta dan pemerintah imperialis Belanda pada tanggal 2 November 1949, Revolusi Agustus dirintangi kelandjutannya. Beberapa hasil revolusi dihapuskan oleh pemerintah reaksioner Indonesia. Dilapangan ekonomi, politik, militer dan kebudayaan, imperialis Belanda mendapatkan konsesi² yang demikian mengenakan, sehingga „masa KMB” merupakan salahsatu masa yang gelap dan sangat memalukan bagi bangsa Indonesia.

Tidak kurang dari 7 tahun lamanja Rakjat Indonesia berdjuaug untuk membatalkan persetudjuan KMB. Sekalipun pada mulanja PKI boleh dikatakan sendiri sadja memperdjuaugkan tudjuan ini, tetapi kian hati kian banyak partai, golongan maupun perseorangan yang ikutserta. Perdjuaugan untuk pembatalan persetudjuan KMB mendjadi perdjuaugan nasional yang memobilisasi semua tenaga melawan kolonialisme Belanda dengan mendapat sokongan dari Rakjat pekerdja sedunia. Achirnja menanglah tuntutan Rakjat, dan Pemerintah harus membatalkan persetudjuan KMB setjara sepihak.

Sebelum persetudjuan KMB dibatalkan, Rakjat Indonesia telah berhasil mengusir MMB, membubarkan Uni Indonesia-Belanda, membubarkan „Sticusa”, membatalkan „hutang Indonesia” kepada Belanda dan menjingkirkan kontrol pemerintah Belanda atas politik luarnegeri dan perdagangan luarnegeri Indonesia. Sesudah persetudjuan KMB dibatalkan, aksi² pembebasan Irian Barat mengalami gelombang pasang, dan sebagai akibatnja, kantor² perwakilan Belanda diberbagai kota di Indonesia ditutup, pegawai² kolonial dan orang² Belanda yang dapat merugikan kepentingan Indonesia dikeluarkan dari Indonesia, dan perusahaan² kepunjaan kaum kapitalis kolonial Belanda diambilalih, kemudian dinasionalisasi.

Langkah² ini sangat penting dalam Rakjat Indonesia menudju kekemerdekaan nasional yang penuh. Sungguhpun demikian, Irian Barat, jaitu 20% dari wilayah Republik Indonesia masih sadja diduduki oleh kaum kolonialis Belanda, dilapangan perminjakan jaitu BPM, Anglo-Dutch Shell, belum diganggugugat samasekali, perdagangan luarnegeri RI masih banyak tergantung pada saluran² kapitalis² Belanda, kapalselam² dan kapalterbang² Belanda melanggari wilayah Indonesia, gerombolan² bersendjata masih terus

dibeajai dan didalangi oleh kolonialisme Belanda, kakitangan² mereka masih banyak yang menduduki fungsi² penting didalam Republik, dan bahkan dilapangan pendidikan dan kebudayaan kolonialisme Belanda masih punja pengaruh. Semuanja ini menetapkan bahwa imperialisme Belanda masih tetap merupakan musuh pertama Rakjat Indonesia.

Disamping itu, imperialisme Amerika Serikat makin lama makin mendesak kedudukan imperialisme Belanda dan makin mendapat kedudukan dilapangan ekonomi, politik dan kebudayaan di Indonesia. Imperialisme Amerika ini membantu kaum imperialis Belanda di Irian Barat dengan sendjata² dan perlengkapan² lain sesuai dengan tudjuan pakt agresif SEATO, dan di-daerah² Republik lainnja imperialisme Amerika membantu kaum pemberontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta” djuga dengan sendjata² dan perlengkapan² lain, malahan dengan instruktur², penerbang² dan tenaga² spesialis lainnja. Semuanja ini menundjukan bahwa imperialisme Amerika merupakan musuh Rakjat Indonesia yang paling berbahaya.

Diterimanya Undang² Penanaman Modal Asing oleh Parlemen, sekalipun ditentang keras oleh PKI, berarti dibukanya pintu Indonesia untuk masuknja dan diperkuatnja pengaruh politik dan ekonomi negara² imperialis.

Sisa² feodalisme di-desa², baik dalam bentuk monopoli tanah oleh tuantanah, dalam bentuk sewatanah yang berwujud barang dan kerdja, maupun dalam bentuk hutang² yang menempatkan kaum tani dalam kedudukan budak terhadap kaum lintahdarat dan tuantanah, masih terus berlaku.

Semua ini membuktikan, bahwa Indonesia belum merdeka penuh dan belum demokratis, dan ini berarti bahwa pada hakekatnja Indonesia masih negeri setengah-djadjahan dan setengah-feodal.

Sekalipun telah banyak dicitarakan oleh golongan yang berkuasa tentang rentjana untuk pembangunan, industrialisasi dan kessedjahteraan ekonomi negeri, tetapi sesungguhnya, negeri kita ada dalam tjengkeraman krisis ekonomi yang terusmenerus dan sudah dekat pada keruntuhanja. Krisis di Amerika Serikat lebih memperhebat krisis ekonomi ini.

Walaupun tanah kita subur, tetapi dinegeri kita tidak tjukup makanan untuk memenuhi kebutuhan minimum Rakjat. Rakjat hidup dalam keadaan setengah kelaparan. Nilai uang Indonesia makin merosot dan harga barang² meningkat. Sebagai akibat persaingan dari pihak Belanda, Amerika dan kemudian Djepang, industri² dan perusahaan² dagang nasional yang sedikit djumlah-

nja itu hantjur dan gulungtikar. Ketjuali sedjumlah ketjil tuan² feodal, komprador² dan pedjabat² tinggi sivil maupun militer jang korup, bagian terbesar Rakjat Indonesia hidup melarat.

Upah buruh adalah rendah dan upah riil senantiasa merosot. Pemetjatan² berdjalan terus dan djumlah penganggur semakin bertambah besar. Hak² kebebasan demokratis, sekalipun didjamin didalam Undang² Dasar, kenjataannja banjak kekangan²nja. Kesempatan kerdja djuga bertambah sempit, karena ekonomi sektor negara dan ekonomi sektor partikelir nasional, mengalami kemunduran.

Kedudukan kaum tani tidak lebih baik daripada diwaktu jang lampau. Kaum tani masih menderita kekurangan tanahgarapan atau samasekali tidak punja tanah. Berbagai bentuk penghisapan feodal masih berlaku hingga sekarang. Bagian jang sangat terbesar dari kaum tani ditindas oleh penghisapan tuantanah, lintah-darat dan oleh padjak² jang berat. Pengusiran² terhadap kaum tani dari tanahgarapannja belum samasekali lenjap. Kaum pendjadjah asing dan sebagian tuantanah Indonesia masih terus mengorganisasi gerombolan² teroris, terutama DI-TII dan „PRRI-Permesta”, jang membakar desa² dan membunuh kaum tani. Beribu² kaum tani terpaksa mengungsi ke-kota², dimana mereka mengalami hidup jang tjelaka.

Kaum miskin kota, jang djumlahnja selalu bertambah, hidupnya dari hari kesehari bertambah buruk, sehingga merupakan problem jang serius. Penghidupan jang berat membikin sebagian dari mereka mudah tertarik pada perbuatan² jang ekstrim, sehingga mereka merupakan tjadangan tenaga bagi kaum petualang, pematah pemogokan, dsb.

Kaum buruhnelajan masih menderita hubungan kerdja jang bersifat feodal, sedangkan kaum nelajansedang dan lebih² kaum nelajanmiskin kekurangan alat² kerdja.

Kaum inteligensia, termasuk pekerdja² ilmu dan kebudajaan tidak mempunyai haridepan jang baik. Kurangnja alat² dan sukar-nja sjarat² kerdja tidak memungkinkan hasil pekerdjaan jang baik dilapangan ilmu dan kebudajaan.

Pemerintah sedikit sekali membela kepentingan industri dan perdagangan nasional jang masih lemah itu. Burdjuasi nasional tidak hanya sukar sekali meluaskan usaha²nja dan mendirikan perusahaan² industri jang baru; mereka djuga tidak mampu mempertahankan kedudukannja jang sekarang.

Demikianlah gambaran Indonesia sekarang jang belum merdeka penuh dan jang masih setengah-feodal.

II

Perlunja Mentjapai Kemerdekaan Nasional Jang Penuh dan Perubahan² Demokratis

Selama keadaan di Indonesia masih tidak berubah, artinja, selama imperialisme masih mempunyai kekuasaannja dan sisa² feodalisme belum dihapuskan, Rakjat Indonesia takkan mungkin membebaskan diri dari keadaan melarat, terbelakang, pintjang dan takberdaja dalam menghadapi imperialisme. Kekuasaan imperialisme dan sisa² feodalisme tidak akan hapus di Indonesia selama tuantanah dan kaum komprador jang berhubungan erat dengan kapital asing tidak dibersihkan dari kekuasaan Republik Indonesia.

Djika Indonesia mau madju dari suatu negeri setengah-djadjahan dan setengah-feodal mendjadi negeri merdeka, demokratis, makmur dan madju, maka adalah soal jang pokok, diatas se-gala²nja, menjelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja, dengan mendirikan suatu Pemerintah jang dibangun atas demokrasi jang ditudjukan untuk semua golongan Rakjat dan demokrasi jang mengenai semua lapangan dibawah pimpinan klas buruh, suatu Pemerintah Rakjat, pemerintah demokrasi tipe baru, pemerintah Demokrasi Rakjat.

Ini akan merupakan pelaksanaan setjara konsekwen dari apa jang dikatakan Presiden Sukarno „negara 'semua buat semua'” atau „demokrasi jang mampu mendatangkan kesedjahteraan sosial”.

Guna melaksanakan tuntutan² Revolusi Agustus sampai keakar-akarnja, artinja, guna memusnahkan samasekali kekuasaan kaum imperialis asing dan kaum tuantanah, guna membangun Indonesia baru jang merdeka dilapangan politik, ekonomi dan kebudajaan, guna membangun Indonesia jang demokratis, bersatu dan makmur, PKI mengajukan suatu *Program Umum* jang sesuai dengan pendirian² bagian terbesar Rakjat Indonesia.

P e r t a m a :

Sistim negara Indonesia tidak seharusnya sistim negara anti-Rakjat jang dikuasai oleh tuantanah² dan komprador, melainkan harus sistim negara Rakjat jang sumber kekuasaannja ada pada Rakjat, jaitu negara Demokrasi Rakjat, negara dari Rakjat, oleh Rakjat dan untuk Rakjat. Hanya negara jang demikian inilah jang sesuai dengan watak Revolusi Agustus 1945. Pemerintah Demokrasi Rakjat akan merupakan suatu pemerintah jang samasekali baru djika dibandingkan dengan semua pemerintah jang ada se-

belumnya. Ia akan merupakan suatu pemerintah yang mendasarkan dirinya atas massa. Ia akan merupakan suatu pemerintah yang tujuannya ialah kemerdekaan nasional yang penuh. Ia akan merupakan suatu pemerintah front persatuan nasional, yang dibentuk atas dasar persekutuan kaum buruh dan kaum tani dibawah pimpinan kelas buruh. Mengingat terbelakangnya ekonomi negeri kita, PKI berpendapat bahwa pemerintah ini harus tidak merupakan pemerintah diktatur proletariat melainkan pemerintah diktatur Rakjat. Pemerintah ini bukannya harus melaksanakan perubahan² sosialis melainkan perubahan² demokratis. Ia akan merupakan suatu pemerintah yang mampu mempersatukan semua tenaga anti-feodal dan anti-imperialis, yang mampu memberikan tanah dengan tuma² kepada kaum tani, yang mampu menjamin hak² demokrasi bagi Rakjat; suatu pemerintah yang mampu membela industri dan perdagangan nasional, yang mampu meninggikan tingkathidup materiil kaum buruh dan menghapuskan pengangguran, yang mampu memberantas butahuruf dan yang mampu melakukan revolusi kebudayaan dikalangan Rakjat. Dengan singkat, ia akan merupakan suatu pemerintah Rakjat yang mampu menjamin kemerdekaan nasional serta perkembangannya melalui jalan demokrasi dan kemandjauan.

K e d u a :

Demokrasi Indonesia tidak seharusnya demokrasi model Barat, demokrasi liberal, demokrasi lama, melainkan harus demokrasi untuk semua golongan Rakjat, laki² dan wanita, dan mengenai semua lapangan politik, ekonomi dan kebudayaan. Demokrasi ini adalah demokrasi tipe baru, demokrasi Rakjat. Demokrasi Rakjat adalah sekaligus mungkin dan perlu. Demokrasi Rakjat adalah mungkin, karena disatu pihak burdjuasi nasional sangat lemah kedudukannya dilapangan ekonomi dan tidak kuat kedudukannya dilapangan politik, sedangkan dipihak lain proletariat Indonesia telah terbukti mempunyai kesadaran kelas yang tinggi, mempunyai kemampuan yang tak bisa diabaikan dilapangan politik, dan sanggup memberi pimpinan kepada massa luas kaum tani, burdjuasi ketjil kota, kaum intelektual revolusioner dan elemen² demokratis lainnya. Demokrasi Rakjat adalah perlu, karena hanya demokrasi matjam inilah yang akan mendapat dukungan penuh dari ber-djuta² kaum buruh, ber-puluh² djuta kaum tani serta burdjuasi ketjil kota, kaum intelektual, burdjuasi nasional, kaum ningrat (bangsawan) yang madju dan elemen² patriotik umumnya.

K e t i g a :

Politik pemerintah Rakjat, jaitu penghapusan kekuasaan kaum imperialis disegala lapangan dan penghapusan penindasan feodal tidak seharusnya berarti digantikannya kekuasaan itu oleh kekuasaan burdjuasi dalam negeri atas Rakjat banjak, melainkan harus digantikan oleh kekuasaan bersama diantara semua kelas yang anti-imperialis dan anti-feodal, jaitu sistim politik front persatuan. Dengan demikian bisa dihilangkan ketidakadilan, bahwa ber-djuta² kaum buruh dan ber-puluh² djuta kaum tani tidak turut menentukan haluan politik pemerintah, djuga bahwa ber-djuta² kaum burdjuis ketjil kota, kaum intelektual dan kaum burdjuis nasional yang anti-imperialis dan anti-feodal tidak turut menentukan haluan pemerintah. Dengan ikutsertanya Rakjat banjak ini dalam tampuk pimpinan negara, maka terdjamilah setjara sungguh² kekebalan perseorangan dan tempattinggal, kemerdekaan beragama, kemerdekaan berkejakinan, berbitjara, pers, berserikat, berkumpul, hak demonstrasi, hak mogok dan mendirikan serikatburuh, kemerdekaan bergerak dan memilih pekerdjaan, serta hak semua warganegara atas upah sama untuk pekerdjaan yang sama. Negara adalah badan keduniaan. Badan² keagamaan dipisahkan dari negara.

K e e m p a t :

Struktur pemerintah Rakjat tidak seharusnya struktur demokrasi begitu sadja, djuga tidak seharusnya struktur yang memusat sadja, melainkan harus struktur demokrasi yang memusat. Ini berarti bahwa disatu pihak kekuasaan tertinggi untuk daerah² ada pada DPRD² dan dipihak lain ada pemerintah sentral yang kuat, yang mengurus urusan² umum, dan yang tunduk pada DPR pilihan Rakjat. Kekuasaan daerah harus memperkuat kekuasaan pusat dan kekuasaan pusat harus membantu perkembangan demokrasi, ekonomi dan kebudayaan daerah. Dengan demikian Republik Proklamasi dipertahankan setjara teguh dalam wujud Republik Kesatuan dengan pemerintah daerah yang demokratis dan otonomi suku-bangsa yang luas. Kekuasaan tertinggi harus ada ditangan wakil² yang dipilih oleh Rakjat, yang saban waktu bisa ditarik kembali atas putusan bagian terbesar daripada pemilihnya.

K e l i m a :

Tentara dan kekuatan bersendjata lainnya tidak seharusnya mendjadi alat untuk menindas Rakjat, melainkan harus mendjadi

pengabdian Rakyat. Ini sesuai dengan tradisi Angkatan Perang Republik Indonesia yang bersemangat Revolusi Agustus 1945, yang selama peperangan kemerdekaan melawan tentara kolonial Belanda dan selama pertempuran menumpas pemberontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta” maupun menumpas gerombolan² DI-TII senantiasa sehidup-semati dengan Rakyat. Sudah sewadjar² bahwa perwira², bintang², dan tamtama² APRI tetap setia pada tjita² Revolusi Agustus dan berdjua²ng untuk pelaksanaan tuntutan² Revolusi Agustus itu.

K e e n a m :

Ekonomi Indonesia, disamping mengutamakan ekonomi sektor negara sebagai sektor yang memimpin, tidak seharusnya menentang industri dan perdagangan yang diselenggarakan oleh kaum kapitalis nasional, melainkan harus dengan konsekwen menentang ekonomi kaum imperialis dan feodal. Ekonomi kaum kapitalis nasional justru harus dikembangkan, dan untuk ini sjarat²nya adalah dihapuskan² sistem ekonomi imperialis dan feodal. Proteksi dan fasilitas harus diberikan kepada kapitalis² nasional, terutama industrialis² nasional, untuk berkembang dalam batas² yang tak dapat menguasai kehidupan Rakyat dan negara, dan disamping itu ekonomi individu² Rakyat pekerdja harus dibantu.

K e t u d j u h :

Hubungan agraria dan pertanian tidak seharusnya bersifat imperialis dan feodal, melainkan harus bersifat merdeka dan demokratis. Oleh sebab itu semua tanah yang dimiliki oleh tuantanah² asing maupun tuantanah² Indonesia harus disita tanpa penggantian kerugian. Kepada kaum tani, per-tama² kepada kaum tani tak bertanah dan kaum tanimiskin, diberikan dan dibagikan tanah dengan tjuma². Tanah² harus dibagikan kepada anggota keluarga kaum tani seorang². Sistem milik tanah haruslah sistem milik tanah kaum tani, artinya milik perseorangan kaum tani atas tanah. Perkebunan² yang berteknik modern, juga tanah² hutan, tidak dibagikan kepada kaum tani melainkan harus dikuasai oleh negara. Tanah dan milik lain dari kaum tanikaja tidak disita. Tanah dan milik lain dari kaum tanisedang dilindungi oleh pemerintah. Sistem rodi, pologoro dan perbudakan feodal lainnya dihapuskan. Hutang kaum tani, nelajan dan tukang² keradjinan tangan kepada lintah-darat juga dihapuskan. Kredit yang pandjang, mudah dan murah diberikan kepada kaum tani, nelajan dan tukang² keradjinan

tangan. Kaum tani dibantu dalam memperbaiki sistem irigasi yang lama dan membikin yang baru. Mengingat bahwa diberbagai pulau terdapat tanah² luas yang baik untuk dikerdjakan tetapi belum dibuka karena kurangnya tenaga kerdja, maka dengan tenaga dan alat² pemerintah diselenggarakan pemindahan ber-angsur² dari sebagian penduduk pulau Djawa dan pulau² lainnya ke-pulau² tsb, dan kepada mereka ini diberikan tanah yang tjukup sebagai milik perseorangan, juga diberikan perlengkapan yang perlu untuk perumahan, perawatan kesehatan, kredit dan alatkerdja yang tjukup.

K e d e l a p a n :

Industri dan perburuhan tidak seharusnya bersifat kolonial, melainkan harus bersifat nasional. Industri nasional dikembangkan dan sjarat² untuk industrialisasi negeri disiapkan dengan menggunakan semua tenaga dan sumber negara. Upah minimum bagi buruh industri dan buruh perkebunan diatur, demikian pula gaji minimum bagi pegawai² pemerintah dan pegawai² kantor partikelir. Mengadakan kerdja 6 djam sehari untuk pekerdjaan tambang dibawah tanah dan industri² lain yang mengganggu kesehatan. Mengadakan liburan tahunan se-kurang²nya 14 hari dengan upah penuh. Mengadakan sistem djaminan sosial atas beaja negara dan kaum kapitalis dalam hal sakit, tjatjad, pengangguran dan hari tua. Melarang dilakukannya pekerdjaan oleh wanita² dan buruh muda dalam industri² yang mengganggu kesehatan, dan melarang kerdja anak². Melenjapkan penghisapan setengah-feodal atas kerdja, termasuk sistem kenek, sistem kontrak, dll. Mendjamin perkembangan bebas serikatburuh² dan hak mengadakan perdjandjian² kolektif. Mengadakan kontrol yang keras atas harga barang² dagangan.

K e s e m b i l a n :

Kebudayaan Indonesia tidak seharusnya kebudayaan kolonial, yang tidak ilmiah dan anti-kerakjatan, melainkan harus kebudayaan yang nasional, ilmiah dan kerakjatan. Kewadajiban beladjar yang tjuma² diadakan bagi anak lelaki maupun perempuan sampai umur 13 tahun. Pekerdjaan para sardjana dan seniman dibantu dan dikembangkan. Semua sukubangsa berhak memakai bahasa daerahnya di-sekolah², dipengadilan dan dimana saja, disamping menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Mengadakan sistem kesehatan Rakyat dengan pusat² peng-

obatan dan rumahsakit² jang luas, termasuk balai² kesehatan bagi wanita hamil dan anak². Mengambil tindakan² untuk memberantas dan melenjapkan sumber² malaria, kolera, disentri dan penjakit² menular lainnja.

Kesepuluh:

Politik luarnegeri Indonesia tidak seharusnya politik luarnegeri jang bertentangan dengan kemerdekaan, keutuhan wilajah dan perdamaian dunia, melainkan harus politik luarnegeri jang membela kemerdekaan, keutuhan wilajah dan perdamaian dunia. Memperjuangkan pembebasan Irian Barat sebagai wilajah jang sah dari Republik Indonesia, dan mengirim kembali tentara dan pegawai² kolonial Belanda dari Irian Barat. Mendjalankan setjara konsekwen politik bebas dan aktif jang anti-kolonialisme dan menudju perdamaian dunia jang abadi, jaitu politik perdamaian dan persahabatan dengan semua negeri jang tjinta-damai berdasarkan Dasasila Asia-Afrika. Melarang propaganda perang. Mendjalankan politik kerdjasama ekonomi, ilmu dan kebudayaan dengan semua negara atas dasar saling menguntungkan dan persamaan jang sepenuhnya.

Demikianlah *Program Umum* jang diadjuken PKI, jang benar² sesuai dengan tuntutan bagian terbesar Rakjat Indonesia.

III

Pembentukan Front Persatuan Nasional Atas Dasar Persekutuan Kaum Buruh Dan Kaum Tani

Pembentukan pemerintah Demokrasi Rakjat dan pelaksanaan program diatas oleh pemerintah ini berarti mendjamin mungkinnja mengachiri untuk se-lama²nja kekuasaan kaum imperialis, tuan-tanah dan burdjuasi komprador dinegeri kita, berarti mulainja zaman baru dalam sedjarah kemadjuan Rakjat kita.

Djalan apakah jang harus ditempuh oleh Rakjat Indonesia? Bentuk² perdjjuangan apakah jang harus diambil oleh Rakjat Indonesia?

Tiap² bangsa akan melalui djalannja sendiri menudju ke Sosialisme berdasarkan perkembangan daripada keadaan nasionalnja, daripada keadaan politik, ekonomi dan kebudayaan. Klas buruh bisa memenuhi kewadajiban sedjarahnja dalam negara jang demokratis, dimana Parlemen dan badan² lainnja diperbaharui, artinja diberi isi jang benar² demokratis serta disusun sesuai dengan ke-

inginan Rakjat.

Singkatnja, dapatkah ditjapai Demokrasi Rakjat di Indonesia melalui djalan damai, djalan parlementer?

Ini adalah suatu kemungkinan dan kemungkinan jang dengan sekuat tenaga harus kita djadikan kenjataan. Memang kalau tergantung kepada kaum Komunis, bentuk jang se-baik²nja, bentuk jang ideal dari peralihan kesistim kekuasaan Rakjat jang demokratis, jaitu tingkat persiapan kesistim sosialis, jalah bentuk jang damai, bentuk jang parlementer. Djika tergantung pada kaum Komunis, djalan damai lah jang dipilih.

Tetapi apakah kaum imperialis, tuan² feodal dan tuan² komprador akan membiarkan hapusnja kekuasaan kolonial dan penghisapan feodal mereka serta peralihan kesistim kekuasaan Rakjat setjara damai, setjara parlementer? Ini tidak tergantung pada kaum Komunis; ini tergantung pada kaum imperialis, tuan² feodal dan tuan² komprador. Pengalaman membuktikan, bahwa mereka tidak akan membiarkan peralihan kekuasaan setjara damai itu, djika imbalanced kekuatan menguntungkan mereka. Hanya djika imbalanced kekuatan tidak menguntungkan mereka, maka mereka, sekalipun berkepentingan dan ingin, tetapi tidak mampu merintang² peralihan setjara damai itu.

Oleh sebab itu, diatas se-gala²nja kaum Komunis harus waspada, harus senantiasa mempersiapkan diri dan mempersiapkan Rakjat disegala lapangan agar kaum reaksioner tidak bisa menghalangi keinginan Rakjat untuk mentjapai perubahan² sosial jang fundamental setjara damai, setjara parlementer. Tindakan se-wenang² kaum reaksioner terhadap Rakjat dan Partai Komunis hanya dapat dipatahkan dengan kekuatan Rakjat jang lebih besar daripada kekuatan kaum reaksioner dan dengan pimpinan jang teguh dari Partai Komunis jang bersatu dengan partai² demokratis lainnja.

Djadi, djalankeluar terletak dalam mengubah imbalanced kekuatan antara kaum imperialis, klas tuantanah dan burdjuasi komprador disatu pihak, dan kekuatan Rakjat dipihak lain. Djalankeluar terletak dalam membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa, terutama kaum buruh dan kaum tani.

Klas buruh harus memelopori perdjjuangan seluruh Rakjat. Untuk tudjuan ini klas buruh sendiri harus meningkatkan aktivitetnja, mendidik dirinja sendiri dan mendjadi kekuatan jang besar dan sadar. Klas buruh tidak hanya harus melakukan perdjjuangan untuk memperbaiki tingkathidupnja, ia djuga harus meningkatkan tugas²nja ketingkatan jang lebih luas dan lebih tinggi. Ia harus membantu perdjjuangan klas² lainnja. Klas buruh harus membantu

perjuangan kaum tani untuk tanah, perjuangan kaum inteligensia untuk hak²nja yang pokok, perjuangan burdjuasi nasional melawan persaingan asing, perjuangan seluruh Rakjat Indonesia untuk kemerdekaan nasional dan kebebasan² demokratis. Rakjat bisa mentjapai kemenangan hanya apabila klas buruh Indonesia sudah merupakan kekuatan yang bebas, sadar, matang dalam politik, terorganisasi dan mampu memimpin perjuangan seluruh Rakjat, hanya apabila Rakjat sudah melihat klas buruh sebagai pemimpinnja.

Tetapi tidak tjukup hanya dengan mempertinggi kesedaran dan organisasi klas buruh sadja; masih ada kaum tani yang harus dibangkitkan dan diorganisasi. Dengan tidak turut aktifnja kaum tani, yang merupakan 60% sampai 70% penduduk, tidak mungkin kita berbitjara tentang kemenangan Rakjat. Inilah sebabnja mengapa klas buruh harus membantu perjuangan kaum tani.

Persekutuan buruh dan tani merupakan dasar perjuangan Rakjat, ia merupakan batupertama yang harus didjadikan dasar bagi perjuangan seluruh Rakjat melawan musuh² asing. Pembentukan persekutuan buruh dan tani, persekutuan pedjuang² yang sadar, aktif dan terorganisasi, — disinilah letaknja djaminan bagi kemenangan Rakjat.

Kaum inteligensia, burdjuasi ketjil dan burdjuasi nasional seharusnya memasuki perjuangan Rakjat untuk kemerdekaan nasional dan kebebasan demokratis. Kaum inteligensia berkepentingan dalam pembentukan suatu Republik Indonesia yang merdeka dan demokratis dengan kebudayaan yang madju. Burdjuasi ketjil — tukang² keradjinan tangan, pedagang² dan pengusaha² pertukangan ketjil — akan membantu perjuangan bersama dari Rakjat, karena kepentingan mereka djuga terdesak didalam Indonesia yang belum merdeka penuh dan masih setengah-feodal.

Djuga burdjuasi nasional seharusnya turut ambil bagian dalam perjuangan untuk pembebasan nasional, tetapi tidak demikian halnya dengan burdjuasi komprador yang dengan seribusatu djalan berhubungan dengan kaum imperialis dan yang kepentingannya terdjalin dengan kepentingan kaum pendjadjah. Burdjuasi nasional, terutama kaum industrialis nasional, menginginkan berachirnja persaingan asing, menginginkan perkembangan industri dan perdagangan nasional.

Djadi, klas buruh, kaum tani, burdjuasi ketjil dan burdjuasi nasional, harus bersatu didalam satu front nasional.

Persekutuan klas buruh dan kaum tani harus mendjadi dasar dari front persatuan nasional ini.

Klas buruh harus mendjadi pemimpin front persatuan nasional.

Hanya suatu front persatuan nasional yang dibentuk atas dasar persekutuan buruh dan tani, dipimpin oleh klas buruh, dan terbentuk sebagai hasil gerakan Rakjat yang se-luas²nja dan perdjungan revolusioner daripada massa, akan memungkinkan Rakjat Indonesia mendirikan suatu pemerintah Demokrasi Rakjat yang akan mendjalankan program Demokrasi Rakjat dan memimpin Rakjat menudju kemenangan.

IV

Program Tuntutan PKI

PKI bertudjuan mempersatukan Rakjat Indonesia kedalam satu front nasional dan sebagai hasil perjuangan revolusioner dari ber-djuta² massa mentjiptakan pemerintah Demokrasi Rakjat. PKI tidak memandang pekerdjaan dalam Parlemen sebagai pekerdjaan terpokok dan tidak pula menganggapnja sebagai satu²nja bentuk perdjungan. Tetapi ini tidak berarti, bahwa PKI mengabaikan pemilihan² dan perdjungan parlementer, djuga tidak berarti bahwa PKI mengambil sikap yang satu dan sama terhadap pemerintah² yang akan ada dikemudian hari sampai terbentuknja pemerintah Demokrasi Rakjat. Samasekali tidak.

PKI mendasarkan politiknja atas analisa Marxis mengenai keadaan yang kongkrit dan perimbangan kekuatan. PKI telah ambil-bagian dan akan terus ambilbagian yang paling aktif dalam pemilihan² dan perdjungan parlementer. PKI, sadar sepenuhnya akan tanggungdjawab politiknja, mendjalankan pekerdjaan parlementer dengan penuh ke-sungguh²an. PKI bukannya tidak mem-beda²kan sikap terhadap tiap² pemerintah. Dalam keadaan² tertentu Partai beroposisi terhadap pemerintah dan berseru kepada massa untuk menggulingkannya, dalam keadaan² lain Partai menjokong pemerintah dan dalam keadaan² yang lain lagi turut dalam pemerintah.

Sokongan yang diberikan PKI kepada Konsepsi Presiden Sukarno, yang djika didjalankan akan berarti terbentuknja pemerintah gotongrojong atau pemerintah koalisi nasional, dituntun oleh pendirian yang tidak menjamakan setiap pemerintah sebelum terbentuknja Demokrasi Rakjat itu.

Apakah tuntutan² minimum, tuntutan² yang paling mendesak dari Rakjat Indonesia dewasa ini?

Berdasarkan Program Umum PKI, dan sesuai dengan perimbangan kekuatan serta sesuai dengan keadaan yang berlaku sekarang, maka PKI mengadakan Program Tuntutan yang men-tjerminkan tuntutan² yang paling mendesak dan yang objektif dari

Rakjat Indonesia sekarang.

PKI berpendapat, bahwa Program Tuntutan ini yang paling baik dilaksanakan oleh suatu pemerintah gotongrojong. Tetapi sekalipun pemerintah belum pemerintah gotongrojong, selama ia berpendirian anti-kolonial dan madju, ia mempunyai sjarat² untuk memenuhi tuntutan² mendesak Rakjat Indonesia ini. Hanja djika pemerintah mendjalankan program yang menguntungkan kepentingan nasional, yang demokratis dan madju, maka ia bisa mendapat sokongan yang kuat dari Rakjat.

Oleh sebab itu PKI mengajukan tuntutan² sebagai berikut :

Untuk Kemerdekaan Nasional

1. Perhebat lebih landjut perjuangan pembebasan Irian Barat dengan djalan menjusun kekuatan dalam negeri, menggalang semua potensi nasional, memodernisasi perlengkapan AD, ALRI dan AURI, dan menarik solidaritet internasional, untuk menghadapi segala kemungkinan.
2. Bantu Rakjat Indonesia yang berada di Irian Barat dalam mengorganisasi diri dan dalam semua bentuk perlawanannya terhadap pendudukan Belanda di Irian Barat.
3. Mobilisasi dan koordinasi seluruh kekuatan nasional untuk merebut kemerdekaan ekonomi yang lebih besar, dengan djalan a.l. menasionalisasi semua perusahaan Belanda, termasuk modal Belanda didalam perusahaan² tjampuran, a.l. BPM. Perlakukan perusahaan² AS sama dengan perusahaan² Belanda, djika AS terusmenerus mempersendjatai gerombolan² kontra-revolusioner atau membantu Belanda dengan sendjata dalam agresinya terhadap R.I.
4. Hantjurkan samasekali gerombolan pengatjau sisa² kaum pemberontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta“, gerombolan teroris DI-TII, gerombolan subversif KMT dan gerombolan² kakitangan imperialis lainnya dan amankan seluruh negeri dalam tempo yang se-singkat²nja.
5. Djatuhkan hukuman mati kepada orang² asing yang terang membantu pemberontak kontra-revolusioner dan djuga kepada orang² Indonesia yang mengepalai pemberontakan kontra-revolusioner dan yang memerintahkan pembunuhan² massal terhadap Rakjat dan pemimpin² Rakjat.
6. Djatuhkan hukuman yang berat kepada siapa sadja yang mengadakan gerakan² subversif dengan djalan melakukan sabotase² di-djawatan² pemerintah, dilapangan ekonomi atau di-lapangan² lain.

Untuk Hak² Demokrasi

7. Laksanakan UUD 1945 sesuai dengan djiwa, semangat dan watak Revolusi Agustus 1945 yang anti-imperialis dan demokratis.
8. Kalahkan politik anti-persatuan dan politik diktatur anti-Komunis dari siapa sadja, terutama dari sebagian pemimpin² Masjumi-PSI, dan bentuk pemerintah gotongrojong diantara partai² yang setudju Konsepsi Presiden.
9. Laksanakan dengan sungguh² otonomi daerah seperti yang ditetapkan didalam Undang² no. 1 tahun 1957, adakan perimbangan keuangan yang adil antara pusat dan daerah serta bantu perkembangan ekonomi daerah dan kebudayaan tiap² suku bangsa.
10. Hapuskan semua undang² dan peraturan² kolonial seperti „IGO“, „IGOB“, dll. dan demokratiskan pemerintah desa dengan djalan mengadakan pemilihan kepala desa setjara periodik dan membentuk otonomi daerah swatantra tingkat III.
11. Adakan tepat pada waktunya pemilihan umum yang demokratis, langsung, sama, bebas dan rahasia, baik untuk DPR maupun untuk DPRD².
12. Beri kebebasan demokratis yang se-luas²nja kepada Rakjat dan organisasi² Rakjat dan batalkan semua undang² dan peraturan² yang membatasi kebebasan gerakan patriotik. Djamin hak sama bagi semua warganegara, tanpa pandang asal keturunan, keyakinan politik dan kepertjajaan.
13. Djamin semua hak dan kebebasan kaum buruh dan pegawai negeri untuk membela kepentingan²nja yang sah dan batalkan semua undang² dan peraturan² yang bersifat melarang atau membatasi hak mogok kaum buruh dan pegawai negeri.
14. Djamin hak sama antara laki² dan wanita dalam hak memilih dan dipilih, hak memangku semua djabatan umum dan hak atas upah yang sama bagi pekerdjaan yang sama, djamin kedudukan yang sama bagi wanita dalam perkawinan, pertjeraan dan pembagian waris serta hak sama untuk mendapatkan pendidikan dan menuntut ilmu, dan djamin bagi wanita hak keringanan kerdja selama hamil dan hak perlop sebelum dan sesudah melahirkan.
15. Petjat dari djabatan² pemerintah pengchianat² bangsa, orang² reaksioner, penggelap² dan koruptor² dan supaja orang² ini dihukum, tidak perduli mereka itu orang² sivil atau militer, anggota partai pemerintah atau bukan.
16. Tempatkan pada djabatan² pemerintah orang² yang bersedia

mengabdikan dirinja kepada kepentingan Republik dan Rakjat Indonesia.

17. Adakan hubungan salingbantu jang baik antara dwitunggal Tentara dan Rakjat dan antara perwira dan anakbuah, pertahankan hakpilih dan hak² demokratis lainnja bagi pradjurit, singkirkan dari ketentaraan pengchianat² bangsa, koruptor² dan elemen² jang hendak merusak demokrasi parlementer dan mendirikan diktatur militer atau junta militer dinegeri kita.

Untuk Perbaikan Nasib

18. Pertiinggi upah riil kaum buruh dan pegawai negeri, perbaiki djaminan sosial dan sjarat² kerdja mereka. Berikan tundjangan kepada penganggur dan larang pemetjatan se-wenang².
19. Perbaiki keadaan kaum tani dengan mewadjabkan tuantanah² menurunkan sewatanah, sehingga kaum tani penjewa tanah menerima minimum 60% dan tuantanah menerima maximum 40% dari hasil panen, serta dengan mewadjabkan lintah-darat² mendaftarkan diri dan menurunkan bunga uang pindjaman, dengan meringankan padjak² negara dan dengan menghapuskan tunggakan padjak bumi.
20. Perbaiki nasib buruhtani dan lindungi hak kaum tani penjewa tanah, beri pindjaman jang mudah, langsung, pandjang dan berbunga rendah kepada petani² miskin dan bantu petani² mengorganisasi diri untuk mengembangkan produksi pertanian.
21. Hapuskan setoran² paksa kaum tani, hapuskan sistim pologoro dan rodi serta perbaiki nasib pamongdesa.
22. Sahkan milik kaum tani atas tanah jang dulunja milik perkebunan² asing tetapi jang sudah lama dikerdjakan oleh kaum tani, larang perampasan tanah² tersebut oleh pihak perkebunan, dan selesaikan sengketa² tanah dengan djalan berunding.
23. Berikan dan bagikan dengan tjuma² tanah² kosong jang tak dikerdjakan kepada kaum tani takbertanah dan tanimiskin. Batasi milik tanah tuantanah, beli tanah² kelebihan dari tuantanah dengan tjara dan harga jang ditentukan oleh pemerintah dan bagikan tanah² itu kepada kaum tani takbertanah dan tanimiskin.
24. Sita tanah dan milik lain dari kaum tuantanah jang memihak gerombolan pengatjau kontra-revolusioner dan gerombolan² teroris lainnja, dan bagikan tanah² itu kepada kaum tani takbertanah dan tanimiskin.
25. Djamin hak kaum tani dan organisasi² tani dalam menentu-

kan sewatanah kaum tani jang disewa untuk ditanami rosela, tebu, tembakau, dll.

26. Laksanakan dengan sungguh² nasionalisasi tanah² partikelir dengan harga dan tjara pembajaran jang ditentukan oleh pemerintah dan bagikan tanah² sawah dan ladang dari bekas² tanah partikelir itu kepada kaum tani takbertanah dan tanimiskin.
27. Adakan djaminan pasar, perlindungan, kredit, dan keringanan padjak bagi pengusaha² ketjil.
28. Tjegah pembongkaran se-wenang² terhadap rumah² Rakjat dan beri bantuan kredit dan material dengan harga pantas kepada Rakjat di-kota² untuk mendirikan rumahtinggal.
29. Bantu paranelajan dengan modal dan alat penangkap ikan, bantu mereka mengadakan pengawetan, meluaskan pasar, dan ringankan padjak lelang; bebaskan buruhenlajan dari rodi, perbaiki upah mereka dan turunkan setorannja.
30. Adakan persiapan² jang pantas dalam melaksanakan transmigrasi, berikan tanah jang tjukup dan baik serta bantuan kredit dan alat² kerdja bagi para transmigran, dan bantu transmigran² spontan.
31. Djamin hak mendirikan dan mengembangkan koperasi² di kalangan kaum buruh, kaum tani, nelajan dan pekerdja² keradjinan tangan dan bantu koperasi² Rakjat pekerdja dengan modal dan fasilitas tanpa diskriminasi.
32. Beri hak kepada kaum tani untuk dengan latihan dan pimpinan TNI mengangkat sendjata membela diri terhadap gerombolan² teroris jang membunuh kaum tani dan menghantjurkan desa². Beri bantuan kepada kaum pengungsi korban keganasan gerombolan² teroris.
33. Perbaiki asrama² pradjurit dan polisi, adakan perbaikan sjarathidup bagi parapradjurit dan perlakuan² istimewa terhadap pasukan², perwira², bintang² dan tamtama² dari semua angkatan bersendjata jang beroperasi menindas kaum pemberontak kontra-revolusioner dan gerombolan² teroris.
34. Djamin pekerdjaan dan pendidikan kedjuruan bagi para veteran bekas pedjuang bersendjata.

Untuk Perbaikan Ekonomi

35. Pertiinggi panen padi, bahan² makanan lainnja dan kapas dengan djalan menentukan kewadjaban² kepada pemilik² perkebunan² untuk menanam sebagian kebunnja dengan padi, bahan² makanan lainnja atau kapas, dan dengan djalan mem-

- berikan bantuan kepada kaum tani berupa bibit, alat² pertanian, rabuk, bimbingan teknis dan perbaikan pengairan.
36. Perluas pembangunan industri nasional dan lindungi industri nasional terhadap persaingan barang² asing, adakan sistim tjukai jang bersifat melindungi dan kendalikan harga barang² supaya tidak terus membubung.
 37. Batalkan Undang² Penanaman Modal Asing. Kuasai devisen maskapai² minjak asing, awasi produksi dan kuasai distribusi hasil² minjak untuk mendjamin kebutuhan Rakjat dan pertahanan negara.
 38. Djadikan perusahaan² bekas milik Belanda sebagai perusahaan² pemerintah dan tjegah pemartikeliran perusahaan² pemerintah. Konsesi² tanah untuk pertambangan jang belum digunakan supaya segera ditjabut kembali dan sedapat mungkin diusahakan oleh pemerintah sendiri.
 39. Impor dan expor serta perusahaan² penting disegala lapangan harus sepeenuhnja dikuasai oleh pemerintah. Impor untuk keperluan negara dan kebutuhan pokok Rakjat serta expor barang² hasil perusahaan² negara supaya dilakukan langsung oleh pemerintah. Laksanakan distribusi bahan² kebutuhan pokok Rakjat lewat koperasi² Rakjat, RK², RT² dan warung².
 40. Perbaiki dan perbanyak alat² perhubungan darat, sungai, laut dan udara, terutama untuk daerah² luar Djawa.
 41. Rentjana² pembangunan ekonomi pemerintah tidak boleh memberatkan beban Rakjat, sebaliknya jang harus diberatkan ialah kapitalis² besar asing, tuantanah² dan hartawan² lainnja.

Untuk Kemadjuan Kebudayaan

42. Tambah anggaran belandja untuk Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan, tambah djumlah sekolah, gedung² dan peralatan sekolah, kembalikan gedung² sekolah jang dipakai untuk keperluan lain, djamin fasilitas² dilapangan pendidikan bagi murid² dan mahasiswa, hapuskan uang udjian, turunkan harga buku² peladjaran, perbaiki nasib guru, pergiat usaha pemberantasan butahuruf, selenggarakan pertukaran kebudayaan antar-sukubangsa.
43. Hapuskan pendidikan kolonial serta laksanakan pendidikan nasional jang ilmiah dan kerakjatan, dan larang subversi imperialis dilapangan kebudayaan melalui film, lektur, musik, dll. jang bersifat rendah dan merusak, turunkan pajak seni-man, pajak tontonan dan pajak impor buku² ilmiah serta beri subsidi dan fasilitas kepada organisasi² kebudayaan.

44. Adakan kesempatan kerdja jang lebih luas dan perlakuan² istimewa terhadap paraahli Indonesia jang dengan sungguh² bekerdja untuk kemadjuan ilmu dan kebudayaan.
45. Adakan gedung² atau rumah² untuk pertemuan² paraseniman, untuk latihan² dan pertundjukan² kesenian. Bantu kegiatan olahraga Rakjat dan pemuda chususnja.
46. Perbanyak klinik² pengobatan, biro² konsultasi wanita hamil, rumahsalin², dan giatkan pemberantasan penjakit jang banjak terdapat dikalangan penduduk seperti malaria, trachom, penjakit² kulit, tjatjing, tbc dll.

Untuk Perdamaian Dunia

47. Lawan remiliterisasi Djepang jang membahayakan keamanan Indonesia serta perdamaian di Asia dan Pasifik.
48. Desak AS dan Inggris supaya ber-sama² Uni Sovjet menghentikan samasekali pertjobaan², penimbunan dan pembuatan sendjata² A dan H dan tuntutan supaya SEATO dan semua pakt militer dibubarkan. Adakan daerah bebas-atom di Asia dan Pasifik.
49. Djalankan sungguh² politik luarnegeri atas dasar anti-kolonialisme dan mempertahankan perdamaian dunia, laksanakan keputusan² Konferensi Bandung dengan konsekwen dan lawan tiap² usaha jang mau menarik Indonesia kedalam blok perang dan agresif.
50. Luaskan hubungan ekonomi, ilmu dan kebudayaan dengan semua negeri, tanpa memandang perbedaan sistim sosial dan politik, atas dasar samaderadjat dan saling menguntungkan.



PKI berpendapat bahwa tuntutan² diatas adalah tuntutan² jang sepeenuhnja bisa dilaksanakan oleh setiap pemerintah jang menghendaki bantuan² Rakjat, apabila ia mau menempuh djalan kemerdekaan nasional, demokrasi dan kemadjuan bagi Indonesia. PKI menjatakan kesediaannja untuk menjokong dan memberikan semua bantuan kepada setiap pemerintah jang memenuhi tuntutan² ini, jang bersedia mendjalankan tuntutan² ini untuk mengatasi kesulitan² dan perlawanan² dari reaksi.

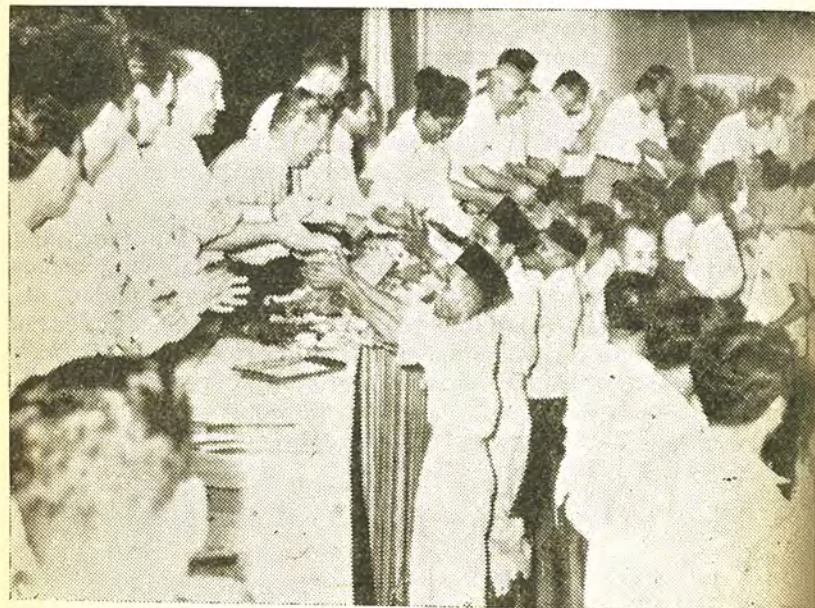


Demikianlah, tugas PKI jang pokok jalah menjelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus sampai ke-akar²nja, jang berarti pembebasan Rakjat Indonesia dari perbudakan dan kemelaratan, mendjamin hidup jang bebas dan bahagia.

Tudjuan perdjjuangan Rakjat Indonesia jang didjelaskan dalam program ini bersumber pada keadaan kongkrit di Indonesia dan sepenuhnya sesuai dengan harapan dan hasrat bagian terbesar Rakjat Indonesia.

Tidak meragukan lagi bahwa tudjuan ini akan terlaksana, karena bintangdjora jang menerangi djalan perdjjuangan Rakjat Indonesia jalah adjaran² Marx, Engels dan Lenin jang mahadjaja, dan karena pengalaman dua Rakjat jang besar — Uni Sovjet dan Tiongkok — merupakan teladan jang memberi inspirasi kepada Rakjat Indonesia dibawah pimpinan klas buruh dan Partai Komunis Indonesia. Djalan lain jang lebih mudah dan lebih tepat daripada ini tidak ada dan tidak mungkin ada.

PKI berseru kepada klas buruh, kaum tani, kaum nelajan, inteligensia, burdjuasi ketjil dan burdjuasi nasional, kepada berbagai partai² politik, organisasi² dan tenaga² progresif lainnja untuk bersatu guna memperkuat dan memperluas front persatuan nasional dalam perdjjuangan untuk kemerdekaan, kebebasan demokratis dan kesedjahteraan ekonomi Indonesia, dalam perdjjuangan untuk Indonesia Baru jang bahagia.



RESOLUSI² LAINNJA

Habiskan Samasekali Kekuasaan Ekonomi Belanda di Indonesia

Dalam Laporan Umum Kawan D.N. Aidit jang disampaikan atasnama Komite Central Partai dan telah disahkan oleh Kongres Nasional ke-VI PKI jang dilangsungkan di Djakarta pada tanggal 7 — 14 September 1959 telah disimpulkan, bahwa dengan diambilalijnja perusahaan² Belanda dalam rangka perdjjuangan pembebasan Irian Barat pada akhir tahun 1957 tidaklah berarti bahwa perdjjuangan nasional untuk melikwidasi sepenuhnya sisa² kolonialisme Belanda sudah selesai. Belum semua kekuasaan dan pengaruh politik, ekonomi, militer dan kebudayaan kaum kolonialis Belanda dihapuskan bersih dari bumi Indonesia, diantaranya jang menjolok jalah adanya kapital Belanda dilapangan perminjangan jang belum diganggugugat samasekali.

Karena masih mempunyai kekuasaan kapital, kaum kolonialis Belanda masih mampu mengatjaukan ekonomi Indonesia dengan tindakan²nja menekan pemerintah untuk memberikan konsesi² baru dengan djalan melakukan massa-onslah terhadap kaum buruh dan mempersulit peredaran minjak keperluan dalam negeri jang tidak hanya vital bagi penghidupan Rakjat, tetapi djuga vital bagi keperluan pembangunan dan pertahanan nasional. Djuga berarti Belanda masih mempunyai sumber keuangan buat membiajai matjam-matjam kegiatan subversi dan mengongkosi tentara pendudukanja di Irian Barat. Karena itu Rakjat Indonesia menjokong sepenuhnya peringatan keras Presiden Sukarno dalam Manifesto Politiknja pada tanggal 17 Agustus 1959, bahwa djika Belanda dalam soal Irian Barat tetap membandel, djika mereka dalam persoalan claim nasional kita tetap berkepalabatu, maka semua modal Belanda, termasuk jang berada dalam perusahaan² tjampuran, akan habis-tamat riwayatnja samasekali di bumi Indonesia.

Untuk melindungi kapitalnja jang masih ada dan untuk dapat terus mengangangi Irian Barat, jang setjara se-wenang² dan kurangadjar telah ditempatkan dibawah kekuasaan Kementerian Dalamnegeri Belanda, kaum kolonialis Belanda masih terus mem-

biajai gerombolan² bersendjata anti Republik Indonesia, mempertahankan kakitangannya menduduki fungsi penting dalam alat² negara dan dilapangan ekonomi dan terusmenerus mengantjar udara, lautan dan pantai² Indonesia dengan pesawat² udara dan kapalselam². Kekurangadjaran kolonialis² Belanda ini akan berlarut² djika kepadanya tidak diberikan djawaban jang setimpal. Djawaban ini tidak lain pemerintah harus mengambil langkah² jang tegas memenuhi tuntutan Rakjat banjak jaitu menasionalisasi semua perusahaan Belanda jang diambilalih tanpa ganti kerugian dan mengoper saham² Belanda jang ada dalam BPM.

Sementara orang jang mudah dihindangi oleh rasa takut kepada imperialisme akan angkat tangan dan berbitjara, ber-hati² dalam bertindak dilapangan perminjakan karena soal ini merupakan soal internasional jang gawat. Apa jang dimaksud dengan soal gawat ini tidak lain karena lapangan perminjakan ini menjangkutpaut langsung kepentingan kaum imperialis AS jang banjak menanamkan modalnya dilapangan perminjakan. Terhadap kechawatiran ini Presiden Sukarno telah memberikan penegasan dalam Manifesto Politiknja, bahwa djika modal asing bukan Belanda mendjalankan peranan jang negatif, misalnja diam² mendjalankan sabotase ekonomi atau setjara gelap²an memberi bantuan kepada kontra-revolusi, maka djanganlah kaget, djika nanti Rakjat Indonesia memperlakukan mereka sama dengan modal Belanda. Telah menjadi pengalaman politik Rakjat, bahwa pengatjauan peredaran minjak tidak hanya dilakukan oleh BPM, djuga oleh SVPM, bahwa sekarang imperialis AS belum pernah merubah sikapnja menjokong pendudukan Belanda di Irian Barat dan menjadikan Irian Barat sebagai salahsatu pangkalan perang dari SEATO. Djuga telah menjadi pengalaman politik Rakjat pada waktu pengambilalihan perusahaan² Belanda dan pada waktu menggagalkan pertjobaan² pendaratan tentara AS di Pakanbaru untuk membantu setjara langsung pemberontakan kontra-revolusioner „PRRI-Permesta“, bahwa kekuatan imperialisme sekarang ini terbatas dan terus merosot.

Situasi internasional dan nasional sekarang lebih menguntungkan djika dibandingkan dengan waktu ketika mengambilalih perusahaan² Belanda pada achir tahun 1957. Dalam rangka pelaksanaan program Kabinet Sukarno-Djuanda untuk melanjutkan perdjjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik, Kongres Nasional ke-VI PKI menjerukan kepada seluruh Rakjat untuk terus membulatkan persatuan nasional dan meningkatkan kewaspadaan nasional sesuai dengan djiwa UUD 1945 dalam melanjutkan perdjjuangan nasional menghabisi samasekali

kekuasaan ekonomi Belanda dan membebaskan Irian Barat dengan berpedoman kepada Manifesto Politik Presiden Sukarno.



Turunkan Harga Barang² Dengan Melakukan Politik Harga Rendah

Kongres Nasional ke-VI PKI jang dilangsungkan di Djakarta pada tanggal 7-14 September 1959 telah melihat kenyataan², bahwa harapan² akan mendapatkan perbaikan penghidupan telah timbul dikalangan Rakjat dalam mereka menjambut program Kabinet Sukarno-Djuanda jang mau melengkapi sandang-pangan Rakjat dalam waktu sesingkat-singkatnja. Jang terutama diharapkan oleh Rakjat sekarang ini adalah turunnja harga barang² kebutuhan hidup se-hari². Didorong oleh kenyataan, bahwa kabinet² jang telah silih-berganti pada tahun² belakangan ini tidak mampu mengendalikan harga, malahan sedikit atau banjak turut menambah mahalnja harga barang² dan menambah kemerosotan tingkat hidup Rakjat, adalah wadjar djika suasana baru dengan berlakunja UUD '45 diharapkan oleh Rakjat akan membawa perubahan dilapangan penghidupan mereka se-hari².

Tindakan drastis telah dilakukan oleh Kabinet Sukarno-Djuanda jang sedjak tanggal 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang kertas Rp. 500,— dan Rp. 1.000,— menjadi Rp. 50,— dan Rp. 100,—, pembekuan 90% simpanan uang pada bank² diatas djumlah Rp. 25.000,— dan menghapuskan sistim B.E. diganti dengan sistim PUEK (Pemungutan Expor) dan PUIM (Pemungutan Impor). Bersamaan dengan melakukan sanering uang ini didjalankan devaluasi rupiah dengan menetapkan nilai dollar Amerika Serikat menjadi Rp. 45,—, nilai mana adalah lebih besar daripada waktu berlakunja B.E. jang berdjumlah Rp. 38,— untuk tiap dollar AS.

Karena kurangnya persiapan² jang diperlukan, tindakan drastis pemerintah itu menimbulkan banjak keluhan dan tuntutan², supaja Rakjat, terutama kaum buruh, kaum tani, pedagang² dan pengusaha² ketjil tidak menjadi korban, demikian djuga pengusaha² nasional tidak kekurangan modal, sehingga jang dirugikan hanyalah kaum modal asing, kaum spekulan dan koruptor. Tanpa mentjegah akibat² jang merugikan Rakjat, apalagi djika tidak membawa penurunan harga, sanering uang itu hanyalah menjewakan Rakjat.

Rakjat Indonesia telah mengalami gunting uang model Sjafrudin Prawiranegara yang hanya menguntungkan kaum modal besar asing dan komplotannya dan matjam² tindakan moneter dilapangan ekspor-impor seperti sistim BE yang semuanya ini tidak membawa perbaikan apa² dilapangan keuangan dan ekonomi, malahan mengatjaukan harga barang² kebutuhan hidup Rakjat se-hari². Pada waktu sekarang tingkat harga barang² impor kebutuhan Rakjat sudah naik setjara luarbiasa jaitu 700% sampai 800% dari tingkat harga sebelum BE. Dan harga barang² impor sekarang dengan resmi dinaikkan oleh pemerintah dengan dilakukannya devaluasi rupiah, ditambah dengan PUIM sebagai pengganti TPI yang bagi beberapa golongan barang terdapat kenaikan² prosentase.

Laporan Umum Kawan D.N. Aidit atasnama Komite Central Partai yang telah disahkan oleh Kongres telah menandakan, bahwa kaum spekulasi berhasil menunggangi situasi peredaran barang² yang sangat sulit, selain karena matjetnja produksi dalam negeri, terbatasnja persediaan barang² impor dan tidak lantjarnya transpor, adalah djuga karena politik harga yang mendorong meradjalelanja spekulasi.

Suburnja spekulasi ini bersumber kepada politik harga liberal, jaitu menyesuaikan harga pemerintah dengan harga pasar dengan alasan supaya tidak terdapat perbedaan harga resmi dan harga pasar yang sudah tinggi. Dalam prakteknja politik harga yang liberal ini memaksa pemerintah mengikuti apa yang diperbuat oleh kaum spekulasi yang selalu mempermainkan harga untuk menge-djar keuntungan sebesar-besarnya dengan mengorbankan kepentingan konsumen yang sebagian terbesar terdiri dari massa Rakjat yang tidak mampu.

Politik harga yang liberal, ditambah oleh masih berlakunya sistim distribusi dan lisensi yang hanya menguntungkan pedagang² dan tukang² tjatut besar telah tjukup mengatjaukan keadaan harga, karena itu harus diubah mendjadi *politik harga yang dipimpin, ja-itu melaksanakan politik harga rendah yang ditetapkan dan dikendalikan setjara konsekwen oleh pemerintah*. Tjara mengendalikan harga dan mentjegah meradjalelanja spekulasi dan tjatut adalah supaya pemerintah mengharuskan pasar mengikuti harga rendah yang ditetapkan oleh pemerintah dengan membandjiri pasar dengan barang² kebutuhan Rakjat se-hari² dan langsung melaksanakan distribusi barang² tersebut untuk mendjamin golongan konsumen yang tidak mampu.

Pelaksanaan politik harga yang dipimpin harus disertai dengan pelaksanaan politik distribusi yang ditudjukan untuk sebanjak mungkin mengurangi djumlah pedagang perantara dan mengguna-

kan koperasi² Rakjat, RK², RT² dan warung² sebagai saluran distribusi yang utama. Pembaharuan politik distribusi ini diperlukan karena hingga sekarang masih berlaku susunan aparat perdagangan yang ber-lapis² dalam peredaran barang² dipasar antara importir atau distributor dengan pendjual etjeran yang menyebabkan adanya pedagang² perantara yang sangat banjak djumlahnja yang mengakibatkan pengambilan keuntungan yang banjak dan ber-lapis² pula oleh matjam² golongan parasiter atas kerugian para konsumen.

Kaum modal besar asing dan komplotannya dan golongan² parasiter lainnya yang terdiri dari tukang² tjatut besar dan koruptor² sivil dan militer membuat kampanye reaksioner dengan menjebar-kan bisikan² yang beratjun, bahwa tindakan tegas pemerintah dalam mengendalikan harga hanya membuat hilangnya barang² dari pasar. Hilangnya barang² ini dapat ditjegah asalkan pemerintah menguasai sepenuhnya ekspor-impor, menguasai tjabang² produksi yang vital, menguasai se-banjak²nja persediaan barang² dan bahan² yang menjangkutpaut sandang-pangan Rakjat, menguasai sebagian besar gudang² dan melantjarkan transpor. Dengan barang dan bahan se-banjak²nja ditangan pemerintah dapatlah pemerintah mengatur djalannya harga.

Selain daripada itu, pemerintah hendaknya menggunakan uang yang dibekukan untuk keperluan pembiayaan projek² negara dan sektor produktif dilapangan industri dan pertanian dalam rangka usaha self-supporting beras dan pakaian. Kepada modal asing yang mempunyai hak transfer djangan diberikan kredit, malahan harus menjetorkan sebagian devisen yang dimilikinja berupa keuntungan atau lain² untuk mendapatkan rupiah dari pemerintah. Djuga kepada tuantanah² djangan diberikan kredit.

Menarik pengalaman daripada kegagalan Kabinet Djuanda yang pernah menetapkan harga pasar tidak boleh melebihi harga 15 Desember 1958 yang disebabkan, selain karena tidak diikuti oleh tindakan² yang diperlukan untuk itu dan karena sabotase kaum pengatjau ekonomi, djuga disebabkan karena tidak dilaksanakannya setjara konsekwen oleh alat² ekonomi pemerintah sendiri yang ternyata belum bersih dari elemen² birokrat dan korup yang ber-komplot dengan kaum modal besar asing dan kaum spekulasi. Karena itu untuk mendjamin kelantjaraan pelaksanaan politik harga yang dipimpin harus dilaksanakan apa yang diserukan oleh Presiden Sukarno dalam Manifesto Politiknja pada tanggal 17 Agustus 1959, jaitu retooling disemua lapangan, terutama membersihkan alat² negara dari elemen² korup dan parasiter lainnya tanpa pandang bulu, tidak perduli berpartai atau non-partai, tidak perduli sivil atau militer.

Kongres Nasional ke-VI PKI telah mengkonstatasi, bahwa inflasi dan kenaikan harga barang² pokok merupakan salahsatu tjiri penting daripada krisis ekonomi jang terus mentjengkeram Indonesia. Karena itu pemetjahan masalah harga tidak dapat dilepaskan daripada perjuangn seluruh Rakjat untuk melepaskan Indonesia dari akibat buruk krisis dunia kapitalis, dan untuk ini Kongres Nasional ke-VI PKI telah menjetudjui dengan bulat tuntutan² jang diadjukan dalam Laporan Umum Kawan D.N. Aidit. Tuntutan² ini pada pokoknja ialah supaya produksi dalam negeri diperbesar, terutama dengan memperluas dan memperkuat ekonomi sektor negara dengan menasionalisasi semua perusahaan Belanda, mengoper saham² Belanda di-perusahaan² tjampuran dan menggerowoti kekuasaan ekonomi modal besar asing lainnja, mengubah perdagangan luarnegeri jang beratsebelah, jaitu berat ke-negeri² imperialis, dengan djalan meluaskan hubungan dagang dengan negeri² Sosialis jang tidak mengenal krisis ekonomi dan dengan negeri² A-A serta berusaha mengatasi keperluan akan barang² modal dan teknik dari luarnegeri melalui pindjaman dengan bunga se-rendah²nja dan tanpa ikatan politik atau militer.

Dengan melaksanakan tuntutan² diatas dapatlah ditjptakan fondamen ekonomi jang sehat dan hanja atas dasar ekonomi jang sehat inilah sanering uang dapat membawa perbaikan² dilapangan keuangan dan moneter dan dapat dilaksanakan politik harga jang menguntungkan Rakjat.

Kongres Nasional ke-VI PKI menjerukan kepada semua kaum buruh, kaum tani dan golongan² Rakjat pekerdja lainnja untuk dengan lebih gigih melawan kemahalan harga dan mendorong kepada Kabinet Sukarno-Djuanda untuk menentukan politik harga rendah jang berdasarkan kepentingan Rakjat, bukan atas kepentingan kaum modal besar asing, kaum spekulasi dan komplotannja. Ini berarti politik harga jang liberal harus segera diganti dengan politik harga jang dipimpin jang mendjamin harga rendah bagi barang² kebutuhan pokok Rakjat.



Tjabut Keadaan Perang di Daerah-Daerah Dimana Tidak Ada Operasi Militer

Kongres Nasional ke-VI PKI jang dilangsungkan di Djakarta dari tanggal 7-14 September 1959, setelah mendiskusikan Laporan

Umum CC PKI dalam hubungan dengan masih berlakunja keadaan perang, berpendapat bahwa Pengumuman Presiden/Panglima Tertinggi tanggal 14 Maret 1957 tentang berlakunja SOB adalah suatu tindakan jang ditudjukan untuk menjelamatkan Republik Indonesia dari rongrongan kaum kontra-revolusioner separatis.

Berlakunja SOB jang kemudian diteruskan dengan „Keadaan Perang” berdasarkan UUKB No. 74/57, telah memperlihatkan segi²nja jang positif di-daerah² jang dikatjau oleh kontra-revolusi bersendjata.

Tetapi kenyataan djuga menundjukkan bahwa berlakunja kekuasaan militer itu tidak sedikit segi² negatifnja, jang djika tidak segera diachiri bisa ber-larut² dan menutupi segi² positifnja. Segi² negatif jang serius adalah pengekan hak² demokrasi bagi Rakjat, seperti adanya larangan dan pembatasan kegiatan politik, termasuk bagi golongan² dan Partai² jang melawan pemberontak kontra-revolusioner, pendukung² UUD 1945 dan pendukung² politik Pemerintah; pemberangusan pers demokratis; larangan mogok termasuk di-perusahaan² jang memihak pemberontak kontra-revolusioner; pengusiran² kaum tani dari tanahgarapannja; larangan menjadi anggota Partai bagi pegawai² golongan F dan golongan pegawai tertentu lainnja; serta larangan² lain jang sangat mengekang perkembangan gerakan progresif dan demokratis.

Tjampurtangan sementara perwira jang masih aktif dalam soal² jang bukan bidangnja, seperti dalam soal keuangan, ekonomi, politik dan pemerintahan, telah mengakibatkan exses² jang serius, padahal tugas penguasa perang adalah pendjagaan dan pemulihan keamanan dan bukan mengurus soal² jang tidak berhubungan langsung dengan soal² tersebut.

Pada waktu jang diperlukan Rakjat lewat Dewan Perwakilan Rakjat bisa memberikan kekuasaan kepada Angkatan Perang kita jang patriotik, selama kekuasaan ini memang sungguh² diperlukan dan tidak disalahgunakan. Timbulnja kontradiksi² jang tidak perlu antara Rakjat dan Angkatan Perang harus ditjegah, dan hal² jang mungkin menudju kearah pertadjaman kontradiksi harus dihindari. Untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia, jang berarti mempertahankan dan mengembangkan hasil² Revolusi Agustus 1945, harus dilaksanakan garis „Dwi Tunggal Rakjat dan Tentara”, jaitu garis „Rakjat bantu Tentara dan Tentara bantu Rakjat” atau „salingbantu Rakjat dan Tentara.”

Situasi nasional dewasa ini menundjukkan, bahwa pada pokoknja pemberontakan kontra-revolusioner „PRRI-Permesta” telah dapat dipatahkan. Kenyataan djuga menundjukkan, bahwa bagi daerah² dimana tidak ada operasi militer terhadap kaum pembe-

rontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta” atau gerombolan DI-TII, tidaklah diperlukan berlakunya keadaan perang. Walaupun di-daerah² tersebut mungkin terdapat djaring² pengatjauan kontra-revolusi, tetapi pada pokoknja keadaan adalah aman dan untuk mengatasinja tidak perlu harus menggunakan kekuasaan berdasarkan keadaan perang.

Untuk membangkitkan potensi nasional dalam mendukung pelaksanaan Program Kabinet Sukarno-Djuanda, diperlukan suasana bebas dan terdjaminnja hak² demokrasi bagi Rakjat, jang memungkinkan meluasnja inisiatif dan daja-tjipta massa Rakjat. Meneruskan berlakunya keadaan perang di-daerah² dimana tidak ada operasi militer terhadap kaum pemberontak kontra-revolusioner, berarti menindas hak² Rakjat, menekan inisiatif dan daja-tjipta massa luas.

Berdasarkan pertimbangan² jang dikemukakan ini Kongres mendesak Pemerintah :

— *supaja mentjabut berlakunya keadaan perang dan memulihkan kebebasan demokratis di-daerah² dimana tidak ada operasi militer terhadap kaum pemberontak kontra-revolusioner.*

— *supaja di-daerah² operasi diberikan kebebasan kepada Rakjat dan organisasi Rakjat untuk ber-sama² dengan alat² negara melawan kegiatan politik dan kegiatan bersendjata kaum kontra-revolusioner.*

Kongres menjerukan kepada seluruh Rakjat untuk mendukung dan memperdjuangkan tuntutan ini untuk memperluas kebebasan demokratis sebagai djaminan bantuan Rakjat dalam melaksanakan Program Kabinet Sukarno-Djuanda.



Sita Perusahaan² Dan Modal Orang² Kuomintang !

Kongres Nasional ke-VI Partai Komunis Indonesia, jang diadakan dari tanggal 7 sampai tanggal 14 September 1959 di Djakarta, menjambut dengan gembira bahwa berkat dorongan massa Rakjat jang dipelopori oleh kaum progresif telah dilakukan beberapa tindakan jang tegas atau agak tegas terhadap komplotan Kuomintang di Indonesia.

Akan tetapi Kongres menjesalkan bahwa sementara orang jang berkuasa dalam alat² negara kemudian tidak mengadakan tindakan

landjutan (follow-up) jang tepat sesuai dengan kedudukan komplotan itu sebagai musuh Rakjat dan musuh Negara. Bahkan, nampak tanda² keragu-raguan dari sementara orang jang berkuasa dalam alat² negara terhadap komplotan itu, terutama sedjak bulan² terachir dari masa berdirinja Kabinet Djuanda. Dan Kongres lebih² menjesalkan, berhubung dengan adanya gejala² jang menundjukkan sikap bermainmata dan kompromis, jang sudah pasti sikap jang tidak sesuai dengan kepentingan Rakjat dan Negara.

Mewakili perasaan dan fikiran Rakjat Indonesia, Kongres berpendapat bahwa untuk keselamatan Republik dan untuk kemandjuaan pembangunan ekonomi Indonesia jang sesuai dengan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 tindakan² jang harus diambil terhadap komplotan orang² Kuomintang tidaklah tjukup hanja dengan melarang dan membubarkan perkumpulan² mereka, hanja dengan melarang beberapa penerbitan mereka, hanja dengan melarang dan membubarkan sekolah² mereka. Tindakan² selandjutnja harus dilakukan, diantaranya jang terpenting ialah *mensita perusahaan² dan modal orang² Kuomintang* dan mendjadikannja milik negara, sedangkan terhadap orang²nja jang tetap melakukan kegiatan subversif dalam bentuk apapun harus didjatuhi hukuman jang berat atau pengusiran segera dari Indonesia. Dalam pada itu aparat² negara dipusat maupun di-daerah², militer maupun sivil, harus segera dibersihkan dari orang² Kuomintang atau orang² suapannja dan sahabat² pelindungnja.

Kongres menjimpulkan bahwa tindakan² jang dituntut itu hanja akan mendjadi kenyataan dan berdjalan dengan sukses apabila persatuan dwitunggal Rakjat dan Tentara semakin diperkuat dan kerdjasama jang demokratis antara mereka dilaksanakan.

Kongres menjimpulkan pula bahwa sovinisme harus ditjegah dan dilawan dengan sekuat tenaga, karena sovinisme djustru membikin kabur kawan dan lawan, mempersulit dilakukannja tindakan² tegas terhadap komplotan Kuomintang dan kakitangannja, disamping merugikan perdjuangan anti-imperialisme pada umumnja. Tindakan terhadap komplotan Kuomintang tidak boleh berbau rasial, tetapi se-mata² tindakan anti-subversif asing.

Untuk menghilangkan dasar ekonomi kaum subversif Kuomintang, sitalah perusahaan² dan modal orang² Kuomintang !

Laksanakanlah kerdjasama jang demokratis antara Tentara dan Rakjat !

Waspadalah terhadap sovinisme dan waspada terhadap mereka jang mensalahgunakan kekuasaan untuk memperkaja diri !



Djadikan Manifesto Politik Presiden Sukarno Pegangan Dalam Membantu dan Menjokong Kabinet Kerdja

Kongres Nasional ke-VI PKI yang berlangsung mulai tanggal 7 s/d 14 September 1959 di Djakarta setelah mendiskusikan Laporan Umum Komite Central Partai yang disampaikan oleh Kawan D.N. Aidit dan setelah mempelajari Manifesto Politik Presiden Sukarno, berpendapat bahwa Manifesto Politik ini yang diutjapkan pada tanggal 17 Agustus 1959, merupakan dokumen penting bagi Rakjat Indonesia dalam melanjutkan revolusi nasionalnya yang belum selesai. Manifesto Politik ini juga telah memberikan pedoman umum tentang pelaksanaan tiga fasal program Kabinet Kerdja.

Adalah sepenuhnya sesuai dengan tuntutan seluruh Rakjat bahwa dalam hubungan dengan perjuangan mengusir imperialisme Belanda, Manifesto Politik menegaskan bahwa *„djika imperialisme Belanda tetap membandel dan kepalabatu dalam soal Irian Barat, maka semua modal Belanda termasuk yang berada dalam perusahaan² tjampuran akan habis-tamat riwayatnya samasekali d bumi Indonesia.”* Sudah semendjak persetudjuan KMB yang chianat itu PKI senantiasa memperingatkan bahwa kekatjauan ekonomi, kematjetan pembangunan dan penderitaan Rakjat Indonesia bersumber kepada kekuasaan modal besar asing. Kongres sepenuhnya berpendapat dengan Manifesto yang antara lain menyatakan bahwa *„terhadap modal asing lainnya, djika mereka dengan diam² menjalankan sabotase ekonomi atau setjara gelap²an membantu pemberontak kontra-revolusioner, merekapun akan diperlakukan sama dengan modal Belanda.”*

Setelah kekuatan pokok kaum pemberontak „PRRI-Permesta” dapat dipatahkan nampak adanya usaha² dari kaum imperialis dan kakitangannya untuk mengadakan kompromi (islah) antara Pemerintah dengan sisa² kaum pemberontak. Mengingat bahwa adanya sisa² pemberontak ini tetap merupakan landasan bagi subversi asing dan tidak sedikit menyebabkan korban manusia serta kerugian materiil bagi Rakjat dan Tentara dan tidak sedikit menghabiskan uang Pemerintah, maka tepat sekali apa yang dinjatakan dalam Manifesto Politik bahwa *„Pemerintah tidak mau mengadakan perundingan atau kompromi dengan pemberontak.”*

Dalam rangka memulihkan keamanan Kongres menjambut dengan gembira pernyataan Presiden Sukarno bahwa *„Pemerintah akan meneruskan dan memperhebat operasi² keamanan dengan*

pengerahan kekuatan alat² negara dan Rakjat setjara maximal”, tetapi dalam pada itu Kongres djuga berpendapat bahwa mengikutsertakan Rakjat itu tidak tjukup hanya dengan mengintensifkan organisasi² keamanan Rakjat dan wadji blatih bagi pemuda² dan veteran sadja, melainkan haruslah djuga dengan memberikan kebebasan² demokratis kepada Rakjat dan organisasi² Rakjat. Hanya dengan djalan demikianlah garis *„dwitunggal Tentara dan Rakjat”* atau garis *„salingbantu Rakjat dan Tentara”* dapat dilaksanakan sepenuhnya dalam praktek.

Pelaksanaan program Kabinet Kerdja bukanlah hanya tergantung kepada Rakjat yang memang tidak perlu lagi diragukan sedikitpun akan bantuannya, melainkan terutama tergantung kepada aparat Pemerintah sendiri. Oleh sebab itu Kongres menjambut dengan gembira maksud Presiden untuk mengadakan retooling terhadap semua alat negara yang harus berarti mendemokraskan dan mereorganisasi alat² negara, memetjat dari djabat²an sivil maupun militer pengchianat² bangsa, orang² reaksioner, penggelap² serta koruptor² dan supaja orang² ini dihukum dan selanjutnya mengisi alat² negara dengan orang² patriotik dan tjakap yang bersedia mengabdikan diri kepada kepentingan Rakjat.

Kongres berpendapat bahwa pernyataan Presiden yang menegaskan akan dikuasainya oleh negara dan tidak dipartikelirkannya tjabang² produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, sesuai dengan fasal 33 UUD 1945 adalah sesuai dengan tuntutan dan harapan Rakjat Indonesia. Ini berarti bahwa ekonomi sektor negara harus diperkuat dan diperluas sehingga menempati posisi komando dalam kehidupan ekonomi negeri, kekuasaan modal monopoli Belanda dilikwidasi sepenuhnya, kekuasaan modal monopoli asing lainnya digerowoti, dan penghisapan feodal dari tuantanah² atas kaum tani dikurangi. Ekonomi sektor partikelir nasional dilindungi, tingkat hidup Rakjat terutama kaum buruh dan kaum tani diperbaiki.

Pengalaman memberikan pelajaran kepada kita bahwa bukan sadja melalui djalan militer tetapi djuga saluran kebudayaan digunakan oleh kaum imperialis untuk melumpuhkan semangat revolusioner Rakjat. Oleh sebab itu adalah tepat sekali pernyataan Presiden Sukarno dalam Manifesto Politik bahwa *„Pemerintah akan melindungi dan membantu perkembangan kebudayaan nasional dan menentang kebudayaan imperialis”*.

Untuk mengurangi ketegangan² internasional dewasa ini sebagai akibat dari politik perang imperialis Amerika, Kongres menjambut dengan hangat pernyataan Presiden untuk menjetop selekas²nja dan dilarang se-keras²nja segala pertjobaan, segala pem-

bikinan dan pemakaian sendjata nuklir. Kongres djuga berpendapat bahwa gerakan perdamaian dan gerakan anti-kolonial adalah satu dan tak bisa di-pisah²kan. Tepat sekali seperti apa jang pernah dikatakan oleh Presiden Sukarno bahwa tidak ada perdamaian selama masih ada kolonialisme.

Kongres yakin bahwa Rakjat Indonesia pasti akan membenarkan apa jang dinjatakan dalam Manifesto bahwa „*sesungguhnya kita berevolusi bukan hanya untuk menaikkan Sang Merah Putih melainkan karena kita ingin tjukup makan dan pakaian, tjukup tanah, pendeknja ingin perbaikan hidup.*” Adalah mendjadi kewajiban bagi tiap² pemerintah jang menamakan dirinja nasional untuk memenuhi tuntutan² diatas. Untuk dapat memenuhi tuntutan² tersebut diperlukan sokongan dan bantuan jang teguh dari Rakjat. Supaja sokongan dan bantuan Rakjat itu dapat dimobilisasi, Pemerintah harus memberikan kebebasan² demokratis, dan berusaha untuk menghimpun bagian terbesar dari kekuatan nasional dan mengadjak semua partai dan golongan² patriotik dalam pemerintahan. Pemerintah jang demikian itu tidak bisa lain ketjuali Pemerintah Gotongrojong sesuai dengan Konsepsi Presiden.

Berdasarkan hal² tersebut diatas, Kongres berseru kepada seluruh kaum Komunis dan Rakjat Indonesia untuk mempeladjar dan mendiskusikan Manifesto Politik Presiden Sukarno, mendjadi-kannja pegangan dalam membantu, menjokong dan menagih pelaksanaan program Kabinet Kerdja.

Kongres mendesak kepada Pemerintah agar Manifesto Politik benar² mendjadi pegangan Pemerintah dalam melaksanakan programnja setjara konsekwen.



Hantjurkan Sisa² Kekuatan Pemberontak Kontra-Revolusioner „PRRI-Permesta” Dan DI-TII Sampai ke Akar²nja

Kongres Nasional ke-VI PKI jang dilangsungkan di Djakarta pada tanggal 7 s/d 14 September 1959 telah memberikan perhatian istimewa terhadap masalah penghantjuran sisa² kekuatan pemberontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta” serta gerombolan² teroris DI-TII untuk memulihkan keamanan dalam negeri sesuai dengan program Kabinet Sukarno-Djuanda.

Keterangan² jang dikemukakan oleh para utusan Kongres terutama jang datang dari daerah² jang masih belum aman menunjukkan bahwa masalah pembasmian sisa² kekuatan pemberontak dan gerombolan² teroris „PRRI-Permesta” dan DI-TII masih merupakan masalah nasional jang sangat mendesak.

Meskipun kekuatan kaum pemberontak kontra-revolusioner itu pada pokoknja telah dapat dipatahkan, kenjataan sekarang menunjukkan bahwa sisa² kekuatan mereka tidaklah boleh diremehkan. Mereka masih sadja terus mengadakan pengatjauan, pembunuhan, perampokan, penggarongan, pembakaran rumah² Rakjat dan praktek² teroris lainnja, hal mana telah menjebabkan makin berlipatgandanja penderitaan Rakjat, terutama kaum tani di-desa². Pengaruh politik mereka dikalangan massa jang terbelakang masih belum dilumpuhkan samasekali.

Ber-larut²nja keadaan seperti sekarang djuga tidak hanya berakibat terus bertambahnja biasa jang harus dipikul oleh Pemerintah dan Rakjat tetapi djuga menambah kemerosotan produksi dan perdagangan luarnegeri kita. Disamping itu pengalaman Rakjat Indonesia telah menunjukkan bahwa gerombolan² pengatjau itu masih bisa hidup karena bantuan tuantanah² didesa dan bantuan sendjata serta perlengkapan² lain dari kaum imperialis asing. Gerombolan² pengatjau merupakan landasan bagi usaha² intervensi asing untuk terus mengatjau negeri kita. Dengan adanya gerombolan² pengatjau, kaum imperialis djuga bermaksud mempertahankan keadaan perang di Indonesia agar dengan demikian dapat menekan perkembangan gerakan demokratis.

Oleh karena itu agar keamanan segera dapat dipulihkan dan Rakjat dapat dibebaskan dari penindasan dan penderitaan jang tak tertahankan itu, sisa² kekuatan pemberontak dan gerombolan² teroris harus dibasmi sampai ke-akar²nja dalam waktu jang se-singkat²nja. Untuk ini soal jang paling pokok diatas se-gala²nja ialah tetap adanya politik pemerintah jang tegas, jang tidak setengah² dan jang tidak mengenal kompromi. Dalam hubungan ini Kongres menjambut dengan gembira pernyataan Presiden Sukarno dalam Manifesto Politiknja pada tanggal 17 Agustus 1959 jl. jang antara lain mengatakan sbb : „*Beleid keamanan Pemerintah tetap tegas, Pemerintah meneruskan dan memperhebat operasi² keamanan dengan pengerahan alat² negara dan Rakjat setjara maximal. Pemerintah tidak mau mengadakan perundingan atau kompromis dengan pemberontak*”.

Tetapi, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman sampai sekarang, pernyataan politik jang tegas terhadap kaum pemberontak telah diperlemah karena kurang kesungguhan dalam pelaksanaan

mengikutsertakan Rakjat dalam arti jang se-luas²nja. Perpaduan antara politik jang tegas dan pelaksanaan prinsip mengikutsertakan Rakjat merupakan djaminan satu²nja bagi berhasilnja usaha Pemerintah dalam membasmi sisa² kekuatan pemberontak „PRRI-Permesta” dan gerombolan² DI-TII sampai ke-akar²nja, sebagai telah dibuktikan oleh sukses² jang telah ditjapai dalam operasi² militer selama ini, baik di Djawa Barat, Sumatera maupun di Sulawesi dan di-tempat² lain, dan sebagai jang diakui sendiri oleh panglima² dan komandan² operasi jang bersangkutan. Oleh karena itu Kongres djuga menjambut dengan gembira pernajaan Presiden Sukarno dalam Manifesto Politiknja itu jang mengatakan bahwa dalam rangka mengikutsertakan Rakjat Pemerintah akan mengintensifkan organisasi² keamanan Rakjat dan wadji blatih bagi pemuda² dan veteran. Ini berarti penjempurnaan organisasi² keamanan Rakjat, jang sekarang memang merupakan satu hal jang sangat mendesak. Dengan lebih disempurnakannja organisasi² keamanan Rakjat, maka kaum tani akan mendapat kesempatan jang lebih luas untuk dibawah pimpinan APRI turut ambilbagian dalam operasi² keamanan dan pembersihan.

Tetapi dalam pada itu Kongres djuga berpendapat bahwa mengikutsertakan Rakjat itu tidak tjukup hanja dengan mengintensifkan organisasi² keamanan Rakjat dan wadji blatih bagi pemuda² dan veteran sadja, melainkan haruslah djuga dengan memberikan kebebasan² demokratis kepada Rakjat dan organisasi² Rakjat. Pemerintah jang benar² bertekad bulat untuk membasmi sisa² kaum pemberontak sampai ke-akar²nja haruslah bersandar kepada massa Rakjat. Dan ini hanja mungkin dengan memobilisasi Rakjat dengan djalan memberikan kebebasan² demokratis kepada Rakjat dan organisasi² Rakjat, disamping tidak memberikan kebebasan demokratis kepada musuh² Rakjat, termasuk tuantanah² bumiputera jang mendjadi kakitangan kontra-revolusi. Tanpa memobilisasi Rakjat sisa² kekuatan pemberontak dan gerombolan² teroris itu tentu tidak dapat dihantjurkan sampai ke-akar²nja. Selain daripada itu hanja dengan memberikan kebebasan² demokratis kepada Rakjat dan organisasi² Rakjat garis „*dwitunggal Rakjat dan Tentara*”, jaitu garis „*Rakjat bantu Tentara dan Tentara bantu Rakjat*” atau „*Salingbantu Rakjat dan Tentara*” dapat dilaksanakan sepenuhnya dalam praktek.

Kongres menekankan bahwa djustru mengenai soal jang sangat penting ini masih terdapat kelemahan jang serius. Ini nampak pada kenyataan bahwa di-daerah² jang sudah dibebaskan, kebebasan politik Rakjat tidak tjepat dipulihkan dan malahan ada usaha² untuk tetap mengekangnja. Ini telah sangat memperlemah daja-

djuang Rakjat dan dengan demikian berarti memberi nafas kepada kaum pemberontak untuk mengkonsolidasi diri kembali. Hal jang demikian inilah jang telah menjebabkan pembasmian kaum pemberontak kontra-revolusioner mendjadi ber-larut² dan memakan sangat banjak biaja.

Berdasarkan kenyataan² tersebut diatas, Kongres sekali lagi menuntut supaya Pemerintah tetap mendjalankan politik jang tegas dan bersamaan dengan itu dengan konsekwen melaksanakan prinsip memobilisasi Rakjat dengan djalan memberikan kebebasan² demokratis kepada Rakjat dan organisasi² Rakjat untuk ber-sama² dengan Pemerintah dan APRI turut ambilbagian dalam menghantjurkan samasekali kaum pemberontak baik setjara militer maupun setjara politik. Inilah djaminan satu²nja djika Pemerintah benar² mau berhasil dalam melaksanakan programnja mengenai pemulihan keamanan sesuai dengan harapan seluruh Rakjat.

Kepada kaum Komunis dan Rakjat Indonesia, Kongres berseru supaya dengan gigih dan ulet memperdjuangkan prinsip² ini agar dengan demikian dapat membantu pelaksanaan program Pemerintah dengan kekuatan jang se-besar²nja.



Susun Pola Pembangunan Untuk Melikwidasi Ekonomi Kolonial

Kongres Nasional ke-VI PKI menjambut dengan gembira pembentukan Dewan Perantjang Nasional oleh Presiden Sukarno dengan harapan agar segera dapat disusun Pola Pembangunan Ekonomi djangka pendek dan djangka pandjang. Dalam amanatnja kepada Sidang Pleno Pertama Depernas pada tanggal 28 Agustus 1959 Presiden antara lain menjatakan sebagai berikut :

„*Didalam alam pendjadjahan kita punja ekonomi adalah ekonomi kolonial dan ekonomi kolonial ini harus kita robah mendjadi ekonomi nasional jang bersih daripada penghisapan, daripada eksploitasi oleh tenaga² luaran*”.

Berdasarkan amanat Presiden tersebut, Kongres berpendapat bahwa sudah seharusnja setiap anggota Depernas membersihkan dirinja dari fikiran² jang hendak memasukkan modal asing baru, karena hal ini langsung bertentangan dengan tudjuan melikwidasi ekonomi kolonial. Sesuai dengan djiwa fasal 33 UUD 1945 kekuasaan modal besar asing jang masih ada harus dilenjakkan.

Masih berlakunya kekuasaan ekonomi modal Belanda dan modal monopoli asing lainnya serta masih meradjalelanja penghisapan feodal oleh tuantanah dan lintahdarat telah merusak keadaan ekonomi dan menjebakkan ekonomi Indonesia tetap tergantung kepada negeri² imperialis. Kerusakan² ekonomi akibat pendudukan fasis Djepang, agresi² kolonial Belanda dan pengatjauan² gerombolan² kontra-revolusi samasekali belum dipulihkan. Oleh karena itu merehabilitasi keadaan ekonomi yang rusak, melikwidasi sepe-nuhnja sisa² kolonialisme Belanda, menggerowoti kekuasaan modal monopoli asing lainnya dan melawan penghisapan feodal adalah sjarat² minimum untuk mensukseskan Pola² Pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur.

Dengan pertimbangan² ini, djelaslah bahwa untuk melaksanakan pemulihan ekonomi tersebut tugas yang per-tama² dari Depernas adalah menjusun segera Pola Pembangunan djangka pendek yang realistis. Atas dasar rehabilitasi ekonomi yang dihasilkan oleh rentjana djangka pendek ini tugas Depernas seterusnya ialah menjusun Pola Pembangunan selanjutnya untuk lebih meningkatkan lagi perkembangan ekonomi negeri.

Supaja dapat membangkitkan antusiasme Rakjat dalam menjambut dan melaksanakannya, Pola Pembangunan harus djelas menguntungkan bagi perbaikan hidup Rakjat pekerdja dan perbaikan ekonomi negeri pada umumnya. Singkatnya isi pokok rentjana pembangunan djangka pendek tersebut ialah merealisasi program Kabinet Sukarno-Djuanda untuk melengkapi sandang-pangan Rakjat, memulihkan keamanan dalamnegeri dan melawan imperialisme. Berdasarkan pokok² fikiran ini, djelaslah bahwa problem² pembangunan yang urgen sekarang adalah seperti berikut :

1. Memelihara setjara intensif, memperkuat dan mengembangkan ekonomi sektor negara terutama perusahaan² negara yang berbagai matjam bentuknya seperti : ICW, IBW, Jajasan, NV. Negara, PT Negara dan djuga bekas perusahaan² Belanda yang diambilalih yang seharusnya dinasionalisasi dan didjadikan perusahaan² negara dan Pemerintah Daerah. Tiap usaha mempartikelirkan perusahaan² negara yang ada dalam bentuk apapun baik sepenuhnya maupun sebagian harus ditjegah dan dilawan se-keras²nya. Perusahaan² negara dengan status yang berbagai matjam harus dapat ditertibkan menurut Undang² Perusahaan Negara yang mendjamin lenjapnya otonomisme yang mendjadi sarang birokrasi, dan pemborosan uang negara seperti yang terdapat dalam PT² Negara sekarang dengan apa yang dinamakan „8 besar”.

2. Mengusahakan self-supporting dalam waktu yang tidak lama dalam soal memenuhi kebutuhan beras dan tekstil. Dalam hal

ini Pemerintah harus memberikan bantuannya yang aktif dalam mengembangkan sektor pertanian Rakjat, terutama dengan melawan penghisapan² feodal.

3. Menjeseaikan projek² setengah-djadi yang produktif diberbagai lapangan baik dikerdjakan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah, terutama sekali yang berhubungan dengan sandang-pangan dan kelantaran transpor darat, laut, sungai dan udara.

4. Menjesuaikan semua bantuan luarnegeri dan perdagangan luarnegeri dengan kebutuhan yang kongkrit akan barang² modal dan bahan² baku sesuai dengan rentjana pembangunan Indonesia.

Dengan demikian, usaha pembangunan tidak didasarkan atas penanaman modal asing, tetapi berdasarkan hasil pertukaran bahan-bahan mentah negeri kita dan dimana diperlukan, dengan bantuan luarnegeri yang diperoleh dengan djalan kredit djangka pandjang tanpa ikatan² politik dan militer.

5. Menjesuaikan pendidikan tenaga ahli dan tenaga kedjuruan dengan rentjana pembangunan dengan memperbanjak sekolah² kedjuruan dan dengan mendirikan sekolah² atau kursus² diperusahaan-perusahaan dan djawatan².

Memobilisasi se-efektif²nja modal dalamnegeri terutama yang ada pada negara dan meninggalkan politik kredit yang tidak produktif yang selama ini sebagian besar hanja ditudjukan pada sektor perdagangan.

Sumber² keuangan negara harus tingkat demi tingkat digeser dari padjak² langsung dan tidak langsung kesektor produktif terutama dari perusahaan² negara yang ada dan bekas perusahaan² Belanda yang diambilalih. Pada pokoknya sumber² pembiayaan pembangunan tidak boleh per-tama² dipikulkan kepada Rakjat pekerdja.

Achirnya diserukan kepada kaum buruh, kaum tani dan massa Rakjat pekerdja lainnya untuk menjatakan perasaan dan fikiran-nya guna mendorong Depernas menjusun Pola Pembangunan yang dapat mentjiptakan sjarat² yang kongkrit untuk melikwidasi ekonomi kolonial dan membangun ekonomi nasional.



Laksanakan Sistim 6 : 4, Tambah Tanahgarapan, Djamin Keamanan Untuk Mempertinggi Produksi Pertanian

Kongres Nasional ke-VI PKI yang dilangsungkan di Djakarta dari tanggal 7 s/d 14 September 1959 mengkonstatasi kemunduran-kemunduran yang serius dilapangan produksi pertanian, terutama produksi bahan makanan. Produksi beras setiap tahun sudah tidak mungkin lagi menutup kebutuhan minimum Rakjat Indonesia. Untuk mendapat rata² 93 kg. beras tiap djiwa dalam setahun seperti direntjanakan oleh Pemerintah, yang samasekali belum memenuhi sjarat² kesehatan, diperlukan tambahan beras kira² 1 djuta ton, diantaranya dengan impor yang setiap tahunnya tidak kurang dari 600.000 ton beras, yang merupakan pengeluaran devisen tidak sedikit.

Seperti dinjatakan dalam Laporan Umum Kawan D.N. Aidit, sebab pokok daripada kemerosotan ini adalah bersumber pada masih meradjalelanja sisa² feodalisme dinegeri kita dan ketergantungan ekonomi negeri kita pada negeri² imperialis yang terus-menerus ditimpa krisis ekonomi. Ini semua menjebabkan tidak mungkinja tenaga produktif didesa berkembang bebas. Indonesia tjukup memiliki modal berupa tanah pertanian yang tjukup luas dan subur, tenaga kerdja kaum tani ber-puluh² djuta yang ulet dan berpengalaman dalam pekerdjaan pertanian. Tetapi sjarat yang sangat menguntungkan ini tidak dapat digunakan se-baik²nja, karena masih adanja sisa² feodalisme yang berat dan ketergantungan ekonomi Indonesia pada negeri² imperialis, kurangnya bantuan yang diberikan oleh Pemerintah, dan djuga karena masih adanja pengatjauan gerombolan² kontra-revolusioner „PRRI-Permesta” dan gerombolan bandit DI-TII.

Kongres Nasional ke-VI PKI menganggap bahwa tugas meningkatkan produksi pertanian, terutama produksi beras, adalah tugas nasional pemerintah dan Rakjat Indonesia. Dalam waktu yang tidak terlalu lama Indonesia harus bisa memenuhi kebutuhan sendiri akan beras dan bahan² baku untuk industri textil sesuai dengan program Pemerintah Sukarno-Djuanda tentang melengkapi sandang-pangan Rakjat.

Kongres memberikan penilaian yang tinggi pada usaha² kader² dan anggota² PKI yang telah membikin pertjobaan untuk meningkatkan produksi padi sampai bisa mentjapai hasil 60 sampai 120 kwintal tiap ha. Karena itu diserukan kepada segenap anggota Partai, terutama anggota² dari kalangan kaum tani untuk memper-

luas pertjobaan peningkatan produksi pertanian. Meskipun begitu, peningkatan produksi pertanian baru dapat didjalankan setjara maksimal djika kaum tani dibebaskan samasekali dari penghisapan feodal dengan melaksanakan sembojan „tanah untuk kaum tani.”

Untuk meningkatkan produksi pertanian, terutama produksi bahan makanan, chususnja beras, harus dilaksanakan 5 prinsip mengerdjakan tanah, jaitu „Luku dalam, tanam rapat, perbanjak rabuk, perbaiki bibit dan pengairan”. Disamping 5 prinsip ini tentu harus pula diperhatikan soal menjiangi sawah, melawan hama dan memperbaiki alat pertanian. Bersamaan dengan itu Rakjat Indonesia harus mendesak Pemerintah supaja :

1. Mengambil tindakan untuk membatasi sewatanah yang boleh dipungut oleh tuantanah dengan maximum 40% dan minimum 25% dari hasil panen, ketjuali yang selama ini sudah menerima kurang dari 25%. Artinja kaum tani penjewa tanah harus menerima minimum 60% dari hasil panen. Disamping itu Pemerintah harus melindungi kaum tani penjewa tanah tuantanah dan melarang pengusiran oleh tuantanah terhadap kaum tani.

2. Membatasi milik tanah tuantanah, membeli kelebihan tanah tuantanah dengan tjara dan harga yang ditentukan oleh Pemerintah dan membagikan tanah² tersebut kepada tani takbertanah dan tanimiskin.

3. Menghapuskan hak erfpacht atas tanah² bekas perkebunan Belanda yang telah diduduki oleh kaum tani dan mensahkan tanah² itu sebagai hakmilik kaum tani yang mengerdjakan.

4. Menghantjurkan samasekali gerombolan pengatjau sisa² kaum pemberontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta” dan gerombolan teroris DI-TII, mensita tanah dan milik lain dari kaum tuantanah yang memihak gerombolan pengatjau kontra-revolusioner dan gerombolan teroris lainnja, dan membagikan tanah² itu kepada kaum tani takbertanah dan tanimiskin.

Kongres berpendapat bahwa dengan memenuhi tuntutan² tersebut Pemerintah akan bisa meringankan beban penghidupan kaum tani, meneguhkan sokongan kaum tani dalam membantu pelaksanaan program Pemerintah untuk melengkapi sandang-pangan Rakjat.

Kongres berseru kepada segenap Komunis dan kaum demokrat Indonesia untuk memperdjuangkan dilaksanakannja tuntutan² tersebut diatas.



Lawan Kebudayaan Imperialis, Kembangkan Kebudayaan Rakyat

Kongres Nasional ke-VI PKI yang berlangsung di Djakarta dari tanggal 7 sampai tanggal 14 September 1959, menjambut dengan gembira Laporan Umum Kawan D.N. Aidit mengenai masalah kebudayaan. Setelah mendiskusikan masalah² kebudayaan, maka Kongres mentjatat, bahwa garis „*Seni dan ilmu untuk Rakyat*“, metode „*realisme sosialis*“, langgamkerdja „*turun kebawah*“ dan sjarat „*dua tinggi*“, jaitu „*tinggi mutu ideologi dan tinggi mutu artistik*“, pada pokoknja sudah menjadi pedoman pekerdja² kebudayaan progresif Indonesia. Makaitu, Kongres jakin bahwa ditahun² yang mendatang sesudah Kongres Nasional ke-VI PKI gerakan kebudayaan Rakyat kita akan menghasilkan karja² baru yang lebih besar, lebih tinggi dan lebih indah.

Kongres menekankan, bahwa penguasaan Marxisme-Leninisme dan hubungan erat dengan kehidupan massa Rakyat, jaitu „*tahu Marxisme-Leninisme dan kenal keadaan*“, adalah djuga menjadi sjarat mutlak bagi pekerdja² kebudayaan Komunis apakah dia seorang sastrawan, pelukis, pematung, komponis, dramaturg, sutradara, aktor dan aktris, ataupun lain²nja. Bersamaan dengan itu pekerdja² kebudayaan Komunis wadjib lebih mengeratkan kerdja-sama dengan pekerdja² kebudayaan demokratis dan patriotik lainnja untuk memperkuat front kebudayaan nasional anti-kebudayaan imperialis, untuk setia kepada segala yang baru dan madju, setia kepada Rakyat, tanahair dan revolusi.

Kongres lebih landjut menggarisbawahi *Manifesto Politik* Presiden Sukarno yang menegaskan, bahwa program Kabinet Kerdja „*meneruskan perjuangan menentang imperialisme politik dan ekonomi*“ berarti pula menentang imperialisme dibidang kebudayaan. Oleh sebab itu Kongres mendesak kepada Pemerintah agar bertindak yang njata dan tegas untuk menyelamatkan kebudayaan nasional kita dari agresi kebudayaan imperialis, terutama film, lek-tur dan bunji²an yang histeris, yang memerosotkan naluri dan perasaan² manusia ketingkat hewan.

Kongres memperkuat Resolusi Sidang Pleno ke-IV CC dari Kongres Nasional ke-V bahwa salahsatu sebab yang menjadi penghalang perkembangan kehidupan kebudayaan Rakyat adalah tidak adanya atau sangat kurangnya gedung² pertemuan, gedung² kesenian, gedung² kebudayaan, dan makaitu Kongres merasa gembira bahwa CC telah berhasil mendirikan sebuah Gedung Kebudayaan, sekalipun masih sederhana.

Kongres selandjutnja merasa perlu untuk mendesak Pemerintah agar mendirikan taman² kebudayaan, gedung² pertemuan dan pertundjukan diibukota dan di-kota² penting lainnja. Dalam rangka ini Kongres mengusulkan kepada Pemerintah agar rumah almarhum Raden Saleh, pelukis kebanggaan nasional kita, di Djalan Raden Saleh, Djakarta, dijadikan milik negara dan digunakan untuk keperluan museum seni-bentuk (art gallery), dan agar Pemerintah mengusahakan tempat lain yang sama baiknja untuk rumahsakit yang sekarang menempati bekas Rumah Raden Saleh itu. Djuga Kongres mendesak kepada Pemerintah untuk dengan sungguh² melindungi dan mengembangkan kebudayaan nasional. Museum² supaya lebih banyak didirikan sedangkan yang sudah ada supaya mendapat perhatian lebih besar dan pemeliharaannja lebih baik.

Kongres berseru kepada semua pekerdja kebudayaan progresif untuk memperhebat usahanja dan ber-lomba² mendaki setinggi mungkin gunung kehidupan kebudayaan Rakyat kita.



Ilmu Untuk Rakyat dan Revolusi

Kongres Nasional ke-VI Partai Komunis Indonesia yang berlangsung di Djakarta dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 14 September 1959, menjambut dengan gembira Laporan Umum CC PKI yang menekankan tentang pentingnja memperbaiki pekerdjaan Partai dikalangan intelektual, dan sepenuhnya sependapat bahwa „*proses kelahiran dan pertumbuhan dari kaum intelektual dinegeri kita tidak dapat dipisahkan dari perjuangan melawan kolonialisme*“. Kongres berpendapat bahwa Revolusi Agustus 1945 telah lebih mempersatukan kaum buruh dan kaum tani dengan kaum intelektual yang sampai batas² tertentu mempertemukan ilmu dengan praktek revolusi Rakyat. Dengan demikian ilmu telah mendekati Rakyat dan sampai batas² tertentu semangat kerakjatan telah menjiwai pekerdjaan² ilmiah.

Ilmu pengetahuan, baik ilmu² alam maupun ilmu sosial, menempati tempat yang semakin penting dalam kehidupan Rakyat dan tanahair kita. Pemetjahan masalah² ekonomi dan politik sangat erat berhubungan dengan taraf ilmu di Indonesia dan pentrapannja diberbagai lapangan itu. Oleh sebab itu Partai harus mengembangkan pekerdjaan diberbagai lapangan ilmu untuk mendjamin

pengabdian ilmu kepada kepentingan Rakjat dan tanahair kita.

Dengan belum selesainya Revolusi Agustus 1945 maka aspirasi kaum intelektual Indonesia untuk mengembangkan ilmu guna mengabdikan kepada Rakjat dan tanahair tidak mendapat penyaluran yang memuaskan. Kedudukan kekuatan tengah Indonesia yang lemah dilapangan ekonomi dan politik, ternyata tidak mampu memberikan bimbingan dilapangan ilmu dan kebudayaan. Kaum reaksioner masih mempunyai pengaruh² tertentu dilapangan ilmu dan kebudayaan, sedangkan pekerdjaan kaum progresif dilapangan ini belum cukup meluas dan mendalam. Semuanya ini menjebabkan dinegeri kita terdapat kemandekan dan dekadensi dilapangan ilmu dan kebudayaan, terutama dilapangan ilmu sosial. Keadaan ini memberikan sjarat² bagi kaum imperialis dan kaum reaksioner dalam negeri untuk meratjuni perkembangan ilmu dan kebudayaan, seperti yang juga sudah berulang kali ditjanangkan oleh Presiden Sukarno.

Kongres Nasional ke-VI Partai disamping mensinjalir gejala² buruk yang ada itu, memberikan penghormatan kepada kaum intelektual yang patriotik didalam usaha² mereka untuk menumpas semua yang kolot dan lapuk dan berusaha memperkaja dan mempertinggi taraf ilmu dinegeri kita. Selandjutnja Partai merasa bangga tentang mulai lahirnja kaum intelektual dari Rakjat pekerdja Indonesia yang berusaha mengabdikan ilmu kepada Rakjat dan Revolusi. Dalam hal ini Kongres Nasional ke-VI PKI menjtat dengan gembira hasil² kolektif kaum intelektual dan pekerdja² organisasi revolusioner buruh dan tani diberbagai tjabang produksi, seperti penemuan bibit² padi²an dan kapas yang berkwalitet lebih tinggi, penemuan tjara² baru dilapangan teknik pengolahan tanah, pemeliharaan ikan dan ternak, penjelenggaraan research² dan seminar² dari mahasiswa² tentang berbagai masalah sosial yang hangat dan langsung mengenai kehidupan Rakjat, seperti masalah otonomi tingkat III, dan sebagainya. Djuga Kongres menjambut dengan gembira usaha² kaum intelektual yang mendorong berdirinja badan² konsultasi untuk memberikan nasehat dan pembelaan dalam perkara² yang dihadapi kaum buruh dan tani.

Kongres menjambut dengan hangat berdirinja dan meluasnja *Universitas Rakjat* (UNRA) diberbagai kota dinegeri kita yang menetapkan revolusi Indonesia sebagai sasaran daripada studi. Melalui UNRA ini Partai berusaha memberi sumbangan untuk memperkuat perlawanan terhadap ilmu sosial yang kolot dan mendorong perkembangan ilmu sosial yang progresif yang ditujukan untuk mengabdikan kepada Rakjat. Dengan semakin besarnya jumlah kaum intelektual yang turutserta mengembangkan ilmu Rakjat makin

kuatlah persatuan dikalangan kaum intelektual dalam melawan kolonialisme yang mengakibatkan mereka makin dekat pada Rakjat pekerdja. Hal ini berarti makin luasnya dan makin kokohnya front persatuan nasional anti-imperialis.

Kongres Nasional ke-VI PKI djuga menjambut dengan hangat kemadjuan ilmu, teknik dan kebudayaan di-negeri² Sosialis, khususnya di Uni Sovjet, yang telah mengungguli negeri² kapitalis. Kenjataan² ini membawa perubahan besar dalam sikap dan pandangan kaum intelektual dinegeri kita terhadap Sosialisme. Hanya se-lapisan yang tipis, jaitu mereka yang berkepalabatu, yang tetap ngotot tidak mengakui keunggulan Sosialisme.

Dalam menjtat hasil² tersebut Kongres Nasional ke-VI PKI membenarkan konstataasi Laporan Umum Kawan D.N. Aidit bahwa kemadjuan pekerdjaan Partai dikalangan kaum intelektual masih terlampau lambat dan tidak seimbang dengan kemadjuan² yang diperoleh di-lapangan² lain.

Dalam perdjuaan untuk menjelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja Kongres Nasional ke-VI PKI menjimpulkan tugas² pokok pekerdjaan Partai dikalangan intelektual sbb. :

1. Bekerdja lebih giat dan lebih baik untuk mempersatukan kaum intelektual dan menarik mereka kedalam perdjuaan revolusioner dari Rakjat;
2. Bekerdja lebih giat dan lebih baik untuk mengkonsolidasi dan mengembangkan azas ilmu untuk Rakjat dan Revolusi;
3. Bekerdja lebih giat dan lebih baik untuk memperbesar jumlah anggota Partai Komunis dikalangan kaum intelektual, dan supaya kaum intelektual Komunis senantiasa memperdalam ilmu Marxisme-Leninisme dan menjadi tjontoh dalam memperkaja dan mengembangkan ilmu untuk kepentingan Rakjat;
4. Senantiasa memperbaiki tjarakerdja Komite² Partai dengan melawan segala pandangan yang tidak tepat terhadap kaum intelektual.



Bentuk dan Kembangkan Regu² Kerdjabakti

Kongres Nasional ke-VI PKI yang dilangsungkan pada tanggal 7 s/d 14 September 1959 di Djakarta dengan rasa gembira dan terharu mendengar Laporan Umum CC tentang sukses² yang telah

ditjapai oleh Partai dalam menjambut Kongres Nasional ke-VI Partai dengan membentuk ribuan Regu Kerdjabakti Partai untuk memperbesar amal kepada Rakjat dalam bentuk ber-sama² Rakjat mengerdjakan sawah kaum tanimiskin, membikin atau memperbaiki djal², saluran² air, djembatan², rumah², Rakjat, balai² pertemuan, membersihkan kampung², mengumpulkan pupuk, memberrantas butahuruf dan sebagainya.

Dalam Regu² Kerdjabakti telah ambilbagian pemimpin² Partai dari semua tingkat jang mendapat sambutan antusias dari massa, sehingga menimbulkan suasana baru jang segar dalam gerakan Rakjat progresif. Bagi kader² jang tidak langsung bekerdja di lapangan produksi, terutama kader² tinggi, kerdjabakti jang bersifat kerdja badaniah, djika dibiasakan merupakan salahsatu bentuk pendidikan ideologi jang penting. Kerdjabakti adalah salahsatu kegiatan Partai jang penting disamping kegiatan² Partai jang lain seperti memperdjuangkan dan membela kepentingan massa melalui berbagai organisasi massa, melalui badan² perwakilan, pemerintahan daerah dan lain².

Dengan kerdjabakti telah semakin dipererat hubungan Partai dengan massa. Kerdjabakti adalah djuga salahsatu bentuk pernjataan terimakasih Partai atas kepertjajaan Rakjat jang semakin besar terhadap Partai, dan pernjataan terimakasih atas sumbangan-sumbangan jang diberikan dengan ichlas oleh Rakjat kepada Partai dalam menghimpun berbagai dana seperti dana untuk biaja Pemilihan Umum PKI, untuk biaja pembangunan gedung CC PKI, biaja pembangunan gedung kebudajaan Partai, biaja Kongres Partai dan sebagainya. Semuanya ini terdjadi dimana Rakjat masih hidup dalam sangat kekurangan.

Istimewa didalam menjambut Kongres Nasional ke-VI Partai, dari seluruh pelosok tanahair telah mengalir sumbangan² Rakjat sebagai tanda simpati terhadap Kongres, berdasarkan putusan Sidang Pleno ke-VII CC PKI pada tanggal 19-21 November 1958 jang mengambil Resolusi untuk mengadakan gerakan pengumpulan dana Kongres. Berkat kesedaran politik dan organisasi dari anggota², tjalonanggota² dan simpatisan² PKI, maka untuk Kongres Nasional ke-VI PKI telah terkumpul uang sebanyak Rp. 3.520.974,— (tiga djuta limaratus duapuluh ribu sembilan ratus tudjuhpuh empat rupiah). Semua tanda simpati itu merupakan dorongan bagi Partai dan chususnya bagi peserta² Kongres untuk bekerdja lebih baik dalam melaksanakan tugas² patriotiknja.

Karena tindakan sanering uang oleh Pemerintah, djumlah sumbangan jang telah terkena peraturan itu sebanyak Rp. 507.000,— (limaratus tudjuh ribu rupiah), jang berakibat dana Kongres di-

rugikan 90% dari Rp. 507.000,— jaitu Rp. 456.300,— (empatatus limapuluh enam ribu tigaratus rupiah). Untuk mengatasi keadaan ini Panitia Kongres telah mengadakan penghematan setjara maksimal dan menjerukan supaja utusan² Kongres dari Djawa membawa perbekalan bahan makanan sendiri.

Dengan bangga dan terharu Kongres melihat kenjataan, bahwa seruan itu bukan sadja dipenuhi oleh utusan² Kongres dari Djawa, bahkan sumbangan² baru dari Rakjat mengalir lagi berupa bahan makanan jang me-limpah². Disamping itu mengalir tandamata² jang telah lebih memperkaja isi pameran Partai jang diadakan dalam rangka penjelenggaraan Kongres.

Perhitungan jang terachir menundjukkan, bahwa djumlah uang jang masuk dan keluar untuk Kongres Nasional ke-VI Partai ialah sebagai berikut :

Pemasukan :

Rp. 3.520.974,—

Pengeluaran :

a. Kongres Nasional Rp. 498.575,—
b. Kena sanering Rp. 456.300,—

Rp. 954.875,—

Sisa :

Rp. 2.566.099,—

(Dua djuta limaratus enampuluh-enam ribu sembilanpuluhsembilan rupiah).

Djumlah uang jang sebesar Rp. 2.566.099,— diputuskan oleh Kongres Nasional ke-VI PKI, untuk digunakan sebagai biaja perluasan Gedung Komite Central Partai dan djika ada sisanja untuk sumbangan pembangunan Gedung Kebudayaan di Djakarta.

Sebagai djawaban dan pernjataan terimakasih jang se-besar²nja kepada Rakjat, Kongres memutuskan menjetudjui usul Kawan D.N. Aidit untuk mengembangkan kerdjabakti sesudah Kongres, dengan membentuk se-kurang²nja satu Regu Kerdjabakti ditiap Ketjamatan dimana terdapat Komite PKI.

Regu² Kerdjabakti supaja setjara teratur dan berentjana melakukan kegiatan² bersama dan untuk massa Rakjat. Fungsionaris² Partai dari semua tingkat harus menggabungkan diri pada salahsatu Regu Kerdjabakti.



Hentikan Pertjobaan² Sendjata Nuklir dan Bentuk Daerah² Bebas Atom

Kongres Nasional Ke-VI PKI jang dilangsungkan di Djakarta pada tgl. 7-14 September 1959 berpendapat bahwa masalah pertjobaan² sendjata² nuklir adalah salahsatu masalah internasional jang harus mendapat pemetjahan dengan segera karena ia menjangkut nasib dan kelangsungan hidup umatmanusia sekarang dan generasi² jang akan datang.

Kongres mentjatat bahwa perdjjuangan Rakjat sedunia untuk pelarangan pertjobaan², penimbunan dan pemakaian sendjata² tersebut, telah mentjapai sukses² besar. Berbagai sardjana, pemimpin organisasi² massa, pemuka² pemerintahan dari berbagai negeri, demikian pula konferensi² internasional tingkat pemerintahan maupun bukan-pemerintahan telah melantangkan suara kemanusiaan-nja agar pertjobaan² sendjata² nuklir tersebut segera dihentikan.

Sesuai dengan kehendak Rakjat² sedunia Uni Sovjet telah menjatakan setjara sefihak untuk tidak mengadakan pertjobaan sendjata² nuklir lagi, sebagai termaktub dalam pengumuman Dewan Menteri Uni Sovjet tertanggal 31 Maret 1958. Dunia menjambut dengan gembira keputusan tersebut dan mengharap Amerika Serikat dan Inggris membuat pernjjataan jang serupa. Sungguh disesalkan bahwa harapan² ini tidak terpenuhi, bahkan Amerika Serikat dan Inggris terus mengadakan serangkaian pertjobaan² baru.

Atas desakan jang semakin keras dari Rakjat² sedunia agar negara² atom mengadakan perundingan untuk mentjapai persetudjuan tentang pelarangan pertjobaan² sendjata² nuklir, desakan mana sesuai dengan peringatan „Panitia Ilmiah PBB tentang akibat² Radiasi Atom” jang dalam laporannja kepada Sidang Madjelis Umum PBB bulan Agustus 1958 menegaskan sekali lagi bahwa pertjobaan² sendjata² nuklir membahayakan umatmanusia sekarang dan generasi jang akan datang, maka pada tanggal 31 Oktober 1958 dimulailah perundingan 3 Negara Atom di Djenewa untuk mentjapai persetudjuan tentang pelarangan pertjobaan, penimbunan dan penggunaan sendjata² nuklir. Peristiwa ini adalah suatu kemenangan baru bagi Rakjat diseluruh dunia jang telah memperdjjuangkannja sedjak beberapa tahun lamanja.

Sungguhpun Amerika Serikat dan Inggris berusaha keras untuk menggagalkan dan merintangj tertjapainja persetudjuan dalam Konferensi Djenewa ini, tetapi adalah suatu kenyataan bahwa hingga sekarang Konferensi masih tetap berlangsung bahkan mentjapai kemadjuan² tertentu. Disamping itu adalah suatu kenyataan

jang menggembirakan bahwa selama hampir satu tahun perundingan di Djenewa berlangsung, tidak ada satupun negara jang mengadakan pertjobaan bom atom atau hidrogen. Keadaan ini sangat menggembirakan dan membuktikan bahwa sesungguhnya pertjobaan² dapat dihentikan. Oleh karena itu Kongres mendesak agar perundingan² di Djenewa terus dilangsungkan hingga akhirnya tertjapai persetudjuan. Rakjat Indonesia terutama kaum Komunis Indonesia harus melipatgandakan usahanja agar tuntutan² untuk berhasilnja Konferensi Djenewa mendjadi lebih keras dan lebih njaring. Lebih baik berunding 10 tahun daripada mengadakan pertjobaan 1 bom atom.

Dalam situasi jang menimbulkan harapan demikian itu, keputusan pemerintah Perantjis untuk mengadakan pertjobaan bom atom-nja jang pertama di Sahara, merupakan suatu sabotase terhadap perundingan² di Djenewa dan membukakan pintu bagi Amerika Serikat dan Inggris untuk mengalihkan perhatian dunia dari Konferensi Djenewa dan memulai kembali pertjobaan² sendjata nuklir-nja, dengan demikian mengingkari harapan² jang tumbuh dikalangan Rakjat² diseluruh dunia. Adalah pada tempatnja dan sesuai dengan rasa kemanusiaan, kechwatiran umum dan pendapat umum di Indonesia maupun diseluruh dunia, apabila pemerintah Indonesia menjampaikan protes se-keras²nja kepada pemerintah Perantjis dan menuntut agar pertjobaan bom atom Perantjis di Sahara itu dibatalkan.

Sedjalan dengan perdjjuangan untuk menghentikan pertjobaan², penimbunan dan penggunaan sendjata² nuklir, adalah perdjjuangan untuk mentjiptakan daerah² bebas atom. Bagi Rakjat Indonesia perdjjuangan untuk mentjiptakan daerah² bebas atom ini mendjadi lebih mendesak lagi setelah kenjjataan bertambah banjakknja negara² Asia jang menerima sendjata² nuklir. Disamping Djepang, Okinawa dan Korea Selatan dewasa ini Amerika Serikat sedang berusaha sekeras-kerasnja agar sendjata² nuklir dapat pula masuk ke Filipina, Muangthai dan Vietnam Selatan.

Kongres berpendapat bahwa dewasa ini sudah tiba waktunja bagi pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah² njata guna terlaksananja ide pembentukan daerah² bebas atom di Asia dan Pasifik.



Lawan Subversi dan Intervensi AS, dan Bubarkan SEATO !

Kongres Nasional ke-VI PKI yang dilangsungkan di Djakarta pada tgl. 7-14 September 1959 setelah mendengar dan mendiskusikan Laporan Umum CC, membenarkan dan memperkuat analisa dan garis politik CC yang menjimpulkan bahwa imperialisme Amerika Serikat adalah musuh yang paling berbahaya bagi seluruh kemanusiaan yang tjinta damai dan kemadjuan. Salahsatu bentuk dan saluran intervensi dan agresi imperialisme AS terhadap bangsa² lain adalah pakt² militer. Melalui pakt² militer agresif ini AS dan imperialisme dunia mentjoba mempertahankan kekuasaan kolonialnya atas bangsa² lain. Melalui pakt² militer agresif ini AS mengatjau dan mengganggu keamanan dan hidup damai bangsa². Mereka memetjahbelah dan mengadudomba bangsa² satu sama lain. Mereka menimbulkan perang dalamnegeri dan mereka menjuruh bangsa Asia bertempur melawan bangsa Asia.

Kenjataan² dan pengalaman² Indonesia dan negeri² lain di Asia Tenggara sendiri menunjukkan bahwa bagian dunia ini merupakan salahsatu sasaran terpenting dari agresi imperialis AS yang disini diwakili oleh kegiatan² subversi, intervensi dan agresi pakt militer SEATO. Dewasa ini sedang berlangsung pula intervensi² bersendjata SEATO yang mengganggu keamanan di Asia. Di Laos intervensi SEATO yang sudah ber-tahun² dipersiapkan, sekarang sudah mengakibatkan perang dalamnegeri. Di India sedang giat diadakan usaha², fitnahan² dan provokasi² untuk memetjahbelah hubungan tetangga baik antara India dan RRT. Djuga di Kambodja subversi SEATO masih terus giat dilakukan untuk menjatuhkan politik netral Pemerintah Norodom Sihanouk yang teguh menolak SEATO. Di Indonesia SEATO masih sadja terus membantu dan mendalangi sisa² kekuatan kaum pemberontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta”.

Adalah menjadi kepentingan bersama yang mendesak dari semua negeri Asia, chususnya negeri² Asia Tenggara, untuk dengan gigih melawan dan mengalahkan segala bentuk subversi, intervensi dan agresi dari SEATO, sesuai dengan Putusan² Bandung. Laporan Umum Kawan D.N. Aidit dengan tepat menjatakan bahwa dalam perlawanan terhadap SEATO ini, Indonesia berada difront yang paling depan. Tugas ini bagi Indonesia merupakan tugas nasional dan internasional yang berat tetapi mulia, demi keselamatan dan keutuhan Republik Indonesia, demi perdamaian di Asia dan didunia.

Kongres berseru dan berharap agar Pemerintah Republik Indonesia menundjukkan inisiatif yang lebih berani dan terusmenerus untuk melawan segala bentuk subversi dan intervensi AS dan untuk membubarkan SEATO yang membahayakan keamanan dan keutuhan Republik Indonesia.

Kongres berseru kepada seluruh Rakjat agar mempertinggi kewaspadaannya dan melipatgandakan kegiatan untuk mendorong Pemerintah supaya mengambil tindakan² yang lebih tegas terhadap SEATO.

Perlawanan terhadap SEATO adalah perlawanan nasional seluruh Rakjat Indonesia.

Lawan subversi dan intervensi Amerika Serikat !
Bubarkan SEATO !



Sukseskan Penjelenggaraan KTT

Kongres Nasional ke-VI PKI yang dilangsungkan di Djakarta pada tgl. 7-14 September 1959 menggarisbawahi Laporan Umum CC yang meminta perhatian Pemerintah dan Rakjat Indonesia atas pentingnya tuntutan umatmanusia sedunia yang mendukung usul Uni Sovjet untuk mengadakan Konferensi Tingkat Tertinggi (KTT).

Terlaksananya K.T.T. akan sangat mengurangi ketegangan² internasional dan merupakan permulaan baik bagi dihentikannya perang dingin yang sangat mengganggu keamanan internasional itu. Ia akan merupakan kemenangan dari prinsip menyelesaikan segala pertikaian internasional melalui djalan berunding dan dalam suasana damai.

Dalam proses memperdjuangkan terlaksananya K.T.T. ini, Rakjat² tjinta damai terusmenerus mengalami sabotase² kaum imperialis yang hendak menggagalkan terwujudnya hasrat umatmanusia akan perdamaian ini. Tetapi Kongres berkejakinan teguh bahwa kekuatan² perdamaian adalah lebih besar dan lebih unggul daripada kekuatan perang.

Kemenangan penting kearah tertjapainya K.T.T. adalah saling-kundjung antara pemimpin² tinggi pemerintahan beberapa negara, terutama yang akan dilakukan oleh Presiden Eisenhower dari Amerika Serikat ke Uni Sovjet dan yang sudah dilakukan oleh P.M. Chrusjov dari Uni Sovjet ke Amerika Serikat baru² ini.

Peristiwa terachir ini disambut dengan gembira dan dengan dukungan yang sangat kuat dari Rakjat demokratis disemua negeri, termasuk Rakjat Indonesia.

Kongres berpendapat bahwa adalah sewadjar^{nya} djika pemerintahan Indonesia dalam menjambut baik kedjadian² internasional yang penting ini memikirkan serta mendjalankan usaha² yang serius kearah penjingkiran segala rintangan bagi terdjamin^{nya} penjelenggaraan Konferensi Tingkat Tertinggi dalam waktu yang setjepat-tjepat^{nya}.

Indonesia termasuk salahsatu negeri yang paling berkepentingan atas terpelihar^{annya} perdamaian dunia yang merupakan sjarat penting bagi kelantjaran pembangunan negerin^{ja}.

Sukseskan penjelenggaraan Konferensi Tingkat Tertinggi!



Karena Setia Pada UUD 1945, Tolak PP No. 6 Tahun 1959

Kongres Nasional ke-VI PKI yang berlangsung dari tanggal 7 sampai dengan 14 September 1959 di Djakarta :
mendengar :

a). Laporan Umum yang disampaikan oleh Kawan D.N. Aidit, yang antara lain mengatakan bahwa : untuk mengalahkan bahaya anti-demokrasi yang menudju pada sistim pemerintah diktatur perseorangan ataupun diktatur militer supaja seluruh Rakjat Indonesia dengan gigih memperdjuangkan agar Pemerintah : „*menghormati kedudukan dan hak-hak daripada Dewan Perwakilan Rakjat Pusat (Parlemen) dan Daerah dan mempertahankan sistim kepala Daerah yang dipilih oleh Rakjat, meluaskan wewenang daripada pemerintahan² Daerah Swatantra I dan II dan melaksanakan pembentukan pemerintah Daerah Swatantra tingkat III*”.

b). Laporan² dari para utusan, chusus^{nya} mengenai otonomi daerah.

c). Pengumuman diundangkann^{ja} PP No. 6 tahun 1959 bin^{kin} Menterⁱ Ipik Gandamana.
Menimbang, bahwa :

1. Salahsatu tugas Revolusi Agustus 1945 dalam bidang pemerintahan Daerah adalah merombak dan mengganti sistim pemerintahan „*eenhoofd*ig” yang otokratis kolonial (seperti dibawah

kekuasaan amtenar² BB) dengan sistim pemerintahan yang demokratis kolegial.

2. Sedjak Proklamasi 17 Agustus 1945 pemerintahan yang ditjita²kan itu berangsur-angsur dilaksanakan, mula² dengan UU KNI Daerah No. 1 tahun 1945, kemudian disempurnakan dengan UU No. 22 tahun 1948 dan setelah itu lebih disempurnakan oleh DPR hasil Pemilihan Umum dalam bentuk UU No. 1 tahun 1957.

3. UU No. 1 tahun 1957 tersebut sepenuhnya mendjamin dasar Unitarisme Negara dan menutup kemungkinan segala bentuk federalisme, sebab dengan dilaksanakan sepenuhnya UU No. 1/1957 tidak lagi ada alasan bagi petualang² untuk menghasut se-olah² segala kekuasaan dipegang Pemerintah Pusat. Terbukti oleh kenyataan, bahwa terlambat^{nya} memberikan otonomi yang luas kepada daerah² telah sangat membantu kaum separatis dalam propagandanya.

4. UU No. 1 tahun 1957 sepenuhnya sesuai dengan djiwa UUD 1945, yang didalam fasal 18 menjatakan sebagai berikut :

„*Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan ketjil, dengan bentuk susunan pemerintahann^{ja} ditetapkan dengan Undang² dengan memandang dan mengingatⁱ dasar permusjawaratan dalam sistim pemerintahan negara.....*” dan seterusnya.

5. UU No. 1 tahun 1957 sepenuhnya sesuai dengan prinsip demokrasi terpimpin, oleh karena demokrasin^{ja} ditjerminkan dengan adanja prinsip pemilihan dan musjawarah sedang prinsip terpinpin^{nya} dijamin oleh fasal² yang memberikan hak² pengawasan baik yang bersifat preventif maupun repressif kepada Pemerintah Pusat.

6. UU No. 1 tahun 1957, djika dilaksanakan sepenuhnya akan menghilangkan dualisme sebab hanja akan ada satu sadja pemerintah didaerah, jaitu pemerintah otonom yang kolegial demokratis dan mempunjai wewenang yang luas. Djika selama ini ada dualisme, sebab pokokn^{ja} jalah karena UU No. 1 tahun 1957 belum dilaksanakan dengan sungguh² oleh Pemerintah Pusat.

7. UU No. 1 tahun 1957 adalah sesuai dengan Manifesto Politik Presiden yang menghendaki otonomi yang se-luas²nja dan sangat sesuai dengan djiwa serta semangat gotongrojong.

8. Anggapan bahwa dengan UU No. 1 tahun 1957 telah memungkinkan seseorang yang tidak tjakap, tidak berpengalaman, dan sebagain^{ja} untuk duduk di Dewan Pemerintah Daerah (DPD), adalah tidak beralasan, karena kemampuan dan ketjapakan mereka belum pernah diudji, berhubung wewenang otonom yang se-luas²nja dengan kelengkapan aparaturn^{ja} belum pernah diserahkan pada Dewan Pemerintah Daerah. Tetapi akibat buruk

daripada „Pemerintah” „eenhoofdig” dan tidak kolegial sudah dibuktikan dizaman kolonial dan sesudah merdeka.

9. Djika dianggap perlu untuk menjempurnakan UUI No. 1 tahun 1957 maka, sesuai dengan fasal 18 UUD 1945, supaya dilakukan dengan undang².

10. PP No. 6 tahun 1959 menghapuskan sistim kolegial pemerintahan Daerah, DPD dibubarkan dan diganti oleh Badan Pekerja Harian yang hanya merupakan pembantu belaka dari Kepala Daerah. Tidak ada keharusan bagi kepala daerah untuk berunding dengan BPH.

11. PP No. 6 tahun 1959 menghidupkan kembali sistim pemerintahan „eenhoofdig”, karena Kepala Daerah bisa ditundjuk oleh Pusat diluar pentjalonan DPRD dan tidak bisa didjatuhkan oleh DPRD.

12. PP No. 6 tahun 1959 menjuburkan dualisme, sebab Kepala Daerah sebagai alat Daerah tidak diwadjabkan mempertanggungjawabkan tindak-kekuasaannya kepada DPRD dan DPRD sebagai badan yang dipilih oleh Rakjat tidak bisa mendjalankan tindakan korektif terhadap Kepala Daerah.

13. PP No. 6 tahun 1959 menghilangkan sifat otonomi, sebab DPRD pada hakekatnya diturunkan deradjatnya dari badan legislatif menjadi sematjam badan-penasehat (advies-college) saja yang tidak berwewenang apa².

14. PP No. 6 tahun 1959 tidak mendjamin hak DPRD menentukan pembantu² Kepala Daerah (BPH), sebab anggota² BPH hanya se-dapat²nja diangkat dari tjalon² DPRD, tetapi bukan keharusan.

15. PP No. 6 tahun 1959 menentukan sjarat² menjadi Kepala Daerah antara lain „pengalaman dalam pemerintahan”, jaitu sjarat yang pada umumnya hanya bisa dipenuhi oleh orang² pamongpradja. Padahal, sedangkan untuk djadi anggota Dewan Menteri (Kabinet) tidak ada ketentuan sjarat demikian ini.

16. PP No. 6 tahun 1959 dikatakan untuk mentjiptakan pemerintahan Daerah yang sesuai dengan pemerintahan Pusat, padahal menurut UUD 1945 bentuk pemerintah di Pusat dan di Daerah diatur sendiri².

17. PP No. 6 tahun 1959 dikatakan untuk menjesuaikan „stijl” pemerintah Daerah dengan pemerintah Pusat, padahal Presiden dipilih oleh MPR sedangkan Kepala Daerah boleh menjimpang dari hasil pilihan DPRD.

18. PP No. 6 tahun 1959 hendak mentjiptakan „Sukarno² ke-tjil” di-daerah², padahal di Indonesia hanya ada satu Sukarno yang mendapat kepertjajaan besar dari Rakjat Indonesia karena beliau

adalah pedjuang kemerdekaan yang sudah terudji sedangkan orang² yang dikatakan berpengalaman itu termasuk orang² yang bekerdja dengan kaum kolonialis Belanda pada waktu Bung Karno melawan Belanda.

19. PP No. 6 tahun 1959 bukan hanya tidak bersumber pada UUD '45, tetapi malahan mentjiderai UUD '45, karena fasal 18 UUD '45 dengan positif menentukan bahwa soal pemerintahan dan otonomi Daerah harus diatur dengan Undang² dan bukan dengan PP.

Memutuskan :

1. Djustru karena setia pada UUD 1945, PKI tetap mempertahankan UUI No. 1 tahun 1957 dan memperdjuangkan pelaksanaannya sepenuhnya.

2. Menolak PP No. 6 tahun 1959 buatan Menteri Ipi Gandamana dan menuntut pentjabutannya, karena PP No. 6 bertentangan dengan UUD 1945, anti-demokratis dan anti-gotongrojong.

3. Memperdjuangkan keputusan No. 1 dan 2 melalui semua djalan parlementer dan demokratis.



PKI Menerima UUD 1945 dan Pantjasila untuk Memperkuat Front Nasional dan Mentjapai Masjarakat Adil dan Makmur

Dalam Laporan Umum CC kepada Kongres Nasional ke-VI PKI yang disampaikan oleh Kawan D.N. Aidit telah dikemukakan bahwa setelah Konstituante gagal untuk membikin UUD baru, maka PKI dan golongan² patriotik lainnya dengan teguh memperdjuangkan supaya UUD 1945 diterima oleh Konstituante. Setelah hal ini tak berhasil, sekalipun mendapat dukungan suara terbanjak dalam Konstituante, PKI berpendapat bahwa satu²nja djalan untuk menjelamatkan negeri dari bentjana perpetjahan nasional lebih lanjut hanyalah djika Presiden Sukarno mendekritkan UUD 1945 atasnama mayoritas Rakjat Indonesia. Kekurangan² yang terdapat pada UUD 1945 akan dapat diisi dikemudian hari melalui Sidang² Majelis Permusjawaratan Rakjat (MPR) yang demokratis. Maka itu pendekritan berlakunya kembali UUD 1945 yang terdjadi pada tanggal 5 Djuli 1959 disambut dengan baik oleh PKI dan Rakjat Indonesia pada umumnya. Kongres Nasional ke-VI PKI membe-

narkan sikap ini.

Dalam Manifesto Politik Presiden Sukarno yang diutjapkan pada tanggal 17 Agustus 1959 diterangkan, bahwa UUD 1945 „*memberikan landasan yang kuat idiil dan struktural, jaitu Pantjasila dan Pemerintah yang stabil, untuk bekerdja setingkat demi setingkat merealisasikan dasar dan tudjuan Revolusi.*” Djuga ditjantumkan penegasan bahwa yang dimaksudkan dengan Pemerintah yang stabil ialah „*Pemerintah yang berwibawa, yang dapat bekerdja tenang-teguh ber-tahun². tidak untuk mendjamin kepentingan modal asing, tetapi untuk mendjamin sandang-pangan bagi Rakjat!*” Terdapat pula penegasan bahwa „*demokrasi harus mendjadi alat Rakjat untuk mentjapai tudjuan Rakjat*”, jaitu „*Negara kuat, masjarakat adil dan makmur*”.

Kongres Nasional ke-VI PKI berpendapat bahwa putusan Partai yang sudah sedjak sebelum Kongres Nasional ke-VI menerima dan memperdjuangkan Pantjasila baik didalam maupun diluar Konstituante, serta putusan Partai untuk kembali ke UUD 1945 dan menerima Manifesto Politik Presiden Sukarno adalah sesuai dengan Konstitusi Partai dan Program Partai, sebelum maupun sesudah diperbaharui. Karena itu Kongres selandjutnja memutuskan supaya dalam menghadapi perkembangan situasi dimasa datang putusan² Partai tersebut mendjadi pegangan untuk memperkuat front nasional, memperkuat perdjuangan untuk Indonesia yang merdeka penuh dan demokratis sebagai langkah penting untuk mentjapai masjarakat adil dan makmur.



Bebaskan Manolis Glezos!

Kongres Nasional ke-VI PKI yang dilangsungkan di Djakarta dari tgl. 7-14 September 1959 berpendapat, bahwa salahsatu perdjuangan yang penting daripada umatmanusia untuk kemerdekaan, demokrasi dan perdamaian adalah perdjuangan Rakjat Junani untuk kepentingan² fundamentilnja, untuk keamanan negerinja. Dalam perdjuangan yang mulia ini, Manolis Glezos, pahlawan Rakjat Junani, ber-sama² dengan Vutsas, anggota Comite Central Partai Komunis Junani serta pemimpin² dan demokrat² lainnja seperti Trikalinos, Singelaris, Karkayanis, Raguzeridis dan Grigoriadu telah mendjadi korban kedjahatan kaum reaksioner.

Pengadilan Atena telah mendjatuhkan hukuman pendjara 5 ta-

hun untuk Manolis Glezos atas tuduhan mengchianati negara, tuduhan yang samasekali palsu. Hukuman ini didasarkan atas suatu undang² tahun 1936 dari pemerintahan diktatur fasis Metaxas, yang sebenarnja sedjak tahun 1951 telah dinjatakan tidak berlaku lagi. Suatu komisi internasional dari kaum pengatjara, bahkan ketua Partai Monarki Junani, Tsaldaris, menjatakan bahwa tuduhan pengchianatan itu palsu se-mata².

Tudjuan politik dari provokasi reaksioner ini tidaklah lain daripada untuk mendiskreditkan gerakan demokratis di Junani, terutama sekali Partai Komunis Junani. Bukanlah sesuatu yang kebetulan djika tindakan mengadili patriot² dan demokrat² Junani ini berdjalan bersamaan dengan meningkatnja gelombang pasang gerakan Rakjat Junani yang menentang didjadikannja Junani pangkalan sendjata atom dan peluru kendali Amerika Serikat. Kaum reaksioner Junani dengan demikian berusaha menipu dan mengintimidasi Rakjat Junani untuk menutupi kegiatan² anti-nasional mereka.

Kongres Nasional ke-VI PKI mengutuk tindakan provokatif dari kaum kontra-revolusioner yang dewasa ini berkuasa di Junani. Kongres menjerukan kepada seluruh Rakjat Indonesia agar menjokong dengan aktif serta mendjalankan aksi² solidaritet dengan lebih intensif untuk ber-sama² dengan Rakjat Junani yang gagah-perwira serta umatmanusia sedunia yang tjinta damai dan tjinta keadilan menuntut pembatalan sepenuhnya dari hukuman yang tiada menurut hukum serta tiada berkeadilan itu atas diri Glezos. Hati nurani Rakjat² didunia tidak bisa menerima kenyataan bahwa putera² terbaik dari Junani dirampas hak²nja untuk meneruskan aktivitet² patriotik mereka yang luhur itu.

Bebaskan Manolis Glezos dan kawan²nja, patriot² dan demokrat² Junani!



Kutuk Pembunuhan Ali Olowi dan Penembakan Buruh Iran!

Kongres Nasional ke-VI PKI dengan perhatian serta rasa solidaritet yang dalam mengikuti kedjadian² menjedihkan yang menimpa insinjur Ali Olowi, anggota Biro Eksekutif Partai Tudeh Iran, dan buruh batubara serta buruh textil yang melakukan pemogokan di Teheran dan Isfahan belum lama berselang.

Pada tanggal 16 Djuni 1959, atas perintah Sjah Iran, Risa Pahlevi, insinjur Ali Olowi ditembak mati setelah meringkuk selama 3 tahun dalam pendjara. Penembakan ini dilakukan tanpa melalui proses hukum dan pada saat kaum buruh Teheran dan Isfahan mengadakan aksi² pemogokannya untuk perbaikan nasib dan untuk menentang politik anti-nasional dari pemerintah Iran yang mengabdikan kaum imperialis Amerika dan Inggris. Penembakan seorang pemimpin Partai Tudeh ini dilakukan dengan harapan dapat mengintimidasi Rakjat Iran serta membendung gelombang gerakan Rakjat di Iran. Dalam pada itu, pada tanggal 18 Djuni 1959 atas perintah Sjah, polisi militer telah menembaki buruh batubara di Teheran yang mogok selama 3 hari untuk perbaikan upah, sehingga mengakibatkan 50 orang tewas dan banjak luka². Djuga kaum buruh pabrik Matan di Isfahan ditembak dan belasan buruh meninggal dunia.

Peristiwa itu sangat mengantjam djiwa semua tahanan politik, terutama djiwa 500 anggota Partai Tudeh, serikatburuh², organisasi² pemuda demokratis dan partisan² perdamaian yang militan yang ditahan diberbagai pendjara di Iran.

Kongres mengutuk tindakan² kedji itu yang merupakan pelanggaran hak² azasi manusia yang tertantam dalam Piagam Hak² Manusia PBB yang djuga diakui oleh Undang² Dasar Iran sendiri. Kongres menjerukan kepada Rakjat Indonesia untuk mendesak Sekretaris Djenderal PBB, Dag Hammerskoeld, agar PBB tidak bersikap atjuh-tak-atjuh terhadap kedjahatan² kedji yang dilakukan setiap hari oleh rezim yang se-wenang², yang mengingatkan kita pada abad pertengahan dimana manusia tidak mempunyai harga dimata kaum feodal. Kongres mendesak supaya Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC), sesuai dengan wewenang²nya, mengadakan angket resmi tentang perkosaan² yang dilakukan oleh pemerintah Iran terhadap hak² azasi manusia dan hak² kaum buruh di Iran.

Kutuk pembunuhan Ali Olowi dan penembakan buruh Iran!



Bebaskan Fajarollah Helou, Pahlawan Libanon!

Kongres Nasional ke-VI PKI dengan penuh rasa kuatir dan gelisah mengikuti penderitaan serta siksaan² yang mengantjam djiwa Kawan Fajarollah Helou, Sekretaris Komite Central Partai

Komunis Libanon yang ditjuluk pada tanggal 25 Djuni 1959 oleh polisi Republik Arab Persatuan di Damsjik, ibukota Suriah.

Kawan Fajarollah Helou adalah seorang patriot sedjati, seorang penulis yang penuh bakat, seorang pemimpin yang rendahhati dan sangat ditjintai oleh Rakjat Libanon karena perjuangannya yang gagahberani melawan imperialisme untuk kemerdekaan nasional negerinya.

Berita² yang terachir dari Damsjik menundjukkan bahwa perlawanan yang gigih dari Kawan Fajarollah Helou terhadap siksaan² polisi Republik Arab Persatuan menjebabkan bahwa polisi Republik Arab Persatuan menggunakan tjara² penjiksaan yang lebih kedjam dari tjara² siksaan Zaman Tengah, seperti memasukkan udara kedalam perutnya, kemudian mengindjak perut yang kembung karena udara ini sehingga mengakibatkan perdarahan yang keras.

Kongres atasnama lebih dari 1,5 djuta Komunis dan lebih dari 8 djuta pemilih PKI, menyatakan simpati yang se-dalam²nja kepada Kawan Fajarollah Helou dan memprotes se-keras²nja kebiadaban polisi Republik Arab Persatuan serta menjerukan kepada seluruh Rakjat Indonesia yang anti-imperialis dan demokratis untuk ber-sama² dengan berbagai golongan yang luas yang mengadakan gerakan solidaritet yang menjeluruh di Libanon dan di-negara² Arab lainnya, di Italia, Perantjis, Sri Lanka, Djepang dan lain² negeri diseluruh dunia mendesak pemerintah Republik Arab Persatuan segera membebaskan Fajarollah Helou atau menjerakkan²nya kepada Pemerintah Libanon.

Kongres berpendapat, dengan gerakan solidaritet internasional yang kuat Kawan Fajarollah Helou, pahlawan Libanon dapat diselamatkan, kebebasannya dapat direbut dan tangan kaum penjiksa dapat ditjegah melakukan kebiadabannya.



Sokong Terus Perjuangan Rakjat Aldjazair!

Kongres Nasional ke-VI Partai Komunis Indonesia yang dilangsungkan di Djakarta pada tanggal 7 s/d 14 September 1959, menjtudjui Laporan Umum Kawan D.N. Aidit, yang antara lain menyatakan bahwa perang kemerdekaan yang sedang gigih dilakukan oleh Rakjat salahsatu negeri Asia-Afrika, Rakjat Aldjazair, adalah gerakan pembebasan nasional yang harus mendapat per-

hatian serta sokongan sebesar-besarnya dari Rakjat Indonesia.

Perang kemerdekaan yang dilakukan oleh Rakjat Aldjazair melawan kolonialisme Perantjis selama 5 tahun hingga sekarang ini, adalah akibat logis dari politik penindasan dan penghisapan kolonial yang setjara kedjam didjalankan oleh kaum imperialis Perantjis terhadap Rakjat Aldjazair selama hampir 130 tahun. Seperti halnya Rakjat di-negeri² djadjahan lainnya, Rakjat Aldjazair selama masa itu tidak hanya dirampas kekayaan bumi dan alamnya, tetapi djuga dilutjuti hak² kebebasannya untuk menentukan nasib sendiri.

Terutama dalam waktu 5 tahun achir² ini, kaum imperialis Perantjis dengan bantuan negeri² anggota NATO yang dikepalai oleh imperialis Amerika Serikat telah melakukan segala bentuk kebiadaban dalam usahanya menindas dan menghantjurkan sama-sekali gerakan kemerdekaan nasional Aldjazair. Meninggalnya *Aissat Idir*, Sekretaris Djenderal Gabungan Umum Serikatburuh² Aldjazair pada tanggal 25 Djuli 1959 akibat siksaan dan penganiayaan kaum kolonialis Perantjis, merupakan salahsatu dari sekian banyak kebiadaban kolonial dan perkosaan hak² azasi manusia yang didjamin dalam Piagam PBB. Kaum imperialis Perantjis dan seluruh komplotan agresif yang tergabung dalam NATO sangat berkepentingan untuk tetap mempertahankan Aldjazair sebagai negeri djadjahan, sesuai dengan rentjana² perangnya yang hendak mendjadikan seluruh negeri² Afrika Utara sebagai sumber penghisapan kolonial dan pangkalan perang yang membahayakan perdamaian dunia.

Berkat keuletan Rakjat Aldjazair sendiri dan berkat bantuan serta solidaritet dari semua kekuatan kemerdekaan, demokrasi dan perdamaian diseluruh dunia, terutama berkat dukungan dan solidaritet negeri² Sosialis yang dipelopori oleh Uni Sovjet yang senantiasa memihak Rakjat tertindas, perang kemerdekaan Rakjat Aldjazair makin hari makin mendapat kemajuan.

Terbentuknya Pemerintah Sementara Aldjazair, adalah suatu faktor politik yang sangat penting artinya tidak saja bagi perdjjuangan Aldjazair digelanggang internasional, tetapi djuga bagi segenap kekuatan kemerdekaan dan perdamaian diseluruh dunia. Oleh karenanya adalah wajar dan harus disambut dengan gem-bira sikap pemerintah² nasional beberapa negeri Asia-Afrika, termasuk pemerintah Republik Indonesia, yang ber-sama² dengan pemerintah negeri² kubu Sosialis, telah mengakui Pemerintah Sementara Aldjazair yang diproklamasikan pada tanggal 18 September 1958 di Kairo.

Kongres menjerukan agar Pemerintah melandjutkan usaha² yang

lebih intensif supaya PBB mengambil keputusan diadakannya perundingan antara Pemerintah Perantjis dan Pemerintah Sementara Republik Aldjazair atas dasar pengakuan kemerdekaan Rakjat Aldjazair.

Kongres sepenuhnya yakin bahwa imbalanced kekuatan internasional dewasa ini yang sudah setjara definitif dan kongkrit menguntungkan gerakan kemerdekaan dan perdamaian, dan front nasional pembebasan Rakjat Aldjazair yang semakin kokoh merupakan djaminan pasti bagi kemenangan Rakjat Aldjazair.

Dengan rasa solidaritet yang se-dalam²nja serta salut yang setinggi²nja, Kongres menjatakan rasa simpati yang se-dalam²nja dan sokongan yang sekuat-kuatnja kepada Rakjat Aldjazair yang gagah-berani dalam perdjjuangan mulianja untuk mengusir se-lama²nja kaum pendjadjah Perantjis dari tanahairnja, untuk membangun Aldjazair baru yang merdeka penuh dan demokratis.

Segala hormat kepada Rakjat Aldjazair, segala kutuk kepada imperialis Perantjis, untuk Asia-Afrika yang merdeka, untuk dunia yang damai.



Bebaskan Pedjuang² Perdamaian Mesir dan Suriah

Kongres Nasional ke-VI Partai Komunis Indonesia yang ber-sidang dari tgl. 7 s/d 14 September 1959 di Djakarta dengan tje-mas dan rasa amarah mengikuti berita² tentang penahanan di Iskandariah atas sedjumlah besar anggota Dewan Perdamaian Dunia, Dewan Perdamaian Nasional Mesir dan Suriah serta para peserta Kongres Dunia Untuk Perlutjutan Sendjata Dan Kerdja-sama Internasional di Stockholm oleh kekuasaan Nasser di Republik Arab Persatuan.

Melakukan perdjjuangan untuk mempertahankan perdamaian dunia yang dewasa ini dibahayakan oleh rentjana² agresif kaum imperialis untuk mengobarkan perang yang akan lebih dahsjat daripada perang di-masa² yang lalu, adalah suatu keharusan sedjarah dan kewadajiban mutlak setiap orang serta setiap pemerintahan apabila ia ingin mengabdikan diri pada tjita² kemanusiaan dan tjita² kemerdekaan. Penahanan atas pedjuang² perdamaian Mesir dan Suriah oleh Pemerintah Nasser, apalagi tanpa diikuti dengan

diadilinja mereka dengan segera sesuai dengan hukum yang lazim berlaku sebagaimana halnya sekarang itu, adalah tindakan sewenang² dan fasis, suatu kejahatan terhadap keadilan dan kemanusiaan.

Berdasarkan hal diatas, Kongres Nasional ke-VI Partai Komunis Indonesia atasnama lebih dari 1,5 djuta Komunis serta seluruh Rakjat pekerdja Indonesia yang demokratis memprotes se-keras²nja tindakan Pemerintah Nasser dan menjerukan kepada seluruh Rakjat Indonesia yang mendjungjungtinggi demokrasi, keadilan dan kemerdekaan agar ber-sama² dengan Rakjat² progresif dan tjinta damai di Asia-Afrika dan seluruh dunia menuntut kepada Pemerintah Nasser dari Republik Arab Persatuan supaya pedjuang² perdamaian di Mesir dan Suriah segera dibebaskan dari tahanan.

Perdjuangan Rakjat Mesir dan Suriah untuk demokrasi, kemerdekaan dan perdamaian adalah djuga perdjuangan Rakjat Indonesia!

Bebaskan pedjuang² perdamaian Mesir dan Suriah!



Gagalkan Intervensi AS di Laos!

Dalam mendiskusikan situasi internasional, chususnja dalam menindjau situasi di-negeri² tetangga di Asia Tenggara, Kongres Nasional ke-VI PKI yang dilangsungkan di Djakarta dari tgl. 7-14 September 1959 telah membitjarakan djuga perkembangan² yang amat mengchawatirkan di Laos.

Masalah Laos, bersama dengan masalah Vietnam dan Kambo-dja sebenarnja telah dapat diselesaikan setjara damai dan memuaskan oleh Konferensi Djenewa mengenai Indotjina dalam tahun 1954. Konferensi ini memutuskan untuk membentuk Komisi Pengawasan Internasional guna mengawasi pelaksanaan dari tjara² penyelesaian yang telah disetudjui dalam Konferensi Djenewa tsb.

Disamping persetudjuan Djenewa ini telah pula ditandatangani Persetudjuan Vientiane dalam tahun 1957 yang menetapkan bahwa masalah Laos akan diselesaikan setjara damai tidak dengan tjampurtangan dari luar, apalagi dengan djalan mendatangkan amunisi, sendjata² serta instruktur² militer asing.

Tetapi kenyataan menundjukkan bahwa semua persetudjuan ini dilanggar terang²an oleh Pemerintah Phoui Sananikone yang berkuasa sedjak bulan Agustus 1958.

Wakil² dan pemimpin² Neo Lao Haksat (*Partai Patriotik Rakjat*) dan gerakan front nasional Pathet Lao yang menang dan mendapat dukungan luas serta suara banjak dalam pemilihan umum, bukannya didjamin dan diakui hak²nja untuk duduk dalam pemerintahan. Lebih daripada itu, mereka di-kedjar², dimasukkan pendjara dan banjak yang dibunuh. Demikian pula halnya dengan perwira² dan anggota² dua bataljon pasukan Pathet Lao, yang menurut putusan Djenewa seharusnya dilebur dalam tentara keradjaan Laos, telah dilutjuti, ditangkap dan dimasukkan pendjara.

Bertentangan dengan putusan² Djenewa dan persetudjuan Vientiane, Pemerintah Sananikone yang mengchianati kepentingan nasional Laos dengan resmi memasukkan perwira² A.S. untuk melatih dan langsung memimpin tentara keradjaan Laos. Lebih dari 5/6 dari 135 djuta dollar bantuan A.S. kepada Laos dipergunakan untuk memperlengkapi 30.000 pasukan keradjaan Laos yang dilatih dan dipimpin langsung oleh 30 orang perwira angkatan perang A.S. Djelaslah bahwa A.S. yang mendjadi biangkeladi teror kolonial dan perang dalamnegeri di Laos dan menjuruh bangsa Laos membunuh bangsa Laos, praktek kolonial yang sudah dialami pula oleh banjak negeri Asia, termasuk Indonesia sendiri.

Kongres berpendapat bahwa intervensi² terang²an dari Amerika Serikat di Laos tidak sadja merusak perdamaian dan ketenteraman hidup Rakjat Laos, tetapi djuga merupakan bahaya serius yang mengantjam perdamaian di Asia Tenggara. Intervensi ini merupakan pelanggaran yang kurangadjar terhadap persetudjuan Djenewa dan persetudjuan Vientiane. Intervensi ini bertudjuan mengubah Indotjina dari daerah damai mendjadi pangkalan perang dan sumber ketegangan² internasional yang baru, menjeret Laos dan Vietnam Selatan kedalam SEATO, mengepung dan selandjutnja menundukkan Kambo-dja yang mendjalankan politik netral supaya bisa diseret pula kedalam SEATO dan dengan demikian mengubah seluruh Indotjina mendjadi daerah pangkalan SEATO. Intervensi ini bermaksud menimbulkan „Korea ke-II” dengan Laos sebagai landasan dan batu lontjatan untuk melantjarkan agresi terhadap Republik Demokrasi Vietnam (RDV) dan Republik Rakjat Tiongkok (RRT), dan untuk merusak perdamaian di Asia. Inilah latar belakang politik Pemerintah Sananikone untuk mendapatkan bantuan pasukan² PBB. Oleh karenanja mendjadi kewadajiban penting bagi Rakjat dan Pemerintah Indonesia untuk bersama Rakjat² di Asia dan diseluruh dunia melawan dan menggagalkan intervensi dan agresi A.S. di Laos.

Kongres menjerukan kepada Rakjat dan mendesak Pemerintah

Indonesia agar menuntut dihentikannya intervensi A.S. di Laos, ditarik mundurnya semua perwira A.S. dari Laos dan dihapuskan-nya semua pangkalan militer asing dinegeri ini. Kongres memperkuat usul Presiden Sukarno kepada P.M. Pham Van Dong dari RDV untuk dipekerdjakannya kembali setjara normal Komisi Pengawasan Internasional mengenai Indotjina.

Dewan Keamanan PBB, yang sudah diminta bersidang oleh Sekretaris Djenderal PBB atas permintaan Pemerintah Sananikone, akan bisa bertindak *adil* terhadap Laos dan Asia djika ditunjukkan untuk menghidupkan kembali Komisi Pengawasan Internasional yang dibentuk oleh Konferensi Djenewa dan bukan untuk mengirim sebuah Komisi „Facts Finding” yang pada hakekatnya dikuasai oleh SEATO dan Amerika Serikat yang langsung tersangkut dalam intervensi di Laos. Perserikatan Bangsa² tidak berhak untuk tjam-purtangan dalam urusan Laos dengan mengesampingkan putusan² Djenewa dan Vientiane.

Gagalkan intervensi A.S. di Laos, djaminan penting bagi perdamaian di Asia Tenggara.



Protes Fasisme Salazar dan Bebaskan Alvaro Cunhal

Kongres Nasional ke-VI Partai Komunis Indonesia yang ber-sidang di Djakarta dari tanggal 7-14 September 1959 dalam meng-ikuti situasi internasional dan mendiskusikan soal² solidaritet inter-nasional mentjurahkan perhatiannya yang besar pada kedjadian² yang berlangsung di Portugal dibawah pemerintahan fasis Salazar.

31 Tahun telah lewat semendjak kaum fasis berkuasa di Por-tugal. Sepanjang tahun² ini makin meningkatlah pernjataan² pro-tes dan aksi² untuk melawan rezim Perdana Menteri Salazar yang telah melenjapkan kebebasan² fundamentil warganegara Portugal dari kehidupan sosial dan politik Portugal. Setjara sistimatis klik Salazar yang berkuasa menutup-nutupi kemelaratn, kelaparan, pengangguran dan kesulitan² yang semakin meningkat dikalangan kaum tani serta lapisan tengah penduduk. Penindasan terhadap Rakjat serta kaum patriot dari berbagai aliran politik serta ideologi yang melawan diktatur fasis Salazar untuk perbaikan nasib dan demokrasi semakin keras. Untuk melakukan „tindakan keamanan”

rezim Salazar yang sepenuhnya dipimpin oleh polisi politik (P.I.D.E.) setiap hari meng-indjak² kebebasan surat-menjurat, melakukan penggeledahan rumah² setiap saat dengan se-wenang² serta tindakan² se-mena² lainnya. Para patriot, laki² maupun wa-nita yang membela demokrasi serta hak² azasi warganegara yang dijamin oleh Konstitusi Portugal, di-kedjar², dipendjarakan dan disiksa dalam tahanan sampai mati tanpa diadili atau diperiksa setjara singkat sekalipun. Mereka dilempar dalam „kamp² maut” seperti kamp Tarafal dikepulauan Tandjung Hidjau (Afrika). Dalam bulan² pertama sadja dari tahun 1957, 70 orang patriot dihukum oleh pengadilan² yang hakim²nya sepenuhnya tunduk pada polisi politik dan 20 diantara mereka itu mendapat hukuman total 90 tahun, denda sebesar 100.000 escudo dan kehilangan hak-hak politik mereka selama 150 tahun.

Diantara para patriot itu terdapat *Alvaro Cunhal*, Sekretaris Djenderal Partai Komunis Portugal yang setelah mendjalani hu-kuman 8 tahun pendjara dan bebas selama 1½ tahun ditangkap kembali atas dasar „tindakan keamanan” untuk waktu 3 tahun. Dengan demikian Alvaro Cunhal pemimpin Rakjat Portugal yang ditjintai itu selalu tinggal terisolasi dalam sel benteng Peniche dan dewasa ini berada dalam keadaan sakit dan djiwanja terantjam.

Kongres menjampaiakan salut se-tinggi²nya serta simpati yang se-dalam²nya kepada seluruh Rakjat pekerdja serta patriot² Por-tugal yang berdjuaang dengan gagahberani dan penuh pengorbanan melawan kebengisan fasisme Salazar, untuk perbaikan hidup serta kemadjuan sosial dan untuk menegakkan kebebasan² demokratis serta pembelaan hak² azasi manusia.

Kongres Nasional ke-VI PKI menjerukan kepada segenap kaum Komunis serta seluruh Rakjat Indonesia yang patriotik guna me-njatakan perasaan serta fikiran mereka kepada Presiden Portugal, Menteri² Kehakiman dan Dalamnegeri Portugal untuk memprotes dan mengutuk tindakan² teror fasis terhadap Rakjat Portugal, di-indjak²nya hak² azasi manusia dan warganegara dan menuntut pembebasan serta amnesti total bagi semua patriot dan tawanan politik yang dewasa ini masih meringkuk dalam berbagai kamp maut Portugal.



Kawat Utjapan Selamat CC PKI Kepada CC PKUS Berhubung Dengan Pendaratan Roket Kosmos di Bulan

Comite Central
Partai Komunis Uni Sovjet
Moskow

Kongres Nasional ke-VI Partai Komunis Indonesia jang kini sedang berlangsung di Djakarta mengutjapkan selamat kepada para sardjana dan Rakjat Sovjet berhubung dengan suksesnja pendaratan roket kosmos Sovjet di Bulan. Peristiwa ini mengubah imbalan kekuatan² dunia jang menguntungkan perdamaian dan menghalang-halangi rentjana² perang kaum imperialis. Sekali lagi Sosialisme membuktikan keunggulannja dalam mewujudkan keinginan² manusia jang paling berani dan berhasil.

Comite Central
Partai Komunis Indonesia

D.N. Aidit

I S I

Sekedar pengantar	3
KONGRES PERSATUAN DJAJA	5
UNTUK DEMOKRASI DAN KABINET GOTONG-ROJONG	8
I Meneruskan perjuangn jang merdeka penuh dan demokratis	13
(1) Imperialisme Belanda masih tetap musuh pertama Rakjat Indonesia	13
(2) Indonesia masih tetap berada dalam tjengkeraman krisis ekonomi	16
(3) Memperluas perdagangan dengan negeri ² Sosialis	23
(4) Pengangguran, kemiskinan, ketidakadilan ekonomi dan sosial	30
(5) Memperbaiki pekerdjaan Front Nasional dan mementjilkan lebih landjut kekuatan kapalabatu	37
(6) PKI mempertahankan Republik Proklamasi	47
(7) Sikap PKI terhadap Kabinet Sukarno-Djuanda	48
(8) Memperkuat dan memperluas Demokrasi	53
II Untuk memperkuat Front Internasional Anti-Kolonial dan Tjinta-Damai	56
(1) Inti pokok zaman kita ialah peralihan dari kapitalisme ke Sosialisme	58
(2) Situasi ekonomi dunia kapitalis sekarang	60
(3) Kubu Sosialis dan pengaruh internasionalnja	65
(4) Situasi politik internasional	77
(5) Soalnja bukan „Memilih Blok”, tetapi mendjalankan politik luarnegeri jang menguntungkan Rakjat Indonesia	84
III Meneruskan Pembangunan Partai	94
(1) Perkembangan Partai antara Kongres Nasional ke-V dan ke-VI	94
(2) Pendidikan Marxisme-Leninisme sjarat mutlak untuk persatuan didalam Partai	100
(3) Subjektivisme harus terus kita perangi	103
(4) Teruskan bekerdja dengan Plan 3 Tahun	109
(5) Memperkuat, memperluas dan memperbaharui Partai ...	114
(6) Pimpinan Partai pada gerakan massa	120
(7) Djadikan koperasi djuga sendjata ditangan Rakjat Pekerdja	134

PIDATO PENGANTAR UNTUK RENTJANA PER- UBAHAN KONSTITUSI PARTAI	138
I Preambul Konstitusi	143
II Peraturan ² Konstitusi	157
PIDATO PENGANTAR UNTUK RENTJANA PER- UBAHAN PROGRAM PKI	177
PEMILIHAN COMITE CENTRAL DAN KOMISI VERIFIKASI	199
KEMBANGKAN SEMANGAT KONGRES NASIONAL KE-VI PKI	202
SUKSES ² JA KONGRES NASIONAL KE-VI PKI ADA- LAH KEMENANGAN DEMOKRASI JANG BESAR!	206
Susunan Presidium Kongres Nasional ke-VI PKI	218
Badan ² pimpinan baru hasil pilihan Kongres Nasional ke-VI PKI	219
Comite Central PKI	219
Komisi Kontrol Central	220
Komisi Verifikasi Central	220
Politbiro CC PKI	220
Sekretariat CC PKI	220
Pemenang ² Pandji ² Kongres Nasional ke-VI PKI berdasar- kan hasil pelaksanaan Plan 3 Tahun Pertama Orga- nisasi, Pendidikan, Gerakan Amal dan Kesenian ...	221
RESOLUSI TENTANG LAPORAN UMUM CC PKI KEPADA KONGRES NASIONAL KE-VI	222
RESOLUSI PENSAHAN PERUBAHAN KONSTITUSI PKI	264
KONSTITUSI PKI	264
RESOLUSI PENSAHAN PERUBAHAN PROGRAM PKI	289
PROGRAM PKI	289
RESOLUSI ² LAINNJA	309
Habiskan samasekali kekuasaan ekonomi Belanda di Indonesia	309
Turunkan harga barang ² dengan melakukan politik harga rendah	311
Tjabut keadaan perang di-daerah ² dimana tidak ada operasi militer	314
Sita perusahaan ² dan modal orang ² Kuomintang!	316
Djadikan Manifesto Politik Presiden Sukarno pegangan da- lam membantu dan menjokong Kabinet Kerdja	318
Hantjurkan sisa ² kekuatan pemberontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta” dan DI-TII sampai ke-akar ² nja	320

Susun pola pembangunan untuk melikwidasi ekonomi kolonial	323
Laksanakan sistim 6 : 4, tambah tanahgarapan, djamin ke- amanan untuk mempertinggi produksi pertanian ...	326
Lawan kebudajaan imperialis, kembangkan kebudajaan Rakjat	328
Ilmu untuk Rakjat dan revolusi	329
Bentuk dan kembangkan regu ² kerdjabakti	331
Hentikan pertjobaan ² sendjata nuklir dan bentuk daerah ² bebas atom	334
Lawan subversi dan intervensi AS, dan bubarkan SEATO!	336
Sukseskan penjelenggaraan KTT	337
Karena setia pada UUD 1945, tolak PP no. 6 tahun 1959 ...	338
PKI menerima UUD 1945 dan Pantjasila untuk memperkuat Front Nasional dan mentjapai masjarakat adil dan makmur	341
Bebaskan Manolis Glezos!	342
Kutuk pembunuhan Ali Olowi dan penembakan buruh Iran!	343
Bebaskan Fajarollah Helou, pahlawan Libanon!	344
Sokong terus perdjjuangan Rakjat Aldjazair!	345
Bebaskan pedjuang ² perdamaian Mesir dan Suriah!	347
Gagalkan intervensi AS di Laos!	348
Protes fasisme Salazar dan bebaskan Alvaro Cunhal	350
Kawat utjapan selamat CC PKI kepada CC PKUS berhubung dengan pendaratan roket kosmos dibulan	352

Joop Meijden
Amsterdam

RALAT

Pada halaman 142, alinea pertama dari atas, semestinja berbunji sbb :
Dengan sedikit mengingatkan kembali kepada kesalahan Partai di lapangan organisasi selama tahun² Revolusi Agustus '45 seperti yang dikemukakan didalam „Djalan Baru” maka mendjadi lebih djelas lagi dapat kita fahami bahwa Konstitusi Partai yang disahkan oleh Kongres Nasional Ke-V sungguh² merupakan pelaksanaan yang sempurna daripada koreksi „Djalan Baru” dilapangan organisasi.

Pada halaman 199, djudul pada halaman ini mestinja sbb : Pemilihan Komite Central dan Komisi Verifikasi.

Rp. 40.—